



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. rincian Anggaran Pendapatan Negara;
- b. rincian Anggaran Belanja Negara; dan
- c. rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. rincian Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
- b. rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

- a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - b. rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana, dan prakiraan maju tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, dan sumber dana, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
 - b. rincian Dana Desa.
- (2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. rincian Dana Perimbangan;
 - b. rincian Dana Insentif Daerah; dan
 - c. rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Rincian Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. rincian Dana Transfer Umum; dan
 - b. rincian Dana Transfer Khusus.
- (4) Rincian Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. rincian Dana Bagi Hasil; dan
 - b. rincian Dana Alokasi Umum.
- (5) Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. rincian Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - b. rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (6) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler;
 - b. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi.
- (7) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VI;

b. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VII;
- c. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi tercantum dalam Lampiran VIII;
- d. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IX;
- e. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran X;
- f. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XI;
- g. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XII; dan
- h. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (9) Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (10) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(11) rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (11) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (12) Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (13) Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (14) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari:
 - a. perubahan data; dan/atau
 - b. kesalahan hitung,diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (15) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinan lembaga dalam menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (16) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan penggunaannya untuk:
 - a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah; dan/atau
 - b. memenuhi anggaran yang diwajibkan dan/atau membayar iuran yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan sanksi atas penggunaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(18) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (18) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

- (1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar).
- (3) Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian yang dapat dibiayai menggunakan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
 - c. perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/lembaga tertentu;
- d. perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam;
- e. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;
- f. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
- g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2018;
- h. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
- i. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan *ineligible expenditure* atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- j. pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
- k. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga;
- l. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;

m. realokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- m. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;
- n. perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penambahan SBN sebagai akibat tambahan pembiayaan;
- o. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan parameter, realisasi perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;
- p. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs;
- q. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2018 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri; dan
- r. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi,

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan dan pergeseran Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Pasal 9

- (1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:
 - a. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
 - b. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2018 yang tidak terserap;
 - c. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - d. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah *closing date*,diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Sihwati Lestari

Sihwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.743.056.850.376
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	894.448.650.110
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	66.154.650.000
1.1.1.1	Pendapatan PPh Minyak Bumi	29.853.100.000
1.1.1.2	Pendapatan PPh Gas Bumi	36.301.550.000
1.1.2	Pendapatan PPh Nonmigas	828.294.000.110
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	145.756.375.850
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	22.711.510.000
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	68.260.490.000
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	48.505.700.000
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.923.713.000
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	311.548.880.000
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	82.473.700.000
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	137.831.560.000
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	282.071.260
1.1.2.10	Pendapatan PPh DTP	
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	655.394.900.106
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	410.687.726.381
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	223.306.569.688
1.2.3	Pendapatan PPN Lainnya	0
1.2.4	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	15.085.363.119
1.2.5	Pendapatan PPnBM Impor	6.165.186.918
1.2.6	Pendapatan PPnBM Lainnya	150.054.000
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.103.600.160
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	2.483.405.652
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	680.343.496
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	1.689.767.192
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	13.959.342.000
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	289.352.597
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	1.389.223
1.4	Pendapatan Cukai	165.501.000.000
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	158.855.592.463
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	158.214.143
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.987.193.394



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.4.4	Pendapatan Cukai Lainnya	500.000.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	8.608.700.000
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	43.321.800.000
2.1	Pendapatan Bea Masuk	38.899.300.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	4.422.500.000
TOTAL		1.786.378.650.376

Memorandum Item:

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan (PPh)	10.797.907.892
a. PPh atas Komoditas Panas Bumi	1.942.890.000
b. PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	8.846.120.000
c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	8.425.156
d. <i>Recurrent Cost</i> SPAN	472.736
2. Bea Masuk	634.297.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Sekretaris Bidang Perekonomian dan Perundang-undangan,



Hawati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	378.297.855.437
421	PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM	190.754.771.993
4211	Pendapatan Minyak bumi	118.606.710.000
42111	Pendapatan Minyak Bumi	118.606.710.000
421111	Pendapatan Minyak Bumi	118.606.710.000
4212	Pendapatan Gas Bumi	41.171.600.000
42121	Pendapatan Gas Bumi	41.171.600.000
421211	Pendapatan Gas Bumi	41.171.600.000
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	24.960.724.137
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	571.198.698
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	155.746.751
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	415.451.947
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	24.389.525.438
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	19.128.059.644
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	2.172.690.000
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	1.866.906.217
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	57.187.977
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	644.086.049
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	512.495.550
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	8.100.000
4214	Pendapatan Kehutanan	4.511.543.106
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	2.198.468.053
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.198.468.053
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	930.974.040
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	930.974.040
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	217.586.437



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	217.586.437
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.164.514.574
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.164.514.574
4215	Pendapatan Perikanan	625.810.919
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	304.132
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	164.068
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	140.063
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	625.506.787
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	625.506.787
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	878.383.829
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	846.157.640
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	846.157.640
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	28.681.872
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	23.751.312
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	4.930.560
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	3.544.316
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	3.544.316
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	45.589.300.000
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	45.589.300.000
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	44.738.637.000
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	15.976.500.000
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	28.762.137.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	850.663.000
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	850.663.000
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	47.884.451.843
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	45.662.723.235
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	28.449.783.873
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	14.246.152.911
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10.004.568.836
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	480.095.338
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2.664.800
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	305.579.782
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.652.967.689
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	39.787.110
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	717.967.404
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.572.533.820
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.282.754.109
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	289.779.711
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	14.994.337.541
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	3.789.322
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	423.423.028
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	38.647.689
424136	Pendapatan Investasi	120.000.000
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	11.438.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	2.970.477.500
42414	Pendapatan dan Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	646.068.000
424141	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang	646.068.000
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	9.662.630
42421	Pendapatan Hibah Terikat-Uang	9.662.630
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.870.630
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda Uang	7.052.000
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang	500.000
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang	240.000
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	529.656.541
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	529.656.541
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	43.038.279
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	386.626.368
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	99.991.893
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1.682.409.437
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1.670.475.437
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.670.475.437
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	11.934.000
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	235.000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	3.064.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	100.000
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	105.000
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	8.430.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	94.069.331.600
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	29.631.801.288
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	19.077.645.857
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	18.305.604.794
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	62.709.210
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	4.500
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	702.967.810
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	6.359.543
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	152.219.276
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	54.554
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.254.758
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	8.791.243
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	141.118.720
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	553.298.438
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	250.627.650
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	624.015
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.000
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.929.254
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	2.259.489
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	294.813.028
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	2.200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	2.200.000
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	51.582.715
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	51.582.715
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8.844.855.000
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	8.794.230.000
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	50.625.000
42517	Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	950.000.000
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	678.242.124
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	271.757.875
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	15.763.753.670
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.391.168.025
425211	Pendapatan Paspor	927.202.450
425212	Pendapatan Visa	132.785.800
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	708.418.750
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	235.095.000
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	521.839.850
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	194.021.000
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	171.805.175
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	500.000.000
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	571.138.979
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	217.750.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	133.500.000
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	178.550.000
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	41.338.979
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	316.829.966
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	543.078
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.681.237
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.092.657
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.600.184
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	90.000.000
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	150.000.000
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	22.000.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	24.912.808
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	263.454.146
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	49.266.772
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.438.480
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	69.536.895
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	29.995.244



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	66.000.000
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	35.044.755
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	11.000.000
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	72.000
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.100.000
42525	Pendapatan Perizinan	1.024.254.437
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	935.000.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	11.600.100
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	24.600.000
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	26.490.000
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.463.022
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	24.101.315
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.794.331.965
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	910.137.010
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	694.173.305
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	2.453.000.000
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.503.875.000
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.493.286.000
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	34.721.850
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	166.526.300
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	538.612.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	946.829.735
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.400.000
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.400.000
425273	Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catat	277.760.035
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	239.909.475
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	20.783.705
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	387.576.520
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	4.000.000
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	455.746.414
425281	Pendapatan Akreditasi	17.758.100
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.361.321
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	86.936.859
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	13.741.005
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	35.933.166
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	6.714.420
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	121.543.813
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	95.280.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	76.477.729
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	6.927.885.404
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	3.441.439.176
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat	136.970.350
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	2.492.054.635
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	602.825.273
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	34.925.447
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	149.063.980
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	25.599.490
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	89.810.000
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	89.810.000
42533	Pendapatan Jasa Karantina	192.517.999
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	129.717.999
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	62.800.000
42534	Pendapatan Jasa Agraria	2.358.115.228
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.358.115.228
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	846.003.000
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	846.003.000
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.357.727.810
42541	Pendapatan Pendidikan	3.784.061.688
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	78.963.924
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	3.434.503.640
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	77.722.597
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	192.871.526
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	265.738.321



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	254.462.983
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11.275.338
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	302.766.472
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	40.983.282
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	92.422.295
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	102.880.370
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	6.043.390
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	24.944.910
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	944.995
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	34.547.229
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	5.161.327
425451	Pendapatan Museum	3.126.121
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	2.035.206
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	22.803.185.097
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	6.769.179.733
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	771.236.980
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	993.750.000
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.397.855.730
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	564.441.128
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	241.527.020
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	368.088.312
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	778.088.821
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	573.425.542



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	80.766.198
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	15.893.022.317
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	14.786.883.682
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.061.187.075
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	38.747.068
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	181.000
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	2.540.690
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	1.182.800
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.300.000
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	140.983.046
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	20.225.344
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI	58.450
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	102.860.639
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	17.838.612
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	375.555.205
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.996.385
425611	Pendapatan Wisata Alam	114.904.318
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.052.892
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	39.175
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	21.463.846
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	18.469.207
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.994.638
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	225.094.973
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	23.751.980



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	35.834.494
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol	120.000.000
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	45.508.498
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	9.739.278.376
42571	Pendapatan Bunga	913.975.234
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	913.975.234
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.110.041.860
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.110.041.860
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat	106.985.261
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	106.985.261
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	165.000.000
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	165.000.000
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	280.969.644
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	280.969.644
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	5.580.000.000
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	130.000.000
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	230.000.000
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	5.220.000.000
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	418.766.438



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.800.000
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	399.160.000
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	17.806.438
42579	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan	163.539.938
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	163.396.287
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	115.651
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	28.000
4258	Pendapatan Denda	20.646.525
42581	Pendapatan Denda I	20.646.525
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	10.126.325
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	10.000.000
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	519.200
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling	1.000
4259	Pendapatan Lain-lain	4.449.498.222
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	4.433.034.437
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20.121.288
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.272.450
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.201.232
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	4.408.439.465
42599	Pendapatan Lain-Lain II	16.463.784



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN AKUN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	10.493.898
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.969.886

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hani
Hani Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM,
KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 121

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				K P J M			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5777	Pengembangan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif		25.974.386	137.508		26.111.894	26.304.068	26.502.007	26.705.884
5778	Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi		27.317.796			27.317.796	27.640.436	27.972.754	28.315.043
5779	Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri		20.185.857	100.000		20.285.857	20.415.812	20.549.666	20.687.536
5780	Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri		25.000.000			25.000.000	25.159.739	25.324.270	25.493.738
JUMLAH RM						657.151.214			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Negara
Deputi Bidang Perekonomian dan Perundang-undangan,



Wati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.01] BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM		0	0	0	275.885.267.880	275.885.267.880
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH		0	0	0	275.885.267.880	275.885.267.880
999.01.06	Program Pengelolaan Utang Negara		0	0	0	275.885.267.880	275.885.267.880
	Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang	RM	0	0	0	275.885.267.880	275.885.267.880
1	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri		0	0	0	255.844.881.657	255.844.881.657
2	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri		0	0	0	20.040.386.223	20.040.386.223
	JUMLAH TOTAL		0	0	0	275.885.267.880	275.885.267.880



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM		0	0	0	440.000	440.000
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA		0	0	0	440.000	440.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	440.000	440.000
	Pengelolaan Banking Commission	RM	0	0	0	440.000	440.000
1	<i>Banking Commission</i>		0	0	0	440.000	440.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		0	0	0	119.030.000	119.030.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA		0	0	0	119.030.000	119.030.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	119.030.000	119.030.000
	Pengelolaan Hibah Pencegahan Risiko Banjir	PLN	0	0	0	119.030.000	119.030.000
1	<i>Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)</i>		0	0	0	119.030.000	119.030.000
04	EKONOMI		0	0	0	777.170.000	777.170.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN		0	0	0	100.000	100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	100.000	100.000
	Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian	PLN	0	0	0	100000	100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)</i>		0	0	0	100.000	100.000
04.04	PENGAIRAN		0	0	0	276.870.000	276.870.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	276.870.000	276.870.000
	Pengelolaan Hibah Sumber Daya Air dan Irigasi	PLN	0	0	0	276.870.000	276.870.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>		0	0	0	276.870.000	276.870.000
04.08	TRANSPORTASI		0	0	0	500.200.000	500.200.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	500.200.000	500.200.000
	Pengelolaan Hibah Transportasi	PLN	0	0	0	100.000	100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<i>Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase II</i>		0	0	0	100.000	100.000
	Pengelolaan Hibah Transportasi	HLN	0	0	0	100.000	100.000
1	<i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>		0	0	0	100.000	100.000
	Pengelolaan Hibah Transportasi	RM	0	0	0	500.000.000	500.000.000
1	<i>Hibah Jalan Daerah</i>		0	0	0	500.000.000	500.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	143.910.000	143.910.000
05.02	MANAJEMEN AIR LIMBAH		0	0	0	24.100.000	24.100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	24.100.000	24.100.000
	Pengelolaan Hibah Air Limbah	HLN	0	0	0	24.100.000	24.100.000
1	Hibah Air Limbah		0	0	0	100.000	100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang		0	0	0	24.000.000	24.000.000
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI		0	0	0	100.100.000	100.100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	100.100.000	100.100.000
	Pengelolaan Hibah Sanitasi (Rupiah Murni)	RM	0	0	0	100.000.000	100.000.000
1.	Hibah Sanitasi		0	0	0	100.000.000	100.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Hibah Sanitasi (Penerusan Hibah)	HLN	0	0	0	100.000	100.000
1	Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi		0	0	0	100.000	100.000
05.04	KONVERSI SUMBER DAYA ALAM		0	0	0	19.710.000	19.710.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	19.710.000	19.710.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Hibah Sumber Daya Alam	HLN	0	0	0	19.710.000	19.710.000
1	<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem</i>		0	0	0	19.710.000	19.710.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		0	0	0	900.100.000	900.100.000
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM		0	0	0	900.100.000	900.100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	100.000	100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Hibah Air Minum	HLN	0	0	0	100.000	100.000
1	Hibah Air Minum		0	0	0	100.000	100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	900.000.000	900.000.000
	Pengelolaan Nationwide Water Hibah Program (Rupiah Murni)	RM	0	0	0	900.000.000	900.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nationwide Water Hibah Program (NWHP)		0	0	0	900.000.000	900.000.000
	JUMLAH TOTAL		0	0	0	1.940.650.000	1.940.650.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM		0	0	0	10.797.907.892	10.797.907.892
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA		0	0	0	10.797.907.892	10.797.907.892
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	10.797.907.892	10.797.907.892
	Pengelolaan Subsidi Pajak	RM	0	0	0	10.797.907.892	10.797.907.892
1	PPh atas Komoditas Panas Bumi		0	0	0	1.942.890.000	1.942.890.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
: [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PPh atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal		0	0	0	8.846.120.000	8.846.120.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PPh atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		0	0	0	8.425.156	8.425.156
4	PPh atas pembiayaan Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni		0	0	0	472.736	472.736



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04	EKONOMI		0	0	0	209.116.681.416	209.116.681.416
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	12.879.350.101	75.296.324
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	75.296.324	75.296.324
	Pengelolaan Subsidi Bunga Kredit Program	RM	0	0	0	75.296.324	75.296.324
1	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)		0	0	0	16.994.423	16.994.423
2	Risk Sharing KKP-E		0	0	0	27.509.358	27.509.358



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Kredit Pengembangan Energiti Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)		0	0	0	22.421.350	22.421.350
4	Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)		0	0	0	7.772.348	7.772.348
5	Skema Subsidi Resi Gudang		0	0	0	598.845	598.845
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	12.169.756.777	12.169.756.777
	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	RM	0	0	0	12.169.756.777	12.169.756.777
1	Imbal Jasa Penjaminan KUR		0	0	0	190.686.777	190.686.777
2	Subsidi Bunga KUR		0	0	0	11.979.070.000	11.979.070.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
: [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	634.297.000	634.297.000
	Pengelolaan Subsidi Bea Masuk	RM	0	0	0	634.297.000	634.297.000
1	Fasilitasi Bea Masuk		0	0	0	634.297.000	634.297.000
	a. Subsidi BMDTP Industri Agro		0	0	0	34.265.000	34.265.000
	b. Subsidi BMDTP Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		0	0	0	289.838.000	289.838.000
	c. Subsidi BMDTP Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Industri		0	0	0	298.194.000	298.194.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
: [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	d. Subsidi BMDTP Obat dan Makanan		0	0	0	12.000.000	12.000.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN		0	0	0	29.503.224.800	29.503.224.800
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	29.503.224.800	29.503.224.800
	Pengelolaan Subsidi Pupuk	RM	0	0	0	29.503.224.800	29.503.224.800
1	Subsidi Pupuk		0	0	0	29.503.224.800	29.503.224.800
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		0	0	0	159.971.896.000	159.971.896.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	159.971.896.000	159.971.896.000
	Pengelolaan Subsidi Energi	RM	0	0	0	159.971.896.000	159.971.896.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
: [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 Kg		0	0	0	100.648.440.000	100.648.440.000
	2 Subsidi Listrik		0	0	0	59.323.456.000	59.323.456.000
04.08	TRANSPORTASI		0	0	0	6.603.123.515	6.603.123.515
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	4.785.214.440	4.785.214.440
	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	RM	0	0	0	4.785.214.440	4.785.214.440
	1 PSO kepada PT KAI		0	0	0	4.785.214.440	4.785.214.440
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	1.817.909.075	1.817.909.075
	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	RM	0	0	0	1.817.909.075	1.817.909.075



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PSO kepada PT Peln		0	0	0	1.817.909.075	1.817.909.075
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		0	0	0	159.087.000	159.087.000
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	159.087.000	159.087.000
	Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	RM	0	0	0	159.087.000	159.087.000
1	PSO kepada Perum LKBN Antara		0	0	0	159.087.000	159.087.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		0	0	0	5.613.543	5.613.543
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		0	0	0	5.613.543	5.613.543



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI

: [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
: [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	5.613.543	5.613.543
	Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih	RM	0	0	0	5.613.543	5.613.543
1	Subsidi Bunga untuk Air Bersih		0	0	0	5.613.543	5.613.543
11	PERLINDUNGAN SOSIAL		0	0	0	4.400.654.265	4.400.654.265
11.07	BANTUAN PERUMAHAN		0	0	0	4.400.654.265	4.400.654.265
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	4.400.654.265	4.400.654.265
	Pengelolaan Subsidi Perumahan	RM	0	0	0	4.400.654.265	4.400.654.265
1.	Subsidi Bunga Kredit Perumahan		0	0	0	3.452.654.265	3.452.654.265



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		0	0	0	948.000.000	948.000.000
	JUMLAH TOTAL		0	0	0	224.320.857.116	224.320.857.116



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM		32.362.945.764	0	0	88.126.789.603	120.489.735.367
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		32.362.945.764	0	0	88.126.789.603	120.489.735.367
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		32.362.945.764	0	0	0	32.362.945.764
	Pengelolaan Gaji, Honorarium, Vakasi dan Lain-lain	RM	32.362.945.764	0	0	0	32.362.945.764
1	Cadangan Gaji dan Tunjangan		4.591.520.850	0	0	0	4.591.520.850



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2 Cadangan Honorarium, Vakasi dan lain-lain		27.771.424.914	0	0	0	27.771.424.914
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	10.869.180.507	10.869.180.507
	Pengelolaan Dana Cadangan Risiko Fiskal & Stabilitas Harga Pangan dan Ketahanan Pangan	RM	0	0	0	10.869.180.507	10.869.180.507
1	Cadangan Risiko Fiskal		0	0	0	8.369.180.507	8.369.180.507



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2 Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan		0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	256.561.323	256.561.323
	Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun	RM	0	0	0	256.561.323	256.561.323
1	Kawasan Bintan dan Karimun		0	0	0	256.561.323	256.561.323
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Dana Cadangan Keperluan Mendesak	RM	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000
1	Cadangan Keperluan Mendesak		0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	700.000.000	700.000.000
	Pengelolaan Dana Cadangan Selisih Kurs	RM	0	0	0	700.000.000	700.000.000
1	Cadangan Selisih Kurs		0	0	0	700.000.000	700.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Dana Cadangan Reward K/L	RM	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
1	Cadangan Insentif Kementerian Negara/Lembaga (K/L)		0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	500.000.000	500.000.000
	Pengelolaan Dana Dukungan Kelayakan/Viability Gap Fund	RM	0	0	0	500.000.000	500.000.000
1	Cadangan Dana Dukungan Kelayakan/Viability Gap Fund (VGF)		0	0	0	500.000.000	500.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	115.794.674	115.794.674
	Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua	RM	0	0	0	115.794.674	115.794.674
1	Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua		0	0	0	115.794.674	115.794.674
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	15.883.331	15.883.331



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat	RM	0	0	0	15.883.331	15.883.331
1	Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat		0	0	0	15.883.331	15.883.331
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	33.400.000.000	33.400.000.000
	Pengelolaan Cadangan Anggaran Pembayaran Tunggakan/Kurang Bayar	RM	0	0	0	33.400.000.000	33.400.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cadangan Anggaran Pembayaran Tunggakan/Kurang Bayar		0	0	0	33.400.000.000	33.400.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	110.000.000	110.000.000
	Bantuan Kemasyarakatan Presiden	RM	0	0	0	110.000.000	110.000.000
1	Bantuan Kemasyarakatan Presiden		0	0	0	110.000.000	110.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	13.200.000	13.200.000
	Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden	RM	0	0	0	13.200.000	13.200.000
1	Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden		0	0	0	13.200.000	13.200.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	7.617.000.180	7.617.000.180
	Penyesuaian Anggaran Pendidikan	RM	0	0	0	7.617.000.180	7.617.000.180



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyesuaian Anggaran Pendidikan		0	0	0	7.617.000.180	7.617.000.180
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	4.910.199.214	4.910.199.214
	Penyesuaian Anggaran Kesehatan	RM	0	0	0	4.910.199.214	4.910.199.214
1	Penyesuaian Anggaran Kesehatan		0	0	0	4.910.199.214	4.910.199.214
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	500.000.000	500.000.000
	Pengelolaan Cadangan Hibah Internasional	RM	0	0	0	500.000.000	500.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cadangan Hibah Internasional		0	0	0	500.000.000	500.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	12.500.000.000	12.500.000.000
	Pengelolaan Cadangan Cadangan Anggaran Pemilu	RM	0	0	0	12.500.000.000	12.500.000.000
1	Cadangan Anggaran Pemilu		0	0	0	12.500.000.000	12.500.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	73.970.374	73.970.374
	Pengelolaan Cadangan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB	RM	0	0	0	73.970.374	73.970.374



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cadangan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB		0	0	0	73.970.374	73.970.374
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pengelolaan Cadangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	RM	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
1	Cadangan TKDD		0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	45.000.000	45.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Cadangan Gerakan Pramuka	RM	0	0	0	45.000.000	45.000.000
1	Cadangan Gerakan Pramuka		0	0	0	45.000.000	45.000.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		0	0	5.000.000.000	11.000.000.000	16.000.000.000
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA		0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
	Pengelolaan Cadangan Penanggulangan Bencana	RM	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
1	Cadangan Bencana Alam		0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pengelolaan Cadangan Penanggulangan Bencana	RM	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
1	Cadangan Penanggulangan Bencana Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah		0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
	Pengelolaan Cadangan Penanggulangan Bencana	RM	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Cadangan <i>Pooling Fund</i> Bencana		0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
04	EKONOMI		0	0	0	2.231.441.333	2.231.441.333
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		0	0	0	1.855.627.475	1.855.627.475
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	1.855.627.475	1.855.627.475
	Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas	RM	0	0	0	1.855.627.475	1.855.627.475
1	Dana Operasional Kegiatan SKK Migas		0	0	0	1.855.627.475	1.855.627.475



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		0	0	0	375.813.858	375.813.858
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	375.813.858	375.813.858
	Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal	RM	0	0	0	375.813.858	375.813.858
1	Bantuan Operasional Layanan Pos Universal		0	0	0	375.813.858	375.813.858
11	PERLINDUNGAN SOSIAL		0	0	0	11.998.006.141	11.998.006.141



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA		0	0	0	11.998.006.141	11.998.006.141
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000
	Pengelolaan Dana Cadangan Beras Pemerintah	RM	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000
1	Cadangan Beras Pemerintah		0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000
999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		0	0	0	9.498.006.141	9.498.006.141



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN- LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Dana Cadangan Program JKN	RM	0	0	0	9.498.006.141	9.498.006.141
1	Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		0	0	0	9.498.006.141	9.498.006.141
	JUMLAH TOTAL		32.362.945.764	0	5.000.000.000	113.356.237.077	150.719.182.841



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM		0	0	0	646.018.430	646.018.430
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		0	0	0	646.018.430	646.018.430
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	0	0	97.626.719	97.626.719
	Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	RM	0	0	0	97.626.719	97.626.719
1	Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog		0	0	0	97.626.719	97.626.719
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	0	0	548.391.711	548.391.711



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Pembayaran Belanja Terkait Pengelolaan Kas Negara	RM	0	0	0	548.391.711	548.391.711
	Pembiayaan Operasional BUN Pengelolaan Kas Negara		0	0	0	548.391.711	548.391.711
04	EKONOMI		0	594.003.882	0	0	594.003.882
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	594.003.882	0	0	594.003.882
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	326.070.000	0	0	326.070.000
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama	RM	0	326.070.000	0	0	326.070.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dana Dukungan Kelayakan/Viability Gap Fund (VGF) pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		0	326.070.000	0	0	326.070.000
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	176.949.498	0	0	176.949.498
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek	RM	0	176.949.498	0	0	176.949.498
1	Dana Fasilitas Penyiapan Proyek dengan Skema KPBU		0	176.949.498	0	0	176.949.498
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	90.984.384	0	0	90.984.384



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan Trust Fund dan Kontribusi ke Lembaga Internasional Sektor Ekonomi	RM	0	90.984.384	0	0	90.984.384
	Kontribusi ke Lembaga Internasional		0	90.984.384			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL		124.787.694.336	0	0	0	124.787.694.336
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		124.787.694.336	0	0	0	124.787.694.336
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		124.787.694.336	0	0	0	124.787.694.336
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial	RM	124.787.694.336	0	0	0	124.787.694.336
1	Anggaran Manfaat Pensiun		113.273.828.106	0	0	0	113.273.828.106
2	Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan)		5.576.027.104	0	0	0	5.576.027.104
3	Cicilan UPSL Program THT		5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000
4	Jamkesmas dan Jamkestama		215.103.600	0	0	0	215.103.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja		230.377.292	0	0	0	230.377.292
6	IWP Program Jaminan Kematian		492.358.234	0	0	0	492.358.234
JUMLAH TOTAL			124.787.694.336	594.003.882	0	646.018.430	126.027.716.648

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hayati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
I	Provinsi Aceh	16.637.580	-	16.637.580
	Tambahan Alokasi DBH SDA Migas	-	-	308.385.853
1	Kab. Aceh Barat	1.512.507	-	1.512.507
2	Kab. Aceh Besar	1.512.507	-	1.512.507
3	Kab. Aceh Selatan	1.512.507	-	1.512.507
4	Kab. Aceh Singkil	1.512.507	-	1.512.507
5	Kab. Aceh Tengah	1.512.507	-	1.512.507
6	Kab. Aceh Tenggara	1.512.507	-	1.512.507
7	Kab. Aceh Timur	5.941.590	-	5.941.590
8	Kab. Aceh Utara	18.205.611	-	18.205.611
9	Kab. Bireuen	1.512.507	-	1.512.507
10	Kab. Pidie	1.512.507	-	1.512.507
11	Kab. Simeulue	1.512.507	-	1.512.507
12	Kota Banda Aceh	1.512.507	-	1.512.507
13	Kota Sabang	1.512.507	-	1.512.507
14	Kota Langsa	1.512.507	-	1.512.507
15	Kota Lhokseumawe	1.512.507	-	1.512.507
16	Kab. Gayo Lues	1.512.507	-	1.512.507



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
I	Provinsi Aceh	19.673.593	-	19.673.593	36.311.173
	Tambahan Alokasi DBH SDA Migas	-	-	172.693.277	481.079.130
1	Kab. Aceh Barat	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
2	Kab. Aceh Besar	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
3	Kab. Aceh Selatan	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
4	Kab. Aceh Singkil	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
5	Kab. Aceh Tengah	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
6	Kab. Aceh Tenggara	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
7	Kab. Aceh Timur	21.941.627	-	21.941.627	27.883.217
8	Kab. Aceh Utara	19.194.068	-	19.194.068	37.399.679
9	Kab. Bireuen	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
10	Kab. Pidie	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
11	Kab. Simeulue	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
12	Kota Banda Aceh	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
13	Kota Sabang	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
14	Kota Langsa	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
15	Kota Lhokseumawe	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
16	Kab. Gayo Lues	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
17	Kab. Aceh Barat Daya	1.512.507	-	1.512.507
18	Kab. Aceh Jaya	1.512.507	-	1.512.507
19	Kab. Nagan Raya	1.512.507	-	1.512.507
20	Kab. Aceh Tamiang	12.152.973	-	12.152.973
21	Kab. Bener Meriah	1.512.507	-	1.512.507
22	Kab. Pidie Jaya	1.512.507	-	1.512.507
23	Kota Subulussalam	1.512.507	-	1.512.507
II	Provinsi Sumatera Utara	1.943.623	64.787	2.008.410
1	Kab. Asahan	121.476	4.049	125.525
2	Kab. Dairi	121.476	4.049	125.525
3	Kab. Deli Serdang	127.424	4.247	131.671
4	Kab. Karo	121.476	4.049	125.525
5	Kab. Labuhanbatu	121.476	4.049	125.525
6	Kab. Langkat	2.690.881	89.696	2.780.577
7	Kab. Mandailing Natal	121.476	4.049	125.525
8	Kab. Nias	121.476	4.049	125.525
9	Kab. Simalungun	121.476	4.049	125.525
10	Kab. Tapanuli Selatan	121.476	4.049	125.525



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
17	Kab. Aceh Barat Daya	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
18	Kab. Aceh Jaya	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
19	Kab. Nagan Raya	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
20	Kab. Aceh Tamiang	1.788.508	-	1.788.508	13.941.481
21	Kab. Bener Meriah	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
22	Kab. Pidie Jaya	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
23	Kota Subulussalam	1.788.508	-	1.788.508	3.301.015
II	Provinsi Sumatera Utara	1.586.808	26.447	1.613.255	3.621.665
1	Kab. Asahan	99.175	1.653	100.828	226.353
2	Kab. Dairi	99.175	1.653	100.828	226.353
3	Kab. Deli Serdang	332.306	5.538	337.844	469.515
4	Kab. Karo	99.175	1.653	100.828	226.353
5	Kab. Labuhanbatu	99.175	1.653	100.828	226.353
6	Kab. Langkat	2.940.485	49.008	2.989.493	5.770.070
7	Kab. Mandailing Natal	99.175	1.653	100.828	226.353
8	Kab. Nias	99.175	1.653	100.828	226.353
9	Kab. Simalungun	99.175	1.653	100.828	226.353
10	Kab. Tapanuli Selatan	99.175	1.653	100.828	226.353



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
11	Kab. Tapanuli Tengah	121.476	4.049	125.525
12	Kab. Tapanuli Utara	121.476	4.049	125.525
13	Kab. Toba Samosir	121.476	4.049	125.525
14	Kota Binjai	121.476	4.049	125.525
15	Kota Medan	121.476	4.049	125.525
16	Kota Pematang Siantar	121.476	4.049	125.525
17	Kota Sibolga	121.476	4.049	125.525
18	Kota Tanjung Balai	121.476	4.049	125.525
19	Kota Tebing Tinggi	121.476	4.049	125.525
20	Kota Padang Sidempuan	121.476	4.049	125.525
21	Kab. Pakpak Bharat	121.476	4.049	125.525
22	Kab. Nias Selatan	121.476	4.049	125.525
23	Kab. Humbang Hasundutan	121.476	4.049	125.525
24	Kab. Serdang Bedagai	121.476	4.049	125.525
25	Kab. Samosir	121.476	4.049	125.525
26	Kab. Batu Bara	121.476	4.049	125.525
27	Kab. Padang Lawas	1.311.894	43.730	1.355.624
28	Kab. Padang Lawas Utara	121.476	4.049	125.525



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
11	Kab. Tapanuli Tengah	99.175	1.653	100.828	226.353
12	Kab. Tapanuli Utara	99.175	1.653	100.828	226.353
13	Kab. Toba Samosir	99.175	1.653	100.828	226.353
14	Kota Binjai	99.175	1.653	100.828	226.353
15	Kota Medan	99.175	1.653	100.828	226.353
16	Kota Pematang Siantar	99.175	1.653	100.828	226.353
17	Kota Sibolga	99.175	1.653	100.828	226.353
18	Kota Tanjung Balai	99.175	1.653	100.828	226.353
19	Kota Tebing Tinggi	99.175	1.653	100.828	226.353
20	Kota Padang Sidempuan	99.175	1.653	100.828	226.353
21	Kab. Pakpak Bharat	99.175	1.653	100.828	226.353
22	Kab. Nias Selatan	99.175	1.653	100.828	226.353
23	Kab. Humbang Hasundutan	99.175	1.653	100.828	226.353
24	Kab. Serdang Bedagai	99.175	1.653	100.828	226.353
25	Kab. Samosir	99.175	1.653	100.828	226.353
26	Kab. Batu Bara	99.175	1.653	100.828	226.353
27	Kab. Padang Lawas	99.175	1.653	100.828	1.456.452
28	Kab. Padang Lawas Utara	99.175	1.653	100.828	226.353



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	121.476	4.049	125.525
30	Kab. Labuhanbatu Utara	121.476	4.049	125.525
31	Kab. Nias Utara	121.476	4.049	125.525
32	Kab. Nias Barat	121.476	4.049	125.525
33	Kota Gunungsitoli	121.476	4.049	125.525
III	Provinsi Riau	1.227.885.849	40.929.528	1.268.815.377
1	Kab. Bengkalis	1.269.810.832	42.327.028	1.312.137.860
2	Kab. Indragiri Hilir	223.251.972	7.441.732	230.693.704
3	Kab. Indragiri Hulu	233.296.369	7.776.546	241.072.915
4	Kab. Kampar	525.662.023	17.522.067	543.184.090
5	Kab. Kuantan Singingi	223.251.972	7.441.732	230.693.704
6	Kab. Pelalawan	235.478.867	7.849.296	243.328.163
7	Kab. Rokan Hilir	704.879.395	23.495.980	728.375.375
8	Kab. Rokan Hulu	232.850.558	7.761.685	240.612.243
9	Kab. Siak	590.718.220	19.690.607	610.408.827
10	Kota Dumai	223.251.972	7.441.732	230.693.704
11	Kota Pekanbaru	223.251.972	7.441.732	230.693.704
12	Kab. Kepulauan Meranti	225.839.241	7.527.975	233.367.216



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	99.175	1.653	100.828	226.353
30	Kab. Labuhanbatu Utara	99.175	1.653	100.828	226.353
31	Kab. Nias Utara	99.175	1.653	100.828	226.353
32	Kab. Nias Barat	99.175	1.653	100.828	226.353
33	Kota Gunungsitoli	99.175	1.653	100.828	226.353
III	Provinsi Riau	35.007.939	583.466	35.591.405	1.304.406.782
1	Kab. Bengkalis	6.365.080	106.085	6.471.165	1.318.609.025
2	Kab. Indragiri Hilir	6.365.080	106.085	6.471.165	237.164.869
3	Kab. Indragiri Hulu	6.365.080	106.085	6.471.165	247.544.080
4	Kab. Kampar	21.901.862	365.031	22.266.893	565.450.983
5	Kab. Kuantan Singingi	6.365.080	106.085	6.471.165	237.164.869
6	Kab. Pelalawan	54.031.438	900.524	54.931.962	298.260.125
7	Kab. Rokan Hilir	6.365.080	106.085	6.471.165	734.846.540
8	Kab. Rokan Hulu	6.365.080	106.085	6.471.165	247.083.408
9	Kab. Siak	6.365.080	106.085	6.471.165	616.879.992
10	Kota Dumai	6.365.080	106.085	6.471.165	237.164.869
11	Kota Pekanbaru	6.365.080	106.085	6.471.165	237.164.869
12	Kab. Kepulauan Meranti	6.812.736	113.546	6.926.282	240.293.498



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
IV	Provinsi Jambi	98.499.595	3.283.320	101.782.915
1	Kab. Batang Hari	24.543.037	818.101	25.361.138
2	Kab. Bungo	19.699.919	656.664	20.356.583
3	Kab. Kerinci	19.699.919	656.664	20.356.583
4	Kab. Merangin	19.699.919	656.664	20.356.583
5	Kab. Muaro Jambi	29.393.407	979.780	30.373.187
6	Kab. Sarolangun	25.468.120	848.937	26.317.057
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	147.760.689	4.925.356	152.686.045
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	44.840.760	1.494.692	46.335.452
9	Kab. Tebo	20.265.072	675.502	20.940.574
10	Kota Jambi	22.927.619	764.254	23.691.873
11	Kota Sungai Penuh	19.699.919	656.664	20.356.583
V	Provinsi Sumatera Selatan	159.459.695	5.315.323	164.775.018
1	Kab. Lahat	21.126.571	704.219	21.830.790
2	Kab. Musi Banyuasin	208.816.373	6.960.546	215.776.919
3	Kab. Musi Rawas	44.355.449	1.478.515	45.833.964
4	Kab. Muara Enim	47.171.027	1.572.368	48.743.395
5	Kab. Ogan Komering Ilir	19.932.462	664.415	20.596.877



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
IV	Provinsi Jambi	132.834.142	2.213.902	135.048.044	236.830.959
1	Kab. Batang Hari	26.566.828	442.780	27.009.608	52.370.746
2	Kab. Bungo	26.566.828	442.780	27.009.608	47.366.191
3	Kab. Kerinci	26.566.828	442.780	27.009.608	47.366.191
4	Kab. Merangin	26.566.828	442.780	27.009.608	47.366.191
5	Kab. Muaro Jambi	26.843.184	447.386	27.290.570	57.663.757
6	Kab. Sarolangun	26.662.815	444.380	27.107.195	53.424.252
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	227.572.627	3.792.877	231.365.504	384.051.549
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	64.290.142	1.071.502	65.361.644	111.697.096
9	Kab. Tebo	26.566.828	442.780	27.009.608	47.950.182
10	Kota Jambi	26.566.828	442.780	27.009.608	50.701.481
11	Kota Sungai Penuh	26.566.828	442.780	27.009.608	47.366.191
V	Provinsi Sumatera Selatan	731.502.306	12.191.705	743.694.011	908.469.029
1	Kab. Lahat	104.361.452	1.739.358	106.100.810	127.931.600
2	Kab. Musi Banyuasin	1.197.211.793	19.953.530	1.217.165.323	1.432.942.242
3	Kab. Musi Rawas	247.086.073	4.118.101	251.204.174	297.038.138
4	Kab. Muara Enim	168.480.121	2.808.002	171.288.123	220.031.518
5	Kab. Ogan Komering Ilir	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
6	Kab. Ogan Komering Ulu	29.178.774	972.626	30.151.400
7	Kota Palembang	19.932.462	664.415	20.596.877
8	Kota Prabumulih	32.802.874	1.093.429	33.896.303
9	Kota Pagar Alam	19.932.462	664.415	20.596.877
10	Kota Lubuk Linggau	19.932.462	664.415	20.596.877
11	Kab. Banyuasin	29.907.993	996.933	30.904.926
12	Kab. Ogan Ilir	30.477.863	1.015.929	31.493.792
13	Kab. OKU Timur	19.932.462	664.415	20.596.877
14	Kab. OKU Selatan	19.932.462	664.415	20.596.877
15	Kab. Empat Lawang	19.932.462	664.415	20.596.877
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	34.542.160	1.151.405	35.693.565
17	Kab. Musi Rawas Utara	19.932.462	664.415	20.596.877
VI	Provinsi Lampung	-	-	-
1	Kab. Lampung Barat	-	-	-
2	Kab. Lampung Selatan	-	-	-
3	Kab. Lampung Tengah	-	-	-
4	Kab. Lampung Utara	-	-	-
5	Kab. Lampung Timur	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
6	Kab. Ogan Komering Ulu	95.646.003	1.594.100	97.240.103	127.391.503
7	Kota Palembang	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
8	Kota Prabumulih	103.195.428	1.719.924	104.915.352	138.811.655
9	Kota Pagar Alam	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
10	Kota Lubuk Linggau	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
11	Kab. Banyuasin	91.437.788	1.523.963	92.961.751	123.866.677
12	Kab. Ogan Ilir	91.437.788	1.523.963	92.961.751	124.455.543
13	Kab. OKU Timur	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
14	Kab. OKU Selatan	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
15	Kab. Empat Lawang	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	95.650.472	1.594.175	97.244.647	132.938.212
17	Kab. Musi Rawas Utara	91.437.788	1.523.963	92.961.751	113.558.628
VI	Provinsi Lampung	10.257.496	174.377	10.431.873	10.431.873
1	Kab. Lampung Barat	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
2	Kab. Lampung Selatan	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
3	Kab. Lampung Tengah	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
4	Kab. Lampung Utara	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
5	Kab. Lampung Timur	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
6	Kab. Tanggamus	-	-	-
7	Kab. Tulang Bawang	-	-	-
8	Kab. Way Kanan	-	-	-
9	Kota Bandar Lampung	-	-	-
10	Kota Metro	-	-	-
11	Kab. Pesawaran	-	-	-
12	Kab. Pringsewu	-	-	-
13	Kab. Mesuji	-	-	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-
15	Kab. Pesisir Barat	-	-	-
VII	Provinsi DKI Jakarta	41.370.664	1.379.022	42.749.686
VIII	Provinsi Jawa Barat	113.264.512	3.838.637	117.103.149
1	Kab. Bandung	8.442.769	279.087	8.721.856
2	Kab. Bekasi	15.244.613	505.815	15.750.428
3	Kab. Bogor	8.442.769	279.087	8.721.856
4	Kab. Ciamis	8.442.769	279.087	8.721.856
5	Kab. Cianjur	8.442.769	279.087	8.721.856
6	Kab. Cirebon	8.442.769	279.087	8.721.856



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
6	Kab. Tanggamus	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
7	Kab. Tulang Bawang	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
8	Kab. Way Kanan	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
9	Kota Bandar Lampung	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
10	Kota Metro	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
11	Kab. Pesawaran	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
12	Kab. Pringsewu	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
13	Kab. Mesuji	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
14	Kab. Tulang Bawang Barat	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
15	Kab. Pesisir Barat	1.367.666	22.566	1.390.232	1.390.232
VII	Provinsi DKI Jakarta	30.772.489	512.875	31.285.364	74.035.050
VIII	Provinsi Jawa Barat	106.195.847	1.785.633	107.981.480	225.084.629
1	Kab. Bandung	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
2	Kab. Bekasi	25.700.931	427.767	26.128.698	41.879.126
3	Kab. Bogor	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
4	Kab. Ciamis	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
5	Kab. Cianjur	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
6	Kab. Cirebon	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
7	Kab. Garut	8.442.769	279.087	8.721.856
8	Kab. Indramayu	23.872.214	793.401	24.665.615
9	Kab. Karawang	16.257.973	539.593	16.797.566
10	Kab. Kuningan	8.442.769	279.087	8.721.856
11	Kab. Majalengka	8.774.807	290.155	9.064.962
12	Kab. Purwakarta	8.442.769	279.087	8.721.856
13	Kab. Subang	13.707.978	454.594	14.162.572
14	Kab. Sukabumi	8.442.769	279.087	8.721.856
15	Kab. Sumedang	8.442.769	279.087	8.721.856
16	Kab. Tasikmalaya	8.442.769	279.087	8.721.856
17	Kota Bandung	8.442.769	279.087	8.721.856
18	Kota Bekasi	8.442.769	279.087	8.721.856
19	Kota Bogor	8.442.769	279.087	8.721.856
20	Kota Cirebon	8.442.769	279.087	8.721.856
21	Kota Depok	8.442.769	279.087	8.721.856
22	Kota Sukabumi	8.442.769	279.087	8.721.856
23	Kota Tasikmalaya	8.442.769	279.087	8.721.856
24	Kota Cimahi	8.442.769	279.087	8.721.856



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
7	Kab. Garut	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
8	Kab. Indramayu	21.817.150	363.038	22.180.188	46.845.803
9	Kab. Karawang	36.044.514	600.160	36.644.674	53.442.240
10	Kab. Kuningan	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
11	Kab. Majalengka	8.457.871	140.383	8.598.254	17.663.216
12	Kab. Purwakarta	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
13	Kab. Subang	61.786.214	1.029.189	62.815.403	76.977.975
14	Kab. Sukabumi	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
15	Kab. Sumedang	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
16	Kab. Tasikmalaya	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
17	Kota Bandung	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
18	Kota Bekasi	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
19	Kota Bogor	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
20	Kota Cirebon	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
21	Kota Depok	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
22	Kota Sukabumi	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
23	Kota Tasikmalaya	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
24	Kota Cimahi	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
25	Kota Banjar	8.442.769	279.087	8.721.856
26	Kab. Bandung Barat	8.442.769	279.087	8.721.856
27	Kab. Pangandaran	8.442.769	279.087	8.721.856
IX	Provinsi Jawa Tengah	2.843.206	94.774	2.937.980
1	Kab. Banjarnegara	167.247	5.575	172.822
2	Kab. Banyumas	167.247	5.575	172.822
3	Kab. Batang	167.247	5.575	172.822
4	Kab. Blora	5.686.413	189.547	5.875.960
5	Kab. Boyolali	167.247	5.575	172.822
6	Kab. Brebes	167.247	5.575	172.822
7	Kab. Cilacap	167.247	5.575	172.822
8	Kab. Demak	167.247	5.575	172.822
9	Kab. Grobogan	167.247	5.575	172.822
10	Kab. Jepara	167.247	5.575	172.822
11	Kab. Karanganyar	167.247	5.575	172.822
12	Kab. Kebumen	167.247	5.575	172.822
13	Kab. Kendal	167.247	5.575	172.822
14	Kab. Klaten	167.247	5.575	172.822



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
25	Kota Banjar	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
26	Kab. Bandung Barat	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
27	Kab. Pangandaran	8.034.704	133.330	8.168.034	16.889.890
IX	Provinsi Jawa Tengah	12.767.009	212.783	12.979.792	15.917.772
1	Kab. Banjarnegara	751.001	12.517	763.518	936.340
2	Kab. Banyumas	751.001	12.517	763.518	936.340
3	Kab. Batang	751.001	12.517	763.518	936.340
4	Kab. Blora	25.534.018	425.567	25.959.585	31.835.545
5	Kab. Boyolali	751.001	12.517	763.518	936.340
6	Kab. Brebes	751.001	12.517	763.518	936.340
7	Kab. Cilacap	751.001	12.517	763.518	936.340
8	Kab. Demak	751.001	12.517	763.518	936.340
9	Kab. Grobogan	751.001	12.517	763.518	936.340
10	Kab. Jepara	751.001	12.517	763.518	936.340
11	Kab. Karanganyar	751.001	12.517	763.518	936.340
12	Kab. Kebumen	751.001	12.517	763.518	936.340
13	Kab. Kendal	751.001	12.517	763.518	936.340
14	Kab. Klaten	751.001	12.517	763.518	936.340



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
15	Kab. Kudus	167.247	5.575	172.822
16	Kab. Magelang	167.247	5.575	172.822
17	Kab. Pati	167.247	5.575	172.822
18	Kab. Pekalongan	167.247	5.575	172.822
19	Kab. Pemasang	167.247	5.575	172.822
20	Kab. Purbalingga	167.247	5.575	172.822
21	Kab. Purworejo	167.247	5.575	172.822
22	Kab. Rembang	167.247	5.575	172.822
23	Kab. Semarang	167.247	5.575	172.822
24	Kab. Sragen	167.247	5.575	172.822
25	Kab. Sukoharjo	167.247	5.575	172.822
26	Kab. Tegal	167.247	5.575	172.822
27	Kab. Temanggung	167.247	5.575	172.822
28	Kab. Wonogiri	167.247	5.575	172.822
29	Kab. Wonosobo	167.247	5.575	172.822
30	Kota Magelang	167.247	5.575	172.822
31	Kota Pekalongan	167.247	5.575	172.822
32	Kota Salatiga	167.247	5.575	172.822



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
15	Kab. Kudus	751.001	12.517	763.518	936.340
16	Kab. Magelang	751.001	12.517	763.518	936.340
17	Kab. Pati	751.001	12.517	763.518	936.340
18	Kab. Pekalongan	751.001	12.517	763.518	936.340
19	Kab. Pemasang	751.001	12.517	763.518	936.340
20	Kab. Purbalingga	751.001	12.517	763.518	936.340
21	Kab. Purworejo	751.001	12.517	763.518	936.340
22	Kab. Rembang	751.001	12.517	763.518	936.340
23	Kab. Semarang	751.001	12.517	763.518	936.340
24	Kab. Sragen	751.001	12.517	763.518	936.340
25	Kab. Sukoharjo	751.001	12.517	763.518	936.340
26	Kab. Tegal	751.001	12.517	763.518	936.340
27	Kab. Temanggung	751.001	12.517	763.518	936.340
28	Kab. Wonogiri	751.001	12.517	763.518	936.340
29	Kab. Wonosobo	751.001	12.517	763.518	936.340
30	Kota Magelang	751.001	12.517	763.518	936.340
31	Kota Pekalongan	751.001	12.517	763.518	936.340
32	Kota Salatiga	751.001	12.517	763.518	936.340



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
33	Kota Semarang	167.247	5.575	172.822
34	Kota Surakarta	167.247	5.575	172.822
35	Kota Tegal	167.247	5.575	172.822
X	Provinsi Jawa Timur	1.313.140.485	43.784.767	1.356.925.252
1	Kab. Bangkalan	73.022.854	2.433.742	75.456.596
2	Kab. Banyuwangi	70.951.937	2.364.711	73.316.648
3	Kab. Blitar	70.951.937	2.364.711	73.316.648
4	Kab. Bojonegoro	2.572.033.097	85.734.081	2.657.767.178
5	Kab. Bondowoso	70.951.937	2.364.711	73.316.648
6	Kab. Gresik	73.602.053	2.453.049	76.055.102
7	Kab. Jember	70.951.937	2.364.711	73.316.648
8	Kab. Jombang	70.951.937	2.364.711	73.316.648
9	Kab. Kediri	70.951.937	2.364.711	73.316.648
10	Kab. Lamongan	70.951.937	2.364.711	73.316.648
11	Kab. Lumajang	70.951.937	2.364.711	73.316.648
12	Kab. Madiun	70.951.937	2.364.711	73.316.648
13	Kab. Magetan	70.951.937	2.364.711	73.316.648
14	Kab. Malang	70.951.937	2.364.711	73.316.648



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
33	Kota Semarang	751.001	12.517	763.518	936.340
34	Kota Surakarta	751.001	12.517	763.518	936.340
35	Kota Tegal	751.001	12.517	763.518	936.340
X	Provinsi Jawa Timur	150.435.980	2.553.628	152.989.608	1.509.914.860
1	Kab. Bangkalan	9.964.727	164.859	10.129.586	85.586.182
2	Kab. Banyuwangi	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
3	Kab. Blitar	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
4	Kab. Bojonegoro	10.174.839	168.361	10.343.200	2.668.110.378
5	Kab. Bondowoso	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
6	Kab. Gresik	9.695.932	160.379	9.856.311	85.911.413
7	Kab. Jember	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
8	Kab. Jombang	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
9	Kab. Kediri	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
10	Kab. Lamongan	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
11	Kab. Lumajang	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
12	Kab. Madiun	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
13	Kab. Magetan	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
14	Kab. Malang	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
15	Kab. Mojokerto	70.951.937	2.364.711	73.316.648
16	Kab. Nganjuk	70.951.937	2.364.711	73.316.648
17	Kab. Ngawi	70.951.937	2.364.711	73.316.648
18	Kab. Pacitan	70.951.937	2.364.711	73.316.648
19	Kab. Pamekasan	70.951.937	2.364.711	73.316.648
20	Kab. Pasuruan	70.951.937	2.364.711	73.316.648
21	Kab. Ponorogo	70.951.937	2.364.711	73.316.648
22	Kab. Probolinggo	70.951.937	2.364.711	73.316.648
23	Kab. Sampang	70.951.937	2.364.711	73.316.648
24	Kab. Sidoarjo	70.951.937	2.364.711	73.316.648
25	Kab. Situbondo	70.951.937	2.364.711	73.316.648
26	Kab. Sumenep	70.951.937	2.364.711	73.316.648
27	Kab. Trenggalek	70.951.937	2.364.711	73.316.648
28	Kab. Tuban	81.284.276	2.709.123	83.993.399
29	Kab. Tulungagung	70.951.937	2.364.711	73.316.648
30	Kota Blitar	70.951.937	2.364.711	73.316.648
31	Kota Kediri	70.951.937	2.364.711	73.316.648
32	Kota Madiun	70.951.937	2.364.711	73.316.648



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
15	Kab. Mojokerto	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
16	Kab. Nganjuk	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
17	Kab. Ngawi	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
18	Kab. Pacitan	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
19	Kab. Pamekasan	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
20	Kab. Pasuruan	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
21	Kab. Ponorogo	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
22	Kab. Probolinggo	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
23	Kab. Sampang	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
24	Kab. Sidoarjo	18.814.059	312.348	19.126.407	92.443.055
25	Kab. Situbondo	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
26	Kab. Sumenep	13.108.502	217.255	13.325.757	86.642.405
27	Kab. Trenggalek	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
28	Kab. Tuban	7.933.830	131.010	8.064.840	92.058.239
29	Kab. Tulungagung	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
30	Kota Blitar	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
31	Kota Kediri	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
32	Kota Madiun	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
33	Kota Malang	70.951.937	2.364.711	73.316.648
34	Kota Mojokerto	70.951.937	2.364.711	73.316.648
35	Kota Pasuruan	70.951.937	2.364.711	73.316.648
36	Kota Probolinggo	70.951.937	2.364.711	73.316.648
37	Kota Surabaya	70.951.937	2.364.711	73.316.648
38	Kota Batu	70.951.937	2.364.711	73.316.648
XI	Provinsi Kalimantan Tengah	50.987	1.700	52.687
1	Kab. Barito Selatan	7.844	261	8.105
2	Kab. Barito Utara	101.973	3.399	105.372
3	Kab. Kapuas	7.844	261	8.105
4	Kab. Kotawaringin Barat	7.844	261	8.105
5	Kab. Kotawaringin Timur	7.844	261	8.105
6	Kota Palangkaraya	7.844	261	8.105
7	Kab. Katingan	7.844	261	8.105
8	Kab. Seruyan	7.844	261	8.105
9	Kab. Sukamara	7.844	261	8.105
10	Kab. Lamandau	7.844	261	8.105
11	Kab. Gunung Mas	7.844	261	8.105



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
33	Kota Malang	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
34	Kota Mojokerto	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
35	Kota Pasuruan	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
36	Kota Probolinggo	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
37	Kota Surabaya	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
38	Kota Batu	7.933.830	131.010	8.064.840	81.381.488
XI	Provinsi Kalimantan Tengah	303.897	5.159	309.056	361.743
1	Kab. Barito Selatan	46.753	779	47.532	55.637
2	Kab. Barito Utara	607.793	10.130	617.923	723.295
3	Kab. Kapuas	46.753	779	47.532	55.637
4	Kab. Kotawaringin Barat	46.753	779	47.532	55.637
5	Kab. Kotawaringin Timur	46.753	779	47.532	55.637
6	Kota Palangkaraya	46.753	779	47.532	55.637
7	Kab. Katingan	46.753	779	47.532	55.637
8	Kab. Seruyan	46.753	779	47.532	55.637
9	Kab. Sukamara	46.753	779	47.532	55.637
10	Kab. Lamandau	46.753	779	47.532	55.637
11	Kab. Gunung Mas	46.753	779	47.532	55.637



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
12	Kab. Pulang Pisau	7.844	261	8.105
13	Kab. Murung Raya	7.844	261	8.105
14	Kab. Barito Timur	7.844	261	8.105
XII	Provinsi Kalimantan Selatan	7.564.050	252.135	7.816.185
1	Kab. Banjar	1.260.675	42.023	1.302.698
2	Kab. Barito Kuala	1.260.675	42.023	1.302.698
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.260.675	42.023	1.302.698
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.260.675	42.023	1.302.698
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.260.675	42.023	1.302.698
6	Kab. Kotabaru	1.260.675	42.023	1.302.698
7	Kab. Tabalong	13.222.088	440.736	13.662.824
8	Kab. Tanah Laut	1.260.675	42.023	1.302.698
9	Kab. Tapin	1.260.675	42.023	1.302.698
10	Kota Banjarbaru	1.260.675	42.023	1.302.698
11	Kota Banjarmasin	1.260.675	42.023	1.302.698
12	Kab. Balangan	3.166.688	105.556	3.272.244
13	Kab. Tanah Bumbu	1.260.675	42.023	1.302.698
XIII	Provinsi Kalimantan Timur	342.336.063	11.509.240	353.845.303



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
12	Kab. Pulang Pisau	46.753	779	47.532	55.637
13	Kab. Murung Raya	46.753	779	47.532	55.637
14	Kab. Barito Timur	46.753	779	47.532	55.637
XII	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	7.816.185
1	Kab. Banjar	-	-	-	1.302.698
2	Kab. Barito Kuala	-	-	-	1.302.698
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-	-	1.302.698
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-	1.302.698
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	1.302.698
6	Kab. Kotabaru	-	-	-	1.302.698
7	Kab. Tabalong	-	-	-	13.662.824
8	Kab. Tanah Laut	-	-	-	1.302.698
9	Kab. Tapin	-	-	-	1.302.698
10	Kota Banjarbaru	-	-	-	1.302.698
11	Kota Banjarmasin	-	-	-	1.302.698
12	Kab. Balangan	-	-	-	3.272.244
13	Kab. Tanah Bumbu	-	-	-	1.302.698
XIII	Provinsi Kalimantan Timur	729.381.024	12.308.777	741.689.801	1.095.535.104



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
1	Kab. Berau	72.806.783	2.417.089	75.223.872
2	Kab. Kutai Kartanegara	412.941.450	13.754.911	426.696.361
3	Kab. Kutai Barat	72.806.783	2.417.089	75.223.872
4	Kab. Kutai Timur	75.873.438	2.519.311	78.392.749
5	Kab. Paser	72.806.783	2.417.089	75.223.872
6	Kota Balikpapan	72.806.783	2.417.089	75.223.872
7	Kota Bontang	72.806.783	2.417.089	75.223.872
8	Kota Samarinda	76.770.780	2.549.222	79.320.002
9	Kab. Penajam Paser Utara	72.806.783	2.417.089	75.223.872
10	Kab. Mahakam Ulu	72.806.783	2.417.089	75.223.872
XIV	Provinsi Sulawesi Tengah	11.579.742	385.991	11.965.733
1	Kab. Banggai	23.159.484	771.983	23.931.467
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.929.957	64.332	1.994.289
3	Kab. Buol	1.929.957	64.332	1.994.289
4	Kab. Toli-Toli	1.929.957	64.332	1.994.289
5	Kab. Donggala	1.929.957	64.332	1.994.289
6	Kab. Morowali	1.929.957	64.332	1.994.289
7	Kab. Poso	1.929.957	64.332	1.994.289



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
1	Kab. Berau	151.922.996	2.516.807	154.439.803	229.663.675
2	Kab. Kutai Kartanegara	616.146.368	10.253.864	626.400.232	1.053.096.593
3	Kab. Kutai Barat	151.922.996	2.516.807	154.439.803	229.663.675
4	Kab. Kutai Timur	151.922.996	2.516.807	154.439.803	232.832.552
5	Kab. Paser	151.922.996	2.516.807	154.439.803	229.663.675
6	Kota Balikpapan	151.922.996	2.516.807	154.439.803	229.663.675
7	Kota Bontang	154.106.804	2.553.204	156.660.008	231.883.880
8	Kota Samarinda	152.773.860	2.530.988	155.304.848	234.624.850
9	Kab. Penajam Paser Utara	168.407.451	2.791.548	171.198.999	246.422.871
10	Kab. Mahakam Ulu	151.922.996	2.516.807	154.439.803	229.663.675
XIV	Provinsi Sulawesi Tengah	78.540.581	1.309.010	79.849.591	91.815.324
1	Kab. Banggai	157.081.163	2.618.019	159.699.182	183.630.649
2	Kab. Banggai Kepulauan	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
3	Kab. Buol	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
4	Kab. Toli-Toli	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
5	Kab. Donggala	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
6	Kab. Morowali	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
7	Kab. Poso	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
8	Kota Palu	1.929.957	64.332	1.994.289
9	Kab. Parigi Moutong	1.929.957	64.332	1.994.289
10	Kab. Tojo Una Una	1.929.957	64.332	1.994.289
11	Kab. Sigi	1.929.957	64.332	1.994.289
12	Kab. Banggai Laut	1.929.957	64.332	1.994.289
13	Kab. Morowali Utara	1.929.957	64.332	1.994.289
XV	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-
1	Kab. Bantaeng	-	-	-
2	Kab. Barru	-	-	-
3	Kab. Bone	-	-	-
4	Kab. Bulukumba	-	-	-
5	Kab. Enrekang	-	-	-
6	Kab. Gowa	-	-	-
7	Kab. Jeneponto	-	-	-
8	Kab. Luwu	-	-	-
9	Kab. Luwu Utara	-	-	-
10	Kab. Maros	-	-	-
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
8	Kota Palu	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
9	Kab. Parigi Moutong	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
10	Kab. Tojo Una Una	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
11	Kab. Sigi	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
12	Kab. Banggai Laut	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
13	Kab. Morowali Utara	13.090.097	218.168	13.308.265	15.302.554
XV	Provinsi Sulawesi Selatan	30.969.003	516.150	31.485.153	31.485.153
1	Kab. Bantaeng	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
2	Kab. Barru	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
3	Kab. Bone	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
4	Kab. Bulukumba	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
5	Kab. Enrekang	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
6	Kab. Gowa	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
7	Kab. Jeneponto	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
8	Kab. Luwu	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
9	Kab. Luwu Utara	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
10	Kab. Maros	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
12	Kota Palopo	-	-	-
13	Kab. Luwu Timur	-	-	-
14	Kab. Pinrang	-	-	-
15	Kab. Sinjai	-	-	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-
18	Kab. Soppeng	-	-	-
19	Kab. Takalar	-	-	-
20	Kab. Tana Toraja	-	-	-
21	Kab. Wajo	-	-	-
22	Kota Pare-pare	-	-	-
23	Kota Makassar	-	-	-
24	Kab. Toraja Utara	-	-	-
XVI	Provinsi Maluku	163.759	5.459	169.218
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	32.752	1.092	33.844
2	Kab. Maluku Tengah	32.752	1.092	33.844
3	Kab. Maluku Tenggara	32.752	1.092	33.844
4	Kab. Buru	32.752	1.092	33.844



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
12	Kota Palopo	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
13	Kab. Luwu Timur	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
14	Kab. Pinrang	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
15	Kab. Sinjai	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
16	Kab. Kepulauan Selayar	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
17	Kab. Sidenreng Rappang	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
18	Kab. Soppeng	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
19	Kab. Takalar	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
20	Kab. Tana Toraja	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
21	Kab. Wajo	61.938.007	1.032.300	62.970.307	62.970.307
22	Kota Pare-pare	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
23	Kota Makassar	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
24	Kab. Toraja Utara	2.692.957	44.883	2.737.840	2.737.840
XVI	Provinsi Maluku	-	-	-	169.218
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-	33.844
2	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	33.844
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	33.844
4	Kab. Buru	-	-	-	33.844



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
5	Kota Ambon	32.752	1.092	33.844
6	Kab. Seram Bagian Barat	32.752	1.092	33.844
7	Kab. Seram Bagian Timur	327.518	10.917	338.435
8	Kab. Kepulauan Aru	32.752	1.092	33.844
9	Kota Tual	32.752	1.092	33.844
10	Kab. Maluku Barat Daya	32.752	1.092	33.844
11	Kab. Buru Selatan	32.752	1.092	33.844
XVII	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-
1	Kab. Bangka	-	-	-
2	Kab. Belitung	-	-	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	-	-	-
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-
7	Kab. Belitung Timur	-	-	-
XVIII	Provinsi Kepulauan Riau	121.528.129	4.056.234	125.584.363
1	Kab. Natuna	163.179.920	5.438.574	168.618.494
2	Kab. Kepulauan Anambas	106.388.140	3.545.515	109.933.655



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
5	Kota Ambon	-	-	-	33.844
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	33.844
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	338.435
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	33.844
9	Kota Tual	-	-	-	33.844
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-	33.844
11	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-
XVII	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-
1	Kab. Bangka	-	-	-	-
2	Kab. Belitung	-	-	-	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-
7	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-
		170.655.749	2.863.810	173.519.559	299.103.922
XVIII	Provinsi Kepulauan Riau	175.441.321	2.921.230	178.362.551	346.981.045
1	Kab. Natuna	119.434.305	1.987.779	121.422.084	231.355.739
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,5%	SUB JUMLAH
3	Kab. Karimun	40.131.063	1.336.945	41.468.008
4	Kota Batam	40.131.063	1.336.945	41.468.008
5	Kota Tanjung Pinang	40.131.063	1.336.945	41.468.008
6	Kab. Lingga	40.131.063	1.336.945	41.468.008
7	Kab. Bintan	40.131.063	1.336.945	41.468.008
XIX	Provinsi Papua Barat	34.927.093	-	34.927.093
	DBH SDA Migas dalam rangka Otsus	-	-	640.330.040
1	Kab. Fak Fak	5.821.182	-	5.821.182
2	Kab. Manokwari	5.821.182	-	5.821.182
3	Kab. Sorong	44.076.005	-	44.076.005
4	Kota Sorong	5.821.182	-	5.821.182
5	Kab. Raja Ampat	5.821.182	-	5.821.182
6	Kab. Sorong Selatan	5.821.182	-	5.821.182
7	Kab. Teluk Bintuni	31.599.364	-	31.599.364
8	Kab. Teluk Wondama	5.821.182	-	5.821.182
9	Kab. Kaimana	5.821.182	-	5.821.182
10	Kab. Maybrat	5.821.182	-	5.821.182
11	Kab. Tambrau	5.821.182	-	5.821.182



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
3	Kab. Karimun	54.092.787	898.754	54.991.541	96.459.549
4	Kota Batam	54.092.787	898.754	54.991.541	96.459.549
5	Kota Tanjung Pinang	54.092.787	898.754	54.991.541	96.459.549
6	Kab. Lingga	54.092.787	898.754	54.991.541	96.459.549
7	Kab. Bintan	54.092.787	898.754	54.991.541	96.459.549
XIX	Provinsi Papua Barat	218.834.393	-	218.834.393	253.761.486
	DBH SDA Migas dalam rangka Otsus	-	-	1.458.895.954	2.099.225.994
1	Kab. Fak Fak	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
2	Kab. Manokwari	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
3	Kab. Sorong	40.398.469	-	40.398.469	84.474.474
4	Kota Sorong	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
5	Kab. Raja Ampat	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
6	Kab. Sorong Selatan	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
7	Kab. Teluk Bintuni	433.742.716	-	433.742.716	465.342.080
8	Kab. Teluk Wondama	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
9	Kab. Kaimana	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
10	Kab. Maybrat	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
11	Kab. Tambrau	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		30%	0,5%	SUB JUMLAH	
12	Kab. Manokwari Selatan	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
13	Kab. Pegunungan Arfak	36.472.399	-	36.472.399	42.293.581
XX	Provinsi Kalimantan Utara	3.083.866	51.398	3.135.264	28.024.619
1	Kab. Bulungan	3.281.343	54.689	3.336.032	31.671.959
2	Kab. Malinau	1.541.933	25.699	1.567.632	14.012.310
3	Kab. Nunukan	2.447.821	40.797	2.488.618	22.684.115
4	Kota Tarakan	3.522.435	58.707	3.581.142	29.717.787
5	Kab. Tana Tidung	1.541.933	25.699	1.567.632	14.012.310
TOTAL		10.766.187.888	159.560.881	12.557.338.000	30.941.378.050

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Negara Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hubungan Perundang-undangan,



Hayati Lestari

Hayati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
TRANSFER KE DAERAH	756.772.533.532
I. Dana Perimbangan	724.592.590.224
A. Dana Transfer Umum	524.223.746.621
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	106.350.163.929
a. DBH Pajak	52.438.615.165
i. Pajak Penghasilan	31.336.017.770
ii. Pajak Bumi dan Bangunan	17.925.485.546
iii. Cukai Hasil Tembakau	3.177.111.849
b. DBH Sumber Daya Alam	53.911.548.764
i. Minyak Bumi dan Gas Bumi	30.941.378.050
ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	19.968.579.310
iii. Kehutanan	1.798.235.604
iv. Perikanan	500.648.736
v. Panas Bumi	702.707.064
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	417.873.582.692
a. DAU Murni Formula	414.873.582.692
b. DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000
B. Dana Transfer Khusus	200.368.843.603
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.326.700.000
a. Pendidikan	16.859.000.000
b. Kesehatan dan Keluarga Berencana	19.875.400.000
c. Air Minum	2.070.750.000
d. Sanitasi	2.000.000.000
e. Perumahan dan Pemukiman	1.126.460.000
f. Pasar	1.772.690.000
g. Industri kecil dan menengah	540.000.000
h. Pertanian	1.900.000.000
i. Kelautan dan Perikanan	905.200.000
j. Pariwisata	1.003.400.000
k. Jalan	16.243.600.000
l. Irigasi	3.000.000.000
m. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	530.200.000
n. Transportasi	1.500.000.000
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	131.042.143.603



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.226.860.000
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.475.500.000
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.548.500.000
d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	56.867.226.628
e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD	914.100.000
f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus	2.306.445.422
g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	129.940.000
h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB)	12.226.000.000
i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	200.000.000
j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	907.500.000
k. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	213.159.300
l. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	26.912.253
II. Dana Insentif Daerah	10.000.000.000
III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	22.179.943.308
A. Dana Otonomi Khusus (Otsus)	20.979.943.308
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357.471.654
a. Provinsi Papua	5.850.230.158
b. Provinsi Papua Barat	2.507.241.496
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.357.471.654
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4.265.000.000
a. Provinsi Papua	2.824.446.537



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
b. Provinsi Papua Barat	1.440.553.463
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.200.000.000
DANA DESA	70.000.000.000
J U M L A H	826.772.533.532

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Anggaran dan Perundang-undangan,



[Handwritten Signature]
Hayati Wati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Provinsi Aceh	-	9.099.517	419.209	54.221.483
1	Kab. Aceh Barat	3.753.163	3.041.486	-	1.358.876
2	Kab. Aceh Besar	3.753.163	-	914.994	1.890.877
3	Kab. Aceh Selatan	3.753.163	153.985	-	1.822.727
4	Kab. Aceh Singkil	3.753.163	7.976.737	-	1.473.314
5	Kab. Aceh Tengah	3.753.163	17.218	623.461	1.698.693
6	Kab. Aceh Tenggara	3.753.163	-	-	1.735.482
7	Kab. Aceh Timur	3.753.163	6.177.009	-	16.266.592
8	Kab. Aceh Utara	3.753.163	1.736.215	-	66.543.496
9	Kab. Bireuen	3.753.163	548.401	-	3.076.811
10	Kab. Pidie	3.753.163	-	-	1.824.257
11	Kab. Simeulue	3.753.163	-	-	1.551.590
12	Kota Banda Aceh	3.753.163	-	-	1.077.974
13	Kota Sabang	3.753.163	-	-	1.148.754
14	Kota Langsa	3.753.163	1.167.927	-	1.231.063



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
I	Provinsi Aceh	-	638.495	6.255	64.384.959
1	Kab. Aceh Barat	-	661.124	1.088	5.062.574
2	Kab. Aceh Besar	-	1.092.233	1.088	3.899.192
3	Kab. Aceh Selatan	-	-	1.088	1.977.800
4	Kab. Aceh Singkil	-	-	1.088	9.451.139
5	Kab. Aceh Tengah	-	-	1.088	2.340.460
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	1.088	1.736.570
7	Kab. Aceh Timur	-	-	1.088	22.444.689
8	Kab. Aceh Utara	-	-	1.088	68.280.799
9	Kab. Bireuen	-	-	1.088	3.626.300
10	Kab. Pidie	-	438.084	1.088	2.263.429
11	Kab. Simeulue	-	-	1.088	1.552.678
12	Kota Banda Aceh	-	-	1.088	1.079.062
13	Kota Sabang	-	-	1.088	1.149.842
14	Kota Langsa	-	-	1.088	2.400.078



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Provinsi Aceh	505.529	20.378	2.259.228	-
1	Kab. Aceh Barat	126.729	-	42.465	-
2	Kab. Aceh Besar	-	33.359	59.090	-
3	Kab. Aceh Selatan	6.416	-	56.960	-
4	Kab. Aceh Singkil	332.364	-	46.041	-
5	Kab. Aceh Tengah	717	22.730	53.084	-
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	54.234	-
7	Kab. Aceh Timur	257.375	-	508.331	-
8	Kab. Aceh Utara	72.342	-	2.079.484	-
9	Kab. Bireuen	22.850	-	96.150	-
10	Kab. Pidie	-	-	57.008	-
11	Kab. Simeulue	-	-	48.487	-
12	Kota Banda Aceh	-	-	33.687	-
13	Kota Sabang	-	-	35.899	-
14	Kota Langsa	48.664	-	38.471	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
I	Provinsi Aceh	26.604	261	2.812.000	67.196.959
1	Kab. Aceh Barat	20.660	34	189.888	9.005.625
2	Kab. Aceh Besar	34.132	34	126.615	7.778.970
3	Kab. Aceh Selatan	-	34	63.410	5.794.373
4	Kab. Aceh Singkil	-	34	378.439	13.582.741
5	Kab. Aceh Tengah	-	34	76.565	6.170.188
6	Kab. Aceh Tenggara	-	34	54.268	5.544.001
7	Kab. Aceh Timur	-	34	765.740	26.963.592
8	Kab. Aceh Utara	-	34	2.151.860	74.185.822
9	Kab. Bireuen	-	34	119.034	7.498.497
10	Kab. Pidie	13.690	34	70.732	6.087.324
11	Kab. Simeulue	-	34	48.521	5.354.362
12	Kota Banda Aceh	-	34	33.721	4.865.946
13	Kota Sabang	-	34	35.933	4.938.938
14	Kota Langsa	-	34	87.169	6.240.410



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Kota Lhokseumawe	3.753.163	-	-	21.668.146
16	Kab. Gayo Lues	3.753.163	-	138.378	2.064.203
17	Kab. Aceh Barat Daya	3.753.163	908.198	-	1.299.936
18	Kab. Aceh Jaya	3.753.163	726.748	-	1.665.910
19	Kab. Nagan Raya	3.753.163	6.001.587	-	1.606.556
20	Kab. Aceh Tamiang	3.753.163	6.328.759	-	82.155.429
21	Kab. Bener Meriah	3.753.163	-	-	1.347.408
22	Kab. Pidie Jaya	3.753.163	16.062	-	1.278.796
23	Kota Subulussalam	3.753.163	1.597.738	-	1.099.042
II	Provinsi Sumatera Utara	-	78.009.338	2.601.186	45.233.486
1	Kab. Asahan	3.753.163	34.048.854	38.977	2.543.575
2	Kab. Dairi	3.753.163	37.773	192.739	1.697.121
3	Kab. Deli Serdang	3.753.163	21.081.043	-	8.242.781
4	Kab. Karo	3.753.163	78.226	-	1.515.327
5	Kab. Labuhanbatu	3.753.163	30.282.913	798.801	2.447.088



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
15	Kota Lhokseumawe	-	-	1.088	21.669.234
16	Kab. Gayo Lues	-	-	1.088	2.203.669
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	262.941	1.088	2.472.163
18	Kab. Aceh Jaya	-	-	1.088	2.393.746
19	Kab. Nagan Raya	-	99.600	1.088	7.708.831
20	Kab. Aceh Tamiang	-	-	1.088	88.485.276
21	Kab. Bener Meriah	-	-	1.088	1.348.496
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	1.088	1.295.946
23	Kota Subulussalam	-	-	1.088	2.697.868
II	Provinsi Sumatera Utara	3.755.976	3.464.478	10.696	133.075.160
1	Kab. Asahan	-	-	1.088	36.632.494
2	Kab. Dairi	-	858.984	1.088	2.787.705
3	Kab. Deli Serdang	105.639	-	1.088	29.430.551
4	Kab. Karo	640.873	-	1.088	2.235.514
5	Kab. Labuhanbatu	-	-	1.088	33.529.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
15	Kota Lhokseumawe	-	-	677.130	-
16	Kab. Gayo Lues	-	5.045	64.506	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	37.842	-	40.623	-
18	Kab. Aceh Jaya	30.281	-	52.060	-
19	Kab. Nagan Raya	250.066	-	50.205	-
20	Kab. Aceh Tamiang	263.698	-	2.567.357	-
21	Kab. Bener Meriah	-	-	42.106	-
22	Kab. Pidie Jaya	669	-	39.962	-
23	Kota Subulussalam	66.572	-	34.345	-
II	Provinsi Sumatera Utara	866.770	25.289	376.946	31.300
1	Kab. Asahan	1.797.023	1.800	100.683	-
2	Kab. Dairi	1.994	8.901	67.178	-
3	Kab. Deli Serdang	1.112.611	-	326.277	4.182
4	Kab. Karo	4.129	-	59.982	25.368
5	Kab. Labuhanbatu	1.598.265	36.889	96.864	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
15	Kota Lhokseumawe	-	34	677.164	26.099.561
16	Kab. Gayo Lues	-	34	69.585	6.026.417
17	Kab. Aceh Barat Daya	8.217	34	86.716	6.312.042
18	Kab. Aceh Jaya	-	34	82.375	6.229.284
19	Kab. Nagan Raya	3.113	34	303.418	11.765.412
20	Kab. Aceh Tamiang	-	34	2.831.089	95.069.528
21	Kab. Bener Meriah	-	34	42.140	5.143.799
22	Kab. Pidie Jaya	-	34	40.665	5.089.774
23	Kota Subulussalam	-	34	100.951	6.551.982
II	Provinsi Sumatera Utara	28.871	89	1.329.265	134.404.425
1	Kab. Asahan	-	43	1.899.549	42.285.206
2	Kab. Dairi	34.001	43	112.117	6.652.985
3	Kab. Deli Serdang	-	43	1.443.113	34.626.827
4	Kab. Karo	-	43	89.522	6.078.199
5	Kab. Labuhanbatu	-	43	1.732.061	39.015.114



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
			Perkebunan	Perhutanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kab. Langkat	3.753.163	28.127.541	-	113.580.610
7	Kab. Mandailing Natal	3.753.163	7.723.027	499.167	2.590.780
8	Kab. Nias	3.753.163	-	-	862.131
9	Kab. Simalungun	3.753.163	37.188.247	1.015.668	3.031.439
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.753.163	4.037.168	717.681	1.926.976
11	Kab. Tapanuli Tengah	3.753.163	3.618.877	856.419	1.923.239
12	Kab. Tapanuli Utara	3.753.163	-	1.005.218	1.802.043
13	Kab. Toba Samosir	3.753.163	99.912	-	1.321.153
14	Kota Binjai	3.753.163	659.457	-	3.781.641
15	Kota Medan	3.753.163	-	-	6.419.414
16	Kota Pematang Siantar	3.753.163	40.048	-	894.754
17	Kota Sibolga	3.753.163	-	-	910.549
18	Kota Tanjung Balai	3.753.163	15.119.527	-	908.035
19	Kota Tebing Tinggi	3.753.163	-	-	912.510
20	Kota Padang Sidempuan	3.753.163	135.632	-	1.301.168



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
6	Kab. Langkat	57.104	-	1.088	141.766.343
7	Kab. Mandailing Natal	1.425.254	483.238	1.088	12.722.554
8	Kab. Nias	-	-	1.088	863.219
9	Kab. Simalungun	1.043	-	1.088	41.237.485
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.563.240	11.899.977	1.088	22.146.130
11	Kab. Tapanuli Tengah	151.698	107.974	1.304	6.659.511
12	Kab. Tapanuli Utara	4.698.967	377.484	1.088	7.884.800
13	Kab. Toba Samosir	-	-	1.088	1.422.153
14	Kota Binjai	-	-	1.088	4.442.186
15	Kota Medan	-	-	2.088	6.421.502
16	Kota Pematang Siantar	-	-	1.088	935.890
17	Kota Sibolga	-	-	1.700	912.249
18	Kota Tanjung Balai	-	-	6.143	16.033.705
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	1.088	913.598
20	Kota Padang Sidempuan	211.645	67.799	1.088	1.717.332



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Kab. Langkat	1.484.509	-	4.495.899	2.260
7	Kab. Mandailing Natal	407.604	23.052	102.552	56.416
8	Kab. Nias	-	-	34.126	-
9	Kab. Simalungun	1.962.713	46.904	119.994	41
10	Kab. Tapanuli Selatan	213.073	33.143	76.276	141.045
11	Kab. Tapanuli Tengah	190.996	39.550	76.128	6.005
12	Kab. Tapanuli Utara	-	46.422	71.331	186.001
13	Kab. Toba Samosir	5.273	-	52.296	-
14	Kota Binjai	34.805	-	149.690	-
15	Kota Medan	-	-	254.102	-
16	Kota Pematang Siantar	2.114	-	35.417	-
17	Kota Sibolga	-	-	36.043	-
18	Kota Tanjung Balai	797.975	-	35.943	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	36.120	-
20	Kota Padang Sidempuan	7.158	-	51.505	8.378



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
6	Kab. Langkat	-	43	5.982.711	151.502.217
7	Kab. Mandailing Natal	19.128	43	608.795	17.084.512
8	Kab. Nias	-	43	34.169	4.650.551
9	Kab. Simalungun	-	43	2.129.695	47.120.343
10	Kab. Tapanuli Selatan	471.041	43	934.621	26.833.914
11	Kab. Tapanuli Tengah	4.274	52	317.005	10.729.679
12	Kab. Tapanuli Utara	14.942	43	318.739	11.956.702
13	Kab. Toba Samosir	-	43	57.612	5.232.928
14	Kota Binjai	-	43	184.538	8.379.887
15	Kota Medan	-	83	254.185	10.428.850
16	Kota Pematang Siantar	-	43	37.574	4.726.627
17	Kota Sibolga	-	67	36.110	4.701.522
18	Kota Tanjung Balai	-	243	834.161	20.621.029
19	Kota Tebing Tinggi	-	43	36.163	4.702.924
20	Kota Padang Sidempuan	2.684	43	69.768	5.540.263



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Kab. Pakpak Bharat	3.753.163	65.221	105.998	1.510.491
22	Kab. Nias Selatan	3.753.163	-	1.397.722	2.423.967
23	Kab. Humbang Hasundutan	3.753.163	-	-	1.741.107
24	Kab. Serdang Bedagai	3.753.163	30.710.020	-	2.211.378
25	Kab. Samosir	3.753.163	-	-	1.137.558
26	Kab. Batu Bara	3.753.163	10.590.187	-	1.395.360
27	Kab. Padang Lawas	3.753.163	6.319.161	1.293.959	3.389.420
28	Kab. Padang Lawas Utara	3.753.163	5.406.703	461.566	1.774.582
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.753.163	51.191.271	1.350.321	1.753.641
30	Kab. Labuhanbatu Utara	3.753.163	25.419.261	670.508	2.148.383
31	Kab. Nias Utara	3.753.163	57.283	-	1.213.205
32	Kab. Nias Barat	3.753.163	-	-	839.438
33	Kota Gunungsitoli	3.753.163	-	-	783.085
III	Provinsi Sumatera Barat	-	10.041.583	822.685	7.094.736
1	Kab. Limapuluh Kota	3.753.163	452.655	-	1.907.598



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah (10) = (4+5+6+7+8+9)
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Kab. Pakpak Bharat	-	62.459	1.088	1.745.257
22	Kab. Nias Selatan	-	-	1.088	3.822.777
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	1.088	1.742.195
24	Kab. Serdang Bedagai	-	-	1.088	32.922.486
25	Kab. Samosir	-	-	1.088	1.138.646
26	Kab. Batu Bara	-	-	1.088	11.986.635
27	Kab. Padang Lawas	-	-	1.088	11.003.628
28	Kab. Padang Lawas Utara	4.168.440	-	1.088	11.812.379
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	1.088	54.296.321
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	1.088	28.239.240
31	Kab. Nias Utara	-	-	1.088	1.271.576
32	Kab. Nias Barat	-	-	1.088	840.526
33	Kota Gunungsitoli	-	-	1.088	784.173
III	Provinsi Sumatera Barat	120.901	704.082	5.167	18.789.154
1	Kab. Limapuluh Kota	-	200.930	1.088	2.562.271



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
21	Kab. Pakpak Bharat	3.442	4.895	59.790	-
22	Kab. Nias Selatan	-	64.548	95.949	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	68.919	-
24	Kab. Serdang Bedagai	1.620.807	-	87.534	-
25	Kab. Samosir	-	-	45.028	-
26	Kab. Batu Bara	558.927	-	55.233	-
27	Kab. Padang Lawas	333.511	59.756	134.165	-
28	Kab. Padang Lawas Utara	285.354	21.315	70.244	165.001
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	2.701.762	62.359	69.415	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	1.341.572	30.964	85.040	-
31	Kab. Nias Utara	3.023	-	48.023	-
32	Kab. Nias Barat	-	-	33.228	-
33	Kota Gunungsitoli	-	-	30.997	-
III	Provinsi Sumatera Barat	557.866	68.557	394.152	6.717
1	Kab. Limapuluh Kota	18.861	-	52.989	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
21	Kab. Pakpak Bharat	2.472	43	70.642	5.569.062
22	Kab. Nias Selatan	-	43	160.540	7.736.480
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	43	68.962	5.564.320
24	Kab. Serdang Bedagai	-	43	1.708.384	38.384.033
25	Kab. Samosir	-	43	45.071	4.936.880
26	Kab. Batu Bara	-	43	614.203	16.354.001
27	Kab. Padang Lawas	-	43	527.475	15.284.266
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	43	541.957	16.107.499
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	43	2.833.579	60.883.063
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	43	1.457.619	33.450.022
31	Kab. Nias Utara	-	43	51.089	5.075.828
32	Kab. Nias Barat	-	43	33.271	4.626.960
33	Kota Gunungsitoli	-	43	31.040	4.568.376
III	Provinsi Sumatera Barat	39.116	287	1.066.695	19.855.849
1	Kab. Limapuluh Kota	5.581	30	77.461	6.392.895



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kab. Agam	3.753.163	2.676.266	-	1.795.264
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.753.163	-	2.314.473	2.195.906
4	Kab. Padang Pariaman	3.753.163	-	-	1.579.935
5	Kab. Pasaman	3.753.163	-	-	1.720.413
6	Kab. Pesisir Selatan	3.753.163	6.281.433	-	2.585.889
7	Kab. Sijunjung	3.753.163	476.409	338.620	1.967.990
8	Kab. Solok	3.753.163	196.192	-	1.862.831
9	Kab. Tanah Datar	3.753.163	82.414	-	1.367.320
10	Kota Bukit Tinggi	3.753.163	-	-	558.208
11	Kota Padang Panjang	3.753.163	-	-	700.780
12	Kota Padang	3.753.163	290.989	-	2.178.852
13	Kota Payakumbuh	3.753.163	-	-	637.873
14	Kota Sawahlunto	3.753.163	-	-	711.419
15	Kota Solok	3.753.163	-	-	801.479
16	Kota Pariaman	3.753.163	-	-	1.088.317



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
2	Kab. Agam	-	-	1.088	4.472.618
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	1.088	4.511.467
4	Kab. Padang Pariaman	-	-	1.088	1.581.023
5	Kab. Pasaman	-	-	1.088	1.721.501
6	Kab. Pesisir Selatan	32.366	-	1.088	8.900.776
7	Kab. Sijunjung	-	38.484	1.088	2.822.591
8	Kab. Solok	-	1.409	1.088	2.061.520
9	Kab. Tanah Datar	-	-	1.088	1.450.822
10	Kota Bukit Tinggi	-	-	1.088	559.296
11	Kota Padang Panjang	-	-	1.088	701.868
12	Kota Padang	-	1.901.238	1.088	4.372.167
13	Kota Payakumbuh	-	-	1.088	638.961
14	Kota Sawahlunto	-	623.594	1.088	1.336.101
15	Kota Solok	-	-	1.088	802.567
16	Kota Pariaman	-	-	1.088	1.089.405



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Kab. Agam	111.511	-	49.868	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	64.291	60.997	-
4	Kab. Padang Pariaman	-	-	43.887	-
5	Kab. Pasaman	-	-	47.789	-
6	Kab. Pesisir Selatan	261.726	-	71.830	899
7	Kab. Sijunjung	19.850	9.406	54.666	-
8	Kab. Solok	8.175	-	51.745	-
9	Kab. Tanah Datar	3.434	-	37.981	-
10	Kota Bukit Tinggi	-	-	15.506	-
11	Kota Padang Panjang	-	-	19.466	-
12	Kota Padang	12.125	-	60.524	-
13	Kota Payakumbuh	-	-	17.719	-
14	Kota Sawahlunto	-	-	19.762	-
15	Kota Solok	-	-	22.263	-
16	Kota Pariaman	-	-	30.231	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
2	Kab. Agam	-	30	161.409	8.387.190
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	30	125.318	8.389.948
4	Kab. Padang Pariaman	-	30	43.917	5.378.103
5	Kab. Pasaman	-	30	47.819	5.522.483
6	Kab. Pesisir Selatan	-	30	334.485	12.988.424
7	Kab. Sijunjung	1.069	30	85.021	6.660.775
8	Kab. Solok	39	30	59.989	5.874.672
9	Kab. Tanah Datar	-	30	41.445	5.245.430
10	Kota Bukit Tinggi	-	30	15.536	4.327.995
11	Kota Padang Panjang	-	30	19.496	4.474.527
12	Kota Padang	52.812	30	125.491	8.250.821
13	Kota Payakumbuh	-	30	17.749	4.409.873
14	Kota Sawahlunto	17.322	30	37.114	5.126.378
15	Kota Solok	-	30	22.293	4.578.023
16	Kota Pariaman	-	30	30.261	4.872.829



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Kab. Pasaman Barat	3.753.163	12.809.085	-	1.963.809
18	Kab. Dharmasraya	3.753.163	8.352.659	136.521	1.299.476
19	Kab. Solok Selatan	3.753.163	8.548.228	501.126	1.455.587
IV	Provinsi Riau	-	50.604.423	15.554.418	650.510.191
1	Kab. Bengkalis	3.753.163	13.520.233	6.735.252	1.553.926.495
2	Kab. Indragiri Hilir	3.753.163	25.814.705	6.051.002	4.640.943
3	Kab. Indragiri Hulu	3.753.163	24.552.016	2.258.505	52.197.207
4	Kab. Kampar	3.753.163	32.383.342	5.718.771	187.057.853
5	Kab. Kuantan Singingi	3.753.163	11.964.635	4.037.481	2.578.983
6	Kab. Pelalawan	3.753.163	23.097.985	19.512.145	50.814.507
7	Kab. Rokan Hilir	3.753.163	21.253.875	1.442.984	214.649.787
8	Kab. Rokan Hulu	3.753.163	33.656.597	1.124.407	23.338.132
9	Kab. Siak	3.753.163	14.362.914	9.316.825	433.116.082
10	Kota Dumai	3.753.163	12.487	2.620.779	22.591.327
11	Kota Pekanbaru	3.753.163	1.598.579	33.481	14.938.368



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
17	Kab. Pasaman Barat	-	-	1.088	14.773.982
18	Kab. Dharmasraya	-	50.414	1.088	9.840.158
19	Kab. Solok Selatan	451.237	259	1.088	10.957.525
IV	Provinsi Riau	-	750.006	3.265	717.422.303
1	Kab. Bengkalis	-	-	1.088	1.574.183.068
2	Kab. Indragiri Hilir	-	-	1.088	36.507.738
3	Kab. Indragiri Hulu	-	271.056	1.088	79.279.872
4	Kab. Kampar	-	-	1.088	225.161.054
5	Kab. Kuantan Singingi	-	200.066	1.088	18.782.253
6	Kab. Pelalawan	-	-	1.088	93.425.725
7	Kab. Rokan Hilir	-	-	1.088	237.347.734
8	Kab. Rokan Hulu	-	-	1.088	58.120.224
9	Kab. Siak	-	28.243	1.094	456.825.158
10	Kota Dumai	-	-	1.088	25.225.681
11	Kota Pekanbaru	-	-	1.088	16.571.516



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	Kab. Pasaman Barat	533.712	-	54.550	-
18	Kab. Dharmasraya	348.027	3.792	36.097	-
19	Kab. Solok Selatan	356.176	13.920	40.433	12.534
IV	Provinsi Riau	2.249.085	604.894	21.683.673	-
1	Kab. Bengkalis	600.899	261.926	51.797.550	-
2	Kab. Indragiri Hilir	1.147.320	235.317	154.698	-
3	Kab. Indragiri Hulu	1.091.201	87.831	1.739.907	-
4	Kab. Kampar	1.439.260	222.397	6.235.262	-
5	Kab. Kuantan Singingi	531.762	157.013	85.966	-
6	Kab. Pelalawan	1.026.577	758.806	1.693.817	-
7	Kab. Rokan Hilir	944.617	56.116	7.154.993	-
8	Kab. Rokan Hulu	1.495.849	43.727	777.938	-
9	Kab. Siak	638.352	362.321	14.437.203	-
10	Kota Dumai	555	101.919	753.044	-
11	Kota Pekanbaru	71.048	1.302	497.946	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
17	Kab. Pasaman Barat	-	30	588.292	19.115.437
18	Kab. Dharmasraya	1.400	30	389.346	13.982.667
19	Kab. Solok Selatan	7	30	423.100	15.133.788
IV	Provinsi Riau	25.000	109	24.562.761	741.985.064
1	Kab. Bengkalis	-	36	52.660.411	1.630.596.642
2	Kab. Indragiri Hilir	-	36	1.537.371	41.798.272
3	Kab. Indragiri Hulu	9.035	36	2.928.010	85.961.045
4	Kab. Kampar	-	36	7.896.955	236.811.172
5	Kab. Kuantan Singingi	6.669	36	781.446	23.316.862
6	Kab. Pelalawan	-	36	3.479.236	100.658.124
7	Kab. Rokan Hilir	-	36	8.155.762	249.256.659
8	Kab. Rokan Hulu	-	36	2.317.550	64.190.937
9	Kab. Siak	941	36	15.438.853	476.017.174
10	Kota Dumai	-	36	855.554	29.834.398
11	Kota Pekanbaru	-	36	570.332	20.895.011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Kab. Kepulauan Meranti	3.753.163	200.324	3.366.040	42.191.079
V	Provinsi Jambi	-	10.635.453	3.968.396	96.827.746
1	Kab. Batang Hari	3.753.163	7.022.980	2.904.129	67.182.233
2	Kab. Bungo	3.753.163	4.637.076	100.415	9.079.470
3	Kab. Kerinci	3.753.163	987.581	-	1.510.643
4	Kab. Merangin	3.753.163	1.518.917	-	5.600.956
5	Kab. Muaro Jambi	3.753.163	11.136.079	268.781	72.161.637
6	Kab. Sarolangun	3.753.163	1.848.557	2.757.281	26.075.534
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.753.163	7.820.333	4.153.404	99.048.970
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.753.163	2.770.129	1.415.492	53.852.706
9	Kab. Tebo	3.753.163	4.800.159	4.274.083	16.314.889
10	Kota Jambi	3.753.163	-	-	35.719.524
11	Kota Sungai Penuh	3.753.163	-	-	764.421
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	29.043.278	8.895.670	529.524.038
1	Kab. Lahat	3.753.163	3.537.151	1.184.918	63.775.606



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	2.500.658	1.088	48.259.189
V	Provinsi Jambi	188.056	2.231.131	2.992	113.853.774
1	Kab. Batang Hari	-	513.989	1.088	77.624.419
2	Kab. Bungo	-	1.602.029	1.088	15.420.078
3	Kab. Kerinci	690.510	-	1.088	3.189.822
4	Kab. Merangin	-	32.344	1.088	7.153.305
5	Kab. Muaro Jambi	-	36.059	1.088	83.603.644
6	Kab. Sarolangun	-	6.387.921	1.088	37.070.381
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	5.641	1.088	111.029.436
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	223	1.088	58.039.638
9	Kab. Tebo	-	346.319	1.088	25.736.538
10	Kota Jambi	-	-	1.088	35.720.612
11	Kota Sungai Penuh	61.714	-	1.088	827.223
VI	Provinsi Sumatera Selatan	748.475	36.655.874	4.801	604.872.136
1	Kab. Lahat	43.629	24.481.184	1.088	93.023.576



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Kab. Kepulauan Meranti	8.903	130.902	1.406.369	-
V	Provinsi Jambi	709.030	231.490	4.841.387	9.403
1	Kab. Batang Hari	273.116	98.821	1.959.482	-
2	Kab. Bungo	180.331	3.417	264.818	-
3	Kab. Kerinci	38.406	-	44.060	20.140
4	Kab. Merangin	59.069	-	163.361	-
5	Kab. Muaro Jambi	433.070	9.146	2.104.714	-
6	Kab. Sarolangun	71.888	93.824	760.536	-
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	304.124	141.331	2.888.928	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	107.727	48.166	1.570.704	-
9	Kab. Tebo	186.673	145.438	475.851	-
10	Kota Jambi	-	-	1.041.819	-
11	Kota Sungai Penuh	-	-	22.296	1.800
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.290.812	370.653	14.709.001	20.791
1	Kab. Lahat	157.207	45.257	2.214.431	1.515



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
12	Kab. Kepulauan Meranti	83.355	36	1.629.565	53.641.917
V	Provinsi Jambi	111.557	150	5.903.017	119.756.791
1	Kab. Batang Hari	14.991	32	2.346.442	83.724.024
2	Kab. Bungo	46.726	32	495.324	19.668.565
3	Kab. Kerinci	-	32	102.638	7.045.623
4	Kab. Merangin	943	32	223.405	11.129.873
5	Kab. Muaro Jambi	1.052	32	2.548.014	89.904.821
6	Kab. Sarolangun	186.314	32	1.112.594	41.936.138
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	165	32	3.334.580	118.117.179
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	7	32	1.726.636	63.519.437
9	Kab. Tebo	10.101	32	818.095	30.307.796
10	Kota Jambi	-	32	1.041.851	40.515.626
11	Kota Sungai Penuh	-	32	24.128	4.604.514
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.018.219	133	17.409.609	622.281.745
1	Kab. Lahat	850.041	38	3.268.489	100.045.228



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kab. Musi Banyuasin	3.753.163	25.064.921	3.934.528	669.750.838
3	Kab. Musi Rawas	3.753.163	9.319.899	1.483.713	187.200.561
4	Kab. Muara Enim	3.754.862	7.390.989	1.262.975	398.874.648
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.753.163	25.897.724	24.877.373	5.432.575
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3.753.163	1.935.758	250.084	65.800.271
7	Kota Palembang	3.753.163	-	-	3.759.891
8	Kota Prabumulih	3.753.163	-	-	92.210.875
9	Kota Pagar Alam	3.753.163	454.580	-	1.859.713
10	Kota Lubuk Linggau	3.753.163	-	-	1.499.105
11	Kab. Banyuasin	3.753.163	20.184.162	1.321.214	43.574.781
12	Kab. Ogan Ilir	3.753.163	6.636.068	-	56.000.124
13	Kab. OKU Timur	3.753.163	2.692.308	266.995	3.043.726
14	Kab. OKU Selatan	3.753.163	872.428	338.226	2.687.022
15	Kab. Empat Lawang	3.753.163	1.306.340	-	2.166.526
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.753.163	2.795.987	532.546	508.670.276



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
2	Kab. Musi Banyuasin	-	7.858.220	1.088	706.609.595
3	Kab. Musi Rawas	5.654	387.198	1.088	198.398.113
4	Kab. Muara Enim	2.467.604	104.833.000	1.018	514.830.234
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	1.088	56.208.760
6	Kab. Ogan Komering Ulu	60.402	4.306.260	1.088	72.353.863
7	Kota Palembang	-	-	1.797	3.761.688
8	Kota Prabumulih	-	10.494	1.088	92.222.457
9	Kota Pagar Alam	211.901	-	1.088	2.527.282
10	Kota Lubuk Linggau	-	-	1.088	1.500.193
11	Kab. Banyuasin	-	37.063	1.088	65.118.308
12	Kab. Ogan Ilir	-	-	1.088	62.637.280
13	Kab. OKU Timur	-	956.431	1.088	6.960.548
14	Kab. OKU Selatan	131.932	47.396	1.088	4.078.092
15	Kab. Empat Lawang	-	-	1.088	3.473.954
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	1.376.228	1.088	513.376.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Kab. Musi Banyuasin	1.113.997	150.277	23.255.237	-
3	Kab. Musi Rawas	414.218	56.670	6.500.019	196
4	Kab. Muara Enim	328.484	48.235	13.849.813	85.679
5	Kab. Ogan Komering Ilir	1.151.010	950.177	188.631	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	86.034	9.552	2.284.732	2.097
7	Kota Palembang	-	-	130.552	-
8	Kota Prabumulih	-	-	3.201.766	-
9	Kota Pagar Alam	20.204	-	64.573	7.358
10	Kota Lubuk Linggau	-	-	52.052	-
11	Kab. Banyuasin	897.074	50.463	1.513.013	-
12	Kab. Ogan Ilir	294.936	-	1.944.449	-
13	Kab. OKU Timur	119.658	10.198	105.685	-
14	Kab. OKU Selatan	38.775	12.918	93.299	4.581
15	Kab. Empat Lawang	58.060	-	75.227	-
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	124.266	20.340	17.662.162	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
2	Kab. Musi Banyuasin	272.855	38	24.792.404	735.155.162
3	Kab. Musi Rawas	13.444	38	6.984.585	209.135.861
4	Kab. Muara Enim	3.640.030	28	17.952.269	536.537.365
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	38	2.289.856	62.251.779
6	Kab. Ogan Komering Ulu	149.523	38	2.531.976	78.639.002
7	Kota Palembang	-	62	130.614	7.645.465
8	Kota Prabumulih	364	38	3.202.168	99.177.788
9	Kota Pagar Alam	-	38	92.173	6.372.618
10	Kota Lubuk Linggau	-	38	52.090	5.305.446
11	Kab. Banyuasin	1.287	38	2.461.875	71.333.346
12	Kab. Ogan Ilir	-	38	2.239.423	68.629.866
13	Kab. OKU Timur	33.209	38	268.788	10.982.499
14	Kab. OKU Selatan	1.646	38	151.257	7.982.512
15	Kab. Empat Lawang	-	38	133.325	7.360.442
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	47.786	38	17.854.592	534.983.880



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Kab. Musi Rawas Utara	3.753.163	8.084.795	130.112	11.789.604
VII	Provinsi Bengkulu	-	5.098.326	41.104	3.948.343
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.753.163	82.958	-	1.237.711
2	Kab. Bengkulu Utara	3.753.163	6.445.065	-	1.932.467
3	Kab. Rejang Lebong	3.753.163	9.419	-	1.421.112
4	Kota Bengkulu	3.753.163	-	-	1.314.113
5	Kab. Kaur	3.753.163	562.374	-	1.771.236
6	Kab. Seluma	3.753.163	2.331.614	-	1.763.034
7	Kab. Mukomuko	3.753.163	9.335.727	164.418	1.936.045
8	Kab. Lebong	3.753.163	6.632	-	1.793.259
9	Kab. Kepahiang	3.753.163	42.242	-	1.447.995
10	Kab. Bengkulu Tengah	3.753.163	1.577.274	-	1.176.400
VIII	Provinsi Lampung	-	14.565.837	381.901	10.964.684
1	Kab. Lampung Barat	3.753.163	-	-	1.535.627
2	Kab. Lampung Selatan	3.753.163	2.790.799	-	3.137.490



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
17	Kab. Musi Rawas Utara	72.778	2.330.027	1.088	22.408.404
VII	Provinsi Bengkulu	429.301	1.108.050	2.720	10.627.844
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	1.088	1.321.757
2	Kab. Bengkulu Utara	238.226	2.002.070	1.088	10.618.916
3	Kab. Rejang Lebong	68.678	-	1.088	1.500.297
4	Kota Bengkulu	-	-	1.088	1.315.201
5	Kab. Kaur	105.129	3.507	1.088	2.443.334
6	Kab. Seluma	-	50.380	1.088	4.146.116
7	Kab. Mukomuko	7.823	-	1.088	11.445.101
8	Kab. Lebong	1.297.347	11.855	1.088	3.110.181
9	Kab. Kepahiang	-	-	1.088	1.491.325
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	2.364.390	1.088	5.119.152
VIII	Provinsi Lampung	4.288.964	553.759	4.079	30.759.224
1	Kab. Lampung Barat	-	-	1.088	1.536.715
2	Kab. Lampung Selatan	35.815	852.409	1.088	6.817.601



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	Kab. Musi Rawas Utara	359.324	4.970	409.361	2.527
VII	Provinsi Bengkulu	226.592	1.370	131.611	14.310
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.687	-	41.257	-
2	Kab. Bengkulu Utara	286.447	-	64.416	7.941
3	Kab. Rejang Lebong	419	-	47.370	2.289
4	Kota Bengkulu	-	-	43.804	-
5	Kab. Kaur	24.994	-	59.041	3.504
6	Kab. Seluma	103.627	-	58.768	-
7	Kab. Mukomuko	414.921	6.622	64.535	261
8	Kab. Lebong	295	-	59.775	43.245
9	Kab. Kepahiang	1.877	-	48.267	-
10	Kab. Bengkulu Tengah	70.101	-	39.213	-
VIII	Provinsi Lampung	647.371	14.852	365.489	142.965
1	Kab. Lampung Barat	-	-	51.188	-
2	Kab. Lampung Selatan	124.036	-	104.583	1.194



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan	Sektor Lainnya		
		Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya			
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
17	Kab. Musi Rawas Utara	80.904	38	857.124	27.018.691
VII	Provinsi Bengkulu	36.935	91	410.909	11.038.753
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	36	44.980	5.119.900
2	Kab. Bengkulu Utara	66.736	36	425.576	14.797.655
3	Kab. Rejang Lebong	-	36	50.114	5.303.574
4	Kota Bengkulu	-	36	43.840	5.112.204
5	Kab. Kaur	117	36	87.692	6.284.189
6	Kab. Seluma	1.679	36	164.110	8.063.389
7	Kab. Mukomuko	-	36	486.375	15.684.639
8	Kab. Lebong	395	36	103.746	6.967.090
9	Kab. Kepahiang	-	36	50.180	5.294.668
10	Kab. Bengkulu Tengah	78.813	36	188.163	9.060.478
VIII	Provinsi Lampung	18.459	136	1.189.272	31.948.496
1	Kab. Lampung Barat	-	36	51.224	5.341.102
2	Kab. Lampung Selatan	28.414	36	258.263	10.829.027



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kab. Lampung Tengah	3.753.163	21.201.135	-	4.995.118
4	Kab. Lampung Utara	3.753.163	4.497.426	-	2.867.979
5	Kab. Lampung Timur	3.753.163	772.195	-	11.251.038
6	Kab. Tanggamus	3.753.163	67.402	-	2.447.031
7	Kab. Tulang Bawang	3.753.163	10.134.165	-	3.144.558
8	Kab. Way Kanan	3.753.163	5.263.785	930.656	2.771.477
9	Kota Bandar Lampung	3.753.163	-	-	2.673.445
10	Kota Metro	3.753.163	-	-	1.257.640
11	Kab. Pesawaran	3.753.163	10.389	-	1.816.842
12	Kab. Pringsewu	3.753.163	-	-	1.275.282
13	Kab. Mesuji	3.753.163	10.976.532	596.949	1.494.811
14	Kab. Tulang Bawang Barat	3.753.163	2.103.918	-	1.642.701
15	Kab. Pesisir Barat	3.753.163	445.601	-	1.547.696
IX	Provinsi DKI Jakarta	3.753.163	-	-	49.570.518
X	Provinsi Jawa Barat	-	12.537.435	5.269.668	89.637.681



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
3	Kab. Lampung Tengah	-	95.686	1.088	26.293.027
4	Kab. Lampung Utara	-	-	1.088	7.366.493
5	Kab. Lampung Timur	-	931	1.088	12.025.252
6	Kab. Tanggamus	17.120.041	1.098.490	1.088	20.734.052
7	Kab. Tulang Bawang	-	-	1.088	13.279.811
8	Kab. Way Kanan	-	55.703	1.088	9.022.709
9	Kota Bandar Lampung	-	-	1.088	2.674.533
10	Kota Metro	-	-	1.088	1.258.728
11	Kab. Pesawaran	-	111.817	1.088	1.940.136
12	Kab. Pringsewu	-	-	1.088	1.276.370
13	Kab. Mesuji	-	-	1.088	13.069.380
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	1.088	3.747.707
15	Kab. Pesisir Barat	-	-	1.088	1.994.385
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	253.819	49.824.337
X	Provinsi Jawa Barat	32.921.215	7.384.284	7.738	147.758.021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Kab. Lampung Tengah	942.273	-	166.504	-
4	Kab. Lampung Utara	199.886	-	95.599	-
5	Kab. Lampung Timur	34.320	-	375.035	-
6	Kab. Tanggamus	2.996	-	81.568	570.668
7	Kab. Tulang Bawang	450.407	-	104.819	-
8	Kab. Way Kanan	233.946	36.192	92.383	-
9	Kota Bandar Lampung	-	-	89.115	-
10	Kota Metro	-	-	41.921	-
11	Kab. Pesawaran	462	-	60.561	-
12	Kab. Pringsewu	-	-	42.509	-
13	Kab. Mesuji	487.846	23.215	49.827	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	93.507	-	54.757	-
15	Kab. Pesisir Barat	19.804	-	51.590	-
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	1.652.351	-
X	Provinsi Jawa Barat	139.305	51.233	746.981	274.343



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
3	Kab. Lampung Tengah	3.190	36	1.112.003	31.158.193
4	Kab. Lampung Utara	-	36	295.521	11.415.177
5	Kab. Lampung Timur	31	36	409.422	16.187.837
6	Kab. Tanggamus	36.616	36	691.884	25.179.099
7	Kab. Tulang Bawang	-	36	555.262	17.588.236
8	Kab. Way Kanan	1.857	36	364.414	13.140.286
9	Kota Bandar Lampung	-	36	89.151	6.516.847
10	Kota Metro	-	36	41.957	5.053.848
11	Kab. Pesawaran	3.727	36	64.786	5.758.085
12	Kab. Pringsewu	-	36	42.545	5.072.078
13	Kab. Mesuji	-	36	560.924	17.383.467
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	36	148.300	7.649.170
15	Kab. Pesisir Barat	-	36	71.430	5.818.978
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	8.461	1.660.812	55.238.312
X	Provinsi Jawa Barat	61.536	64	1.273.462	149.031.483



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bandung	3.753.163	13.077.273	209.952	6.797.257
2	Kab. Bekasi	3.753.163	-	-	48.898.248
3	Kab. Bogor	3.753.163	4.443.671	1.553.305	10.007.539
4	Kab. Ciamis	3.753.163	672.129	1.118.013	3.245.073
5	Kab. Cianjur	3.753.163	3.962.257	2.885.802	5.859.338
6	Kab. Cirebon	3.753.163	-	286.153	12.646.647
7	Kab. Garut	3.753.163	9.024.961	620.504	5.631.765
8	Kab. Indramayu	3.753.163	1.577.928	1.313.308	107.691.073
9	Kab. Karawang	3.753.163	-	1.205.785	37.060.562
10	Kab. Kuningan	3.753.163	28.024	1.214.125	3.139.447
11	Kab. Majalengka	3.753.163	1.213.943	265.920	13.243.185
12	Kab. Purwakarta	3.753.163	758.893	1.088.386	2.810.196
13	Kab. Subang	3.753.163	4.026.179	626.384	57.745.831
14	Kab. Sukabumi	3.753.163	6.334.819	4.181.285	6.120.175
15	Kab. Sumedang	3.753.163	76.328	942.054	3.078.613



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
1	Kab. Bandung	58.256.974	82.225	1.088	78.424.769
2	Kab. Bekasi	-	300.887	1.572	49.200.707
3	Kab. Bogor	20.686.878	21.860.301	1.088	58.552.782
4	Kab. Ciamis	6.827	32.890	1.088	5.076.020
5	Kab. Cianjur	41.434	101.567	1.088	12.851.486
6	Kab. Cirebon	-	2.555.272	1.217	15.489.289
7	Kab. Garut	31.823.501	597.584	1.088	47.699.403
8	Kab. Indramayu	-	-	2.023	110.584.332
9	Kab. Karawang	-	10.731	1.088	38.278.166
10	Kab. Kuningan	-	-	1.088	4.382.684
11	Kab. Majalengka	7.364	-	1.088	14.731.500
12	Kab. Purwakarta	21.301	581.961	1.088	5.261.825
13	Kab. Subang	-	-	1.088	62.399.482
14	Kab. Sukabumi	20.397.419	3.163.531	1.088	40.198.317
15	Kab. Sumedang	4.229	32.890	1.088	4.135.202



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bandung	690.189	9.696	269.058	2.306.005
2	Kab. Bekasi	-	-	1.935.556	-
3	Kab. Bogor	234.527	71.732	396.132	818.856
4	Kab. Ciamis	35.473	51.630	128.451	270
5	Kab. Cianjur	209.119	133.268	231.932	1.640
6	Kab. Cirebon	-	13.215	500.596	-
7	Kab. Garut	476.317	28.655	222.924	1.259.680
8	Kab. Indramayu	83.280	60.649	4.262.772	-
9	Kab. Karawang	-	55.684	1.466.981	-
10	Kab. Kuningan	1.479	56.069	124.270	-
11	Kab. Majalengka	64.069	12.280	524.209	291
12	Kab. Purwakarta	40.053	50.262	111.237	843
13	Kab. Subang	212.493	28.927	2.285.772	-
14	Kab. Sukabumi	334.338	193.094	242.257	807.398
15	Kab. Sumedang	4.028	43.505	121.862	167



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
1	Kab. Bandung	3.255	43	3.278.246	85.456.178
2	Kab. Bekasi	11.910	62	1.947.528	54.901.398
3	Kab. Bogor	865.304	43	2.386.594	64.692.539
4	Kab. Ciamis	1.302	43	217.169	9.046.352
5	Kab. Cianjur	4.020	43	580.022	17.184.671
6	Kab. Cirebon	101.146	48	615.005	19.857.457
7	Kab. Garut	23.654	43	2.011.273	53.463.839
8	Kab. Indramayu	-	80	4.406.781	118.744.276
9	Kab. Karawang	425	43	1.523.133	43.554.462
10	Kab. Kuningan	-	43	181.861	8.317.708
11	Kab. Majalengka	-	43	600.892	19.085.555
12	Kab. Purwakarta	23.036	43	225.474	9.240.462
13	Kab. Subang	-	43	2.527.235	68.679.880
14	Kab. Sukabumi	125.223	43	1.702.353	45.653.833
15	Kab. Sumedang	1.302	43	170.907	8.059.272



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Kab. Tasikmalaya	3.753.163	1.194.150	1.439.600	4.525.899
17	Kota Bandung	3.753.163	-	-	5.119.968
18	Kota Bekasi	3.753.163	-	-	5.993.806
19	Kota Bogor	3.753.163	-	-	2.312.510
20	Kota Cirebon	3.753.163	-	-	2.445.895
21	Kota Depok	3.753.163	-	-	3.897.674
22	Kota Sukabumi	3.753.163	-	-	939.640
23	Kota Tasikmalaya	3.753.163	-	32.538	1.699.460
24	Kota Cimahi	3.753.163	-	-	1.327.418
25	Kota Banjar	3.753.163	193.983	212.165	1.431.182
26	Kab. Bandung Barat	3.753.163	2.926.511	825.795	3.399.236
27	Kab. Pangandaran	3.753.163	638.689	1.057.598	1.483.089
XI	Provinsi Jawa Tengah	-	7.641.647	13.363.878	42.596.429
1	Kab. Banjarnegara	3.753.163	21.918	153.747	2.544.384
2	Kab. Banyumas	3.753.163	899.514	1.534.231	4.563.098



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
16	Kab. Tasikmalaya	396.774	32.890	1.088	7.590.401
17	Kota Bandung	-	-	1.088	5.121.056
18	Kota Bekasi	-	-	1.088	5.994.894
19	Kota Bogor	384	-	1.088	2.313.982
20	Kota Cirebon	-	-	1.121	2.447.016
21	Kota Depok	-	-	1.088	3.898.762
22	Kota Sukabumi	-	-	1.088	940.728
23	Kota Tasikmalaya	-	-	1.088	1.733.086
24	Kota Cimahi	-	-	1.088	1.328.506
25	Kota Banjar	-	-	1.088	1.838.418
26	Kab. Bandung Barat	41.773	184.403	1.088	7.378.806
27	Kab. Pangandaran	-	-	1.088	3.180.464
XI	Provinsi Jawa Tengah	1.368.583	1.102.520	16.633	66.089.690
1	Kab. Banjarnegara	2.745.726	-	1.088	5.466.863
2	Kab. Banyumas	-	958.781	1.088	7.956.712



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
16	Kab. Tasikmalaya	63.025	66.482	179.150	15.706
17	Kota Bandung	-	-	202.665	-
18	Kota Bekasi	-	-	237.255	-
19	Kota Bogor	-	-	91.537	15
20	Kota Cirebon	-	-	96.817	-
21	Kota Depok	-	-	154.283	-
22	Kota Sukabumi	-	-	37.194	-
23	Kota Tasikmalaya	-	1.503	67.270	-
24	Kota Cimahi	-	-	52.544	-
25	Kota Banjar	10.238	9.798	56.651	-
26	Kab. Bandung Barat	154.455	38.136	134.553	1.654
27	Kab. Pangandaran	33.709	48.840	58.706	-
XI	Provinsi Jawa Tengah	283.165	519.706	1.419.881	45.619
1	Kab. Banjarnegara	1.015	5.979	84.813	91.524
2	Kab. Banyumas	41.640	59.665	152.103	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan	Sektor Lainnya		
		Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya			
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
16	Kab. Tasikmalaya	1.302	43	325.708	11.669.272
17	Kota Bandung	-	43	202.708	9.076.927
18	Kota Bekasi	-	43	237.298	9.985.355
19	Kota Bogor	-	43	91.595	6.158.740
20	Kota Cirebon	-	44	96.861	6.297.040
21	Kota Depok	-	43	154.326	7.806.251
22	Kota Sukabumi	-	43	37.237	4.731.128
23	Kota Tasikmalaya	-	43	68.816	5.555.065
24	Kota Cimahi	-	43	52.587	5.134.256
25	Kota Banjar	-	43	76.730	5.668.311
26	Kab. Bandung Barat	7.299	43	336.140	11.468.109
27	Kab. Pangandaran	-	43	141.298	7.074.925
XI	Provinsi Jawa Tengah	36.751	554	2.305.676	68.395.366
1	Kab. Banjarnegara	-	36	183.367	9.403.393
2	Kab. Banyumas	31.959	36	285.403	11.995.278



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kab. Batang	3.753.163	5.528.742	1.096.636	2.182.994
4	Kab. Blora	3.753.163	-	10.320.089	71.897.240
5	Kab. Boyolali	3.753.163	-	1.981.498	2.571.212
6	Kab. Brebes	3.753.163	583.116	4.324.411	4.868.113
7	Kab. Cilacap	3.753.163	4.829.506	3.130.067	5.546.265
8	Kab. Demak	3.753.163	-	365.218	4.094.141
9	Kab. Grobogan	3.753.163	-	8.196.216	6.983.624
10	Kab. Jepara	3.753.163	3.522.441	1.093.396	3.366.913
11	Kab. Karanganyar	3.753.163	1.616.157	21.360	2.259.118
12	Kab. Kebumen	3.753.163	-	1.707.519	3.501.308
13	Kab. Kendal	3.753.163	4.879.904	1.678.964	3.476.784
14	Kab. Klaten	3.753.163	-	104.927	3.078.903
15	Kab. Kudus	3.753.163	-	235.310	3.116.987
16	Kab. Magelang	3.753.163	47.943	489.883	3.073.908
17	Kab. Pati	3.753.163	790.072	2.196.588	3.586.377



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
3	Kab. Batang	13.761	-	1.088	8.823.221
4	Kab. Blora	-	-	1.088	82.218.417
5	Kab. Boyolali	-	-	1.088	4.553.798
6	Kab. Brebes	8.737	49.533	1.088	9.834.998
7	Kab. Cilacap	-	1.499.444	5.126	15.010.408
8	Kab. Demak	-	-	1.088	4.460.447
9	Kab. Grobogan	-	2.209	1.088	15.183.137
10	Kab. Jepara	-	19.665	1.088	8.003.503
11	Kab. Karanganyar	-	-	1.088	3.897.723
12	Kab. Kebumen	-	3.131	1.091	5.213.049
13	Kab. Kendal	5.545	-	1.088	10.042.285
14	Kab. Klaten	-	-	1.088	3.184.918
15	Kab. Kudus	-	-	1.088	3.353.385
16	Kab. Magelang	-	-	1.088	3.612.822
17	Kab. Pati	-	13.945	6.481	6.593.463



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Kab. Batang	255.935	42.647	72.766	459
4	Kab. Elora	-	401.337	2.396.575	-
5	Kab. Boyolali	-	77.058	85.707	-
6	Kab. Brebes	26.993	168.172	162.270	291
7	Kab. Cilacap	223.566	121.725	184.876	-
8	Kab. Demak	-	14.203	136.471	-
9	Kab. Grobogan	-	318.742	232.787	-
10	Kab. Jepara	163.060	42.521	112.230	-
11	Kab. Karanganyar	74.815	831	75.304	-
12	Kab. Kebumen	-	66.404	116.710	-
13	Kab. Kendal	225.899	65.293	115.893	185
14	Kab. Klaten	-	4.080	102.630	-
15	Kab. Kudus	-	9.151	103.900	-
16	Kab. Magelang	2.219	19.051	102.464	-
17	Kab. Pati	36.574	85.423	119.546	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
3	Kab. Batang	-	36	371.843	12.948.227
4	Kab. Blora	-	36	2.797.948	88.769.528
5	Kab. Boyolali	-	36	162.801	8.469.762
6	Kab. Brebes	1.651	36	359.413	13.947.574
7	Kab. Cilacap	49.981	171	580.319	19.343.890
8	Kab. Demak	-	36	150.710	8.364.320
9	Kab. Grobogan	74	36	551.639	19.487.939
10	Kab. Jepara	656	36	318.503	12.075.169
11	Kab. Karanganyar	-	36	150.986	7.801.872
12	Kab. Kebumen	104	36	183.254	9.149.466
13	Kab. Kendal	-	36	407.306	14.202.754
14	Kab. Klaten	-	36	106.746	7.044.827
15	Kab. Kudus	-	36	113.087	7.219.635
16	Kab. Magelang	-	36	123.770	7.489.755
17	Kab. Pati	465	216	242.224	10.588.850



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Kab. Pekalongan	3.753.163	1.587.842	1.818.188	2.452.604
19	Kab. Pemalang	3.753.163	795.583	2.747.930	3.609.066
20	Kab. Purbalingga	3.753.163	-	504.707	2.372.565
21	Kab. Purworejo	3.753.163	-	1.135.729	2.137.911
22	Kab. Rembang	3.753.163	-	2.112.456	2.418.923
23	Kab. Semarang	3.753.163	3.667.144	799.991	2.476.670
24	Kab. Sragen	3.753.163	583.731	674.405	2.506.053
25	Kab. Sukoharjo	3.753.163	337.231	10.571	2.223.006
26	Kab. Tegal	3.753.163	135.221	2.069.313	3.650.959
27	Kab. Temanggung	3.753.163	517.438	1.108.017	1.973.382
28	Kab. Wonogiri	3.753.163	-	1.098.724	2.873.727
29	Kab. Wonosobo	3.753.163	141.383	186.288	2.285.668
30	Kota Magelang	3.753.163	-	-	485.968
31	Kota Pekalongan	3.753.163	-	-	988.636
32	Kota Salatiga	3.753.163	81.701	-	617.942



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
18	Kab. Pekalongan	21.120	-	1.088	5.880.842
19	Kab. Pemalang	4.022	-	1.088	7.157.689
20	Kab. Purbalingga	-	-	1.088	2.878.360
21	Kab. Purworejo	-	-	1.088	3.274.728
22	Kab. Rembang	-	1.838.699	1.088	6.371.166
23	Kab. Semarang	-	-	1.088	6.944.893
24	Kab. Sragen	-	-	1.088	3.765.277
25	Kab. Sukoharjo	-	-	1.088	2.571.896
26	Kab. Tegal	10.093	15.003	1.088	5.881.677
27	Kab. Temanggung	5.676	-	1.088	3.605.601
28	Kab. Wonogiri	-	9.673	1.088	3.983.212
29	Kab. Wonosobo	2.659.649	-	1.088	5.274.076
30	Kota Magelang	-	-	1.088	487.056
31	Kota Pekalongan	-	-	19.864	1.008.500
32	Kota Salatiga	-	-	1.118	700.761



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
18	Kab. Pekalongan	73.504	70.707	81.753	704
19	Kab. Pemasang	36.829	106.864	120.302	134
20	Kab. Purbalingga	-	19.627	79.085	-
21	Kab. Purworejo	-	44.167	71.264	-
22	Kab. Rembang	-	82.151	80.631	-
23	Kab. Semarang	169.758	31.111	82.556	-
24	Kab. Sragen	27.022	26.227	83.535	-
25	Kab. Sukoharjo	15.611	411	74.100	-
26	Kab. Tegal	6.260	80.473	121.699	336
27	Kab. Temanggung	23.953	43.090	65.779	189
28	Kab. Wonogiri	-	42.728	95.791	-
29	Kab. Wonosobo	6.545	7.245	76.189	88.655
30	Kota Magelang	-	-	16.199	-
31	Kota Pekalongan	-	-	32.955	-
32	Kota Salatiga	3.782	-	20.598	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan	Sektor Lainnya		
		Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya			
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
18	Kab. Pekalongan	-	36	226.704	9.860.709
19	Kab. Pemasang	-	36	264.165	11.175.017
20	Kab. Purbalingga	-	36	98.748	6.730.271
21	Kab. Purworejo	-	36	115.467	7.143.358
22	Kab. Rembang	61.290	36	224.108	10.348.437
23	Kab. Semarang	-	36	283.461	10.981.517
24	Kab. Sragen	-	36	136.820	7.655.260
25	Kab. Sukoharjo	-	36	90.158	6.415.217
26	Kab. Tegal	500	36	209.304	9.844.144
27	Kab. Temanggung	-	36	133.047	7.491.811
28	Kab. Wonogiri	322	36	138.877	7.875.252
29	Kab. Wonosobo	-	36	178.670	9.205.909
30	Kota Magelang	-	36	16.235	4.256.454
31	Kota Pekalongan	-	662	33.617	4.795.280
32	Kota Salatiga	-	37	24.417	4.478.341



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Kota Semarang	3.753.163	-	559.135	4.491.974
34	Kota Surakarta	3.753.163	-	-	1.331.316
35	Kota Tegal	3.753.163	-	-	777.978
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	1.861	-	2.374.006
1	Kab. Bantul	3.753.163	-	-	2.307.235
2	Kab. Gunung Kidul	3.753.163	-	-	2.209.948
3	Kab. Kulon Progo	3.753.163	7.445	-	1.297.499
4	Kab. Sleman	3.753.163	-	-	2.640.149
5	Kota Yogyakarta	3.753.163	-	-	1.041.192
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	11.019.791	16.413.918	96.093.513
1	Kab. Bangkalan	3.753.163	-	159.724	9.439.482
2	Kab. Banyuwangi	3.753.163	9.504.935	5.307.017	4.887.168
3	Kab. Blitar	3.753.163	1.511.619	1.243.433	3.149.745
4	Kab. Bojonegoro	3.753.163	-	7.683.606	196.385.312
5	Kab. Bondowoso	3.753.163	2.218.348	1.804.040	2.167.793



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
33	Kota Semarang	-	-	1.243	5.052.352
34	Kota Surakarta	-	-	1.088	1.332.404
35	Kota Tegal	-	-	1.150	779.128
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	16.924	1.366	2.394.157
1	Kab. Bantul	-	-	1.113	2.308.348
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	1.088	2.211.036
3	Kab. Kulon Progo	-	67.697	1.088	1.373.729
4	Kab. Sleman	-	-	1.088	2.641.237
5	Kota Yogyakarta	-	-	1.088	1.042.280
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	3.178.539	13.862	126.719.623
1	Kab. Bangkalan	-	-	1.088	9.600.294
2	Kab. Banyuwangi	-	376.943	1.088	20.077.151
3	Kab. Blitar	-	4.718	1.088	5.910.603
4	Kab. Bojonegoro	-	-	1.088	204.070.006
5	Kab. Bondowoso	-	-	1.088	6.191.269



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
33	Kota Semarang	-	21.744	149.732	-
34	Kota Surakarta	-	-	44.377	-
35	Kota Tegal	-	-	25.933	-
XII	Provinsi DI Yogyakarta	69	-	79.134	-
1	Kab. Bantul	-	-	76.908	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	73.665	-
3	Kab. Kulon Progo	345	-	43.250	-
4	Kab. Sleman	-	-	88.005	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	34.706	-
XIII	Provinsi Jawa Timur	306.105	455.942	2.669.264	-
1	Kab. Bangkalan	-	6.655	327.760	-
2	Kab. Banyuwangi	462.045	221.126	169.693	-
3	Kab. Blitar	73.481	51.810	109.366	-
4	Kab. Bojonegoro	-	320.150	6.818.934	-
5	Kab. Bondowoso	107.836	75.168	75.271	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
33	Kota Semarang	-	41	171.517	8.977.032
34	Kota Surakarta	-	36	44.413	5.129.980
35	Kota Tegal	-	38	25.971	4.558.262
XII	Provinsi DI Yogyakarta	564	46	79.813	2.473.970
1	Kab. Bantul	-	37	76.945	6.138.456
2	Kab. Gunung Kidul	-	36	73.701	6.037.900
3	Kab. Kulon Progo	2.257	36	45.888	5.172.780
4	Kab. Sleman	-	36	88.041	6.482.441
5	Kota Yogyakarta	-	36	34.742	4.830.185
XIII	Provinsi Jawa Timur	88.293	385	3.519.989	130.239.612
1	Kab. Bangkalan	-	38	334.453	13.687.910
2	Kab. Banyuwangi	13.088	38	865.990	24.696.304
3	Kab. Blitar	164	38	234.859	9.898.625
4	Kab. Bojonegoro	-	38	7.139.122	214.962.291
5	Kab. Bondowoso	-	38	258.313	10.202.745



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kab. Gresik	3.753.163	-	192.170	27.817.294
7	Kab. Jember	3.753.163	10.126.291	1.991.700	5.995.295
8	Kab. Jombang	3.753.163	29.725	1.660.027	4.374.752
9	Kab. Kediri	3.753.163	6.839.455	1.003.803	4.042.841
10	Kab. Lamongan	3.753.163	-	3.225.734	5.471.936
11	Kab. Lumajang	3.753.163	4.024.775	1.208.419	2.963.403
12	Kab. Madiun	3.753.163	294.851	3.461.419	2.084.014
13	Kab. Magetan	3.753.163	-	350.500	1.899.029
14	Kab. Malang	3.753.163	6.278.812	6.211.902	5.876.515
15	Kab. Mojokerto	3.753.163	80.173	1.181.944	4.370.318
16	Kab. Nganjuk	3.753.163	-	3.013.370	3.311.391
17	Kab. Ngawi	3.753.163	933.886	4.179.473	2.606.666
18	Kab. Pacitan	3.753.163	-	172.372	2.002.830
19	Kab. Pamekasan	3.753.163	-	38.323	4.327.298
20	Kab. Pasuruan	3.753.163	403.616	861.411	5.645.859



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
6	Kab. Gresik	-	132.973	9.453	28.151.890
7	Kab. Jember	-	-	1.249	18.114.535
8	Kab. Jombang	-	111.173	1.088	6.176.765
9	Kab. Kediri	-	-	1.088	11.887.187
10	Kab. Lamongan	-	-	1.088	8.698.758
11	Kab. Lumajang	-	-	1.088	8.197.685
12	Kab. Madiun	-	-	1.088	5.841.372
13	Kab. Magetan	-	-	1.088	2.250.617
14	Kab. Malang	-	43.014	1.320	18.411.563
15	Kab. Mojokerto	-	129.625	1.088	5.763.148
16	Kab. Nganjuk	-	-	1.088	6.325.849
17	Kab. Ngawi	-	-	1.088	7.721.113
18	Kab. Pacitan	-	8.958	1.088	2.185.248
19	Kab. Pamekasan	-	-	1.088	4.366.709
20	Kab. Pasuruan	-	182.991	1.088	7.094.965



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Kab. Gresik	-	8.007	965.878	-
7	Kab. Jember	492.250	82.988	208.170	-
8	Kab. Jombang	1.445	69.168	151.901	-
9	Kab. Kediri	332.474	41.825	140.376	-
10	Kab. Lamongan	-	134.406	189.998	-
11	Kab. Lumajang	195.649	50.351	102.896	-
12	Kab. Madiun	14.333	144.226	72.362	-
13	Kab. Magetan	-	14.604	65.938	-
14	Kab. Malang	305.220	258.829	204.046	-
15	Kab. Mojokerto	3.897	49.248	151.747	-
16	Kab. Nganjuk	-	125.557	114.979	-
17	Kab. Ngawi	45.397	174.145	90.509	-
18	Kab. Pacitan	-	7.182	69.543	-
19	Kab. Pamekasan	-	1.597	150.253	-
20	Kab. Pasuruan	19.620	35.892	196.037	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
6	Kab. Gresik	4.617	328	978.830	32.883.883
7	Kab. Jember	-	43	783.451	22.651.149
8	Kab. Jombang	3.860	38	226.412	10.156.340
9	Kab. Kediri	-	38	514.713	16.155.063
10	Kab. Lamongan	-	38	324.442	12.776.363
11	Kab. Lumajang	-	38	348.934	12.299.782
12	Kab. Madiun	-	38	230.959	9.825.494
13	Kab. Magetan	-	38	80.580	6.084.360
14	Kab. Malang	1.494	46	769.635	22.934.361
15	Kab. Mojokerto	4.501	38	209.431	9.725.742
16	Kab. Nganjuk	-	38	240.574	10.319.586
17	Kab. Ngawi	-	38	310.089	11.784.365
18	Kab. Pacitan	311	38	77.074	6.015.485
19	Kab. Pamekasan	-	38	151.888	8.271.760
20	Kab. Pasuruan	6.354	38	257.941	11.106.069



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Kab. Ponorogo	3.753.163	17.507	3.084.769	2.861.544
22	Kab. Probolinggo	3.753.163	469.945	1.399.761	3.956.483
23	Kab. Sampang	3.753.163	-	40.902	5.003.311
24	Kab. Sidoarjo	3.753.163	-	-	15.438.516
25	Kab. Situbondo	3.753.163	1.053.783	2.198.657	2.546.867
26	Kab. Sumenep	3.753.163	-	1.250.181	14.020.052
27	Kab. Trenggalek	3.753.163	214.568	949.705	2.265.065
28	Kab. Tuban	3.753.163	-	7.442.572	22.340.750
29	Kab. Tulungagung	3.753.163	52.472	3.710.822	2.747.865
30	Kota Blitar	3.753.163	-	7.134	628.647
31	Kota Kediri	3.753.163	-	77.447	812.699
32	Kota Madiun	3.753.163	-	-	696.964
33	Kota Malang	3.753.163	-	-	1.970.507
34	Kota Mojokerto	3.753.163	-	-	733.995
35	Kota Pasuruan	3.753.163	-	-	878.813



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
21	Kab. Ponorogo	-	10.433	1.088	5.975.341
22	Kab. Probolinggo	-	-	1.088	5.827.277
23	Kab. Sampang	-	-	1.088	5.045.301
24	Kab. Sidoarjo	-	-	1.088	15.439.604
25	Kab. Situbondo	-	-	1.088	5.800.395
26	Kab. Sumenep	-	-	1.088	15.271.321
27	Kab. Trenggalek	-	81.238	1.123	3.511.699
28	Kab. Tuban	-	11.563.699	1.088	41.348.109
29	Kab. Tulungagung	-	64.981	1.088	6.577.228
30	Kota Blitar	-	-	1.088	636.869
31	Kota Kediri	-	-	1.088	891.234
32	Kota Madiun	-	-	1.088	698.052
33	Kota Malang	-	-	1.088	1.971.595
34	Kota Mojokerto	-	3.410	1.088	738.493
35	Kota Pasuruan	-	-	1.088	879.901



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
21	Kab. Ponorogo	851	128.532	99.359	-
22	Kab. Probolinggo	22.845	58.323	137.378	-
23	Kab. Sampang	-	1.704	173.726	-
24	Kab. Sidoarjo	-	-	536.060	-
25	Kab. Situbondo	51.226	91.611	88.433	-
26	Kab. Sumenep	-	52.091	486.807	-
27	Kab. Trenggalek	10.430	39.571	78.648	-
28	Kab. Tuban	-	310.107	775.720	-
29	Kab. Tulungagung	2.551	154.618	95.412	-
30	Kota Blitar	-	297	21.828	-
31	Kota Kediri	-	3.227	28.219	-
32	Kota Madiun	-	-	24.200	-
33	Kota Malang	-	-	68.420	-
34	Kota Mojokerto	-	-	25.486	-
35	Kota Pasuruan	-	-	30.514	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
21	Kab. Ponorogo	362	38	229.142	9.957.646
22	Kab. Probolinggo	-	38	218.584	9.799.024
23	Kab. Sampang	-	38	175.468	8.973.932
24	Kab. Sidoarjo	-	38	536.098	19.728.865
25	Kab. Situbondo	-	38	231.308	9.784.866
26	Kab. Sumenep	-	38	538.936	19.563.420
27	Kab. Trenggalek	2.821	39	131.509	7.396.371
28	Kab. Tuban	401.517	38	1.487.382	46.588.654
29	Kab. Tulungagung	2.256	38	254.875	10.585.266
30	Kota Blitar	-	38	22.163	4.412.195
31	Kota Kediri	-	38	31.484	4.675.881
32	Kota Madiun	-	38	24.238	4.475.453
33	Kota Malang	-	38	68.458	5.793.216
34	Kota Mojokerto	118	38	25.642	4.517.298
35	Kota Pasuruan	-	38	30.552	4.663.616



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Kota Probolinggo	3.753.163	24.403	-	1.366.900
37	Kota Surabaya	3.753.163	-	-	6.309.611
38	Kota Batu	3.753.163	-	543.333	976.522
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	34.291.363	5.901.528	10.417.500
1	Kab. Bengkayang	3.753.163	9.681.844	-	2.269.956
2	Kab. Landak	3.753.163	10.164.814	153.536	3.192.902
3	Kab. Kapuas Hulu	3.753.163	12.084.615	1.158.924	5.294.494
4	Kab. Ketapang	3.753.163	38.778.342	8.839.592	5.454.823
5	Kab. Mempawah	3.753.163	1.145.385	55.415	1.466.088
6	Kab. Sambas	3.753.163	8.822.773	-	3.114.397
7	Kab. Sanggau	3.753.163	21.069.537	3.281.291	3.466.253
8	Kab. Sintang	3.753.163	13.836.378	5.624.389	4.305.235
9	Kota Pontianak	3.753.163	-	-	1.934.250
10	Kota Singkawang	3.753.163	20.099	-	1.112.718
11	Kab. Sekadau	3.753.163	5.662.116	255.124	2.122.393



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
36	Kota Probolinggo	-	-	5.145	1.396.448
37	Kota Surabaya	-	-	2.346	6.311.957
38	Kota Batu	-	-	1.088	1.520.943
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	1.707.011	5.764	52.323.166
1	Kab. Bengkayang	-	29.602	1.088	11.982.490
2	Kab. Landak	-	202.411	1.088	13.714.751
3	Kab. Kapuas Hulu	-	39.291	1.088	18.578.412
4	Kab. Ketapang	-	2.341.614	1.088	55.415.459
5	Kab. Mempawah	-	163.214	1.088	2.831.190
6	Kab. Sambas	-	20.070	4.665	11.961.905
7	Kab. Sanggau	-	3.713.958	1.088	31.532.127
8	Kab. Sintang	-	253.723	1.088	24.020.813
9	Kota Pontianak	-	-	5.336	1.939.586
10	Kota Singkawang	-	46	1.088	1.133.951
11	Kab. Sekadau	-	28.632	1.088	8.069.353



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
36	Kota Probolinggo	1.186	-	47.462	-
37	Kota Surabaya	-	-	219.084	-
38	Kota Batu	-	22.639	33.907	-
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	952.538	163.931	289.375	-
1	Kab. Bengkayang	470.645	-	78.818	-
2	Kab. Landak	494.123	6.397	110.865	-
3	Kab. Kapuas Hulu	587.447	48.289	183.837	-
4	Kab. Ketapang	1.885.058	368.316	189.404	-
5	Kab. Mempawah	55.678	2.309	50.906	-
6	Kab. Sambas	428.885	-	108.139	-
7	Kab. Sanggau	1.024.214	136.720	120.356	-
8	Kab. Sintang	672.602	234.350	149.487	-
9	Kota Pontianak	-	-	67.161	-
10	Kota Singkawang	977	-	38.636	-
11	Kab. Sekadau	275.242	10.630	73.694	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
36	Kota Probolinggo	-	179	48.827	5.198.438
37	Kota Surabaya	-	81	219.165	10.284.285
38	Kota Batu	-	38	56.584	5.330.690
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	47.417	160	1.453.421	53.776.587
1	Kab. Bengkayang	1.028	38	550.529	16.286.182
2	Kab. Landak	7.028	38	618.451	18.086.365
3	Kab. Kapuas Hulu	1.364	38	820.975	23.152.550
4	Kab. Ketapang	81.306	38	2.524.122	61.692.744
5	Kab. Mempawah	5.667	38	114.598	6.698.951
6	Kab. Sambas	697	162	537.883	16.252.951
7	Kab. Sanggau	128.957	38	1.410.285	36.695.575
8	Kab. Sintang	8.810	38	1.065.287	28.839.263
9	Kota Pontianak	-	185	67.346	5.760.095
10	Kota Singkawang	2	38	39.653	4.926.767
11	Kab. Sekadau	994	38	360.598	12.183.114



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Kab. Melawi	3.753.163	4.658.626	1.677.191	2.880.395
13	Kab. Kayong Utara	3.753.163	3.959.649	174.471	2.362.128
14	Kab. Kubu Raya	3.753.163	7.281.276	2.386.177	2.693.967
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	52.651.645	10.648.951	12.181.485
1	Kab. Barito Selatan	3.753.163	298.188	579.217	3.741.338
2	Kab. Barito Utara	3.753.163	2.641.585	1.797.545	8.605.757
3	Kab. Kapuas	3.753.163	11.612.913	2.823.037	3.813.076
4	Kab. Kotawaringin Barat	3.753.163	35.447.404	5.362.076	2.538.670
5	Kab. Kotawaringin Timur	3.753.163	72.737.264	2.762.574	3.724.766
6	Kota Palangkaraya	3.753.163	-	-	1.286.517
7	Kab. Katingan	3.753.163	5.388.835	7.026.862	3.370.218
8	Kab. Seruyan	3.753.163	46.607.017	8.334.935	3.724.768
9	Kab. Sukamara	3.753.163	7.203.966	-	2.077.621
10	Kab. Lamandau	3.753.163	17.553.261	6.595.033	2.271.956
11	Kab. Gunung Mas	3.753.163	5.713.774	5.717.374	2.671.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
12	Kab. Melawi	-	313	1.088	9.217.613
13	Kab. Kayong Utara	-	6.227	1.088	6.503.563
14	Kab. Kubu Raya	-	28.943	1.088	12.391.451
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	14.622.118	3.807	90.108.006
1	Kab. Barito Selatan	-	3.466.236	1.088	8.086.067
2	Kab. Barito Utara	-	19.014.127	1.088	32.060.102
3	Kab. Kapuas	-	9.042.971	1.088	27.293.085
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	83.242	1.088	43.432.480
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	1.659.418	1.088	80.885.110
6	Kota Palangkaraya	-	-	1.088	1.287.605
7	Kab. Katingan	-	1.477.341	1.088	17.264.344
8	Kab. Seruyan	-	81.275	1.088	58.749.083
9	Kab. Sukamara	-	-	1.088	9.282.675
10	Kab. Lamandau	-	170.505	1.088	26.591.843
11	Kab. Gunung Mas	-	1.554.689	1.088	15.658.050



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Kab. Melawi	226.461	69.883	100.014	-
13	Kab. Kayong Utara	192.483	7.270	82.018	-
14	Kab. Kubu Raya	353.951	99.424	93.541	-
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	3.510.110	621.189	609.074	-
1	Kab. Barito Selatan	11.596	19.709	109.122	-
2	Kab. Barito Utara	102.728	61.166	251.001	-
3	Kab. Kapuas	451.613	96.062	111.215	-
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.378.510	182.460	74.045	-
5	Kab. Kotawaringin Timur	2.828.671	94.004	108.639	-
6	Kota Palangkaraya	-	-	37.523	-
7	Kab. Katingan	209.566	239.109	98.298	-
8	Kab. Seruyan	1.812.495	283.619	108.639	-
9	Kab. Sukamara	280.154	-	60.597	-
10	Kab. Lamandau	682.627	224.414	66.265	-
11	Kab. Gunung Mas	222.202	194.550	77.908	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
12	Kab. Melawi	11	38	396.407	13.367.183
13	Kab. Kayong Utara	216	38	282.025	10.538.751
14	Kab. Kubu Raya	1.005	38	547.959	16.692.573
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	731.106	190	5.471.669	95.579.675
1	Kab. Barito Selatan	101.099	32	241.558	12.080.788
2	Kab. Barito Utara	554.579	32	969.506	36.782.771
3	Kab. Kapuas	263.753	32	922.675	31.968.923
4	Kab. Kotawaringin Barat	2.428	32	1.637.475	48.823.118
5	Kab. Kotawaringin Timur	48.400	32	3.079.746	87.718.019
6	Kota Palangkaraya	-	32	37.555	5.078.323
7	Kab. Katingan	43.089	32	590.094	21.607.601
8	Kab. Seruyan	2.371	32	2.207.156	64.709.402
9	Kab. Sukamara	-	32	340.783	13.376.621
10	Kab. Lamandau	4.973	32	978.311	31.323.317
11	Kab. Gunung Mas	45.345	32	540.037	19.951.250



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Kab. Pulang Pisau	3.753.163	3.048.027	-	2.510.675
13	Kab. Murung Raya	3.753.163	14.284	1.597.150	4.501.404
14	Kab. Barito Timur	3.753.163	2.340.064	-	3.888.051
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	7.965.375	492.205	21.284.390
1	Kab. Banjar	3.753.163	2.079.208	96.747	4.191.779
2	Kab. Barito Kuala	3.753.163	5.048.697	-	2.729.799
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.753.163	1.078.870	13.892	2.053.735
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.753.163	-	-	1.773.495
5	Kab. Hulu Sungai Utara	3.753.163	297.081	-	2.063.764
6	Kab. Kotabaru	3.753.163	9.110.209	316.594	2.906.206
7	Kab. Tabalong	3.753.163	952.218	386.391	51.896.712
8	Kab. Tanah Laut	3.753.163	5.177.401	151.754	2.094.075
9	Kab. Tapin	3.753.163	3.463.550	10.428	2.513.834
10	Kota Banjarbaru	3.753.163	-	-	1.134.294
11	Kota Banjarmasin	3.753.163	-	-	1.779.637



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
12	Kab. Pulang Pisau	-	948.363	1.088	6.508.153
13	Kab. Murung Raya	-	15.554.540	1.088	21.668.466
14	Kab. Barito Timur	-	5.435.767	1.088	11.664.970
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	38.622.130	3.536	68.367.636
1	Kab. Banjar	-	4.953.199	1.088	11.322.021
2	Kab. Barito Kuala	-	-	1.088	7.779.584
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	24.612.358	1.088	27.759.943
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	118.138	1.088	1.892.721
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	1.088	2.361.933
6	Kab. Kotabaru	-	30.934.105	1.088	43.268.202
7	Kab. Tabalong	-	6.170.615	1.088	59.407.024
8	Kab. Tanah Laut	-	22.689.528	1.088	30.113.846
9	Kab. Tapin	-	12.098.579	1.088	18.087.479
10	Kota Banjarbaru	-	-	1.088	1.135.382
11	Kota Banjarmasin	-	-	1.088	1.780.725



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Kab. Pulang Pisau	118.534	-	73.228	-
13	Kab. Murung Raya	555	54.347	131.291	-
14	Kab. Barito Timur	91.002	-	113.401	-
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	354.017	19.141	709.480	-
1	Kab. Banjar	92.409	3.762	139.726	-
2	Kab. Barito Kuala	224.387	-	90.993	-
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	47.950	540	68.458	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	59.116	-
5	Kab. Hulu Sungai Utara	13.204	-	68.792	-
6	Kab. Kotabaru	404.898	12.312	96.874	-
7	Kab. Tabalong	42.321	15.026	1.729.890	-
8	Kab. Tanah Laut	230.107	5.902	69.803	-
9	Kab. Tapin	153.936	406	83.794	-
10	Kota Banjarbaru	-	-	37.810	-
11	Kota Banjarmasin	-	-	59.321	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
12	Kab. Pulang Pisau	27.661	32	219.455	10.480.771
13	Kab. Murung Raya	453.674	32	639.899	26.061.528
14	Kab. Barito Timur	158.543	32	362.978	15.781.111
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	1.287.404	118	2.370.160	70.737.796
1	Kab. Banjar	165.107	36	401.040	15.476.224
2	Kab. Barito Kuala	-	36	315.416	11.848.163
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	820.412	36	937.396	32.450.502
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.938	36	63.090	5.708.974
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	36	82.032	6.197.128
6	Kab. Kotabaru	1.031.137	36	1.545.257	48.566.622
7	Kab. Tabalong	205.687	36	1.992.960	65.153.147
8	Kab. Tanah Laut	756.318	36	1.062.166	34.929.175
9	Kab. Tapin	403.286	36	641.458	22.482.100
10	Kota Banjarbaru	-	36	37.846	4.926.391
11	Kota Banjarmasin	-	36	59.357	5.593.245



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		Pertambangan
			Perkebunan	Perhutanan	Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Kab. Balangan	3.753.163	121.894	-	8.004.655
13	Kab. Tanah Bumbu	3.753.163	4.532.373	993.014	1.995.574
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	35.753.058	10.031.502	256.364.856
1	Kab. Berau	3.753.163	15.726.250	12.133.798	5.461.426
2	Kab. Kutai Kartanegara	3.753.163	30.209.978	7.808.281	809.311.073
3	Kab. Kutai Barat	3.753.163	16.230.604	5.714.586	4.576.622
4	Kab. Kutai Timur	3.753.163	52.827.726	6.756.594	52.504.999
5	Kab. Paser	3.753.163	20.019.113	948.678	15.511.011
6	Kota Balikpapan	3.753.163	-	8.700	4.431.965
7	Kota Bontang	3.753.163	-	-	61.623.284
8	Kota Samarinda	3.753.163	-	-	20.442.815
9	Kab. Penajam Paser Utara	3.753.163	6.128.176	3.493.800	48.489.322
10	Kab. Mahakam Ulu	3.753.163	1.870.384	3.261.569	3.106.910
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	-	110.406	45.158	4.849.428
1	Kab. Bolaang Mongondow	3.753.163	110.360	-	1.424.403



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
12	Kab. Balangan	-	8.207.713	1.088	16.335.350
13	Kab. Tanah Bumbu	-	44.704.288	1.088	52.226.337
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	67.398.765	2.720	369.550.901
1	Kab. Berau	-	28.038.912	1.088	61.361.474
2	Kab. Kutai Kartanegara	-	113.854.139	1.088	961.184.559
3	Kab. Kutai Barat	-	23.845.287	1.088	50.368.187
4	Kab. Kutai Timur	-	74.707.197	1.088	186.797.604
5	Kab. Paser	-	21.497.259	1.088	57.977.149
6	Kota Balikpapan	-	60.295	1.088	4.502.048
7	Kota Bontang	-	28.554	1.088	61.652.926
8	Kota Samarinda	-	7.101.400	1.088	27.545.303
9	Kab. Penajam Paser Utara	-	49.467	1.088	58.161.853
10	Kab. Mahakam Ulu	-	412.550	1.088	8.652.501
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	2.749.534	7.322.047	6.855	15.083.428
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	1.461.130	1.088	2.996.981



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Kab. Balangan	5.418	-	266.822	-
13	Kab. Tanah Bumbu	201.439	38.617	66.519	-
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	993.140	278.653	7.121.246	-
1	Kab. Berau	764.470	505.575	189.633	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	1.468.541	325.345	28.101.079	-
3	Kab. Kutai Barat	788.988	238.108	158.910	-
4	Kab. Kutai Timur	2.568.014	281.525	1.823.090	-
5	Kab. Paser	973.151	39.528	538.577	-
6	Kota Balikpapan	-	362	153.888	-
7	Kota Bontang	-	-	2.139.697	-
8	Kota Samarinda	-	-	709.820	-
9	Kab. Penajam Paser Utara	297.897	145.575	1.683.657	-
10	Kab. Mahakam Ulu	90.921	135.899	107.879	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	6.134	2.509	202.060	114.564
1	Kab. Bolaang Mongondow	4.598	-	44.513	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
12	Kab. Balangan	273.590	36	545.866	20.634.379
13	Kab. Tanah Bumbu	1.490.143	36	1.796.754	57.776.254
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	1.872.188	76	10.265.303	379.816.204
1	Kab. Berau	973.573	38	2.433.289	67.547.926
2	Kab. Kutai Kartanegara	3.953.269	38	33.848.272	998.785.994
3	Kab. Kutai Barat	827.961	38	2.014.005	56.135.355
4	Kab. Kutai Timur	2.594.000	38	7.266.667	197.817.434
5	Kab. Paser	746.433	38	2.297.727	64.028.039
6	Kota Balikpapan	2.094	38	156.382	8.411.593
7	Kota Bontang	991	38	2.140.726	67.546.815
8	Kota Samarinda	246.576	38	956.434	32.254.900
9	Kab. Penajam Paser Utara	1.718	38	2.128.885	64.043.901
10	Kab. Mahakam Ulu	14.325	38	349.062	12.754.726
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	305.085	286	630.638	15.714.066
1	Kab. Bolaang Mongondow	45.660	34	94.805	6.844.949



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kab. Minahasa	3.753.163	63.237	-	1.592.281
3	Kab. Kepulauan Sangihe	3.753.163	-	-	1.044.028
4	Kota Bitung	3.753.163	-	-	1.081.564
5	Kota Manado	3.753.163	-	-	1.288.749
6	Kab. Kepulauan Talaud	3.753.163	-	-	1.583.844
7	Kab. Minahasa Selatan	3.753.163	147.023	-	1.472.062
8	Kota Tomohon	3.753.163	-	-	1.298.093
9	Kab. Minahasa Utara	3.753.163	51.937	-	1.399.780
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.753.163	-	-	1.108.528
11	Kota Kotamobagu	3.753.163	-	-	929.013
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.753.163	34.180	56.385	1.453.999
13	Kab. Minahasa Tenggara	3.753.163	14.829	-	1.325.950
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.753.163	14.901	-	1.249.417
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.753.163	5.156	124.249	1.146.000
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	3.088.208	180.665	27.316.306



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
2	Kab. Minahasa	6.994.973	-	1.088	8.651.579
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	107.567	1.088	1.152.683
4	Kota Bitung	-	21.825.217	7.850	22.914.631
5	Kota Manado	3.949.183	-	5.427	5.243.359
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	102.650	1.088	1.687.582
7	Kab. Minahasa Selatan	4.182	14.991	1.088	1.639.346
8	Kota Tomohon	-	72.101	1.088	1.371.282
9	Kab. Minahasa Utara	48.656	3.661.134	1.088	5.162.595
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	1.088	1.109.616
11	Kota Kotamobagu	-	-	1.088	930.101
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	23.442	1.088	1.569.094
13	Kab. Minahasa Tenggara	1.142	11.426	1.088	1.354.435
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	607.577	1.088	1.872.983
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	1.400.954	1.088	2.677.447
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	835.767	3.536	31.424.482



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Kab. Minahasa	2.635	-	49.759	218.593
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	-	32.626	-
4	Kota Bitung	-	-	33.799	-
5	Kota Manado	-	-	40.273	123.412
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	49.495	-
7	Kab. Minahasa Selatan	6.126	-	46.002	131
8	Kota Tomohon	-	-	40.565	-
9	Kab. Minahasa Utara	2.164	-	43.743	1.521
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	34.642	-
11	Kota Kotamobagu	-	-	29.032	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.424	1.958	45.437	-
13	Kab. Minahasa Tenggara	618	-	41.436	36
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	621	-	39.044	-
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	215	4.314	35.813	-
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	137.254	7.026	910.544	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
2	Kab. Minahasa	-	34	271.021	12.675.763
3	Kab. Kepulauan Sangihe	3.361	34	36.021	4.941.867
4	Kota Bitung	682.038	245	716.082	27.383.876
5	Kota Manado	-	170	163.855	9.160.377
6	Kab. Kepulauan Talaud	3.208	34	52.737	5.493.482
7	Kab. Minahasa Selatan	468	34	52.761	5.445.270
8	Kota Tomohon	2.253	34	42.852	5.167.297
9	Kab. Minahasa Utara	114.410	34	161.872	9.077.630
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	34	34.676	4.897.455
11	Kota Kotamobagu	-	34	29.066	4.712.330
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	733	34	49.586	5.371.843
13	Kab. Minahasa Tenggara	357	34	42.481	5.150.079
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	18.987	34	58.686	5.684.832
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	43.780	34	84.156	6.514.766
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	27.859	118	1.082.801	32.507.283



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Banggai	3.753.163	1.603.552	414.709	83.877.260
2	Kab. Banggai Kepulauan	3.753.163	94.681	-	1.710.358
3	Kab. Buol	3.753.163	3.642.853	-	1.698.373
4	Kab. Toli-Toli	3.753.163	112.191	307.952	1.824.356
5	Kab. Donggala	3.753.163	1.203.008	-	2.516.290
6	Kab. Morowali	3.753.163	796.211	-	2.313.462
7	Kab. Poso	3.753.163	604.709	-	2.873.142
8	Kota Palu	3.753.163	-	-	1.067.456
9	Kab. Parigi Moutong	3.753.163	1.784	-	2.638.837
10	Kab. Tojo Una Una	3.753.163	-	-	2.339.955
11	Kab. Sigi	3.753.163	-	-	1.779.146
12	Kab. Banggai Laut	3.753.163	-	-	1.313.484
13	Kab. Morowali Utara	3.753.163	4.293.842	-	3.313.106
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	2.012.888	49.220	15.746.231
1	Kab. Bantaeng	3.753.163	-	-	1.499.160



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
1	Kab. Banggai	-	58.756	1.088	85.955.365
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	1.088	1.806.127
3	Kab. Buol	-	30.276	1.088	5.372.590
4	Kab. Toli-Toli	-	31.770	1.088	2.277.357
5	Kab. Donggala	-	173.144	1.088	3.893.530
6	Kab. Morowali	-	2.600.117	1.088	5.710.878
7	Kab. Poso	-	-	1.088	3.478.939
8	Kota Palu	-	133.042	1.088	1.201.586
9	Kab. Parigi Moutong	-	23.441	1.088	2.665.150
10	Kab. Tojo Una Una	-	-	1.088	2.341.043
11	Kab. Sigi	-	-	1.088	1.780.234
12	Kab. Banggai Laut	-	-	1.088	1.314.572
13	Kab. Morowali Utara	-	292.524	1.088	7.900.560
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	6.455.893	6.537	24.270.769
1	Kab. Bantaeng	-	-	1.088	1.500.248



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Banggai	71.269	16.128	2.795.909	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	4.208	-	57.012	-
3	Kab. Buol	161.905	-	56.612	-
4	Kab. Toli-Toli	4.986	11.976	60.812	-
5	Kab. Donggala	53.467	-	83.876	-
6	Kab. Morowali	35.387	-	77.115	-
7	Kab. Poso	26.876	-	95.771	-
8	Kota Palu	-	-	35.582	-
9	Kab. Parigi Moutong	79	-	87.961	-
10	Kab. Tojo Una Una	-	-	77.998	-
11	Kab. Sigi	-	-	59.305	-
12	Kab. Banggai Laut	-	-	43.783	-
13	Kab. Morowali Utara	190.837	-	110.437	-
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	44.731	957	262.437	-
1	Kab. Bantaeng	-	-	56.219	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
1	Kab. Banggai	1.959	36	2.885.301	92.593.829
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	36	61.256	5.620.546
3	Kab. Buol	1.009	36	219.562	9.345.315
4	Kab. Toli-Toli	1.059	36	78.869	6.109.389
5	Kab. Donggala	5.771	36	143.150	7.789.843
6	Kab. Morowali	86.671	36	199.209	9.663.250
7	Kab. Poso	-	36	122.683	7.354.785
8	Kota Palu	4.435	36	40.053	4.994.802
9	Kab. Parigi Moutong	781	36	88.857	6.507.170
10	Kab. Tojo Una Una	-	36	78.034	6.172.240
11	Kab. Sigi	-	36	59.341	5.592.738
12	Kab. Banggai Laut	-	36	43.819	5.111.554
13	Kab. Morowali Utara	9.751	36	311.061	11.964.784
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	107.598	109	415.832	24.686.601
1	Kab. Bantaeng	-	41	56.260	5.309.671



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kab. Barru	3.753.163	-	-	1.423.623
3	Kab. Bone	3.753.163	408.555	-	4.458.640
4	Kab. Bulukumba	3.753.163	1.632.830	-	1.888.108
5	Kab. Enrekang	3.753.163	139.376	-	1.935.875
6	Kab. Gowa	3.753.163	496.952	196.879	2.514.400
7	Kab. Jeneponto	3.753.163	553.603	-	1.907.275
8	Kab. Luwu	3.753.163	-	-	1.845.389
9	Kab. Luwu Utara	3.753.163	507.434	-	2.769.462
10	Kab. Maros	3.753.163	-	-	1.582.789
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.753.163	-	-	2.332.833
12	Kota Palopo	3.753.163	-	-	920.475
13	Kab. Luwu Timur	3.753.163	876.983	-	1.997.482
14	Kab. Pinrang	3.753.163	32.320	-	1.867.627
15	Kab. Sinjai	3.753.163	-	-	1.444.739
16	Kab. Kepulauan Selayar	3.753.163	-	-	1.984.839



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
2	Kab. Barru	-	102	1.088	1.424.813
3	Kab. Bone	-	17.869	1.088	4.886.152
4	Kab. Bulukumba	-	-	1.110	3.522.048
5	Kab. Enrekang	-	655	1.088	2.076.994
6	Kab. Gowa	-	4.324	1.088	3.213.643
7	Kab. Jeneponto	-	-	1.088	2.461.966
8	Kab. Luwu	-	-	1.088	1.846.477
9	Kab. Luwu Utara	-	42.376	1.088	3.320.360
10	Kab. Maros	-	5.584.086	1.088	7.167.963
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	5.682.807	1.088	8.016.728
12	Kota Palopo	-	-	1.088	921.563
13	Kab. Luwu Timur	-	14.432.769	1.088	17.308.322
14	Kab. Pinrang	-	-	1.088	1.901.035
15	Kab. Sinjai	-	-	1.088	1.445.827
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	1.088	1.985.927



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Kab. Barru	-	-	53.386	-
3	Kab. Bone	20.428	-	167.199	-
4	Kab. Bulukumba	81.641	-	70.804	-
5	Kab. Enrekang	6.969	-	72.595	-
6	Kab. Gowa	24.848	8.613	94.290	-
7	Kab. Jeneponto	27.680	-	71.523	-
8	Kab. Luwu	-	-	69.202	-
9	Kab. Luwu Utara	25.372	-	103.855	-
10	Kab. Maros	-	-	59.355	-
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	87.481	-
12	Kota Palopo	-	-	34.518	-
13	Kab. Luwu Timur	43.849	-	74.906	-
14	Kab. Pinrang	1.616	-	70.036	-
15	Kab. Sinjai	-	-	54.178	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	74.431	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
2	Kab. Barru	4	41	53.431	5.231.407
3	Kab. Bone	670	41	188.338	8.827.653
4	Kab. Bulukumba	-	42	152.487	7.427.698
5	Kab. Enrekang	25	41	79.630	5.909.787
6	Kab. Gowa	162	41	127.954	7.094.760
7	Kab. Jeneponto	-	41	99.244	6.314.373
8	Kab. Luwu	-	41	69.243	5.668.883
9	Kab. Luwu Utara	1.589	41	130.857	7.204.380
10	Kab. Maros	209.403	41	268.799	11.189.925
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	213.105	41	300.627	12.070.518
12	Kota Palopo	-	41	34.559	4.709.285
13	Kab. Luwu Timur	541.229	41	660.025	21.721.510
14	Kab. Pinrang	-	41	71.693	5.725.891
15	Kab. Sinjai	-	41	54.219	5.253.209
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	41	74.472	5.813.562



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Kab. Sidenreng Rappang	3.753.163	107.892	-	2.170.562
18	Kab. Soppeng	3.753.163	43.630	-	1.490.311
19	Kab. Takalar	3.753.163	2.205.623	-	1.448.096
20	Kab. Tana Toraja	3.753.163	111.606	-	1.277.797
21	Kab. Wajo	3.753.163	860.942	-	18.265.482
22	Kota Pare-pare	3.753.163	-	-	956.337
23	Kota Makassar	3.753.163	-	-	3.801.925
24	Kab. Toraja Utara	3.753.163	73.807	-	1.201.699
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1.671.504	8.341	6.531.950
1	Kab. Buton	3.753.163	-	-	1.113.736
2	Kab. Konawe	3.753.163	1.419.398	-	1.622.952
3	Kab. Kolaka	3.753.163	2.883.398	-	1.484.023
4	Kab. Muna	3.753.163	-	33.364	1.267.906
5	Kota Kendari	3.753.163	-	-	1.296.106
6	Kota Bau-bau	3.753.163	-	-	1.267.460



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	87	1.088	2.279.629
18	Kab. Soppeng	-	2.556	1.088	1.537.585
19	Kab. Takalar	-	-	1.088	3.654.807
20	Kab. Tana Toraja	-	11.446	1.088	1.401.937
21	Kab. Wajo	-	-	1.088	19.127.512
22	Kota Pare-pare	-	-	1.088	957.425
23	Kota Makassar	-	-	1.106	3.803.031
24	Kab. Toraja Utara	-	44.495	1.088	1.321.089
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	4.304.313	4.795	12.520.903
1	Kab. Buton	-	480.310	1.593	1.595.639
2	Kab. Konawe	-	255.754	1.268	3.299.372
3	Kab. Kolaka	-	5.613.168	1.088	9.981.677
4	Kab. Muna	-	-	1.088	1.302.358
5	Kota Kendari	-	-	1.088	1.297.194
6	Kota Bau-bau	-	33.614	1.088	1.302.162



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
17	Kab. Sidenreng Rappang	5.395	-	81.396	-
18	Kab. Soppeng	2.181	-	55.887	-
19	Kab. Takalar	110.281	-	54.304	-
20	Kab. Tana Toraja	5.580	-	47.917	-
21	Kab. Wajo	43.047	-	684.956	-
22	Kota Pare-pare	-	-	35.863	-
23	Kota Makassar	-	-	142.572	-
24	Kab. Toraja Utara	3.690	-	45.064	-
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	37.145	162	108.866	-
1	Kab. Buton	-	-	41.765	-
2	Kab. Konawe	70.970	-	60.861	-
3	Kab. Kolaka	144.170	-	55.651	-
4	Kab. Muna	-	1.460	47.546	-
5	Kota Kendari	-	-	48.604	-
6	Kota Bau-bau	-	-	47.530	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
17	Kab. Sidenreng Rappang	3	41	86.835	6.119.627
18	Kab. Soppeng	96	41	58.205	5.348.953
19	Kab. Takalar	-	41	164.626	7.572.596
20	Kab. Tana Toraja	429	41	53.967	5.209.067
21	Kab. Wajo	-	41	728.044	23.608.719
22	Kota Pare-pare	-	41	35.904	4.746.492
23	Kota Makassar	-	41	142.613	7.698.807
24	Kab. Toraja Utara	1.669	41	50.464	5.124.716
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	71.739	80	217.992	12.738.895
1	Kab. Buton	18.012	60	59.837	5.408.639
2	Kab. Konawe	9.591	48	141.470	7.194.005
3	Kab. Kolaka	210.494	41	410.356	14.145.196
4	Kab. Muna	-	41	49.047	5.104.568
5	Kota Kendari	-	41	48.645	5.099.002
6	Kota Bau-bau	1.261	41	48.832	5.104.157



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kab. Konawe Selatan	3.753.163	758.401	-	2.352.763
8	Kab. Bombana	3.753.163	-	-	1.833.646
9	Kab. Wakatobi	3.753.163	-	-	1.557.583
10	Kab. Kolaka Utara	3.753.163	-	-	1.742.629
11	Kab. Konawe Utara	3.753.163	1.491.942	-	2.025.744
12	Kab. Buton Utara	3.753.163	-	-	1.406.165
13	Kab. Konawe Kepulauan	3.753.163	-	-	1.260.914
14	Kab. Kolaka Timur	3.753.163	132.879	-	1.448.410
15	Kab. Muna Barat	3.753.163	-	-	939.629
16	Kab. Buton Tengah	3.753.163	-	-	1.573.376
17	Kab. Buton Selatan	3.753.163	-	-	1.934.759
XXII	Provinsi Bali	-	206.986	-	2.996.263
1	Kab. Badung	3.753.163	-	-	1.187.446
2	Kab. Bangli	3.753.163	-	-	1.080.899
3	Kab. Buleleng	3.753.163	56.561	-	2.049.665



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
7	Kab. Konawe Selatan	-	5.228.520	1.088	8.340.772
8	Kab. Bombana	-	482.597	1.088	2.317.331
9	Kab. Wakatobi	-	-	1.088	1.558.671
10	Kab. Kolaka Utara	-	2.278.469	1.088	4.022.186
11	Kab. Konawe Utara	-	2.768.483	1.088	6.287.257
12	Kab. Buton Utara	-	-	1.088	1.407.253
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	1.088	1.262.002
14	Kab. Kolaka Timur	-	-	1.088	1.582.377
15	Kab. Muna Barat	-	-	1.088	940.717
16	Kab. Buton Tengah	-	48.053	1.088	1.622.517
17	Kab. Buton Selatan	-	28.286	1.088	1.964.133
XXII	Provinsi Bali	105.797	-	10.397	3.319.443
1	Kab. Badung	25.682	-	1.291	1.214.419
2	Kab. Bangli	4.896	-	1.088	1.086.883
3	Kab. Buleleng	66.178	-	8.847	2.181.251



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Kab. Konawe Selatan	37.920	-	88.229	-
8	Kab. Bombana	-	-	68.762	-
9	Kab. Wakatobi	-	-	58.409	-
10	Kab. Kolaka Utara	-	-	65.349	-
11	Kab. Konawe Utara	74.597	-	75.965	-
12	Kab. Buton Utara	-	-	52.731	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	47.284	-
14	Kab. Kolaka Timur	6.644	-	54.315	-
15	Kab. Muna Barat	-	-	35.236	-
16	Kab. Buton Tengah	-	-	59.002	-
17	Kab. Buton Selatan	-	-	72.553	-
XXII	Provinsi Bali	5.750	-	83.230	2.939
1	Kab. Badung	-	-	41.231	892
2	Kab. Bangli	-	-	37.531	170
3	Kab. Buleleng	2.749	-	71.169	2.298



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
7	Kab. Konawe Selatan	196.070	41	322.260	12.416.195
8	Kab. Bombana	18.097	41	86.900	6.157.394
9	Kab. Wakatobi	-	41	58.450	5.370.284
10	Kab. Kolaka Utara	85.443	41	150.833	7.926.182
11	Kab. Konawe Utara	103.818	41	254.421	10.294.841
12	Kab. Buton Utara	-	41	52.772	5.213.188
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	41	47.325	5.062.490
14	Kab. Kolaka Timur	-	41	61.000	5.396.540
15	Kab. Muna Barat	-	41	35.277	4.729.157
16	Kab. Buton Tengah	1.802	41	60.845	5.436.525
17	Kab. Buton Selatan	1.061	41	73.655	5.790.951
XXII	Provinsi Bali	-	289	92.208	3.411.651
1	Kab. Badung	-	45	42.168	5.009.750
2	Kab. Bangli	-	38	37.739	4.877.785
3	Kab. Buleleng	-	307	76.523	6.010.937



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kab. Gianyar	3.753.163	-	-	1.256.189
5	Kab. Jembrana	3.753.163	689.822	-	1.181.735
6	Kab. Karangasem	3.753.163	81.562	-	1.581.987
7	Kab. Klungkung	3.753.163	-	-	869.755
8	Kab. Tabanan	3.753.163	-	-	1.249.121
9	Kota Denpasar	3.753.163	-	-	1.528.255
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	135.930	230.600	4.680.292
1	Kab. Bima	3.753.163	-	434.231	2.245.991
2	Kab. Dompu	3.753.163	424.287	303.102	1.456.624
3	Kab. Lombok Barat	3.753.163	-	-	1.915.969
4	Kab. Lombok Tengah	3.753.163	-	43.146	2.800.709
5	Kab. Lombok Timur	3.753.163	76.704	92.644	3.271.414
6	Kab. Sumbawa	3.753.163	42.729	-	2.587.641
7	Kota Mataram	3.753.163	-	-	1.246.663
8	Kota Bima	3.753.163	-	-	1.152.209



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
4	Kab. Gianyar	11.289	-	1.187	1.268.665
5	Kab. Jembrana	-	-	1.088	1.872.645
6	Kab. Karangasem	-	-	1.088	1.664.637
7	Kab. Klungkung	-	-	1.088	870.843
8	Kab. Tabanan	315.144	-	1.088	1.565.353
9	Kota Denpasar	-	-	24.826	1.553.081
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	5.423.801	3.532	10.474.155
1	Kab. Bima	-	-	2.263	2.682.485
2	Kab. Dompu	-	-	1.088	2.185.101
3	Kab. Lombok Barat	-	51.914	3.118	1.971.001
4	Kab. Lombok Tengah	-	-	1.088	2.844.943
5	Kab. Lombok Timur	-	-	1.097	3.441.859
6	Kab. Sumbawa	-	7.632.329	1.110	10.263.809
7	Kota Mataram	-	-	1.102	1.247.765
8	Kota Bima	-	-	1.088	1.153.297



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Kab. Gianyar	-	-	43.618	392
5	Kab. Jembrana	33.533	-	41.032	-
6	Kab. Karangasem	3.965	-	54.930	-
7	Kab. Klungkung	-	-	30.200	-
8	Kab. Tabanan	-	-	43.372	10.943
9	Kota Denpasar	-	-	53.064	-
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.776	6.406	130.008	-
1	Kab. Bima	-	18.093	77.986	-
2	Kab. Dompu	20.625	12.629	50.577	-
3	Kab. Lombok Barat	-	-	66.527	-
4	Kab. Lombok Tengah	-	1.798	97.247	-
5	Kab. Lombok Timur	3.729	3.860	113.591	-
6	Kab. Sumbawa	2.077	-	89.849	-
7	Kota Mataram	-	-	43.287	-
8	Kota Bima	-	-	40.007	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
4	Kab. Gianyar	-	41	44.051	5.065.879
5	Kab. Jembrana	-	38	74.603	5.700.411
6	Kab. Karangasem	-	38	58.933	5.476.733
7	Kab. Klungkung	-	38	30.238	4.654.244
8	Kab. Tabanan	-	38	54.353	5.372.869
9	Kota Denpasar	-	862	53.926	5.360.170
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	150.661	98	290.949	10.765.104
1	Kab. Bima	-	79	96.158	6.531.806
2	Kab. Dompu	-	38	83.869	6.022.133
3	Kab. Lombok Barat	1.803	108	68.438	5.792.602
4	Kab. Lombok Tengah	-	38	99.083	6.697.189
5	Kab. Lombok Timur	-	38	121.218	7.316.240
6	Kab. Sumbawa	265.011	39	356.976	14.373.948
7	Kota Mataram	-	38	43.325	5.044.253
8	Kota Bima	-	38	40.045	4.946.505



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Kab. Sumbawa Barat	3.753.163	-	-	1.099.356
10	Kab. Lombok Utara	3.753.163	-	49.276	944.592
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	222.604	127.104	7.883.974
1	Kab. Alor	3.753.163	-	-	1.654.137
2	Kab. Belu	3.753.163	-	-	958.929
3	Kab. Ende	3.753.163	-	-	1.488.837
4	Kab. Flores Timur	3.753.163	82.354	-	1.729.325
5	Kab. Kupang	3.753.163	-	450.201	2.040.272
6	Kab. Lembata	3.753.163	-	-	1.298.990
7	Kab. Manggarai	3.753.163	-	-	1.340.567
8	Kab. Ngada	3.753.163	183.055	-	1.025.279
9	Kab. Sikka	3.753.163	50.187	-	1.560.449
10	Kab. Sumba Barat	3.753.163	49.170	58.217	981.294
11	Kab. Sumba Timur	3.753.163	429.759	-	2.299.877
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.753.163	-	-	2.172.681



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
9	Kab. Sumbawa Barat	-	14.010.962	1.088	15.111.406
10	Kab. Lombok Utara	-	-	1.088	994.956
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	190.773	157.544	7.622	8.589.621
1	Kab. Alor	-	-	2.545	1.656.682
2	Kab. Belu	-	-	1.088	960.017
3	Kab. Ende	102.090	-	1.088	1.592.015
4	Kab. Flores Timur	-	-	3.846	1.815.525
5	Kab. Kupang	-	-	1.088	2.491.561
6	Kab. Lembata	-	-	1.088	1.300.078
7	Kab. Manggarai	528.537	59.690	3.353	1.932.147
8	Kab. Ngada	132.466	-	1.088	1.341.888
9	Kab. Sikka	-	-	1.160	1.611.796
10	Kab. Sumba Barat	-	-	1.088	1.089.769
11	Kab. Sumba Timur	-	43.879	1.088	2.774.603
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	440.381	1.088	2.614.150



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Kab. Sumbawa Barat	-	-	38.172	-
10	Kab. Lombok Utara	-	2.053	32.798	-
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	6.183	3.531	218.999	5.299
1	Kab. Alor	-	-	57.435	-
2	Kab. Belu	-	-	33.296	-
3	Kab. Ende	-	-	51.696	3.545
4	Kab. Flores Timur	4.003	-	60.046	-
5	Kab. Kupang	-	18.758	70.843	-
6	Kab. Lembata	-	-	45.104	-
7	Kab. Manggarai	-	-	46.547	18.352
8	Kab. Ngada	8.899	-	35.600	4.600
9	Kab. Sikka	2.440	-	54.182	-
10	Kab. Sumba Barat	2.390	2.426	34.073	-
11	Kab. Sumba Timur	20.891	-	79.857	-
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	75.440	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
9	Kab. Sumbawa Barat	486.492	38	524.702	19.389.271
10	Kab. Lombok Utara	-	38	34.889	4.783.008
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.376	212	238.600	8.828.221
1	Kab. Alor	-	88	57.523	5.467.368
2	Kab. Belu	-	38	33.334	4.746.514
3	Kab. Ende	-	38	55.279	5.400.457
4	Kab. Flores Timur	-	134	64.183	5.632.871
5	Kab. Kupang	-	38	89.639	6.334.363
6	Kab. Lembata	-	38	45.142	5.098.383
7	Kab. Manggarai	2.073	116	67.088	5.752.398
8	Kab. Ngada	-	38	49.137	5.144.188
9	Kab. Sikka	-	40	56.662	5.421.621
10	Kab. Sumba Barat	-	38	38.927	4.881.859
11	Kab. Sumba Timur	1.524	38	102.310	6.630.076
12	Kab. Timor Tengah Selatan	15.291	38	90.769	6.458.082



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.753.163	-	-	1.622.133
14	Kota Kupang	3.753.163	-	-	1.141.583
15	Kab. Rote Ndao	3.753.163	-	-	1.446.903
16	Kab. Manggarai Barat	3.753.163	-	-	1.615.039
17	Kab. Nagekeo	3.753.163	-	-	1.261.604
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.753.163	95.890	-	1.484.892
19	Kab. Sumba Tengah	3.753.163	-	-	1.248.481
20	Kab. Manggarai Timur	3.753.163	-	-	1.409.873
21	Kab. Sabu Raijua	3.753.163	-	-	747.770
22	Kab. Malaka	3.753.163	-	-	1.006.981
XXV	Provinsi Maluku	-	298.848	164.069	11.580.378
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.753.163	-	92.988	2.612.659



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	17.667	1.088	1.640.888
14	Kota Kupang	-	-	1.088	1.142.671
15	Kab. Rote Ndao	-	-	1.088	1.447.991
16	Kab. Manggarai Barat	-	-	1.088	1.616.127
17	Kab. Nagekeo	-	-	1.088	1.262.692
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	1.088	1.581.870
19	Kab. Sumba Tengah	-	-	1.088	1.249.569
20	Kab. Manggarai Timur	-	68.559	1.088	1.479.520
21	Kab. Sabu Rajua	-	-	1.088	748.858
22	Kab. Malaka	-	-	1.088	1.008.069
XXV	Provinsi Maluku	-	2.337.093	6.989	14.387.377
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	1.088	2.706.735



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	56.324	-
14	Kota Kupang	-	-	39.638	-
15	Kab. Rote Ndao	-	-	50.240	-
16	Kab. Manggarai Barat	-	-	56.078	-
17	Kab. Nagekeo	-	-	43.806	-
18	Kab. Sumba Barat Daya	4.661	-	51.559	-
19	Kab. Sumba Tengah	-	-	43.350	-
20	Kab. Manggarai Timur	-	-	48.954	-
21	Kab. Sabu Raijua	-	-	25.964	-
22	Kab. Malaka	-	-	34.965	-
XXV	Provinsi Maluku	16.603	9.115	482.516	-
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	3.229	81.646	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
13	Kab. Timor Tengah Utara	613	38	56.975	5.451.026
14	Kota Kupang	-	38	39.676	4.935.510
15	Kab. Rote Ndao	-	38	50.278	5.251.432
16	Kab. Manggarai Barat	-	38	56.116	5.425.406
17	Kab. Nagekeo	-	38	43.844	5.059.699
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	38	56.258	5.391.291
19	Kab. Sumba Tengah	-	38	43.388	5.046.120
20	Kab. Manggarai Timur	2.381	38	51.373	5.284.056
21	Kab. Sabu Raijua	-	38	26.002	4.528.023
22	Kab. Malaka	-	38	35.003	4.796.235
XXV	Provinsi Maluku	97.379	291	605.904	14.993.281
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	34	84.909	6.544.807



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kab. Maluku Tengah	3.753.163	507.074	-	4.308.204
3	Kab. Maluku Tenggara	3.753.163	-	-	1.909.137
4	Kab. Buru	3.753.163	688.317	295.572	2.037.467
5	Kota Ambon	3.753.163	-	-	1.537.519
6	Kab. Seram Bagian Barat	3.753.163	-	-	2.808.097
7	Kab. Seram Bagian Timur	3.753.163	-	-	22.090.136
8	Kab. Kepulauan Aru	3.753.163	-	-	3.256.673
9	Kota Tual	3.753.163	-	-	1.264.523
10	Kab. Maluku Barat Daya	3.753.163	-	-	2.540.759
11	Kab. Buru Selatan	3.753.163	-	267.716	1.956.338
XXVI	Provinsi Papua	-	5.704.073	2.681.670	24.176.271
1	Kab. Biak Numfor	3.753.163	-	1.488.327	2.014.040
2	Kab. Jayapura	3.753.163	1.692.283	-	3.152.669
3	Kab. Jayawijaya	3.753.163	-	-	2.405.872
4	Kab. Merauke	3.753.163	10.378.738	2.592.510	6.975.800



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
2	Kab. Maluku Tengah	-	-	1.360	4.816.638
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	2.170	1.911.307
4	Kab. Buru	-	-	1.088	3.022.444
5	Kota Ambon	-	-	1.096	1.538.615
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	1.088	2.809.185
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	1.088	22.091.224
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	15.715	3.272.388
9	Kota Tual	-	-	1.088	1.265.611
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	9.348.374	1.088	11.890.221
11	Kab. Buru Selatan	-	-	1.088	2.225.142
XXVI	Provinsi Papua	-	34.791.210	7.887	67.361.111
1	Kab. Biak Numfor	-	557.980	1.088	4.061.435
2	Kab. Jayapura	-	-	1.088	4.846.040
3	Kab. Jayawijaya	-	252.515	1.088	2.659.475
4	Kab. Merauke	-	-	1.088	19.948.136



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Kab. Maluku Tengah	21.128	-	134.631	-
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	59.661	-
4	Kab. Buru	28.680	10.263	63.671	-
5	Kota Ambon	-	-	48.047	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	87.753	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	690.317	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	101.771	-
9	Kota Tual	-	-	39.516	-
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	79.399	-
11	Kab. Buru Selatan	-	9.296	61.136	-
XXVI	Provinsi Papua	316.893	148.982	1.007.345	-
1	Kab. Biak Numfor	-	51.678	62.939	-
2	Kab. Jayapura	70.512	-	98.521	-
3	Kab. Jayawijaya	-	-	75.183	-
4	Kab. Merauke	432.447	90.018	217.994	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
2	Kab. Maluku Tengah	-	42	155.801	8.725.602
3	Kab. Maluku Tenggara	-	68	59.729	5.724.199
4	Kab. Buru	-	34	102.648	6.878.255
5	Kota Ambon	-	34	48.081	5.339.859
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	34	87.787	6.650.135
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	34	690.351	26.534.738
8	Kab. Kepulauan Aru	-	491	102.262	7.127.813
9	Kota Tual	-	34	39.550	5.058.324
10	Kab. Maluku Barat Daya	292.137	34	371.570	16.014.954
11	Kab. Buru Selatan	-	34	70.466	6.048.771
XXVI	Provinsi Papua	1.449.634	329	2.923.183	70.284.294
1	Kab. Biak Numfor	17.437	34	132.088	7.946.686
2	Kab. Jayapura	-	34	169.067	8.768.270
3	Kab. Jayawijaya	7.891	34	83.108	6.495.746
4	Kab. Merauke	-	34	740.493	24.441.792



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kab. Mimika	3.753.163	1.992.318	1.312.550	4.377.837
6	Kab. Nabire	3.753.163	4.032.023	470.050	3.023.453
7	Kab. Paniai	3.753.163	-	-	2.081.177
8	Kab. Puncak Jaya	3.753.163	-	-	2.762.080
9	Kab. Kepulauan Yapen	3.753.163	-	-	2.440.420
10	Kota Jayapura	3.753.163	-	-	1.280.361
11	Kab. Sarmi	3.753.163	99.883	491.395	4.580.030
12	Kab. Keerom	3.753.163	1.196.311	58.838	2.950.564
13	Kab. Yahukimo	3.753.163	-	-	4.291.856
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.753.163	-	-	4.138.276
15	Kab. Tolikara	3.753.163	-	-	3.098.318
16	Kab. Boven Digoel	3.753.163	3.424.736	3.388.949	5.113.796
17	Kab. Mappi	3.753.163	-	818.017	5.061.213
18	Kab. Asmat	3.753.163	-	-	5.244.587
19	Kab. Waropen	3.753.163	-	-	5.184.433



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
5	Kab. Mimika	-	125.881.126	1.088	133.564.919
6	Kab. Nabire	-	-	1.088	7.526.614
7	Kab. Paniai	-	243.800	1.088	2.326.065
8	Kab. Puncak Jaya	-	382.495	1.088	3.145.663
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	1.088	2.441.508
10	Kota Jayapura	-	-	1.088	1.281.449
11	Kab. Sarmi	-	1.373.328	1.088	6.545.724
12	Kab. Keerom	-	-	1.088	4.206.801
13	Kab. Yahukimo	-	2.392.410	1.088	6.685.354
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	3.901.770	1.088	8.041.134
15	Kab. Tolikara	-	1.792.069	1.088	4.891.475
16	Kab. Boven Digoel	-	-	1.088	11.928.569
17	Kab. Mappi	-	-	1.088	5.880.318
18	Kab. Asmat	-	-	1.088	5.245.675
19	Kab. Waropen	-	-	1.088	5.185.521



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Kab. Mimika	83.013	45.575	136.807	-
6	Kab. Nabire	168.001	16.321	94.483	-
7	Kab. Paniai	-	-	65.037	-
8	Kab. Puncak Jaya	-	-	86.315	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	76.263	-
10	Kota Jayapura	-	-	40.011	-
11	Kab. Sarmi	4.162	17.062	143.126	-
12	Kab. Keerom	49.846	2.043	92.205	-
13	Kab. Yahukimo	-	-	134.120	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	129.321	-
15	Kab. Tolikara	-	-	96.822	-
16	Kab. Boven Digoel	142.697	117.672	159.806	-
17	Kab. Mappi	-	28.403	158.163	-
18	Kab. Asmat	-	-	163.893	-
19	Kab. Waropen	-	-	162.014	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
5	Kab. Mimika	3.933.785	34	4.199.214	141.517.296
6	Kab. Nabire	-	34	278.839	11.558.616
7	Kab. Paniai	7.619	34	72.690	6.151.918
8	Kab. Puncak Jaya	11.953	34	98.302	6.997.128
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	34	76.297	6.270.968
10	Kota Jayapura	-	34	40.045	5.074.657
11	Kab. Sarmi	42.917	34	207.301	10.506.188
12	Kab. Keerom	-	34	144.128	8.104.092
13	Kab. Yahukimo	74.763	34	208.917	10.647.434
14	Kab. Pegunungan Bintang	121.930	34	251.285	12.045.582
15	Kab. Tolikara	56.002	34	152.858	8.797.496
16	Kab. Boven Digoel	-	34	420.209	16.101.941
17	Kab. Mappi	-	34	186.600	9.820.081
18	Kab. Asmat	-	34	163.927	9.162.765
19	Kab. Waropen	-	34	162.048	9.100.732



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Kab. Supiori	3.753.163	-	-	1.933.015
21	Kab. Mamberamo Raya	3.753.163	-	106.042	7.739.377
22	Kab. Mamberamo Tengah	3.753.163	-	-	1.347.141
23	Kab. Yalimo	3.753.163	-	-	1.252.671
24	Kab. Lanny Jaya	3.753.163	-	-	1.548.291
25	Kab. Nduga	3.753.163	-	-	1.774.311
26	Kab. Dogiyai	3.753.163	-	-	2.398.859
27	Kab. Puncak	3.753.163	-	-	2.625.569
28	Kab. Intan Jaya	3.753.163	-	-	2.446.969
29	Kab. Deiyai	3.753.163	-	-	3.462.100
XXVII	Provinsi Maluku Utara	-	252.655	864.751	5.660.654
1	Kab. Halmahera Tengah	3.753.163	-	367.859	2.576.817
2	Kota Ternate	3.753.163	-	-	2.095.289
3	Kab. Halmahera Barat	3.753.163	-	-	2.241.550
4	Kab. Halmahera Timur	3.753.163	207.578	1.376.290	2.540.480



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya				
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
20	Kab. Supiori	-	-	1.088	1.934.103
21	Kab. Mamberamo Raya	-	-	1.088	7.846.507
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	1.088	1.348.229
23	Kab. Yalimo	-	-	1.088	1.253.759
24	Kab. Lanny Jaya	-	-	1.088	1.549.379
25	Kab. Nduga	-	-	1.088	1.775.399
26	Kab. Dogiyai	-	-	1.088	2.399.947
27	Kab. Puncak	-	1.556.271	1.088	4.182.928
28	Kab. Intan Jaya	-	831.076	1.088	3.279.133
29	Kab. Deiyai	-	-	1.088	3.463.188
XXVII	Provinsi Maluku Utara	7.045	1.705.270	3.088	8.493.463
1	Kab. Halmahera Tengah	-	276.499	1.088	3.222.263
2	Kota Ternate	-	-	1.088	2.096.377
3	Kab. Halmahera Barat	28.181	235.695	1.088	2.506.514
4	Kab. Halmahera Timur	-	925.414	1.088	5.050.850



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	Kab. Supiori	-	-	60.407	-
21	Kab. Mamberamo Raya	-	3.682	241.856	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	42.098	-
23	Kab. Yalimo	-	-	39.146	-
24	Kab. Lanny Jaya	-	-	48.384	-
25	Kab. Nduga	-	-	55.447	-
26	Kab. Dogiyai	-	-	74.964	-
27	Kab. Puncak	-	-	82.049	-
28	Kab. Intan Jaya	-	-	76.468	-
29	Kab. Deiyai	-	-	108.191	-
XXVII	Provinsi Maluku Utara	5.615	16.815	94.344	117
1	Kab. Halmahera Tengah	-	16.094	96.631	-
2	Kota Ternate	-	-	78.573	-
3	Kab. Halmahera Barat	-	-	84.058	1.057
4	Kab. Halmahera Timur	10.379	60.213	95.268	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
20	Kab. Supiori	-	34	60.441	5.747.707
21	Kab. Mamberamo Raya	-	34	245.572	11.845.242
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	34	42.132	5.143.524
23	Kab. Yalimo	-	34	39.180	5.046.102
24	Kab. Lanny Jaya	-	34	48.418	5.350.960
25	Kab. Nduga	-	34	55.481	5.584.043
26	Kab. Dogiyai	-	34	74.998	6.228.108
27	Kab. Puncak	48.633	34	130.716	8.066.807
28	Kab. Intan Jaya	25.971	34	102.473	7.134.769
29	Kab. Deiyai	-	34	108.225	7.324.576
XXVII	Provinsi Maluku Utara	28.421	51	145.363	8.638.826
1	Kab. Halmahera Tengah	10.369	41	123.135	7.098.561
2	Kota Ternate	-	41	78.614	5.928.154
3	Kab. Halmahera Barat	8.839	41	93.995	6.353.672
4	Kab. Halmahera Timur	34.703	41	200.604	9.004.617



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kab. Halmahera Selatan	3.753.163	385.606	920.270	4.158.100
6	Kab. Halmahera Utara	3.753.163	345.276	-	1.747.064
7	Kab. Kepulauan Sula	3.753.163	-	794.586	2.025.627
8	Kota Tidore Kepulauan	3.753.163	-	-	1.751.950
9	Kab. Pulau Morotai	3.753.163	-	-	1.846.877
10	Kab. Pulau Taliabu	3.753.163	72.161	-	1.658.864
XXVIII	Provinsi Banten	-	935.696	1.039.362	6.830.327
1	Kab. Lebak	3.753.163	2.692.984	1.768.424	4.384.862
2	Kab. Pandeglang	3.753.163	793.778	2.114.975	4.123.035
3	Kab. Serang	3.753.163	256.023	269.396	3.666.843
4	Kab. Tangerang	3.753.163	-	-	6.033.019
5	Kota Cilegon	3.753.163	-	4.654	1.184.366
6	Kota Tangerang	3.753.163	-	-	3.819.093
7	Kota Serang	3.753.163	-	-	1.503.264
8	Kota Tangerang Selatan	3.753.163	-	-	2.606.827



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
5	Kab. Halmahera Selatan	-	774.935	2.561	6.241.472
6	Kab. Halmahera Utara	-	3.841.013	1.088	5.934.441
7	Kab. Kepulauan Sula	-	143.182	1.088	2.964.483
8	Kota Tidore Kepulauan	-	-	1.088	1.753.038
9	Kab. Pulau Morotai	-	-	1.088	1.847.965
10	Kab. Pulau Taliabu	-	624.341	1.088	2.356.454
XXVIII	Provinsi Banten	81	1.577.289	2.341	10.385.096
1	Kab. Lebak	324	1.169.544	1.088	10.017.226
2	Kab. Pandeglang	-	4.084.332	1.088	11.117.208
3	Kab. Serang	-	1.033.902	1.088	5.227.252
4	Kab. Tangerang	-	-	1.249	6.034.268
5	Kota Cilegon	-	21.379	1.088	1.211.487
6	Kota Tangerang	-	-	1.436	3.820.529
7	Kota Serang	-	-	1.088	1.504.352
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	1.241	2.608.068



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Kab. Halmahera Selatan	19.280	40.262	155.929	-
6	Kab. Halmahera Utara	17.264	-	65.515	-
7	Kab. Kepulauan Sula	-	34.763	75.961	-
8	Kota Tidore Kepulauan	-	-	65.698	-
9	Kab. Pulau Morotai	-	-	69.258	-
10	Kab. Pulau Taliabu	3.608	-	62.207	-
XXVIII	Provinsi Banten	41.586	40.420	227.678	3
1	Kab. Lebak	119.688	68.772	146.162	11
2	Kab. Pandeglang	35.279	82.249	137.434	-
3	Kab. Serang	11.379	10.476	122.228	-
4	Kab. Tangerang	-	-	201.101	-
5	Kota Cilegon	-	181	39.479	-
6	Kota Tangerang	-	-	127.303	-
7	Kota Serang	-	-	50.109	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	86.894	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
5	Kab. Halmahera Selatan	29.060	96	244.627	10.239.262
6	Kab. Halmahera Utara	144.038	41	226.858	9.914.462
7	Kab. Kepulauan Sula	5.369	41	116.134	6.833.780
8	Kota Tidore Kepulauan	-	41	65.739	5.571.940
9	Kab. Pulau Morotai	-	41	69.299	5.670.427
10	Kab. Pulau Taliabu	23.413	41	89.269	6.198.886
XXVIII	Provinsi Banten	52.576	78	362.341	10.747.437
1	Kab. Lebak	38.985	36	373.654	14.144.043
2	Kab. Pandeglang	136.144	36	391.142	15.261.513
3	Kab. Serang	34.463	36	178.582	9.158.997
4	Kab. Tangerang	-	42	201.143	9.988.574
5	Kota Cilegon	713	36	40.409	5.005.059
6	Kota Tangerang	-	48	127.351	7.701.043
7	Kota Serang	-	36	50.145	5.307.660
8	Kota Tangerang Selatan	-	41	86.935	6.448.166



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-	6.045.431	96.022	3.148.800
1	Kab. Bangka	3.753.163	4.541.579	69.549	2.061.333
2	Kab. Belitung	3.753.163	5.470.155	-	1.748.520
3	Kota Pangkal Pinang	3.753.163	-	-	1.347.994
4	Kab. Bangka Selatan	3.753.163	1.167.009	-	2.081.725
5	Kab. Bangka Tengah	3.753.163	1.387.762	46.178	1.776.377
6	Kab. Bangka Barat	3.753.163	5.489.144	-	1.826.762
7	Kab. Belitung Timur	3.753.163	6.126.074	268.359	1.752.488
XXX	Provinsi Gorontalo	-	879.868	259.031	1.939.536
1	Kab. Boalemo	3.753.163	1.074.338	-	1.271.533
2	Kab. Gorontalo	3.753.163	836.168	-	1.278.184
3	Kota Gorontalo	3.753.163	-	-	701.440
4	Kab. Pohuwato	3.753.163	1.547.827	-	1.619.257
5	Kab. Bone Bolango	3.753.163	-	-	1.531.026
6	Kab. Gorontalo Utara	3.753.163	61.141	1.036.126	1.356.703



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-	11.870.624	2.176	21.163.053
1	Kab. Bangka	-	8.952.143	1.088	15.625.692
2	Kab. Belitung	-	2.494.354	2.178	9.715.207
3	Kota Pangkal Pinang	-	37.649	1.088	1.386.731
4	Kab. Bangka Selatan	-	6.649.221	1.088	9.899.043
5	Kab. Bangka Tengah	-	6.046.654	1.088	9.258.059
6	Kab. Bangka Barat	-	14.943.659	1.088	22.260.653
7	Kab. Belitung Timur	-	8.358.815	1.088	16.506.824
XXX	Provinsi Gorontalo	-	29.045	1.632	3.109.112
1	Kab. Boalemo	-	-	1.088	2.346.959
2	Kab. Gorontalo	-	7.967	1.088	2.123.407
3	Kota Gorontalo	-	-	1.088	702.528
4	Kab. Pohuwato	-	28.614	1.088	3.196.786
5	Kab. Bone Bolango	-	54.186	1.088	1.586.300
6	Kab. Gorontalo Utara	-	25.412	1.088	2.480.470



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	268.686	4.001	87.467	-
1	Kab. Bangka	201.848	2.656	71.574	-
2	Kab. Belitung	243.118	-	60.713	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	46.805	-
4	Kab. Bangka Selatan	51.867	-	72.282	-
5	Kab. Bangka Tengah	61.678	1.764	61.680	-
6	Kab. Bangka Barat	243.962	-	63.429	-
7	Kab. Belitung Timur	272.270	10.250	60.850	-
XXX	Provinsi Gorontalo	48.882	14.391	80.814	-
1	Kab. Boalemo	44.764	-	39.735	-
2	Kab. Gorontalo	34.840	-	39.943	-
3	Kota Gorontalo	-	-	21.920	-
4	Kab. Pohuwato	64.493	-	50.602	-
5	Kab. Bone Bolango	-	-	47.845	-
6	Kab. Gorontalo Utara	2.548	35.977	42.397	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan	Sektor Lainnya		
		Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya			
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	329.740	60	689.954	21.853.007
1	Kab. Bangka	310.838	38	586.954	19.965.809
2	Kab. Belitung	86.610	76	390.517	13.858.887
3	Kota Pangkal Pinang	1.307	38	48.150	5.188.044
4	Kab. Bangka Selatan	230.876	38	355.063	14.007.269
5	Kab. Bangka Tengah	209.953	38	335.113	13.346.335
6	Kab. Bangka Barat	518.877	38	826.306	26.840.122
7	Kab. Belitung Timur	290.237	38	633.645	20.893.632
XXX	Provinsi Gorontalo	1.210	68	145.365	3.254.477
1	Kab. Boalemo	-	34	84.533	6.184.655
2	Kab. Gorontalo	249	34	75.066	5.951.636
3	Kota Gorontalo	-	34	21.954	4.477.645
4	Kab. Pohuwato	894	34	116.023	7.065.972
5	Kab. Bone Bolango	1.693	34	49.572	5.389.035
6	Kab. Gorontalo Utara	794	34	81.750	6.315.383



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	535.661	-	27.321.510
1	Kab. Natuna	3.753.163	-	-	59.232.972
2	Kab. Kepulauan Anambas	3.753.163	120.251	-	31.072.097
3	Kab. Karimun	3.753.163	242.840	-	3.235.217
4	Kota Batam	3.753.163	-	-	5.642.873
5	Kota Tanjung Pinang	3.753.163	-	-	2.580.462
6	Kab. Lingga	3.753.163	333.046	-	3.753.451
7	Kab. Bintan	3.753.163	1.446.505	-	3.768.968
XXXII	Provinsi Papua Barat	-	2.572.779	4.416.338	121.687.486
1	Kab. Fak Fak	3.753.163	935.304	60.320	8.548.019
2	Kab. Manokwari	3.753.163	-	-	7.148.818
3	Kab. Sorong	3.753.163	4.006.773	-	153.270.829
4	Kota Sorong	3.753.163	-	-	2.908.002
5	Kab. Raja Ampat	3.753.163	-	-	7.313.987
6	Kab. Sorong Selatan	3.753.163	1.593.027	761.870	4.941.632



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	5.364.507	4.515	33.226.193
1	Kab. Natuna	-	-	1.088	59.234.060
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	1.088	31.193.436
3	Kab. Karimun	-	21.072.410	3.078	24.553.545
4	Kota Batam	-	-	4.716	5.647.589
5	Kota Tanjung Pinang	-	-	1.856	2.582.318
6	Kab. Lingga	-	34.024	1.088	4.121.609
7	Kab. Bintan	-	351.593	5.145	5.572.211
XXXII	Provinsi Papua Barat	-	2.554.745	4.123	131.235.471
1	Kab. Fak Fak	-	3.259	1.088	9.547.990
2	Kab. Manokwari	-	8.112.699	1.088	15.262.605
3	Kab. Sorong	-	538.507	1.088	157.817.197
4	Kota Sorong	-	444.042	3.439	3.355.483
5	Kab. Raja Ampat	-	252.185	1.088	7.567.260
6	Kab. Sorong Selatan	-	-	1.088	7.297.617



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	23.807	-	910.717	-
1	Kab. Natuna	-	-	1.974.432	-
2	Kab. Kepulauan Anambas	5.345	-	1.035.737	-
3	Kab. Karimun	10.793	-	107.841	-
4	Kota Batam	-	-	188.096	-
5	Kota Tanjung Pinang	-	-	86.015	-
6	Kab. Lingga	14.802	-	125.115	-
7	Kab. Bintan	64.289	-	125.632	-
XXXII	Provinsi Papua Barat	57.173	98.141	2.028.125	-
1	Kab. Fak Fak	46.765	2.597	320.551	-
2	Kab. Manokwari	-	-	268.081	-
3	Kab. Sorong	200.339	-	5.747.656	-
4	Kota Sorong	-	-	109.050	-
5	Kab. Raja Ampat	-	-	274.275	-
6	Kab. Sorong Selatan	79.651	32.803	185.311	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	178.817	150	1.113.491	34.339.684
1	Kab. Natuna	-	36	1.974.468	64.961.691
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	36	1.041.118	35.987.717
3	Kab. Karimun	702.414	103	821.151	29.127.859
4	Kota Batam	-	157	188.253	9.589.005
5	Kota Tanjung Pinang	-	62	86.077	6.421.558
6	Kab. Lingga	1.134	36	141.087	8.015.859
7	Kab. Bintan	11.720	171	201.812	9.527.186
XXXII	Provinsi Papua Barat	42.579	69	2.226.087	133.461.558
1	Kab. Fak Fak	122	41	370.076	13.671.229
2	Kab. Manokwari	304.226	41	572.348	19.588.116
3	Kab. Sorong	20.194	41	5.968.230	167.538.590
4	Kota Sorong	16.652	129	125.831	7.234.477
5	Kab. Raja Ampat	9.457	41	283.773	11.604.196
6	Kab. Sorong Selatan	-	41	297.806	11.348.586



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kab. Teluk Bintuni	3.753.163	3.180.767	7.308.635	270.242.673
8	Kab. Teluk Wondama	3.753.163	-	2.909.308	3.874.600
9	Kab. Kaimana	3.753.163	128.993	3.586.471	4.565.185
10	Kab. Maybrat	3.753.163	412.218	612.906	4.621.588
11	Kab. Tambrauw	3.753.163	34.032	2.425.843	4.052.838
12	Kab. Manokwari Selatan	3.753.163	-	-	3.788.971
13	Kab. Pegunungan Arfak	3.753.163	-	-	11.472.800
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	2.275.367	109.387	3.718.521
1	Kab. Majene	3.753.163	-	-	1.863.437
2	Kab. Mamuju	3.753.163	-	-	3.310.401
3	Kab. Polewali Mandar	3.753.163	-	-	2.158.808
4	Kab. Mamasa	3.753.163	-	-	1.914.510
5	Kab. Pasangkayu	3.753.163	6.876.248	437.549	3.673.145
6	Kab. Mamuju Tengah	3.753.163	2.225.222	-	1.953.782
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-	6.403.586	5.137.142	46.156.184



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
7	Kab. Teluk Bintuni	-	-	1.088	280.733.163
8	Kab. Teluk Wondama	-	-	1.088	6.784.996
9	Kab. Kaimana	-	868.286	1.088	9.150.023
10	Kab. Maybrat	-	-	1.088	5.647.800
11	Kab. Tambrauw	-	-	1.088	6.513.801
12	Kab. Manokwari Selatan	-	-	1.088	3.790.059
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	1.088	11.473.888
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	5.031	1.632	6.109.938
1	Kab. Majene	-	-	1.088	1.864.525
2	Kab. Mamuju	-	20.125	1.088	3.331.614
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	1.088	2.159.896
4	Kab. Mamasa	-	-	1.088	1.915.598
5	Kab. Pasangkayu	-	-	1.088	10.988.030
6	Kab. Mamuju Tengah	-	-	1.088	4.180.092
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-	8.870.391	1.360	66.568.663



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Kab. Teluk Bintuni	159.038	314.677	10.134.100	-
8	Kab. Teluk Wondama	-	125.262	145.298	-
9	Kab. Kaimana	6.450	154.418	171.194	-
10	Kab. Maybrat	20.611	26.389	173.310	-
11	Kab. Tambrauw	1.702	104.446	151.981	-
12	Kab. Manokwari Selatan	-	-	142.086	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	430.230	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	37.923	1.519	51.646	-
1	Kab. Majene	-	-	71.173	-
2	Kab. Mamuju	-	-	126.439	-
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	82.454	-
4	Kab. Mamasa	-	-	73.124	-
5	Kab. Pasangkayu	353.363	19.750	140.294	-
6	Kab. Mamuju Tengah	114.352	-	74.624	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	177.877	142.698	1.282.116	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambahan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
7	Kab. Teluk Bintuni	-	41	10.607.856	295.094.182
8	Kab. Teluk Wondama	-	41	270.601	10.808.760
9	Kab. Kaimana	32.561	41	364.664	13.267.850
10	Kab. Maybrat	-	41	220.351	9.621.314
11	Kab. Tambrauw	-	41	258.170	10.525.134
12	Kab. Manokwari Selatan	-	41	142.127	7.685.349
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	41	430.271	15.657.322
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	70	23	91.181	6.201.119
1	Kab. Majene	-	42	71.215	5.688.903
2	Kab. Mamuju	769	42	127.250	7.212.027
3	Kab. Polewali Mandar	-	42	82.496	5.995.555
4	Kab. Mamasa	-	42	73.166	5.741.927
5	Kab. Pasangkayu	-	42	513.449	15.254.642
6	Kab. Mamuju Tengah	-	42	189.018	8.122.273
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	246.400	38	1.849.129	68.417.792



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah		
			Sektor		
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bulungan	3.753.163	8.606.820	6.450.368	48.556.253
2	Kab. Malinau	3.753.163	191.146	9.815.602	7.241.136
3	Kab. Nunukan	3.753.163	12.115.628	3.033.075	20.087.900
4	Kota Tarakan	3.753.163	-	-	101.918.057
5	Kab. Tana Tidung	3.753.163	4.700.750	1.249.523	6.821.392
	Jumlah	1.910.361.666	2.011.562.100	551.075.400	11.307.063.910



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Bagian Daerah			Jumlah
		Sektor			
		Pertambangan		Sektor Lainnya	
		Panas Bumi	Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4+5+6+7+8+9)
1	Kab. Bulungan	-	1.288.305	1.088	64.902.834
2	Kab. Malinau	-	11.173.287	1.088	28.422.259
3	Kab. Nunukan	-	22.526.709	1.088	57.764.400
4	Kota Tarakan	-	-	1.088	101.919.145
5	Kab. Tana Tidung	-	493.262	1.088	13.266.015
	Jumlah	234.373.500	1.368.713.700	1.125.900	15.473.914.510



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan			
		Sektor			
		Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan	
Minyak Bumi dan Gas Bumi	Panas Bumi				
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bulungan	418.387	268.765	1.685.981	-
2	Kab. Malinau	9.292	408.983	251.428	-
3	Kab. Nunukan	588.954	126.378	697.497	-
4	Kota Tarakan	-	-	3.538.821	-
5	Kab. Tana Tidung	228.509	52.063	236.854	-
	Jumlah	89.402.760	21.430.710	376.902.130	7.812.450



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya	Sektor Lainnya		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
1	Kab. Bulungan	44.733	38	2.417.904	71.073.901
2	Kab. Malinau	387.961	38	1.057.702	33.233.124
3	Kab. Nunukan	782.177	38	2.195.044	63.712.607
4	Kota Tarakan	-	38	3.538.859	109.211.167
5	Kab. Tana Tidung	17.127	38	534.591	17.553.769
	Jumlah	45.623.790	37.530	541.209.370	17.925.485.546

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Biaya Pemungutan		Jumlah	Total
		Sektor			
		Pertambangan	Sektor Lainnya		
		Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya			
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(11+12+13+14+15+16)	(18)=(3+10+17)
1	Kab. Bulungan	44.733	38	2.417.904	71.073.901
2	Kab. Malinau	387.961	38	1.057.702	33.233.124
3	Kab. Nunukan	782.177	38	2.195.044	63.712.607
4	Kota Tarakan	-	38	3.538.859	109.211.167
5	Kab. Tana Tidung	17.127	38	534.591	17.553.769
Jumlah		45.623.790	37.530	541.209.370	17.925.485.546

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Perundang-undangan,



Haqiyati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Provinsi Aceh	733.307	90.787.900	91.521.207
1	Kab. Aceh Barat	51.581	6.162.616	6.214.197
2	Kab. Aceh Besar	29.066	7.574.016	7.603.082
3	Kab. Aceh Selatan	19.139	5.583.254	5.602.393
4	Kab. Aceh Singkil	18.205	3.330.591	3.348.796
5	Kab. Aceh Tengah	44.053	4.678.870	4.722.923
6	Kab. Aceh Tenggara	21.747	3.285.163	3.306.910
7	Kab. Aceh Timur	44.847	4.406.189	4.451.036
8	Kab. Aceh Utara	38.730	5.394.547	5.433.277
9	Kab. Bireuen	42.147	5.831.382	5.873.529
10	Kab. Pidie	23.894	6.399.291	6.423.185
11	Kab. Simeulue	15.415	2.903.312	2.918.727
12	Kota Banda Aceh	252.095	33.156.772	33.408.867
13	Kota Sabang	17.821	3.190.728	3.208.549
14	Kota Langsa	100.684	8.336.250	8.436.934



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Kota Lhokseumawe	111.732	8.000.687	8.112.419
16	Kab. Nagan Raya	110.430	4.470.973	4.581.403
17	Kab. Aceh Jaya	15.107	2.810.073	2.825.180
18	Kab. Aceh Barat Daya	22.202	3.209.125	3.231.327
19	Kab. Gayo Lues	15.260	2.610.452	2.625.712
20	Kab. Aceh Tamiang	43.962	5.628.409	5.672.371
21	Kab. Bener Meriah	24.635	3.317.538	3.342.173
22	Kota Subulussalam	21.263	3.006.061	3.027.324
23	Kab. Pidie Jaya	15.944	2.895.553	2.911.497
II	Provinsi Sumatera Utara	30.018.562	297.383.238	327.401.800
1	Kab. Asahan	871.054	13.297.206	14.168.260
2	Kab. Dairi	424.712	5.535.222	5.959.934
3	Kab. Deli Serdang	1.369.081	28.641.129	30.010.210
4	Kab. Karo	451.001	6.927.295	7.378.296
5	Kab. LabuhanBatu	548.102	13.080.020	13.628.122



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kab. Langkat	563.038	10.609.673	11.172.711
7	Kab. Mandailing Natal	430.158	7.940.963	8.371.121
8	Kab. Nias	423.797	4.371.768	4.795.565
9	Kab. Simalungun	521.976	10.805.067	11.327.043
10	Kab. Tapanuli Selatan	425.990	9.801.453	10.227.443
11	Kab. Tapanuli Tengah	435.118	5.586.484	6.021.602
12	Kab. Tapanuli Utara	425.979	7.876.005	8.301.984
13	Kab. Toba Samosir	426.930	8.999.423	9.426.353
14	Kota Binjai	802.064	7.171.682	7.973.746
15	Kota Medan	27.502.916	179.225.181	206.728.097
16	Kota Pematang Siantar	952.481	12.889.719	13.842.200
17	Kota Sibolga	469.685	7.131.273	7.600.958
18	Kota Tanjung Balai	751.433	5.795.610	6.547.043
19	Kota Tebing Tinggi	648.334	7.143.777	7.792.111
20	Kota Padang Sidempuan	532.620	8.482.679	9.015.299



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Kab. Pakpak Bharat	422.649	4.622.069	5.044.718
22	Kab. Nias Selatan	430.409	4.903.900	5.334.309
23	Kab. Humbang Hasundutan	423.866	5.159.010	5.582.876
24	Kab. Serdang Bedagai	548.904	9.664.595	10.213.499
25	Kab. Samosir	423.051	4.914.942	5.337.993
26	Kab. Batu Bara	695.030	13.681.689	14.376.719
27	Kab. Padang Lawas Utara	429.226	5.548.977	5.978.203
28	Kab. Padang Lawas	432.101	5.930.371	6.362.472
29	Kab. LabuhanBatu Selatan	441.073	8.270.292	8.711.365
30	Kab. LabuhanBatu Utara	479.268	6.278.368	6.757.636
31	Kab. Nias Utara	424.642	4.654.399	5.079.041
32	Kab. Nias Barat	423.043	4.477.948	4.900.991
33	Kota Gunungsitoli	478.117	6.656.670	7.134.787
III	Provinsi Sumatera Barat	4.604.079	87.931.572	92.535.651
1	Kab. Limapuluh Kota	181.153	3.888.318	4.069.471



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Agam	133.366	5.386.587	5.519.953
3	Kab. Kepulauan Mentawai	116.168	3.011.107	3.127.275
4	Kab. Padang Pariaman	136.623	3.729.430	3.866.053
5	Kab. Pasaman	116.794	3.772.498	3.889.292
6	Kab. Pesisir Selatan	120.060	4.186.462	4.306.522
7	Kab. Sijunjung	170.683	3.868.685	4.039.368
8	Kab. Solok	116.624	4.653.290	4.769.914
9	Kab. Tanah Datar	166.443	4.537.845	4.704.288
10	Kota Bukit Tinggi	210.171	6.092.648	6.302.819
11	Kota Padang Panjang	138.742	3.246.063	3.384.805
12	Kota Padang	4.155.089	52.609.722	56.764.811
13	Kota Payakumbuh	261.347	4.597.748	4.859.095
14	Kota Sawahlunto	134.936	3.921.350	4.056.286
15	Kota Solok	154.607	5.436.472	5.591.079
16	Kota Pariaman	189.316	5.264.975	5.454.291



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Kab. Pasaman Barat	140.699	4.494.605	4.635.304
18	Kab. Dharmasraya	147.046	4.966.009	5.113.055
19	Kab. Solok Selatan	116.252	4.233.543	4.349.795
IV	Provinsi Riau	7.317.613	194.941.540	202.259.153
1	Kab. Bengkalis	654.631	38.994.769	39.649.400
2	Kab. Indragiri Hilir	713.930	13.511.535	14.225.465
3	Kab. Indragiri Hulu	546.517	12.247.071	12.793.588
4	Kab. Kampar	462.735	11.976.599	12.439.334
5	Kab. Kuantan Singingi	1.540.561	10.428.058	11.968.619
6	Kab. Pelalawan	359.835	24.004.609	24.364.444
7	Kab. Rokan Hilir	789.904	13.241.859	14.031.763
8	Kab. Rokan Hulu	320.707	10.738.755	11.059.462
9	Kab. Siak	390.398	25.890.152	26.280.550
10	Kota Dumai	729.030	33.075.191	33.804.221
11	Kota Pekanbaru	3.982.322	88.510.880	92.493.202



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Kepulauan Meranti	485.849	9.792.831	10.278.680
V	Provinsi Kepulauan Riau	5.760.952	110.075.625	115.836.577
1	Kab. Bintan	542.828	12.987.539	13.530.367
2	Kab. Natuna	433.333	9.407.179	9.840.512
3	Kab. Karimun	606.665	15.911.199	16.517.864
4	Kota Batam	5.248.479	84.742.373	89.990.852
5	Kota Tanjung Pinang	940.779	17.717.317	18.658.096
6	Kab. Lingga	436.778	8.837.815	9.274.593
7	Kab. Kepulauan Anambas	432.564	15.510.016	15.942.580
VI	Provinsi Jambi	2.067.996	59.082.639	61.150.635
1	Kab. Batang hari	114.922	4.867.518	4.982.440
2	Kab. Bungo	242.250	7.549.403	7.791.653
3	Kab. Kerinci	104.723	2.855.938	2.960.661
4	Kab. Merangin	185.716	5.365.449	5.551.165
5	Kab. Muaro Jambi	117.010	6.154.164	6.271.174



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kab. Sarolangun	108.984	4.201.057	4.310.041
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	153.333	6.684.261	6.837.594
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	96.102	6.197.272	6.293.374
9	Kab. Tebo	108.562	4.647.064	4.755.626
10	Kota Jambi	1.761.218	34.687.652	36.448.870
11	Kota Sungai Penuh	109.174	5.414.180	5.523.354
VII	Provinsi Sumatera Selatan	8.015.492	201.962.101	209.977.593
1	Kab. Lahat	326.486	10.842.203	11.168.689
2	Kab. Musi Banyuasin	262.386	19.880.882	20.143.268
3	Kab. Musi Rawas	241.260	7.492.818	7.734.078
4	Kab. Muara Enim	930.428	39.073.272	40.003.700
5	Kab. Ogan Komering Ilir	236.920	11.650.997	11.887.917
6	Kab. Ogan Komering Ulu	263.881	9.459.863	9.723.744
7	Kota Palembang	7.159.524	116.121.930	123.281.454
8	Kota Pagar Alam	245.337	6.474.478	6.719.815



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kota Lubuk Linggau	300.009	9.840.852	10.140.861
10	Kota Prabumulih	336.978	16.544.025	16.881.003
11	Kab. Banyuasin	290.577	11.626.839	11.917.416
12	Kab. Ogan Ilir	287.630	7.670.970	7.958.600
13	Kab. OKU Timur	233.150	7.527.462	7.760.612
14	Kab. OKU Selatan	227.158	6.585.807	6.812.965
15	Kab. Empat Lawang	228.583	6.515.024	6.743.607
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	226.125	8.797.901	9.024.026
17	Kab. Musi Rawas Utara	226.806	6.837.832	7.064.638
VIII	Provinsi Bangka Belitung	1.773.183	31.990.040	33.763.223
1	Kab. Bangka	316.366	7.229.493	7.545.859
2	Kab. Belitung	579.644	5.103.493	5.683.137
3	Kota Pangkal Pinang	1.138.151	15.972.750	17.110.901
4	Kab. Bangka Selatan	137.981	3.650.794	3.788.775
5	Kab. Bangka Tengah	175.154	5.319.551	5.494.705



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kab. Bangka Barat	168.105	6.643.185	6.811.290
7	Kab. Belitung Timur	144.374	4.065.793	4.210.167
IX	Provinsi Bengkulu	595.580	27.477.765	28.073.345
1	Kab. Bengkulu Selatan	36.295	2.619.826	2.656.121
2	Kab. Bengkulu Utara	41.235	3.829.114	3.870.349
3	Kab. Rejang Lebong	58.090	3.812.182	3.870.272
4	Kota Bengkulu	546.300	16.061.931	16.608.231
5	Kab. Kaur	32.183	1.958.454	1.990.637
6	Kab. Seluma	31.846	2.350.830	2.382.676
7	Kab. Mukomuko	42.742	2.992.453	3.035.195
8	Kab. Lebong	30.054	2.345.106	2.375.160
9	Kab. Kepahiang	39.018	2.519.163	2.558.181
10	Kab. Bengkulu Tengah	35.607	2.727.588	2.763.195
X	Provinsi Lampung	5.173.338	85.734.548	90.907.886
1	Kab. Lampung Barat	169.088	4.308.874	4.477.962



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Lampung Selatan	382.462	9.347.122	9.729.584
3	Kab. Lampung Tengah	374.129	12.432.089	12.806.218
4	Kab. Lampung Utara	207.404	6.706.051	6.913.455
5	Kab. Lampung Timur	558.290	6.627.072	7.185.362
6	Kab. Tanggamus	267.085	6.459.047	6.726.132
7	Kab. Tulang Bawang	183.518	6.363.868	6.547.386
8	Kab. Way Kanan	181.938	4.705.674	4.887.612
9	Kota Bandar Lampung	3.816.800	43.163.672	46.980.472
10	Kota Metro	706.476	7.826.974	8.533.450
11	Kab. Pesawaran	166.550	4.561.023	4.727.573
12	Kab. Pringsewu	238.824	4.768.862	5.007.686
13	Kab. Mesuji	169.389	3.864.906	4.034.295
14	Kab. Tulang Bawang Barat	171.526	3.941.616	4.113.142
15	Kab. Pesisir Barat	166.527	3.524.974	3.691.501
XI	Provinsi DKI Jakarta	1.186.670.314	14.907.442.716	16.094.113.030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XII	Provinsi Jawa Barat	108.759.221	1.208.919.674	1.317.678.895
1	Kab. Bandung	6.000.359	52.215.910	58.216.269
2	Kab. Bekasi	19.096.357	345.424.072	364.520.429
3	Kab. Bogor	5.570.960	125.271.057	130.842.017
4	Kab. Ciamis	2.093.075	25.657.707	27.750.782
5	Kab. Cianjur	4.672.248	29.182.377	33.854.625
6	Kab. Cirebon	2.166.680	39.128.676	41.295.356
7	Kab. Garut	2.271.410	28.454.194	30.725.604
8	Kab. Indramayu	2.020.716	49.606.229	51.626.945
9	Kab. Karawang	8.263.891	180.357.817	188.621.708
10	Kab. Kuningan	2.223.720	25.508.580	27.732.300
11	Kab. Majalengka	2.070.143	26.594.606	28.664.749
12	Kab. Purwakarta	3.058.207	65.936.002	68.994.209
13	Kab. Subang	1.985.964	38.129.701	40.115.665
14	Kab. Sukabumi	2.154.301	36.968.067	39.122.368



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Kab. Sumedang	2.102.729	30.581.365	32.684.094
16	Kab. Tasikmalaya	1.935.980	25.509.803	27.445.783
17	Kota Bandung	46.554.477	252.202.494	298.756.971
18	Kota Bekasi	10.211.387	104.916.773	115.128.160
19	Kota Bogor	11.302.820	51.679.099	62.981.919
20	Kota Cirebon	4.362.308	35.489.188	39.851.496
21	Kota Depok	7.274.441	68.408.587	75.683.028
22	Kota Sukabumi	2.305.333	28.254.066	30.559.399
23	Kota Cimahi	3.591.543	32.608.039	36.199.582
24	Kota Tasikmalaya	2.628.233	29.521.010	32.149.243
25	Kota Banjar	1.938.392	22.848.788	24.787.180
26	Kab. Bandung Barat	3.396.513	40.300.452	43.696.965
27	Kab. Pangandaran	1.886.645	22.624.854	24.511.499
XIII	Provinsi Banten	30.232.780	666.736.591	696.969.371
1	Kab. Lebak	2.019.500	48.613.540	50.633.040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Pandeglang	2.007.518	49.472.648	51.480.166
3	Kab. Serang	2.301.669	73.808.776	76.110.445
4	Kab. Tangerang	7.533.802	199.535.761	207.069.563
5	Kota Cilegon	5.910.774	118.390.504	124.301.278
6	Kota Tangerang	7.769.196	269.000.520	276.769.716
7	Kota Serang	2.234.616	69.422.862	71.657.478
8	Kota Tangerang Selatan	15.572.096	171.860.275	187.432.371
XIV	Provinsi Jawa Tengah	35.354.754	447.839.079	483.193.833
1	Kab. Banjarnegara	576.475	10.172.810	10.749.285
2	Kab. Banyumas	1.083.806	20.690.059	21.773.865
3	Kab. Batang	552.134	17.626.298	18.178.432
4	Kab. Blora	572.606	13.641.240	14.213.846
5	Kab. Boyolali	821.039	15.753.159	16.574.198
6	Kab. Brebes	676.504	10.254.893	10.931.397
7	Kab. Cilacap	830.827	45.748.754	46.579.581



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kab. Demak	615.574	12.228.172	12.843.746
9	Kab. Grobogan	634.417	10.943.607	11.578.024
10	Kab. Jepara	1.204.970	21.245.424	22.450.394
11	Kab. Karanganyar	1.515.864	13.551.836	15.067.700
12	Kab. Kebumen	784.706	10.460.642	11.245.348
13	Kab. Kendal	655.207	14.317.446	14.972.653
14	Kab. Klaten	1.013.987	16.459.484	17.473.471
15	Kab. Kudus	10.772.037	63.942.401	74.714.438
16	Kab. Magelang	701.824	11.700.739	12.402.563
17	Kab. Pati	795.493	13.107.593	13.903.086
18	Kab. Pekalongan	520.448	8.549.167	9.069.615
19	Kab. Pemasang	565.925	9.743.131	10.309.056
20	Kab. Purbalingga	616.361	9.875.226	10.491.587
21	Kab. Purworejo	580.084	9.228.796	9.808.880
22	Kab. Rembang	658.604	10.150.275	10.808.879



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Kab. Semarang	1.021.494	19.509.738	20.531.232
24	Kab. Sragen	667.637	10.958.451	11.626.088
25	Kab. Sukoharjo	1.169.761	16.743.504	17.913.265
26	Kab. Tegal	727.720	10.590.711	11.318.431
27	Kab. Temanggung	639.848	9.725.379	10.365.227
28	Kab. Wonogiri	585.052	10.790.939	11.375.991
29	Kab. Wonosobo	510.676	8.956.384	9.467.060
30	Kota Magelang	942.406	10.952.276	11.894.682
31	Kota Pekalongan	1.346.478	10.809.199	12.155.677
32	Kota Salatiga	1.037.697	11.270.999	12.308.696
33	Kota Semarang	9.968.859	143.555.369	153.524.228
34	Kota Surakarta	6.524.875	26.686.429	33.211.304
35	Kota Tegal	1.140.736	11.818.089	12.958.825
XV	Provinsi DI Yogyakarta	7.989.601	73.842.946	81.832.547
1	Kab. Bantul	1.371.219	16.201.224	17.572.443



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Gunung Kidul	1.023.186	13.042.746	14.065.932
3	Kab. Kulon Progo	963.379	11.114.915	12.078.294
4	Kab. Sleman	4.717.569	35.456.689	40.174.258
5	Kota Yogyakarta	3.909.049	34.948.846	38.857.895
XVI	Provinsi Jawa Timur	88.717.178	743.408.410	832.125.588
1	Kab. Bangkalan	1.256.455	12.994.811	14.251.266
2	Kab. Banyuwangi	1.823.128	24.286.106	26.109.234
3	Kab. Blitar	1.411.022	13.723.503	15.134.525
4	Kab. Bojonegoro	1.356.101	18.222.314	19.578.415
5	Kab. Bondowoso	1.175.205	11.664.250	12.839.455
6	Kab. Gresik	2.222.480	72.861.445	75.083.925
7	Kab. Jember	2.040.422	25.433.981	27.474.403
8	Kab. Jombang	1.381.018	16.489.900	17.870.918
9	Kab. Kediri	1.712.038	15.855.452	17.567.490
10	Kab. Lamongan	1.463.751	15.145.812	16.609.563



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kab. Lumajang	1.350.957	13.726.713	15.077.670
12	Kab. Madiun	1.142.731	12.278.684	13.421.415
13	Kab. Magetan	1.174.388	12.555.211	13.729.599
14	Kab. Malang	3.511.378	32.305.656	35.817.034
15	Kab. Mojokerto	1.516.487	22.083.213	23.599.700
16	Kab. Nganjuk	1.343.680	13.375.679	14.719.359
17	Kab. Ngawi	1.142.081	12.455.170	13.597.251
18	Kab. Pacitan	1.170.823	11.165.680	12.336.503
19	Kab. Pamekasan	1.345.799	14.115.216	15.461.015
20	Kab. Pasuruan	3.336.987	37.855.015	41.192.002
21	Kab. Ponorogo	1.487.167	12.972.026	14.459.193
22	Kab. Probolinggo	1.249.965	17.292.743	18.542.708
23	Kab. Sampang	1.106.776	11.899.992	13.006.768
24	Kab. Sidoarjo	6.087.230	81.370.073	87.457.303
25	Kab. Situbondo	1.287.331	12.090.099	13.377.430



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Kab. Sumenep	1.145.059	13.137.243	14.282.302
27	Kab. Trenggalek	1.413.453	11.515.467	12.928.920
28	Kab. Tuban	1.235.568	21.317.573	22.553.141
29	Kab. Tulungagung	1.976.425	14.257.465	16.233.890
30	Kota Blitar	1.672.882	13.777.840	15.450.722
31	Kota Kediri	5.293.466	27.399.063	32.692.529
32	Kota Madiun	1.496.693	19.399.548	20.896.241
33	Kota Malang	8.176.058	47.081.390	55.257.448
34	Kota Mojokerto	1.332.767	13.332.569	14.665.336
35	Kota Pasuruan	1.293.537	15.288.826	16.582.363
36	Kota Probolinggo	1.342.912	14.563.194	15.906.106
37	Kota Surabaya	61.418.416	350.162.207	411.580.623
38	Kota Batu	1.183.130	9.661.490	10.844.620
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	13.077.852	82.747.827	95.825.679
1	Kab. Bengkayang	490.888	4.470.232	4.961.120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Landak	461.937	5.021.737	5.483.674
3	Kab. Kapuas Hulu	478.880	6.281.889	6.760.769
4	Kab. Ketapang	544.949	13.244.848	13.789.797
5	Kab. Mempawah	526.418	6.288.091	6.814.509
6	Kab. Sambas	550.268	6.477.680	7.027.948
7	Kab. Sanggau	509.077	7.837.790	8.346.867
8	Kab. Sintang	497.287	7.484.227	7.981.514
9	Kota Pontianak	11.966.691	31.701.528	43.668.219
10	Kota Singkawang	1.569.618	6.473.570	8.043.188
11	Kab. Sekadau	466.181	5.074.359	5.540.540
12	Kab. Melawi	466.803	4.684.422	5.151.225
13	Kab. Kayong Utara	458.921	3.889.141	4.348.062
14	Kab. Kubu Raya	628.860	15.192.228	15.821.088
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	729.264	63.140.964	63.870.228
1	Kab. Barito Selatan	25.742	4.579.157	4.604.899



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Barito Utara	26.425	6.352.687	6.379.112
3	Kab. Kapuas	37.543	5.275.920	5.313.463
4	Kab. Kotawaringin Barat	448.463	13.349.916	13.798.379
5	Kab. Kotawaringin Timur	162.644	13.798.008	13.960.652
6	Kota Palangkaraya	171.559	15.746.996	15.918.555
7	Kab. Barito Timur	25.517	8.563.460	8.588.977
8	Kab. Murung Raya	26.877	5.257.270	5.284.147
9	Kab. Pulang Pisau	26.373	3.936.899	3.963.272
10	Kab. Gunung Mas	27.741	3.606.305	3.634.046
11	Kab. Lamandau	35.701	3.261.676	3.297.377
12	Kab. Sukamara	26.229	3.061.601	3.087.830
13	Kab. Katingan	26.799	3.906.159	3.932.958
14	Kab. Seruyan	26.284	4.015.392	4.041.676
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	3.960.245	98.470.264	102.430.509
1	Kab. Banjar	300.779	10.600.565	10.901.344



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Barito Kuala	151.800	5.931.117	6.082.917
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	166.772	5.584.908	5.751.680
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	404.867	6.064.883	6.469.750
5	Kab. Hulu Sungai Utara	165.029	5.686.951	5.851.980
6	Kab. Kotabaru	207.646	13.062.714	13.270.360
7	Kab. Tabalong	484.385	13.087.689	13.572.074
8	Kab. Tanah Laut	186.537	9.408.943	9.595.480
9	Kab. Tapin	236.907	6.509.603	6.746.510
10	Kota Banjarbaru	320.281	15.120.449	15.440.730
11	Kota Banjarmasin	2.088.415	33.888.791	35.977.206
12	Kab. Balangan	153.567	9.916.664	10.070.231
13	Kab. Tanah Bumbu	1.073.383	12.842.120	13.915.503
XX	Provinsi Kalimantan Timur	10.992.695	275.132.941	286.125.636
1	Kab. Berau	699.294	35.762.431	36.461.725
2	Kab. Kutai Kartanegara	783.806	49.629.078	50.412.884



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kab. Kutai Barat	573.039	23.413.243	23.986.282
4	Kab. Kutai Timur	552.598	51.315.395	51.867.993
5	Kab. Paser	641.078	24.893.258	25.534.336
6	Kota Balikpapan	2.343.322	98.209.380	100.552.702
7	Kota Bontang	776.415	52.102.554	52.878.969
8	Kota Samarinda	9.011.698	46.279.986	55.291.684
9	Kab. Penajam Paser Utara	558.157	16.325.680	16.883.837
10	Kab. Mahakam Ulu	549.635	14.768.406	15.318.041
XXI	Provinsi Kalimantan Utara	1.553.407	18.620.221	20.173.628
1	Kab. Bulungan	210.812	7.624.546	7.835.358
2	Kab. Malinau	176.663	4.432.649	4.609.312
3	Kab. Nunukan	238.080	4.093.841	4.331.921
4	Kab. Tana Tidung	176.059	3.018.995	3.195.054
5	Kota Tarakan	1.528.496	8.760.300	10.288.796
XXII	Provinsi Sulawesi Utara	2.844.451	58.978.992	61.823.443



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bolaang Mongondow	98.703	2.572.107	2.670.810
2	Kab. Minahasa	122.274	5.702.804	5.825.078
3	Kab. Kepulauan Sangihe	115.026	3.878.867	3.993.893
4	Kota Bitung	204.540	7.058.059	7.262.599
5	Kota Manado	2.347.739	32.916.019	35.263.758
6	Kab. Kepulauan Talaud	93.742	2.674.498	2.768.240
7	Kab. Minahasa Selatan	152.876	3.702.064	3.854.940
8	Kota Tomohon	272.711	3.983.917	4.256.628
9	Kab. Minahasa Utara	135.422	8.170.888	8.306.310
10	Kab. Bolaang Mongondow Utara	91.518	2.472.035	2.563.553
11	Kota Kotamobagu	126.994	4.875.765	5.002.759
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	94.330	2.642.240	2.736.570
13	Kab. Minahasa Tenggara	99.958	2.874.694	2.974.652
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	215.856	2.503.342	2.719.198
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	94.989	2.441.187	2.536.176



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXIII	Provinsi Gorontalo	544.609	15.157.492	15.702.101
1	Kab. Boalemo	50.770	2.156.543	2.207.313
2	Kab. Gorontalo	89.075	4.054.965	4.144.040
3	Kota Gorontalo	473.855	9.134.583	9.608.438
4	Kab. Pohuwato	87.559	2.491.554	2.579.113
5	Kab. Bone Bolango	65.630	2.787.560	2.853.190
6	Kab. Gorontalo Utara	50.023	2.111.032	2.161.055
XXIV	Provinsi Sulawesi Tengah	676.284	37.953.797	38.630.081
1	Kab. Banggai	133.085	9.169.327	9.302.412
2	Kab. Banggai Kepulauan	25.423	2.003.480	2.028.903
3	Kab. Buol	34.501	2.539.834	2.574.335
4	Kab. Toli-Toli	37.993	3.455.541	3.493.534
5	Kab. Donggala	44.257	2.576.378	2.620.635
6	Kab. Morowali	27.702	5.913.665	5.941.367
7	Kab. Poso	50.730	3.923.437	3.974.167



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kota Palu	473.979	14.508.116	14.982.095
9	Kab. Parigi Moutong	63.106	2.871.703	2.934.809
10	Kab. Tojo Una Una	29.963	2.444.005	2.473.968
11	Kab. Sigi	39.988	2.324.649	2.364.637
12	Kab. Banggai Laut	25.432	1.956.944	1.982.376
13	Kab. Morowali Utara	28.268	3.243.617	3.271.885
XXV	Provinsi Sulawesi Selatan	6.365.764	154.126.436	160.492.200
1	Kab. Bantaeng	140.755	4.548.192	4.688.947
2	Kab. Barru	129.880	4.653.530	4.783.410
3	Kab. Bone	266.140	6.692.893	6.959.033
4	Kab. Bulukumba	169.459	5.892.021	6.061.480
5	Kab. Enrekang	141.779	4.508.749	4.650.528
6	Kab. Gowa	206.892	6.716.847	6.923.739
7	Kab. Jeneponto	136.334	6.137.896	6.274.230
8	Kab. Luwu	180.191	4.797.252	4.977.443



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Luwu Utara	142.313	4.460.857	4.603.170
10	Kab. Maros	177.121	9.753.182	9.930.303
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	212.482	8.228.512	8.440.994
12	Kab. Pinrang	150.834	5.305.131	5.455.965
13	Kab. Kepulauan Selayar	147.004	3.929.723	4.076.727
14	Kab. Sidenreng Rappang	137.581	5.889.079	6.026.660
15	Kab. Sinjai	158.145	4.652.434	4.810.579
16	Kab. Soppeng	163.193	4.358.641	4.521.834
17	Kab. Takalar	169.820	4.908.408	5.078.228
18	Kab. Tana Toraja	148.923	4.299.616	4.448.539
19	Kab. Wajo	223.096	5.547.843	5.770.939
20	Kota Pare-pare	169.458	7.647.824	7.817.282
21	Kota Makassar	5.561.144	90.977.422	96.538.566
22	Kota Palopo	236.311	6.253.313	6.489.624
23	Kab. Luwu Timur	187.764	16.634.456	16.822.220



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Kab. Toraja Utara	192.026	4.395.831	4.587.857
XXVI	Provinsi Sulawesi Barat	157.392	11.728.365	11.885.757
1	Kab. Majene	24.705	2.536.041	2.560.746
2	Kab. Mamuju	105.524	5.633.953	5.739.477
3	Kab. Polewali Mandar	58.804	3.787.762	3.846.566
4	Kab. Mamasa	17.977	1.943.290	1.961.267
5	Kab. Pasangkayu	14.538	2.220.386	2.234.924
6	Kab. Mamuju Tengah	14.541	1.471.115	1.485.656
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara	599.936	36.820.494	37.420.430
1	Kab. Buton	20.022	1.768.785	1.788.807
2	Kab. Konawe	23.696	2.836.645	2.860.341
3	Kab. Kolaka	80.953	8.504.585	8.585.538
4	Kab. Muna	34.037	2.687.912	2.721.949
5	Kota Kendari	444.195	16.675.166	17.119.361
6	Kota Bau-bau	92.381	4.090.131	4.182.512



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kab. Konawe Selatan	22.732	2.426.253	2.448.985
8	Kab. Bombana	18.011	2.272.706	2.290.717
9	Kab. Wakatobi	20.437	1.885.708	1.906.145
10	Kab. Kolaka Utara	18.135	1.901.713	1.919.848
11	Kab. Konawe Utara	18.179	1.371.740	1.389.919
12	Kab. Buton Utara	17.915	1.415.037	1.432.952
13	Kab. Konawe Kepulauan	17.161	1.276.732	1.293.893
14	Kab. Kolaka Timur	17.533	1.483.598	1.501.131
15	Kab. Buton Selatan	19.365	1.560.479	1.579.844
16	Kab. Buton Tengah	18.142	1.638.345	1.656.487
17	Kab. Muna Barat	17.009	1.435.206	1.452.215
XXVIII	Provinsi Bali	13.489.391	165.358.158	178.847.549
1	Kab. Badung	4.328.202	75.053.300	79.381.502
2	Kab. Bangli	794.404	11.259.679	12.054.083
3	Kab. Buleleng	1.278.222	16.861.668	18.139.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kab. Gianyar	2.418.238	18.083.347	20.501.585
5	Kab. Jembrana	806.669	11.897.617	12.704.286
6	Kab. Karangasem	1.339.953	13.488.934	14.828.887
7	Kab. Klungkung	833.332	12.304.841	13.138.173
8	Kab. Tabanan	1.964.133	14.595.581	16.559.714
9	Kota Denpasar	6.470.935	74.492.269	80.963.204
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.450.280	49.217.236	50.667.516
1	Kab. Bima	78.138	2.761.396	2.839.534
2	Kab. Dompu	131.726	3.903.641	4.035.367
3	Kab. Lombok Barat	132.603	4.994.773	5.127.376
4	Kab. Lombok Tengah	115.332	9.603.426	9.718.758
5	Kab. Lombok Timur	156.941	8.311.676	8.468.617
6	Kab. Sumbawa	142.196	5.346.577	5.488.773
7	Kota Mataram	985.035	20.458.407	21.443.442
8	Kota Bima	265.921	6.137.569	6.403.490



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Sumbawa Barat	88.587	9.034.329	9.122.916
10	Kab. Lombok Utara	78.941	3.274.058	3.352.999
XXX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.049.100	46.241.902	47.291.002
1	Kab. Alor	45.122	2.354.600	2.399.722
2	Kab. Belu	73.740	2.966.254	3.039.994
3	Kab. Ende	150.650	3.447.101	3.597.751
4	Kab. Flores Timur	43.450	2.884.505	2.927.955
5	Kab. Kupang	29.155	2.407.912	2.437.067
6	Kab. Lembata	46.057	1.993.507	2.039.564
7	Kab. Manggarai	48.078	2.693.077	2.741.155
8	Kab. Ngada	243.023	1.879.295	2.122.318
9	Kab. Sikka	140.278	3.962.623	4.102.901
10	Kab. Sumba Barat	27.483	2.200.736	2.228.219
11	Kab. Sumba Timur	59.181	3.827.723	3.886.904
12	Kab. Timor Tengah Selatan	31.203	2.800.731	2.831.934



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kab. Timor Tengah Utara	25.457	2.227.519	2.252.976
14	Kota Kupang	399.093	19.897.290	20.296.383
15	Kab. Rote Ndao	24.251	1.702.896	1.727.147
16	Kab. Manggarai Barat	33.279	2.416.107	2.449.386
17	Kab. Nagekeo	28.357	1.589.076	1.617.433
18	Kab. Sumba Tengah	22.756	1.319.272	1.342.028
19	Kab. Sumba Barat Daya	31.224	1.955.856	1.987.080
20	Kab. Manggarai Timur	25.344	1.865.468	1.890.812
21	Kab. Sabu Rajua	22.490	1.356.607	1.379.097
22	Kab. Malaka	23.976	1.614.698	1.638.674
XXXI	Provinsi Maluku	864.598	24.063.308	24.927.906
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	41.340	2.976.401	3.017.741
2	Kab. Maluku Tengah	57.717	2.781.951	2.839.668
3	Kab. Maluku Tenggara	176.765	2.375.572	2.552.337
4	Kab. Buru	42.511	1.944.386	1.986.897



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kota Ambon	506.977	16.525.066	17.032.043
6	Kab. Seram Bagian Barat	42.697	1.753.341	1.796.038
7	Kab. Seram Bagian Timur	40.269	2.016.287	2.056.556
8	Kab. Kepulauan Aru	267.580	1.661.681	1.929.261
9	Kota Tual	43.228	1.303.123	1.346.351
10	Kab. Maluku Barat Daya	38.907	1.549.213	1.588.120
11	Kab. Buru Selatan	38.907	1.207.942	1.246.849
XXXII	Provinsi Maluku Utara	963.167	24.551.642	25.514.809
1	Kab. Halmahera Tengah	48.214	1.903.209	1.951.423
2	Kab. Halmahera Barat	56.901	1.899.828	1.956.729
3	Kota Ternate	932.572	10.282.080	11.214.652
4	Kab. Halmahera Timur	60.296	1.906.500	1.966.796
5	Kota Tidore Kepulauan	57.334	3.554.387	3.611.721
6	Kab. Kepulauan Sula	48.719	1.838.071	1.886.790
7	Kab. Halmahera Selatan	52.506	2.509.411	2.561.917



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kab. Halmahera Utara	91.691	9.591.134	9.682.825
9	Kab. Pulau Morotai	48.360	1.859.178	1.907.538
10	Kab. Pulau Taliabu	48.158	1.483.663	1.531.821
XXXIII	Provinsi Papua	2.244.169	174.088.452	176.332.621
1	Kab. Biak Numfor	132.381	5.617.558	5.749.939
2	Kab. Jayapura	112.481	5.553.188	5.665.669
3	Kab. Jayawijaya	152.367	6.021.935	6.174.302
4	Kab. Merauke	328.748	8.855.196	9.183.944
5	Kab. Mimika	938.142	131.635.615	132.573.757
6	Kab. Nabire	108.333	4.372.972	4.481.305
7	Kab. Paniai	36.082	3.937.432	3.973.514
8	Kab. Puncak Jaya	36.067	3.600.330	3.636.397
9	Kab. Kepulauan Yapen	47.869	3.872.006	3.919.875
10	Kota Jayapura	762.523	27.869.134	28.631.657
11	Kab. Sarmi	42.603	3.375.602	3.418.205



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Keerom	52.049	3.506.625	3.558.674
13	Kab. Yahukimo	36.268	3.220.384	3.256.652
14	Kab. Pegunungan Bintang	36.067	3.308.958	3.345.025
15	Kab. Tolikara	36.067	3.077.400	3.113.467
16	Kab. Boven Digoel	36.209	3.360.144	3.396.353
17	Kab. Mappi	37.696	3.279.768	3.317.464
18	Kab. Asmat	36.163	3.368.750	3.404.913
19	Kab. Waropen	36.067	3.011.186	3.047.253
20	Kab. Supiori	36.067	3.054.767	3.090.834
21	Kab. Mamberamo Raya	36.095	2.937.437	2.973.532
22	Kab. Mamberamo Tengah	37.430	2.965.385	3.002.815
23	Kab. Yalimo	36.078	2.899.865	2.935.943
24	Kab. Lanny Jaya	36.067	2.978.813	3.014.880
25	Kab. Nduga	36.067	3.012.236	3.048.303
26	Kab. Puncak	36.067	3.433.536	3.469.603



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Kab. Dogiyai	36.067	3.120.477	3.156.544
28	Kab. Intan Jaya	36.067	2.797.903	2.833.970
29	Kab. Deiyai	36.067	3.088.079	3.124.146
XXXIV	Provinsi Papua Barat	552.674	33.020.819	33.573.493
1	Kab. Sorong	29.143	3.906.249	3.935.392
2	Kab. Manokwari	100.691	7.443.125	7.543.816
3	Kab. Fak Fak	110.467	1.585.831	1.696.298
4	Kota Sorong	382.511	10.697.897	11.080.408
5	Kab. Sorong Selatan	21.252	1.801.639	1.822.891
6	Kab. Raja Ampat	21.039	1.705.475	1.726.514
7	Kab. Teluk Bintuni	30.788	13.660.265	13.691.053
8	Kab. Teluk Wondama	20.725	1.567.115	1.587.840
9	Kab. Kaimana	28.665	1.463.928	1.492.593
10	Kab. Tambrauw	20.797	1.573.618	1.594.415
11	Kab. Maybrat	21.481	1.300.752	1.322.233



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	PPh WPOPDN	PPh Pasal 21	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Manokwari Selatan	20.725	1.401.750	1.422.475
13	Kab. Pegunungan Arfak	20.725	1.423.585	1.444.310
Total Provinsi		1.585.899.228	20.604.975.694	22.190.874.922
Total Kabupaten/Kota		598.843.372	8.546.299.476	9.145.142.848
Total Nasional		2.184.742.600	29.151.275.170	31.336.017.770

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Hati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
I	Provinsi Aceh	26.258.869
II	Provinsi Sumatera Utara	18.671.529
III	Provinsi Sumatera Barat	12.599.113
IV	Provinsi Jambi	8.749.676
V	Provinsi Sumatera Selatan	8.699.176
VI	Provinsi Lampung	11.404.419
VII	Provinsi Jawa Barat	380.484.671
VIII	Provinsi Jawa Tengah	713.377.508
IX	Provinsi DI Yogyakarta	17.368.721
X	Provinsi Jawa Timur	1.602.576.612
XI	Provinsi Sulawesi Tengah	7.445.976
XII	Provinsi Sulawesi Selatan	18.205.403
XIII	Provinsi Bali	12.449.365
XIV	Provinsi Nusa Tenggara Barat	295.658.416
XV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15.681.699
XVI	Provinsi Kepulauan Riau	5.804.048
XVII	Provinsi Kalimantan Tengah	6.742.236
XVIII	Provinsi Kalimantan Barat	7.572.097
XIV	Provinsi Gorontalo	7.362.315
JUMLAH		3.177.111.849

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hubungan dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Haryati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
I	Provinsi Aceh	640.543	9.218.410	9.858.953
1	Kab. Aceh Barat	912.883	17.938.848	18.851.731
2	Kab. Aceh Besar	48.499	887.115	935.614
3	Kab. Aceh Selatan	115.738	838.037	953.775
4	Kab. Aceh Singkil	7.219	838.037	845.256
5	Kab. Aceh Tengah	699.264	838.037	1.537.301
6	Kab. Aceh Tenggara	-	838.037	838.037
7	Kab. Aceh Timur	-	838.037	838.037
8	Kab. Aceh Utara	-	838.037	838.037
9	Kab. Bireuen	-	838.037	838.037
10	Kab. Pidie	433.190	883.731	1.316.921
11	Kab. Simeulue	-	838.037	838.037
12	Kota Banda Aceh	-	838.037	838.037
13	Kota Sabang	-	838.037	838.037
14	Kota Langsa	-	838.037	838.037
15	Kota Lhokseumawe	-	838.037	838.037



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
16	Kab. Gayo Lues	30.691	838.037	868.728
17	Kab. Aceh Barat Daya	42.240	838.037	880.277
18	Kab. Aceh Jaya	-	838.037	838.037
19	Kab. Nagan Raya	249.408	1.241.237	1.490.645
20	Kab. Aceh Tamiang	-	838.037	838.037
21	Kab. Bener Meriah	-	838.037	838.037
22	Kab. Pidie Jaya	-	838.037	838.037
23	Kota Subulussalam	23.040	838.037	861.077
II	Provinsi Sumatera Utara	2.202.235	54.733.643	56.935.878
1	Kab. Asahan	-	3.420.853	3.420.853
2	Kab. Dairi	1.009.920	3.420.853	4.430.773
3	Kab. Deli Serdang	-	3.420.853	3.420.853
4	Kab. Karo	-	3.420.853	3.420.853
5	Kab. Labuhanbatu	39.744	3.420.853	3.460.597
6	Kab. Langkat	-	3.420.853	3.420.853
7	Kab. Mandailing Natal	1.992.461	3.420.853	5.413.314



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
8	Kab. Nias	-	3.420.853	3.420.853
9	Kab. Simalungun	-	3.420.853	3.420.853
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.629.741	109.467.286	113.097.027
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.001.472	3.420.853	4.422.325
12	Kab. Tapanuli Utara	482.534	3.420.853	3.903.387
13	Kab. Toba Samosir	-	3.420.853	3.420.853
14	Kota Binjai	-	3.420.853	3.420.853
15	Kota Medan	-	3.420.853	3.420.853
16	Kota Pematang Siantar	-	3.420.853	3.420.853
17	Kota Sibolga	-	3.420.853	3.420.853
18	Kota Tanjung Balai	-	3.420.853	3.420.853
19	Kota Tebing Tinggi	-	3.420.853	3.420.853
20	Kota Padang Sidempuan	615.667	3.420.853	4.036.520
21	Kab. Pakpak Bharat	37.402	3.420.853	3.458.255
22	Kab. Nias Selatan	-	3.420.853	3.420.853
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	3.420.853	3.420.853



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
24	Kab. Serdang Bedagai	-	3.420.853	3.420.853
25	Kab. Samosir	-	3.420.853	3.420.853
26	Kab. Batu Bara	-	3.420.853	3.420.853
27	Kab. Padang Lawas	-	3.420.853	3.420.853
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	3.420.853	3.420.853
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	3.420.853	3.420.853
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	3.420.853	3.420.853
31	Kab. Nias Utara	-	3.420.853	3.420.853
32	Kab. Nias Barat	-	3.420.853	3.420.853
33	Kota Gunungsitoli	-	3.420.853	3.420.853
III	Provinsi Sumatera Barat	285.936	10.092.618	10.378.554
1	Kab. Limapuluh Kota	79.642	1.121.402	1.201.044
2	Kab. Agam	7.526	1.121.402	1.128.928
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.121.402	1.121.402
4	Kab. Padang Pariaman	-	1.121.402	1.121.402
5	Kab. Pasaman	104.947	1.121.402	1.226.349



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
6	Kab. Pesisir Selatan	95.309	2.835.002	2.930.311
7	Kab. Sijunjung	99.706	1.801.404	1.901.110
8	Kab. Solok	20.813	1.121.402	1.142.215
9	Kab. Tanah Datar	-	1.121.402	1.121.402
10	Kota Bukit Tinggi	-	1.121.402	1.121.402
11	Kota Padang Panjang	-	1.121.402	1.121.402
12	Kota Padang	-	1.121.402	1.121.402
13	Kota Payakumbuh	-	1.121.402	1.121.402
14	Kota Sawahlunto	153.446	17.498.478	17.651.924
15	Kota Solok	-	1.121.402	1.121.402
16	Kota Pariaman	-	1.121.402	1.121.402
17	Kab. Pasaman Barat	6.259	1.121.402	1.127.661
18	Kab. Dharmasraya	134.765	1.414.558	1.549.323
19	Kab. Solok Selatan	441.331	1.121.402	1.562.733
IV	Provinsi Riau	1.072.402	13.816.000	14.888.402
1	Kab. Bengkalis	-	2.512.000	2.512.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
2	Kab. Indragiri Hilir	176.563	19.573.818	19.750.381
3	Kab. Indragiri Hulu	2.176.320	3.792.000	5.968.320
4	Kab. Kampar	115.200	2.512.000	2.627.200
5	Kab. Kuantan Singingi	1.001.914	9.290.182	10.292.096
6	Kab. Pelalawan	67.200	2.512.000	2.579.200
7	Kab. Rokan Hilir	-	2.512.000	2.512.000
8	Kab. Rokan Hulu	-	2.512.000	2.512.000
9	Kab. Siak	-	2.512.000	2.512.000
10	Kota Dumai	-	2.512.000	2.512.000
11	Kota Pekanbaru	-	2.512.000	2.512.000
12	Kab. Kepulauan Meranti	752.410	2.512.000	3.264.410
V	Provinsi Jambi	1.681.219	40.389.037	42.070.256
1	Kab. Batang Hari	832.186	24.085.308	24.917.494
2	Kab. Bungo	308.755	31.708.472	32.017.227
3	Kab. Kerinci	-	8.077.807	8.077.807
4	Kab. Merangin	599.904	8.077.807	8.677.711



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
5	Kab. Muaro Jambi	934.195	10.530.922	11.465.117
6	Kab. Sarolangun	2.164.147	33.359.139	35.523.286
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	657.062	8.077.807	8.734.869
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	8.077.807	8.077.807
9	Kab. Tebo	1.228.627	13.405.462	14.634.089
10	Kota Jambi	-	8.077.807	8.077.807
11	Kota Sungai Penuh	-	8.077.807	8.077.807
VI	Provinsi Sumatera Selatan	8.766.484	362.884.993	371.651.477
1	Kab. Lahat	1.339.738	302.317.414	303.657.152
2	Kab. Musi Banyuasin	1.936.000	72.690.199	74.626.199
3	Kab. Musi Rawas	38.646	45.360.624	45.399.270
4	Kab. Muara Enim	5.597.530	393.890.466	399.487.996
5	Kab. Ogan Komering Ilir	288.000	45.360.624	45.648.624
6	Kab. Ogan Komering Ulu	2.027.491	49.660.374	51.687.865
7	Kota Palembang	-	45.360.624	45.360.624
8	Kota Prabumulih	42.106	45.360.624	45.402.730



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
9	Kota Pagar Alam	-	45.360.624	45.360.624
10	Kota Lubuk Linggau	-	45.360.624	45.360.624
11	Kab. Banyuasin	3.072.588	45.360.624	48.433.212
12	Kab. Ogan Ilir	2.564.582	45.360.624	47.925.206
13	Kab. OKU Timur	642.560	45.360.624	46.003.184
14	Kab. OKU Selatan	2.655.667	48.801.264	51.456.931
15	Kab. Empat Lawang	405.120	45.360.624	45.765.744
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	703.718	45.360.624	46.064.342
17	Kab. Musi Rawas Utara	13.752.192	85.213.388	98.965.580
VII	Provinsi Bengkulu	1.129.795	31.839.701	32.969.496
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	7.075.489	7.075.489
2	Kab. Bengkulu Utara	2.099.808	31.836.514	33.936.322
3	Kab. Rejang Lebong	-	7.075.489	7.075.489
4	Kota Bengkulu	-	7.075.489	7.075.489
5	Kab. Kaur	323.942	7.196.663	7.520.605
6	Kab. Seluma	978.355	8.856.680	9.835.035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
7	Kab. Mukomuko	-	7.075.489	7.075.489
8	Kab. Lebong	314.534	8.881.955	9.196.489
9	Kab. Kepahiang	-	7.075.489	7.075.489
10	Kab. Bengkulu Tengah	802.541	35.209.548	36.012.089
VIII	Provinsi Lampung	260.510	1.523.200	1.783.710
1	Kab. Lampung Barat	56.064	217.600	273.664
2	Kab. Lampung Selatan	56.870	217.600	274.470
3	Kab. Lampung Tengah	-	217.600	217.600
4	Kab. Lampung Utara	-	217.600	217.600
5	Kab. Lampung Timur	-	217.600	217.600
6	Kab. Tanggamus	499.526	3.046.400	3.545.926
7	Kab. Tulang Bawang	96.000	217.600	313.600
8	Kab. Way Kanan	153.062	217.600	370.662
9	Kota Bandar Lampung	-	217.600	217.600
10	Kota Metro	-	217.600	217.600
11	Kab. Pesawaran	180.518	217.600	398.118



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
12	Kab. Pringsewu	-	217.600	217.600
13	Kab. Mesuji	-	217.600	217.600
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	217.600	217.600
15	Kab. Pesisir Barat	-	217.600	217.600
IX	Provinsi Jawa Barat	282.967	5.218.491	5.501.458
1	Kab. Bandung	-	401.422	401.422
2	Kab. Bekasi	-	401.422	401.422
3	Kab. Bogor	310.003	10.401.622	10.711.625
4	Kab. Ciamis	-	401.422	401.422
5	Kab. Cianjur	291.744	406.859	698.603
6	Kab. Cirebon	-	401.422	401.422
7	Kab. Garut	289.670	401.422	691.092
8	Kab. Indramayu	-	401.422	401.422
9	Kab. Karawang	-	401.422	401.422
10	Kab. Kuningan	-	401.422	401.422
11	Kab. Majalengka	-	401.422	401.422



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
12	Kab. Purwakarta	5.683	401.422	407.105
13	Kab. Subang	-	401.422	401.422
14	Kab. Sukabumi	228.698	402.884	631.582
15	Kab. Sumedang	-	401.422	401.422
16	Kab. Tasikmalaya	6.067	429.884	435.951
17	Kota Bandung	-	401.422	401.422
18	Kota Bekasi	-	401.422	401.422
19	Kota Bogor	-	401.422	401.422
20	Kota Cirebon	-	401.422	401.422
21	Kota Depok	-	401.422	401.422
22	Kota Sukabumi	-	401.422	401.422
23	Kota Tasikmalaya	-	401.422	401.422
24	Kota Cimahi	-	401.422	401.422
25	Kota Banjar	-	401.422	401.422
26	Kab. Bandung Barat	-	401.422	401.422
27	Kab. Pangandaran	-	401.422	401.422



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
X	Provinsi Jawa Tengah	32.617	3.331	35.948
1	Kab. Banjarnegara	-	197	197
2	Kab. Banyumas	-	196	196
3	Kab. Batang	-	196	196
4	Kab. Blora	-	196	196
5	Kab. Boyolali	-	196	196
6	Kab. Brebes	-	196	196
7	Kab. Cilacap	12.907	6.662	19.569
8	Kab. Demak	-	196	196
9	Kab. Grobogan	-	196	196
10	Kab. Jepara	7.373	196	7.569
11	Kab. Karanganyar	-	196	196
12	Kab. Kebumen	37.786	196	37.982
13	Kab. Kendal	-	196	196
14	Kab. Klaten	-	196	196
15	Kab. Kudus	-	196	196



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
16	Kab. Magelang	-	196	196
17	Kab. Pati	-	196	196
18	Kab. Pekalongan	-	196	196
19	Kab. Pemasang	-	196	196
20	Kab. Purbalingga	-	196	196
21	Kab. Purworejo	-	196	196
22	Kab. Rembang	-	196	196
23	Kab. Semarang	-	196	196
24	Kab. Sragen	-	196	196
25	Kab. Sukoharjo	-	196	196
26	Kab. Tegal	-	196	196
27	Kab. Temanggung	-	196	196
28	Kab. Wonogiri	72.401	196	72.597
29	Kab. Wonosobo	-	196	196
30	Kota Magelang	-	196	196
31	Kota Pekalongan	-	196	196



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
32	Kota Salatiga	-	196	196
33	Kota Semarang	-	196	196
34	Kota Surakarta	-	196	196
35	Kota Tegal	-	196	196
XI	Provinsi DI Yogyakarta	30.490	-	30.490
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	121.958	-	121.958
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
XII	Provinsi Jawa Timur	182.168	15.010.227	15.192.395
1	Kab. Bangkalan	-	811.364	811.364
2	Kab. Banyuwangi	271.789	29.933.612	30.205.401
3	Kab. Blitar	700	811.364	812.064
4	Kab. Bojonegoro	-	811.364	811.364
5	Kab. Bondowoso	-	811.364	811.364



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
6	Kab. Gresik	-	811.364	811.364
7	Kab. Jember	6.240	849.037	855.277
8	Kab. Jombang	-	811.364	811.364
9	Kab. Kediri	-	811.364	811.364
10	Kab. Lamongan	-	811.364	811.364
11	Kab. Lumajang	317.743	858.066	1.175.809
12	Kab. Madiun	-	811.364	811.364
13	Kab. Magetan	-	811.364	811.364
14	Kab. Malang	883	811.364	812.247
15	Kab. Mojokerto	-	811.364	811.364
16	Kab. Nganjuk	-	811.364	811.364
17	Kab. Ngawi	-	811.364	811.364
18	Kab. Pacitan	117.965	811.364	929.329
19	Kab. Pamekasan	-	811.364	811.364
20	Kab. Pasuruan	-	811.364	811.364
21	Kab. Ponorogo	-	811.364	811.364



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
22	Kab. Probolinggo	-	811.364	811.364
23	Kab. Sampang	-	811.364	811.364
24	Kab. Sidoarjo	-	811.364	811.364
25	Kab. Situbondo	-	811.364	811.364
26	Kab. Sumenep	-	811.364	811.364
27	Kab. Trenggalek	13.094	811.364	824.458
28	Kab. Tuban	-	811.364	811.364
29	Kab. Tulungagung	261	813.830	814.091
30	Kota Blitar	-	811.364	811.364
31	Kota Kediri	-	811.364	811.364
32	Kota Madiun	-	811.364	811.364
33	Kota Malang	-	811.364	811.364
34	Kota Mojokerto	-	811.364	811.364
35	Kota Pasuruan	-	811.364	811.364
36	Kota Probolinggo	-	811.364	811.364
37	Kota Surabaya	-	811.364	811.364



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
38	Kota Batu	-	811.364	811.364
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	5.342.698	20.212.122	25.554.820
1	Kab. Bengkayang	23.731	3.109.557	3.133.288
2	Kab. Landak	93.082	3.152.642	3.245.724
3	Kab. Kapuas Hulu	3.367.603	3.123.895	6.491.498
4	Kab. Ketapang	8.498.208	15.648.994	24.147.202
5	Kab. Mempawah	941.894	3.248.095	4.189.989
6	Kab. Sambas	28.800	3.109.557	3.138.357
7	Kab. Sanggau	7.592.179	27.688.846	35.281.025
8	Kab. Sintang	170.342	3.109.557	3.279.899
9	Kota Pontianak	-	3.109.557	3.109.557
10	Kota Singkawang	-	3.109.557	3.109.557
11	Kab. Sekadau	411.840	3.109.557	3.521.397
12	Kab. Melawi	7.680	3.109.557	3.117.237
13	Kab. Kayong Utara	45.350	3.109.557	3.154.907
14	Kab. Kubu Raya	190.080	3.109.557	3.299.637



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
XIV	Provinsi Kalimantan Tengah	14.308.141	152.122.991	166.431.132
1	Kab. Barito Selatan	2.418.931	37.581.703	40.000.634
2	Kab. Barito Utara	11.367.963	120.513.376	131.881.339
3	Kab. Kapuas	7.082.822	130.321.054	137.403.876
4	Kab. Kotawaringin Barat	246.528	23.409.120	23.655.648
5	Kab. Kotawaringin Timur	769.444	28.105.198	28.874.642
6	Kota Palangkaraya	-	23.403.537	23.403.537
7	Kab. Katingan	2.500.358	35.702.331	38.202.689
8	Kab. Seruyan	662.496	23.854.119	24.516.615
9	Kab. Sukamara	321.139	23.403.537	23.724.676
10	Kab. Lamandau	131.232	30.154.749	30.285.981
11	Kab. Gunung Mas	5.209.133	23.504.175	28.713.308
12	Kab. Pulang Pisau	-	23.403.537	23.403.537
13	Kab. Murung Raya	23.038.560	46.726.020	69.764.580
14	Kab. Barito Timur	3.483.955	38.409.506	41.893.461
XV	Provinsi Kalimantan Selatan	5.695.502	925.566.246	931.261.748



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
1	Kab. Banjar	1.731.725	231.935.388	233.667.113
2	Kab. Barito Kuala	-	154.261.041	154.261.041
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	468.538	201.804.076	202.272.614
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	129.139	154.261.041	154.390.180
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	154.261.041	154.261.041
6	Kab. Kotabaru	6.649.882	237.432.726	244.082.608
7	Kab. Tabalong	5.142.106	343.261.494	348.403.600
8	Kab. Tanah Laut	2.236.166	364.729.699	366.965.865
9	Kab. Tapin	723.878	335.958.638	336.682.516
10	Kota Banjarbaru	37.632	154.261.041	154.298.673
11	Kota Banjarmasin	-	154.261.041	154.261.041
12	Kab. Balangan	1.328.333	628.731.348	630.059.681
13	Kab. Tanah Bumbu	4.334.611	587.106.411	591.441.022
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	14.297.264	1.340.324.777	1.354.622.041
1	Kab. Berau	5.110.694	722.823.271	727.933.965
2	Kab. Kutai Kartanegara	14.045.370	903.047.152	917.092.522



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
3	Kab. Kutai Barat	14.850.355	514.726.094	529.576.449
4	Kab. Kutai Timur	14.806.464	1.108.212.470	1.123.018.934
5	Kab. Paser	5.698.080	563.217.267	568.915.347
6	Kota Balikpapan	-	297.849.951	297.849.951
7	Kota Bontang	301.325	297.849.951	298.151.276
8	Kota Samarinda	1.226.438	356.310.994	357.537.432
9	Kab. Penajam Paser Utara	966.509	299.412.018	300.378.527
10	Kab. Mahakam Ulu	183.821	297.849.951	298.033.772
XVII	Provinsi Sulawesi Utara	970.709	38.377.518	39.348.227
1	Kab. Bolaang Mongondow	214.358	9.831.876	10.046.234
2	Kab. Minahasa	-	5.482.503	5.482.503
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	5.482.503	5.482.503
4	Kota Bitung	118.502	51.698.667	51.817.169
5	Kota Manado	4.915	5.482.503	5.487.418
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	5.482.503	5.482.503
7	Kab. Minahasa Selatan	93.485	6.942.161	7.035.646



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
8	Kota Tomohon	-	5.482.503	5.482.503
9	Kab. Minahasa Utara	1.482.010	15.425.051	16.907.061
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	5.482.503	5.482.503
11	Kota Kotamobagu	80.909	5.482.503	5.563.412
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	292.378	5.482.503	5.774.881
13	Kab. Minahasa Tenggara	47.654	5.482.503	5.530.157
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	751.411	5.544.874	6.296.285
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	797.213	14.724.920	15.522.133
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah	2.408.962	29.192.346	31.601.308
1	Kab. Banggai	276.077	4.865.391	5.141.468
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	4.865.391	4.865.391
3	Kab. Buol	198.413	4.865.391	5.063.804
4	Kab. Toli-Toli	489.274	4.865.391	5.354.665
5	Kab. Donggala	349.440	4.865.391	5.214.831
6	Kab. Morowali	5.496.250	40.936.943	46.433.193
7	Kab. Poso	24.768	4.865.391	4.890.159



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
8	Kota Palu	444.461	4.865.391	5.309.852
9	Kab. Parigi Moutong	1.620.019	4.865.391	6.485.410
10	Kab. Tojo Una Una	289.862	4.865.391	5.155.253
11	Kab. Sigi	167.616	4.865.391	5.033.007
12	Kab. Banggai Laut	-	4.865.391	4.865.391
13	Kab. Morowali Utara	279.667	22.313.139	22.592.806
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan	1.046.722	41.223.982	42.270.704
1	Kab. Bantaeng	-	3.584.694	3.584.694
2	Kab. Barru	-	3.584.694	3.584.694
3	Kab. Bone	211.200	3.588.008	3.799.208
4	Kab. Bulukumba	-	3.584.694	3.584.694
5	Kab. Enrekang	128.026	3.605.441	3.733.467
6	Kab. Gowa	-	3.584.694	3.584.694
7	Kab. Jenepono	-	3.584.694	3.584.694
8	Kab. Luwu	1.099.469	3.584.694	4.684.163
9	Kab. Luwu Utara	706.560	3.584.694	4.291.254



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
10	Kab. Maros	-	3.587.974	3.587.974
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	14.515	3.590.988	3.605.503
12	Kota Palopo	-	3.584.694	3.584.694
13	Kab. Luwu Timur	1.408.282	82.414.329	83.822.611
14	Kab. Pinrang	-	3.584.694	3.584.694
15	Kab. Sinjai	-	3.584.694	3.584.694
16	Kab. Kepulauan Selayar	15.936	3.584.694	3.600.630
17	Kab. Sidenreng Rappang	510.912	3.584.694	4.095.606
18	Kab. Soppeng	3.840	3.584.694	3.588.534
19	Kab. Takalar	-	3.584.694	3.584.694
20	Kab. Tana Toraja	47.136	3.584.694	3.631.830
21	Kab. Wajo	35.750	3.584.694	3.620.444
22	Kota Pare-pare	-	3.584.694	3.584.694
23	Kota Makassar	-	3.584.694	3.584.694
24	Kab. Toraja Utara	5.261	3.584.694	3.589.955
XX	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.351.936	96.448.492	99.800.428



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
1	Kab. Buton	1.171.757	12.553.351	13.725.108
2	Kab. Konawe	1.357.094	14.018.902	15.375.996
3	Kab. Kolaka	1.814.784	109.556.137	111.370.921
4	Kab. Muna	219.994	12.056.062	12.276.056
5	Kota Kendari	-	12.056.062	12.056.062
6	Kota Bau-bau	117.274	12.056.062	12.173.336
7	Kab. Konawe Selatan	1.016.410	39.283.024	40.299.434
8	Kab. Bombana	3.941.184	25.106.062	29.047.246
9	Kab. Wakatobi	-	12.056.062	12.056.062
10	Kab. Kolaka Utara	1.253.837	15.039.817	16.293.654
11	Kab. Konawe Utara	2.485.421	49.676.062	52.161.483
12	Kab. Buton Utara	29.990	12.056.062	12.086.052
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	12.056.062	12.056.062
14	Kab. Kolaka Timur	-	12.056.062	12.056.062
15	Kab. Muna Barat	-	12.056.062	12.056.062
16	Kab. Buton Tengah	-	12.056.062	12.056.062



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
17	Kab. Buton Selatan	-	12.056.062	12.056.062
XXI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.435.579	83.963.520	85.399.099
1	Kab. Bima	486.221	18.658.560	19.144.781
2	Kab. Dompu	208.128	18.658.560	18.866.688
3	Kab. Lombok Barat	194.074	18.658.560	18.852.634
4	Kab. Lombok Tengah	-	18.658.560	18.658.560
5	Kab. Lombok Timur	-	18.658.560	18.658.560
6	Kab. Sumbawa	1.930.042	18.658.560	20.588.602
7	Kota Mataram	-	18.658.560	18.658.560
8	Kota Bima	-	18.658.560	18.658.560
9	Kab. Sumbawa Barat	2.923.853	167.927.040	170.850.893
10	Kab. Lombok Utara	-	18.658.560	18.658.560
XXII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.497.019	18.720	1.515.739
1	Kab. Alor	-	1.783	1.783
2	Kab. Belu	1.291.603	32.869	1.324.472
3	Kab. Ende	614	1.783	2.397



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
			1.783	1.783
4	Kab. Flores Timur	-	1.783	1.140.669
5	Kab. Kupang	1.138.886	1.783	1.783
6	Kab. Lembata	-	1.783	150.737
7	Kab. Manggarai	148.954	1.783	176.503
8	Kab. Ngada	174.720	1.783	1.783
9	Kab. Sikka	-	1.783	1.783
10	Kab. Sumba Barat	-	1.783	951.645
11	Kab. Sumba Timur	949.862	1.783	1.038.583
12	Kab. Timor Tengah Selatan	1.036.800	1.783	1.087.026
13	Kab. Timor Tengah Utara	1.080.672	6.354	1.783
14	Kota Kupang	-	1.783	1.783
15	Kab. Rote Ndao	-	1.783	1.783
16	Kab. Manggarai Barat	-	1.783	5.623
17	Kab. Nagekeo	3.840	1.783	1.783
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	1.783	1.783
19	Kab. Sumba Tengah	-	1.783	1.783



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
20	Kab. Manggarai Timur	85.325	1.783	87.108
21	Kab. Sabu Raijua	76.800	1.783	78.583
22	Kab. Malaka	-	1.783	1.783
XXIII	Provinsi Maluku	252.869	2.808.000	3.060.869
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	561.600	561.600
2	Kab. Maluku Tengah	-	561.600	561.600
3	Kab. Maluku Tenggara	-	561.600	561.600
4	Kab. Buru	-	561.600	561.600
5	Kota Ambon	-	561.600	561.600
6	Kab. Seram Bagian Barat	316.570	561.600	878.170
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	561.600	561.600
8	Kab. Kepulauan Aru	-	561.600	561.600
9	Kota Tual	-	561.600	561.600
10	Kab. Maluku Barat Daya	610.253	5.616.001	6.226.254
11	Kab. Buru Selatan	84.653	561.600	646.253
XXIV	Provinsi Papua	6.663.481	328.545.536	335.209.017



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
1		-	23.467.538	23.467.538
1	Kab. Biak Numfor	-	23.467.538	23.467.538
2	Kab. Jayapura	-	23.467.538	23.714.450
3	Kab. Jayawijaya	246.912	23.467.538	23.467.538
4	Kab. Merauke	-	23.467.538	23.467.538
5	Kab. Mimika	2.764.723	657.091.072	659.855.795
6	Kab. Nabire	4.803.200	23.467.538	28.270.738
7	Kab. Paniai	5.100.672	23.467.538	28.568.210
8	Kab. Puncak Jaya	424.032	23.467.538	23.891.570
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	23.467.538	23.467.538
10	Kota Jayapura	-	23.467.538	23.467.538
11	Kab. Sarmi	4.662.336	23.467.538	28.129.874
12	Kab. Keerom	3.121.600	23.467.538	26.589.138
13	Kab. Yahukimo	-	23.467.538	23.467.538
14	Kab. Pegunungan Bintang	747.200	23.467.538	24.214.738
15	Kab. Tolikara	1.486.272	23.467.538	24.953.810
16	Kab. Boven Digoel	-	23.467.538	23.467.538



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
17	Kab. Mappi	-	23.467.538	23.467.538
18	Kab. Asmat	-	23.467.538	23.467.538
19	Kab. Waropen	812.160	23.467.538	24.279.698
20	Kab. Supiori	-	23.467.538	23.467.538
21	Kab. Mamberamo Raya	2.484.818	23.467.538	25.952.356
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	23.467.538	23.467.538
23	Kab. Yalimo	-	23.467.538	23.467.538
24	Kab. Lanny Jaya	-	23.467.538	23.467.538
25	Kab. Nduga	-	23.467.538	23.467.538
26	Kab. Dogiyai	-	23.467.538	23.467.538
27	Kab. Puncak	-	23.467.538	23.467.538
28	Kab. Intan Jaya	-	23.467.538	23.467.538
29	Kab. Deiyai	-	23.467.538	23.467.538
XXV	Provinsi Maluku Utara	3.384.926	51.422.437	54.807.363
1	Kab. Halmahera Tengah	1.713.830	38.804.986	40.518.816
2	Kota Ternate	-	11.427.208	11.427.208



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
3	Kab. Halmahera Barat	303.206	11.427.208	11.730.414
4	Kab. Halmahera Timur	612.941	26.787.274	27.400.215
5	Kab. Halmahera Selatan	1.806.605	47.106.497	48.913.102
6	Kab. Halmahera Utara	2.258.362	24.427.742	26.686.104
7	Kab. Kepulauan Sula	6.844.761	11.427.208	18.271.969
8	Kota Tidore Kepulauan	-	11.427.208	11.427.208
9	Kab. Pulau Morotai	-	11.427.208	11.427.208
10	Kab. Pulau Taliabu	-	11.427.208	11.427.208
XXVI	Provinsi Banten	106.406	3.267.889	3.374.295
1	Kab. Lebak	170.189	933.683	1.103.872
2	Kab. Pandeglang	255.437	6.535.779	6.791.216
3	Kab. Serang	-	933.683	933.683
4	Kab. Tangerang	-	933.683	933.683
5	Kota Cilegon	-	933.683	933.683
6	Kota Tangerang	-	933.683	933.683
7	Kota Serang	-	933.683	933.683



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
8	Kota Tangerang Selatan	-	933.683	933.683
XXVII	Provinsi Bangka Belitung	26.926.498	144.003.321	170.929.819
1	Kab. Bangka	3.717.677	81.348.235	85.065.912
2	Kab. Belitung	863.923	59.083.527	59.947.450
3	Kota Pangkal Pinang	9.139	45.450.930	45.460.069
4	Kab. Bangka Selatan	2.311.757	77.673.481	79.985.238
5	Kab. Bangka Tengah	1.148.371	59.661.851	60.810.222
6	Kab. Bangka Barat	4.511.558	51.641.802	56.153.360
7	Kab. Belitung Timur	2.822.285	67.269.155	70.091.440
XXVIII	Provinsi Gorontalo	568.446	-	568.446
1	Kab. Boalemo	-	-	-
2	Kab. Gorontalo	437.126	-	437.126
3	Kota Gorontalo	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	712.166	-	712.166
5	Kab. Bone Bolango	1.042.675	-	1.042.675
6	Kab. Gorontalo Utara	81.818	-	81.818



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
XXIX	Provinsi Kepulauan Riau	2.265.792	13.510.340	15.776.132
1	Kab. Natuna	1.574	4.060.411	4.061.985
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	4.060.411	4.060.411
3	Kab. Karimun	2.323.008	5.457.021	7.780.029
4	Kota Batam	-	4.060.411	4.060.411
5	Kota Tanjung Pinang	-	4.060.411	4.060.411
6	Kab. Lingga	46.618	5.022.918	5.069.536
7	Kab. Bintan	425.664	4.060.411	4.486.075
XXX	Provinsi Papua Barat	2.373.447	1.200.032	3.573.479
1	Kab. Fak Fak	1.462.968	200.005	1.662.973
2	Kab. Manokwari	2.116.132	200.005	2.316.137
3	Kab. Sorong	3.660	200.005	203.665
4	Kota Sorong	-	200.005	200.005
5	Kab. Raja Ampat	1.402.326	2.400.064	3.802.390
6	Kab. Sorong Selatan	-	200.005	200.005
7	Kab. Teluk Bintuni	916.881	200.005	1.116.886



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
8	Kab. Teluk Wondama	691.200	200.005	891.205
9	Kab. Kaimana	2.900.621	200.005	3.100.626
10	Kab. Maybrat	-	200.005	200.005
11	Kab. Tambrau	-	200.005	200.005
12	Kab. Manokwari Selatan	-	200.005	200.005
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	200.005	200.005
XXXI	Provinsi Sulawesi Barat	70.330	-	70.330
1	Kab. Majene	-	-	-
2	Kab. Mamuju	203.059	-	203.059
3	Kab. Polewali Mandar	41.050	-	41.050
4	Kab. Mamasa	-	-	-
5	Kab. Pasangkayu	37.210	-	37.210
6	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-
XXXII	Provinsi Kalimantan Utara	1.575.216	116.814.881	118.390.097
1	Kab. Bulungan	2.996.506	79.955.631	82.952.137
2	Kab. Malinau	1.747.546	134.602.159	136.349.705



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	Landrent	Royalty	Total
1	2	3	4	5
3	Kab. Nunukan	839.731	117.069.206	117.908.937
4	Kota Tarakan	-	58.407.440	58.407.440
5	Kab. Tana Tidung	717.082	77.225.087	77.942.169
	Total	456.958.959	19.511.620.351	19.968.579.310

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Negara Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Heri Sutawati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	Provinsi Aceh	64.511	-	416.192	480.703
1	Kab. Aceh Barat	9.172	-	-	9.172
2	Kab. Aceh Besar	11.434	-	-	11.434
3	Kab. Aceh Selatan	18.868	-	-	18.868
4	Kab. Aceh Singkil	10.301	-	-	10.301
5	Kab. Aceh Tengah	37.629	-	-	37.629
6	Kab. Aceh Tenggara	5.865	-	-	5.865
7	Kab. Aceh Timur	15.054	-	-	15.054
8	Kab. Aceh Utara	9.666	-	-	9.666
9	Kab. Bireuen	5.865	-	-	5.865
10	Kab. Pidie	6.682	-	-	6.682
11	Kab. Simeulue	17.842	-	-	17.842
12	Kota Banda Aceh	5.865	-	-	5.865
13	Kota Sabang	5.865	-	-	5.865
14	Kota Langsa	5.994	-	-	5.994
15	Kota Lhokseumawe	5.865	-	-	5.865
16	Kab. Gayo Lues	7.751	-	-	7.751



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
17	Kab. Aceh Barat Daya	5.865	-	-	5.865
18	Kab. Aceh Jaya	12.969	-	-	12.969
19	Kab. Nagan Raya	16.887	-	-	16.887
20	Kab. Aceh Tamiang	8.763	-	-	8.763
21	Kab. Bener Meriah	22.114	-	-	22.114
22	Kab. Pidie Jaya	5.865	-	-	5.865
23	Kota Subulussalam	5.865	-	-	5.865
II	Provinsi Sumatera Utara	4.275.424	741.600	16.678.590	21.695.614
1	Kab. Asahan	267.214	-	-	267.214
2	Kab. Dairi	293.710	-	-	293.710
3	Kab. Deli Serdang	267.444	-	-	267.444
4	Kab. Karo	761.798	-	-	761.798
5	Kab. Labuhanbatu	267.214	-	-	267.214
6	Kab. Langkat	269.687	-	-	269.687
7	Kab. Mandailing Natal	443.851	2.966.400	-	3.410.251
8	Kab. Nias	267.214	-	-	267.214
9	Kab. Simalungun	797.126	-	-	797.126



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
10	Kab. Tapanuli Selatan	337.869	-	-	337.869
11	Kab. Tapanuli Tengah	267.391	-	-	267.391
12	Kab. Tapanuli Utara	903.108	-	-	903.108
13	Kab. Toba Samosir	973.763	-	-	973.763
14	Kota Binjai	267.214	-	-	267.214
15	Kota Medan	267.214	-	-	267.214
16	Kota Pematang Siantar	267.214	-	-	267.214
17	Kota Sibolga	267.214	-	-	267.214
18	Kota Tanjung Balai	267.214	-	-	267.214
19	Kota Tebing Tinggi	267.214	-	-	267.214
20	Kota Padang Sidempuan	267.214	-	-	267.214
21	Kab. Pakpak Bharat	281.345	-	-	281.345
22	Kab. Nias Selatan	1.750.967	-	-	1.750.967
23	Kab. Humbang Hasundutan	655.816	-	-	655.816
24	Kab. Serdang Bedagai	267.214	-	-	267.214
25	Kab. Samosir	618.722	-	-	618.722
26	Kab. Batu Bara	267.214	-	-	267.214



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
27	Kab. Padang Lawas	1.503.675	-	-	1.503.675
28	Kab. Padang Lawas Utara	797.126	-	-	797.126
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.856.949	-	-	1.856.949
30	Kab. Labuhanbatu Utara	313.140	-	-	313.140
31	Kab. Nias Utara	267.214	-	-	267.214
32	Kab. Nias Barat	267.214	-	-	267.214
33	Kota Gunungsitoli	267.214	-	-	267.214
III	Provinsi Sumatera Barat	2.287.258	-	19.647.558	21.934.816
1	Kab. Limapuluh Kota	275.493	-	-	275.493
2	Kab. Agam	257.584	-	-	257.584
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.526.044	-	-	3.526.044
4	Kab. Padang Pariaman	254.140	-	-	254.140
5	Kab. Pasaman	261.028	-	-	261.028
6	Kab. Pesisir Selatan	298.913	-	-	298.913
7	Kab. Sijunjung	701.874	-	-	701.874
8	Kab. Solok	271.360	-	-	271.360
9	Kab. Tanah Datar	262.406	-	-	262.406



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
10	Kota Bukit Tinggi	254.140	-	-	254.140
11	Kota Padang Panjang	254.140	-	-	254.140
12	Kota Padang	256.895	-	-	256.895
13	Kota Payakumbuh	254.510	-	-	254.510
14	Kota Sawahlunto	261.372	-	-	261.372
15	Kota Solok	254.199	-	-	254.199
16	Kota Pariaman	254.140	-	-	254.140
17	Kab. Pasaman Barat	260.339	-	-	260.339
18	Kab. Dharmasraya	495.228	-	-	495.228
19	Kab. Solok Selatan	495.228	-	-	495.228
IV	Provinsi Riau	18.645.052	903.928	15.158.408	34.707.388
1	Kab. Bengkalis	7.943.439	-	-	7.943.439
2	Kab. Indragiri Hilir	7.188.650	3.533.312	-	10.721.962
3	Kab. Indragiri Hulu	3.935.131	-	-	3.935.131
4	Kab. Kampar	6.238.720	-	-	6.238.720
5	Kab. Kuantan Singingi	4.784.220	-	-	4.784.220
6	Kab. Pelalawan	15.455.610	-	-	15.455.610



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
7	Kab. Rokan Hilir	4.296.850	-	-	4.296.850
8	Kab. Rokan Hulu	4.006.314	82.400	-	4.088.714
9	Kab. Siak	8.891.935	-	-	8.891.935
10	Kota Dumai	4.328.709	-	-	4.328.709
11	Kota Pekanbaru	3.390.009	-	-	3.390.009
12	Kab. Kepulauan Meranti	4.120.619	-	-	4.120.619
V	Provinsi Jambi	4.875.947	-	4.569.367	9.445.314
1	Kab. Batang Hari	3.027.244	-	-	3.027.244
2	Kab. Bungo	975.189	-	-	975.189
3	Kab. Kerinci	975.189	-	-	975.189
4	Kab. Merangin	975.189	-	-	975.189
5	Kab. Muaro Jambi	1.924.142	-	-	1.924.142
6	Kab. Sarolangun	1.641.515	-	-	1.641.515
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	4.279.952	-	-	4.279.952
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.063.302	-	-	2.063.302
9	Kab. Tebo	1.691.685	-	-	1.691.685
10	Kota Jambi	975.189	-	-	975.189



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
11	Kota Sungai Penuh	975.189	-	-	975.189
VI	Provinsi Sumatera Selatan	9.218.844	659.200	2.604.400	12.482.444
1	Kab. Lahat	1.731.303	-	-	1.731.303
2	Kab. Musi Banyuasin	2.828.009	2.636.800	-	5.464.809
3	Kab. Musi Rawas	1.833.470	-	-	1.833.470
4	Kab. Muara Enim	2.344.306	-	-	2.344.306
5	Kab. Ogan Komering Ilir	13.019.235	-	-	13.019.235
6	Kab. Ogan Komering Ulu	1.629.135	-	-	1.629.135
7	Kota Palembang	1.152.355	-	-	1.152.355
8	Kota Prabumulih	1.152.355	-	-	1.152.355
9	Kota Pagar Alam	1.152.355	-	-	1.152.355
10	Kota Lubuk Linggau	1.152.355	-	-	1.152.355
11	Kab. Banyuasin	1.180.583	-	-	1.180.583
12	Kab. Ogan Ilir	1.152.355	-	-	1.152.355
13	Kab. OKU Timur	1.320.135	-	-	1.320.135
14	Kab. OKU Selatan	1.152.355	-	-	1.152.355
15	Kab. Empat Lawang	1.152.355	-	-	1.152.355



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.770.355	-	-	1.770.355
17	Kab. Musi Rawas Utara	1.152.355	-	-	1.152.355
VII	Provinsi Bengkulu	46.029	-	744.702	790.731
1	Kab. Bengkulu Selatan	10.229	-	-	10.229
2	Kab. Bengkulu Utara	92.057	-	-	92.057
3	Kab. Rejang Lebong	10.229	-	-	10.229
4	Kota Bengkulu	10.229	-	-	10.229
5	Kab. Kaur	10.229	-	-	10.229
6	Kab. Seluma	10.229	-	-	10.229
7	Kab. Mukomuko	10.229	-	-	10.229
8	Kab. Lebong	10.229	-	-	10.229
9	Kab. Kepahiang	10.229	-	-	10.229
10	Kab. Bengkulu Tengah	10.229	-	-	10.229
VIII	Provinsi Lampung	959.510	-	-	959.510
1	Kab. Lampung Barat	137.073	-	-	137.073
2	Kab. Lampung Selatan	137.073	-	-	137.073
3	Kab. Lampung Tengah	137.073	-	-	137.073



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
4	Kab. Lampung Utara	137.073	-	-	137.073
5	Kab. Lampung Timur	137.073	-	-	137.073
6	Kab. Tanggamus	137.073	-	-	137.073
7	Kab. Tulang Bawang	137.073	-	-	137.073
8	Kab. Way Kanan	780.676	-	-	780.676
9	Kota Bandar Lampung	137.073	-	-	137.073
10	Kota Metro	137.073	-	-	137.073
11	Kab. Pesawaran	137.073	-	-	137.073
12	Kab. Pringsewu	137.073	-	-	137.073
13	Kab. Mesuji	1.275.418	-	-	1.275.418
14	Kab. Tulang Bawang Barat	137.073	-	-	137.073
15	Kab. Pesisir Barat	137.073	-	-	137.073
IX	Provinsi Jawa Barat	827.676	-	-	827.676
1	Kab. Bandung	74.537	-	-	74.537
2	Kab. Bekasi	63.667	-	-	63.667
3	Kab. Bogor	78.619	-	-	78.619
4	Kab. Ciamis	355.432	-	-	355.432



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
5	Kab. Cianjur	315.230	-	-	315.230
6	Kab. Cirebon	93.537	-	-	93.537
7	Kab. Garut	95.156	-	-	95.156
8	Kab. Indramayu	113.147	-	-	113.147
9	Kab. Karawang	69.640	-	-	69.640
10	Kab. Kuningan	137.947	-	-	137.947
11	Kab. Majalengka	100.005	-	-	100.005
12	Kab. Purwakarta	97.589	-	-	97.589
13	Kab. Subang	81.661	-	-	81.661
14	Kab. Sukabumi	196.900	-	-	196.900
15	Kab. Sumedang	147.424	-	-	147.424
16	Kab. Tasikmalaya	202.320	-	-	202.320
17	Kota Bandung	63.667	-	-	63.667
18	Kota Bekasi	63.667	-	-	63.667
19	Kota Bogor	63.667	-	-	63.667
20	Kota Cirebon	63.667	-	-	63.667
21	Kota Depok	63.667	-	-	63.667



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
22	Kota Sukabumi	63.667	-	-	63.667
23	Kota Tasikmalaya	63.667	-	-	63.667
24	Kota Cimahi	63.667	-	-	63.667
25	Kota Banjar	63.667	-	-	63.667
26	Kab. Bandung Barat	110.327	-	-	110.327
27	Kab. Pangandaran	404.558	-	-	404.558
X	Provinsi Jawa Tengah	3.986.399	-	-	3.986.399
1	Kab. Banjarnegara	276.227	-	-	276.227
2	Kab. Banyumas	367.420	-	-	367.420
3	Kab. Batang	651.431	-	-	651.431
4	Kab. Blora	2.984.898	-	-	2.984.898
5	Kab. Boyolali	406.040	-	-	406.040
6	Kab. Brebes	767.778	-	-	767.778
7	Kab. Cilacap	504.601	-	-	504.601
8	Kab. Demak	234.595	-	-	234.595
9	Kab. Grobogan	689.650	-	-	689.650
10	Kab. Jepara	320.795	-	-	320.795



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
11	Kab. Karanganyar	236.248	-	-	236.248
12	Kab. Kebumen	313.021	-	-	313.021
13	Kab. Kendal	655.812	-	-	655.812
14	Kab. Klaten	234.494	-	-	234.494
15	Kab. Kudus	234.694	-	-	234.694
16	Kab. Magelang	248.142	-	-	248.142
17	Kab. Pati	424.521	-	-	424.521
18	Kab. Pekalongan	323.196	-	-	323.196
19	Kab. Pemasang	615.853	-	-	615.853
20	Kab. Purbalingga	258.578	-	-	258.578
21	Kab. Purworejo	285.946	-	-	285.946
22	Kab. Rembang	758.445	-	-	758.445
23	Kab. Semarang	464.899	-	-	464.899
24	Kab. Sragen	250.545	-	-	250.545
25	Kab. Sukoharjo	234.494	-	-	234.494
26	Kab. Tegal	836.162	-	-	836.162
27	Kab. Temanggung	275.487	-	-	275.487



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
28	Kab. Wonogiri	254.211	-	-	254.211
29	Kab. Wonosobo	277.697	-	-	277.697
30	Kota Magelang	234.494	-	-	234.494
31	Kota Pekalongan	234.494	-	-	234.494
32	Kota Salatiga	234.494	-	-	234.494
33	Kota Semarang	387.244	-	-	387.244
34	Kota Surakarta	234.494	-	-	234.494
35	Kota Tegal	234.494	-	-	234.494
XI	Provinsi DI Yogyakarta	5.941	-	-	5.941
1	Kab. Bantul	3.185	-	-	3.185
2	Kab. Gunung Kidul	11.667	-	-	11.667
3	Kab. Kulon Progo	2.970	-	-	2.970
4	Kab. Sleman	2.970	-	-	2.970
5	Kota Yogyakarta	2.970	-	-	2.970
XII	Provinsi Jawa Timur	4.346.950	-	-	4.346.950
1	Kab. Bangkalan	246.143	-	-	246.143
2	Kab. Banyuwangi	2.653.121	-	-	2.653.121



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
3	Kab. Blitar	642.625	-	-	642.625
4	Kab. Bojonegoro	620.478	-	-	620.478
5	Kab. Bondowoso	443.872	-	-	443.872
6	Kab. Gresik	258.442	-	-	258.442
7	Kab. Jember	1.123.007	-	-	1.123.007
8	Kab. Jombang	281.303	-	-	281.303
9	Kab. Kediri	471.881	-	-	471.881
10	Kab. Lamongan	775.887	-	-	775.887
11	Kab. Lumajang	384.745	-	-	384.745
12	Kab. Madiun	724.378	-	-	724.378
13	Kab. Magetan	254.287	-	-	254.287
14	Kab. Malang	388.432	-	-	388.432
15	Kab. Mojokerto	396.716	-	-	396.716
16	Kab. Nganjuk	639.731	-	-	639.731
17	Kab. Ngawi	704.349	-	-	704.349
18	Kab. Pacitan	238.971	-	-	238.971
19	Kab. Pamekasan	245.836	-	-	245.836



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
20	Kab. Pasuruan	334.321	-	-	334.321
21	Kab. Ponorogo	519.305	-	-	519.305
22	Kab. Probolinggo	322.167	-	-	322.167
23	Kab. Sampang	235.773	-	-	235.773
24	Kab. Sidoarjo	234.970	-	-	234.970
25	Kab. Situbondo	285.373	-	-	285.373
26	Kab. Sumenep	313.770	-	-	313.770
27	Kab. Trenggalek	302.827	-	-	302.827
28	Kab. Tuban	851.838	-	-	851.838
29	Kab. Tulungagung	376.128	-	-	376.128
30	Kota Blitar	234.970	-	-	234.970
31	Kota Kediri	234.970	-	-	234.970
32	Kota Madiun	234.970	-	-	234.970
33	Kota Malang	234.970	-	-	234.970
34	Kota Mojokerto	234.970	-	-	234.970
35	Kota Pasuruan	234.970	-	-	234.970
36	Kota Probolinggo	234.970	-	-	234.970



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
37	Kota Surabaya	234.970	-	-	234.970
38	Kota Batu	237.361	-	-	237.361
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	6.237.743	1.023.511	42.530.574	49.791.828
1	Kab. Bengkayang	960.020	-	-	960.020
2	Kab. Landak	1.146.612	659.200	-	1.805.812
3	Kab. Kapuas Hulu	3.596.744	824.000	-	4.420.744
4	Kab. Ketapang	4.549.772	906.400	-	5.456.172
5	Kab. Mempawah	1.542.989	-	-	1.542.989
6	Kab. Sambas	980.033	-	-	980.033
7	Kab. Sanggau	1.102.733	-	-	1.102.733
8	Kab. Sintang	3.376.243	659.200	-	4.035.443
9	Kota Pontianak	1.038.255	-	-	1.038.255
10	Kota Singkawang	959.653	-	-	959.653
11	Kab. Sekadau	961.846	-	-	961.846
12	Kab. Melawi	2.251.628	-	-	2.251.628
13	Kab. Kayong Utara	967.054	-	-	967.054
14	Kab. Kubu Raya	1.517.389	1.045.243	-	2.562.632



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
XIV	Provinsi Kalimantan Tengah	33.931.081	7.940.078	238.817.280	280.688.439
1	Kab. Barito Selatan	5.288.653	659.200	-	5.947.853
2	Kab. Barito Utara	12.127.914	824.000	-	12.951.914
3	Kab. Kapuas	12.072.700	2.768.927	-	14.841.627
4	Kab. Kotawaringin Barat	8.652.836	824.000	-	9.476.836
5	Kab. Kotawaringin Timur	7.303.734	824.000	-	8.127.734
6	Kota Palangkaraya	5.227.307	-	-	5.227.307
7	Kab. Katingan	14.974.249	187.872	-	15.162.121
8	Kab. Seruyan	21.210.334	3.243.264	-	24.453.598
9	Kab. Sukamara	5.220.168	-	-	5.220.168
10	Kab. Lamandau	8.937.681	3.243.264	-	12.180.945
11	Kab. Gunung Mas	11.660.680	8.569.600	-	20.230.280
12	Kab. Pulang Pisau	5.236.005	695.225	-	5.931.230
13	Kab. Murung Raya	12.519.922	9.887.998	-	22.407.920
14	Kab. Barito Timur	5.292.179	32.960	-	5.325.139
XV	Provinsi Kalimantan Selatan	629.319	-	4.227.467	4.856.786
1	Kab. Banjar	104.887	-	-	104.887



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
2	Kab. Barito Kuala	120.431	-	-	120.431
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	104.887	-	-	104.887
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	104.887	-	-	104.887
5	Kab. Hulu Sungai Utara	104.887	-	-	104.887
6	Kab. Kotabaru	104.887	-	-	104.887
7	Kab. Tabalong	483.500	-	-	483.500
8	Kab. Tanah Laut	122.938	-	-	122.938
9	Kab. Tapin	104.887	-	-	104.887
10	Kota Banjarbaru	104.887	-	-	104.887
11	Kota Banjarmasin	104.887	-	-	104.887
12	Kab. Balangan	104.887	-	-	104.887
13	Kab. Tanah Bumbu	846.431	-	-	846.431
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	14.197.286	5.732.466	183.238.855	203.168.607
1	Kab. Berau	4.223.427	3.684.190	-	7.907.617
2	Kab. Kutai Kartanegara	4.570.605	5.438.400	-	10.009.005
3	Kab. Kutai Barat	11.258.741	3.955.200	-	15.213.941
4	Kab. Kutai Timur	7.272.517	1.648.000	-	8.920.517



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
5	Kab. Paser	3.184.250	2.901.634	-	6.085.884
6	Kota Balikpapan	3.154.953	-	-	3.154.953
7	Kota Bontang	3.154.953	-	-	3.154.953
8	Kota Samarinda	3.154.953	-	-	3.154.953
9	Kab. Penajam Paser Utara	5.085.567	1.977.600	-	7.063.167
10	Kab. Mahakam Ulu	11.729.180	3.324.840	-	15.054.020
XVII	Provinsi Sulawesi Utara	98.584	-	2.660.213	2.758.797
1	Kab. Bolaang Mongondow	40.627	-	-	40.627
2	Kab. Minahasa	14.083	-	-	14.083
3	Kab. Kepulauan Sangihe	14.083	-	-	14.083
4	Kota Bitung	14.083	-	-	14.083
5	Kota Manado	14.083	-	-	14.083
6	Kab. Kepulauan Talaud	14.083	-	-	14.083
7	Kab. Minahasa Selatan	15.294	-	-	15.294
8	Kota Tomohon	14.083	-	-	14.083
9	Kab. Minahasa Utara	14.083	-	-	14.083
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	14.083	-	-	14.083



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
		14.083	-	-	14.083
11	Kota Kotamobagu	90.844	-	-	90.844
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	26.410	-	-	26.410
13	Kab. Minahasa Tenggara	16.900	-	-	16.900
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	77.510	-	-	77.510
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	729.735	2.442.638	5.622.462	8.794.835
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah	391.800	3.708.000	-	4.099.800
1	Kab. Banggai	121.623	-	-	121.623
2	Kab. Banggai Kepulauan	244.347	-	-	244.347
3	Kab. Buol	230.059	-	-	230.059
4	Kab. Toli-Toli	241.729	-	-	241.729
5	Kab. Donggala	220.252	2.130.093	-	2.350.345
6	Kab. Morowali	395.105	1.966.229	-	2.361.334
7	Kab. Poso	121.623	-	-	121.623
8	Kota Palu	253.440	-	-	253.440
9	Kab. Parigi Moutong	209.138	1.966.229	-	2.175.367
10	Kab. Tojo Una Una	139.532	-	-	139.532
11	Kab. Sigi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
12	Kab. Banggai Laut	121.623	-	-	121.623
13	Kab. Morowali Utara	228.670	-	-	228.670
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan	141.720	-	2.481.990	2.623.710
1	Kab. Bantaeng	12.324	-	-	12.324
2	Kab. Barru	13.041	-	-	13.041
3	Kab. Bone	23.324	-	-	23.324
4	Kab. Bulukumba	12.324	-	-	12.324
5	Kab. Enrekang	14.237	-	-	14.237
6	Kab. Gowa	30.105	-	-	30.105
7	Kab. Jeneponto	13.174	-	-	13.174
8	Kab. Luwu	13.300	-	-	13.300
9	Kab. Luwu Utara	13.151	-	-	13.151
10	Kab. Maros	13.623	-	-	13.623
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	14.023	-	-	14.023
12	Kota Palopo	12.324	-	-	12.324
13	Kab. Luwu Timur	162.712	-	-	162.712
14	Kab. Pinrang	12.324	-	-	12.324



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
		12.391	-	-	12.391
15	Kab. Sinjai	12.324	-	-	12.324
16	Kab. Kepulauan Selayar	12.324	-	-	12.324
17	Kab. Sidenreng Rappang	73.201	-	-	73.201
19	Kab. Soppeng	12.324	-	-	12.324
20	Kab. Takalar	16.090	-	-	16.090
21	Kab. Tana Toraja	12.324	-	-	12.324
22	Kab. Wajo	12.324	-	-	12.324
23	Kota Pare-pare	29.764	-	-	29.764
24	Kota Makassar	13.832	-	-	13.832
25	Kab. Toraja Utara	198.763	4.234.967	5.879.240	10.312.970
XX	Provinsi Sulawesi Tenggara	28.743	-	-	28.743
1	Kab. Buton	105.138	5.932.800	-	6.037.938
2	Kab. Konawe	94.895	4.415.067	-	4.509.962
3	Kab. Kolaka	27.243	-	-	27.243
4	Kab. Muna	25.459	-	-	25.459
5	Kota Kendari	27.120	-	-	27.120
6	Kota Bau-bau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
7	Kab. Konawe Selatan	40.942	-	-	40.942
8	Kab. Bombana	31.548	-	-	31.548
9	Kab. Wakatobi	24.845	-	-	24.845
10	Kab. Kolaka Utara	34.707	-	-	34.707
11	Kab. Konawe Utara	175.282	6.592.000	-	6.767.282
12	Kab. Buton Utara	30.303	-	-	30.303
13	Kab. Konawe Kepulauan	29.239	-	-	29.239
14	Kab. Kolaka Timur	45.054	-	-	45.054
15	Kab. Muna Barat	24.845	-	-	24.845
16	Kab. Buton Tengah	24.845	-	-	24.845
17	Kab. Buton Selatan	24.845	-	-	24.845
XXI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	76.878	20.567	2.132.647	2.230.092
1	Kab. Bima	17.862	-	-	17.862
2	Kab. Dompu	56.071	-	-	56.071
3	Kab. Lombok Barat	20.616	-	-	20.616
4	Kab. Lombok Tengah	17.084	-	-	17.084
5	Kab. Lombok Timur	36.421	-	-	36.421



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
6	Kab. Sumbawa	29.542	82.268	-	111.810
7	Kota Mataram	17.084	-	-	17.084
8	Kota Bima	17.084	-	-	17.084
9	Kab. Sumbawa Barat	78.662	-	-	78.662
10	Kab. Lombok Utara	17.084	-	-	17.084
XXII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	41.506	-	-	41.506
1	Kab. Alor	10.482	-	-	10.482
2	Kab. Belu	3.953	-	-	3.953
3	Kab. Ende	32.642	-	-	32.642
4	Kab. Flores Timur	3.953	-	-	3.953
5	Kab. Kupang	3.953	-	-	3.953
6	Kab. Lembata	3.953	-	-	3.953
7	Kab. Manggarai	3.953	-	-	3.953
8	Kab. Ngada	3.953	-	-	3.953
9	Kab. Sikka	47.793	-	-	47.793
10	Kab. Sumba Barat	3.953	-	-	3.953
11	Kab. Sumba Timur	3.953	-	-	3.953



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.953	-	-	3.953
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.953	-	-	3.953
14	Kota Kupang	3.953	-	-	3.953
15	Kab. Rote Ndao	3.953	-	-	3.953
16	Kab. Manggarai Barat	3.953	-	-	3.953
17	Kab. Nagekeo	3.953	-	-	3.953
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.953	-	-	3.953
19	Kab. Sumba Tengah	3.953	-	-	3.953
20	Kab. Manggarai Timur	3.953	-	-	3.953
21	Kab. Sabu Raijua	3.953	-	-	3.953
22	Kab. Malaka	3.953	-	-	3.953
XXIII	Provinsi Maluku	4.958.934	936.814	34.163.751	40.059.499
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.493.172	-	-	3.493.172
2	Kab. Maluku Tengah	1.092.101	-	-	1.092.101
3	Kab. Maluku Tenggara	1.000.819	-	-	1.000.819
4	Kab. Buru	3.608.376	-	-	3.608.376
5	Kota Ambon	991.787	-	-	991.787



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.001.772	3.747.255	-	4.749.027
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.011.624	-	-	1.011.624
8	Kab. Kepulauan Aru	1.016.228	-	-	1.016.228
9	Kota Tual	991.787	-	-	991.787
10	Kab. Maluku Barat Daya	991.787	-	-	991.787
11	Kab. Buru Selatan	4.636.283	-	-	4.636.283
XXIV	Provinsi Papua	6.836.473	3.316.738	56.907.393	67.060.604
1	Kab. Biak Numfor	488.320	-	-	488.320
2	Kab. Jayapura	868.781	-	-	868.781
3	Kab. Jayawijaya	488.320	-	-	488.320
4	Kab. Merauke	2.411.906	1.483.200	-	3.895.106
5	Kab. Mimika	1.835.638	-	-	1.835.638
6	Kab. Nabire	3.646.290	659.200	-	4.305.490
7	Kab. Paniai	488.320	-	-	488.320
8	Kab. Puncak Jaya	488.320	-	-	488.320
9	Kab. Kepulauan Yapen	488.320	-	-	488.320
10	Kota Jayapura	488.320	-	-	488.320



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
11	Kab. Sarmi	3.111.265	824.000	-	3.935.265
12	Kab. Keerom	1.990.886	626.240	-	2.617.126
13	Kab. Yahukimo	488.320	-	-	488.320
14	Kab. Pegunungan Bintang	488.320	-	-	488.320
15	Kab. Tolikara	488.320	-	-	488.320
16	Kab. Boven Digoel	2.307.759	-	-	2.307.759
17	Kab. Mappi	655.000	-	-	655.000
18	Kab. Asmat	751.979	-	-	751.979
19	Kab. Waropen	488.320	-	-	488.320
20	Kab. Supiori	488.320	-	-	488.320
21	Kab. Mamberamo Raya	488.320	9.674.312	-	10.162.632
22	Kab. Mamberamo Tengah	488.320	-	-	488.320
23	Kab. Yalimo	488.320	-	-	488.320
24	Kab. Lanny Jaya	488.320	-	-	488.320
25	Kab. Nduga	488.320	-	-	488.320
26	Kab. Dogiyai	488.320	-	-	488.320
27	Kab. Puncak	488.320	-	-	488.320



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
28	Kab. Intan Jaya	488.320	-	-	488.320
29	Kab. Deiyai	488.320	-	-	488.320
XXV	Provinsi Maluku Utara	3.975.352	1.800.440	23.741.588	29.517.380
1	Kab. Halmahera Tengah	1.718.812	659.200	-	2.378.012
2	Kota Ternate	883.412	-	-	883.412
3	Kab. Halmahera Barat	889.114	-	-	889.114
4	Kab. Halmahera Timur	2.687.266	659.200	-	3.346.466
5	Kab. Halmahera Selatan	5.259.457	988.800	-	6.248.257
6	Kab. Halmahera Utara	909.601	-	-	909.601
7	Kab. Kepulauan Sula	903.512	824.000	-	1.727.512
8	Kota Tidore Kepulauan	883.412	-	-	883.412
9	Kab. Pulau Morotai	883.412	659.200	-	1.542.612
10	Kab. Pulau Taliabu	883.412	3.411.360	-	4.294.772
XXVI	Provinsi Banten	188.734	-	-	188.734
1	Kab. Lebak	73.850	-	-	73.850
2	Kab. Pandeglang	357.543	-	-	357.543
3	Kab. Serang	53.924	-	-	53.924



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
		53.924	-	-	53.924
4	Kab. Tangerang	53.924	-	-	53.924
5	Kota Cilegon	53.924	-	-	53.924
6	Kota Tangerang	53.924	-	-	53.924
7	Kota Serang	53.924	-	-	53.924
8	Kota Tangerang Selatan	53.924	-	-	53.924
		87.945	-	2.171.446	2.259.391
XXVII	Provinsi Bangka Belitung	34.378	-	-	34.378
1	Kab. Bangka	120.284	-	-	120.284
2	Kab. Belitung	29.315	-	-	29.315
3	Kota Pangkal Pinang	29.315	-	-	29.315
4	Kab. Bangka Selatan	29.360	-	-	29.360
5	Kab. Bangka Tengah	30.818	-	-	30.818
6	Kab. Bangka Barat	78.312	-	-	78.312
7	Kab. Belitung Timur	453.727	-	5.259.105	5.712.832
XXVIII	Provinsi Gorontalo	196.258	-	-	196.258
1	Kab. Boalemo	311.222	-	-	311.222
2	Kab. Gorontalo	181.491	-	-	181.491
3	Kota Gorontalo				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
4	Kab. Pohuwato	480.305	-	-	480.305
5	Kab. Bone Bolango	189.921	-	-	189.921
6	Kab. Gorontalo Utara	455.712	-	-	455.712
XXIX	Provinsi Kepulauan Riau	126.330	-	1.200.598	1.326.928
1	Kab. Natuna	42.110	-	-	42.110
2	Kab. Kepulauan Anambas	42.110	-	-	42.110
3	Kab. Karimun	145.520	-	-	145.520
4	Kota Batam	42.110	-	-	42.110
5	Kota Tanjung Pinang	42.110	-	-	42.110
6	Kab. Lingga	149.249	-	-	149.249
7	Kab. Bintan	42.110	-	-	42.110
XXX	Provinsi Papua Barat	6.401.251	2.779.182	63.958.729	73.139.162
1	Kab. Fak Fak	1.738.119	98.880	-	1.836.999
2	Kab. Manokwari	1.777.931	741.600	-	2.519.531
3	Kab. Sorong	1.611.024	824.000	-	2.435.024
4	Kota Sorong	1.066.875	-	-	1.066.875
5	Kab. Raja Ampat	1.088.022	-	-	1.088.022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IIUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
6	Kab. Sorong Selatan	1.156.739	741.600	-	1.898.339
7	Kab. Teluk Bintuni	4.115.155	1.648.000	-	5.763.155
8	Kab. Teluk Wondama	4.101.843	1.318.400	-	5.420.243
9	Kab. Kaimana	2.971.187	1.914.749	-	4.885.936
10	Kab. Maybrat	1.666.275	1.914.749	-	3.581.024
11	Kab. Tambrau	1.638.496	-	-	1.638.496
12	Kab. Manokwari Selatan	1.606.462	1.914.749	-	3.521.211
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.066.875	-	-	1.066.875
XXXI	Provinsi Sulawesi Barat	22.896	-	1.374.542	1.397.438
1	Kab. Majene	9.158	-	-	9.158
2	Kab. Mamuju	16.968	-	-	16.968
3	Kab. Polewali Mandar	9.158	-	-	9.158
4	Kab. Mamasa	12.688	-	-	12.688
5	Kab. Pasangkayu	10.996	-	-	10.996
6	Kab. Mamuju Tengah	32.614	-	-	32.614
XXXII	Provinsi Kalimantan Utara	20.082.039	2.281.702	143.200.126	165.563.867
1	Kab. Bulungan	19.613.620	2.534.809	-	22.148.429



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PSDH	IUPH	DR	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
2	Kab. Malinau	14.143.562	2.472.000	-	16.615.562
3	Kab. Nunukan	19.887.123	2.142.400	-	22.029.523
4	Kota Tarakan	10.078.763	-	-	10.078.763
5	Kab. Tana Tidung	16.605.088	1.977.600	-	18.582.688
Total		744.779.232	174.069.149	879.387.223	1.798.235.604

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Menteri Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hubungan Perundang-undangan,



Hayu Sinuwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
I	Provinsi Aceh	-
1	Kab. Aceh Barat	983.593
2	Kab. Aceh Besar	983.593
3	Kab. Aceh Selatan	983.593
4	Kab. Aceh Singkil	983.593
5	Kab. Aceh Tengah	983.593
6	Kab. Aceh Tenggara	983.593
7	Kab. Aceh Timur	983.593
8	Kab. Aceh Utara	983.593
9	Kab. Bireuen	983.593
10	Kab. Pidie	983.593
11	Kab. Simeulue	983.593
12	Kota Banda Aceh	983.593
13	Kota Sabang	983.593
14	Kota Langsa	983.593
15	Kota Lhokseumawe	983.593
16	Kab. Gayo Lues	983.593
17	Kab. Aceh Barat Daya	983.593
18	Kab. Aceh Jaya	983.593
19	Kab. Nagan Raya	983.593
20	Kab. Aceh Tamiang	983.593
21	Kab. Bener Meriah	983.593
22	Kab. Pidie Jaya	983.593
23	Kota Subulussalam	983.593
II	Provinsi Sumatera Utara	-
1	Kab. Asahan	983.593
2	Kab. Dairi	983.593
3	Kab. Deli Serdang	983.593
4	Kab. Karo	983.593
5	Kab. Labuhanbatu	983.593
6	Kab. Langkat	983.593
7	Kab. Mandailing Natal	983.593
8	Kab. Nias	983.593
9	Kab. Simalungun	983.593
10	Kab. Tapanuli Selatan	983.593
11	Kab. Tapanuli Tengah	983.593
12	Kab. Tapanuli Utara	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
13	Kab. Toba Samosir	983.593
14	Kota Binjai	983.593
15	Kota Medan	983.593
16	Kota Pematang Siantar	983.593
17	Kota Sibolga	983.593
18	Kota Tanjung Balai	983.593
19	Kota Tebing Tinggi	983.593
20	Kota Padang Sidempuan	983.593
21	Kab. Pakpak Bharat	983.593
22	Kab. Nias Selatan	983.593
23	Kab. Humbang Hasundutan	983.593
24	Kab. Serdang Bedagai	983.593
25	Kab. Samosir	983.593
26	Kab. Batu Bara	983.593
27	Kab. Padang Lawas	983.593
28	Kab. Padang Lawas Utara	983.593
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	983.593
30	Kab. Labuhanbatu Utara	983.593
31	Kab. Nias Utara	983.593
32	Kab. Nias Barat	983.593
33	Kota Gunungsitoli	983.593
III	Provinsi Sumatera Barat	-
1	Kab. Limapuluh Kota	983.593
2	Kab. Agam	983.593
3	Kab. Kepulauan Mentawai	983.593
4	Kab. Padang Pariaman	983.593
5	Kab. Pasaman	983.593
6	Kab. Pesisir Selatan	983.593
7	Kab. Sijunjung	983.593
8	Kab. Solok	983.593
9	Kab. Tanah Datar	983.593
10	Kota Bukit Tinggi	983.593
11	Kota Padang Panjang	983.593
12	Kota Padang	983.593
13	Kota Payakumbuh	983.593
14	Kota Sawahlunto	983.593
15	Kota Solok	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
16	Kota Pariaman	983.593
17	Kab. Pasaman Barat	983.593
18	Kab. Dharmasraya	983.593
19	Kab. Solok Selatan	983.593
IV	Provinsi Riau	-
1	Kab. Bengkalis	983.593
2	Kab. Indragiri Hilir	983.593
3	Kab. Indragiri Hulu	983.593
4	Kab. Kampar	983.593
5	Kab. Kuantan Singingi	983.593
6	Kab. Pelalawan	983.593
7	Kab. Rokan Hilir	983.593
8	Kab. Rokan Hulu	983.593
9	Kab. Siak	983.593
10	Kota Dumai	983.593
11	Kota Pekanbaru	983.593
12	Kab. Kepulauan Meranti	983.593
V	Provinsi Jambi	-
1	Kab. Batang Hari	983.593
2	Kab. Bungo	983.593
3	Kab. Kerinci	983.593
4	Kab. Merangin	983.593
5	Kab. Muaro Jambi	983.593
6	Kab. Sarolangun	983.593
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	983.593
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	983.593
9	Kab. Tebo	983.593
10	Kota Jambi	983.593
11	Kota Sungai Penuh	983.593
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-
1	Kab. Lahat	983.593
2	Kab. Musi Banyuasin	983.593
3	Kab. Musi Rawas	983.593
4	Kab. Muara Enim	983.593
5	Kab. Ogan Komering Ilir	983.593
6	Kab. Ogan Komering Ulu	983.593
7	Kota Palembang	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
8	Kota Prabumulih	983.593
9	Kota Pagar Alam	983.593
10	Kota Lubuk Linggau	983.593
11	Kab. Banyuasin	983.593
12	Kab. Ogan Ilir	983.593
13	Kab. OKU Timur	983.593
14	Kab. OKU Selatan	983.593
15	Kab. Empat Lawang	983.593
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	983.593
17	Kab. Musi Rawas Utara	983.593
VII	Provinsi Bengkulu	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	983.593
2	Kab. Bengkulu Utara	983.593
3	Kab. Rejang Lebong	983.593
4	Kota Bengkulu	983.593
5	Kab. Kaur	983.593
6	Kab. Seluma	983.593
7	Kab. Mukomuko	983.593
8	Kab. Lebong	983.593
9	Kab. Kepahiang	983.593
10	Kab. Bengkulu Tengah	983.593
VIII	Provinsi Lampung	-
1	Kab. Lampung Barat	983.593
2	Kab. Lampung Selatan	983.593
3	Kab. Lampung Tengah	983.593
4	Kab. Lampung Utara	983.593
5	Kab. Lampung Timur	983.593
6	Kab. Tanggamus	983.593
7	Kab. Tulang Bawang	983.593
8	Kab. Way Kanan	983.593
9	Kota Bandar Lampung	983.593
10	Kota Metro	983.593
11	Kab. Pesawaran	983.593
12	Kab. Pringsewu	983.593
13	Kab. Mesuji	983.593
14	Kab. Tulang Bawang Barat	983.593
15	Kab. Pesisir Barat	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
IX	Provinsi DKI Jakarta	983.492
X	Provinsi Jawa Barat	-
1	Kab. Bandung	983.593
2	Kab. Bekasi	983.593
3	Kab. Bogor	983.593
4	Kab. Ciamis	983.593
5	Kab. Cianjur	983.593
6	Kab. Cirebon	983.593
7	Kab. Garut	983.593
8	Kab. Indramayu	983.593
9	Kab. Karawang	983.593
10	Kab. Kuningan	983.593
11	Kab. Majalengka	983.593
12	Kab. Purwakarta	983.593
13	Kab. Subang	983.593
14	Kab. Sukabumi	983.593
15	Kab. Sumedang	983.593
16	Kab. Tasikmalaya	983.593
17	Kota Bandung	983.593
18	Kota Bekasi	983.593
19	Kota Bogor	983.593
20	Kota Cirebon	983.593
21	Kota Depok	983.593
22	Kota Sukabumi	983.593
23	Kota Tasikmalaya	983.593
24	Kota Cimahi	983.593
25	Kota Banjar	983.593
26	Kab. Bandung Barat	983.593
27	Kab. Pangandaran	983.593
XI	Provinsi Jawa Tengah	-
1	Kab. Banjarnegara	983.593
2	Kab. Banyumas	983.593
3	Kab. Batang	983.593
4	Kab. Blora	983.593
5	Kab. Boyolali	983.593
6	Kab. Brebes	983.593
7	Kab. Cilacap	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Demak	983.593
9	Kab. Grobogan	983.593
10	Kab. Jepara	983.593
11	Kab. Karanganyar	983.593
12	Kab. Kebumen	983.593
13	Kab. Kendal	983.593
14	Kab. Klaten	983.593
15	Kab. Kudus	983.593
16	Kab. Magelang	983.593
17	Kab. Pati	983.593
18	Kab. Pekalongan	983.593
19	Kab. Pemasang	983.593
20	Kab. Purbalingga	983.593
21	Kab. Purworejo	983.593
22	Kab. Rembang	983.593
23	Kab. Semarang	983.593
24	Kab. Sragen	983.593
25	Kab. Sukoharjo	983.593
26	Kab. Tegal	983.593
27	Kab. Temanggung	983.593
28	Kab. Wonogiri	983.593
29	Kab. Wonosobo	983.593
30	Kota Magelang	983.593
31	Kota Pekalongan	983.593
32	Kota Salatiga	983.593
33	Kota Semarang	983.593
34	Kota Surakarta	983.593
35	Kota Tegal	983.593
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-
1	Kab. Bantul	983.593
2	Kab. Gunung Kidul	983.593
3	Kab. Kulon Progo	983.593
4	Kab. Sleman	983.593
5	Kota Yogyakarta	983.593
XIII	Provinsi Jawa Timur	-
1	Kab. Bangkalan	983.593
2	Kab. Banyuwangi	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
3	Kab. Blitar	983.593
4	Kab. Bojonegoro	983.593
5	Kab. Bondowoso	983.593
6	Kab. Gresik	983.593
7	Kab. Jember	983.593
8	Kab. Jombang	983.593
9	Kab. Kediri	983.593
10	Kab. Lamongan	983.593
11	Kab. Lumajang	983.593
12	Kab. Madiun	983.593
13	Kab. Magetan	983.593
14	Kab. Malang	983.593
15	Kab. Mojokerto	983.593
16	Kab. Nganjuk	983.593
17	Kab. Ngawi	983.593
18	Kab. Pacitan	983.593
19	Kab. Pamekasan	983.593
20	Kab. Pasuruan	983.593
21	Kab. Ponorogo	983.593
22	Kab. Probolinggo	983.593
23	Kab. Sampang	983.593
24	Kab. Sidoarjo	983.593
25	Kab. Situbondo	983.593
26	Kab. Sumenep	983.593
27	Kab. Trenggalek	983.593
28	Kab. Tuban	983.593
29	Kab. Tulungagung	983.593
30	Kota Blitar	983.593
31	Kota Kediri	983.593
32	Kota Madiun	983.593
33	Kota Malang	983.593
34	Kota Mojokerto	983.593
35	Kota Pasuruan	983.593
36	Kota Probolinggo	983.593
37	Kota Surabaya	983.593
38	Kota Batu	983.593
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bengkayang	983.593
2	Kab. Landak	983.593
3	Kab. Kapuas Hulu	983.593
4	Kab. Ketapang	983.593
5	Kab. Mempawah	983.593
6	Kab. Sambas	983.593
7	Kab. Sanggau	983.593
8	Kab. Sintang	983.593
9	Kota Pontianak	983.593
10	Kota Singkawang	983.593
11	Kab. Sekadau	983.593
12	Kab. Melawi	983.593
13	Kab. Kayong Utara	983.593
14	Kab. Kubu Raya	983.593
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-
1	Kab. Barito Selatan	983.593
2	Kab. Barito Utara	983.593
3	Kab. Kapuas	983.593
4	Kab. Kotawaringin Barat	983.593
5	Kab. Kotawaringin Timur	983.593
6	Kota Palangkaraya	983.593
7	Kab. Katingan	983.593
8	Kab. Seruyan	983.593
9	Kab. Sukamara	983.593
10	Kab. Lamandau	983.593
11	Kab. Gunung Mas	983.593
12	Kab. Pulang Pisau	983.593
13	Kab. Murung Raya	983.593
14	Kab. Barito Timur	983.593
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-
1	Kab. Banjar	983.593
2	Kab. Barito Kuala	983.593
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	983.593
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	983.593
5	Kab. Hulu Sungai Utara	983.593
6	Kab. Kotabaru	983.593
7	Kab. Tabalong	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Tanah Laut	983.593
9	Kab. Tapin	983.593
10	Kota Banjarbaru	983.593
11	Kota Banjarmasin	983.593
12	Kab. Balangan	983.593
13	Kab. Tanah Bumbu	983.593
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-
1	Kab. Berau	983.593
2	Kab. Kutai Kartanegara	983.593
3	Kab. Kutai Barat	983.593
4	Kab. Kutai Timur	983.593
5	Kab. Paser	983.593
6	Kota Balikpapan	983.593
7	Kota Bontang	983.593
8	Kota Samarinda	983.593
9	Kab. Penajam Paser Utara	983.593
10	Kab. Mahakam Ulu	983.593
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	-
1	Kab. Bolaang Mongondow	983.593
2	Kab. Minahasa	983.593
3	Kab. Kepulauan Sangihe	983.593
4	Kota Bitung	983.593
5	Kota Manado	983.593
6	Kab. Kepulauan Talaud	983.593
7	Kab. Minahasa Selatan	983.593
8	Kota Tomohon	983.593
9	Kab. Minahasa Utara	983.593
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	983.593
11	Kota Kotamobagu	983.593
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	983.593
13	Kab. Minahasa Tenggara	983.593
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	983.593
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	983.593
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-
1	Kab. Banggai	983.593
2	Kab. Banggai Kepulauan	983.593
3	Kab. Buol	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
4	Kab. Toli-Toli	983.593
5	Kab. Donggala	983.593
6	Kab. Morowali	983.593
7	Kab. Poso	983.593
8	Kota Palu	983.593
9	Kab. Parigi Moutong	983.593
10	Kab. Tojo Una Una	983.593
11	Kab. Sigi	983.593
12	Kab. Banggai Laut	983.593
13	Kab. Morowali Utara	983.593
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-
1	Kab. Bantaeng	983.593
2	Kab. Barru	983.593
3	Kab. Bone	983.593
4	Kab. Bulukumba	983.593
5	Kab. Enrekang	983.593
6	Kab. Gowa	983.593
7	Kab. Jeneponto	983.593
8	Kab. Luwu	983.593
9	Kab. Luwu Utara	983.593
10	Kab. Maros	983.593
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	983.593
12	Kota Palopo	983.593
13	Kab. Luwu Timur	983.593
14	Kab. Pinrang	983.593
15	Kab. Sinjai	983.593
16	Kab. Kepulauan Selayar	983.593
17	Kab. Sidenreng Rappang	983.593
18	Kab. Soppeng	983.593
19	Kab. Takalar	983.593
20	Kab. Tana Toraja	983.593
21	Kab. Wajo	983.593
22	Kota Pare-pare	983.593
23	Kota Makassar	983.593
24	Kab. Toraja Utara	983.593
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-
1	Kab. Buton	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
2	Kab. Konawe	983.593
3	Kab. Kolaka	983.593
4	Kab. Muna	983.593
5	Kota Kendari	983.593
6	Kota Bau-bau	983.593
7	Kab. Konawe Selatan	983.593
8	Kab. Bombana	983.593
9	Kab. Wakatobi	983.593
10	Kab. Kolaka Utara	983.593
11	Kab. Konawe Utara	983.593
12	Kab. Buton Utara	983.593
13	Kab. Konawe Kepulauan	983.593
14	Kab. Kolaka Timur	983.593
15	Kab. Muna Barat	983.593
16	Kab. Buton Tengah	983.593
17	Kab. Buton Selatan	983.593
XXII	Provinsi Bali	-
1	Kab. Badung	983.593
2	Kab. Bangli	983.593
3	Kab. Buleleng	983.593
4	Kab. Gianyar	983.593
5	Kab. Jembrana	983.593
6	Kab. Karangasem	983.593
7	Kab. Klungkung	983.593
8	Kab. Tabanan	983.593
9	Kota Denpasar	983.593
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-
1	Kab. Bima	983.593
2	Kab. Dompu	983.593
3	Kab. Lombok Barat	983.593
4	Kab. Lombok Tengah	983.593
5	Kab. Lombok Timur	983.593
6	Kab. Sumbawa	983.593
7	Kota Mataram	983.593
8	Kota Bima	983.593
9	Kab. Sumbawa Barat	983.593
10	Kab. Lombok Utara	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
1	Kab. Alor	983.593
2	Kab. Belu	983.593
3	Kab. Ende	983.593
4	Kab. Flores Timur	983.593
5	Kab. Kupang	983.593
6	Kab. Lembata	983.593
7	Kab. Manggarai	983.593
8	Kab. Ngada	983.593
9	Kab. Sikka	983.593
10	Kab. Sumba Barat	983.593
11	Kab. Sumba Timur	983.593
12	Kab. Timor Tengah Selatan	983.593
13	Kab. Timor Tengah Utara	983.593
14	Kota Kupang	983.593
15	Kab. Rote Ndao	983.593
16	Kab. Manggarai Barat	983.593
17	Kab. Nagekeo	983.593
18	Kab. Sumba Barat Daya	983.593
19	Kab. Sumba Tengah	983.593
20	Kab. Manggarai Timur	983.593
21	Kab. Sabu Raijua	983.593
22	Kab. Malaka	983.593
XXV	Provinsi Maluku	-
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	983.593
2	Kab. Maluku Tengah	983.593
3	Kab. Maluku Tenggara	983.593
4	Kab. Buru	983.593
5	Kota Ambon	983.593
6	Kab. Seram Bagian Barat	983.593
7	Kab. Seram Bagian Timur	983.593
8	Kab. Kepulauan Aru	983.593
9	Kota Tual	983.593
10	Kab. Maluku Barat Daya	983.593
11	Kab. Buru Selatan	983.593
XXVI	Provinsi Papua	-
1	Kab. Biak Numfor	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
2	Kab. Jayapura	983.593
3	Kab. Jayawijaya	983.593
4	Kab. Merauke	983.593
5	Kab. Mimika	983.593
6	Kab. Nabire	983.593
7	Kab. Paniai	983.593
8	Kab. Puncak Jaya	983.593
9	Kab. Kepulauan Yapen	983.593
10	Kota Jayapura	983.593
11	Kab. Sarmi	983.593
12	Kab. Keerom	983.593
13	Kab. Yahukimo	983.593
14	Kab. Pegunungan Bintang	983.593
15	Kab. Tolikara	983.593
16	Kab. Boven Digoel	983.593
17	Kab. Mappi	983.593
18	Kab. Asmat	983.593
19	Kab. Waropen	983.593
20	Kab. Supiori	983.593
21	Kab. Mamberamo Raya	983.593
22	Kab. Mamberamo Tengah	983.593
23	Kab. Yalimo	983.593
24	Kab. Lanny Jaya	983.593
25	Kab. Nduga	983.593
26	Kab. Dogiyai	983.593
27	Kab. Puncak	983.593
28	Kab. Intan Jaya	983.593
29	Kab. Deiyai	983.593
XXVII	Provinsi Maluku Utara	-
1	Kab. Halmahera Tengah	983.593
2	Kota Ternate	983.593
3	Kab. Halmahera Barat	983.593
4	Kab. Halmahera Timur	983.593
5	Kab. Halmahera Selatan	983.593
6	Kab. Halmahera Utara	983.593
7	Kab. Kepulauan Sula	983.593
8	Kota Tidore Kepulauan	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
9	Kab. Pulau Morotai	983.593
10	Kab. Pulau Taliabu	983.593
XXVIII	Provinsi Banten	-
1	Kab. Lebak	983.593
2	Kab. Pandeglang	983.593
3	Kab. Serang	983.593
4	Kab. Tangerang	983.593
5	Kota Cilegon	983.593
6	Kota Tangerang	983.593
7	Kota Serang	983.593
8	Kota Tangerang Selatan	983.593
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-
1	Kab. Bangka	983.593
2	Kab. Belitung	983.593
3	Kota Pangkal Pinang	983.593
4	Kab. Bangka Selatan	983.593
5	Kab. Bangka Tengah	983.593
6	Kab. Bangka Barat	983.593
7	Kab. Belitung Timur	983.593
XXX	Provinsi Gorontalo	-
1	Kab. Boalemo	983.593
2	Kab. Gorontalo	983.593
3	Kota Gorontalo	983.593
4	Kab. Pohuwato	983.593
5	Kab. Bone Bolango	983.593
6	Kab. Gorontalo Utara	983.593
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-
1	Kab. Natuna	983.593
2	Kab. Kepulauan Anambas	983.593
3	Kab. Karimun	983.593
4	Kota Batam	983.593
5	Kota Tanjung Pinang	983.593
6	Kab. Lingga	983.593
7	Kab. Bintan	983.593
XXXII	Provinsi Papua Barat	-
1	Kab. Fak Fak	983.593
2	Kab. Manokwari	983.593



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)
3	Kab. Sorong	983.593
4	Kota Sorong	983.593
5	Kab. Raja Ampat	983.593
6	Kab. Sorong Selatan	983.593
7	Kab. Teluk Bintuni	983.593
8	Kab. Teluk Wondama	983.593
9	Kab. Kaimana	983.593
10	Kab. Maybrat	983.593
11	Kab. Tambrauw	983.593
12	Kab. Manokwari Selatan	983.593
13	Kab. Pegunungan Arfak	983.593
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-
1	Kab. Majene	983.593
2	Kab. Mamuju	983.593
3	Kab. Polewali Mandar	983.593
4	Kab. Mamasa	983.593
5	Kab. Pasangkayu	983.593
6	Kab. Mamuju Tengah	983.593
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-
1	Kab. Bulungan	983.593
2	Kab. Malinau	983.593
3	Kab. Nunukan	983.593
4	Kota Tarakan	983.593
5	Kab. Tana Tidung	983.593
	TOTAL	500.648.736

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Perundang-undangan,



Hidayati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Aceh	33.355	-	-	33.355
1	Kab. Aceh Barat	3.032	-	-	3.032
2	Kab. Aceh Besar	3.032	-	-	3.032
3	Kab. Aceh Selatan	3.032	-	-	3.032
4	Kab. Aceh Singkil	3.032	-	-	3.032
5	Kab. Aceh Tengah	3.032	-	-	3.032
6	Kab. Aceh Tenggara	3.032	-	-	3.032
7	Kab. Aceh Timur	3.032	-	-	3.032
8	Kab. Aceh Utara	3.032	-	-	3.032
9	Kab. Bireuen	3.032	-	-	3.032
10	Kab. Pidie	3.032	-	-	3.032
11	Kab. Simeulue	3.032	-	-	3.032
12	Kota Banda Aceh	3.032	-	-	3.032
13	Kota Sabang	66.710	-	-	66.710
14	Kota Langsa	3.032	-	-	3.032



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Kota Lhokseumawe	3.032	-	-	3.032
16	Kab. Gayo Lues	3.032	-	-	3.032
17	Kab. Aceh Barat Daya	3.032	-	-	3.032
18	Kab. Aceh Jaya	3.032	-	-	3.032
19	Kab. Nagan Raya	3.032	-	-	3.032
20	Kab. Aceh Tamiang	3.032	-	-	3.032
21	Kab. Bener Meriah	3.032	-	-	3.032
22	Kab. Pidie Jaya	3.032	-	-	3.032
23	Kota Subulussalam	3.032	-	-	3.032
II	Provinsi Sumatera Utara	572.625	-	354.212	926.837
1	Kab. Asahan	35.789	-	22.138	57.927
2	Kab. Dairi	35.789	-	22.138	57.927
3	Kab. Deli Serdang	35.789	-	22.138	57.927
4	Kab. Karo	35.789	-	22.138	57.927
5	Kab. Labuhanbatu	35.789	-	22.138	57.927



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kab. Langkat	35.789	-	22.138	57.927
7	Kab. Mandailing Natal	1.145.250	-	708.425	1.853.675
8	Kab. Nias	35.789	-	22.138	57.927
9	Kab. Simalungun	35.789	-	22.138	57.927
10	Kab. Tapanuli Selatan	35.789	-	22.138	57.927
11	Kab. Tapanuli Tengah	35.789	-	22.138	57.927
12	Kab. Tapanuli Utara	35.789	-	22.138	57.927
13	Kab. Toba Samosir	35.789	-	22.138	57.927
14	Kota Binjai	35.789	-	22.138	57.927
15	Kota Medan	35.789	-	22.138	57.927
16	Kota Pematang Siantar	35.789	-	22.138	57.927
17	Kota Sibolga	35.789	-	22.138	57.927
18	Kota Tanjung Balai	35.789	-	22.138	57.927
19	Kota Tebing Tinggi	35.789	-	22.138	57.927
20	Kota Padang Sidempuan	35.789	-	22.138	57.927



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Kab. Pakpak Bharat	35.789	-	22.138	57.927
22	Kab. Nias Selatan	35.789	-	22.138	57.927
23	Kab. Humbang Hasundutan	35.789	-	22.138	57.927
24	Kab. Serdang Bedagai	35.789	-	22.138	57.927
25	Kab. Samosir	35.789	-	22.138	57.927
26	Kab. Batu Bara	35.789	-	22.138	57.927
27	Kab. Padang Lawas	35.789	-	22.138	57.927
28	Kab. Padang Lawas Utara	35.789	-	22.138	57.927
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	35.789	-	22.138	57.927
30	Kab. Labuhanbatu Utara	35.789	-	22.138	57.927
31	Kab. Nias Utara	35.789	-	22.138	57.927
32	Kab. Nias Barat	35.789	-	22.138	57.927
33	Kota Gunungsitoli	35.789	-	22.138	57.927
III	Provinsi Sumatera Barat	398.400	-	-	398.400
1	Kab. Limapuluh Kota	44.267	-	-	44.267



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kab. Agam	44.267	-	-	44.267
3	Kab. Kepulauan Mentawai	44.267	-	-	44.267
4	Kab. Padang Pariaman	44.267	-	-	44.267
5	Kab. Pasaman	44.267	-	-	44.267
6	Kab. Pesisir Selatan	44.267	-	-	44.267
7	Kab. Sijunjung	44.267	-	-	44.267
8	Kab. Solok	289.067	-	-	289.067
9	Kab. Tanah Datar	44.267	-	-	44.267
10	Kota Bukit Tinggi	44.267	-	-	44.267
11	Kota Padang Panjang	44.267	-	-	44.267
12	Kota Padang	44.267	-	-	44.267
13	Kota Payakumbuh	44.267	-	-	44.267
14	Kota Sawahlunto	44.267	-	-	44.267
15	Kota Solok	44.267	-	-	44.267
16	Kota Pariaman	44.267	-	-	44.267



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Kab. Pasaman Barat	44.267	-	-	44.267
18	Kab. Dharmasraya	44.267	-	-	44.267
19	Kab. Solok Selatan	552.000	-	-	552.000
IV	Provinsi Sumatera Selatan	170.208	-	-	170.208
1	Kab. Lahat	100.260	-	-	100.260
2	Kab. Musi Banyuasin	21.276	-	-	21.276
3	Kab. Musi Rawas	21.276	-	-	21.276
4	Kab. Muara Enim	224.676	-	-	224.676
5	Kab. Ogan Komering Ilir	21.276	-	-	21.276
6	Kab. Ogan Komering Ulu	21.276	-	-	21.276
7	Kota Palembang	21.276	-	-	21.276
8	Kota Prabumulih	21.276	-	-	21.276
9	Kota Pagar Alam	58.032	-	-	58.032
10	Kota Lubuk Linggau	21.276	-	-	21.276
11	Kab. Banyuasin	21.276	-	-	21.276



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Kab. Ogan Ilir	21.276	-	-	21.276
13	Kab. OKU Timur	21.276	-	-	21.276
14	Kab. OKU Selatan	21.276	-	-	21.276
15	Kab. Empat Lawang	21.276	-	-	21.276
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	21.276	-	-	21.276
17	Kab. Musi Rawas Utara	21.276	-	-	21.276
V	Provinsi Lampung	433.104	6.463.990	-	6.897.094
1	Kab. Lampung Barat	61.872	923.427	-	985.299
2	Kab. Lampung Selatan	241.816	923.427	-	1.165.243
3	Kab. Lampung Tengah	61.872	923.427	-	985.299
4	Kab. Lampung Utara	61.872	923.427	-	985.299
5	Kab. Lampung Timur	61.872	923.427	-	985.299
6	Kab. Tanggamus	87.884	12.927.980	-	13.015.864
7	Kab. Tulang Bawang	61.872	923.427	-	985.299
8	Kab. Way Kanan	61.872	923.427	-	985.299



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Kota Bandar Lampung	207.745	923.427	-	1.131.172
10	Kota Metro	61.872	923.427	-	985.299
11	Kab. Pesawaran	514.379	923.427	-	1.437.806
12	Kab. Pringsewu	61.872	923.427	-	985.299
13	Kab. Mesuji	61.872	923.427	-	985.299
14	Kab. Tulang Bawang Barat	61.872	923.427	-	985.299
15	Kab. Pesisir Barat	61.872	923.427	-	985.299
VI	Provinsi Jawa Barat	219.188	122.992.794	-	123.211.982
1	Kab. Bandung	25.687	113.838.189	-	113.863.876
2	Kab. Bekasi	16.861	9.460.985	-	9.477.846
3	Kab. Bogor	16.861	58.496.307	-	58.513.168
4	Kab. Ciamis	16.861	9.460.985	-	9.477.846
5	Kab. Cianjur	16.861	9.460.985	-	9.477.846
6	Kab. Cirebon	16.861	9.460.985	-	9.477.846
7	Kab. Garut	16.861	44.758.064	-	44.774.925



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Kab. Indramayu	16.861	9.460.985	-	9.477.846
9	Kab. Karawang	16.861	9.460.985	-	9.477.846
10	Kab. Kuningan	16.861	9.460.985	-	9.477.846
11	Kab. Majalengka	16.861	9.460.985	-	9.477.846
12	Kab. Purwakarta	155.322	9.460.985	-	9.616.307
13	Kab. Subang	157.261	9.460.985	-	9.618.246
14	Kab. Sukabumi	16.861	57.275.993	-	57.292.854
15	Kab. Sumedang	16.861	9.460.985	-	9.477.846
16	Kab. Tasikmalaya	16.861	9.460.985	-	9.477.846
17	Kota Bandung	16.861	9.460.985	-	9.477.846
18	Kota Bekasi	16.861	9.460.985	-	9.477.846
19	Kota Bogor	16.861	9.460.985	-	9.477.846
20	Kota Cirebon	16.861	9.460.985	-	9.477.846
21	Kota Depok	16.861	9.460.985	-	9.477.846
22	Kota Sukabumi	16.861	9.460.985	-	9.477.846



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Kota Tasikmalaya	16.861	9.460.985	-	9.477.846
24	Kota Cimahi	16.861	9.460.985	-	9.477.846
25	Kota Banjar	16.861	9.460.985	-	9.477.846
26	Kab. Bandung Barat	150.707	9.460.985	-	9.611.692
27	Kab. Pangandaran	16.861	9.460.985	-	9.477.846
VII	Provinsi Jawa Tengah	723.086	-	-	723.086
1	Kab. Banjarnegara	42.534	-	-	42.534
2	Kab. Banyumas	197.114	-	-	197.114
3	Kab. Batang	42.534	-	-	42.534
4	Kab. Blora	42.534	-	-	42.534
5	Kab. Boyolali	51.107	-	-	51.107
6	Kab. Brebes	112.967	-	-	112.967
7	Kab. Cilacap	42.534	-	-	42.534
8	Kab. Demak	42.534	-	-	42.534
9	Kab. Grobogan	42.534	-	-	42.534



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kab. Jepara	42.534	-	-	42.534
11	Kab. Karanganyar	401.310	-	-	401.310
12	Kab. Kebumen	42.534	-	-	42.534
13	Kab. Kendal	71.096	-	-	71.096
14	Kab. Klaten	42.534	-	-	42.534
15	Kab. Kudus	42.534	-	-	42.534
16	Kab. Magelang	163.617	-	-	163.617
17	Kab. Pati	42.534	-	-	42.534
18	Kab. Pekalongan	42.534	-	-	42.534
19	Kab. Pemalang	74.960	-	-	74.960
20	Kab. Purbalingga	67.198	-	-	67.198
21	Kab. Purworejo	42.534	-	-	42.534
22	Kab. Rembang	42.534	-	-	42.534
23	Kab. Semarang	448.101	-	-	448.101
24	Kab. Sragen	102.950	-	-	102.950



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Kab. Sukoharjo	42.534	-	-	42.534
26	Kab. Tegal	124.008	-	-	124.008
27	Kab. Temanggung	87.045	-	-	87.045
28	Kab. Wonogiri	49.840	-	-	49.840
29	Kab. Wonosobo	42.534	-	-	42.534
30	Kota Magelang	42.534	-	-	42.534
31	Kota Pekalongan	42.534	-	-	42.534
32	Kota Salatiga	47.808	-	-	47.808
33	Kota Semarang	42.534	-	-	42.534
34	Kota Surakarta	42.534	-	-	42.534
35	Kota Tegal	42.534	-	-	42.534
VIII	Provinsi Jawa Timur	624.178	-	-	624.178
1	Kab. Bangkalan	33.739	-	-	33.739
2	Kab. Banyuwangi	422.212	-	-	422.212
3	Kab. Blitar	33.739	-	-	33.739



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kab. Bojonegoro	33.739	-	-	33.739
5	Kab. Bondowoso	226.902	-	-	226.902
6	Kab. Gresik	33.739	-	-	33.739
7	Kab. Jember	33.739	-	-	33.739
8	Kab. Jombang	33.739	-	-	33.739
9	Kab. Kediri	33.739	-	-	33.739
10	Kab. Lamongan	33.739	-	-	33.739
11	Kab. Lumajang	33.739	-	-	33.739
12	Kab. Madiun	134.057	-	-	134.057
13	Kab. Magetan	71.363	-	-	71.363
14	Kab. Malang	56.222	-	-	56.222
15	Kab. Mojokerto	105.914	-	-	105.914
16	Kab. Nganjuk	33.739	-	-	33.739
17	Kab. Ngawi	129.284	-	-	129.284
18	Kab. Pacitan	33.739	-	-	33.739



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Kab. Pamekasan	33.739	-	-	33.739
20	Kab. Pasuruan	87.046	-	-	87.046
21	Kab. Ponorogo	231.198	-	-	231.198
22	Kab. Probolinggo	33.739	-	-	33.739
23	Kab. Sampang	33.739	-	-	33.739
24	Kab. Sidoarjo	33.739	-	-	33.739
25	Kab. Situbondo	37.009	-	-	37.009
26	Kab. Sumenep	33.739	-	-	33.739
27	Kab. Trenggalek	33.739	-	-	33.739
28	Kab. Tuban	33.739	-	-	33.739
29	Kab. Tulungagung	33.739	-	-	33.739
30	Kota Blitar	33.739	-	-	33.739
31	Kota Kediri	33.739	-	-	33.739
32	Kota Madiun	33.739	-	-	33.739
33	Kota Malang	33.739	-	-	33.739



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Kota Mojokerto	33.739	-	-	33.739
35	Kota Pasuruan	33.739	-	-	33.739
36	Kota Probolinggo	33.739	-	-	33.739
37	Kota Surabaya	33.739	-	-	33.739
38	Kota Batu	84.543	-	-	84.543
IX	Provinsi Sulawesi Utara	-	5.928.432	-	5.928.432
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	846.919	-	846.919
2	Kab. Minahasa	-	7.468.300	-	7.468.300
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	846.919	-	846.919
4	Kota Bitung	-	846.919	-	846.919
5	Kota Manado	-	907.474	-	907.474
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	846.919	-	846.919
7	Kab. Minahasa Selatan	-	888.757	-	888.757
8	Kota Tomohon	-	4.768.662	-	4.768.662
9	Kab. Minahasa Utara	-	1.200.338	-	1.200.338



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	846.919	-	846.919
11	Kota Kotamobagu	-	846.919	-	846.919
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	846.919	-	846.919
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	857.929	-	857.929
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	846.919	-	846.919
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	846.919	-	846.919
X	Provinsi Nusa Tenggara Timur	539.148	-	212.890	752.038
1	Kab. Alor	51.347	-	20.274	71.621
2	Kab. Belu	51.347	-	20.274	71.621
3	Kab. Ende	440.559	-	20.274	460.833
4	Kab. Flores Timur	51.347	-	20.274	71.621
5	Kab. Kupang	51.347	-	20.274	71.621
6	Kab. Lembata	336.605	-	20.274	356.879
7	Kab. Manggarai	385.610	-	425.756	811.366
8	Kab. Ngada	69.564	-	20.274	89.838



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Kab. Sikka	51.347	-	20.274	71.621
10	Kab. Sumba Barat	51.347	-	20.274	71.621
11	Kab. Sumba Timur	51.347	-	20.274	71.621
12	Kab. Timor Tengah Selatan	51.347	-	20.274	71.621
13	Kab. Timor Tengah Utara	51.347	-	20.274	71.621
14	Kota Kupang	51.347	-	20.274	71.621
15	Kab. Rote Ndao	51.347	-	20.274	71.621
16	Kab. Manggarai Barat	51.347	-	20.274	71.621
17	Kab. Nagekeo	51.347	-	20.274	71.621
18	Kab. Sumba Barat Daya	51.347	-	20.274	71.621
19	Kab. Sumba Tengah	51.347	-	20.274	71.621
20	Kab. Manggarai Timur	51.347	-	20.274	71.621
21	Kab. Sabu Raijua	51.347	-	20.274	71.621
22	Kab. Malaka	51.347	-	20.274	71.621
XI	Provinsi Banten	500.160	-	-	500.160



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Lebak	142.903	-	-	142.903
2	Kab. Pandeglang	575.643	-	-	575.643
3	Kab. Serang	567.579	-	-	567.579
4	Kab. Tangerang	142.903	-	-	142.903
5	Kota Cilegon	142.903	-	-	142.903
6	Kota Tangerang	142.903	-	-	142.903
7	Kota Serang	142.903	-	-	142.903
8	Kota Tangerang Selatan	142.903	-	-	142.903
XII	Provinsi Bengkulu	171.456	-	-	171.456
1	Kab. Bengkulu Selatan	38.101	-	-	38.101
2	Kab. Bengkulu Utara	38.101	-	-	38.101
3	Kab. Rejang Lebong	164.139	-	-	164.139
4	Kota Bengkulu	38.101	-	-	38.101
5	Kab. Kaur	38.101	-	-	38.101
6	Kab. Seluma	38.101	-	-	38.101



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kab. Mukomuko	38.101	-	-	38.101
8	Kab. Lebong	38.101	-	-	38.101
9	Kab. Kepahiang	216.875	-	-	216.875
10	Kab. Bengkulu Tengah	38.101	-	-	38.101
XIII	Maluku Utara	204.192	-	-	204.192
1	Kab. Halmahera Tengah	45.376	-	-	45.376
2	Kab. Halmahera Barat	45.376	-	-	45.376
3	Kota Ternate	45.376	-	-	45.376
4	Kab. Halmahera Timur	45.376	-	-	45.376
5	Kota Tidore Kepulauan	45.376	-	-	45.376
6	Kab. Kepulauan Sula	45.376	-	-	45.376
7	Kab. Halmahera Selatan	408.384	-	-	408.384
8	Kab. Halmahera Utara	45.376	-	-	45.376
9	Kab. Pulau Morotai	45.376	-	-	45.376
10	Kab. Pulau Taliabu	45.376	-	-	45.376



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Iuran Tetap	Setoran Bagian Pemerintah	Iuran Produksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TOTAL	22.945.498	676.926.113	2.835.453	702.707.064

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hayati Lestari
Hayati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
I	Provinsi Aceh	2.126.193.327	-	2.126.193.327
1	Kab. Aceh Barat	588.209.483	-	588.209.483
2	Kab. Aceh Besar	751.399.714	-	751.399.714
3	Kab. Aceh Selatan	660.081.905	-	660.081.905
4	Kab. Aceh Singkil	454.078.750	-	454.078.750
5	Kab. Aceh Tengah	623.701.928	-	623.701.928
6	Kab. Aceh Tenggara	602.160.379	-	602.160.379
7	Kab. Aceh Timur	819.436.048	-	819.436.048
8	Kab. Aceh Utara	895.221.997	-	895.221.997
9	Kab. Bireuen	834.727.911	-	834.727.911
10	Kab. Pidie	825.287.235	-	825.287.235
11	Kab. Simeulue	465.338.369	-	465.338.369
12	Kota Banda Aceh	605.014.830	-	605.014.830
13	Kota Sabang	370.143.343	-	370.143.343
14	Kota Langsa	456.700.561	-	456.700.561
15	Kota Lhokseumawe	469.471.445	-	469.471.445



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
16	Kab. Gayo Lues	472.230.875	-	472.230.875
17	Kab. Aceh Barat Daya	460.983.806	-	460.983.806
18	Kab. Aceh Jaya	437.094.042	-	437.094.042
19	Kab. Nagan Raya	522.187.942	-	522.187.942
20	Kab. Aceh Tamiang	547.975.351	-	547.975.351
21	Kab. Bener Meriah	458.759.081	-	458.759.081
22	Kab. Pidie Jaya	441.952.256	-	441.952.256
23	Kota Subulussalam	353.735.077	-	353.735.077
II	Provinsi Sumatera Utara	2.713.750.553	-	2.713.750.553
1	Kab. Asahan	906.419.993	9.993.726	916.413.719
2	Kab. Dairi	627.664.476	2.961.104	630.625.580
3	Kab. Deli Serdang	1.510.993.188	5.181.932	1.516.175.120
4	Kab. Karo	757.048.872	3.840.000	760.888.872
5	Kab. Labuhanbatu	706.387.966	8.513.174	714.901.140
6	Kab. Langkat	1.212.693.537	13.695.106	1.226.388.643
7	Kab. Mandailing Natal	811.216.130	10.368.000	821.584.130



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
8	Kab. Nias	443.235.113	-	443.235.113
9	Kab. Simahungun	1.243.341.378	9.993.726	1.253.335.104
10	Kab. Tapanuli Selatan	659.619.123	13.695.106	673.314.229
11	Kab. Tapanuli Tengah	649.961.800	20.727.728	670.689.528
12	Kab. Tapanuli Utara	655.805.793	4.071.518	659.877.311
13	Kab. Toba Samosir	543.079.562	4.811.794	547.891.356
14	Kota Binjai	578.790.111	13.695.106	592.485.217
15	Kota Medan	1.633.591.868	53.294.091	1.686.885.959
16	Kota Pematang Siantar	597.491.807	18.705.873	616.197.680
17	Kota Sibolga	418.908.191	6.292.346	425.200.537
18	Kota Tanjung Balai	435.346.351	11.474.278	446.820.629
19	Kota Tebing Tinggi	419.071.661	12.954.830	432.026.491
20	Kota Padang Sidempuan	510.642.332	13.695.106	524.337.438
21	Kab. Pakpak Bharat	354.721.524	-	354.721.524
22	Kab. Nias Selatan	587.955.530	768.000	588.723.530
23	Kab. Humbang Hasundutan	535.793.748	370.138	536.163.886



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
24	Kab. Serdang Bedagai	797.088.981	2.304.000	799.392.981
25	Kab. Samosir	463.519.618	2.220.828	465.740.446
26	Kab. Batu Bara	625.193.759	3.701.380	628.895.139
27	Kab. Padang Lawas	540.720.708	384.000	541.104.708
28	Kab. Padang Lawas Utara	554.213.357	740.276	554.953.633
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	522.537.176	740.276	523.277.452
30	Kab. Labuhanbatu Utara	608.668.247	2.961.104	611.629.351
31	Kab. Nias Utara	428.942.187	384.000	429.326.187
32	Kab. Nias Barat	359.696.030	-	359.696.030
33	Kota Gunungsitoli	444.992.240	1.110.414	446.102.654
III	Provinsi Sumatera Barat	2.076.398.191	-	2.076.398.191
1	Kab. Limapuluh Kota	766.871.792	-	766.871.792
2	Kab. Agam	834.935.989	-	834.935.989
3	Kab. Kepulauan Mentawai	623.196.979	-	623.196.979
4	Kab. Padang Pariaman	790.451.964	-	790.451.964
5	Kab. Pasaman	609.932.806	-	609.932.806



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
6	Kab. Pesisir Selatan	859.754.884	-	859.754.884
7	Kab. Sijunjung	560.403.310	-	560.403.310
8	Kab. Solok	728.558.349	-	728.558.349
9	Kab. Tanah Datar	714.102.850	-	714.102.850
10	Kota BukitTinggi	459.952.239	8.470.584	468.422.823
11	Kota Padang Panjang	382.968.596	5.647.056	388.615.652
12	Kota Padang	1.130.556.777	38.494.352	1.169.051.129
13	Kota Payakumbuh	447.002.220	17.396.486	464.398.706
14	Kota Sawahlunto	383.541.396	3.529.410	387.070.806
15	Kota Solok	406.093.320	4.811.794	410.905.114
16	Kota Pariaman	423.572.160	5.922.208	429.494.368
17	Kab. Pasaman Barat	658.505.223	-	658.505.223
18	Kab. Dharmasraya	522.603.733	-	522.603.733
19	Kab. Solok Selatan	490.084.500	-	490.084.500
IV	Provinsi Riau	1.548.578.928	-	1.548.578.928
1	Kab. Bengkalis	366.236.024	7.032.622	373.268.646



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
2	Kab. Indragiri Hilir	970.682.269	14.435.382	985.117.651
3	Kab. Indragiri Hulu	683.268.360	6.144.000	689.412.360
4	Kab. Kampar	818.272.232	2.961.104	821.233.336
5	Kab. Kuantan Singingi	653.630.363	4.071.518	657.701.881
6	Kab. Pelalawan	640.061.247	5.181.932	645.243.179
7	Kab. Rokan Hilir	456.515.994	9.253.450	465.769.444
8	Kab. Rokan Hulu	691.385.933	2.304.000	693.689.933
9	Kab. Siak	341.622.637	3.331.242	344.953.879
10	Kota Dumai	451.407.124	12.214.554	463.621.678
11	Kota Pekanbaru	843.387.856	30.721.454	874.109.310
12	Kab. Kepulauan Meranti	426.298.788	1.850.690	428.149.478
V	Provinsi Jambi	1.433.203.410	-	1.433.203.410
1	Kab. Batang Hari	622.206.844	5.181.932	627.388.776
2	Kab. Bungo	651.664.824	4.441.656	656.106.480
3	Kab. Kerinci	611.508.076	740.276	612.248.352
4	Kab. Merangin	737.185.980	3.701.380	740.887.360



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
5	Kab. Muaro Jambi	697.173.560	1.850.690	699.024.250
6	Kab. Sarolangun	596.224.443	3.331.242	599.555.685
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	528.774.934	7.402.760	536.177.694
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	557.019.452	7.402.760	564.422.212
9	Kab. Tebo	596.446.589	1.850.690	598.297.279
10	Kota Jambi	734.455.495	22.948.556	757.404.051
11	Kota Sungai Penuh	446.487.752	1.411.764	447.899.516
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.743.742.960	-	1.743.742.960
1	Kab. Lahat	716.894.205	6.662.484	723.556.689
2	Kab. Musi Banyuasin	392.618.589	4.811.794	397.430.383
3	Kab. Musi Rawas	657.659.559	4.811.794	662.471.353
4	Kab. Muara Enim	682.549.191	3.701.380	686.250.571
5	Kab. Ogan Komering Ilir	1.078.468.697	4.588.233	1.083.056.930
6	Kab. Ogan Komering Ulu	656.234.586	5.181.932	661.416.518
7	Kota Palembang	1.310.021.273	37.764.687	1.347.785.960
8	Kota Prabumulih	431.416.897	8.823.525	440.240.422



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
9	Kota Pagar Alam	401.064.581	13.440.000	414.504.581
10	Kota Lubuk Linggau	466.739.473	26.649.936	493.389.409
11	Kab. Banyuasin	969.438.405	5.922.208	975.360.613
12	Kab. Ogan Ilir	644.017.353	5.181.932	649.199.285
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	807.393.949	2.590.966	809.984.915
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	619.993.742	2.590.966	622.584.708
15	Kab. Empat Lawang	439.652.907	3.331.242	442.984.149
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	323.769.927	2.220.828	325.990.755
17	Kab. Musi Rawas Utara	394.763.043	2.590.966	397.354.009
VII	Provinsi Bengkulu	1.334.178.390	-	1.334.178.390
1	Kab. Bengkulu Selatan	568.767.537	5.922.208	574.689.745
2	Kab. Bengkulu Utara	641.772.798	1.850.690	643.623.488
3	Kab. Rejang Lebong	608.573.482	11.999.994	620.573.476
4	Kota Bengkulu	687.765.932	23.647.047	711.412.979
5	Kab. Kaur	452.168.633	1.110.414	453.279.047
6	Kab. Seluma	512.465.092	7.402.760	519.867.852



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
7	Kab. Mukomuko	502.457.619	1.110.414	503.568.033
8	Kab. Lebong	413.174.620	4.224.000	417.398.620
9	Kab. Kepahiang	434.807.102	4.608.000	439.415.102
10	Kab. Bengkulu Tengah	448.590.282	370.138	448.960.420
VIII	Provinsi Lampung	1.906.780.297	-	1.906.780.297
1	Kab. Lampung Barat	539.577.264	1.850.690	541.427.954
2	Kab. Lampung Selatan	1.044.447.682	1.480.552	1.045.928.234
3	Kab. Lampung Tengah	1.374.335.214	3.840.000	1.378.175.214
4	Kab. Lampung Utara	976.178.683	5.552.070	981.730.753
5	Kab. Lampung Timur	1.104.135.612	-	1.104.135.612
6	Kab. Tanggamus	797.038.404	1.110.414	798.148.818
7	Kab. Tulang Bawang	637.951.010	1.480.552	639.431.562
8	Kab. Way Kanan	676.727.863	2.304.000	679.031.863
9	Kota Bandar Lampung	1.063.872.920	46.637.388	1.110.510.308
10	Kota Metro	467.307.219	7.764.702	475.071.921
11	Kab. Pesawaran	684.210.957	-	684.210.957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
12	Kab. Pringsewu	637.757.501	1.920.000	639.677.501
13	Kab. Mesuji	455.225.458	-	455.225.458
14	Kab. Tulang Bawang Barat	486.338.425	1.110.414	487.448.839
15	Kab. Pesisir Barat	434.289.159	740.276	435.029.435
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-
X	Provinsi Jawa Barat	3.212.647.404	-	3.212.647.404
1	Kab. Bandung	2.147.966.417	3.701.380	2.151.667.797
2	Kab. Bekasi	1.218.255.504	2.590.966	1.220.846.470
3	Kab. Bogor	2.027.820.799	7.032.622	2.034.853.421
4	Kab. Ciamis	1.226.081.050	2.590.966	1.228.672.016
5	Kab. Cianjur	1.607.681.345	2.220.828	1.609.902.173
6	Kab. Cirebon	1.559.197.471	4.441.656	1.563.639.127
7	Kab. Garut	1.828.986.436	8.064.000	1.837.050.436
8	Kab. Indramayu	1.415.066.293	2.961.104	1.418.027.397
9	Kab. Karawang	1.311.795.510	4.235.292	1.316.030.802
10	Kab. Kuningan	1.233.878.977	5.552.070	1.239.431.047



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
11	Kab. Majalengka	1.240.856.363	4.811.794	1.245.668.157
12	Kab. Purwakarta	888.019.462	3.456.000	891.475.462
13	Kab. Subang	1.320.673.239	2.961.104	1.323.634.343
14	Kab. Sukabumi	1.632.205.710	1.850.690	1.634.056.400
15	Kab. Sumedang	1.171.378.405	2.470.587	1.173.848.992
16	Kab. Tasikmalaya	1.508.324.968	-	1.508.324.968
17	Kota Bandung	1.695.146.944	53.294.091	1.748.441.035
18	Kota Bekasi	1.246.233.066	19.764.696	1.265.997.762
19	Kota Bogor	813.779.065	25.169.384	838.948.449
20	Kota Cirebon	593.145.833	7.764.702	600.910.535
21	Kota Depok	909.471.224	23.318.694	932.789.918
22	Kota Sukabumi	507.943.190	11.647.053	519.590.243
23	Kota Tasikmalaya	803.891.912	25.539.522	829.431.434
24	Kota Cimahi	590.474.234	5.552.070	596.026.304
25	Kota Banjar	383.384.447	3.176.469	386.560.916
26	Kab. Bandung Barat	1.126.707.364	-	1.126.707.364



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
27	Kab. Pangandaran	561.229.468	-	561.229.468
XI	Provinsi Jawa Tengah	3.784.512.513	-	3.784.512.513
1	Kab. Banjarnegara	989.677.453	4.441.656	994.119.109
2	Kab. Banyumas	1.431.742.124	10.588.230	1.442.330.354
3	Kab. Batang	814.034.417	3.331.242	817.365.659
4	Kab. Blora	952.514.460	8.883.312	961.397.772
5	Kab. Boyolali	1.043.552.276	2.117.646	1.045.669.922
6	Kab. Brebes	1.370.022.166	1.850.690	1.371.872.856
7	Kab. Cilacap	1.410.207.862	5.294.115	1.415.501.977
8	Kab. Demak	938.287.132	2.117.646	940.404.778
9	Kab. Grobogan	1.133.179.929	2.470.587	1.135.650.516
10	Kab. Jepara	1.027.798.317	4.071.518	1.031.869.835
11	Kab. Karanganyar	1.007.870.479	5.552.070	1.013.422.549
12	Kab. Kebumen	1.270.129.645	4.071.518	1.274.201.163
13	Kab. Kendal	986.826.495	7.402.760	994.229.255
14	Kab. Klaten	1.272.337.662	3.529.410	1.275.867.072



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
15	Kab. Kudus	831.258.390	3.176.469	834.434.859
16	Kab. Magelang	1.089.151.569	1.850.690	1.091.002.259
17	Kab. Pati	1.230.193.753	1.850.690	1.232.044.443
18	Kab. Pekalongan	962.698.102	4.588.233	967.286.335
19	Kab. Pemalang	1.218.988.687	4.071.518	1.223.060.205
20	Kab. Purbalingga	912.934.570	5.294.115	918.228.685
21	Kab. Purworejo	951.523.640	8.823.525	960.347.165
22	Kab. Rembang	793.145.321	2.590.966	795.736.287
23	Kab. Semarang	984.259.838	9.529.407	993.789.245
24	Kab. Sragen	1.079.073.389	4.235.292	1.083.308.681
25	Kab. Sukoharjo	932.667.475	6.292.346	938.959.821
26	Kab. Tegal	1.196.443.995	2.117.646	1.198.561.641
27	Kab. Temanggung	815.241.545	8.513.174	823.754.719
28	Kab. Wonogiri	1.158.056.714	15.176.463	1.173.233.177
29	Kab. Wonosobo	862.219.360	10.734.002	872.953.362
30	Kota Magelang	449.177.032	5.999.997	455.177.029



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
31	Kota Pekalongan	461.800.809	9.529.407	471.330.216
32	Kota Salatiga	458.691.170	8.117.643	466.808.813
33	Kota Semarang	1.225.952.784	62.471.136	1.288.423.920
34	Kota Surakarta	847.350.214	18.877.038	866.227.252
35	Kota Tegal	493.439.619	9.529.407	502.969.026
XII	Provinsi DI Yogyakarta	1.351.102.020	-	1.351.102.020
1	Kab. Bantul	1.009.528.274	-	1.009.528.274
2	Kab. Gunung Kidul	965.080.463	-	965.080.463
3	Kab. Kulon Progo	726.666.807	352.941	727.019.748
4	Kab. Sleman	1.026.081.409	-	1.026.081.409
5	Kota Yogyakarta	675.575.229	15.882.345	691.457.574
XIII	Provinsi Jawa Timur	3.998.431.715	-	3.998.431.715
1	Kab. Bangkalan	1.027.967.347	3.072.000	1.031.039.347
2	Kab. Banyuwangi	1.427.682.189	10.363.864	1.438.046.053
3	Kab. Blitar	1.143.550.460	10.363.864	1.153.914.324
4	Kab. Bojonegoro	962.562.603	3.882.351	966.444.954



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
5	Kab. Bondowoso	937.008.730	3.840.000	940.848.730
6	Kab. Gresik	953.513.242	9.623.588	963.136.830
7	Kab. Jember	1.757.784.457	8.143.036	1.765.927.493
8	Kab. Jombang	1.121.597.500	1.411.764	1.123.009.264
9	Kab. Kediri	1.275.275.702	352.941	1.275.628.643
10	Kab. Lamongan	1.179.406.924	4.441.656	1.183.848.580
11	Kab. Lumajang	1.000.501.943	2.590.966	1.003.092.909
12	Kab. Madiun	902.133.644	2.823.528	904.957.172
13	Kab. Magetan	926.446.789	9.882.348	936.329.137
14	Kab. Malang	1.712.030.558	4.441.656	1.716.472.214
15	Kab. Mojokerto	1.000.096.559	1.850.690	1.001.947.249
16	Kab. Nganjuk	1.095.705.635	7.058.820	1.102.764.455
17	Kab. Ngawi	1.070.936.809	1.411.764	1.072.348.573
18	Kab. Pacitan	815.713.188	1.850.690	817.563.878
19	Kab. Pamekasan	880.012.202	4.224.000	884.236.202
20	Kab. Pasuruan	1.214.055.132	8.883.312	1.222.938.444



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
21	Kab. Ponorogo	1.075.089.856	9.623.588	1.084.713.444
22	Kab. Probolinggo	1.006.908.016	1.850.690	1.008.758.706
23	Kab. Sampang	863.077.533	2.220.828	865.298.361
24	Kab. Sidoarjo	1.244.893.902	10.941.171	1.255.835.073
25	Kab. Situbondo	830.381.085	1.480.552	831.861.637
26	Kab. Sumenep	1.181.597.892	1.480.552	1.183.078.444
27	Kab. Trenggalek	910.627.900	1.850.690	912.478.590
28	Kab. Tuban	1.057.348.126	5.999.997	1.063.348.123
29	Kab. Tulungagung	1.187.589.447	4.941.174	1.192.530.621
30	Kota Blitar	430.364.698	7.411.761	437.776.459
31	Kota Kediri	621.217.848	16.235.286	637.453.134
32	Kota Madiun	513.066.617	9.529.407	522.596.024
33	Kota Malang	866.386.024	20.117.637	886.503.661
34	Kota Mojokerto	406.134.942	6.352.938	412.487.880
35	Kota Pasuruan	434.869.105	11.999.994	446.869.099
36	Kota Probolinggo	472.474.689	10.235.289	482.709.978



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
37	Kota Surabaya	1.254.344.402	54.352.914	1.308.697.316
38	Kota Batu	497.451.706	1.850.690	499.302.396
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	1.756.069.684	-	1.756.069.684
1	Kab. Bengkayang	598.824.193	740.276	599.564.469
2	Kab. Landak	683.669.130	-	683.669.130
3	Kab. Kapuas Hulu	995.333.776	1.536.000	996.869.776
4	Kab. Ketapang	1.144.785.211	3.331.242	1.148.116.453
5	Kab. Mempawah	595.745.934	2.590.966	598.336.900
6	Kab. Sambas	894.193.050	-	894.193.050
7	Kab. Sanggau	840.753.919	2.304.000	843.057.919
8	Kab. Sintang	927.656.038	6.144.000	933.800.038
9	Kota Pontianak	716.035.844	10.734.002	726.769.846
10	Kota Singkawang	507.446.104	9.623.588	517.069.692
11	Kab. Sekadau	514.671.472	-	514.671.472
12	Kab. Melawi	616.672.615	-	616.672.615
13	Kab. Kayong Utara	486.572.256	-	486.572.256



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
14	Kab. Kubu Raya	806.955.704	-	806.955.704
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	1.603.623.745	-	1.603.623.745
1	Kab. Barito Selatan	587.598.244	2.688.000	590.286.244
2	Kab. Barito Utara	571.435.063	3.701.380	575.136.443
3	Kab. Kapuas	886.053.953	6.528.000	892.581.953
4	Kab. Kotawaringin Barat	666.005.942	4.992.000	670.997.942
5	Kab. Kotawaringin Timur	837.439.281	6.528.000	843.967.281
6	Kota Palangkaraya	661.758.638	11.520.000	673.278.638
7	Kab. Katingan	710.270.173	2.688.000	712.958.173
8	Kab. Seruyan	628.862.445	1.110.414	629.972.859
9	Kab. Sukamara	428.972.591	1.110.414	430.083.005
10	Kab. Lamandau	471.522.527	1.152.000	472.674.527
11	Kab. Gunung Mas	571.131.728	4.811.794	575.943.522
12	Kab. Pulang Pisau	579.793.787	1.536.000	581.329.787
13	Kab. Murung Raya	681.049.504	3.456.000	684.505.504
14	Kab. Barito Timur	489.928.267	1.152.000	491.080.267



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	1.188.146.871	-	1.188.146.871
1	Kab. Banjar	749.309.778	4.811.794	754.121.572
2	Kab. Barito Kuala	590.862.571	2.220.828	593.083.399
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	536.650.183	1.536.000	538.186.183
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	533.064.238	3.072.000	536.136.238
5	Kab. Hulu Sungai Utara	505.759.317	1.850.690	507.610.007
6	Kab. Kotabaru	636.301.672	1.536.000	637.837.672
7	Kab. Tabalong	512.171.941	3.701.380	515.873.321
8	Kab. Tanah Laut	558.663.764	1.920.000	560.583.764
9	Kab. Tapin	474.135.792	3.331.242	477.467.034
10	Kota Banjarbaru	450.327.791	7.402.760	457.730.551
11	Kota Banjarmasin	714.670.492	19.247.176	733.917.668
12	Kab. Balangan	391.515.124	1.152.000	392.667.124
13	Kab. Tanah Bumbu	483.662.405	1.850.690	485.513.095
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	815.693.641	-	815.693.641
1	Kab. Berau	593.229.249	3.701.380	596.930.629



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
2	Kab. Kutai Kartanegara	290.849.874	16.286.072	307.135.946
3	Kab. Kutai Barat	617.042.219	1.480.552	618.522.771
4	Kab. Kutai Timur	584.115.665	740.276	584.855.941
5	Kab. Paser	408.830.614	1.850.690	410.681.304
6	Kota Balikpapan	433.818.667	11.999.994	445.818.661
7	Kota Bontang	228.066.293	5.294.115	233.360.408
8	Kota Samarinda	696.702.219	20.823.519	717.525.738
9	Kab. Penajam Paser Utara	273.886.923	8.883.312	282.770.235
10	Kab. Mahakam Ulu	497.410.048	-	497.410.048
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	1.463.436.158	-	1.463.436.158
1	Kab. Bolaang Mongondow	571.005.322	740.276	571.745.598
2	Kab. Minahasa	672.386.076	15.915.934	688.302.010
3	Kab. Kepulauan Sangihe	544.582.062	8.143.036	552.725.098
4	Kota Bitung	490.156.746	25.539.522	515.696.268
5	Kota Manado	745.590.462	32.202.006	777.792.468
6	Kab. Kepulauan Talaud	504.257.906	4.071.518	508.329.424



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
7	Kab. Minahasa Selatan	539.053.540	3.840.000	542.893.540
8	Kota Tomohon	421.364.016	15.529.404	436.893.420
9	Kab. Minahasa Utara	517.063.219	2.304.000	519.367.219
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	402.043.333	3.701.380	405.744.713
11	Kota Kotamobagu	387.697.225	6.662.484	394.359.709
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	392.491.928	370.138	392.862.066
13	Kab. Minahasa Tenggara	421.387.260	3.456.000	424.843.260
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	357.676.719	-	357.676.719
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	361.695.058	-	361.695.058
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	1.637.588.970	-	1.637.588.970
1	Kab. Banggai	892.517.139	17.026.348	909.543.487
2	Kab. Banggai Kepulauan	489.625.437	1.110.414	490.735.851
3	Kab. Buol	539.153.067	2.590.966	541.744.033
4	Kab. Toli-Toli	644.175.164	2.220.828	646.395.992
5	Kab. Donggala	690.603.113	3.331.242	693.934.355
6	Kab. Morowali	519.755.708	2.590.966	522.346.674



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
7	Kab. Poso	742.590.533	10.363.864	752.954.397
8	Kota Palu	690.615.599	16.235.286	706.850.885
9	Kab. Parigi Moutong	785.102.521	1.850.690	786.953.211
10	Kab. Tojo Una Una	593.766.844	4.441.656	598.208.500
11	Kab. Sigi	649.629.922	-	649.629.922
12	Kab. Banggai Laut	414.353.073	1.058.823	415.411.896
13	Kab. Morowali Utara	582.457.276	1.110.414	583.567.690
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	2.586.312.342	-	2.586.312.342
1	Kab. Bantaeng	521.067.684	7.772.898	528.840.582
2	Kab. Barru	529.315.122	5.294.115	534.609.237
3	Kab. Bone	1.099.934.949	16.896.000	1.116.830.949
4	Kab. Bulukumba	727.206.756	9.993.726	737.200.482
5	Kab. Enrekang	552.746.057	6.292.346	559.038.403
6	Kab. Gowa	870.900.548	17.026.348	887.926.896
7	Kab. Jeneponto	663.228.244	11.474.278	674.702.522
8	Kab. Luwu	710.996.594	7.680.000	718.676.594



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
9	Kab. Luwu Utara	678.944.673	2.470.587	681.415.260
10	Kab. Maros	730.061.373	8.513.174	738.574.547
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	770.430.333	14.065.244	784.495.577
12	Kota Palopo	529.252.118	16.941.168	546.193.286
13	Kab. Luwu Timur	556.822.890	1.110.414	557.933.304
14	Kab. Pinrang	730.354.882	14.435.382	744.790.264
15	Kab. Sinjai	606.990.877	4.811.794	611.802.671
16	Kab. Kepulauan Selayar	597.831.567	2.590.966	600.422.533
17	Kab. Sidenreng Rappang	635.503.772	14.065.244	649.569.016
18	Kab. Soppeng	641.128.878	8.064.000	649.192.878
19	Kab. Takalar	623.000.092	8.470.584	631.470.676
20	Kab. Tana Toraja	574.987.815	17.396.486	592.384.301
21	Kab. Wajo	736.210.424	17.766.624	753.977.048
22	Kota Pare-pare	466.840.162	8.143.036	474.983.198
23	Kota Makassar	1.335.864.834	53.999.973	1.389.864.807
24	Kab. Toraja Utara	539.664.289	14.117.640	553.781.929



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.614.486.358	-	1.614.486.358
1	Kab. Buton	436.047.058	4.441.656	440.488.714
2	Kab. Konawe	696.445.565	21.097.866	717.543.431
3	Kab. Kolaka	598.226.868	12.954.830	611.181.698
4	Kab. Muna	675.388.045	9.623.588	685.011.633
5	Kota Kendari	681.353.647	23.688.832	705.042.479
6	Kota Bau-bau	524.506.895	15.915.934	540.422.829
7	Kab. Konawe Selatan	689.098.872	5.760.000	694.858.872
8	Kab. Bombana	496.347.235	7.764.702	504.111.937
9	Kab. Wakatobi	475.773.663	9.623.588	485.397.251
10	Kab. Kolaka Utara	502.726.640	2.304.000	505.030.640
11	Kab. Konawe Utara	466.947.730	4.071.518	471.019.248
12	Kab. Buton Utara	424.337.906	4.441.656	428.779.562
13	Kab. Konawe Kepulauan	331.343.977	2.590.966	333.934.943
14	Kab. Kolaka Timur	412.597.728	5.922.208	418.519.936
15	Kab. Muna Barat	371.369.577	1.850.690	373.220.267



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
16	Kab. Buton Tengah	372.828.811	3.701.380	376.530.191
17	Kab. Buton Selatan	363.283.792	3.529.410	366.813.202
XXII	Provinsi Bali	1.325.847.555	-	1.325.847.555
1	Kab. Badung	355.583.355	5.647.056	361.230.411
2	Kab. Bangli	582.990.233	1.480.552	584.470.785
3	Kab. Buleleng	991.461.540	6.705.879	998.167.419
4	Kab. Gianyar	714.403.553	2.117.646	716.521.199
5	Kab. Jembrana	571.163.423	3.701.380	574.864.803
6	Kab. Karangasem	770.730.461	1.058.823	771.789.284
7	Kab. Klungkung	552.088.682	2.117.646	554.206.328
8	Kab. Tabanan	835.897.238	-	835.897.238
9	Kota Denpasar	671.386.055	5.647.056	677.033.111
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.583.746.053	-	1.583.746.053
1	Kab. Bima	906.012.508	-	906.012.508
2	Kab. Dompu	586.500.847	3.331.242	589.832.089
3	Kab. Lombok Barat	795.626.001	1.110.414	796.736.415



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
4	Kab. Lombok Tengah	1.024.345.209	4.441.656	1.028.786.865
5	Kab. Lombok Timur	1.183.762.857	5.552.070	1.189.314.927
6	Kab. Sumbawa	842.920.927	2.961.104	845.882.031
7	Kota Mataram	614.246.829	18.506.900	632.753.729
8	Kota Bima	467.345.891	14.065.244	481.411.135
9	Kab. Sumbawa Barat	409.358.011	2.590.966	411.948.977
10	Kab. Lombok Utara	408.751.699	-	408.751.699
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.875.182.301	-	1.875.182.301
1	Kab. Alor	621.073.021	6.292.346	627.365.367
2	Kab. Belu	513.128.558	4.441.656	517.570.214
3	Kab. Ende	646.481.578	8.513.174	654.994.752
4	Kab. Flores Timur	629.433.037	7.772.898	637.205.935
5	Kab. Kupang	697.052.126	6.292.346	703.344.472
6	Kab. Lembata	484.412.063	2.688.000	487.100.063
7	Kab. Manggarai	596.113.107	9.984.000	606.097.107
8	Kab. Ngada	482.049.567	5.922.208	487.971.775



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
9	Kab. Sikka	643.050.613	4.811.794	647.862.407
10	Kab. Sumba Barat	411.342.783	4.224.000	415.566.783
11	Kab. Sumba Timur	650.851.650	5.922.208	656.773.858
12	Kab. Timor Tengah Selatan	766.829.063	4.441.656	771.270.719
13	Kab. Timor Tengah Utara	597.381.612	12.214.554	609.596.166
14	Kota Kupang	665.403.082	18.877.038	684.280.120
15	Kab. Rote Ndao	458.792.053	2.590.966	461.383.019
16	Kab. Manggarai Barat	531.113.404	1.764.705	532.878.109
17	Kab. Nagekeo	448.429.617	5.922.208	454.351.825
18	Kab. Sumba Barat Daya	488.988.853	740.276	489.729.129
19	Kab. Sumba Tengah	369.246.880	-	369.246.880
20	Kab. Manggarai Timur	527.446.640	6.528.000	533.974.640
21	Kab. Sabu Raijua	363.560.495	1.850.690	365.411.185
22	Kab. Malaka	454.162.076	-	454.162.076
XXV	Provinsi Maluku	1.699.714.805	-	1.699.714.805
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	578.241.453	740.276	578.981.729



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
2	Kab. Maluku Tengah	990.612.512	2.220.828	992.833.340
3	Kab. Maluku Tenggara	506.768.572	370.138	507.138.710
4	Kab. Buru	528.471.311	-	528.471.311
5	Kota Ambon	690.508.508	7.058.820	697.567.328
6	Kab. Seram Bagian Barat	622.135.262	-	622.135.262
7	Kab. Seram Bagian Timur	546.216.172	-	546.216.172
8	Kab. Kepulauan Aru	599.192.390	740.276	599.932.666
9	Kota Tual	404.585.747	1.110.414	405.696.161
10	Kab. Maluku Barat Daya	577.396.059	370.138	577.766.197
11	Kab. Buru Selatan	440.886.206	-	440.886.206
XXVI	Provinsi Papua	2.616.545.381	-	2.616.545.381
1	Kab. Biak Numfor	603.420.144	5.181.932	608.602.076
2	Kab. Jayapura	703.887.561	1.850.690	705.738.251
3	Kab. Jayawijaya	747.208.131	1.536.000	748.744.131
4	Kab. Merauke	1.244.609.347	4.071.518	1.248.680.865
5	Kab. Mimika	626.831.031	7.296.000	634.127.031



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
6	Kab. Nabire	726.482.574	3.331.242	729.813.816
7	Kab. Paniai	602.676.189	1.850.690	604.526.879
8	Kab. Puncak Jaya	781.271.755	1.152.000	782.423.755
9	Kab. Kepulauan Yapen	565.463.332	1.920.000	567.383.332
10	Kota Jayapura	650.883.809	8.823.525	659.707.334
11	Kab. Sarmi	726.004.701	768.000	726.772.701
12	Kab. Keerom	556.660.641	-	556.660.641
13	Kab. Yahukimo	763.288.609	384.000	763.672.609
14	Kab. Pegunungan Bintang	868.136.050	-	868.136.050
15	Kab. Tolikara	750.656.457	1.536.000	752.192.457
16	Kab. Boven Digoel	848.397.640	-	848.397.640
17	Kab. Mappi	797.003.779	768.000	797.771.779
18	Kab. Asmat	913.225.697	-	913.225.697
19	Kab. Waropen	582.573.175	-	582.573.175
20	Kab. Supiori	464.146.469	-	464.146.469
21	Kab. Mamberamo Raya	735.003.883	-	735.003.883



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
22	Kab. Mamberamo Tengah	671.842.674	-	671.842.674
23	Kab. Yalimo	633.292.256	-	633.292.256
24	Kab. Lanny Jaya	655.582.150	384.000	655.966.150
25	Kab. Nduga	645.650.357	-	645.650.357
26	Kab. Dogiyai	517.342.366	-	517.342.366
27	Kab. Puncak	825.597.943	-	825.597.943
28	Kab. Intan Jaya	717.101.942	-	717.101.942
29	Kab. Deiyai	502.354.327	-	502.354.327
XXVII	Provinsi Maluku Utara	1.354.662.180	-	1.354.662.180
1	Kab. Halmahera Tengah	460.403.872	-	460.403.872
2	Kota Ternate	625.917.660	27.176.457	653.094.117
3	Kab. Halmahera Barat	504.639.047	-	504.639.047
4	Kab. Halmahera Timur	486.927.206	-	486.927.206
5	Kab. Halmahera Selatan	766.195.544	-	766.195.544
6	Kab. Halmahera Utara	495.804.401	-	495.804.401
7	Kab. Kepulauan Sula	495.612.836	-	495.612.836



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
8	Kota Tidore Kepulauan	556.165.633	14.117.640	570.283.273
9	Kab. Pulau Morotai	404.673.835	-	404.673.835
10	Kab. Pulau Taliabu	356.662.296	-	356.662.296
XXVIII	Provinsi Banten	1.140.003.353	-	1.140.003.353
1	Kab. Lebak	1.125.336.936	1.850.690	1.127.187.626
2	Kab. Pandeglang	1.206.226.358	4.992.000	1.211.218.358
3	Kab. Serang	1.122.244.253	-	1.122.244.253
4	Kab. Tangerang	1.212.608.135	10.363.864	1.222.971.999
5	Kota Cilegon	628.714.574	15.176.463	643.891.037
6	Kota Tangerang	891.127.663	38.494.352	929.622.015
7	Kota Serang	650.191.313	24.429.108	674.620.421
8	Kota Tangerang Selatan	589.587.626	19.987.452	609.575.078
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	1.046.862.622	-	1.046.862.622
1	Kab. Bangka	544.666.745	6.705.879	551.372.624
2	Kab. Belitung	502.017.625	2.590.966	504.608.591
3	Kota Pangkal Pinang	460.710.763	15.545.796	476.256.559



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
4	Kab. Bangka Selatan	481.972.838	1.110.414	483.083.252
5	Kab. Bangka Tengah	458.390.034	2.590.966	460.981.000
6	Kab. Bangka Barat	465.028.311	1.411.764	466.440.075
7	Kab. Belitung Timur	458.068.325	-	458.068.325
XXX	Provinsi Gorontalo	1.043.126.752	-	1.043.126.752
1	Kab. Boalemo	468.935.433	-	468.935.433
2	Kab. Gorontalo	670.054.721	5.181.932	675.236.653
3	Kota Gorontalo	521.564.348	18.506.900	540.071.248
4	Kab. Pohuwato	528.364.125	1.058.823	529.422.948
5	Kab. Bone Bolango	498.275.332	1.764.705	500.040.037
6	Kab. Gorontalo Utara	416.503.866	-	416.503.866
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	1.190.057.596	-	1.190.057.596
1	Kab. Natuna	389.300.853	2.220.828	391.521.681
2	Kab. Kepulauan Anambas	384.992.629	768.000	385.760.629
3	Kab. Karimun	426.042.423	10.734.002	436.776.425
4	Kota Batam	633.037.966	22.588.224	655.626.190



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
5	Kota Tanjung Pinang	483.296.130	6.352.938	489.649.068
6	Kab. Lingga	481.596.995	2.590.966	484.187.961
7	Kab. Bintan	512.059.864	5.294.115	517.353.979
XXXII	Provinsi Papua Barat	1.456.520.204	-	1.456.520.204
1	Kab. Fak Fak	693.667.350	2.590.966	696.258.316
2	Kab. Manokwari	547.959.407	3.456.000	551.415.407
3	Kab. Sorong	536.789.026	9.623.588	546.412.614
4	Kota Sorong	498.546.033	15.175.658	513.721.691
5	Kab. Raja Ampat	680.020.122	1.480.552	681.500.674
6	Kab. Sorong Selatan	473.480.498	740.276	474.220.774
7	Kab. Teluk Bintuni	560.695.109	740.276	561.435.385
8	Kab. Teluk Wondama	459.120.937	384.000	459.504.937
9	Kab. Kaimana	622.165.017	740.276	622.905.293
10	Kab. Maybrat	453.791.721	370.138	454.161.859
11	Kab. Tambrau	529.846.085	-	529.846.085
12	Kab. Manokwari Selatan	354.681.768	-	354.681.768



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
13	Kab. Pegunungan Arfak	388.052.957	-	388.052.957
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	1.064.068.728	-	1.064.068.728
1	Kab. Majene	529.327.103	7.402.760	536.729.863
2	Kab. Mamuju	646.936.970	4.811.794	651.748.764
3	Kab. Polewali Mandar	735.369.588	8.513.174	743.882.762
4	Kab. Mamasa	533.723.403	4.811.794	538.535.197
5	Kab. Pasangkayu	498.792.170	1.480.552	500.272.722
6	Kab. Mamuju Tengah	364.029.720	-	364.029.720
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	1.205.960.153	-	1.205.960.153
1	Kab. Bulungan	525.651.863	2.590.966	528.242.829
2	Kab. Malinau	814.152.557	-	814.152.557
3	Kab. Nunukan	478.937.922	2.961.104	481.899.026
4	Kota Tarakan	402.568.235	7.402.760	409.970.995
5	Kab. Tana Tidung	417.103.576	-	417.103.576
	JUMLAH ALOKASI PROVINSI	58.497.175.160	0	58.497.175.160
	JUMLAH ALOKASI KAB/KOTA	356.376.407.532	3.000.000.000	359.376.407.532



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No	Daerah	DAU Formula	DAU Tambahan	Total Dana Alokasi Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	414.873.582.692	3.000.000.000	417.873.582.692

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Henny Sihwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam ribu rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	163.089.664.098
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	153.726.335.269
1.1.1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35.993.087.934
1.1.2	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	40.210.514.934
1.1.3	Kementerian Agama	51.896.000.173
1.1.4	Kementerian Keuangan	2.711.866.968
1.1.5	Kementerian Pertanian	688.100.000
1.1.6	Kementerian Perindustrian	2.323.961.070
1.1.7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	185.014.361
1.1.8	Kementerian Perhubungan	3.559.370.000
1.1.9	Kementerian Kesehatan	1.750.000.000
1.1.10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.297.518
1.1.11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	469.397.491
1.1.12	Kementerian Pariwisata	1.105.100.000
1.1.13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	33.800.000
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	812.346.450
1.1.15	Kementerian Pertahanan	673.400.000
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	2.950.000.000
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	535.664.846
1.1.18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	117.633.032
1.1.19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	111.226.315
1.1.20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	178.520.013
1.1.21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.566.000.000
1.1.22	Kementerian Perdagangan	6.034.164
1.1.23	Kepolisian Negara Republik Indonesia	500.000.000
1.1.24	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	250.000.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	9.363.328.829
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	308.375.424.054
2.1	DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	168.833.369.012
2.2	Dana Transfer Khusus	134.527.572.050
2.2.1	DAK Fisik	16.859.000.000
2.2.1.1	DAK Pendidikan	15.959.000.000
2.2.1.2	DAK Fisik Bidang GOR	600.000.000
2.2.1.3	DAK Fisik Bidang Perpustakaan Daerah	300.000.000
2.2.2	DAK Non Fisik	117.668.572.050
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	56.867.226.628
2.2.2.2	Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	914.100.000
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	51.226.860.000
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.475.500.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam ribu rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
2.2.2.5	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	200.000.000
2.2.2.6	Bantuan Operasional Kesetaraan	1.548.500.000
2.2.2.7	Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	129.940.000
2.2.2.8	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.306.445.422
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	5.014.482.992
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	20.990.000.000
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	990.000.000
	Jumlah	492.455.088.152

Keterangan: Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pengeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBN 2019 oleh DPR RI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Negara Bidang Perekonomian
Deputi Sekretaris Negara Bidang Perekonomian dan Perundang-undangan,



Hayu Wati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Aceh			95.066.949	13.590.526		
2	Kab. Aceh Barat	3.146.999	3.506.800			358.600	2.025.000
3	Kab. Aceh Besar	8.461.079	7.505.333			2.495.455	2.225.000
4	Kab. Aceh Selatan	7.645.938	10.049.670			2.925.565	
5	Kab. Aceh Singkil	12.083.490	14.064.040			2.486.153	225.000
6	Kab. Aceh Tengah	2.051.616	3.941.958				550.000
7	Kab. Aceh Tenggara	6.149.665	4.784.030			2.561.464	1.273.000
8	Kab. Aceh Timur	10.439.137	4.649.000			2.598.679	225.000
9	Kab. Aceh Utara	53.531.153	33.181.823			4.752.401	1.650.000
10	Kab. Bireuen	4.244.957	2.523.010			733.683	275.000
11	Kab. Pidie	6.212.083	3.700.760			2.345.986	
12	Kab. Simeulue	2.435.862	2.494.660				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Provinsi Aceh		108.657.475				37.785.326
2	Kab. Aceh Barat		9.037.399	2.300.000	2.490.333	1.918.908	22.317.882
3	Kab. Aceh Besar		20.686.867	2.328.069	1.615.088	2.756.250	29.432.437
4	Kab. Aceh Selatan		20.621.173	2.528.868	3.221.270	2.756.250	26.703.341
5	Kab. Aceh Singkil		28.858.683	1.533.602			
6	Kab. Aceh Tengah		6.543.574	2.324.493	2.500.000		23.025.075
7	Kab. Aceh Tenggara		14.768.159	2.008.844	2.814.925	2.756.250	26.266.324
8	Kab. Aceh Timur		17.911.816	2.970.192	2.118.502		45.462.297
9	Kab. Aceh Utara		93.115.377	3.424.277			51.522.457
10	Kab. Bireuen		7.776.650	2.766.062	1.000.000		33.076.793
11	Kab. Pidie		12.258.829	2.629.123	1.464.000	3.123.750	27.761.058
12	Kab. Simeulue	15.000.000	19.930.522	901.507	889.831		19.619.083



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
1	Provinsi Aceh	1.600.000	6.993.332	101.169		8.694.501
2	Kab. Aceh Barat	3.037.552		3.116.274	1.316.695	7.470.521
3	Kab. Aceh Besar	4.582.823	9.299.454	2.725.758	1.098.687	17.706.722
4	Kab. Aceh Selatan	14.599.153	11.244.827	6.120.089	1.399.960	33.364.029
5	Kab. Aceh Singkil	1.563.199	1.003.850	3.883.853	495.000	6.945.902
6	Kab. Aceh Tengah	2.876.319		2.622.816	1.120.323	6.619.458
7	Kab. Aceh Tenggara	6.526.631	12.470.583	2.000.000	1.228.004	22.225.218
8	Kab. Aceh Timur	3.792.615	14.999.999	5.266.219	1.358.700	25.417.533
9	Kab. Aceh Utara	49.339.999	4.999.999	1.560.270	1.185.700	57.085.968
10	Kab. Bireuen	15.465.153		3.760.876	1.255.700	20.481.729
11	Kab. Pidie	19.399.999	28.755.538	4.942.701	1.108.000	54.206.238
12	Kab. Simeulue	18.719.925	22.256.077	2.980.502	1.104.558	45.061.062



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
1	Provinsi Aceh	14.250.000	7.139.242			176.526.544
2	Kab. Aceh Barat	3.632.120	1.073.692			50.240.855
3	Kab. Aceh Besar	4.751.587	1.491.968		2.864.743	83.633.731
4	Kab. Aceh Selatan	3.067.177	1.211.631	1.024.575	8.386.840	102.885.154
5	Kab. Aceh Singkil	1.876.889	704.761	1.173.699		41.093.536
6	Kab. Aceh Tengah	3.866.827	1.167.926			46.047.353
7	Kab. Aceh Tenggara	2.729.536	1.063.236	1.860.814	2.500.000	78.993.306
8	Kab. Aceh Timur	4.896.662	1.599.458			100.376.460
9	Kab. Aceh Utara	3.866.827	1.258.232			210.273.138
10	Kab. Bireuen	2.801.620	892.879			68.795.733
11	Kab. Pidie	4.751.214	1.254.575	2.599.779		110.048.566
12	Kab. Simeulue	2.799.711	1.073.692	3.089.202	2.864.743	96.229.353



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Kota Banda Aceh	1.619.284	1.831.087				
14	Kota Sabang	1.487.778	1.812.353			848.034	
15	Kota Langsa	6.234.332	3.591.991			1.157.808	
16	Kota Lhokseumawe	5.484.701	5.731.265			1.378.033	1.342.060
17	Kab. Gayo Lues	1.292.517	3.885.070				1.050.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	10.626.848	4.261.900			200.000	225.000
19	Kab. Aceh Jaya	4.662.157	8.156.050			1.322.780	
20	Kab. Nagan Raya	2.007.771	1.840.270			200.000	
21	Kab. Aceh Tamiang	1.822.670	3.334.624				
22	Kab. Bener Meriah	3.269.161	5.901.673			200.000	
23	Kab. Pidie Jaya	12.702.981	20.994.674			482.586	
24	Kota Subulussalam	10.920.446	1.370.200				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
13	Kota Banda Aceh		3.450.371			2.756.250	14.744.180
14	Kota Sabang	14.750.000	18.898.165		895.745		11.267.385
15	Kota Langsa		10.984.131	2.231.784	2.272.777	3.123.750	18.308.719
16	Kota Lhokseumawe		13.936.059	1.561.045	2.344.236	2.756.250	17.404.433
17	Kab. Gayo Lues		6.227.587	1.801.263	1.165.914		21.929.355
18	Kab. Aceh Barat Daya		15.313.748	1.299.000			23.530.657
19	Kab. Aceh Jaya		14.140.987	1.143.512			18.526.728
20	Kab. Nagan Raya		4.048.041	2.950.061	2.947.464		30.885.764
21	Kab. Aceh Tamiang		5.157.294	2.168.889	2.403.658	2.972.290	31.888.954
22	Kab. Bener Meriah		9.370.834	2.312.362			36.743.136
23	Kab. Pidie Jaya		34.180.241	2.382.110	3.047.304		19.689.860
24	Kota Subulussalam		12.290.646	1.802.465		3.262.144	17.886.906



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
13	Kota Banda Aceh	6.236.749	5.708.174	2.246.175	1.006.681	15.197.779
14	Kota Sabang	3.790.499	8.207.999	1.685.915	618.715	14.303.128
15	Kota Langsa	5.805.124		2.354.551	1.265.212	9.424.887
16	Kota Lhokseumawe	2.204.437		3.106.443	1.080.673	6.391.553
17	Kab. Gayo Lues	12.551.213	1.193.543	1.848.125	1.168.000	16.760.881
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.429.884	16.291.999	2.071.266	1.079.500	22.872.649
19	Kab. Aceh Jaya	4.891.574	5.827.377	2.558.814	1.309.800	14.587.565
20	Kab. Nagan Raya	4.999.999	9.038.187	2.643.346	1.147.700	17.829.232
21	Kab. Aceh Tamiang	4.989.999	3.229.694	2.582.132	1.019.200	11.821.025
22	Kab. Bener Meriah	7.932.287	4.351.194	1.635.469	1.197.536	15.116.486
23	Kab. Pidie Jaya	15.493.193	1.521.199	1.297.867	1.402.010	19.714.269
24	Kota Subulussalam	8.739.999	5.666.037	1.181.399	922.374	16.509.809



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
13	Kota Banda Aceh	1.713.728				37.862.308
14	Kota Sabang	2.076.951	1.329.045	2.500.000	1.909.829	53.180.248
15	Kota Langsa	2.176.980	605.816	1.882.906		51.011.750
16	Kota Lhokseumawe	1.826.951	1.165.030			47.385.557
17	Kab. Gayo Lues	5.242.459	1.249.577			54.377.036
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.382.120	885.423			67.283.597
19	Kab. Aceh Jaya	2.906.434	1.516.276			52.821.502
20	Kab. Nagan Raya	4.682.021	626.320	1.306.685		65.275.588
21	Kab. Aceh Tamiang	3.601.312	1.249.577	1.716.949		62.979.948
22	Kab. Bener Meriah	3.663.946	462.245	2.290.517	1.172.929	71.132.455
23	Kab. Pidie Jaya	3.705.041	1.149.611	2.639.452	1.000.000	87.507.888
24	Kota Subulussalam	2.149.343	749.746			54.651.059



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Provinsi Sumatera Utara			66.035.969	9.228.229		
26	Kab. Asahan	18.750.147	6.748.640			1.247.381	
27	Kab. Dairi	9.234.607	4.098.946				225.000
28	Kab. Deli Serdang	7.292.218	9.797.954			2.675.362	225.000
29	Kab. Karo	13.498.303	5.121.165			493.357	1.275.000
30	Kab. Labuhanbatu	20.383.550	4.522.015			2.778.940	
31	Kab. Langkat	16.536.948	8.426.930				
32	Kab. Mandailing Natal	18.382.633	9.879.624			1.856.000	
33	Kab. Nias	2.456.257	1.908.521				
34	Kab. Simalungun	12.093.275	7.967.072			786.248	
35	Kab. Tapanuli Selatan	6.912.148	6.963.472				675.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	20.367.748	7.545.000			2.307.667	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	Provinsi Sumatera Utara		75.264.198				44.318.876
26	Kab. Asahan		26.746.168	882.000		3.361.639	41.438.594
27	Kab. Dairi		13.558.553	2.187.000		3.140.471	35.813.827
28	Kab. Deli Serdang		19.990.534	1.512.293	3.493.687	2.969.615	40.211.126
29	Kab. Karo		20.387.825	1.256.844	1.795.754	3.243.702	27.340.583
30	Kab. Labuhanbatu		27.684.505	1.173.586	1.131.950		27.756.598
31	Kab. Langkat		24.963.878	594.000		3.123.750	36.317.040
32	Kab. Mandailing Natal		30.118.257	2.508.236	2.916.661		46.727.521
33	Kab. Nias		4.364.778	2.379.439			11.000.000
34	Kab. Simalungun		20.846.595	2.170.722			18.634.000
35	Kab. Tapanuli Selatan		14.550.620	2.082.629	1.650.000		28.860.301
36	Kab. Tapanuli Tengah		30.445.415	2.787.659	1.906.124		24.475.472



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
25	Provinsi Sumatera Utara		1.709.999	568.250		2.278.249
26	Kab. Asahan	2.249.788	1.183.836	3.597.722	1.337.668	8.369.014
27	Kab. Dairi	1.157.549	1.396.750	2.637.979	1.600.000	6.792.278
28	Kab. Deli Serdang	1.681.974	14.330.210	5.858.798	1.022.464	22.893.446
29	Kab. Karo	9.653.999	966.673	5.812.213	1.000.000	17.432.885
30	Kab. Labuhanbatu	5.214.744		2.283.112	1.304.065	8.801.921
31	Kab. Langkat	3.660.770	663.255	4.992.485	1.433.789	10.750.299
32	Kab. Mandailing Natal	3.282.560	29.183.619	4.412.397	1.304.278	38.182.854
33	Kab. Nias			2.740.135	1.302.500	4.042.635
34	Kab. Simalungun	3.066.585	4.295.408	8.512.358	1.358.536	17.232.887
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.499.999		1.574.178	1.100.000	5.174.177
36	Kab. Tapanuli Tengah	3.119.419	1.538.621	2.377.558	1.328.126	8.363.724



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
25	Provinsi Sumatera Utara	8.550.000	4.721.218			135.132.541
26	Kab. Asahan	2.294.479	907.426			83.999.320
27	Kab. Dairi	2.914.592	476.590			64.883.311
28	Kab. Deli Serdang	3.784.332	560.612	2.669.547		98.085.192
29	Kab. Karo	4.997.879	701.656			77.157.128
30	Kab. Labuhanbatu	2.661.530	466.012			69.676.102
31	Kab. Langkat	3.565.941	499.894			79.814.802
32	Kab. Mandailing Natal	4.098.743	443.741	2.365.627		127.361.640
33	Kab. Nias	2.386.407	465.080	2.778.175		27.416.514
34	Kab. Simalungun	3.522.346				62.406.550
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.901.694	847.693			57.067.114
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.851.345	466.012	2.470.887		72.766.638



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Kab. Tapanuli Utara	13.623.611	6.960.770				1.000.000
38	Kab. Toba Samosir	9.243.375	4.932.113			479.002	951.000
39	Kota Binjai	3.484.301	3.298.640			258.600	
40	Kota Medan	1.598.172	1.934.485				
41	Kota Pematang Siantar	10.168.877	3.154.760			585.480	
42	Kota Sibolga	1.826.340	4.705.100			1.015.222	
43	Kota Tanjung Balai	3.413.831	5.737.500			704.026	
44	Kota Tebing Tinggi	5.987.630	2.155.840				200.000
45	Kota Padang Sidempuan	12.604.712	2.753.700			447.857	
46	Kab. Pakpak Bharat	4.705.700	8.251.990			1.588.166	
47	Kab. Nias Selatan	11.007.160	15.751.331			200.000	200.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	11.588.238	7.292.930			382.320	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
37	Kab. Tapanuli Utara		21.584.381	1.672.740	1.313.825		25.737.451
38	Kab. Toba Samosir		15.605.490	1.227.677	2.118.637		24.998.966
39	Kota Binjai	13.567.654	20.609.195	1.661.953	2.716.649		8.129.205
40	Kota Medan		3.532.657				38.366.155
41	Kota Pematang Siantar		13.909.117		1.006.172	3.347.723	13.455.925
42	Kota Sibolga		7.546.662		1.211.551	3.137.807	9.941.119
43	Kota Tanjung Balai		9.855.357	2.735.031		3.131.872	12.948.397
44	Kota Tebing Tinggi		8.343.470	1.675.235	2.291.328	3.202.781	11.156.518
45	Kota Padang Sidempuan		15.806.269	1.000.000	1.231.784	3.176.854	16.707.554
46	Kab. Pakpak Bharat		14.545.856	2.836.031	894.004		17.416.000
47	Kab. Nias Selatan		27.158.491				24.286.823
48	Kab. Humbang Hasundutan		19.488.488	2.129.188	2.563.439		24.057.285



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
37	Kab. Tapanuli Utara	3.137.803	10.552.992	3.101.257	1.685.000	18.477.052
38	Kab. Toba Samosir	2.434.431	1.899.999	4.664.522	1.331.687	10.330.639
39	Kota Binjai	871.299	6.999.999	2.874.908	1.020.600	11.766.806
40	Kota Medan	9.096.677		6.082.389	1.264.318	16.443.384
41	Kota Pematang Siantar	6.503.053		2.096.113	1.132.275	9.731.441
42	Kota Sibolga	1.671.540	8.664.949	1.028.348	1.332.938	12.697.775
43	Kota Tanjung Balai	10.449.999	376.593	1.346.237	960.485	13.133.314
44	Kota Tebing Tinggi	8.099.999	12.464.527	327.821	590.000	21.482.347
45	Kota Padang Sidempuan	5.292.118		1.621.712	885.500	7.799.330
46	Kab. Pakpak Bharat	8.321.224	908.483	933.038	825.000	10.987.745
47	Kab. Nias Selatan	2.565.149	2.099.999	9.800.450	1.202.700	15.668.298
48	Kab. Humbang Hasundutan	4.638.999	3.459.999	2.771.783	1.380.000	12.250.781



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
37	Kab. Tapanuli Utara	4.029.988	466.478			73.281.915
38	Kab. Toba Samosir	3.388.818	749.746			58.419.973
39	Kota Binjai	2.018.559			1.557.850	48.460.217
40	Kota Medan	1.488.664				59.830.860
41	Kota Pematang Siantar	2.479.536		1.739.780		45.669.694
42	Kota Sibolga	853.933			5.609.588	40.998.435
43	Kota Tanjung Balai	2.593.059	971.490			45.368.520
44	Kota Tebing Tinggi	2.479.536		1.762.314		52.393.529
45	Kota Padang Sidempuan					45.721.791
46	Kab. Pakpak Bharat	2.947.064				49.626.700
47	Kab. Nias Selatan	3.867.117	1.210.590	2.028.973		74.220.292
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.369.686	869.705			64.728.572



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	Kab. Serdang Bedagai	11.181.656	8.166.863			594.083	
50	Kab. Samosir	10.823.813	10.077.390			200.000	
51	Kab. Batu Bara	5.036.132	2.286.550				
52	Kab. Padang Lawas	12.469.496	4.471.100				
53	Kab. Padang Lawas Utara	35.900.248	7.014.199			1.590.572	
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	15.776.719	2.260.100			520.205	725.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	5.337.613	9.131.258			308.120	
56	Kab. Nias Utara	12.932.635	9.967.900			200.000	10.723.325
57	Kab. Nias Barat	13.001.971	8.852.800				
58	Kota Gunungsitoli	4.656.611	2.283.200			1.010.584	
59	Provinsi Sumatera Barat			27.799.989	8.038.525		
60	Kab. Limapuluh Kota	5.489.659	4.255.040			833.015	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
49	Kab. Serdang Bedagai		19.942.602	1.709.343	3.030.459		3.696.000
50	Kab. Samosir		21.101.203	1.864.068			25.217.698
51	Kab. Batu Bara		7.322.682				20.208.747
52	Kab. Padang Lawas	15.000.000	31.940.596	1.950.208			34.645.005
53	Kab. Padang Lawas Utara		44.505.019	2.368.023	1.492.245		32.971.236
54	Kab. Labuhanbatu Selatan		19.282.024	1.740.082			23.873.420
55	Kab. Labuhanbatu Utara		14.776.991	1.842.321			32.288.238
56	Kab. Nias Utara	15.042.835	48.866.695	2.040.412	250.000		31.601.716
57	Kab. Nias Barat		21.854.771	1.815.463	1.104.617		22.586.736
58	Kota Gunungsitoli		7.950.395	1.471.681	1.152.548		16.075.371
59	Provinsi Sumatera Barat		35.838.514				30.037.600
60	Kab. Limapuluh Kota		10.577.714	1.496.568		3.262.144	26.861.264



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
49	Kab. Serdang Bedagai	3.765.364	8.442.393	10.778.658	608.000	23.594.415
50	Kab. Samosir	3.619.018	568.486	2.306.275	1.380.000	7.873.779
51	Kab. Batu Bara	5.699.999		2.523.528	1.300.000	9.523.527
52	Kab. Padang Lawas	2.543.149	2.849.999	2.578.828	1.508.217	9.480.193
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.184.999	3.630.331	2.020.537	671.762	8.507.629
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	4.338.199	12.609.641	2.422.707	1.289.000	20.659.547
55	Kab. Labuhanbatu Utara	2.052.350	514.816	3.337.811	1.292.517	7.197.494
56	Kab. Nias Utara	9.836.774		6.056.617	1.155.566	17.048.957
57	Kab. Nias Barat	16.268.464		2.709.359	1.368.970	20.346.793
58	Kota Gunungsitoli	6.212.850		2.917.310	1.304.278	10.434.438
59	Provinsi Sumatera Barat	5.229.672	5.538.421			10.768.093
60	Kab. Limapuluh Kota	6.449.999	11.237.299	2.440.135	987.500	21.114.933



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
49	Kab. Serdang Bedagai	3.566.736	1.205.592	1.865.224		58.610.371
50	Kab. Samosir	2.408.606	732.571			59.197.925
51	Kab. Batu Bara	2.665.238	1.500.992			41.221.186
52	Kab. Padang Lawas	2.148.907		1.800.036		81.964.945
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.324.970				92.169.122
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	2.408.606	824.721	1.894.303		70.682.703
55	Kab. Labuhanbatu Utara	3.901.694	851.212			60.857.950
56	Kab. Nias Utara	2.148.907	1.725.270	2.203.293		105.885.250
57	Kab. Nias Barat	2.044.479	657.077	2.619.275		73.029.211
58	Kota Gunungsitoli	1.528.952	1.601.258	3.067.861		43.282.504
59	Provinsi Sumatera Barat	14.725.000	5.777.838			97.147.045
60	Kab. Limapuluh Kota	3.534.332	1.194.881	2.501.186	2.990.400	73.533.422



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	Kab. Agam	15.437.563	7.406.001			1.198.395	225.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.319.835	6.703.808				
63	Kab. Padang Pariaman	50.106.649	11.400.090			1.810.409	200.000
64	Kab. Pasaman	3.370.972	1.307.675			2.160.195	
65	Kab. Pesisir Selatan	11.157.622	10.166.437			1.953.426	
66	Kab. Sijunjung	3.176.876	4.166.450			1.197.357	
67	Kab. Solok	8.937.406	3.038.176			449.766	225.000
68	Kab. Tanah Datar	5.474.494	10.239.810			3.729.334	
69	Kota Bukit Tinggi	1.829.637	3.642.585			2.540.761	
70	Kota Padang Panjang	1.228.008	1.918.145			747.391	1.427.500
71	Kota Padang	21.862.298	11.704.720			2.574.753	1.240.000
72	Kota Payakumbuh	6.607.017	7.235.600			2.927.261	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
61	Kab. Agam		24.266.959	2.657.575	3.000.000	3.262.144	35.137.414
62	Kab. Kepulauan Mentawai		9.023.643	1.379.460	1.147.406		40.693.494
63	Kab. Padang Pariaman		63.517.148	3.316.884	3.000.000	2.972.290	42.416.246
64	Kab. Pasaman		6.838.842	1.660.530			19.410.433
65	Kab. Pesisir Selatan		23.277.485	3.260.511	2.205.808		53.431.450
66	Kab. Sijunjung		8.540.683	1.978.187	1.650.000	3.123.750	21.158.865
67	Kab. Solok		12.650.348		3.519.776		27.785.119
68	Kab. Tanah Datar		19.443.638	2.198.376	3.091.224		30.639.645
69	Kota Bukit Tinggi		8.012.983	1.382.245		2.646.000	9.164.681
70	Kota Padang Panjang		5.321.044	1.028.108	2.250.000	1.837.500	8.129.205
71	Kota Padang		37.381.771				33.408.569
72	Kota Payakumbuh	13.920.639	30.690.517			3.123.750	14.059.227



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
61	Kab. Agam	4.811.186	17.311.176	5.046.762	1.194.614	28.363.738
62	Kab. Kepulauan Mentawai	6.266.999	2.199.999	3.452.119	1.165.900	13.085.017
63	Kab. Padang Pariaman	11.189.999	21.440.050	2.561.750	1.133.000	36.324.799
64	Kab. Pasaman	9.699.138	14.070.307	2.927.703	1.428.378	28.125.526
65	Kab. Pesisir Selatan	5.974.999	31.364.382	3.250.557	1.233.000	41.822.938
66	Kab. Sijunjung	5.096.184	28.999.999	1.542.062	980.000	36.618.245
67	Kab. Solok	7.938.459	17.489.587	2.360.618	1.100.034	28.888.698
68	Kab. Tanah Datar	11.093.468	24.999.999	2.600.221	1.133.000	39.826.688
69	Kota Bukit Tinggi	7.599.999	14.110.950	730.338	1.208.910	23.650.197
70	Kota Padang Panjang	580.497	13.495.950	558.262	1.109.659	15.744.368
71	Kota Padang	5.438.451	17.283.795	1.977.322	1.039.884	25.739.452
72	Kota Payakumbuh	9.486.591	19.466.030	1.267.716	938.927	31.159.264



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
61	Kab. Agam	3.381.374	1.342.843	1.924.658		103.336.705
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3.006.362	1.545.363	4.388.218	1.718.846	75.987.809
63	Kab. Padang Pariaman	3.150.008	1.304.834	2.705.064	15.500.000	174.207.273
64	Kab. Pasaman	3.414.219	1.286.193	1.902.216		62.637.959
65	Kab. Pesisir Selatan	3.527.814	1.724.220	1.900.813	14.500.000	145.651.039
66	Kab. Sijunjung	2.148.907	928.830	1.953.446	6.000.000	84.100.913
67	Kab. Solok	3.446.418	1.584.441	2.789.209		80.664.009
68	Kab. Tanah Datar	3.414.219	1.417.648	2.989.060	6.063.707	109.084.205
69	Kota Bukit Tinggi	1.174.366		2.435.021		48.465.493
70	Kota Padang Panjang	1.713.728	400.409	1.001.600		37.425.962
71	Kota Padang	2.479.536		1.381.180		100.390.508
72	Kota Payakumbuh	1.744.356		2.071.526	1.000.000	83.848.640



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	Kota Sawahlunto	4.073.885	1.827.070			1.062.957	1.200.000
74	Kota Solok	1.802.316	2.418.000			1.040.857	975.000
75	Kota Pariaman	1.518.685	1.866.800			780.857	225.000
76	Kab. Pasaman Barat	9.693.065	4.857.500			1.205.957	
77	Kab. Dharmasraya	19.167.082	14.144.540			2.494.812	
78	Kab. Solok Selatan	8.908.110	5.984.227			792.216	425.000
79	Provinsi Riau			26.023.412	7.446.529		
80	Kab. Bengkalis	14.353.082	4.506.800			200.000	470.000
81	Kab. Indragiri Hilir	12.858.113	13.145.150				
82	Kab. Indragiri Hulu	13.725.067	10.181.312			867.185	225.000
83	Kab. Kampar	49.206.126	22.723.450			910.883	
84	Kab. Kuantan Singingi	24.874.960	8.346.902			1.291.701	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
73	Kota Sawahlunto		8.163.912	1.537.604	1.920.000	2.972.290	14.527.308
74	Kota Solok		6.236.173	1.049.985	1.247.975	2.972.290	10.854.825
75	Kota Pariaman		4.391.342	1.579.417	2.530.703	2.972.290	13.333.102
76	Kab. Pasaman Barat		15.756.522	1.875.132			23.381.447
77	Kab. Dharmasraya		35.806.434		1.701.132		25.603.387
78	Kab. Solok Selatan		16.109.553	300.000			33.753.613
79	Provinsi Riau		33.469.941				53.811.228
80	Kab. Bengkalis		19.529.882	2.773.602		1.837.500	35.323.625
81	Kab. Indragiri Hilir		26.003.263	1.750.660	351.200		31.474.617
82	Kab. Indragiri Hulu	13.854.451	38.853.015	3.323.782	3.149.679		33.114.173
83	Kab. Kampar		72.840.459		2.750.000		43.576.341
84	Kab. Kuantan Singingi		34.513.563	2.228.258	1.227.498	3.262.144	45.244.128



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
73	Kota Sawahlunto	8.873.949	11.648.649	765.001	1.069.237	22.356.836
74	Kota Solok	33.689.665		1.317.681	1.188.576	36.195.922
75	Kota Pariaman	5.558.706	13.471.407	920.502	1.301.000	21.251.615
76	Kab. Pasaman Barat	8.349.999	12.960.422	3.524.708	1.382.700	26.217.829
77	Kab. Dharmasraya	3.799.999	29.517.574	2.254.565	1.174.000	36.746.138
78	Kab. Solok Selatan	6.171.560	23.747.799	2.578.205	1.124.000	33.621.564
79	Provinsi Riau	6.079.999	40.332.730	624.524		47.037.253
80	Kab. Bengkalis	6.649.999	9.041.149		1.282.892	16.974.040
81	Kab. Indragiri Hilir	10.277.859	27.666.850	6.946.756	914.289	45.805.754
82	Kab. Indragiri Hulu	3.172.340	10.511.918	3.424.630	1.222.000	18.330.888
83	Kab. Kampar	6.051.499		3.852.552	1.082.711	10.986.762
84	Kab. Kuantan Singingi	2.519.449	24.529.571	1.699.624	887.631	29.636.275



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
73	Kota Sawahlunto	1.713.728		2.001.908		55.193.586
74	Kota Solok	1.174.366		2.620.543		62.352.079
75	Kota Pariaman	1.609.423	1.258.232			48.926.124
76	Kab. Pasaman Barat	3.599.921	818.317	1.645.519		73.294.687
77	Kab. Dharmasraya	2.947.064	1.256.565	1.679.262	29.294.115	135.034.097
78	Kab. Solok Selatan	3.414.592	1.220.087	1.325.214		89.744.623
79	Provinsi Riau	11.875.000	4.385.146	2.031.863		152.610.431
80	Kab. Bengkalis		886.030			77.324.679
81	Kab. Indragiri Hilir	3.006.362	1.304.834	2.307.028		112.003.718
82	Kab. Indragiri Hulu	2.697.064	1.250.058	1.644.656		102.363.315
83	Kab. Kampar	3.534.705	1.537.840	1.413.363		136.639.470
84	Kab. Kuantan Singingi	3.098.293	699.018			119.909.177



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
85	Kab. Pelalawan	9.421.012	2.981.480			1.523.674	
86	Kab. Rokan Hilir	10.585.910	4.806.800				
87	Kab. Rokan Hulu	15.752.681	9.575.060			2.692.703	
88	Kab. Siak	8.774.498	10.515.950			722.536	
89	Kota Dumai	10.438.944	5.877.050			785.578	225.000
90	Kota Pekanbaru	2.800.972	4.796.629			397.857	
91	Kab. Kepulauan Meranti	12.799.967	5.716.445			534.242	
92	Provinsi Jambi			27.025.329	5.547.985		
93	Kab. Batang Hari	5.943.633	2.412.544			2.766.698	683.359
94	Kab. Bungo	2.783.920	2.281.400			447.857	2.225.000
95	Kab. Kerinci	10.227.155	4.705.070				1.175.000
96	Kab. Merangin	22.884.974	12.215.346			1.455.320	1.106.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
85	Kab. Pelalawan		13.926.166	2.445.828			27.164.721
86	Kab. Rokan Hilir		15.392.710	2.012.966			47.123.690
87	Kab. Rokan Hulu		28.020.444	3.126.717	1.499.216		48.217.550
88	Kab. Siak		20.012.984	2.882.725	968.981		64.174.709
89	Kota Dumai		17.326.572	1.811.471	757.660		24.378.968
90	Kota Pekanbaru		7.995.458	500.000	1.289.144	2.972.290	27.883.896
91	Kab. Kepulauan Meranti		19.050.654	1.701.432	1.145.684		31.363.958
92	Provinsi Jambi		32.573.314				26.142.638
93	Kab. Batang Hari		11.806.234	2.714.256			31.935.543
94	Kab. Bungo		7.738.177	2.500.000	3.110.238		16.186.242
95	Kab. Kerinci		16.107.225	1.665.852	150.000		28.548.799
96	Kab. Merangin		37.661.640	2.268.577	2.740.377		26.440.148



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
85	Kab. Pelalawan	7.219.999		1.309.931	976.846	9.506.776
86	Kab. Rokan Hilir	4.322.775	7.779.287	1.858.296	1.144.305	15.104.663
87	Kab. Rokan Hulu	4.999.999	17.957.135	3.471.874	1.185.000	27.614.008
88	Kab. Siak	3.499.999	6.645.000	2.215.197	1.212.000	13.572.196
89	Kota Dumai	13.999.999		4.374.490	1.182.000	19.556.489
90	Kota Pekanbaru	8.265.079	23.385.109	1.906.658	1.148.059	34.704.905
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.499.999	5.729.506	2.387.753	1.300.000	11.917.258
92	Provinsi Jambi	2.374.999	20.472.727	259.919		23.107.645
93	Kab. Batang Hari	3.582.848	8.024.456	2.674.817	1.182.198	15.464.319
94	Kab. Bungo	5.161.686		4.136.868	1.184.285	10.482.839
95	Kab. Kerinci	4.949.999	4.068.490	2.883.051	1.133.000	13.034.540
96	Kab. Merangin	5.210.089	29.999.999	5.301.564	1.107.000	41.618.652



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
85	Kab. Pelalawan	1.177.344	1.165.030	1.664.649		57.050.514
86	Kab. Rokan Hilir	2.128.492	1.386.318			83.148.839
87	Kab. Rokan Hulu	2.562.211	1.109.309	1.939.749		114.089.204
88	Kab. Siak	1.793.777	1.212.144	2.757.024		107.374.540
89	Kota Dumai	1.609.423	466.012	1.682.123		67.588.718
90	Kota Pekanbaru	2.589.536	951.107		1.200.000	80.086.336
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.294.479	1.063.236	2.626.348	21.436.490	92.599.539
92	Provinsi Jambi	14.250.000	2.371.014	1.977.457		100.422.068
93	Kab. Batang Hari	2.415.238	1.147.309			65.482.899
94	Kab. Bungo	2.571.767	466.012	1.573.446		44.628.721
95	Kab. Kerinci	3.587.755	1.400.047	2.707.341		67.201.559
96	Kab. Merangin	3.034.705	1.101.877	3.073.972	3.238.750	121.178.698



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
97	Kab. Muaro Jambi	5.088.647	4.017.290			2.787.356	
98	Kab. Sarolangun	37.938.121	11.269.720			462.551	
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.792.436	3.935.180			687.022	
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	12.256.042	14.862.682			1.611.611	1.185.000
101	Kab. Tebo	6.133.576	5.386.200			1.233.466	975.000
102	Kota Jambi	12.821.048	10.981.447			1.298.435	714.100
103	Kota Sungai Penuh	4.933.752	5.362.440			200.000	10.000.000
104	Provinsi Sumatera Selatan			66.105.106	1.000.000		
105	Kab. Lahat	28.285.902	22.864.625			1.091.798	1.375.000
106	Kab. Musi Banyuasin	30.980.032	24.193.430			1.179.762	1.725.000
107	Kab. Musi Rawas	17.685.333	9.883.170			1.068.757	225.000
108	Kab. Muara Enim	22.306.376	4.582.300			1.391.129	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
97	Kab. Muaro Jambi		11.893.293	2.777.050	600.000		30.962.070
98	Kab. Sarolangun		49.670.392	2.603.872	3.036.442		25.715.620
99	Kab. Tanjung Jabung Barat		7.414.638	1.875.909		1.911.000	32.437.481
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	13.538.551	43.453.886	1.500.000	3.030.521		29.964.054
101	Kab. Tebo		13.728.242	3.074.301	1.309.000		23.737.203
102	Kota Jambi		25.815.030	2.000.543		3.123.750	16.190.504
103	Kota Sungai Penuh		20.496.192	1.365.169	2.797.991	3.262.144	11.981.615
104	Provinsi Sumatera Selatan		67.105.106				29.949.684
105	Kab. Lahat		53.617.325	2.422.204	1.200.000		31.024.237
106	Kab. Musi Banyuasin		58.078.224	4.938.268	400.000		28.934.394
107	Kab. Musi Rawas		28.862.260	3.377.683	3.235.573		31.708.012
108	Kab. Muara Enim		28.504.805		3.294.000	1.660.986	29.170.796



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
97	Kab. Muaro Jambi	4.352.709	3.097.900	2.178.176	1.167.884	10.796.669
98	Kab. Sarolangun	4.562.199	13.999.999	1.621.049	1.132.000	21.315.247
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.491.155	7.387.094	4.469.949	1.182.198	18.530.396
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	4.008.999	474.999	1.681.936	1.098.110	7.264.044
101	Kab. Tebo	4.296.049	5.999.999	3.251.824	1.133.000	14.680.872
102	Kota Jambi	589.216		2.866.214	1.298.000	4.753.430
103	Kota Sungai Penuh	4.236.034		1.039.964	1.181.154	6.457.152
104	Provinsi Sumatera Selatan		14.327.546	4.541.060		18.868.606
105	Kab. Lahat	10.927.656	1.733.892	3.944.941	1.133.000	17.739.489
106	Kab. Musi Banyuasin	11.514.999	7.377.721	2.533.686	1.133.000	22.559.406
107	Kab. Musi Rawas	2.100.000	4.407.785	3.350.000	1.172.807	11.030.592
108	Kab. Muara Enim	5.999.999		5.130.893	1.336.379	12.467.271



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
97	Kab. Muaro Jambi	3.121.083	1.353.112	1.240.033		62.743.310
98	Kab. Sarolangun	2.697.064	725.576	2.027.355		107.791.568
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.913.946	1.258.232	1.691.719	2.500.000	71.533.321
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.467.869	1.531.532			88.211.906
101	Kab. Tebo	3.763.786	466.012	2.446.886		63.206.302
102	Kota Jambi	1.048.103	1.161.627			54.092.987
103	Kota Sungai Penuh	2.571.767	1.587.846	2.790.041	1.590.000	54.899.917
104	Provinsi Sumatera Selatan	11.400.000	4.743.083	4.353.940		136.420.419
105	Kab. Lahat	2.640.232	470.672	2.533.569		111.647.728
106	Kab. Musi Banyuasin	6.327.182	1.546.181	1.906.854	2.000.000	126.690.509
107	Kab. Musi Rawas	5.969.388	1.740.728	1.913.323		87.837.559
108	Kab. Muara Enim	4.167.208	888.153			80.153.219



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	12.470.864	23.390.537			445.526	225.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	15.182.714	14.055.970			1.520.656	225.000
111	Kota Palembang	29.064.043	6.777.350			2.164.257	
112	Kota Prabumulih	11.579.980	3.491.784				334.874
113	Kota Pagar Alam	6.175.981	10.630.215			446.436	
114	Kota Lubuk Linggau	7.940.141	7.885.200				225.000
115	Kab. Banyuasin	24.401.699	13.622.610			1.794.899	
116	Kab. Ogan Ilir	44.771.182	30.762.137			2.082.237	
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	14.720.946	9.464.670			4.149.567	
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	19.120.265	13.566.290			1.215.144	
119	Kab. Empat Lawang	11.440.834	12.785.870				
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.623.425	2.286.000			588.479	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
109	Kab. Ogan Komering Ilir		36.531.927	2.126.241	1.500.000	3.262.144	37.866.831
110	Kab. Ogan Komering Ulu		30.984.340	1.816.377	3.000.000	1.746.206	24.978.420
111	Kota Palembang		38.005.650	2.970.669	2.453.144	3.123.750	17.237.145
112	Kota Prabumulih		15.406.638	1.804.334	1.691.911		11.535.533
113	Kota Pagar Alam		17.252.632	2.188.438	3.195.979	3.132.809	17.698.298
114	Kota Lubuk Linggau		16.050.341	1.223.702	2.872.199	3.264.319	14.181.458
115	Kab. Banyuasin		39.819.208		4.075.500		26.796.895
116	Kab. Ogan Ilir		77.615.556	1.518.168	3.623.796		25.240.807
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		28.335.183				25.775.309
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		33.901.699	1.648.700			19.305.013
119	Kab. Empat Lawang		24.226.704	1.050.000	1.939.364		20.121.385
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		10.722.904		2.175.087		20.344.068



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	4.026.847	3.802.002	3.664.741	1.182.198	12.675.788
110	Kab. Ogan Komering Ulu	3.364.261		2.640.844	1.020.000	7.025.105
111	Kota Palembang	11.401.899		5.860.558	1.392.000	18.654.457
112	Kota Prabumulih	5.826.870	19.818.359	1.879.251	1.387.000	28.911.480
113	Kota Pagar Alam	1.613.999	5.724.879	1.936.058	1.382.400	10.657.336
114	Kota Lubuk Linggau	3.449.999		1.334.484	287.500	5.071.983
115	Kab. Banyuasin	10.542.999	6.999.999	5.475.939	1.123.800	24.142.737
116	Kab. Ogan Ilir	7.240.114	593.860	2.948.331	1.273.700	12.056.005
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7.924.299	23.704.193	7.992.995	1.133.000	40.754.487
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6.299.999	2.024.999	5.222.432	1.570.718	15.118.148
119	Kab. Empat Lawang	4.499.999	2.270.999	4.143.403	595.000	11.509.401
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.629.999	2.365.154	2.346.742	1.133.000	13.474.895



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	6.449.182	1.398.036	1.679.273		103.489.422
110	Kab. Ogan Komering Ulu	3.349.648	747.949	1.759.776		75.407.821
111	Kota Palembang	1.488.664	905.559			84.839.038
112	Kota Prabumulih	1.077.597	735.367			61.162.860
113	Kota Pagar Alam	870.113				54.995.605
114	Kota Lubuk Linggau	1.077.597		1.708.138	4.050.000	49.499.737
115	Kab. Banyuasin	2.302.439	1.058.806		16.233.547	114.429.132
116	Kab. Ogan Ilir	2.165.238	512.613	1.324.644		124.056.827
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5.088.482	1.099.628			101.053.089
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.064.167	1.045.315	2.459.653		77.542.695
119	Kab. Empat Lawang	3.937.935		1.132.580		63.917.369
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.230.369		1.873.060		49.820.383



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
121	Kab. Musi Rawas Utara	5.864.916	1.953.200				
122	Provinsi Bengkulu			23.481.424	1.402.852		
123	Kab. Bengkulu Selatan	12.621.427	8.796.359			3.065.064	406.537
124	Kab. Bengkulu Utara	7.672.587	13.972.540			2.594.003	2.225.000
125	Kab. Rejang Lebong	1.000.000	2.448.080			1.267.588	650.000
126	Kota Bengkulu	5.267.715	6.153.680			1.314.428	746.000
127	Kab. Kaur	12.645.210	7.660.040			200.000	225.000
128	Kab. Seluma	17.887.874	8.550.900			680.595	225.000
129	Kab. Mukomuko	5.028.280	1.550.220			1.362.735	806.750
130	Kab. Lebong	9.630.190	9.891.916			3.011.935	453.000
131	Kab. Kepahiang	8.010.103	7.988.695			469.784	225.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	10.140.636	10.399.790			1.107.357	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
121	Kab. Musi Rawas Utara		7.818.116				15.540.058
122	Provinsi Bengkulu		24.884.276				32.184.443
123	Kab. Bengkulu Selatan		24.889.387	2.736.853	2.383.053	2.972.290	25.572.868
124	Kab. Bengkulu Utara	12.000.000	38.464.130	1.627.778	1.207.067		21.968.118
125	Kab. Rejang Lebong		5.365.668	3.938.187		3.123.750	20.254.089
126	Kota Bengkulu		13.481.823	1.939.544	1.475.717	3.123.750	22.056.316
127	Kab. Kaur		20.730.250	2.955.000	2.365.750		21.763.282
128	Kab. Seluma	13.931.169	41.275.538	2.030.992	1.098.307		19.824.698
129	Kab. Mukomuko		8.747.985	2.486.751	951.335		16.964.933
130	Kab. Lebong		22.987.041	553.000			22.308.689
131	Kab. Kepahiang		16.693.582	3.213.574	1.108.889		19.051.671
132	Kab. Bengkulu Tengah		21.872.783	3.186.843	949.374		16.912.296



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
121	Kab. Musi Rawas Utara	9.404.999	15.809.130	4.821.155	1.090.410	31.125.694
122	Provinsi Bengkulu	522.967	36.010.458	102.698		36.636.123
123	Kab. Bengkulu Selatan	2.999.999		1.244.029	1.133.000	5.377.028
124	Kab. Bengkulu Utara	3.114.499	15.884.446	3.891.776	1.094.400	23.985.121
125	Kab. Rejang Lebong	10.349.999		2.542.002	1.132.000	14.024.001
126	Kota Bengkulu	3.618.025	24.969.603	1.686.461	1.054.994	31.329.083
127	Kab. Kaur	7.528.688	14.833.299	1.735.389	1.330.628	25.428.004
128	Kab. Seluma	4.694.935	12.800.953	2.751.509	1.174.200	21.421.597
129	Kab. Mukomuko	4.948.999		1.470.803	1.133.000	7.552.802
130	Kab. Lebong	4.054.671	8.716.438	1.016.797	1.133.000	14.920.906
131	Kab. Kepahiang	5.454.178	10.552.992	1.967.592	1.160.808	19.135.570
132	Kab. Bengkulu Tengah	3.651.799	8.383.460	3.153.658	1.102.500	16.291.417



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
121	Kab. Musi Rawas Utara	1.295.125				55.778.993
122	Provinsi Bengkulu	8.550.000	2.760.102			105.014.944
123	Kab. Bengkulu Selatan	3.369.686	1.759.404	1.739.381		70.799.950
124	Kab. Bengkulu Utara	4.099.141	1.090.468	2.013.438		94.455.261
125	Kab. Rejang Lebong	3.197.064	1.395.180	1.576.325		52.874.264
126	Kota Bengkulu	1.023.717	974.633			75.404.583
127	Kab. Kaur	2.729.536	1.138.700	1.661.984	2.000.000	80.772.506
128	Kab. Seluma	1.942.255	1.262.893	1.874.904		90.731.184
129	Kab. Mukomuko	2.262.007	664.522			39.630.335
130	Kab. Lebong	2.176.980	991.664	2.567.769		66.506.049
131	Kab. Kepahiang	2.947.064	925.074	2.462.240	2.500.000	68.037.664
132	Kab. Bengkulu Tengah	2.135.053	652.673	2.261.871		64.262.310



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
133	Provinsi Lampung			90.985.981	4.886.439		
134	Kab. Lampung Barat	18.522.227	4.602.160			1.413.747	225.000
135	Kab. Lampung Selatan	49.337.352	13.732.510			329.498	
136	Kab. Lampung Tengah	19.447.739	8.697.900			1.434.085	371.525
137	Kab. Lampung Utara	17.122.010	2.765.400			1.494.420	200.000
138	Kab. Lampung Timur	24.632.230	10.994.445			779.959	225.000
139	Kab. Tanggamus	4.392.529	1.416.451			1.931.508	325.000
140	Kab. Tulang Bawang	32.301.435	13.128.900			2.072.552	
141	Kab. Way Kanan	29.881.783	16.111.390			2.212.947	513.125
142	Kota Bandar Lampung	6.742.958	5.152.000			1.660.053	2.225.000
143	Kota Metro	3.554.042	6.479.393			2.639.204	1.402.750
144	Kab. Pesawaran	17.263.184	14.894.860			1.260.115	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
133	Provinsi Lampung		95.872.420				33.165.329
134	Kab. Lampung Barat		24.763.134	1.938.328	724.500		18.889.058
135	Kab. Lampung Selatan		63.399.360	1.993.204	3.521.520		29.408.098
136	Kab. Lampung Tengah		29.951.249	2.634.359	1.875.052		35.629.667
137	Kab. Lampung Utara		21.581.830	2.289.310	1.225.776	3.123.750	40.091.410
138	Kab. Lampung Timur	11.917.600	48.549.234	3.091.479			38.545.311
139	Kab. Tanggamus	12.074.275	20.139.763	2.377.068	4.078.443		32.597.710
140	Kab. Tulang Bawang		47.502.887	1.933.397	1.109.033		27.587.226
141	Kab. Way Kanan		48.719.245	3.032.924	1.130.754		48.227.959
142	Kota Bandar Lampung		15.780.011	1.502.243	1.908.818	3.262.144	14.940.777
143	Kota Metro		14.075.389		1.000.000	1.748.406	15.708.199
144	Kab. Pesawaran		33.418.159	2.459.930	3.379.411		21.116.383



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
133	Provinsi Lampung		24.816.367			24.816.367
134	Kab. Lampung Barat	3.310.499	1.376.443	3.420.191	1.392.718	9.499.851
135	Kab. Lampung Selatan	5.229.672	3.719.591	3.835.852	1.152.982	13.938.097
136	Kab. Lampung Tengah	4.049.127	3.196.068	4.241.912	1.176.065	12.663.172
137	Kab. Lampung Utara	4.190.855	1.490.809	2.538.928	1.491.718	9.712.310
138	Kab. Lampung Timur	6.177.644	2.042.638	3.996.490	1.059.806	13.276.578
139	Kab. Tanggamus	6.352.307	2.174.999	2.390.400	1.659.500	12.577.206
140	Kab. Tulang Bawang	4.616.168	6.649.999	1.926.839	1.354.111	14.547.117
141	Kab. Way Kanan	4.811.298	6.634.083	4.122.536	1.633.005	17.200.922
142	Kota Bandar Lampung	1.050.991	648.319	5.522.815	1.494.930	8.717.055
143	Kota Metro	2.858.755	8.574.518	1.664.450	1.601.758	14.699.481
144	Kab. Pesawaran	6.437.491	4.789.847	3.229.637	1.206.479	15.663.454



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
133	Provinsi Lampung	11.400.000	4.193.457	2.859.374		172.306.947
134	Kab. Lampung Barat	2.906.434	1.491.238	2.073.952		62.286.495
135	Kab. Lampung Selatan	6.106.556	1.439.977	1.814.264		121.621.076
136	Kab. Lampung Tengah	6.774.184	466.012	1.819.879		91.813.574
137	Kab. Lampung Utara	2.404.321	999.661			81.428.368
138	Kab. Lampung Timur	6.457.210	294.301	2.296.008	1.320.000	113.830.121
139	Kab. Tanggamus	4.776.320	691.096	2.523.721	1.002.660	80.763.987
140	Kab. Tulang Bawang	4.002.233	1.204.592	1.857.134		99.743.619
141	Kab. Way Kanan	3.631.747	1.067.168	1.485.277	1.500.000	125.995.996
142	Kota Bandar Lampung	1.174.366	737.324			48.022.738
143	Kota Metro	2.108.515	1.304.876	1.726.840	1.200.000	53.571.706
144	Kab. Pesawaran	3.914.219	689.698	2.528.824		83.170.078



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
145	Kab. Pringsewu	8.579.473	7.387.580			1.796.595	
146	Kab. Mesuji	17.648.237	11.592.890			889.415	
147	Kab. Tulang Bawang Barat	12.828.028	10.229.061			200.000	
148	Kab. Pesisir Barat	13.981.065	12.997.872			200.000	
149	Provinsi DKI Jakarta						
150	Provinsi Jawa Barat			290.224.908	7.668.757		
151	Kab. Bandung	29.974.909	31.141.923			837.857	
152	Kab. Bekasi						
153	Kab. Bogor	47.086.613	33.181.297			1.110.712	
154	Kab. Ciamis	92.327.355	16.292.110			2.081.787	
155	Kab. Cianjur	15.658.172	22.631.740			408.902	
156	Kab. Cirebon	33.330.136	14.551.614			1.048.546	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
145	Kab. Pringsewu		17.763.648	2.319.695	3.426.544	3.123.750	32.090.782
146	Kab. Mesuji		30.130.542	1.980.495	2.781.127		23.090.805
147	Kab. Tulang Bawang Barat		23.257.089	2.878.843	989.096		37.602.101
148	Kab. Pesisir Barat		27.178.937				
149	Provinsi DKI Jakarta						
150	Provinsi Jawa Barat		297.893.665				30.693.537
151	Kab. Bandung		61.954.689	3.168.156	4.000.000	3.123.750	23.837.486
152	Kab. Bekasi			5.517.698			14.963.279
153	Kab. Bogor		81.378.622	3.274.186	7.500.000		26.823.283
154	Kab. Ciamis		110.701.252	1.745.113	3.000.000	2.756.250	22.027.253
155	Kab. Cianjur		38.698.814	3.819.960	7.500.000		34.340.705
156	Kab. Cirebon		48.930.296	2.573.372			24.031.620



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
145	Kab. Pringsewu	2.451.995	1.187.606	1.901.526	1.508.808	7.049.935
146	Kab. Mesuji	5.829.706	1.908.428	1.840.183	562.000	10.140.317
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3.399.287	9.502.912	3.074.760	1.182.198	17.159.157
148	Kab. Pesisir Barat	1.089.999		3.248.273	1.602.200	5.940.472
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat		60.730.856			60.730.856
151	Kab. Bandung	1.567.499	26.431.537	6.351.430	1.070.200	35.420.666
152	Kab. Bekasi		7.362.499		1.421.114	8.783.613
153	Kab. Bogor	2.249.999	44.572.703	7.500.000	1.459.998	55.782.700
154	Kab. Ciamis	1.821.704	22.435.556	6.710.119	1.372.101	32.339.480
155	Kab. Cianjur	5.551.820	30.217.922	1.364.064	1.604.073	38.737.879
156	Kab. Cirebon	8.685.488	31.078.459	6.856.222	1.132.700	47.752.869



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
145	Kab. Pringsewu	3.069.596	1.252.416	1.770.343	477.457	72.344.166
146	Kab. Mesuji	3.349.921	1.449.509	1.705.926		74.628.642
147	Kab. Tulang Bawang Barat	2.415.238	424.071			84.725.595
148	Kab. Pesisir Barat	1.980.182	1.466.863	3.347.396		39.913.850
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat	22.325.000	9.553.051			421.196.109
151	Kab. Bandung	7.277.709	1.368.726		755.000	140.906.182
152	Kab. Bekasi	3.626.318	540.574			33.431.482
153	Kab. Bogor	4.029.988	668.114			179.456.893
154	Kab. Ciamis	7.273.911	1.086.414			180.929.673
155	Kab. Cianjur	4.501.587	793.256	1.075.437		129.467.638
156	Kab. Cirebon	4.904.172	753.125			128.945.454



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
157	Kab. Garut	66.650.197	23.742.630			2.746.893	
158	Kab. Indramayu	52.388.695	22.331.240			1.034.086	
159	Kab. Karawang	54.538.942	19.416.420				
160	Kab. Kuningan	21.769.076	4.807.900			2.040.465	
161	Kab. Majalengka	27.023.459	10.031.668			2.035.346	
162	Kab. Purwakarta	15.643.728	14.668.149			200.000	
163	Kab. Subang	23.201.350	10.187.320			281.316	
164	Kab. Sukabumi	57.175.623	35.979.740			1.600.265	509.100
165	Kab. Sumedang	58.868.078	25.661.830			2.990.274	
166	Kab. Tasikmalaya	62.313.619	29.226.829			1.122.034	
167	Kota Bandung	12.919.127	12.866.700			2.939.500	
168	Kota Bekasi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
157	Kab. Garut		93.139.720	3.646.373	2.150.000	3.262.144	20.563.708
158	Kab. Indramayu		75.754.021	1.683.864		2.840.867	16.872.640
159	Kab. Karawang		73.955.362	1.917.795	1.000.000		35.137.373
160	Kab. Kuningan		28.617.441	800.000	3.200.000	3.262.144	19.734.876
161	Kab. Majalengka		39.090.473	1.133.203	3.600.000	3.123.750	19.444.788
162	Kab. Purwakarta		30.511.877				17.233.405
163	Kab. Subang		33.669.986	1.282.500			27.899.929
164	Kab. Sukabumi		95.264.728	2.372.451	7.500.000		29.351.514
165	Kab. Sumedang		87.520.182	1.400.000			20.446.511
166	Kab. Tasikmalaya		92.662.482	2.402.238	6.160.000	2.972.290	33.997.808
167	Kota Bandung		28.725.327			3.361.639	
168	Kota Bekasi			1.074.213	2.250.000	3.204.655	11.789.450



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
157	Kab. Garut	13.464.499	19.024.022	9.955.143	1.462.720	43.906.384
158	Kab. Indramayu	8.472.069	33.345.048	8.702.651	1.394.743	51.914.511
159	Kab. Karawang	2.633.926	19.623.520	7.540.696	1.566.000	31.364.142
160	Kab. Kuningan	3.242.396	17.265.451	5.032.766	1.332.095	26.872.708
161	Kab. Majalengka	1.969.659	16.385.133		1.428.216	19.783.008
162	Kab. Purwakarta	3.567.299		3.915.897	1.124.200	8.607.396
163	Kab. Subang	8.389.106	14.333.281	7.245.838	1.608.668	31.576.893
164	Kab. Sukabumi	9.547.074	8.975.408	6.639.748	1.021.000	26.183.230
165	Kab. Sumedang	1.975.669	10.341.545	5.963.750	1.440.919	19.721.883
166	Kab. Tasikmalaya	11.999.999	11.513.999	6.542.557	1.070.000	31.126.555
167	Kota Bandung	3.700.439	7.887.772	3.918.291	1.339.675	16.846.177
168	Kota Bekasi		15.978.523	5.388.355		21.366.878



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
157	Kab. Garut	5.524.643	963.094	3.210.546		176.366.612
158	Kab. Indramayu	6.448.892	2.016.471		25.000.000	182.531.266
159	Kab. Karawang	3.740.425	1.029.887			148.144.984
160	Kab. Kuningan	6.227.674	1.123.555	3.139.842		92.978.240
161	Kab. Majalengka	1.614.758	701.348	1.481.126	26.170.100	116.142.554
162	Kab. Purwakarta	4.133.320	1.632.887			62.118.885
163	Kab. Subang	2.173.720	2.234.528	2.047.665		100.885.221
164	Kab. Sukabumi	6.839.333	1.311.977	1.323.391		170.146.624
165	Kab. Sumedang	6.114.716	894.319	1.454.631		137.552.242
166	Kab. Tasikmalaya	7.173.060	2.115.803	2.990.072		181.600.308
167	Kota Bandung					48.933.143
168	Kota Bekasi					39.685.196



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
169	Kota Bogor						
170	Kota Cirebon	10.644.151	7.885.162			2.636.161	
171	Kota Depok	19.654.752	11.531.140			200.000	
172	Kota Sukabumi	7.750.381	12.110.695			3.108.267	
173	Kota Tasikmalaya	6.577.631	5.621.207			1.145.097	1.200.000
174	Kota Cimahi	5.073.853	5.572.183			457.346	
175	Kota Banjar		1.966.500				
176	Kab. Bandung Barat	35.731.440	25.788.640				10.000.000
177	Kab. Pangandaran	19.360.434	7.089.001				438.725
178	Provinsi Jawa Tengah			26.057.061	1.000.000		
179	Kab. Banjarnegara	7.660.744	9.057.090			2.322.509	
180	Kab. Banyumas	20.770.486	7.706.752			4.898.882	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
169	Kota Bogor						
170	Kota Cirebon		21.165.474				
171	Kota Depok		31.385.892	1.494.456	1.687.853		
172	Kota Sukabumi		22.969.343	1.760.442			8.200.918
173	Kota Tasikmalaya		14.543.935	1.197.578		2.756.250	12.722.767
174	Kota Cimahi		11.103.382	1.537.225	2.695.175	2.756.250	10.456.993
175	Kota Banjar		1.966.500	1.019.162	1.800.000		14.530.850
176	Kab. Bandung Barat	13.541.580	85.061.660			2.756.250	12.193.805
177	Kab. Pangandaran		26.888.160				21.285.664
178	Provinsi Jawa Tengah		27.057.061				31.543.241
179	Kab. Banjarnegara		19.040.343		5.959.524	3.123.750	24.237.059
180	Kab. Banyumas		33.376.120	2.306.379	4.000.000	3.123.750	33.704.474



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
169	Kota Bogor	6.119.181	13.174.599	4.471.417		23.765.197
170	Kota Cirebon	4.706.705	28.019.917	1.565.467	1.515.801	35.807.890
171	Kota Depok	740.999				740.999
172	Kota Sukabumi	6.432.671	32.278.476	1.766.791	1.392.000	41.869.938
173	Kota Tasikmalaya	9.113.299	24.234.474	884.270	1.697.860	35.929.903
174	Kota Cimahi	3.849.999	20.985.999	1.705.170		26.541.168
175	Kota Banjar	1.424.999	12.743.210	707.157	603.912	15.479.278
176	Kab. Bandung Barat	4.993.565	35.455.296	4.092.021		44.540.882
177	Kab. Pangandaran	37.832.155		2.644.503	1.308.000	41.784.658
178	Provinsi Jawa Tengah	2.999.999	61.023.599			64.023.598
179	Kab. Banjarnegara	8.199.999	11.000.999	4.337.069	1.223.418	24.761.485
180	Kab. Banyumas	7.199.999	1.158.074	6.345.681	811.500	15.515.254



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
169	Kota Bogor					23.765.197
170	Kota Cirebon	1.101.357	580.769			58.655.490
171	Kota Depok	898.876				36.208.076
172	Kota Sukabumi	898.876	529.754			76.229.271
173	Kota Tasikmalaya	1.763.113	936.617	1.800.000	4.789.530	76.439.693
174	Kota Cimahi					55.090.193
175	Kota Banjar	898.876	516.105			36.210.771
176	Kab. Bandung Barat	3.511.597	566.671			148.630.865
177	Kab. Pangandaran	2.872.149	2.050.339	3.350.791		98.231.761
178	Provinsi Jawa Tengah	19.950.000	9.228.107			151.802.007
179	Kab. Banjarnegara	3.832.356	791.046			81.745.563
180	Kab. Banyumas	4.628.374	449.925	1.185.915		98.290.191



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
181	Kab. Batang	6.089.896	2.798.500			1.709.863	2.200.000
182	Kab. Blora	20.384.592	7.504.810			1.489.647	10.000.000
183	Kab. Boyolali	31.684.203	11.575.532			997.307	2.375.000
184	Kab. Brebes	89.318.182	23.208.529			2.085.323	
185	Kab. Cilacap	19.993.143	6.646.100			2.141.278	684.800
186	Kab. Demak	15.573.564	3.545.020			1.310.365	
187	Kab. Grobogan	24.612.262	9.700.184			2.205.392	
188	Kab. Jepara	7.470.631	4.812.900			972.708	395.000
189	Kab. Karanganyar	9.251.428	2.734.499			1.482.849	558.200
190	Kab. Kebumen	5.661.995	1.145.700			2.099.153	515.000
191	Kab. Kendal	14.052.647	4.914.559			1.863.959	
192	Kab. Klaten	13.901.534	2.835.902			1.602.285	1.200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
181	Kab. Batang		12.798.259		4.276.894	3.123.750	17.429.841
182	Kab. Blora		39.379.049	1.559.452	735.000	3.123.750	31.860.329
183	Kab. Boyolali		46.632.042	1.450.000	3.037.155	3.123.750	18.957.402
184	Kab. Brebes		114.612.034	2.956.601		2.972.290	17.134.082
185	Kab. Cilacap		29.465.321		2.800.000		28.330.167
186	Kab. Demak		20.428.949	2.273.950	3.600.000	2.462.250	12.650.544
187	Kab. Grobogan	15.000.000	51.517.838	700.000		1.765.396	22.035.637
188	Kab. Jepara		13.651.239		4.527.592	3.268.016	23.117.468
189	Kab. Karanganyar		14.026.976		2.895.411	2.756.250	23.338.446
190	Kab. Kebumen		9.421.848	1.105.000		2.972.290	23.299.912
191	Kab. Kendal		20.831.165		3.500.000	3.262.144	22.321.627
192	Kab. Klaten		19.539.721		3.500.000	2.756.250	20.228.649



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
181	Kab. Batang	4.999.999	15.610.541	3.636.377	1.155.000	25.401.917
182	Kab. Blora	7.999.999	12.058.199	4.801.753	1.076.000	25.935.951
183	Kab. Boyolali	4.654.408	9.603.223	5.160.407	1.182.198	20.600.236
184	Kab. Brebes	3.449.999	3.960.999	5.621.059	1.358.718	14.390.775
185	Kab. Cilacap	4.499.999	20.849.409	6.669.139	1.002.600	33.021.147
186	Kab. Demak	1.349.999	13.999.999	5.434.046	1.388.100	22.172.144
187	Kab. Grobogan	7.499.999	9.079.250	7.501.010	1.597.000	25.677.259
188	Kab. Jepara	3.974.550	13.090.987	4.440.491	1.140.461	22.646.489
189	Kab. Karanganyar	9.499.999	626.049	4.255.475	1.099.072	15.480.595
190	Kab. Kebumen	2.517.499	3.971.949	3.806.526	1.104.847	11.400.821
191	Kab. Kendal	5.604.999	1.196.999	4.159.462	1.340.368	12.301.828
192	Kab. Klaten	4.649.999	1.999.999	3.772.250	1.065.000	11.487.248



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
181	Kab. Batang	4.181.461	838.822	2.170.975		70.221.919
182	Kab. Blora	6.274.184	889.419	1.417.717	6.500.000	117.674.851
183	Kab. Boyolali	6.488.377	1.390.233			101.679.195
184	Kab. Brebes	6.164.761	887.927	2.792.568		161.911.038
185	Kab. Cilacap	6.153.425	1.332.475			101.102.535
186	Kab. Demak	7.205.532	940.681			71.734.050
187	Kab. Grobogan	6.194.452	776.188	3.089.597		111.756.367
188	Kab. Jepara	4.276.767	694.358			72.181.929
189	Kab. Karanganyar	2.961.223	441.635			61.900.536
190	Kab. Kebumen	4.561.705	1.132.416	1.806.583	300.016	56.000.591
191	Kab. Kendal	4.751.587	1.249.302			68.217.653
192	Kab. Klaten	3.946.317	1.292.251			62.750.436



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
193	Kab. Kudus	7.068.254	3.619.680			218.109	
194	Kab. Magelang	13.929.197	9.415.574			1.439.495	
195	Kab. Pati	11.698.012	6.472.654			1.765.068	
196	Kab. Pekalongan	20.963.429	18.262.155			2.884.338	
197	Kab. Pemalang	14.865.834	1.778.818			1.408.038	
198	Kab. Purbalingga	33.914.937	15.520.200			231.621	200.000
199	Kab. Purworejo	13.606.832	4.388.430			1.372.609	
200	Kab. Rembang	5.184.696	11.442.997			2.467.908	
201	Kab. Semarang	13.821.207	6.023.580			2.641.964	1.700.000
202	Kab. Sragen	17.338.155	7.024.300			200.000	
203	Kab. Sukoharjo	6.918.629	11.739.980			1.527.623	
204	Kab. Tegal	15.089.243	2.612.960			1.395.330	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
193	Kab. Kudus		10.906.043	3.119.313		3.123.750	16.619.894
194	Kab. Magelang		24.784.266	1.467.760	3.000.000	3.123.750	20.529.485
195	Kab. Pati		19.935.734	700.000	450.000	2.972.290	21.862.945
196	Kab. Pekalongan		42.109.922	2.410.301	3.957.175	3.123.750	18.083.143
197	Kab. Pemalang		18.052.690		2.740.000	3.157.174	20.369.162
198	Kab. Purbalingga		49.866.758			2.535.750	18.344.641
199	Kab. Purworejo		19.367.871		4.266.914	3.123.750	17.306.863
200	Kab. Rembang		19.095.601	2.263.243		2.485.735	15.077.607
201	Kab. Semarang		24.186.751		3.896.858	2.803.658	17.966.105
202	Kab. Sragen		24.562.455		2.500.000	3.123.750	29.455.722
203	Kab. Sukoharjo		20.186.232		1.040.000	3.123.750	18.982.950
204	Kab. Tegal		19.097.533			2.756.250	18.477.496



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
193	Kab. Kudus	6.649.999	3.211.059	1.795.756	983.583	12.640.397
194	Kab. Magelang	4.562.897	2.313.249	6.211.430	968.810	14.056.386
195	Kab. Pati	4.999.999	32.819.354	4.478.216	1.353.718	43.651.287
196	Kab. Pekalongan	3.399.999	24.580.999	4.568.503	1.027.000	33.576.501
197	Kab. Pemalang	11.999.999	2.579.999	4.761.660	1.349.468	20.691.126
198	Kab. Purbalingga	4.999.999	20.672.632	3.934.725	1.380.720	30.988.076
199	Kab. Purworejo	14.433.895	741.347	3.965.825	1.132.635	20.273.702
200	Kab. Rembang		719.696	3.716.007	1.032.000	5.467.703
201	Kab. Semarang	1.139.999	17.113.711	2.753.054	1.082.000	22.088.764
202	Kab. Sragen	1.499.999	5.579.999	3.750.363	1.412.120	12.242.481
203	Kab. Sukoharjo	6.899.999	594.999	3.001.307	1.258.000	11.754.305
204	Kab. Tegal	16.771.428	18.544.999	4.332.934	1.421.221	41.070.582



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
193	Kab. Kudus	1.260.000				47.669.397
194	Kab. Magelang	5.186.916	541.956			72.690.519
195	Kab. Pati	5.849.464	1.149.979	1.946.246		98.517.945
196	Kab. Pekalongan	3.414.219	1.029.850	1.907.923		109.612.784
197	Kab. Pemasang	3.317.823	1.052.953	1.700.000		71.080.928
198	Kab. Purbalingga	4.008.419	768.920	1.847.088	14.801.175	123.160.827
199	Kab. Purworejo	3.478.643	971.635			68.789.378
200	Kab. Rembang	5.497.506	889.560	1.162.905	3.000.000	54.939.860
201	Kab. Semarang	3.313.901	1.433.407			75.689.444
202	Kab. Sragen	5.186.543	591.930			77.662.881
203	Kab. Sukoharjo	3.151.931	747.949			58.987.117
204	Kab. Tegal	3.510.988	701.814		5.713.410	91.328.073



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
205	Kab. Temanggung	11.203.145	6.796.536			1.023.000	1.150.000
206	Kab. Wonogiri	23.100.256	15.414.426			2.814.001	
207	Kab. Wonosobo	7.402.286	6.223.593			663.927	1.250.000
208	Kota Magelang	1.000.000	1.226.849			200.000	
209	Kota Pekalongan	6.014.644	1.249.600			308.178	
210	Kota Salatiga						
211	Kota Semarang	5.073.036	2.296.207			2.948.964	200.000
212	Kota Surakarta	7.125.394	2.398.940			1.281.161	
213	Kota Tegal	4.289.045	1.808.952			2.613.283	
214	Provinsi DI Yogyakarta			26.043.397	1.000.000		
215	Kab. Bantul	3.221.347	2.638.860			576.214	441.000
216	Kab. Gunung Kidul	19.632.814	18.144.972			3.996.141	425.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
205	Kab. Temanggung		20.172.681		2.238.000	2.756.250	14.000.000
206	Kab. Wonogiri		41.328.683	3.098.639	2.902.952	3.123.750	23.483.609
207	Kab. Wonosobo		15.539.806	5.023.085	6.300.000	3.262.144	23.037.616
208	Kota Magelang		2.426.849	1.670.519	2.843.958	2.972.290	7.950.000
209	Kota Pekalongan		7.572.422			3.262.144	12.823.069
210	Kota Salatiga			1.275.000	2.699.142	2.098.087	15.121.184
211	Kota Semarang		10.518.207		500.000	2.972.290	10.000.000
212	Kota Surakarta		10.805.495		3.297.372	2.972.290	12.305.303
213	Kota Tegal		8.711.280			3.262.144	10.856.407
214	Provinsi DI Yogyakarta		27.043.397				20.031.709
215	Kab. Bantul		6.877.421	1.074.999	2.500.000	3.262.144	18.346.724
216	Kab. Gunung Kidul		42.198.927	4.382.748	1.908.103		28.858.986



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
205	Kab. Temanggung	6.165.783	3.891.342	3.887.234	1.356.449	15.300.808
206	Kab. Wonogiri		17.649.999	3.446.050	1.390.000	22.486.049
207	Kab. Wonosobo	9.727.190	6.466.050	4.575.690	1.182.198	21.951.128
208	Kota Magelang	1.951.291	23.893.615	1.207.156	300.000	27.352.062
209	Kota Pekalongan	5.494.499	8.009.999	1.776.049	736.050	16.016.597
210	Kota Salatiga		1.615.999	1.852.632	1.075.930	4.544.561
211	Kota Semarang	3.563.499	24.173.747	5.329.523	1.430.000	34.496.769
212	Kota Surakarta	1.185.043	7.331.163	2.750.000	1.363.753	12.629.959
213	Kota Tegal	4.974.912	17.703.439	1.463.293	1.415.224	25.556.868
214	Provinsi DI Yogyakarta		2.969.621			2.969.621
215	Kab. Bantul	9.095.038	12.580.855	3.843.248	1.049.370	26.568.511
216	Kab. Gunung Kidul	5.629.299	16.525.885	3.683.337	1.058.000	26.896.521



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
205	Kab. Temanggung	4.014.062	832.710			59.314.511
206	Kab. Wonogiri	3.978.143	558.842			100.960.667
207	Kab. Wonosobo	3.388.818	692.875		1.750.000	80.945.472
208	Kota Magelang	898.876			3.000.000	49.114.554
209	Kota Pekalongan	1.516.678		1.831.018		43.021.928
210	Kota Salatiga	1.054.565				26.792.539
211	Kota Semarang	2.179.755	1.014.195			61.681.216
212	Kota Surakarta	898.876			2.750.000	45.659.295
213	Kota Tegal	1.077.597	704.610	1.877.232		52.046.138
214	Provinsi DI Yogyakarta	8.000.000	2.137.863			60.182.590
215	Kab. Bantul	2.915.051	779.367			62.324.217
216	Kab. Gunung Kidul	3.828.592	1.155.701			109.229.578



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
217	Kab. Kulon Progo	3.202.514	9.726.590			1.568.714	873.000
218	Kab. Sleman	4.881.002	2.988.077			1.638.521	
219	Kota Yogyakarta	1.000.000				2.030.541	
220	Provinsi Jawa Timur			190.768.755	22.295.943		
221	Kab. Bangkalan	14.249.478	7.138.832			200.000	
222	Kab. Banyuwangi	6.641.052	2.574.177			254.653	
223	Kab. Blitar	19.757.174	10.411.967			210.150	
224	Kab. Bojonegoro	12.690.582	13.717.450			326.386	1.750.000
225	Kab. Bondowoso	18.654.865	10.200.404			2.008.130	2.200.000
226	Kab. Gresik	9.561.774	8.349.218			2.069.281	
227	Kab. Jember	6.488.686	4.209.051			437.167	
228	Kab. Jombang	10.871.297	13.004.050			3.639.275	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
217	Kab. Kulon Progo	13.725.083	29.095.901			2.972.290	19.412.887
218	Kab. Sleman		9.507.600	2.670.920	2.732.569	3.123.750	18.194.386
219	Kota Yogyakarta		3.030.541			3.262.144	12.616.561
220	Provinsi Jawa Timur		213.064.698				23.946.392
221	Kab. Bangkalan		21.588.310	2.730.946			18.689.386
222	Kab. Banyuwangi		9.469.882		1.000.000		51.694.727
223	Kab. Blitar		30.379.291	864.000	4.250.000	2.972.290	28.938.933
224	Kab. Bojonegoro		28.484.418	1.075.655	4.078.166	3.262.144	26.929.971
225	Kab. Bondowoso		33.063.399		2.800.000	3.123.750	35.667.528
226	Kab. Gresik		19.980.273	2.790.313	3.071.599	2.973.776	16.642.480
227	Kab. Jember		11.134.904	2.627.000		3.123.750	45.717.766
228	Kab. Jombang		27.514.622	1.275.000		2.972.290	17.353.557



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
217	Kab. Kulon Progo	15.021.189	20.159.013	2.720.534	1.160.669	39.061.405
218	Kab. Sleman	2.846.836	6.440.804	2.021.533	1.143.343	12.452.516
219	Kota Yogyakarta	4.265.880	19.722.999	880.270	460.000	25.329.149
220	Provinsi Jawa Timur		111.188.538			111.188.538
221	Kab. Bangkalan	1.058.395	12.757.496	5.217.804	1.173.178	20.206.873
222	Kab. Banyuwangi	4.864.199	19.290.598	4.407.742	599.437	29.161.976
223	Kab. Blitar	1.586.468	11.743.840	4.235.057	1.443.615	19.008.980
224	Kab. Bojonegoro	5.157.454	20.087.844	4.406.216	625.181	30.276.695
225	Kab. Bondowoso	4.599.999	20.106.140	4.269.197	1.168.000	30.143.336
226	Kab. Gresik	2.184.136	27.419.761	5.557.863	1.384.335	36.546.095
227	Kab. Jember	3.726.849	42.423.821	7.478.980	1.594.328	55.223.978
228	Kab. Jombang		18.399.999	5.760.406	1.163.000	25.323.405



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
217	Kab. Kulon Progo	3.632.120	1.088.931		1.800.000	97.063.534
218	Kab. Sleman	2.332.769	1.216.466			52.230.976
219	Kota Yogyakarta					44.238.395
220	Provinsi Jawa Timur	10.450.000	9.649.971			368.299.599
221	Kab. Bangkalan	3.849.648	874.484	1.521.608	3.819.658	73.280.913
222	Kab. Banyuwangi	3.657.166	1.094.080	2.868.497		98.946.328
223	Kab. Blitar	3.481.008	584.943	2.144.136		92.623.581
224	Kab. Bojonegoro	3.274.356	764.406	1.809.720	2.816.997	102.772.528
225	Kab. Bondowoso	5.770.849	868.947	1.787.107		113.224.916
226	Kab. Gresik	4.751.412	593.640			87.349.588
227	Kab. Jember	5.007.661	718.155	1.855.515		125.408.729
228	Kab. Jombang	1.911.666	816.638	1.196.650		78.363.828



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
229	Kab. Kediri	18.318.589	23.133.900			200.000	
230	Kab. Lamongan	29.277.000	13.159.325			335.804	1.082.618
231	Kab. Lumajang	4.967.083	5.107.438				
232	Kab. Madiun	39.015.504	16.597.070			822.080	
233	Kab. Magetan	13.441.010	13.207.375			1.899.856	
234	Kab. Malang	33.350.580	25.880.488			1.138.189	1.600.000
235	Kab. Mojokerto	20.100.618	11.200.260			759.382	
236	Kab. Nganjuk	18.390.292	9.772.004			1.157.559	
237	Kab. Ngawi	36.106.793	9.743.310			450.847	
238	Kab. Pacitan	19.304.220	11.793.623			2.177.143	425.000
239	Kab. Pamekasan	24.959.407	18.682.900			200.000	1.972.000
240	Kab. Pasuruan	25.377.427	6.180.900			475.201	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
229	Kab. Kediri		41.652.489	2.459.253		3.262.144	26.508.085
230	Kab. Lamongan		43.854.747	3.051.946	3.679.216	3.370.291	12.193.805
231	Kab. Lumajang		10.074.521	1.777.669	4.897.412	3.192.785	24.664.921
232	Kab. Madiun		56.434.654	1.866.240		3.267.690	20.371.450
233	Kab. Magetan		28.548.241	1.100.000	3.128.377	3.007.066	17.844.992
234	Kab. Malang	14.700.000	76.669.257	3.042.880	5.968.010	3.123.750	34.504.248
235	Kab. Mojokerto		32.060.260			2.972.290	21.753.207
236	Kab. Nganjuk		29.319.855		873.600	3.123.750	30.480.476
237	Kab. Ngawi		46.300.950	2.739.702	3.443.868		20.553.398
238	Kab. Pacitan		33.699.986	1.374.888	2.719.560	2.756.250	21.656.513
239	Kab. Pamekasan		45.814.307	1.870.718	600.000	3.203.093	14.017.967
240	Kab. Pasuruan		32.033.528	1.872.496	5.500.000	3.262.144	33.790.030



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
229	Kab. Kediri	4.106.028	7.029.999	4.092.351	1.090.410	16.318.788
230	Kab. Lamongan	1.499.999	20.923.999	4.276.452	1.179.000	27.879.450
231	Kab. Lumajang	3.276.074	11.959.779	8.285.990	700.459	24.222.302
232	Kab. Madiun	3.571.999	23.466.777	2.925.829	1.666.317	31.630.922
233	Kab. Magetan	4.254.829	8.055.999	3.105.107	783.421	16.199.356
234	Kab. Malang	3.922.254	33.279.948	11.584.489	1.529.712	50.316.403
235	Kab. Mojokerto	1.349.999	29.505.800	3.392.243	990.000	35.238.042
236	Kab. Nganjuk	4.274.999	16.152.849	5.603.592	1.303.700	27.335.140
237	Kab. Ngawi	4.499.999	5.475.000	3.051.114	1.348.000	14.374.113
238	Kab. Pacitan	3.522.930	10.298.527	3.439.417	1.180.000	18.440.874
239	Kab. Pamekasan	3.324.999	8.823.842	5.538.944	337.806	18.025.591
240	Kab. Pasuruan	2.992.499	13.342.939	7.898.506	1.138.531	25.372.475



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
229	Kab. Kediri	4.002.233				94.202.992
230	Kab. Lamongan	5.774.830	939.014	2.040.196	600.000	103.383.495
231	Kab. Lumajang	3.966.053	1.209.925			74.005.588
232	Kab. Madiun	3.849.648	544.795	2.045.538		120.010.937
233	Kab. Magetan	3.767.750	630.201	1.811.285		76.037.268
234	Kab. Malang	4.060.616	1.364.106			179.049.270
235	Kab. Mojokerto	3.656.811	765.994			96.446.604
236	Kab. Nganjuk	6.485.072	584.780			98.202.673
237	Kab. Ngawi	5.024.850	521.933		1.000.000	93.958.814
238	Kab. Pacitan	4.030.997	1.803.006			86.482.074
239	Kab. Pamekasan	1.793.777	1.591.285		2.613.897	89.530.635
240	Kab. Pasuruan	5.932.189	468.710			108.231.572



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
241	Kab. Ponorogo	15.227.246	14.820.124			1.560.630	
242	Kab. Probolinggo	20.073.709	11.013.534			2.099.842	
243	Kab. Sampang	21.135.675	11.199.094				
244	Kab. Sidoarjo	2.705.878					
245	Kab. Situbondo	11.054.566	6.432.013			1.180.406	
246	Kab. Sumenep	36.856.213	10.257.872			1.413.033	200.000
247	Kab. Trenggalek	26.145.281	2.915.950			860.857	2.195.000
248	Kab. Tuban	10.125.925	5.019.010			200.000	
249	Kab. Tulungagung	37.096.471	7.899.689			563.464	
250	Kota Blitar	2.422.957	1.509.835				1.083.625
251	Kota Kediri	7.201.273	6.114.700			951.679	1.100.000
252	Kota Madiun						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
241	Kab. Ponorogo		31.608.000		3.291.452	1.467.648	19.836.990
242	Kab. Probolinggo		33.187.085	2.962.403	5.400.000	3.123.750	19.363.013
243	Kab. Sampang		32.334.769	1.772.285	3.860.510		6.560.000
244	Kab. Sidoarjo		2.705.878	1.674.597			9.043.590
245	Kab. Situbondo		18.666.985			3.123.750	20.451.455
246	Kab. Sumenep		48.727.118	1.600.000	350.000	1.938.289	29.191.845
247	Kab. Trenggalek	14.439.617	46.556.705	1.821.245	3.000.000	3.123.750	19.057.584
248	Kab. Tuban		15.344.935	1.788.987	4.400.000	3.262.144	14.322.476
249	Kab. Tulungagung		45.559.624	1.964.564	3.424.989	3.123.750	34.629.710
250	Kota Blitar		5.016.417	400.000	1.028.239	3.262.144	11.790.501
251	Kota Kediri		15.367.652	941.239	800.000	2.756.250	13.191.100
252	Kota Madiun						9.896.100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
241	Kab. Ponorogo	3.006.765	3.466.999	4.702.513	1.315.500	12.491.777
242	Kab. Probolinggo	2.719.138	3.824.370	5.250.000	1.223.935	13.017.443
243	Kab. Sampang	3.989.999		7.495.879	1.215.175	12.701.053
244	Kab. Sidoarjo		3.463.452	6.288.564	175.308	9.927.324
245	Kab. Situbondo	4.183.737	9.484.383	4.607.009	1.182.000	19.457.129
246	Kab. Sumenep	72.128	1.449.999	8.604.690	1.119.000	11.245.817
247	Kab. Trenggalek	3.766.657	21.839.301	3.293.757	1.447.000	30.346.715
248	Kab. Tuban	1.331.081	15.165.494	5.106.221	522.500	22.125.296
249	Kab. Tulungagung	3.799.999	3.102.499	3.882.410	1.678.850	12.463.758
250	Kota Blitar	1.811.126	4.468.924	1.211.801	1.037.243	8.529.094
251	Kota Kediri	2.847.999	11.399.999	1.555.818	1.238.000	17.041.816
252	Kota Madiun	957.238	1.452.549		298.924	2.708.711



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
241	Kab. Ponorogo	5.193.386	705.729			74.594.982
242	Kab. Probolinggo	5.449.975	1.215.359			83.719.028
243	Kab. Sampang	3.358.000	703.951	1.641.708		62.932.276
244	Kab. Sidoarjo	1.488.664	892.232		9.549.145	35.281.430
245	Kab. Situbondo	3.716.699	1.176.048	1.570.955		68.163.021
246	Kab. Sumenep	7.205.259	1.055.262	2.906.917		104.220.507
247	Kab. Trenggalek	3.881.747	1.276.873	1.911.931	1.384.626	112.361.176
248	Kab. Tuban	5.252.634	953.677			67.450.149
249	Kab. Tulungagung	6.016.268	1.313.105	1.978.435		110.474.203
250	Kota Blitar	2.661.530		1.325.241		34.013.166
251	Kota Kediri	898.876		1.797.475		52.794.408
252	Kota Madiun					12.604.811



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
253	Kota Malang	5.094.387	1.693.565			1.144.139	
254	Kota Mojokerto	1.303.083	1.000.000				
255	Kota Pasuruan	2.391.333	2.495.840			241.133	
256	Kota Probolinggo	4.540.378	3.775.205			200.000	
257	Kota Surabaya	1.728.237	2.163.800				
258	Kota Batu	3.543.417	2.888.649			477.903	
259	Provinsi Kalimantan Barat			81.708.091	2.231.878		225.000
260	Kab. Bengkayang	24.364.681	10.488.846			1.148.471	2.225.000
261	Kab. Landak	21.762.283	13.680.311			484.086	725.000
262	Kab. Kapuas Hulu	27.432.998	11.742.042				225.000
263	Kab. Ketapang	30.096.765	31.878.114			3.206.425	2.150.000
264	Kab. Mempawah	17.581.531	3.601.239			2.771.988	1.175.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
253	Kota Malang		7.932.091		3.712.003	1.065.751	22.549.564
254	Kota Mojokerto		2.303.083	1.138.755	2.405.873	2.756.250	9.710.468
255	Kota Pasuruan		5.128.306		2.511.595	3.262.144	9.644.975
256	Kota Probolinggo		8.515.583		2.876.744		11.859.511
257	Kota Surabaya		3.892.037				10.025.494
258	Kota Batu		6.909.969	2.113.266	940.715		11.222.335
259	Provinsi Kalimantan Barat		84.164.969				20.219.653
260	Kab. Bengkayang		38.226.998	2.578.655	2.400.000		24.702.419
261	Kab. Landak		36.651.680	2.295.485	3.796.346		26.909.267
262	Kab. Kapuas Hulu		39.400.040	1.975.741	1.000.000		30.533.506
263	Kab. Ketapang		67.331.304	3.261.027			81.148.129
264	Kab. Mempawah		25.129.758	2.012.056	1.600.000		20.044.176



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
253	Kota Malang	1.821.416	4.329.109	2.394.939	1.515.796	10.061.260
254	Kota Mojokerto	900.680	1.823.999	2.188.296	524.513	5.437.488
255	Kota Pasuruan	1.283.639	10.886.049	883.008	405.343	13.458.039
256	Kota Probolinggo	4.289.396	2.494.919	1.531.326	583.605	8.899.246
257	Kota Surabaya	949.999	5.223.404	3.132.361	1.060.040	10.365.804
258	Kota Batu			1.760.394	1.669.541	3.429.935
259	Provinsi Kalimantan Barat	949.999	22.471.584	459.239		23.880.822
260	Kab. Bengkayang	1.949.999	15.577.976	5.000.000	1.005.000	23.532.975
261	Kab. Landak	4.399.999	14.990.999	9.211.765	984.450	29.587.213
262	Kab. Kapuas Hulu	4.497.518	29.946.766	4.553.054	1.049.579	40.046.917
263	Kab. Ketapang	5.229.672		3.863.254	378.500	9.471.426
264	Kab. Mempawah	2.182.465	17.178.160	3.040.481	376.000	22.777.106



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
253	Kota Malang					45.320.669
254	Kota Mojokerto	1.413.637	559.214			25.724.768
255	Kota Pasuruan		930.331			34.935.390
256	Kota Probolinggo	1.182.011	643.954			33.977.049
257	Kota Surabaya		753.125		540.573	25.577.033
258	Kota Batu	1.081.891				25.698.111
259	Provinsi Kalimantan Barat	14.500.000	10.846.659			153.612.103
260	Kab. Bengkayang	3.935.582	1.796.706	2.637.957		99.811.292
261	Kab. Landak	4.664.639	880.763	1.901.106		106.686.499
262	Kab. Kapuas Hulu	3.511.597	1.681.206	2.751.154		120.900.161
263	Kab. Ketapang	4.001.587	1.649.879	2.442.638		169.305.990
264	Kab. Mempawah	1.645.263	1.582.577			74.790.936



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
265	Kab. Sambas	12.752.797	7.585.250			3.693.280	2.225.000
266	Kab. Sanggau	17.877.397	18.642.513			1.427.357	11.619.705
267	Kab. Sintang	4.773.112	3.804.900			3.555.062	225.000
268	Kota Pontianak	33.477.425	12.751.900				
269	Kota Singkawang	5.123.887	2.735.360				725.000
270	Kab. Sekadau	9.748.291	1.597.716				
271	Kab. Melawi	14.978.360	13.281.095			345.343	
272	Kab. Kayong Utara	9.424.776	9.248.798			728.640	225.000
273	Kab. Kubu Raya	38.662.044	11.662.940			517.200	
274	Provinsi Kalimantan Tengah			38.348.305	1.320.643		
275	Kab. Barito Selatan	3.992.071	2.856.290			382.536	
276	Kab. Barito Utara	5.534.682	8.669.200			465.004	425.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah.	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
265	Kab. Sambas		26.256.327	1.650.000	1.920.000		24.570.486
266	Kab. Sanggau		49.566.972	2.019.779	3.461.328		28.856.635
267	Kab. Sintang		12.358.074	2.488.053			33.500.000
268	Kota Pontianak		46.229.325			3.123.750	13.647.602
269	Kota Singkawang		8.584.247	1.136.351		3.285.248	16.642.571
270	Kab. Sekadau		11.346.007	2.943.446	2.351.640		19.137.371
271	Kab. Melawi		28.604.798	3.086.924	1.200.000		23.555.000
272	Kab. Kayong Utara		19.627.214				15.529.704
273	Kab. Kubu Raya		50.842.184	2.123.924			19.924.495
274	Provinsi Kalimantan Tengah		39.668.948				32.009.330
275	Kab. Barito Selatan		7.230.897	1.480.608	1.324.057		31.331.458
276	Kab. Barito Utara		15.093.886	2.349.530	720.000		24.389.819



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
265	Kab. Sambas	3.299.999	34.613.032	8.153.296	1.000.000	47.066.327
266	Kab. Sanggau	3.799.999		6.267.485	1.356.036	11.423.520
267	Kab. Sintang	3.319.999		10.529.633	857.250	14.706.882
268	Kota Pontianak	4.609.121	7.012.068		1.195.000	12.816.189
269	Kota Singkawang	4.766.637		2.370.690	800.950	7.938.277
270	Kab. Sekadau	4.916.249	12.604.124	3.745.218	361.866	21.627.457
271	Kab. Melawi	5.957.999	15.605.313	1.416.189	864.550	23.844.051
272	Kab. Kayong Utara	3.854.979	20.684.034	2.596.991	308.000	27.444.004
273	Kab. Kubu Raya	2.541.620	11.898.836	4.218.906	1.397.250	20.056.612
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.899.999	16.869.263	4.347.929		23.117.191
275	Kab. Barito Selatan	4.649.999	1.619.999	1.395.461	1.425.000	9.090.459
276	Kab. Barito Utara	11.349.652	2.332.554	1.207.903	1.132.000	16.022.109



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
265	Kab. Sambas	4.560.910	1.861.869	3.265.934	2.172.918	113.324.771
266	Kab. Sanggau	3.994.724	835.317	2.811.348		102.969.623
267	Kab. Sintang	3.704.353	755.744			67.513.106
268	Kota Pontianak	2.923.717	534.716			79.275.299
269	Kota Singkawang	1.545.125	1.570.523			40.702.342
270	Kab. Sekadau	2.512.007	960.153	1.757.592		62.635.673
271	Kab. Melawi	2.340.141	1.572.467			84.203.381
272	Kab. Kayong Utara	1.762.653	484.652	2.070.228		66.918.455
273	Kab. Kubu Raya	3.502.233	1.859.388	3.281.098		101.589.934
274	Provinsi Kalimantan Tengah	8.550.000	10.000.521	2.123.081		115.469.071
275	Kab. Barito Selatan	2.179.755	1.328.759			53.965.993
276	Kab. Barito Utara	1.730.182	1.067.922	1.500.000	987.200	63.860.648



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
277	Kab. Kapuas	26.188.941	26.184.170			1.890.400	1.700.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	15.085.962	6.110.328			1.891.983	1.184.500
279	Kab. Kotawaringin Timur	20.106.036	14.805.390			1.427.298	225.000
280	Kota Palangkaraya	5.127.537	1.447.300			1.173.675	2.000.000
281	Kab. Katingan	10.234.715	4.148.175			943.309	
282	Kab. Seruyan	2.837.132	3.028.619			494.183	1.425.000
283	Kab. Sukamara	2.244.228	1.563.600			334.779	350.000
284	Kab. Lamandau	2.554.660	3.418.200			200.000	
285	Kab. Gunung Mas	11.436.926	6.790.509				
286	Kab. Pulang Pisau	1.794.869	2.174.400			326.500	2.225.000
287	Kab. Murung Raya	3.066.929	3.979.455				1.195.000
288	Kab. Barito Timur	7.576.067	4.521.460				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
277	Kab. Kapuas		55.963.511	2.264.824	4.089.096	3.262.144	48.413.217
278	Kab. Kotawaringin Barat		24.272.773	1.918.797	2.749.583		29.677.837
279	Kab. Kotawaringin Timur		36.563.724	1.584.883	1.000.000	1.598.625	48.068.776
280	Kota Palangkaraya		9.748.512		500.000	3.123.750	23.537.798
281	Kab. Katingan		15.326.199	1.133.960	1.305.756		30.476.010
282	Kab. Seruyan		7.784.934	1.445.186			31.954.363
283	Kab. Sukamara		4.492.607	1.048.799	2.732.245		21.905.385
284	Kab. Lamandau		6.172.860	1.972.121	2.756.137		22.284.503
285	Kab. Gunung Mas		18.227.435	1.338.658	1.005.668		25.958.023
286	Kab. Pulang Pisau	12.023.871	18.544.640	1.134.781	1.213.575		24.120.811
287	Kab. Murung Raya		8.241.384	1.241.809	998.973		30.700.002
288	Kab. Barito Timur		12.097.527	1.709.375	742.880		25.241.552



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
277	Kab. Kapuas	4.863.055	2.076.809	2.409.217	1.315.764	10.664.845
278	Kab. Kotawaringin Barat	3.218.836		2.809.401	1.233.847	7.262.084
279	Kab. Kotawaringin Timur	4.445.221		2.358.558	1.182.198	7.985.977
280	Kota Palangkaraya	5.505.621	3.563.303	2.295.042	1.010.000	12.373.966
281	Kab. Katingan	8.429.888	1.899.538	1.347.760	1.181.676	12.858.862
282	Kab. Seruyan	3.205.679	15.170.173	1.058.144	1.133.000	20.566.996
283	Kab. Sukamara	4.494.119	1.705.999	1.001.338	852.000	8.053.456
284	Kab. Lamandau	3.898.206	1.348.581	1.804.367	1.133.000	8.184.154
285	Kab. Gunung Mas	3.347.914	2.616.923	2.432.760	1.288.708	9.686.305
286	Kab. Pulang Pisau	6.639.999	4.151.827	1.678.118	1.179.500	13.649.444
287	Kab. Murung Raya	3.842.085	4.432.595	2.867.162	1.107.000	12.248.842
288	Kab. Barito Timur	7.377.390	9.334.708	1.586.265	1.333.600	19.631.963



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
277	Kab. Kapuas	6.179.138	1.575.692			132.412.467
278	Kab. Kotawaringin Barat	2.729.536	1.136.063	2.851.545		72.598.218
279	Kab. Kotawaringin Timur	3.717.894	1.510.681			102.030.560
280	Kota Palangkaraya	1.645.263	498.633	2.216.278		53.644.200
281	Kab. Katingan	3.164.592	792.220	1.734.093		66.791.692
282	Kab. Seruyan	2.947.064	1.211.631	1.783.585	20.000.000	87.693.759
283	Kab. Sukamara	1.512.653	1.231.670	2.135.273		43.112.088
284	Kab. Lamandau	1.674.521	503.293			43.547.589
285	Kab. Gunung Mas	1.545.125	494.832		1.002.000	59.258.046
286	Kab. Pulang Pisau	3.543.460	1.197.651		1.095.587	64.499.949
287	Kab. Murung Raya	1.762.653				55.193.663
288	Kab. Barito Timur	2.443.182	979.949	1.518.958		64.365.386



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
289	Provinsi Kalimantan Selatan			33.339.448			
290	Kab. Banjar	8.064.886	4.560.750			2.371.957	1.626.392
291	Kab. Barito Kuala	3.488.694	4.423.730			622.394	700.500
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.569.745	5.956.450			1.529.664	225.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	8.566.634	3.658.800			1.922.654	200.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	16.969.876	1.154.300			2.191.133	875.000
295	Kab. Kotabaru	8.129.479	5.250.130			3.569.527	2.000.000
296	Kab. Tabalong	35.884.732	4.707.180			764.357	225.000
297	Kab. Tanah Laut	1.782.140	8.699.260			914.357	
298	Kab. Tapin	9.555.386	8.185.790			1.729.191	
299	Kota Banjarbaru	3.546.356	4.591.820			2.002.803	
300	Kota Banjarmasin	21.319.821	6.383.782			1.733.302	599.950



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
289	Provinsi Kalimantan Selatan		33.339.448				16.258.407
290	Kab. Banjar		16.623.985			2.622.609	20.015.475
291	Kab. Barito Kuala		9.235.318	3.346.928	2.000.000	3.024.603	18.674.913
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		11.280.859	1.782.606	3.338.188	3.172.481	24.282.353
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	14.039.979	28.388.067	3.154.289	3.145.179	3.143.117	20.377.221
294	Kab. Hulu Sungai Utara		21.190.309	1.290.024			14.306.770
295	Kab. Kotabaru		18.949.136	2.103.140	1.900.000	2.489.381	37.598.350
296	Kab. Tabalong		41.581.269	3.300.968	120.000	2.662.218	20.703.408
297	Kab. Tanah Laut		11.395.757	1.500.000	2.704.891	3.123.750	37.508.881
298	Kab. Tapin		19.470.367	2.785.604	3.026.989		17.326.875
299	Kota Banjarbaru		10.140.979	2.516.726	1.600.000	2.769.213	16.177.138
300	Kota Banjarmasin		30.036.855		1.569.803	1.740.203	22.397.419



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
289	Provinsi Kalimantan Selatan		26.535.146	7.776.595		34.311.741
290	Kab. Banjar	6.305.938	14.098.226	6.122.176	1.439.923	27.966.263
291	Kab. Barito Kuala	6.245.082	3.430.639	3.235.077	1.040.000	13.950.798
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	5.528.055	15.420.498	1.233.146	1.085.159	23.266.858
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	5.099.999	6.999.999	1.926.269	306.000	14.332.267
294	Kab. Hulu Sungai Utara	4.723.999	12.557.270	2.500.000	1.276.700	21.057.969
295	Kab. Kotabaru	4.499.999		3.016.572	1.377.700	8.894.271
296	Kab. Tabalong	8.959.999	15.049.999	816.593	1.221.500	26.048.091
297	Kab. Tanah Laut	3.274.999	8.999.999	2.540.456	1.230.700	16.046.154
298	Kab. Tapin	1.519.999	11.483.508	1.198.907	1.088.197	15.290.611
299	Kota Banjarbaru	2.682.015	15.877.252	1.351.091	600.000	20.510.358
300	Kota Banjarmasin	1.838.999		1.889.307	408.000	4.136.306



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	7.500.000	1.557.377			92.966.973
290	Kab. Banjar	2.923.347	977.080	1.377.475		72.506.234
291	Kab. Barito Kuala	2.890.875	1.176.130			54.299.565
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.366.287	1.105.625	2.700.415		74.295.672
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.358.403	466.944		1.500.000	77.865.487
294	Kab. Hulu Sungai Utara	2.891.642	1.190.159		1.909.829	63.836.702
295	Kab. Kotabaru	1.762.653	1.631.042	2.158.692		77.486.665
296	Kab. Tabalong	1.827.224	1.163.119	2.102.533		99.508.830
297	Kab. Tanah Laut	3.946.045	448.770	2.064.208	2.000.000	80.738.456
298	Kab. Tapin	3.879.071	924.568	1.869.181		64.573.266
299	Kota Banjarbaru	1.327.597	674.589	1.885.000		57.601.600
300	Kota Banjarmasin	949.386	555.020			61.384.992



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
301	Kab. Balangan	6.104.972	2.320.480			1.983.337	
302	Kab. Tanah Bumbu	17.707.835	11.641.880			1.558.182	10.590.298
303	Provinsi Kalimantan Timur			55.023.088	5.060.811		225.000
304	Kab. Berau	5.070.755	1.597.700			1.738.573	
305	Kab. Kutai Kartanegara	17.716.844	14.664.040			3.384.213	1.325.000
306	Kab. Kutai Barat	4.466.909	1.990.721			958.304	
307	Kab. Kutai Timur	7.512.491	2.645.456			2.275.450	200.000
308	Kab. Paser	6.737.364	9.636.610			1.840.650	1.675.000
309	Kota Balikpapan	14.962.146	3.948.500			4.593.083	
310	Kota Bontang	1.550.273	1.911.932			719.299	
311	Kota Samarinda	4.235.148	2.204.300			1.500.357	
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.000.000	2.069.575			200.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
301	Kab. Balangan		10.408.789	4.040.793	2.341.817		17.910.194
302	Kab. Tanah Bumbu		41.498.195	2.817.380	1.000.000		41.291.278
303	Provinsi Kalimantan Timur		60.308.899				28.244.023
304	Kab. Berau		8.407.028	1.395.227	2.424.003		37.681.069
305	Kab. Kutai Kartanegara		37.090.097			1.389.289	35.900.705
306	Kab. Kutai Barat		7.415.934	2.608.500	2.510.714		39.069.683
307	Kab. Kutai Timur		12.633.397	1.816.328	2.415.513		29.129.075
308	Kab. Paser		19.889.624	2.017.579		3.123.750	36.902.746
309	Kota Balikpapan		23.503.729			1.413.831	15.260.990
310	Kota Bontang		4.181.504	750.000	1.050.000		10.421.450
311	Kota Samarinda		7.939.805	1.366.380	2.888.710	2.185.254	16.409.025
312	Kab. Penajam Paser Utara		3.269.575	1.403.413			27.056.678



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
301	Kab. Balangan	15.537.249	11.164.423	1.289.054	1.090.410	29.081.136
302	Kab. Tanah Bumbu	4.949.999	15.208.899	3.107.944	1.129.300	24.396.142
303	Provinsi Kalimantan Timur		9.109.522	268.949		9.378.471
304	Kab. Berau	4.702.499	4.749.999	4.049.838	979.252	14.481.588
305	Kab. Kutai Kartanegara	5.280.699	17.577.308	2.617.295	1.153.468	26.628.770
306	Kab. Kutai Barat	6.531.213	3.556.306	3.090.577	1.130.000	14.308.096
307	Kab. Kutai Timur	5.125.078	8.262.481	2.292.209	1.053.814	16.733.582
308	Kab. Paser	6.079.999	4.536.134	1.891.310	1.195.506	13.702.949
309	Kota Balikpapan	2.720.437	1.983.366	2.767.592	1.256.250	8.727.645
310	Kota Bontang	5.411.133	1.518.750	1.847.264	1.064.291	9.841.438
311	Kota Samarinda	6.857.506		3.282.943	1.033.000	11.173.449
312	Kab. Penajam Paser Utara	6.602.499	1.227.145		1.078.380	8.908.024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
301	Kab. Balangan	918.797				64.701.526
302	Kab. Tanah Bumbu	2.654.401	1.351.871	2.207.229		117.216.496
303	Provinsi Kalimantan Timur	11.400.000	10.119.645			119.451.038
304	Kab. Berau	1.353.148	1.083.099			66.825.162
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.657.070	689.698	2.585.533		107.941.162
306	Kab. Kutai Barat	2.547.064	1.208.957			69.668.948
307	Kab. Kutai Timur	2.799.711	1.574.918			67.102.524
308	Kab. Paser	2.729.536	1.063.457			79.429.641
309	Kota Balikpapan		1.154.344		19.575.748	69.636.287
310	Kota Bontang	835.067	699.251	2.575.000		30.353.710
311	Kota Samarinda	1.182.011	1.023.653			44.168.287
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.674.521	1.587.004			43.899.215



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
313	Kab. Mahakam Ulu	2.270.021	1.330.608				
314	Provinsi Sulawesi Utara			36.151.470	1.658.389		
315	Kab. Bolaang Mongondow	4.926.225	8.297.027			1.038.337	
316	Kab. Minahasa	8.617.011	3.430.000			5.041.776	350.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	9.810.891	4.575.163			963.298	200.000
318	Kota Bitung	2.748.669	1.739.730			1.767.053	
319	Kota Manado	12.083.004	1.996.480			1.607.357	
320	Kab. Kepulauan Talaud	3.506.419	1.092.551			891.720	
321	Kab. Minahasa Selatan	16.694.158	11.006.681			1.532.695	
322	Kota Tomohon	3.704.467	6.677.460			525.877	
323	Kab. Minahasa Utara	5.769.152	2.071.700			1.606.857	
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Bi	6.249.687	2.560.790			393.310	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
313	Kab. Mahakam Ulu		3.600.629	1.729.752	1.329.004		
314	Provinsi Sulawesi Utara		37.809.859				21.054.389
315	Kab. Bolaang Mongondow		14.261.589	2.117.427	1.197.759		16.996.853
316	Kab. Minahasa		17.438.787	1.522.383	650.000	2.967.654	19.462.681
317	Kab. Kepulauan Sangihe	15.000.000	30.549.352		845.787	3.809.726	21.381.125
318	Kota Bitung		6.255.452	959.503	2.574.830	3.488.280	15.487.023
319	Kota Manado		15.686.841	2.087.695			13.005.056
320	Kab. Kepulauan Talaud		5.490.690		2.727.067		6.000.000
321	Kab. Minahasa Selatan		29.233.534	2.597.844	881.481		20.279.632
322	Kota Tomohon		10.907.804	1.684.022	1.334.709	2.977.973	15.598.570
323	Kab. Minahasa Utara		9.447.709	1.965.412	1.330.893	2.941.256	13.612.445
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Bi		9.428.787	500.000			13.682.254



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
313	Kab. Mahakam Ulu	5.000.130		5.903.412	1.136.317	12.039.859
314	Provinsi Sulawesi Utara		55.914.379	3.310.500		59.224.879
315	Kab. Bolaang Mongondow	33.249.999	28.139.211	1.785.376	1.301.869	64.476.455
316	Kab. Minahasa	2.446.599	1.041.828	3.857.351	1.147.000	8.492.778
317	Kab. Kepulauan Sangihe	2.499.999	3.038.350	3.556.148	1.020.600	10.115.097
318	Kota Bitung	23.171.632		3.274.315	1.050.433	27.496.380
319	Kota Manado	10.459.344		4.500.000	1.408.620	16.367.964
320	Kab. Kepulauan Talaud	2.221.947	9.940.591	3.077.261	1.193.100	16.432.899
321	Kab. Minahasa Selatan	28.499.999	949.999	1.718.957	973.698	32.142.653
322	Kota Tomohon	224.999		1.222.187	1.306.719	2.753.905
323	Kab. Minahasa Utara	4.299.999		5.703.883	1.525.000	11.528.882
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Bi	3.804.369	1.264.387	2.697.444	1.251.133	9.017.333



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
313	Kab. Mahakam Ulu	853.933				19.553.177
314	Provinsi Sulawesi Utara	14.250.000	14.499.901	2.681.399		149.520.427
315	Kab. Bolaang Mongondow	4.999.994	1.613.744		4.999.999	110.663.820
316	Kab. Minahasa	2.947.064	1.384.988	1.796.252		56.662.587
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.391.895	3.629.302	3.909.787	7.058.750	82.690.821
318	Kota Bitung	926.504	1.048.645	2.430.131		60.666.748
319	Kota Manado	870.113			2.000.000	50.017.669
320	Kab. Kepulauan Talaud	1.327.597	2.437.424	2.320.554		36.736.231
321	Kab. Minahasa Selatan	2.947.064	1.846.340	3.846.013		93.774.561
322	Kota Tomohon	1.876.889	906.807	3.652.432		41.693.111
323	Kab. Minahasa Utara	1.762.653	1.497.390	2.436.875		46.523.515
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang B	999.354	1.570.460		2.000.000	37.198.188



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
325	Kota Kotamobagu	5.554.588	3.420.100			209.532	225.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utar	5.226.509	6.386.330			3.624.491	225.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	7.621.089	4.573.870				
328	Kab. Bolaang Mongondow Timu	10.268.147	6.671.150			680.857	
329	Kab. Bolaang Mongondow Sela	4.063.938	3.723.800			1.491.676	225.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah			51.553.925	3.271.744		
331	Kab. Banggai	4.642.603	3.629.010				
332	Kab. Banggai Kepulauan	9.511.015	5.752.212			532.017	2.225.000
333	Kab. Buol	11.846.293	9.720.890			1.844.809	
334	Kab. Toli-Toli	11.703.265	9.421.270			940.297	
335	Kab. Donggala	3.924.531	8.963.389			1.967.514	
336	Kab. Morowali	8.573.192	3.211.649			682.995	270.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
325	Kota Kotamobagu		9.409.220		2.933.764	3.600.503	11.174.939
326	Kab. Bolaang Mongondow Utar		15.462.330	2.606.379	1.426.474		17.125.172
327	Kab. Minahasa Tenggara		12.194.959	1.555.826	1.301.452		24.166.068
328	Kab. Bolaang Mongondow Timu		17.620.154	2.183.213	957.802		20.269.686
329	Kab. Bolaang Mongondow Sela		9.504.414	2.159.252	2.578.494		21.271.447
330	Provinsi Sulawesi Tengah		54.825.669				34.873.881
331	Kab. Banggai		8.271.613	1.965.600	3.217.420		29.013.910
332	Kab. Banggai Kepulauan		18.020.244				23.649.043
333	Kab. Buol		23.411.992				24.419.423
334	Kab. Toli-Toli		22.064.832	1.844.097	3.009.623	3.262.144	25.849.448
335	Kab. Donggala		14.855.434	2.415.516	3.397.483		30.798.231
336	Kab. Morowali		12.737.836	1.712.809	2.625.137		20.447.566



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
325	Kota Kotamobagu	5.735.324		1.178.746	1.272.098	8.186.168
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.802.499	33.249.999	2.473.384	1.270.110	39.795.992
327	Kab. Minahasa Tenggara	2.479.670		2.091.517	1.584.801	6.155.988
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.393.259		3.328.329	1.196.806	10.918.394
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.599.999	2.199.999	2.201.495	1.450.000	9.451.493
330	Provinsi Sulawesi Tengah	2.614.836	70.251.270	281.909		73.148.015
331	Kab. Banggai	5.442.049	4.407.507	2.999.713	1.653.000	14.502.269
332	Kab. Banggai Kepulauan	20.679.999	9.999.999	4.287.371	1.571.720	36.539.089
333	Kab. Buol	3.060.149	9.948.355	3.791.092	1.576.319	18.375.915
334	Kab. Toli-Toli	13.185.587		3.914.477	1.475.720	18.575.784
335	Kab. Donggala	13.929.999	18.372.627	4.968.659	2.189.211	39.460.496
336	Kab. Morowali	7.007.760		2.633.453	1.467.802	11.109.015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
325	Kota Kotamobagu	1.424.366	1.561.698			38.290.658
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.340.141	1.207.437	2.696.340		82.660.265
327	Kab. Minahasa Tenggara	1.876.889	1.585.373	2.571.119		51.407.674
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.327.597	1.199.594	1.925.793	1.000.000	57.402.233
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.327.597	1.416.677			47.709.374
330	Provinsi Sulawesi Tengah	17.000.000	8.698.837	1.583.114		190.129.516
331	Kab. Banggai	2.765.599	1.272.679	2.508.410		63.517.500
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.230.182	1.348.094			81.786.652
333	Kab. Buol	1.379.061	918.976	1.892.603		70.397.970
334	Kab. Toli-Toli	2.574.573	919.908	2.960.609		81.061.018
335	Kab. Donggala	7.219.761	1.901.329	2.078.076		102.126.326
336	Kab. Morowali	2.294.479	1.118.382	2.847.373		54.892.597



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
337	Kab. Poso	10.564.933	19.883.261			2.847.802	2.225.000
338	Kota Palu	8.110.164	3.463.615			386.356	
339	Kab. Parigi Moutong	23.108.163	19.559.904			2.339.859	
340	Kab. Tojo Una Una	17.499.740	15.678.493			856.635	
341	Kab. Sigi	2.135.720	2.607.842			1.839.186	532.500
342	Kab. Banggai Laut	3.641.439	1.580.850				
343	Kab. Morowali Utara	8.936.286	6.740.800				
344	Provinsi Sulawesi Selatan			51.080.499	3.184.109		
345	Kab. Bantaeng	8.703.843	9.643.770			1.976.387	250.000
346	Kab. Barru	2.271.603	1.610.060			1.071.790	225.000
347	Kab. Bone	57.488.682	10.425.200			1.756.857	
348	Kab. Bulukumba	8.534.598	1.566.300				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
337	Kab. Poso		35.520.996	2.984.219	1.498.031		36.332.617
338	Kota Palu		11.960.135	1.489.092		6.615.000	20.672.733
339	Kab. Parigi Moutong	12.566.784	57.574.710	2.761.882	3.902.266		12.579.999
340	Kab. Tojo Una Una		34.034.868	2.774.608	3.017.841		29.053.053
341	Kab. Sigi		7.115.248	2.760.424			24.771.504
342	Kab. Banggai Laut		5.222.289				13.061.485
343	Kab. Morowali Utara		15.677.086				28.359.566
344	Provinsi Sulawesi Selatan		54.264.608				40.736.615
345	Kab. Bantaeng		20.574.000	1.480.608	2.423.356	3.123.750	18.383.781
346	Kab. Barru		5.178.453	1.290.000	2.817.827		12.491.440
347	Kab. Bone		69.670.739	1.691.931	1.862.476		32.490.468
348	Kab. Bulukumba		10.100.898	2.897.503	3.038.571	2.756.250	26.535.848



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
337	Kab. Poso	17.937.776	8.692.552	4.969.382	1.497.748	33.097.458
338	Kota Palu	21.379.722	25.073.545	2.861.990	1.616.271	50.931.528
339	Kab. Parigi Moutong	10.725.098	6.688.407	4.880.242	2.352.869	24.646.616
340	Kab. Tojo Una Una	4.827.741	18.540.922	3.458.858	1.406.719	28.234.240
341	Kab. Sigi	11.569.800	822.731	4.295.768	2.140.490	18.828.789
342	Kab. Banggai Laut	4.939.999	1.409.165	1.993.073	1.701.926	10.044.163
343	Kab. Morowali Utara	13.868.484	12.051.256	4.800.692	1.467.802	32.188.234
344	Provinsi Sulawesi Selatan		20.646.224	119.809		20.766.033
345	Kab. Bantaeng	34.999.999	33.777.580	3.632.758	1.649.700	74.060.037
346	Kab. Barru	18.049.999	15.199.999	2.229.573	511.521	35.991.092
347	Kab. Bone	3.499.999	5.859.499	5.337.106	1.681.900	16.378.504
348	Kab. Bulukumba	6.909.999		4.124.247	1.650.000	12.684.246



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
337	Kab. Poso	7.934.480	1.535.480	2.517.232	1.093.600	122.514.113
338	Kota Palu	3.832.533	773.580			96.274.601
339	Kab. Parigi Moutong	5.162.467	1.054.143	1.765.554	11.325.000	120.772.637
340	Kab. Tojo Una Una	4.099.141	949.678	2.806.239		104.969.668
341	Kab. Sigi	8.742.827	628.401	2.709.174		65.556.367
342	Kab. Banggai Laut	1.645.263	916.155	3.044.217		33.933.572
343	Kab. Morowali Utara	2.443.182	1.249.471	2.072.165		81.989.704
344	Provinsi Sulawesi Selatan	14.250.000	13.241.765	1.617.732		144.876.753
345	Kab. Bantaeng	1.730.182	1.398.036	2.695.094	8.400.000	134.268.844
346	Kab. Barru	1.762.653	1.407.133	2.436.798		63.375.396
347	Kab. Bone	7.978.876	1.848.374	2.075.275	1.403.727	135.400.370
348	Kab. Bulukumba	3.317.449	1.863.582	2.701.056		65.895.403



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
349	Kab. Enrekang	23.661.321	5.947.798			1.933.286	10.721.799
350	Kab. Gowa	25.518.060	8.359.869			1.940.646	
351	Kab. Jeneponto	45.956.293	19.303.340			1.761.199	1.292.100
352	Kab. Luwu	50.918.058	15.537.679			4.379.070	225.000
353	Kab. Luwu Utara	8.291.480	13.597.730			2.025.678	10.350.639
354	Kab. Maros	3.949.192	1.626.160			310.000	225.000
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	7.659.074	7.960.670			1.303.857	406.000
356	Kota Palopo	9.193.151	2.912.650			836.000	860.000
357	Kab. Luwu Timur	4.603.659	3.347.720				
358	Kab. Pinrang	3.031.383	1.905.700			1.125.757	500.000
359	Kab. Sinjai	8.267.241	7.949.260			1.423.188	
360	Kab. Kepulauan Selayar	10.725.952	11.283.804			3.205.952	341.780



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
349	Kab. Enrekang		42.264.204	2.781.673	2.868.881		25.449.148
350	Kab. Gowa		35.818.575	2.055.356	3.057.022	2.756.250	46.691.011
351	Kab. Jeneponto		68.312.932		1.572.143		19.434.316
352	Kab. Luwu		71.059.807	2.861.460	3.342.832		52.893.453
353	Kab. Luwu Utara		34.265.527		2.589.157		31.065.642
354	Kab. Maros		6.110.352	4.255.033	2.400.000	2.622.609	24.434.170
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan		17.329.601	3.014.876	1.347.902		17.703.938
356	Kota Palopo		13.801.801	2.375.646	1.800.000	2.878.362	14.444.775
357	Kab. Luwu Timur		7.951.379	2.770.242	2.542.278		31.611.603
358	Kab. Pinrang		6.562.840	2.918.129	2.100.000	2.756.250	23.830.672
359	Kab. Sinjai		17.639.689	1.450.000	2.838.074	2.756.250	30.908.114
360	Kab. Kepulauan Selayar	14.000.000	39.557.488	2.802.115	3.016.443	2.756.250	26.908.185



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
349	Kab. Enrekang	6.749.999	4.649.299	2.125.252	1.651.000	15.175.550
350	Kab. Gowa	4.201.353	31.659.130	4.339.829	1.734.168	41.934.480
351	Kab. Jenepono	3.660.770	10.552.992	5.326.262	1.712.987	21.253.011
352	Kab. Luwu	6.641.579	5.622.222	3.532.005	1.728.951	17.524.757
353	Kab. Luwu Utara	5.049.999	3.196.199	3.709.895	1.660.000	13.616.093
354	Kab. Maros	5.749.999	14.569.999	2.451.393	1.647.000	24.418.391
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	5.699.999	3.393.485	3.070.723	1.599.525	13.763.732
356	Kota Palopo	9.195.750	17.495.716	2.884.737	1.510.000	31.086.203
357	Kab. Luwu Timur	2.817.299	4.079.114	2.548.343	1.667.000	11.111.756
358	Kab. Pinrang	6.179.999	4.881.636	3.884.184	1.635.168	16.580.987
359	Kab. Sinjai	3.964.091	36.935.473	3.186.269	1.368.875	45.454.708
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.672.972	1.948.748	2.206.388	700.000	6.528.108



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
349	Kab. Enrekang	4.100.704	1.277.644	2.994.627	1.300.000	98.212.431
350	Kab. Gowa	3.293.733	1.485.104			137.091.531
351	Kab. Jeneponto	2.511.647	1.599.458			114.683.507
352	Kab. Luwu	4.664.639	1.415.253	1.717.898	2.305.858	157.785.957
353	Kab. Luwu Utara	4.163.573	1.344.855	2.544.604		89.589.451
354	Kab. Maros	4.632.483	1.118.429	2.648.440		72.639.907
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2.229.808	2.206.253	2.700.420		60.296.530
356	Kota Palopo	2.674.808	1.528.519	1.714.551		72.304.665
357	Kab. Luwu Timur	3.511.242	1.376.623			60.875.123
358	Kab. Pinrang	5.302.948	1.417.648	1.939.259		63.408.733
359	Kab. Sinjai	3.891.757	1.765.720	2.133.572	2.352.916	111.190.800
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.076.951	2.126.472	2.674.626	1.000.000	89.446.638



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					Perpustakaan Daerah
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
361	Kab. Sidenreng Rappang	52.948.847	23.697.967			1.878.781	
362	Kab. Soppeng	27.409.103	7.254.513			1.671.229	225.000
363	Kab. Takalar	6.529.993	1.678.560			1.649.657	
364	Kab. Tana Toraja	3.345.428	9.804.380				225.000
365	Kab. Wajo	4.133.418	21.187.720			2.186.167	225.000
366	Kota Pare-pare	5.211.973	4.610.122				
367	Kota Makassar	39.795.775	9.385.830			2.930.314	
368	Kab. Toraja Utara	6.780.286	11.948.296				
369	Provinsi Sulawesi Tenggara			72.371.232	3.129.684		
370	Kab. Buton	9.512.154	24.869.170			1.882.726	
371	Kab. Konawe	52.632.685	14.033.310			2.393.264	
372	Kab. Kolaka	18.892.493	15.576.276			2.249.645	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
361	Kab. Sidenreng Rappang		78.525.595		2.894.744	2.756.250	35.422.750
362	Kab. Soppeng		36.559.845		2.000.000		26.049.698
363	Kab. Takalar		9.858.210	1.632.004	2.962.268		19.937.523
364	Kab. Tana Toraja		13.374.808	3.125.515	2.400.000		26.426.139
365	Kab. Wajo		27.732.305	2.593.940	1.866.000	3.123.750	27.507.038
366	Kota Pare-pare		9.822.095	1.563.796	2.707.413	2.622.609	14.116.366
367	Kota Makassar		52.111.919			3.262.144	11.688.435
368	Kab. Toraja Utara		18.728.582	2.464.387	2.727.152	2.808.894	19.125.601
369	Provinsi Sulawesi Tenggara		75.500.916				22.237.408
370	Kab. Buton		36.264.050				18.830.618
371	Kab. Konawe		69.059.259				20.617.370
372	Kab. Kolaka		36.718.414	2.210.945		3.262.144	25.112.323



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
361	Kab. Sidenreng Rappang	4.999.999	9.967.654	3.240.014	1.652.000	19.859.667
362	Kab. Soppeng	6.411.578	5.276.496	2.150.880	1.713.300	15.552.254
363	Kab. Takalar	6.275.606	36.724.413	3.555.397	765.000	47.320.416
364	Kab. Tana Toraja	6.939.436	22.148.006	3.087.165	1.665.000	33.839.607
365	Kab. Wajo	6.385.220	7.447.249	3.051.000	1.730.725	18.614.194
366	Kota Pare-pare	2.189.367	14.053.054	2.980.573	1.817.500	21.040.494
367	Kota Makassar	7.711.149		8.544.062	757.898	17.013.109
368	Kab. Toraja Utara	6.693.980	3.326.201	2.721.000	1.864.486	14.605.667
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.749.999	22.367.236	335.959		27.453.194
370	Kab. Buton	3.825.674	1.399.999	2.965.861	1.647.718	9.839.252
371	Kab. Konawe	9.999.999	21.599.320	3.440.135	1.479.590	36.519.044
372	Kab. Kolaka	3.085.506		4.610.187	1.557.986	9.253.679



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
361	Kab. Sidenreng Rappang	4.509.796	894.685			144.863.487
362	Kab. Soppeng	3.728.516	1.064.639	2.064.167		87.019.119
363	Kab. Takalar	4.130.090	1.607.156	2.375.379		89.823.046
364	Kab. Tana Toraja	3.760.525	1.118.509		2.000.000	86.045.103
365	Kab. Wajo	5.981.294	1.306.681	2.694.082		91.419.284
366	Kota Pare-pare	1.110.069	916.180	1.860.687		55.759.709
367	Kota Makassar	1.488.664	863.311			86.427.582
368	Kab. Toraja Utara	3.382.393	926.286			64.768.962
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	17.500.000	6.620.217			149.311.735
370	Kab. Buton	1.545.125	1.955.338			68.434.383
371	Kab. Konawe	6.932.189	1.201.593	2.858.792	4.500.000	141.688.247
372	Kab. Kolaka	3.599.648	1.442.974			81.600.127



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
373	Kab. Muna	27.503.534	20.389.326			1.983.992	
374	Kota Kendari	24.807.267	14.695.600			1.095.271	225.000
375	Kota Bau-bau	5.894.499	2.841.330			1.183.517	
376	Kab. Konawe Selatan	9.175.043	10.295.239			8.633.161	2.200.000
377	Kab. Bombana	3.447.105	1.716.255			2.005.337	225.000
378	Kab. Wakatobi	16.779.922	13.624.545			1.681.067	1.325.000
379	Kab. Kolaka Utara	8.487.721	5.387.773			664.355	2.022.500
380	Kab. Konawe Utara	17.063.682	6.118.550			1.923.670	
381	Kab. Buton Utara	4.956.036	5.611.020			3.158.496	
382	Kab. Konawe Kepulauan	7.035.279	6.647.120			1.706.857	
383	Kab. Kolaka Timur	10.947.667	6.424.250			2.389.709	
384	Kab. Muna Barat	7.303.681	16.602.080				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
373	Kab. Muna		49.876.852		1.529.280	1.498.371	26.121.938
374	Kota Kendari		40.823.138			3.123.750	18.681.232
375	Kota Bau-bau		9.919.346	1.737.650		3.238.196	13.221.601
376	Kab. Konawe Selatan		30.303.443	2.222.218	1.184.597		36.294.221
377	Kab. Bombana		7.393.697				16.515.710
378	Kab. Wakatobi	15.193.263	48.603.797	1.816.176	600.000		18.034.039
379	Kab. Kolaka Utara		16.562.349	2.166.195	2.407.134		22.053.825
380	Kab. Konawe Utara		25.105.902	2.733.120	600.000		23.114.176
381	Kab. Buton Utara		13.725.552	1.245.655	1.138.879		17.752.272
382	Kab. Konawe Kepulauan		15.389.256		1.050.000		12.193.805
383	Kab. Kolaka Timur		19.761.626		1.121.893		27.443.571
384	Kab. Muna Barat		23.905.761	775.130	1.425.747		21.022.435



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
373	Kab. Muna	11.008.225	16.400.006	2.664.852	1.395.600	31.468.683
374	Kota Kendari	2.390.499	13.279.499	2.929.837	1.534.500	20.134.335
375	Kota Bau-bau	7.884.484		2.083.111	477.000	10.444.595
376	Kab. Konawe Selatan	7.649.999	18.999.999	5.129.068	1.491.720	33.270.786
377	Kab. Bombana	3.122.659	8.377.469	2.420.016	1.419.141	15.339.285
378	Kab. Wakatobi	30.675.514	5.629.440	4.000.000	1.467.802	41.772.756
379	Kab. Kolaka Utara	1.861.763	3.431.727	3.016.293	1.058.000	9.367.783
380	Kab. Konawe Utara	6.223.310	2.212.452	2.514.499	1.237.000	12.187.261
381	Kab. Buton Utara	3.103.083	5.562.872	1.401.932	1.198.268	11.266.155
382	Kab. Konawe Kepulauan	2.144.899	2.206.621	4.077.479	1.430.700	9.859.699
383	Kab. Kolaka Timur	5.705.572	3.406.611	3.022.488	1.254.338	13.389.009
384	Kab. Muna Barat	3.834.999	3.939.853	2.146.060	1.065.000	10.985.912



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
373	Kab. Muna	7.948.148	1.712.305	3.408.263		123.563.840
374	Kota Kendari	1.762.653	1.157.108	2.742.546		88.424.762
375	Kota Bau-bau	1.182.011	1.282.761			41.026.160
376	Kab. Konawe Selatan	4.228.516	1.040.148			108.543.929
377	Kab. Bombana	1.327.597	1.714.798		15.000.000	57.291.087
378	Kab. Wakatobi	1.182.011	1.229.101			113.237.880
379	Kab. Kolaka Utara	1.023.717	1.326.588			54.907.591
380	Kab. Konawe Utara	5.145.125	1.314.555	3.012.389	3.000.000	76.212.528
381	Kab. Buton Utara	1.327.597	1.499.492			47.955.602
382	Kab. Konawe Kepulauan	1.206.607	2.028.488			41.727.855
383	Kab. Kolaka Timur	2.139.143	600.348	3.037.166		67.492.756
384	Kab. Muna Barat	5.586.166	1.499.492	2.907.267		68.107.910



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
385	Kab. Buton Tengah	3.341.881	6.559.619				
386	Kab. Buton Selatan	6.135.159	17.959.400				
387	Provinsi Bali			8.105.149	1.000.000		
388	Kab. Badung						
389	Kab. Bangli	7.756.955	2.120.700			907.124	
390	Kab. Buleleng	34.186.033	7.875.300			3.677.703	1.194.400
391	Kab. Gianyar	2.669.178	1.925.510			662.774	225.000
392	Kab. Jembrana	5.592.206	1.735.850				325.000
393	Kab. Karangasem	6.366.338	1.426.100			1.923.857	
394	Kab. Klungkung	3.384.586	1.649.960				558.250
395	Kab. Tabanan	4.525.624	1.581.670			1.276.396	421.043
396	Kota Denpasar		1.000.000			292.735	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
385	Kab. Buton Tengah		9.901.500	909.548	1.233.957		16.239.206
386	Kab. Buton Selatan		24.094.559	1.268.214	1.200.000		12.193.805
387	Provinsi Bali		9.105.149				19.030.735
388	Kab. Badung						15.745.249
389	Kab. Bangli		10.784.779		2.943.804		25.804.618
390	Kab. Buleleng		46.933.436	2.764.757	1.400.000	3.107.005	22.068.738
391	Kab. Gianyar		5.482.462	2.050.000	1.445.517	3.098.025	15.192.683
392	Kab. Jembrana		7.653.056	750.000			24.814.622
393	Kab. Karangasem		9.716.295		2.211.096		30.190.038
394	Kab. Klungkung		5.592.796	2.085.634			15.475.290
395	Kab. Tabanan		7.804.733	2.175.745	2.054.661		23.192.526
396	Kota Denpasar		1.292.735		998.891		16.039.646



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
385	Kab. Buton Tengah	4.400.451	4.000.999	2.137.748	1.444.819	11.984.017
386	Kab. Buton Selatan	4.683.689	2.389.472	2.792.723	1.467.802	11.333.686
387	Provinsi Bali		5.937.499			5.937.499
388	Kab. Badung	3.864.109	3.209.219	360.967	1.020.800	8.455.095
389	Kab. Bangli	4.987.499	9.351.846	2.694.491	974.921	18.008.757
390	Kab. Buleleng	1.709.999	5.683.400	5.718.547	167.555	13.279.501
391	Kab. Gianyar	2.677.549		3.834.750	1.002.700	7.514.999
392	Kab. Jembrana	1.382.841	5.393.147	4.118.696	861.100	11.755.784
393	Kab. Karangasem	5.449.999	2.981.999	2.958.094	911.667	12.301.759
394	Kab. Klungkung	3.660.770	4.764.642	3.146.925	582.622	12.154.959
395	Kab. Tabanan	5.321.639	22.258.761	2.850.000	1.168.307	31.598.707
396	Kota Denpasar	474.999	9.432.499	2.108.379	1.347.374	13.363.251



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
385	Kab. Buton Tengah	1.327.597	1.932.645	3.618.341		47.146.811
386	Kab. Buton Selatan	3.386.894	2.469.700	2.897.581		58.844.439
387	Provinsi Bali	11.000.000	1.580.786			46.654.169
388	Kab. Badung	1.413.637	531.618			26.145.599
389	Kab. Bangli	2.799.711			1.000.000	61.341.669
390	Kab. Buleleng	2.620.384	1.120.895	2.155.060		95.449.776
391	Kab. Gianyar	2.010.558	885.846	2.745.874		40.425.964
392	Kab. Jembrana	2.012.653	1.719.509	1.487.966		50.193.590
393	Kab. Karangasem	926.250	1.345.516			56.690.954
394	Kab. Klungkung	1.182.011				36.490.690
395	Kab. Tabanan	2.947.064	637.784	2.203.386		72.614.606
396	Kota Denpasar	853.933				32.548.456



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat			45.589.906	2.834.344		
398	Kab. Bima	29.796.000	11.817.187			4.298.521	225.000
399	Kab. Dompu	6.533.161	5.074.787			1.561.329	2.225.000
400	Kab. Lombok Barat	29.104.866	6.843.450			4.500.990	729.278
401	Kab. Lombok Tengah	14.133.680	10.270.900			3.244.533	2.632.119
402	Kab. Lombok Timur	23.961.093	15.348.756			3.601.081	1.543.000
403	Kab. Sumbawa	30.728.117	14.838.150			2.383.793	
404	Kota Mataram	17.155.431	2.522.223			2.734.130	
405	Kota Bima	5.410.027	4.117.200			4.240.412	225.000
406	Kab. Sumbawa Barat	4.250.671	2.431.300			2.730.373	
407	Kab. Lombok Utara	16.950.308	5.433.627			494.014	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur			43.449.463	1.068.945		225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		48.424.250				28.994.437
398	Kab. Bima	13.422.722	59.559.430				24.375.092
399	Kab. Dompu		15.394.277	1.421.423	3.053.315		19.197.649
400	Kab. Lombok Barat		41.178.584	1.730.779	4.409.492		20.517.651
401	Kab. Lombok Tengah	13.728.091	44.009.323	3.690.464	2.350.000		19.141.518
402	Kab. Lombok Timur		44.453.930		500.000	5.512.500	24.103.768
403	Kab. Sumbawa		47.950.060	1.985.022		3.123.750	20.897.966
404	Kota Mataram		22.411.784		3.043.766	5.245.218	12.460.846
405	Kota Bima		13.992.639	1.845.462	2.763.922	3.262.144	11.887.968
406	Kab. Sumbawa Barat		9.412.344		2.665.993		15.623.197
407	Kab. Lombok Utara		22.877.949	1.691.174			14.011.349
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur		44.743.408				50.246.034



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		21.415.680	467.500		21.883.180
398	Kab. Bima	2.546.719	15.179.608	5.366.921	1.406.719	24.499.967
399	Kab. Dompu	26.116.543	13.499.999	3.993.181	1.562.200	45.171.923
400	Kab. Lombok Barat	58.932.551	22.436.508	5.397.135	2.223.671	88.989.865
401	Kab. Lombok Tengah	6.175.955	10.038.689	5.139.432	2.221.771	23.575.847
402	Kab. Lombok Timur	35.155.446	21.756.262	19.276.237	2.159.190	78.347.135
403	Kab. Sumbawa	34.850.106	22.233.093	4.576.744	2.205.274	63.865.217
404	Kota Mataram	3.164.195	20.100.559	2.210.765	2.199.871	27.675.390
405	Kota Bima	18.669.930	2.000.000	1.209.344	1.568.692	23.447.966
406	Kab. Sumbawa Barat	14.371.426	22.287.934	3.049.306	1.646.271	41.354.937
407	Kab. Lombok Utara	30.150.918	85.424.841	2.253.190	1.864.771	119.693.720
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	189.999	20.652.736	81.502		20.924.237



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.500.000	7.006.854			117.808.721
398	Kab. Bima	6.235.615	1.410.022	2.910.898	588.229	119.579.253
399	Kab. Dompu	4.882.306	1.529.886	1.891.450	800.000	93.342.229
400	Kab. Lombok Barat	4.780.351	2.439.866		1.909.829	165.956.417
401	Kab. Lombok Tengah	5.280.250	2.013.740		10.800.000	110.861.142
402	Kab. Lombok Timur	6.746.119	2.374.947			162.038.399
403	Kab. Sumbawa	5.117.245	1.583.043		16.720.000	161.242.303
404	Kota Mataram	3.045.427	1.720.516			75.602.947
405	Kota Bima	1.645.263	1.165.675			60.011.039
406	Kab. Sumbawa Barat	3.749.171	1.802.534		1.882.333	76.490.509
407	Kab. Lombok Utara	3.508.679	1.458.307			163.241.178
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	9.500.000	7.788.708			133.202.387



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
409	Kab. Alor	10.266.061	12.684.369			1.516.988	
410	Kab. Belu	12.244.659	6.692.525			879.691	
411	Kab. Ende	15.819.535	9.333.030			200.000	225.000
412	Kab. Flores Timur	9.641.985	8.587.906			3.944.330	225.000
413	Kab. Kupang	10.878.083	8.296.820			606.186	
414	Kab. Lembata	20.057.204	4.657.800			2.314.330	
415	Kab. Manggarai	6.068.686	8.529.800			2.468.257	
416	Kab. Ngada	6.889.184	5.132.356			2.431.808	
417	Kab. Sikka	14.663.115	17.355.000			1.635.683	225.000
418	Kab. Sumba Barat	12.899.447	6.283.737				
419	Kab. Sumba Timur	14.286.463	8.472.160			1.239.500	
420	Kab. Timor Tengah Selatan	17.218.894	18.950.060			1.974.714	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
409	Kab. Alor		24.467.418	1.870.015	2.563.089		20.461.140
410	Kab. Belu		19.816.875	2.430.503	1.910.000	3.123.750	13.847.803
411	Kab. Ende		25.577.565		451.000		27.938.897
412	Kab. Flores Timur		22.399.221	1.055.785	2.579.006		17.976.653
413	Kab. Kupang	13.272.293	33.053.382		2.781.042		16.793.337
414	Kab. Lembata		27.029.334				17.775.170
415	Kab. Manggarai		17.066.743	2.000.000	1.542.469	3.123.750	27.505.870
416	Kab. Ngada		14.453.348	1.284.344	2.425.796	2.935.930	31.697.314
417	Kab. Sikka		33.878.798	2.081.315		1.837.500	18.413.954
418	Kab. Sumba Barat		19.183.184	1.299.023		3.240.266	15.967.398
419	Kab. Sumba Timur		23.998.123	1.265.482			25.700.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan		38.143.668	1.523.811	1.950.000		32.197.904



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
409	Kab. Alor	6.857.975	19.765.561	6.895.754	1.396.700	34.915.990
410	Kab. Belu	5.999.999		2.082.600	1.422.718	9.505.317
411	Kab. Ende	9.599.999	6.881.999	5.484.416	1.647.718	23.614.132
412	Kab. Flores Timur	10.459.344	21.105.984	3.521.282	1.719.266	36.805.876
413	Kab. Kupang	1.595.999	18.999.999	3.915.660	1.585.780	26.097.438
414	Kab. Lembata	1.560.540	4.312.863	3.600.000	1.719.266	11.192.669
415	Kab. Manggarai	4.499.999		7.305.294	1.615.344	13.420.637
416	Kab. Ngada	8.249.999	1.036.999	2.377.738	1.295.320	12.960.056
417	Kab. Sikka	24.745.130		4.208.740	1.647.718	30.601.588
418	Kab. Sumba Barat	4.999.999	25.041.553	4.558.398	1.647.718	36.247.668
419	Kab. Sumba Timur	6.198.162		6.042.806	1.440.000	13.680.968
420	Kab. Timor Tengah Selatan	5.177.499	967.572	9.093.119	1.585.780	16.823.970



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
409	Kab. Alor	3.400.008	1.595.740	4.402.825	2.250.000	95.926.225
410	Kab. Belu	1.609.423	792.220			53.035.891
411	Kab. Ende	4.076.325	823.831			82.481.750
412	Kab. Flores Timur	3.002.840	1.782.396	2.839.044		88.440.821
413	Kab. Kupang	4.997.879	1.094.196	2.087.971		86.905.245
414	Kab. Lembata	1.826.951	1.177.101	2.597.399		61.598.624
415	Kab. Manggarai	3.601.312	1.118.429			69.379.210
416	Kab. Ngada	3.213.014	613.971		1.550.000	71.133.773
417	Kab. Sikka	3.696.418	1.519.199	2.526.592		94.555.364
418	Kab. Sumba Barat	2.444.002	1.058.779			79.440.320
419	Kab. Sumba Timur	3.913.946	1.655.227	2.274.089		72.487.835
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.322.597	939.192	1.644.476		96.545.618



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
421	Kab. Timor Tengah Utara	4.951.953	9.864.500			373.000	
422	Kota Kupang	9.774.078	6.318.600			477.857	225.000
423	Kab. Rote Ndao	10.860.000	3.181.820			200.000	
424	Kab. Manggarai Barat	7.865.141	12.553.270			573.633	225.000
425	Kab. Nagekeo	6.097.068	2.499.550				
426	Kab. Sumba Barat Daya	30.661.024	31.534.394			200.000	
427	Kab. Sumba Tengah	7.736.641	5.100.555			1.000.629	
428	Kab. Manggarai Timur	8.941.854	8.016.750			1.523.157	375.000
429	Kab. Sabu Raijua	3.368.507	2.366.987			390.226	
430	Kab. Malaka	3.248.410	4.364.946			200.000	10.000.000
431	Provinsi Maluku			29.207.240	1.426.023		
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	7.537.994	7.161.860				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
421	Kab. Timor Tengah Utara		15.189.453	1.659.225			20.868.321
422	Kota Kupang		16.795.535		900.000	2.972.290	35.303.197
423	Kab. Rote Ndao		14.241.820	900.000			12.193.805
424	Kab. Manggarai Barat		21.217.044		958.662		27.172.084
425	Kab. Nagekeo		8.596.618	2.514.074	1.000.000		15.663.363
426	Kab. Sumba Barat Daya		62.395.418	1.893.681			24.949.395
427	Kab. Sumba Tengah		13.837.825	1.988.338			22.098.834
428	Kab. Manggarai Timur		18.856.761	2.286.828			29.477.208
429	Kab. Sabu Raijua		6.125.720	1.100.000			18.490.167
430	Kab. Malaka		17.813.356				12.193.805
431	Provinsi Maluku		30.633.263				27.442.602
432	Kab. Maluku Tenggara Barat		14.699.854	1.985.305	1.177.000		15.435.580



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
421	Kab. Timor Tengah Utara	5.334.999	6.004.999	5.215.310	1.445.718	18.001.026
422	Kota Kupang	9.499.999	17.619.440	7.265.216	1.643.315	36.027.970
423	Kab. Rote Ndao		13.583.843	4.389.150	1.864.000	19.836.993
424	Kab. Manggarai Barat	1.499.999	2.381.046	4.776.470	1.629.900	10.287.415
425	Kab. Nagekeo	7.124.999	14.059.999	1.429.819	1.585.780	24.200.597
426	Kab. Sumba Barat Daya	6.999.999		8.279.826	801.600	16.081.425
427	Kab. Sumba Tengah	4.899.999	9.560.000	1.901.517	1.647.718	18.009.234
428	Kab. Manggarai Timur	16.636.999		2.379.240	1.493.720	20.509.959
429	Kab. Sabu Raijua	8.777.264	10.945.280	2.798.842	228.572	22.749.958
430	Kab. Malaka	7.499.999	18.552.999	3.190.356	1.647.718	30.891.072
431	Provinsi Maluku		32.717.438	268.949		32.986.387
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.549.999	2.797.339	4.094.908	1.287.500	9.729.746



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
421	Kab. Timor Tengah Utara	3.983.074	838.153	1.442.045		61.981.297
422	Kota Kupang	1.054.565	675.968	1.878.868	1.650.000	97.258.393
423	Kab. Rote Ndao	3.863.566	1.419.129	2.161.500		54.616.813
424	Kab. Manggarai Barat	5.553.306	829.719			66.018.230
425	Kab. Nagekeo	3.173.896	1.416.677	2.072.031		58.637.256
426	Kab. Sumba Barat Daya	4.633.969	852.056	1.542.113		112.348.057
427	Kab. Sumba Tengah	2.194.002	858.394			58.986.627
428	Kab. Manggarai Timur	5.553.413	675.764			77.359.933
429	Kab. Sabu Raijua	2.668.698	1.025.226			52.159.769
430	Kab. Malaka	3.817.177	689.698	1.260.950		66.666.058
431	Provinsi Maluku	10.000.000	23.377.214			124.439.466
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	5.337.385	2.327.959	3.594.444		54.287.273



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
433	Kab. Maluku Tengah	34.815.819	26.879.366			1.154.866	725.000
434	Kab. Maluku Tenggara	18.903.306	13.778.399			2.429.602	
435	Kab. Buru	6.027.324	9.915.450			3.384.190	
436	Kota Ambon	7.067.255	6.665.580			1.058.008	225.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	39.352.843	20.422.870			798.946	
438	Kab. Seram Bagian Timur	10.338.757	11.991.313			275.257	12.481.218
439	Kab. Kepulauan Aru	3.353.077	3.358.700			457.164	1.117.750
440	Kota Tual	6.593.444	4.377.616				1.050.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	4.320.175	10.354.905			200.000	
442	Kab. Buru Selatan	3.491.827	8.300.290				210.000
443	Provinsi Papua			23.654.079	1.000.000		
444	Kab. Biak Numfor	3.524.825	3.962.157			272.501	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
433	Kab. Maluku Tengah		63.575.051	2.250.000	1.740.108		25.791.502
434	Kab. Maluku Tenggara		35.111.307	2.350.000	1.503.994		18.504.303
435	Kab. Buru	15.000.000	34.326.964	2.496.367			47.612.220
436	Kota Ambon		15.015.843		300.000	3.423.620	11.743.209
437	Kab. Seram Bagian Barat		60.574.659	1.752.085	700.000		19.727.449
438	Kab. Seram Bagian Timur		35.086.545	1.857.167	1.606.163		16.717.914
439	Kab. Kepulauan Aru		8.286.691				17.710.255
440	Kota Tual		12.021.060	1.641.863	1.431.498	4.151.776	15.238.899
441	Kab. Maluku Barat Daya		14.875.080	2.544.406	1.245.782		32.423.134
442	Kab. Buru Selatan		12.002.117	3.063.071			12.538.104
443	Provinsi Papua		24.654.079				51.356.842
444	Kab. Biak Numfor	18.859.704	26.844.187	2.072.662	1.062.925		20.960.489



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
433	Kab. Maluku Tengah	10.399.999	8.674.608	7.182.196	1.476.718	27.733.521
434	Kab. Maluku Tenggara	9.413.410	8.640.588	3.103.664	639.000	21.796.662
435	Kab. Buru	8.890.443		4.200.000	1.719.266	14.809.709
436	Kota Ambon	6.008.749		4.822.237	1.353.840	12.184.826
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.149.395	7.675.291	3.510.274	1.719.266	15.054.226
438	Kab. Seram Bagian Timur	5.719.999	16.891.808	6.088.987	1.526.719	30.227.513
439	Kab. Kepulauan Aru	997.499	10.585.849	6.681.568	1.355.073	19.619.989
440	Kota Tual	5.491.155	7.174.256	1.729.884	1.770.811	16.166.106
441	Kab. Maluku Barat Daya	4.749.999	1.163.749	2.522.928	1.526.936	9.963.612
442	Kab. Buru Selatan	5.849.999	24.540.783	2.856.324	1.650.000	34.897.106
443	Provinsi Papua	968.999	474.999	237.100		1.681.098
444	Kab. Biak Numfor	4.499.999		4.228.009	1.400.000	10.128.008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
433	Kab. Maluku Tengah	4.410.238	2.068.255	3.618.619	1.525.000	132.712.294
434	Kab. Maluku Tenggara	2.211.556	2.165.267	3.489.983	500.000	87.633.072
435	Kab. Buru	4.313.468	2.243.975	3.731.243		109.533.946
436	Kota Ambon	2.294.479	1.140.359			46.102.336
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.729.536	2.200.412	3.109.566		105.847.933
438	Kab. Seram Bagian Timur	2.729.536	2.838.013	3.865.761		94.928.612
439	Kab. Kepulauan Aru	3.913.946	2.572.275			52.103.156
440	Kota Tual	2.211.556	2.598.120		2.250.000	57.710.878
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.168.688	2.796.072			67.016.774
442	Kab. Buru Selatan	2.975.827	2.402.758	4.094.166		71.973.149
443	Provinsi Papua	16.625.000	34.556.331	5.248.211		134.121.561
444	Kab. Biak Numfor	1.713.728	3.263.948	3.991.245		70.037.192



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
445	Kab. Jayapura	4.159.955	2.460.920				
446	Kab. Jayawijaya	7.163.437	3.732.275				
447	Kab. Merauke	2.877.647	6.577.078				225.000
448	Kab. Mimika	4.893.958	10.581.700				
449	Kab. Nabire	8.791.107	18.834.040				
450	Kab. Paniai	7.594.228	12.891.950				302.503
451	Kab. Puncak Jaya	1.532.936	2.182.815				
452	Kab. Kepulauan Yapen	5.020.048	2.437.685				1.725.000
453	Kota Jayapura	4.844.882	5.714.231				225.000
454	Kab. Sarmi	8.510.910	7.283.275				
455	Kab. Keerom	3.957.583	3.248.030			1.642.881	
456	Kab. Yahukimo	30.551.218	5.736.020				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
445	Kab. Jayapura		6.620.875	1.783.585	2.000.000		15.971.960
446	Kab. Jayawijaya	28.833.970	39.729.682	2.834.317	2.072.164		17.701.238
447	Kab. Merauke		9.679.725	2.341.531	913.040		21.584.627
448	Kab. Mimika		15.475.658	1.590.742	1.388.832		8.000.000
449	Kab. Nabire		27.625.147	2.223.579	2.949.841		24.267.005
450	Kab. Paniai		20.788.681	1.799.857	1.434.606		13.969.381
451	Kab. Puncak Jaya		3.715.751				14.995.056
452	Kab. Kepulauan Yapen		9.182.733	1.616.679			19.083.600
453	Kota Jayapura	20.000.000	30.784.113		2.800.427	4.371.050	9.751.014
454	Kab. Sarmi		15.794.185	1.702.926			
455	Kab. Keerom	18.968.453	27.816.947	2.259.204	2.505.331		23.729.454
456	Kab. Yahukimo	24.598.044	60.885.282	2.269.862	2.396.816		13.752.786



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
445	Kab. Jayapura	4.941.872	9.886.000	4.941.432	1.281.000	21.050.304
446	Kab. Jayawijaya			3.319.647	1.467.052	4.786.699
447	Kab. Merauke	4.274.999		4.759.717	998.019	10.032.735
448	Kab. Mimika	9.099.629		2.136.818	1.382.535	12.618.982
449	Kab. Nabire	3.444.999		1.115.801	1.069.250	5.630.050
450	Kab. Paniai	7.057.756	2.005.068	6.500.000	1.467.783	17.030.607
451	Kab. Puncak Jaya	4.601.799	7.106.855	2.974.823	1.353.148	16.036.625
452	Kab. Kepulauan Yapen		7.115.297		1.464.000	8.579.297
453	Kota Jayapura	2.991.359		4.323.419	1.688.524	9.003.302
454	Kab. Sarmi		3.506.583	2.518.939	1.471.226	7.496.748
455	Kab. Keerom	2.374.999	9.024.999	1.806.193	1.268.216	14.474.407
456	Kab. Yahukimo	2.700.000	3.562.456	3.567.782	1.487.921	11.318.159



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
445	Kab. Jayapura	1.942.255	2.180.909	2.797.860		54.347.748
446	Kab. Jayawijaya	1.888.186	5.040.952	7.529.929	1.500.000	83.083.167
447	Kab. Merauke	4.099.707	1.123.168	2.313.876		52.088.409
448	Kab. Mimika	1.945.354	2.234.243	3.442.196		46.696.007
449	Kab. Nabire	3.996.495	3.258.519		22.727.280	92.677.916
450	Kab. Paniai	3.164.592	5.025.058			63.212.782
451	Kab. Puncak Jaya	2.207.608	5.502.000	4.900.000		47.357.040
452	Kab. Kepulauan Yapen	1.210.069	3.034.823	3.618.781		46.325.982
453	Kota Jayapura	1.638.186	3.062.191	3.665.076		65.075.359
454	Kab. Sarmi	1.826.951	3.311.111			30.131.921
455	Kab. Keerom	2.508.299	2.055.905	2.398.071		77.747.618
456	Kab. Yahukimo	2.670.860	4.293.900			97.587.665



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
457	Kab. Pegunungan Bintang	1.000.000	7.577.599				
458	Kab. Tolikara	4.551.811	12.179.475				225.000
459	Kab. Boven Digoel	1.000.000	1.397.500				225.000
460	Kab. Mappi	17.136.285	9.077.193				
461	Kab. Asmat	8.981.645	1.674.035				
462	Kab. Waropen	5.345.960	12.317.390				465.000
463	Kab. Supiori	3.681.920	3.694.759			879.097	
464	Kab. Mamberamo Raya	3.894.885	1.865.420				
465	Kab. Mamberamo Tengah	2.548.109	1.422.686				
466	Kab. Yalimo	8.302.939	17.889.944				
467	Kab. Lanny Jaya	12.136.503	10.653.280				
468	Kab. Nduga	2.554.773	1.000.000				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
457	Kab. Pegunungan Bintang		8.577.599				32.573.341
458	Kab. Tolikara		16.956.286	2.668.969			19.055.778
459	Kab. Boven Digoel		2.622.500	1.574.654			25.392.285
460	Kab. Mappi		26.213.478	2.175.185			37.118.213
461	Kab. Asmat		10.655.680		1.249.986		23.775.981
462	Kab. Waropen		18.128.350	1.632.915			16.993.010
463	Kab. Supiori		8.255.776	1.786.757	869.741		13.111.869
464	Kab. Mamberamo Raya		5.760.305	1.848.770			31.335.546
465	Kab. Mamberamo Tengah		3.970.795	1.827.000			9.000.000
466	Kab. Yalimo		26.192.883	2.423.609			15.164.924
467	Kab. Lanny Jaya		22.789.783				18.111.559
468	Kab. Nduga		3.554.773	2.824.889			14.923.636



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
457	Kab. Pegunungan Bintang	8.999.999	7.999.999	4.820.405	1.421.700	23.242.103
458	Kab. Tolikara	6.798.574	4.656.896	3.290.935	1.461.835	16.208.240
459	Kab. Boven Digoel	3.149.999	8.550.000	2.820.405	1.396.000	15.916.404
460	Kab. Mappi	8.112.887	22.829.724	4.588.185	1.026.891	36.557.687
461	Kab. Asmat	4.499.999	13.668.410			18.168.409
462	Kab. Waropen	14.089.999	6.999.999	1.977.629	1.406.000	24.473.627
463	Kab. Supiori	3.799.999	18.297.720	1.110.473	1.551.653	24.759.845
464	Kab. Mamberamo Raya		4.749.999	951.943	1.348.048	7.049.990
465	Kab. Mamberamo Tengah	9.413.410	7.433.456	2.400.993	1.197.849	20.445.708
466	Kab. Yalimo	7.189.999	9.999.999	2.581.388	1.406.000	21.177.386
467	Kab. Lanny Jaya	3.499.999		3.755.866	1.406.000	8.661.865
468	Kab. Nduga	980.000	6.118.717	7.667.250	1.205.000	15.970.967



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
457	Kab. Pegunungan Bintang	1.855.715	8.201.398			74.450.156
458	Kab. Tolikara	2.508.299	7.414.926	8.507.357		73.319.855
459	Kab. Boven Digoel	1.609.423				47.115.266
460	Kab. Mappi	2.148.907	1.418.445	3.083.956		108.715.871
461	Kab. Asmat	4.306.598	1.047.135			59.203.789
462	Kab. Waropen	4.378.412	932.108	4.634.044		71.172.466
463	Kab. Supiori	1.199.354	2.542.562	3.649.037		56.174.941
464	Kab. Mamberamo Raya	1.638.186	2.436.487			50.069.284
465	Kab. Mamberamo Tengah	1.426.109	6.175.184			42.844.796
466	Kab. Yalimo	1.826.951	1.584.395			68.370.148
467	Kab. Lanny Jaya	1.184.770	1.584.441	8.693.077		61.025.495
468	Kab. Nduga	2.943.356	4.615.000			44.832.621



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
469	Kab. Dogiyai	11.167.064	19.978.283				
470	Kab. Puncak	4.014.786					
471	Kab. Intan Jaya	2.787.405	1.000.000				
472	Kab. Deiyai	11.812.411	6.792.670			869.229	242.406
473	Provinsi Maluku Utara			88.506.618	4.279.080		
474	Kab. Halmahera Tengah	10.221.229	16.079.690			1.093.832	925.000
475	Kota Ternate	6.763.852	6.148.420			1.782.275	925.000
476	Kab. Halmahera Barat	16.366.652	7.220.700			880.044	
477	Kab. Halmahera Timur	5.111.807	2.504.621				
478	Kab. Halmahera Selatan	12.944.328	8.828.300				
479	Kab. Halmahera Utara	5.123.801	4.442.412			1.417.948	
480	Kab. Kepulauan Sula	7.046.290	6.554.570			1.872.377	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
469	Kab. Dogiyai		31.145.347	2.249.541			17.563.032
470	Kab. Puncak		4.014.786	2.174.741			
471	Kab. Intan Jaya		3.787.405	3.005.842	1.807.884		26.430.758
472	Kab. Deiyai		19.716.716	1.703.502	1.442.600		19.000.183
473	Provinsi Maluku Utara		92.785.698				35.115.261
474	Kab. Halmahera Tengah		28.319.751	1.330.172			13.957.166
475	Kota Ternate		15.619.547			4.223.172	14.564.641
476	Kab. Halmahera Barat		24.467.396		2.418.152		18.869.772
477	Kab. Halmahera Timur		7.616.428	1.225.000	1.428.674		26.402.989
478	Kab. Halmahera Selatan		21.772.628	1.594.279	1.912.401		31.449.945
479	Kab. Halmahera Utara	15.000.000	25.984.161	650.000	1.645.998		14.899.735
480	Kab. Kepulauan Sula		15.473.237	1.436.158			17.861.994



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
469	Kab. Dogiyai	3.571.866	19.155.791	2.565.101	1.460.792	26.753.550
470	Kab. Puncak	6.999.999		3.080.946	1.256.000	11.336.945
471	Kab. Intan Jaya	4.499.999		3.522.800	1.325.000	9.347.799
472	Kab. Deiyai	3.692.410	8.805.021	4.680.648	1.669.476	18.847.555
473	Provinsi Maluku Utara		29.254.712	129.900		29.384.612
474	Kab. Halmahera Tengah	3.619.421	16.218.099	2.236.665	1.450.000	23.524.185
475	Kota Ternate	6.099.999		3.829.958	1.350.000	11.279.957
476	Kab. Halmahera Barat	6.066.419	26.382.523	4.464.022	1.512.963	38.425.927
477	Kab. Halmahera Timur	2.960.735	9.705.556	1.702.597	1.565.134	15.934.022
478	Kab. Halmahera Selatan	2.510.778	3.550.026	4.237.689	1.460.792	11.759.285
479	Kab. Halmahera Utara	3.907.977		2.641.150	1.465.735	8.014.862
480	Kab. Kepulauan Sula	6.599.999	3.866.448	4.040.626	1.375.000	15.882.073



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
469	Kab. Dogiyai	2.073.243	2.893.268			82.677.981
470	Kab. Puncak	1.556.277	2.500.000			21.582.749
471	Kab. Intan Jaya	1.274.366	4.522.924			50.176.978
472	Kab. Deiyai	2.176.980	2.154.000			65.041.536
473	Provinsi Maluku Utara	9.500.000	17.299.518			184.085.089
474	Kab. Halmahera Tengah	2.975.827	1.601.458		1.000.000	72.708.559
475	Kota Ternate	2.323.243	2.990.164	3.425.388	1.000.000	55.426.112
476	Kab. Halmahera Barat	2.975.827	1.773.176			88.930.250
477	Kab. Halmahera Timur	3.193.356	1.906.114			57.706.583
478	Kab. Halmahera Selatan	3.379.594	1.491.238	1.739.590		75.098.960
479	Kab. Halmahera Utara	2.975.827	1.980.620		5.882.292	62.033.495
480	Kab. Kepulauan Sula	2.512.007	1.398.036			54.563.505



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
481	Kota Tidore Kepulauan	7.196.922	9.372.190			2.929.978	225.000
482	Kab. Pulau Morotai	6.568.315	10.263.610				1.000.000
483	Kab. Pulau Taliabu	10.859.410	15.581.036				
484	Provinsi Banten			13.159.624	1.375.976		225.000
485	Kab. Lebak	44.490.847	24.644.083			549.472	225.000
486	Kab. Pandeglang	14.478.844	4.754.408			444.875	
487	Kab. Serang	14.842.542	20.611.790			527.857	
488	Kab. Tangerang	30.593.712	14.412.450			1.907.612	
489	Kota Cilegon	1.737.330	3.325.437				
490	Kota Tangerang						
491	Kota Serang	3.172.124	9.755.731			1.626.342	225.000
492	Kota Tangerang Selatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
481	Kota Tidore Kepulauan		19.724.090	1.119.000	2.211.799	3.854.395	16.650.284
482	Kab. Pulau Morotai		17.831.925	2.297.021			12.193.805
483	Kab. Pulau Taliabu		26.440.446				20.112.559
484	Provinsi Banten		14.760.600				16.258.407
485	Kab. Lebak		69.909.402	3.330.000	5.275.134	2.972.290	21.977.358
486	Kab. Pandeglang		19.678.127	3.168.670		3.123.750	17.688.602
487	Kab. Serang		35.982.189	4.625.175	4.186.762		17.588.196
488	Kab. Tangerang		46.913.774				14.004.991
489	Kota Cilegon		5.062.767				12.363.453
490	Kota Tangerang						8.129.205
491	Kota Serang		14.779.197	2.000.000	2.106.456		11.691.301
492	Kota Tangerang Selatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
481	Kota Tidore Kepulauan	7.301.349	17.002.685	977.445	239.945	25.521.424
482	Kab. Pulau Morotai	13.074.180	16.171.099	7.000.000	1.137.331	37.382.610
483	Kab. Pulau Taliabu	5.547.999	4.749.999	4.759.717	1.347.374	16.405.089
484	Provinsi Banten		17.400.301			17.400.301
485	Kab. Lebak	4.654.408	16.467.828	7.164.767	1.770.688	30.057.691
486	Kab. Pandeglang	4.499.999		9.799.986	1.685.700	15.985.685
487	Kab. Serang	995.024		6.440.008	1.447.388	8.882.420
488	Kab. Tangerang	2.049.999	38.136.983	4.492.652	675.800	45.355.434
489	Kota Cilegon	2.577.265	19.100.134	3.069.636	1.315.800	26.062.835
490	Kota Tangerang		6.410.710		125.223	6.535.933
491	Kota Serang	1.864.999		2.726.018	1.500.420	6.091.437
492	Kota Tangerang Selatan	573.551	10.469.396	2.678.982	515.000	14.236.929



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
481	Kota Tidore Kepulauan	2.211.556	3.280.477	3.120.659		77.693.684
482	Kab. Pulau Morotai	5.368.638	2.348.701			77.422.700
483	Kab. Pulau Taliabu	3.832.938	1.849.623			68.640.655
484	Provinsi Banten	8.000.000	2.660.247			59.079.555
485	Kab. Lebak	4.783.958	1.308.504			139.614.337
486	Kab. Pandeglang	2.729.536	664.522		10.000.000	73.038.892
487	Kab. Serang	2.544.106	906.852			74.715.700
488	Kab. Tangerang	1.414.231				107.688.430
489	Kota Cilegon					43.489.055
490	Kota Tangerang					14.665.138
491	Kota Serang	1.545.125				38.213.516
492	Kota Tangerang Selatan					14.236.929



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
493	Provinsi Bangka Belitung			12.318.474	1.220.327		15.000.000
494	Kab. Bangka	8.664.527	9.072.667			2.867.037	200.000
495	Kab. Belitung	2.999.862	5.693.060			3.314.646	
496	Kota Pangkal Pinang	4.209.597	2.591.000			866.457	1.170.501
497	Kab. Bangka Selatan	5.030.282	9.550.426			1.594.040	1.405.000
498	Kab. Bangka Tengah	10.520.142	3.296.120			1.127.977	225.000
499	Kab. Bangka Barat	8.119.539	8.353.053			2.112.510	
500	Kab. Belitung Timur	2.819.045	2.538.058			772.414	
501	Provinsi Gorontalo			8.473.608	1.000.000		
502	Kab. Boalemo	9.495.589	6.431.100			1.082.972	
503	Kab. Gorontalo	16.927.011	10.344.660			4.276.735	825.000
504	Kota Gorontalo	4.515.111	5.397.390			3.024.395	225.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
493	Provinsi Bangka Belitung		28.538.801				17.640.881
494	Kab. Bangka	15.000.000	35.804.231	1.593.600	2.328.877	1.598.625	19.045.863
495	Kab. Belitung		12.007.568	1.508.609	600.000		15.695.184
496	Kota Pangkal Pinang		8.837.555			2.503.899	11.895.914
497	Kab. Bangka Selatan		17.579.748	1.943.747	2.917.678		16.471.507
498	Kab. Bangka Tengah	15.000.000	30.169.239	1.627.297	2.772.158		14.126.613
499	Kab. Bangka Barat		18.585.102	1.668.341		2.016.005	18.520.354
500	Kab. Belitung Timur		6.129.517	1.705.314	1.500.000	551.250	14.945.470
501	Provinsi Gorontalo		9.473.608				19.667.020
502	Kab. Boalemo		17.009.661				17.961.254
503	Kab. Gorontalo		32.373.406		3.644.276	3.123.750	36.570.291
504	Kota Gorontalo		13.161.896	1.879.472	500.000	3.262.144	10.559.152



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
493	Provinsi Bangka Belitung		515.602			515.602
494	Kab. Bangka	4.449.999	8.076.265	2.029.096	1.133.000	15.688.360
495	Kab. Belitung	1.864.525		2.000.685	1.133.000	4.998.210
496	Kota Pangkal Pinang	6.663.559	9.423.364	1.447.285	1.377.300	18.911.508
497	Kab. Bangka Selatan	20.253.065	4.494.674	1.529.877	603.000	26.880.616
498	Kab. Bangka Tengah	5.351.653	10.080.613	1.625.739	1.133.000	18.191.005
499	Kab. Bangka Barat	1.177.667	5.894.749	1.945.074	941.237	9.958.727
500	Kab. Belitung Timur	1.724.883	11.108.023	1.502.596	654.350	14.989.852
501	Provinsi Gorontalo	2.499.999	6.145.755	196.000		8.841.754
502	Kab. Boalemo	4.636.997		2.926.971	1.238.352	8.802.320
503	Kab. Gorontalo	5.149.553	4.447.850	5.340.528	1.198.058	16.135.989
504	Kota Gorontalo	622.599	18.282.008	2.476.757	1.738.630	23.119.994



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
493	Provinsi Bangka Belitung	5.225.000	4.430.750			56.351.034
494	Kab. Bangka	1.115.648	1.353.610			78.528.814
495	Kab. Belitung	1.295.125	1.594.854			37.699.550
496	Kota Pangkal Pinang		703.327	2.715.743		45.567.946
497	Kab. Bangka Selatan	1.512.653	1.594.854	3.356.599		72.257.402
498	Kab. Bangka Tengah	1.488.664	2.139.927			70.514.903
499	Kab. Bangka Barat	1.779.486	1.167.971	1.706.684		55.402.670
500	Kab. Belitung Timur	1.261.217	741.208			41.823.828
501	Provinsi Gorontalo	13.500.000	10.056.147			61.538.529
502	Kab. Boalemo	2.947.064	1.096.019	2.580.665		50.396.983
503	Kab. Gorontalo	6.514.096	2.073.310	2.745.391		103.180.509
504	Kota Gorontalo	1.512.653	825.161			54.820.472



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
505	Kab. Pohuwato	3.692.507	5.431.694			880.395	225.000
506	Kab. Bone Bolango	18.601.350	6.650.594			467.947	2.225.000
507	Kab. Gorontalo Utara	4.788.161	5.490.810			1.888.516	
508	Provinsi Kepulauan Riau			31.833.974	1.000.000		
509	Kab. Natuna	2.956.271	1.620.004				890.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	3.378.123	3.000.400				
511	Kab. Karimun	8.133.417	4.494.040				225.000
512	Kota Batam	26.117.166	12.639.440			2.738.118	
513	Kota Tanjung Pinang	7.482.631	2.031.480			599.799	
514	Kab. Lingga	5.792.376	6.619.400				225.000
515	Kab. Bintan	6.203.707	5.810.631			200.000	
516	Provinsi Papua Barat			34.927.183			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
505	Kab. Pohuwato		10.229.596	1.473.034	2.927.182		19.016.220
506	Kab. Bone Bolango		27.944.891	1.982.922	3.075.694		14.512.236
507	Kab. Gorontalo Utara		12.167.487	1.656.419	3.030.384		10.500.000
508	Provinsi Kepulauan Riau		32.833.974				23.978.305
509	Kab. Natuna	14.429.513	19.895.788	1.808.782	720.000		19.491.647
510	Kab. Kepulauan Anambas		6.378.523				19.167.027
511	Kab. Karimun		12.852.457	2.339.892	2.000.000		23.300.000
512	Kota Batam	15.000.000	56.494.724	2.500.000	2.784.000	3.461.826	19.657.853
513	Kota Tanjung Pinang		10.113.910			3.642.605	16.109.667
514	Kab. Lingga		12.636.776	1.997.751	2.750.000		28.933.487
515	Kab. Bintan		12.214.338	1.967.369			20.932.483
516	Provinsi Papua Barat		34.927.183				43.769.961



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
505	Kab. Pohuwato	5.480.904	31.755.851	3.869.979	1.664.528	42.771.262
506	Kab. Bone Bolango	7.265.374	16.836.443	3.457.943	1.650.382	29.210.142
507	Kab. Gorontalo Utara	2.793.389	2.785.500	3.318.591	1.005.008	9.902.488
508	Provinsi Kepulauan Riau		15.041.315	517.670		15.558.985
509	Kab. Natuna	6.209.249	1.754.399	3.760.540	1.401.300	13.125.488
510	Kab. Kepulauan Anambas	4.742.558	17.131.870	8.028.051	1.472.500	31.374.979
511	Kab. Karimun	4.550.499	12.714.431	3.832.744	768.003	21.865.677
512	Kota Batam	6.537.804	17.499.684	10.161.764	1.132.275	35.331.527
513	Kota Tanjung Pinang	1.008.571	1.618.999	2.226.711	1.439.100	6.293.381
514	Kab. Lingga	6.749.999		2.708.636	1.277.700	10.736.335
515	Kab. Bintan	6.749.999	17.129.243	4.268.948	1.310.000	29.458.190
516	Provinsi Papua Barat			1.188.145		1.188.145



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
505	Kab. Pohuwato	3.552.134	1.872.008	2.861.830		84.703.266
506	Kab. Bone Bolango	2.443.182	989.810			80.158.877
507	Kab. Gorontalo Utara	2.947.064	1.309.028			41.512.870
508	Provinsi Kepulauan Riau	9.000.000	9.134.329			90.505.593
509	Kab. Natuna	1.110.069	1.503.191	4.848.093	5.500.000	68.003.058
510	Kab. Kepulauan Anambas	850.000	2.563.066		12.900.000	73.233.595
511	Kab. Karimun	1.054.565	2.333.788	2.652.773		68.399.152
512	Kota Batam	1.106.361	491.642	2.262.231		124.090.164
513	Kota Tanjung Pinang	926.504	466.012	3.271.896		40.823.975
514	Kab. Lingga	3.090.699	488.547	2.115.816	4.500.000	67.249.411
515	Kab. Bintan	1.023.717	2.390.642	2.827.950		70.814.689
516	Provinsi Papua Barat	10.500.000	15.434.548	2.587.910		108.407.747



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
517	Kab. Fak Fak	1.286.880	3.491.545				425.000
518	Kab. Manokwari	6.998.212	5.114.440			1.492.097	225.000
519	Kab. Sorong	1.216.217	1.953.128				1.000.000
520	Kota Sorong	15.894.243	10.222.515			200.000	
521	Kab. Raja Ampat	5.506.866	3.301.417				225.000
522	Kab. Sorong Selatan	6.636.574	7.886.650				
523	Kab. Teluk Bintuni	7.013.492	7.053.060				
524	Kab. Teluk Wondama	2.402.455	2.474.800			1.391.955	
525	Kab. Kaimana	1.000.000	1.259.957				
526	Kab. Maybrat	1.000.000	3.076.927				
527	Kab. Tambrau	4.572.787	1.290.100				
528	Kab. Manokwari Selatan	1.931.840	1.357.900				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
517	Kab. Fak Fak		5.203.425				15.926.596
518	Kab. Manokwari		13.829.749	525.000	830.439	3.778.138	22.676.281
519	Kab. Sorong		4.169.345	2.111.389	699.242		29.619.908
520	Kota Sorong		26.316.758			3.412.586	8.000.000
521	Kab. Raja Ampat		9.033.283	1.774.545	745.587		16.571.991
522	Kab. Sorong Selatan		14.523.224	2.483.996	993.689		19.827.560
523	Kab. Teluk Bintuni		14.066.552				
524	Kab. Teluk Wondama		6.269.210	2.406.032	924.664		
525	Kab. Kaimana		2.259.957	2.073.096	987.620		17.952.769
526	Kab. Maybrat		4.076.927	2.264.596			16.000.000
527	Kab. Tambrau		5.862.887	1.063.198			21.779.547
528	Kab. Manokwari Selatan		3.289.740				12.193.805



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
517	Kab. Fak Fak	6.661.833	5.134.164	2.071.935	1.337.750	15.205.682
518	Kab. Manokwari	6.499.999		2.920.913	1.138.000	10.558.912
519	Kab. Sorong	28.972.384		3.032.135	1.467.052	33.471.571
520	Kota Sorong	3.753.390	6.815.936	7.281.130	1.460.792	19.311.248
521	Kab. Raja Ampat	13.382.731	5.487.556	5.520.413	1.586.002	25.976.702
522	Kab. Sorong Selatan	2.124.999	4.765.170	3.713.933	1.900.000	12.504.102
523	Kab. Teluk Bintuni	2.675.000	9.553.395	3.032.688	1.775.000	17.036.083
524	Kab. Teluk Wondama	7.149.999	7.019.518	2.504.822	1.650.386	18.324.725
525	Kab. Kaimana	569.999	3.985.647	356.116	1.075.974	5.987.736
526	Kab. Maybrat	1.725.791		1.500.000		3.225.791
527	Kab. Tambrau	6.011.517		3.598.541	1.721.647	11.331.705
528	Kab. Manokwari Selatan	4.706.705		2.935.890	1.711.213	9.353.808



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
517	Kab. Fak Fak	2.508.917	3.019.840	2.414.714		44.279.174
518	Kab. Manokwari	3.790.779	2.545.128	2.788.215		61.322.641
519	Kab. Sorong	3.595.940	2.278.080	3.794.403		79.739.878
520	Kota Sorong	1.826.951	722.895	2.498.412		62.088.850
521	Kab. Raja Ampat	2.479.536	2.609.689	6.273.752		65.465.085
522	Kab. Sorong Selatan	1.556.277	1.346.765	2.480.891	2.573.502	58.290.006
523	Kab. Teluk Bintuni	1.945.354	2.065.365			35.113.354
524	Kab. Teluk Wondama	1.274.366	1.890.324	2.329.890		33.419.211
525	Kab. Kaimana	974.020	2.347.979			32.583.177
526	Kab. Maybrat	1.272.344	2.559.739	4.015.655		33.415.052
527	Kab. Tambrau	2.479.536	2.382.407	5.021.553		49.920.833
528	Kab. Manokwari Selatan	2.408.606	1.904.355		2.000.000	31.150.314



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMPLB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
529	Kab. Pegunungan Arfak	10.689.255	5.209.100				
530	Provinsi Sulawesi Barat			13.498.461	5.388.894		
531	Kab. Majene	12.160.289	10.320.800			2.643.919	225.000
532	Kab. Mamuju	10.252.190	15.983.190			1.751.875	
533	Kab. Polewali Mandar	46.855.342	13.696.240			2.986.913	250.000
534	Kab. Mamasa	22.833.259	14.368.040			2.183.501	225.000
535	Kab. Pasangkayu	20.304.130	17.372.333				
536	Kab. Mamuju Tengah	4.951.530	4.531.970				
537	Provinsi Kalimantan Utara			12.232.593	1.000.000		16.987.897
538	Kab. Bulungan	20.770.541	16.526.140			317.347	795.000
539	Kab. Malinau	4.071.553	2.987.275				
540	Kab. Nunukan	5.419.206	8.834.100			5.389.324	200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
529	Kab. Pegunungan Arfak		15.898.355				30.104.562
530	Provinsi Sulawesi Barat		18.887.355				16.258.407
531	Kab. Majene	12.132.047	37.482.055	1.955.065		3.123.750	14.325.588
532	Kab. Mamuju	12.927.812	40.915.067	1.918.516	2.117.094		19.119.132
533	Kab. Polewali Mandar		63.788.495	1.968.995		3.123.750	21.689.593
534	Kab. Mamasa		39.609.800	1.919.277	3.075.427		17.142.193
535	Kab. Pasangkayu		37.676.463	1.402.583	2.603.148		34.931.247
536	Kab. Mamuju Tengah		9.483.500		1.200.000		18.675.578
537	Provinsi Kalimantan Utara		30.220.490				30.486.015
538	Kab. Bulungan		38.409.028		1.500.000	1.303.829	18.144.478
539	Kab. Malinau		7.058.828		1.341.082		28.972.388
540	Kab. Nunukan		19.842.630		1.065.492		16.323.063



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
529	Kab. Pegunungan Arfak	5.237.051		3.595.159	1.665.100	10.497.310
530	Provinsi Sulawesi Barat		10.259.459	439.137		10.698.596
531	Kab. Majene	4.141.900	25.691.877	1.148.988	1.548.660	32.531.425
532	Kab. Mamuju	6.669.999	9.219.894	2.618.103	1.450.068	19.958.064
533	Kab. Polewali Mandar	6.275.606	19.920.356	6.502.320	1.309.000	34.007.282
534	Kab. Mamasa	13.680.822	17.022.817	2.405.319	1.488.672	34.597.630
535	Kab. Pasangkayu	7.999.999	6.717.335	3.021.575	945.000	18.683.909
536	Kab. Mamuju Tengah	5.999.999	21.088.349	3.937.224	1.408.218	32.433.790
537	Provinsi Kalimantan Utara		14.145.758	156.400		14.302.158
538	Kab. Bulungan	5.338.999	16.849.999	4.883.959	1.121.800	28.194.757
539	Kab. Malinau	5.611.317	1.376.961	5.637.249	584.664	13.210.191
540	Kab. Nunukan	3.849.999	7.027.993	6.000.000	1.292.719	18.170.711



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
529	Kab. Pegunungan Arfak	2.502.233	1.265.666	2.895.624		63.163.750
530	Provinsi Sulawesi Barat	7.125.000	9.071.354	1.808.832		63.849.544
531	Kab. Majene	2.211.556	1.078.755	2.397.156	2.352.916	97.458.266
532	Kab. Mamuju	3.369.686	1.500.492			88.898.051
533	Kab. Polewali Mandar	5.065.784	1.264.630	2.153.735	1.999.979	135.062.243
534	Kab. Mamasa	4.413.573	1.115.795	1.940.100	1.054.200	104.867.995
535	Kab. Pasangkayu	1.762.653		1.646.150	1.764.687	100.470.840
536	Kab. Mamuju Tengah	1.545.125	1.053.187	2.028.949		66.420.129
537	Provinsi Kalimantan Utara	6.000.000	6.041.925			87.050.588
538	Kab. Bulungan	3.414.592	1.765.254	2.302.198		95.034.136
539	Kab. Malinau	1.295.125	996.467	2.504.854		55.378.935
540	Kab. Nunukan	2.294.479	1.304.688	2.381.250	3.000.000	64.382.313



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SDLB/SMP LB/ SMLB/SLB	SKB	Perpustakaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
541	Kota Tarakan	3.380.430	5.312.780			1.993.329	218.000
542	Kab. Tana Tidung	2.801.713	1.448.845			200.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Air Minum	Sanitasi	Perumahan dan Permukiman	Jalan
		Olahraga	Subtotal Pendidikan				
(1)	(2)	(9)	(10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
541	Kota Tarakan	15.000.000	25.904.539			2.854.373	13.777.151
542	Kab. Tana Tidung		4.450.558	1.536.079	1.358.368		15.259.345



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Keluarga Berencana	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17) +(18)
541	Kota Tarakan	2.056.294	6.705.902	2.491.888		11.254.084
542	Kab. Tana Tidung	1.212.345	1.095.334	2.388.238	971.703	5.667.620



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah	TOTAL DAK REGULER
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14) +(19)+(20)+(21)+(22)+(23)
541	Kota Tarakan	1.146.496	1.258.232	1.946.019	10.000.000	68.140.894
542	Kab. Tana Tidung	1.230.369	1.168.758	4.433.777		35.104.874



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Provinsi Aceh	81.988.275				35.245.000	35.245.000
2	Kab. Aceh Barat		41.776.212	305.961			42.082.173
3	Kab. Aceh Besar				621.440		621.440
4	Kab. Aceh Selatan		42.182.267	332.535	403.115		42.917.917
5	Kab. Aceh Singkil			226.615			226.615
6	Kab. Aceh Tengah		41.024.280	1.404.999	300.000		42.729.279
7	Kab. Aceh Tenggara			351.343			351.343
8	Kab. Aceh Timur			3.017.999			3.017.999
9	Kab. Aceh Utara			987.418	359.896		1.347.314
10	Kab. Bireuen		40.655.458	657.292	140.000		41.452.750
11	Kab. Pidie			1.144.999	1.752.400		2.897.399
12	Kab. Simeulue			154.130			154.130



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Provinsi Aceh				34.836.871		6.426.751
2	Kab. Aceh Barat	1.165.000		3.454.204		1.060.024	8.432.561
3	Kab. Aceh Besar	1.793.613		3.519.055	13.420.036	2.887.135	7.478.391
4	Kab. Aceh Selatan	3.933.940		1.500.000		2.062.387	6.108.944
5	Kab. Aceh Singkil				12.014.979	3.733.134	
6	Kab. Aceh Tengah	1.661.000		3.420.375		2.851.754	3.177.452
7	Kab. Aceh Tenggara	624.000		2.250.000		4.227.491	8.181.526
8	Kab. Aceh Timur	270.000				3.222.620	3.289.354
9	Kab. Aceh Utara			6.957.955	17.190.389	4.470.759	7.084.488
10	Kab. Bireuen	643.500		4.778.968	14.044.433	4.455.957	9.341.982
11	Kab. Pidie	3.583.638		5.950.000		4.409.499	7.303.684
12	Kab. Simeuhue	1.125.000		618.000		4.000.000	7.053.285



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
1	Provinsi Aceh	420.000	6.282.362	6.702.362	165.199.259
2	Kab. Aceh Barat				56.193.962
3	Kab. Aceh Besar				29.719.670
4	Kab. Aceh Selatan				56.523.188
5	Kab. Aceh Singkil	792.958		792.958	16.767.686
6	Kab. Aceh Tengah				53.839.860
7	Kab. Aceh Tenggara				15.634.360
8	Kab. Aceh Timur	713.662		713.662	10.513.635
9	Kab. Aceh Utara	698.516		698.516	37.749.421
10	Kab. Bireuen				74.717.590
11	Kab. Pidie	753.310		753.310	24.897.530
12	Kab. Simeulue				12.950.415



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
13	Kota Banda Aceh			375.519	282.470		657.989
14	Kota Sabang						
15	Kota Langsa		41.618.724	275.333			41.894.057
16	Kota Lhokseumawe			326.812	85.017		411.829
17	Kab. Gayo Lues			158.687			158.687
18	Kab. Aceh Barat Daya						
19	Kab. Aceh Jaya			144.158			144.158
20	Kab. Nagan Raya			235.774			235.774
21	Kab. Aceh Tamiang			495.536	179.570		675.106
22	Kab. Bener Meriah			252.439			252.439
23	Kab. Pidie Jaya			255.798	346.819		602.617
24	Kota Subulussalam			162.608			162.608



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13	Kota Banda Aceh	1.482.147		2.358.581		3.400.000	2.013.155
14	Kota Sabang			1.900.000	17.123.658	4.802.876	
15	Kota Langsa			2.710.977		3.051.037	5.072.380
16	Kota Lhokseumawe			2.945.642	11.350.835	1.342.825	
17	Kab. Gayo Lues	2.836.000		2.250.000		1.459.041	5.225.692
18	Kab. Aceh Barat Daya	2.415.000		2.360.000		4.148.815	5.769.804
19	Kab. Aceh Jaya	2.030.203		900.000		1.500.000	8.149.427
20	Kab. Nagan Raya			3.150.000		4.171.487	7.167.322
21	Kab. Aceh Tamiang	2.835.000				4.351.132	5.036.464
22	Kab. Bener Meriah			2.800.403		2.744.127	4.099.743
23	Kab. Pidie Jaya	3.099.109		3.815.872		2.479.821	7.694.105
24	Kota Subulussalam			900.000		3.651.623	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
13	Kota Banda Aceh	848.465		848.465	10.760.337
14	Kota Sabang				23.826.534
15	Kota Langsa				52.728.451
16	Kota Lhokseumawe	769.169		769.169	16.820.300
17	Kab. Gayo Lues				11.929.420
18	Kab. Aceh Barat Daya				14.693.619
19	Kab. Aceh Jaya				12.723.788
20	Kab. Nagan Raya				14.724.583
21	Kab. Aceh Tamiang	420.000		420.000	13.317.702
22	Kab. Bener Meriah				9.896.712
23	Kab. Pidie Jaya				17.691.524
24	Kota Subulussalam				4.714.231



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
25	Provinsi Sumatera Utara	144.705.198	11.097.969	2.059.207		9.657.539	22.814.715
26	Kab. Asahan			1.063.093	2.652.405		3.715.498
27	Kab. Dairi			462.534	2.765.977		3.228.511
28	Kab. Deli Serdang			2.849.526	3.788.208		6.637.734
29	Kab. Karo			539.402	2.570.081		3.109.483
30	Kab. Labuhanbatu		36.421.984	776.180	1.133.531		38.331.695
31	Kab. Langkat			4.565.999	2.655.082		7.221.081
32	Kab. Mandailing Natal				3.603.628		3.603.628
33	Kab. Nias		51.914.064		2.285.897		54.199.961
34	Kab. Simalungun			5.307.999	4.824.660		10.132.659
35	Kab. Tapanuli Selatan			486.479	2.670.127		3.156.606
36	Kab. Tapanuli Tengah				2.792.160		2.792.160



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	Provinsi Sumatera Utara		5.603.894		49.305.083	3.297.406	7.712.097
26	Kab. Asahan	1.635.165		2.033.500		2.876.680	5.909.565
27	Kab. Dairi	3.783.122	4.322.968	3.251.395	14.539.190		2.565.436
28	Kab. Deli Serdang	1.503.964		1.200.000		4.357.850	7.423.827
29	Kab. Karo	1.758.000	5.472.887		13.086.646	3.032.255	3.859.243
30	Kab. Labuhanbatu	1.988.503		450.000		4.326.711	5.938.343
31	Kab. Langkat	792.000				2.712.154	4.547.849
32	Kab. Mandailing Natal	1.638.000		900.000		4.212.795	7.050.249
33	Kab. Nias				12.369.817	2.000.000	3.841.407
34	Kab. Simalungun	2.250.000			29.786.127	4.711.546	6.814.464
35	Kab. Tapanuli Selatan					699.874	8.404.282
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.835.000		420.000		2.892.357	6.828.170



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
25	Provinsi Sumatera Utara	602.648	21.445.554	22.048.202	255.486.595
26	Kab. Asahan	531.282		531.282	16.701.690
27	Kab. Dairi	437.512		437.512	32.128.134
28	Kab. Deli Serdang	848.465		848.465	21.971.840
29	Kab. Karo	420.000		420.000	30.738.514
30	Kab. Labuhanbatu	594.719		594.719	51.629.971
31	Kab. Langkat	437.512		437.512	15.710.596
32	Kab. Mandailing Natal				17.404.672
33	Kab. Nias				72.411.185
34	Kab. Simalungun	842.540		842.540	54.537.336
35	Kab. Tapanuli Selatan				12.260.762
36	Kab. Tapanuli Tengah				15.767.687



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
37	Kab. Tapanuli Utara			562.421	3.209.814		3.772.235
38	Kab. Toba Samosir			269.828	215.884		485.712
39	Kota Binjai			342.155	1.262.889		1.605.044
40	Kota Medan		28.242.262	2.600.608	2.086.613		32.929.483
41	Kota Pematang Siantar		26.237.590		1.575.247		27.812.837
42	Kota Sibolga			143.269	124.793		268.062
43	Kota Tanjung Balai			402.378	557.800		960.178
44	Kota Tebing Tinggi			222.974	429.154		652.128
45	Kota Padang Sidempuan		42.562.702		1.294.175		43.856.877
46	Kab. Pakpak Bharat			74.519	897.628		972.147
47	Kab. Nias Selatan			579.927	2.473.609		3.053.536
48	Kab. Humbang Hasundutan			317.045	1.777.005		2.094.050



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37	Kab. Tapanuli Utara	1.855.746	4.936.569		12.773.067	3.853.514	6.728.969
38	Kab. Toba Samosir	2.039.388	5.688.899	1.800.000	12.672.134	4.465.345	4.629.821
39	Kota Binjai			1.500.000		2.173.366	
40	Kota Medan	1.833.504		4.297.053			
41	Kota Pematang Siantar			2.997.093	10.642.425	2.688.585	
42	Kota Sibolga					3.208.269	
43	Kota Tanjung Balai			2.951.871		2.518.637	
44	Kota Tebing Tinggi					2.824.655	2.527.885
45	Kota Padang Sidempuan					1.271.691	4.087.270
46	Kab. Pakpak Bharat	2.661.281	4.244.726	790.000	12.051.922	4.900.000	3.043.484
47	Kab. Nias Selatan				12.528.026	4.566.157	6.894.271
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.394.135	2.367.779	500.000	12.428.126	4.219.260	7.256.831



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
37	Kab. Tapanuli Utara	420.000		420.000	34.340.100
38	Kab. Toba Samosir	531.282		531.282	32.312.581
39	Kota Binjai	420.000		420.000	5.698.410
40	Kota Medan				39.060.040
41	Kota Pematang Siantar				44.140.940
42	Kota Sibolga				3.476.331
43	Kota Tanjung Balai	808.817		808.817	7.239.503
44	Kota Tebing Tinggi	808.817		808.817	6.813.485
45	Kota Padang Sidempuan				49.215.838
46	Kab. Pakpak Bharat				28.663.560
47	Kab. Nias Selatan				27.041.990
48	Kab. Humbang Hasundutan	689.874		689.874	31.950.055



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
49	Kab. Serdang Bedagai			996.495	2.978.944		3.975.439
50	Kab. Samsir			241.353	2.575.719		2.817.072
51	Kab. Batu Bara				1.721.223		1.721.223
52	Kab. Padang Lawas			2.114.999	3.599.942		5.714.941
53	Kab. Padang Lawas Utara			474.791	4.597.076		5.071.867
54	Kab. Labuhanbatu Selatan			539.578	803.426		1.343.004
55	Kab. Labuhanbatu Utara			675.679	622.469		1.298.148
56	Kab. Nias Utara			2.026.999	1.191.012		3.218.011
57	Kab. Nias Barat			159.565			159.565
58	Kota Gunungsitoli			791.999	2.180.040		2.972.039
59	Provinsi Sumatera Barat	24.741.580	105.286.998	1.963.250			107.250.248
60	Kab. Limapuluh Kota			455.201	1.540.308		1.995.509



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
49	Kab. Serdang Bedagai	594.000		3.300.000	13.447.023	3.212.196	6.636.822
50	Kab. Samosir	1.200.000	6.717.114	1.500.000	12.746.732	1.500.000	4.919.676
51	Kab. Batu Bara	2.471.770			18.503.235	1.271.691	5.566.988
52	Kab. Padang Lawas					4.472.426	23.040.431
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.000.000		480.000		2.954.892	8.404.962
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.930.000		3.363.624		664.800	3.058.412
55	Kab. Labuhanbatu Utara					4.236.224	15.168.353
56	Kab. Nias Utara	3.150.000		3.013.166	13.829.087	4.561.350	2.648.517
57	Kab. Nias Barat	300.000		200.000	12.263.448	6.273.159	
58	Kota Gunungsitoli						4.447.734
59	Provinsi Sumatera Barat				20.149.025	2.233.727	6.030.297
60	Kab. Limapuluh Kota	1.845.000		1.850.000		4.268.131	7.675.698



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
49	Kab. Serdang Bedagai	595.908		595.908	31.761.388
50	Kab. Samosir	842.540		842.540	32.243.134
51	Kab. Batu Bara				29.534.907
52	Kab. Padang Lawas				33.227.798
53	Kab. Padang Lawas Utara				18.911.721
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				10.359.840
55	Kab. Labuhanbatu Utara				20.702.725
56	Kab. Nias Utara				30.420.131
57	Kab. Nias Barat				19.196.172
58	Kota Gunungsitoli				7.419.773
59	Provinsi Sumatera Barat		12.470.540	12.470.540	172.875.417
60	Kab. Limapuluh Kota	713.662		713.662	18.348.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
61	Kab. Agam			642.082	85.000		727.082
62	Kab. Kepulauan Mentawai			137.224			137.224
63	Kab. Padang Pariaman			525.969	515.548		1.041.517
64	Kab. Pasaman			2.261.999	362.359		2.624.358
65	Kab. Pesisir Selatan			631.022	191.784		822.806
66	Kab. Sijunjung						
67	Kab. Solok			1.614.999	127.754		1.742.753
68	Kab. Tanah Datar			403.986	230.489		634.475
69	Kota Bukit Tinggi				139.082		139.082
70	Kota Padang Panjang			71.824	179.298		251.122
71	Kota Padang			1.167.601	1.188.929		2.356.530
72	Kota Payakumbuh			181.156	91.001		272.157



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
61	Kab. Agam	2.568.052		3.599.996		4.241.109	8.225.797
62	Kab. Kepulauan Mentawai	930.000			22.246.650	3.803.670	19.141.163
63	Kab. Padang Pariaman	4.339.436				4.204.973	7.133.282
64	Kab. Pasaman	4.037.879		600.000		2.710.533	2.295.500
65	Kab. Pesisir Selatan	2.775.000				2.933.132	6.980.083
66	Kab. Sijunjung	460.000		550.000		2.815.310	6.052.284
67	Kab. Solok	2.725.834				3.371.910	7.193.533
68	Kab. Tanah Datar	2.100.000				6.219.643	9.635.894
69	Kota Bukit Tinggi					1.329.599	1.849.490
70	Kota Padang Panjang						791.061
71	Kota Padang	3.233.391		7.339.131			4.344.392
72	Kota Payakumbuh	2.418.241		2.429.398		1.329.599	3.049.225



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
61	Kab. Agam	842.540		842.540	20.204.576
62	Kab. Kepulauan Mentawai				46.258.707
63	Kab. Padang Pariaman	713.662		713.662	17.432.870
64	Kab. Pasaman				12.268.270
65	Kab. Pesisir Selatan	848.465		848.465	14.359.486
66	Kab. Sijunjung				9.877.594
67	Kab. Solok	842.540		842.540	15.876.570
68	Kab. Tanah Datar	848.465		848.465	19.438.477
69	Kota Bukit Tinggi	883.841		883.841	4.202.012
70	Kota Padang Panjang	768.376		768.376	1.810.559
71	Kota Padang	792.958		792.958	18.066.402
72	Kota Payakumbuh	879.711		879.711	10.378.331



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
73	Kota Sawahlunto			84.866	101.733		186.599
74	Kota Solok			98.470	227.238		325.708
75	Kota Pariaman			112.258	342.068		454.326
76	Kab. Pasaman Barat			1.709.999	65.013		1.775.012
77	Kab. Dharmasraya			343.430	285.057		628.487
78	Kab. Solok Selatan				175.832		175.832
79	Provinsi Riau	94.644.469		5.028.198		1.943.459	6.971.657
80	Kab. Bengkalis		20.321.045	770.917	1.522.980		22.614.942
81	Kab. Indragiri Hilir			977.812	192.713		1.170.525
82	Kab. Indragiri Hulu			613.668	111.755		725.423
83	Kab. Kampar		48.035.821	1.299.999	148.251		49.484.071
84	Kab. Kuantan Singingi			440.924	87.724		528.648



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
73	Kota Sawahlunto					2.131.581	799.754
74	Kota Solok					2.952.135	4.146.435
75	Kota Pariaman	790.000				2.999.135	3.366.130
76	Kab. Pasaman Barat			2.403.201	12.312.924	3.077.320	6.623.415
77	Kab. Dharmasraya	3.233.598		1.800.000		3.113.182	2.787.754
78	Kab. Solok Selatan	3.382.699			14.117.278	4.315.402	6.894.683
79	Provinsi Riau				30.849.223	3.436.560	3.614.510
80	Kab. Bengkalis	3.647.321		500.000	14.372.640	2.690.287	1.019.950
81	Kab. Indragiri Hilir	937.864			13.705.679	2.819.821	3.034.021
82	Kab. Indragiri Hulu	3.504.693		3.050.000		4.118.090	13.298.116
83	Kab. Kampar			1.100.000		2.625.521	1.467.556
84	Kab. Kuantan Singingi	2.939.656		900.000		3.246.599	3.595.106



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
73	Kota Sawahlunto	828.641		828.641	3.946.575
74	Kota Solok	806.042		806.042	8.230.320
75	Kota Pariaman	713.662		713.662	8.323.253
76	Kab. Pasaman Barat				26.191.872
77	Kab. Dharmasraya				11.563.021
78	Kab. Solok Selatan	300.000		300.000	29.185.894
79	Provinsi Riau	602.648	5.467.939	6.070.587	145.587.006
80	Kab. Bengkalis	768.376		768.376	45.613.516
81	Kab. Indragiri Hilir				21.667.910
82	Kab. Indragiri Hulu				24.696.322
83	Kab. Kampar	768.376		768.376	55.445.524
84	Kab. Kuantan Singingi	420.000		420.000	11.630.009



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
85	Kab. Pelalawan		48.161.202	808.370	270.536		49.240.108
86	Kab. Rokan Hilir			1.160.073	242.298		1.402.371
87	Kab. Rokan Hulu			3.096.999	308.811		3.405.810
88	Kab. Siak			792.289	163.498		955.787
89	Kota Dumai		40.009.500	475.245	811.482		41.296.227
90	Kota Pekanbaru			1.605.553	456.064		2.061.617
91	Kab. Kepulauan Meranti			236.423	52.824		289.247
92	Provinsi Jambi	61.510.651		1.585.196		6.178.648	7.763.844
93	Kab. Batang Hari			332.209	117.766		449.975
94	Kab. Bungo		41.653.043	499.996	171.412		42.324.451
95	Kab. Kerinci			2.718.999	585.117		3.304.116
96	Kab. Merangin			557.315	335.067		892.382



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
85	Kab. Pelalawan	1.975.116					
86	Kab. Rokan Hilir	2.500.000		3.150.000	16.466.524	2.707.829	2.394.363
87	Kab. Rokan Hulu	4.072.922		4.000.000		3.215.157	2.422.585
88	Kab. Siak	2.873.017		1.895.000	16.382.976	2.917.849	2.962.626
89	Kota Dumai	367.500		990.000	19.221.770	2.831.367	7.323.728
90	Kota Pekanbaru	225.000		2.412.593		3.077.564	
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.816.400		3.441.872	13.825.215	3.882.997	
92	Provinsi Jambi					1.329.599	
93	Kab. Batang Hari	2.085.000		2.656.015		3.046.165	2.769.749
94	Kab. Bungo	3.469.451		2.620.000		2.271.023	3.549.696
95	Kab. Kerinci	2.710.306				4.103.925	3.096.025
96	Kab. Merangin	2.906.820		4.356.371		4.250.710	3.833.288
						2.788.678	5.335.046



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
85	Kab. Pelalawan				56.317.416
86	Kab. Rokan Hilir	792.958		792.958	29.949.595
87	Kab. Rokan Hulu	888.113		888.113	18.247.320
88	Kab. Siak	888.113		888.113	33.149.988
89	Kota Dumai				64.953.061
90	Kota Pekanbaru	610.578		610.578	9.192.785
91	Kab. Kepulauan Meranti				20.702.333
92	Provinsi Jambi	602.648	5.303.759	5.906.407	80.996.816
93	Kab. Batang Hari	808.817		808.817	11.820.526
94	Kab. Bungo	848.465		848.465	56.462.317
95	Kab. Kerinci	842.540		842.540	14.940.960
96	Kab. Merangin	883.841		883.841	17.163.138



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
97	Kab. Muaro Jambi			519.079	733.492		1.252.571
98	Kab. Sarolangun			406.141	186.287		592.428
99	Kab. Tanjung Jabung Barat			405.990	1.375.730		1.781.720
100	Kab. Tanjung Jabung Timur			1.022.999	97.799		1.120.798
101	Kab. Tebo			444.175			444.175
102	Kota Jambi		50.159.200		1.264.619		51.423.819
103	Kota Sungai Penuh			111.882	198.062		309.944
104	Provinsi Sumatera Selatan	66.556.151		2.107.296		28.580.500	30.687.796
105	Kab. Lahat			512.054	363.410		875.464
106	Kab. Musi Banyuasin			805.774	658.621		1.464.395
107	Kab. Musi Rawas			484.108	469.257		953.365
108	Kab. Muara Enim		17.084.000	2.232.999	2.490.498		21.807.497



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
97	Kab. Muaro Jambi	3.424.893		2.602.500		4.170.047	1.943.330
98	Kab. Sarolangun	3.661.130		2.160.000		3.982.798	3.027.023
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.600.000		900.000		4.452.879	4.097.988
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.864.778		3.175.000		4.389.224	3.968.102
101	Kab. Tebo	3.210.868		1.643.000		3.021.792	3.220.797
102	Kota Jambi			3.335.744		1.343.365	
103	Kota Sungai Penuh					1.271.691	3.329.690
104	Provinsi Sumatera Selatan				26.799.486	1.270.000	3.948.898
105	Kab. Lahat	2.891.463		3.500.000		1.390.678	5.379.398
106	Kab. Musi Banyuasin	3.800.000		4.507.004		4.559.433	6.551.238
107	Kab. Musi Rawas	2.463.000		5.250.000	13.778.212	4.358.457	8.248.413
108	Kab. Muara Enim	4.438.896		6.236.763		3.551.498	5.188.877



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
97	Kab. Muaro Jambi	808.817		808.817	14.202.158
98	Kab. Sarolangun	515.423		515.423	13.938.802
99	Kab. Tanjung Jabung Barat				12.832.587
100	Kab. Tanjung Jabung Timur				14.517.902
101	Kab. Tebo				11.540.632
102	Kota Jambi	713.662		713.662	56.816.590
103	Kota Sungai Penuh	848.465		848.465	5.759.790
104	Provinsi Sumatera Selatan	437.335	1.744.131	2.181.466	131.443.797
105	Kab. Lahat	808.817		808.817	14.845.820
106	Kab. Musi Banyuasin	842.540		842.540	21.724.610
107	Kab. Musi Rawas	491.515		491.515	35.542.962
108	Kab. Muara Enim	848.465		848.465	42.071.996



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
109	Kab. Ogan Komering Ilir			3.500.999	128.472		3.629.471
110	Kab. Ogan Komering Ulu		17.311.000	450.688	4.158.050		21.919.738
111	Kota Palembang		15.091.948		145.086		15.237.034
112	Kota Prabumulih			232.057	70.660		302.717
113	Kota Pagar Alam			165.391	704.501		869.892
114	Kota Lubuk Linggau		35.095.111	290.999	371.160		35.757.270
115	Kab. Banyuasin			1.094.618	500.207		1.594.825
116	Kab. Ogan Ilir				85.000		85.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur			781.035	3.165.633		3.946.668
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			445.950	612.809		1.058.759
119	Kab. Empat Lawang						
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir			280.665	213.982		494.647



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.140.000		5.641.560		4.378.896	37.146.986
110	Kab. Ogan Komering Ulu	2.084.753				4.094.312	3.229.251
111	Kota Palembang			1.000.000		3.112.005	12.382.329
112	Kota Prabumulih					1.329.599	
113	Kota Pagar Alam			2.900.000		5.703.393	1.932.768
114	Kota Lubuk Linggau			1.850.000		1.491.727	1.847.402
115	Kab. Banyuasin			5.700.000	12.937.220	8.564.429	15.360.770
116	Kab. Ogan Ilir	2.467.931		2.000.000		1.427.638	7.769.563
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.808.088		2.850.000		2.962.304	1.500.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.725.000		5.000.000		2.717.237	5.000.022
119	Kab. Empat Lawang	3.335.165				4.115.486	6.391.997
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.227.555		4.360.000		4.398.092	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	730.711		730.711	52.667.624
110	Kab. Ogan Komering Ulu	808.817		808.817	32.136.871
111	Kota Palembang	808.817		808.817	32.540.185
112	Kota Prabumulih	769.169		769.169	2.401.485
113	Kota Pagar Alam	768.376		768.376	12.174.429
114	Kota Lubuk Linggau	718.637		718.637	41.665.036
115	Kab. Banyuasin	650.226		650.226	44.807.470
116	Kab. Ogan Ilir	420.000		420.000	14.170.132
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	768.376		768.376	14.835.436
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	808.817		808.817	16.309.835
119	Kab. Empat Lawang	420.000		420.000	14.262.648
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	808.817		808.817	12.289.111



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
121	Kab. Musi Rawas Utara			247.404	114.171		361.575
122	Provinsi Bengkulu	32.364.487		1.696.950		15.472.865	17.169.815
123	Kab. Bengkulu Selatan		50.709.656	198.014	1.840.868		52.748.538
124	Kab. Bengkulu Utara			2.517.594	237.574		2.755.168
125	Kab. Rejang Lebong		50.085.134	305.085	1.996.569		52.386.788
126	Kota Bengkulu				7.665.525		7.665.525
127	Kab. Kaur			2.873.999	7.715.096		10.589.095
128	Kab. Seluma			225.431	4.337.367		4.562.798
129	Kab. Mukomuko		50.830.563	263.265	466.093		51.559.921
130	Kab. Lebong			140.217	258.051		398.268
131	Kab. Kepahiang			158.580	821.155		979.735
132	Kab. Bengkulu Tengah			149.145	6.633.917		6.783.062



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
121	Kab. Musi Rawas Utara	300.000			12.014.979	4.207.848	
122	Provinsi Bengkulu						2.744.613
123	Kab. Bengkulu Selatan			3.105.684		3.308.734	2.905.211
124	Kab. Bengkulu Utara	1.050.000		945.000		7.151.894	3.302.615
125	Kab. Rejang Lebong	4.584.775		2.000.000		3.855.474	3.197.034
126	Kota Bengkulu			1.800.000		1.480.459	1.625.797
127	Kab. Kaur	3.652.339				3.585.314	3.345.797
128	Kab. Seluma	2.709.000			12.014.979	4.239.750	2.621.295
129	Kab. Mukomuko	3.543.061		300.000		4.223.338	4.135.089
130	Kab. Lebong	3.140.654					3.966.507
131	Kab. Kepahiang	2.361.000				1.441.117	3.599.840
132	Kab. Bengkulu Tengah	1.125.000				4.377.696	2.918.110



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
121	Kab. Musi Rawas Utara				16.884.402
122	Provinsi Bengkulu	602.648	2.668.521	3.271.169	55.550.084
123	Kab. Bengkulu Selatan				62.068.167
124	Kab. Bengkulu Utara	475.775		475.775	15.680.452
125	Kab. Rejang Lebong	792.958		792.958	66.817.029
126	Kota Bengkulu	459.916		459.916	13.031.697
127	Kab. Kaur				21.172.545
128	Kab. Seluma				26.147.822
129	Kab. Mukomuko				63.761.409
130	Kab. Lebong				7.505.429
131	Kab. Kepahiang	808.817		808.817	9.190.509
132	Kab. Bengkulu Tengah				15.203.868



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
133	Provinsi Lampung	91.128.584		3.271.816			3.271.816
134	Kab. Lampung Barat			331.623	350.695		682.318
135	Kab. Lampung Selatan			3.791.999	5.268.930		9.060.929
136	Kab. Lampung Tengah			2.242.999	424.580		2.667.579
137	Kab. Lampung Utara			730.179	2.288.805		3.018.984
138	Kab. Lampung Timur			4.925.999	1.448.990		6.374.989
139	Kab. Tanggamus			1.834.999	1.192.238		3.027.237
140	Kab. Tulang Bawang		21.868.509	585.041	85.334		22.538.884
141	Kab. Way Kanan			498.927			498.927
142	Kota Bandar Lampung			1.292.360	269.953		1.562.313
143	Kota Metro		42.355.109	189.394	1.400.280		43.944.783
144	Kab. Pesawaran			534.497	444.516		979.013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
133	Provinsi Lampung				27.267.091		4.444.769
134	Kab. Lampung Barat	3.400.190		5.406.767	12.014.979	4.432.096	7.720.644
135	Kab. Lampung Selatan	2.332.000		5.507.490		6.750.271	6.918.286
136	Kab. Lampung Tengah	1.200.000				2.580.607	6.119.873
137	Kab. Lampung Utara					2.587.611	5.260.952
138	Kab. Lampung Timur					2.377.911	3.164.802
139	Kab. Tanggamus	3.183.807		3.240.000	13.808.823	4.002.865	6.133.499
140	Kab. Tulang Bawang	546.000				3.034.375	13.477.900
141	Kab. Way Kanan	3.500.000				4.064.018	25.634.788
142	Kota Bandar Lampung					2.710.659	
143	Kota Metro			1.350.000		2.517.499	
144	Kab. Pesawaran	3.159.104		5.026.175		3.321.208	5.985.453



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
133	Provinsi Lampung	660.816	10.920.837	11.581.653	137.693.913
134	Kab. Lampung Barat	745.483		745.483	34.402.477
135	Kab. Lampung Selatan	801.239		801.239	31.370.215
136	Kab. Lampung Tengah	768.376		768.376	13.336.435
137	Kab. Lampung Utara	808.817		808.817	11.676.364
138	Kab. Lampung Timur	842.540		842.540	12.760.242
139	Kab. Tanggamus	610.578		610.578	34.006.809
140	Kab. Tulang Bawang				39.597.159
141	Kab. Way Kanan	855.757		855.757	34.553.490
142	Kota Bandar Lampung	730.711		730.711	5.003.683
143	Kota Metro	876.077		876.077	48.688.359
144	Kab. Pesawaran				18.470.953



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
145	Kab. Pringsewu			450.271	471.067		921.338
146	Kab. Mesuji			252.941	690.238		943.179
147	Kab. Tulang Bawang Barat			878.042	900.000		1.778.042
148	Kab. Pesisir Barat			189.114			189.114
149	Provinsi DKI Jakarta			1.952.155	1.972.377		3.924.532
150	Provinsi Jawa Barat	193.839.118				1.216.605	1.216.605
151	Kab. Bandung			179.999	2.847.677		3.027.676
152	Kab. Bekasi						
153	Kab. Bogor			6.600.999	10.571.778		17.172.777
154	Kab. Ciamis				2.162.800		2.162.800
155	Kab. Cianjur			5.961.999	3.745.900		9.707.899
156	Kab. Cirebon			4.439.999	2.441.110		6.881.109



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
145	Kab. Pringsewu					2.599.599	4.970.751
146	Kab. Mesuji	2.360.316				3.579.084	27.823.106
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.800.000		2.946.125		4.332.314	12.929.826
148	Kab. Pesisir Barat				12.014.979	2.946.039	6.574.177
149	Provinsi DKI Jakarta		5.373.247				
150	Provinsi Jawa Barat						56.708.323
151	Kab. Bandung	2.000.000		5.300.000			8.586.789
152	Kab. Bekasi	6.890.292				1.500.000	
153	Kab. Bogor	4.363.528		2.800.000		1.329.599	7.134.257
154	Kab. Ciamis	2.800.000		3.000.000		4.393.761	7.594.805
155	Kab. Cianjur	2.800.000				4.258.197	7.836.346
156	Kab. Cirebon	1.343.000		1.800.000		3.166.695	6.896.270



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
145	Kab. Pringsewu				8.491.688
146	Kab. Mesuji				34.705.685
147	Kab. Tulang Bawang Barat				23.786.307
148	Kab. Pesisir Barat				21.724.309
149	Provinsi DKI Jakarta				9.297.779
150	Provinsi Jawa Barat	602.648	20.316.211	20.918.859	272.682.905
151	Kab. Bandung	689.874		689.874	19.604.339
152	Kab. Bekasi	420.000		420.000	8.810.292
153	Kab. Bogor	437.512		437.512	33.237.673
154	Kab. Ciamis	713.662		713.662	20.665.028
155	Kab. Cianjur	843.707		843.707	25.446.149
156	Kab. Cirebon				20.087.074



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
157	Kab. Garut			4.152.999	5.317.234		9.470.233
158	Kab. Indramayu			6.412.999	990.472		7.403.471
159	Kab. Karawang			2.059.999	4.253.564		6.313.563
160	Kab. Kuningan			4.539.999	4.630.141		9.170.140
161	Kab. Majalengka			2.812.999	5.782.091		8.595.090
162	Kab. Purwakarta			1.095.485	2.251.064		3.346.549
163	Kab. Subang			5.054.999	784.693		5.839.692
164	Kab. Sukabumi			7.717.999	6.273.411		13.991.410
165	Kab. Sumedang			4.236.999	4.271.319		8.508.318
166	Kab. Tasikmalaya			379.999	4.397.689		4.777.688
167	Kota Bandung				6.158.519		6.158.519
168	Kota Bekasi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
157	Kab. Garut	1.840.000		4.350.000		3.040.995	7.552.143
158	Kab. Indramayu			6.000.000		1.700.000	19.421.473
159	Kab. Karawang						7.085.220
160	Kab. Kuningan	2.469.552		3.150.000		5.945.851	7.356.498
161	Kab. Majalengka					4.766.358	5.713.964
162	Kab. Purwakarta					1.500.000	9.421.335
163	Kab. Subang	3.670.854				1.500.000	8.476.099
164	Kab. Sukabumi	2.974.135		500.000		2.938.580	6.745.357
165	Kab. Sumedang	5.319.249		1.320.000			6.613.597
166	Kab. Tasikmalaya	2.219.497		3.399.000		4.324.927	6.406.722
167	Kota Bandung			4.750.000		1.271.691	
168	Kota Bekasi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
157	Kab. Garut	768.376		768.376	27.021.747
158	Kab. Indramayu	768.376		768.376	35.293.320
159	Kab. Karawang	420.000		420.000	13.818.783
160	Kab. Kuningan				28.092.041
161	Kab. Majalengka				19.075.412
162	Kab. Purwakarta				14.267.884
163	Kab. Subang	808.817		808.817	20.295.462
164	Kab. Sukabumi	843.707		843.707	27.993.189
165	Kab. Sumedang	531.282		531.282	22.292.446
166	Kab. Tasikmalaya				21.127.834
167	Kota Bandung	504.718		504.718	12.684.928
168	Kota Bekasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
169	Kota Bogor				7.920.958		7.920.958
170	Kota Cirebon				3.859.398		3.859.398
171	Kota Depok				429.662		429.662
172	Kota Sukabumi			361.235	722.081		1.083.316
173	Kota Tasikmalaya			674.593	1.310.069		1.984.662
174	Kota Cimahi						
175	Kota Banjar			182.576	191.299		373.875
176	Kab. Bandung Barat			4.307.999	6.702.357		11.010.356
177	Kab. Pangandaran			337.812	595.124		932.936
178	Provinsi Jawa Tengah	72.736.498		20.075.588		4.500.000	24.575.588
179	Kab. Banjarnegara			858.632	5.716.770		6.575.402
180	Kab. Banyumas			4.842.999	6.872.198		11.715.197



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
169	Kota Bogor	1.229.217		2.150.000		1.500.000	
170	Kota Cirebon	2.495.008		2.200.000		664.800	
171	Kota Depok					1.644.892	
172	Kota Sukabumi						2.860.957
173	Kota Tasikmalaya			2.500.000		1.521.731	7.187.983
174	Kota Cimahi					664.800	
175	Kota Banjar					1.329.599	
176	Kab. Bandung Barat	2.883.000				1.500.000	6.117.200
177	Kab. Pangandaran	1.961.174		3.200.000		4.465.994	27.205.631
178	Provinsi Jawa Tengah		3.317.943		20.406.051	3.046.165	5.140.729
179	Kab. Banjarnegara	2.111.309	3.795.646			4.377.288	3.434.040
180	Kab. Banyumas	2.642.597		7.500.000		4.222.558	4.572.905



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
169	Kota Bogor				12.800.175
170	Kota Cirebon	420.000		420.000	9.639.206
171	Kota Depok	610.578		610.578	2.685.132
172	Kota Sukabumi	420.000		420.000	4.364.273
173	Kota Tasikmalaya				13.194.376
174	Kota Cimahi	808.817		808.817	1.473.617
175	Kota Banjar	808.817		808.817	2.512.291
176	Kab. Bandung Barat				21.510.556
177	Kab. Pangandaran				37.765.735
178	Provinsi Jawa Tengah	602.648	18.128.066	18.730.714	147.953.688
179	Kab. Banjarnegara	769.169		769.169	21.062.854
180	Kab. Banyumas	553.433		553.433	31.206.690



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
181	Kab. Batang			787.905	1.373.274		2.161.179
182	Kab. Blora			2.156.999	3.454.630		5.611.629
183	Kab. Boyolali			886.936	1.619.622		2.506.558
184	Kab. Brebes			2.759.999	8.329.645		11.089.644
185	Kab. Cilacap			2.415.999	7.600.065		10.016.064
186	Kab. Demak			3.943.999	2.770.851		6.714.850
187	Kab. Grobogan			1.969.999	2.499.569		4.469.568
188	Kab. Jepara			2.073.159	3.968.437		6.041.596
189	Kab. Karanganyar				4.325.606		4.325.606
190	Kab. Kebumen			3.559.999	5.082.770		8.642.769
191	Kab. Kendal			950.333	3.878.639		4.828.972
192	Kab. Klaten			4.407.999	2.887.256		7.295.255



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
181	Kab. Batang	3.180.507		3.215.000		664.800	4.448.204
182	Kab. Blora	1.445.468		2.260.000		4.381.363	8.435.526
183	Kab. Boyolali	3.244.805	1.362.021			5.841.048	8.096.847
184	Kab. Brebes	2.915.010				4.520.357	11.227.510
185	Kab. Cilacap	2.797.587		2.700.000		1.386.155	8.237.495
186	Kab. Demak	1.500.000		1.000.000		2.985.101	2.244.038
187	Kab. Grobogan	2.599.450		1.140.000		4.484.661	8.565.132
188	Kab. Jepara	3.505.235	3.044.513	450.000		1.700.000	5.748.167
189	Kab. Karanganyar	2.781.133	2.343.609			4.291.316	6.198.731
190	Kab. Kebumen	2.947.143		6.492.000		5.533.842	4.358.644
191	Kab. Kendal	1.882.463	3.497.378	1.650.000		3.220.037	2.726.997
192	Kab. Klaten	2.693.119	2.982.636	2.000.000		2.076.872	6.036.662



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
181	Kab. Batang	808.817		808.817	14.478.507
182	Kab. Blora	650.226		650.226	22.784.212
183	Kab. Boyolali	729.521		729.521	21.780.800
184	Kab. Brebes	808.817		808.817	30.561.338
185	Kab. Cilacap	787.407		787.407	25.924.708
186	Kab. Demak				14.443.989
187	Kab. Grobogan	730.711		730.711	21.989.522
188	Kab. Jepara	808.817		808.817	21.298.328
189	Kab. Karanganyar	759.938		759.938	20.700.333
190	Kab. Kebumen	300.000		300.000	28.274.398
191	Kab. Kendal	531.282		531.282	18.337.129
192	Kab. Klaten	689.874		689.874	23.774.418



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
193	Kab. Kudus			859.019	2.366.928		3.225.947
194	Kab. Magelang			1.178.419	5.381.687		6.560.106
195	Kab. Pati			1.147.712	4.909.446		6.057.158
196	Kab. Pekalongan			3.531.999	4.886.674		8.418.673
197	Kab. Pemasang			1.309.999	4.025.554		5.335.553
198	Kab. Purbalingga			2.029.999	2.462.139		4.492.138
199	Kab. Purworejo				915.187		915.187
200	Kab. Rembang			570.298	2.954.327		3.524.625
201	Kab. Semarang			947.039	3.116.341		4.063.380
202	Kab. Sragen			826.167	2.773.002		3.599.169
203	Kab. Sukoharjo				2.218.982		2.218.982
204	Kab. Tegal			1.550.972	3.540.812		5.091.784



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
193	Kab. Kudus	3.200.178		600.000		2.877.807	4.189.566
194	Kab. Magelang	2.469.520	1.211.015		12.014.979	2.092.542	3.823.900
195	Kab. Pati	1.743.329		1.900.000		4.230.879	7.829.981
196	Kab. Pekalongan	2.373.905		6.938.415		1.700.000	3.732.850
197	Kab. Pemasang	3.625.000				4.249.580	7.135.343
198	Kab. Purbalingga					2.763.310	3.954.340
199	Kab. Purworejo	2.531.267	2.767.351		12.014.979	4.341.342	7.905.035
200	Kab. Rembang	1.683.204		2.200.000		2.951.072	1.425.530
201	Kab. Semarang	2.446.974	5.492.865	500.000		4.458.727	4.720.813
202	Kab. Sragen	3.433.423	1.775.000	3.400.000		3.022.481	6.866.401
203	Kab. Sukoharjo	2.600.000				5.555.139	4.564.789
204	Kab. Tegal	3.282.803				3.267.008	1.440.420



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
193	Kab. Kudus	967.409		967.409	15.060.907
194	Kab. Magelang	607.125		607.125	28.779.187
195	Kab. Pati	689.874		689.874	22.451.221
196	Kab. Pekalongan	808.817		808.817	23.972.660
197	Kab. Pemasang	610.578		610.578	20.956.054
198	Kab. Purbalingga	808.817		808.817	12.018.605
199	Kab. Purworejo	792.958		792.958	31.268.119
200	Kab. Rembang	768.376		768.376	12.552.807
201	Kab. Semarang	808.817		808.817	22.491.576
202	Kab. Sragen	674.807		674.807	22.771.281
203	Kab. Sukoharjo	801.239		801.239	15.740.149
204	Kab. Tegal	531.282		531.282	13.613.297



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
205	Kab. Temanggung			683.091	7.338.775		8.021.866
206	Kab. Wonogiri			750.930	1.492.989		2.243.919
207	Kab. Wonosobo			2.517.999	3.308.555		5.826.554
208	Kota Magelang			107.916	2.737.519		2.845.435
209	Kota Pekalongan			322.735	2.163.957		2.486.692
210	Kota Salatiga			193.051	3.638.503		3.831.554
211	Kota Semarang			1.752.819	1.301.850		3.054.669
212	Kota Surakarta			454.611	5.086.441		5.541.052
213	Kota Tegal			251.670	1.681.809		1.933.479
214	Provinsi DI Yogyakarta	17.494.027		948.000		11.127.162	12.075.162
215	Kab. Bantul			4.378.999	2.189.328		6.568.327
216	Kab. Gunung Kidul			619.400	643.846		1.263.246



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
205	Kab. Temanggung	945.000	1.559.300	1.500.000	12.014.979	1.329.599	7.124.163
206	Kab. Wonogiri	3.187.227	2.404.566			3.002.286	8.497.326
207	Kab. Wonosobo	6.048.396	5.912.199	7.500.000	12.318.748	4.408.255	4.363.737
208	Kota Magelang		1.156.584		7.799.999	1.500.000	
209	Kota Pekalongan	2.250.000		1.800.000		1.477.385	
210	Kota Salatiga					1.484.430	1.070.679
211	Kota Semarang	2.964.099		500.000		3.013.758	1.007.705
212	Kota Surakarta	2.652.579	4.656.477	2.513.445		2.978.155	
213	Kota Tegal	1.806.877		2.991.410		1.271.691	
214	Provinsi DI Yogyakarta		5.944.814		18.515.190		3.798.751
215	Kab. Bantul	2.315.155	5.504.733		12.014.979	3.400.000	3.614.026
216	Kab. Gunung Kidul		6.522.075	2.967.353		4.417.474	4.461.611



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
205	Kab. Temanggung	761.240		761.240	33.256.147
206	Kab. Wonogiri	808.817		808.817	20.144.141
207	Kab. Wonosobo	768.376		768.376	47.146.265
208	Kota Magelang	350.000		350.000	13.652.018
209	Kota Pekalongan	848.465		848.465	8.862.542
210	Kota Salatiga	808.817		808.817	7.195.480
211	Kota Semarang	907.739		907.739	11.447.970
212	Kota Surakarta	689.874		689.874	19.031.582
213	Kota Tegal	689.874		689.874	8.693.331
214	Provinsi DI Yogyakarta		1.992.218	1.992.218	59.820.162
215	Kab. Bantul	481.629		481.629	33.898.849
216	Kab. Gunung Kidul	713.662		713.662	20.345.421



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
217	Kab. Kulon Progo			3.489.999	801.900		4.291.899
218	Kab. Sleman						
219	Kota Yogyakarta				523.650		523.650
220	Provinsi Jawa Timur	109.485.279		11.887.592		14.383.794	26.271.386
221	Kab. Bangkalan			3.343.999	414.960		3.758.959
222	Kab. Banyuwangi			1.380.692	924.786		2.305.478
223	Kab. Blitar				2.338.779		2.338.779
224	Kab. Bojonegoro			1.017.255	942.625		1.959.880
225	Kab. Bondowoso			1.006.999	3.303.036		4.310.035
226	Kab. Gresik			1.333.303	6.910.107		8.243.410
227	Kab. Jember			1.559.999	3.983.980		5.543.979
228	Kab. Jombang			1.214.907	1.721.577		2.936.484



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
217	Kab. Kulon Progo	3.748.594	1.637.515	1.100.000	12.014.979	4.249.024	22.967.313
218	Kab. Sleman	3.223.090	3.444.053		12.014.979	2.913.467	10.485.913
219	Kota Yogyakarta			3.014.116	10.616.088		
220	Provinsi Jawa Timur		6.508.139		32.510.516	3.297.406	9.823.821
221	Kab. Bangkalan	2.572.104		5.012.646	12.014.979	4.644.477	
222	Kab. Banyuwangi					4.194.505	5.363.907
223	Kab. Blitar	2.767.766		1.000.000		5.648.218	6.627.251
224	Kab. Bojonegoro	1.763.153		7.360.902		4.900.000	3.694.724
225	Kab. Bondowoso	3.253.763		3.600.000	14.391.110	4.337.664	25.046.655
226	Kab. Gresik	3.609.789		600.000	12.014.979	4.635.640	6.793.724
227	Kab. Jember	802.000		4.800.000		3.060.629	5.660.621
228	Kab. Jombang	3.060.800		1.250.000		1.625.959	1.597.734



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
217	Kab. Kulon Progo	594.719		594.719	50.604.043
218	Kab. Sleman	619.515		619.515	32.701.017
219	Kota Yogyakarta	753.310		753.310	14.907.164
220	Provinsi Jawa Timur	602.648	11.699.472	12.302.120	200.198.667
221	Kab. Bangkalan				28.003.165
222	Kab. Banyuwangi	842.540		842.540	12.706.430
223	Kab. Blitar	792.958		792.958	19.174.972
224	Kab. Bojonegoro	808.817		808.817	20.487.476
225	Kab. Bondowoso	808.817		808.817	55.748.044
226	Kab. Gresik	792.958		792.958	36.690.500
227	Kab. Jember				19.867.229
228	Kab. Jombang	753.310		753.310	11.224.287



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
229	Kab. Kediri			2.899.999	1.921.092		4.821.091
230	Kab. Lamongan			4.829.999	5.195.781		10.025.780
231	Kab. Lumajang				3.585.675		3.585.675
232	Kab. Madiun			568.608	988.113		1.556.721
233	Kab. Magetan			494.834	2.307.265		2.802.099
234	Kab. Malang			5.576.999	5.525.334		11.102.333
235	Kab. Mojokerto			1.084.463	2.951.376		4.035.839
236	Kab. Nganjuk			3.249.999	966.434		4.216.433
237	Kab. Ngawi			698.285	2.506.690		3.204.975
238	Kab. Pacitan			447.564	5.898.256		6.345.820
239	Kab. Pamekasan			1.264.999	1.380.967		2.645.966
240	Kab. Pasuruan			1.544.012	7.394.188		8.938.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
229	Kab. Kediri	400.000				2.998.198	6.613.816
230	Kab. Lamongan	3.973.079		1.000.000		3.916.976	5.210.000
231	Kab. Lumajang	2.731.646	4.480.302	1.000.000	12.627.124	3.170.663	6.971.158
232	Kab. Madiun	2.300.000		1.550.000		3.912.662	7.266.400
233	Kab. Magetan					2.817.770	6.932.160
234	Kab. Malang	4.118.664	4.813.000	1.000.000	14.267.887	3.068.667	7.394.116
235	Kab. Mojokerto	2.278.123		5.040.000		2.946.923	8.122.073
236	Kab. Nganjuk	2.195.916		900.000		3.082.955	7.246.608
237	Kab. Ngawi	3.453.389		500.000		3.217.570	8.486.822
238	Kab. Pacitan	2.308.019	4.878.311	640.000		3.200.000	11.928.125
239	Kab. Pamekasan	700.000		6.300.000		4.686.588	4.650.561
240	Kab. Pasuruan	2.975.012	5.293.029	3.600.000	14.151.109	3.098.720	8.452.644



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
229	Kab. Kediri				14.833.105
230	Kab. Lamongan	784.719		784.719	24.910.554
231	Kab. Lumajang	730.711		730.711	35.297.279
232	Kab. Madiun	730.711		730.711	17.316.494
233	Kab. Magetan	730.711		730.711	13.282.740
234	Kab. Malang				45.764.667
235	Kab. Mojokerto	715.645		715.645	23.138.603
236	Kab. Nganjuk	666.085		666.085	18.307.997
237	Kab. Ngawi	769.169		769.169	19.631.925
238	Kab. Pacitan	785.029		785.029	30.085.304
239	Kab. Pamekasan				18.983.115
240	Kab. Pasuruan	826.020		826.020	47.334.734



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
241	Kab. Ponorogo			734.449	4.113.466		4.847.915
242	Kab. Probolinggo			4.060.999	4.579.881		8.640.880
243	Kab. Sampang			3.049.999	3.157.407		6.207.406
244	Kab. Sidoarjo				446.366		446.366
245	Kab. Situbondo			557.917	2.777.241		3.335.158
246	Kab. Sumenep			3.299.999	405.161		3.705.160
247	Kab. Trenggalek			1.759.999	2.162.635		3.922.634
248	Kab. Tuban			969.334	1.736.125		2.705.459
249	Kab. Tulungagung			961.789	5.663.933		6.625.722
250	Kota Blitar			131.429	1.309.718		1.441.147
251	Kota Kediri			271.404	1.216.681		1.488.085
252	Kota Madiun			156.052	1.761.830		1.917.882



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
241	Kab. Ponorogo	2.682.326		1.500.000		3.969.838	9.155.875
242	Kab. Probolinggo	2.700.000	6.294.184	2.000.000	10.500.000	2.915.631	8.666.969
243	Kab. Sampang	1.710.000		6.608.559	12.014.979	4.900.000	602.000
244	Kab. Sidoarjo	1.658.232				1.754.161	
245	Kab. Situbondo	2.760.000		3.150.000	12.014.979	5.766.138	6.922.394
246	Kab. Sumenep	2.600.000		2.350.000		1.779.615	8.318.222
247	Kab. Trenggalek	1.192.000		2.700.000		2.914.977	6.733.498
248	Kab. Tuban	2.806.431				2.236.644	2.637.051
249	Kab. Tulungagung			3.250.000		4.213.812	9.337.004
250	Kota Blitar			450.000		1.380.390	2.640.986
251	Kota Kediri					664.800	1.636.153
252	Kota Madiun						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
241	Kab. Ponorogo	612.957		612.957	22.768.911
242	Kab. Probolinggo	713.662		713.662	42.431.326
243	Kab. Sampang				32.042.944
244	Kab. Sidoarjo	753.310		753.310	4.612.069
245	Kab. Situbondo	808.817		808.817	34.757.486
246	Kab. Sumenep	801.239		801.239	19.554.236
247	Kab. Trenggalek	769.169		769.169	18.232.278
248	Kab. Tuban	551.781		551.781	10.937.366
249	Kab. Tulungagung	753.310		753.310	24.179.848
250	Kota Blitar	730.711		730.711	6.643.234
251	Kota Kediri				3.789.038
252	Kota Madiun				1.917.882



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan Stunting	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
253	Kota Malang			783.050	950.709		1.733.759
254	Kota Mojokerto			118.959	968.234		1.087.193
255	Kota Pasuruan				81.482		81.482
256	Kota Probolinggo		19.063.433	234.987			19.298.420
257	Kota Surabaya			2.659.717	5.521.226		8.180.943
258	Kota Batu			199.860	526.834		726.694
259	Provinsi Kalimantan Barat	88.095.722	38.457.045				38.457.045
260	Kab. Bengkayang			407.366	140.818		548.184
261	Kab. Landak			613.633	1.520.304		2.133.937
262	Kab. Kapuas Hulu			412.789	642.021		1.054.810
263	Kab. Ketapang		52.580.744	4.273.999	243.778		57.098.521
264	Kab. Mempawah			418.764	156.107		574.871



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
253	Kota Malang	3.390.000		2.000.000		2.954.218	904.023
254	Kota Mojokerto					4.056.951	
255	Kota Pasuruan	2.952.882		500.000		2.188.584	
256	Kota Probolinggo		1.441.454			4.102.908	3.928.827
257	Kota Surabaya					664.800	
258	Kota Batu			2.000.000		2.656.827	1.505.303
259	Provinsi Kalimantan Barat				31.979.391		6.005.252
260	Kab. Bengkayang				19.398.749	3.039.759	6.028.096
261	Kab. Landak	2.757.000		1.950.000	19.800.486	4.900.000	4.341.783
262	Kab. Kapuas Hulu	453.000		3.000.000	20.444.648	4.692.108	8.296.567
263	Kab. Ketapang	900.000		5.054.149	28.951.601	3.263.446	4.381.329
264	Kab. Mempawah	4.457.965		1.950.000		3.185.577	4.996.096



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
253	Kota Malang	792.958		792.958	11.774.958
254	Kota Mojokerto	753.310		753.310	5.897.454
255	Kota Pasuruan	768.376		768.376	6.491.324
256	Kota Probolinggo	826.020		826.020	29.597.629
257	Kota Surabaya	753.310		753.310	9.599.053
258	Kota Batu	768.376		768.376	7.657.200
259	Provinsi Kalimantan Barat		8.848.560	8.848.560	173.385.970
260	Kab. Bengkayang	580.049		580.049	29.594.837
261	Kab. Landak	420.000		420.000	36.303.206
262	Kab. Kapuas Hulu	842.540		842.540	38.783.673
263	Kab. Ketapang	842.540		842.540	100.491.586
264	Kab. Mempawah				15.164.509



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
265	Kab. Sambas			4.485.999	464.142		4.950.141
266	Kab. Sanggau		48.149.890	700.757	575.173		49.425.820
267	Kab. Sintang		51.183.000	2.089.999	1.830.207		55.103.206
268	Kota Pontianak			875.055	595.870		1.470.925
269	Kota Singkawang		41.706.889	333.989	104.448		42.145.326
270	Kab. Sekadau			296.771	341.652		638.423
271	Kab. Melawi			317.665	683.617		1.001.282
272	Kab. Kayong Utara			183.322	2.797.497		2.980.819
273	Kab. Kubu Raya			817.175	995.691		1.812.866
274	Provinsi Kalimantan Tengah	58.869.716		1.214.004			1.214.004
275	Kab. Barito Selatan			194.627	592.329		786.956
276	Kab. Barito Utara		49.597.217	188.195	465.593		50.251.005



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
265	Kab. Sambas			1.530.000	19.422.911	3.887.136	7.370.888
266	Kab. Sanggau	1.575.000		3.000.000	13.453.494	3.400.000	8.279.789
267	Kab. Sintang			1.800.000	23.110.675	6.373.816	3.410.560
268	Kota Pontianak	2.836.732				2.962.200	
269	Kota Singkawang			950.000			1.518.401
270	Kab. Sekadau	2.691.000				3.251.918	2.882.701
271	Kab. Melawi	3.900.000		450.000	12.993.957	4.826.764	3.176.847
272	Kab. Kayong Utara	1.620.828			12.014.979	4.333.006	3.141.632
273	Kab. Kubu Raya	1.417.500		1.981.875		1.776.791	9.142.671
274	Provinsi Kalimantan Tengah				20.523.075	2.083.039	9.588.666
275	Kab. Barito Selatan					4.900.000	4.882.086
276	Kab. Barito Utara	270.000				5.953.391	3.163.671



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
265	Kab. Sambas				37.161.076
266	Kab. Sanggau				79.134.103
267	Kab. Sintang	842.540		842.540	90.640.797
268	Kota Pontianak	808.817		808.817	8.078.674
269	Kota Singkawang				44.613.727
270	Kab. Sekadau	420.000		420.000	9.884.042
271	Kab. Melawi	842.540		842.540	27.191.390
272	Kab. Kayong Utara				24.091.264
273	Kab. Kubu Raya				16.131.703
274	Provinsi Kalimantan Tengah	555.071	6.136.354	6.691.425	98.969.925
275	Kab. Barito Selatan	420.000		420.000	10.989.042
276	Kab. Barito Utara	808.817		808.817	60.446.884



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
277	Kab. Kapuas			3.481.999	1.213.142		4.695.141
278	Kab. Kotawaringin Barat		44.247.323	474.640	1.195.706		45.917.669
279	Kab. Kotawaringin Timur		46.665.881	2.109.999	720.236		49.496.116
280	Kota Palangkaraya			433.722	411.146		844.868
281	Kab. Katingan			289.508	270.328		559.836
282	Kab. Seruyan			302.259	374.182		676.441
283	Kab. Sukamara			93.417	855.171		948.588
284	Kab. Lamandau			108.790	533.606		642.396
285	Kab. Gunung Mas			195.094	559.947		755.041
286	Kab. Pulang Pisau			176.158	632.224		808.382
287	Kab. Murung Raya			195.311	885.302		1.080.613
288	Kab. Barito Timur			551.999			551.999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
277	Kab. Kapuas	2.950.000		6.000.000		3.879.312	3.824.320
278	Kab. Kotawaringin Barat	500.000		1.000.000		1.625.959	
279	Kab. Kotawaringin Timur					2.848.056	4.221.270
280	Kota Palangkaraya	1.741.118		700.000		1.492.621	2.192.439
281	Kab. Katingan	410.000		3.275.000		2.764.135	2.755.026
282	Kab. Seruyan	1.000.000		150.000	13.806.375	2.640.991	3.301.104
283	Kab. Sukamara			960.000		4.218.099	4.239.680
284	Kab. Lamandau	650.000		301.800		1.500.000	2.199.999
285	Kab. Gunung Mas	1.659.000		570.000		3.256.821	2.008.478
286	Kab. Pulang Pisau					1.434.670	5.005.373
287	Kab. Murung Raya					4.420.083	
288	Kab. Barito Timur	600.000		150.000		4.258.157	2.742.131



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
277	Kab. Kapuas	713.662		713.662	22.062.435
278	Kab. Kotawaringin Barat	491.634		491.634	49.535.262
279	Kab. Kotawaringin Timur	420.000		420.000	56.985.442
280	Kota Palangkaraya	808.817		808.817	7.779.863
281	Kab. Katingan	536.913		536.913	10.300.910
282	Kab. Seruyan	718.637		718.637	22.293.548
283	Kab. Sukamara				10.366.367
284	Kab. Lamandau	655.380		655.380	5.949.575
285	Kab. Gunung Mas	636.035		636.035	8.885.375
286	Kab. Pulang Pisau				7.248.425
287	Kab. Murung Raya	689.874		689.874	6.190.570
288	Kab. Barito Timur	451.986		451.986	8.754.273



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan Stunting	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	36.258.358	36.711.659	1.005.347		3.424.674	41.141.680
290	Kab. Banjar		42.417.922	786.829	592.844		43.797.595
291	Kab. Barito Kuala			427.544	70.200		497.744
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		41.529.773	293.891			41.823.664
293	Kab. Hulu Sungai Tengah			339.664	575.015		914.679
294	Kab. Hulu Sungai Utara			579.999			579.999
295	Kab. Kotabaru		15.126.735	506.864	123.024		15.756.623
296	Kab. Tabalong			338.923	315.063		653.986
297	Kab. Tanah Laut			478.481	240.000		718.481
298	Kab. Tapin			253.074			253.074
299	Kota Banjarbaru			364.003	778.844		1.142.847
300	Kota Banjarmasin			971.348	3.111.863		4.083.211



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
289	Provinsi Kalimantan Selatan				24.500.517	1.270.000	31.472.087
290	Kab. Banjar	2.954.016		5.933.829	12.014.979		7.356.582
291	Kab. Barito Kuala	2.625.000		1.500.000		3.644.370	5.032.699
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.050.010		4.330.000		4.417.122	22.558.777
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.916.000		1.220.000		4.423.557	6.221.387
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.996.706		1.000.000	12.014.979	3.200.000	6.844.143
295	Kab. Kotabaru	800.000			14.839.481	4.347.686	5.425.495
296	Kab. Tabalong	738.000				3.132.399	5.419.319
297	Kab. Tanah Laut	3.174.423			14.781.771	3.075.302	5.951.760
298	Kab. Tapin	3.531.794		1.200.000		2.254.246	6.406.730
299	Kota Banjarbaru			3.426.212	11.222.562	3.060.629	3.149.580
300	Kota Banjarmasin	841.468		774.385			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	451.986	3.914.471	4.366.457	139.009.099
290	Kab. Banjar	730.711		730.711	72.787.712
291	Kab. Barito Kuala	718.637		718.637	14.018.450
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	808.817		808.817	75.988.390
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	808.817		808.817	16.504.440
294	Kab. Hulu Sungai Utara	200.000		200.000	25.835.827
295	Kab. Kotabaru				41.169.285
296	Kab. Tabalong	769.169		769.169	10.712.873
297	Kab. Tanah Laut	769.169		769.169	28.470.906
298	Kab. Tapin	769.169		769.169	14.415.013
299	Kota Banjarbaru	769.169		769.169	22.770.999
300	Kota Banjarmasin	883.841		883.841	6.582.905



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
301	Kab. Balangan			192.506			192.506
302	Kab. Tanah Bumbu			1.767.999	941.188		2.709.187
303	Provinsi Kalimantan Timur	54.885.087		2.990.063		8.835.578	11.825.641
304	Kab. Berau			322.856	1.938.723		2.261.579
305	Kab. Kutai Kartanegara				4.337.833		4.337.833
306	Kab. Kutai Barat			2.379.999	7.133.769		9.513.768
307	Kab. Kutai Timur				2.972.342		2.972.342
308	Kab. Paser			412.610	3.997.393		4.410.003
309	Kota Balikpapan			878.042	71.018		949.060
310	Kota Bontang			256.892	583.307		840.199
311	Kota Samarinda		54.187.501	1.212.404	1.169.220		56.569.125
312	Kab. Penajam Paser Utara			1.172.999	1.183.312		2.356.311



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
301	Kab. Balangan	4.529.833				1.329.599	5.985.535
302	Kab. Tanah Bumbu	2.450.000		3.836.620	15.470.773	4.324.343	6.663.516
303	Provinsi Kalimantan Timur				40.027.953		1.816.270
304	Kab. Berau			600.000	21.512.226	4.481.811	20.905.206
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.932.479		6.385.870		1.815.935	2.523.499
306	Kab. Kutai Barat					4.261.933	7.337.284
307	Kab. Kutai Timur	1.306.104			13.497.062	4.823.194	2.567.144
308	Kab. Paser	2.434.477		1.800.000		3.194.386	3.955.025
309	Kota Balikpapan	1.261.011		3.794.825		1.625.959	866.486
310	Kota Bontang						
311	Kota Samarinda			600.000		3.400.000	2.186.013
312	Kab. Penajam Paser Utara					4.448.291	3.223.117



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
301	Kab. Balangan	551.106		551.106	12.588.579
302	Kab. Tanah Bumbu	790.579		790.579	36.245.018
303	Provinsi Kalimantan Timur	602.648	1.230.921	1.833.569	110.388.520
304	Kab. Berau	808.817		808.817	50.569.639
305	Kab. Kutai Kartanegara	848.465		848.465	19.844.081
306	Kab. Kutai Barat	436.127		436.127	21.549.112
307	Kab. Kutai Timur	420.000		420.000	25.585.846
308	Kab. Paser				15.793.891
309	Kota Balikpapan	610.578		610.578	9.107.919
310	Kota Bontang				840.199
311	Kota Samarinda				62.755.138
312	Kab. Penajam Paser Utara	808.817		808.817	10.836.536



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
313	Kab. Mahakam Ulu			36.845	103.478		140.323
314	Provinsi Sulawesi Utara	70.289.600	51.051.432	639.360		1.636.541	53.327.333
315	Kab. Bolaang Mongondow			2.794.999	3.434.964		6.229.963
316	Kab. Minahasa			378.025	4.874.975		5.253.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe		50.176.097	146.161	5.837.409		56.159.667
318	Kota Bitung			326.881	1.174.032		1.500.913
319	Kota Manado			562.025	2.311.726		2.873.751
320	Kab. Kepulauan Talaud			136.197	1.349.894		1.486.091
321	Kab. Minahasa Selatan			262.049	3.178.881		3.440.930
322	Kota Tomohon			110.409	1.772.653		1.883.062
323	Kab. Minahasa Utara		50.646.000	252.494	2.933.132		53.831.626
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			70.040	736.960		807.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
313	Kab. Mahakam Ulu				20.490.333	4.811.757	
314	Provinsi Sulawesi Utara				25.414.499		3.324.216
315	Kab. Bolaang Mongondow			930.000		1.700.000	4.276.245
316	Kab. Minahasa	2.577.244		2.685.873		4.577.916	3.097.578
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.000.000			12.355.624	11.292.641	3.446.267
318	Kota Bitung			1.100.000	11.161.856	3.580.000	1.897.955
319	Kota Manado			2.964.694	10.590.180		
320	Kab. Kepulauan Talaud				17.650.309	10.545.000	1.900.511
321	Kab. Minahasa Selatan	1.500.000				4.900.000	3.251.367
322	Kota Tomohon			500.000			2.086.057
323	Kab. Minahasa Utara	1.805.000		1.000.000	12.014.979	3.084.859	3.351.249
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2.491.604		2.465.462		5.321.202	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
313	Kab. Mahakam Ulu	420.000		420.000	25.862.413
314	Provinsi Sulawesi Utara	634.366	15.736.962	16.371.328	168.726.976
315	Kab. Bolaang Mongondow	437.512		437.512	13.573.720
316	Kab. Minahasa	420.000		420.000	18.611.611
317	Kab. Kepulauan Sangihe				84.254.199
318	Kota Bitung	713.662		713.662	19.954.386
319	Kota Manado	842.540		842.540	17.271.165
320	Kab. Kepulauan Talaud				31.581.911
321	Kab. Minahasa Selatan				13.092.297
322	Kota Tomohon				4.469.119
323	Kab. Minahasa Utara				75.087.713
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro				11.085.268



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
325	Kota Kotamobagu		43.647.299	162.253	666.378		44.475.930
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara			2.012.999	2.348.944		4.361.943
327	Kab. Minahasa Tenggara			138.995	958.814		1.097.809
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur			108.923	189.037		297.960
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			102.988	2.882.735		2.985.723
330	Provinsi Sulawesi Tengah	82.843.102		1.069.558			1.069.558
331	Kab. Banggai		52.170.200	1.449.999	6.895.641		60.515.840
332	Kab. Banggai Kepulauan				1.832.670		1.832.670
333	Kab. Buol			264.336	1.754.143		2.018.479
334	Kab. Toli-Toli		50.215.294	356.368	1.716.167		52.287.829
335	Kab. Donggala			563.673	4.166.299		4.729.972
336	Kab. Morowali		52.536.831	173.272	1.991.329		54.701.432



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
325	Kota Kotamobagu			3.373.713		1.380.390	1.706.141
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara					2.909.581	1.834.801
327	Kab. Minahasa Tenggara					1.380.390	2.561.025
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.400.000				2.982.563	3.771.444
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.093.000		1.800.000		4.540.498	3.147.881
330	Provinsi Sulawesi Tengah				27.637.156		47.607.072
331	Kab. Banggai	3.243.541				3.130.749	6.062.432
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.510.945		4.169.315	12.496.960	4.432.301	8.401.405
333	Kab. Buol	1.425.000		800.000	12.517.012	4.447.141	7.128.865
334	Kab. Toli-Toli	1.982.646		200.000	12.817.494	2.890.355	1.068.754
335	Kab. Donggala	3.178.635		5.058.388	13.524.626	4.131.665	24.840.609
336	Kab. Morowali	1.942.564			12.014.979	4.497.194	9.247.098



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
325	Kota Kotamobagu	420.000		420.000	51.356.174
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara				9.106.325
327	Kab. Minahasa Tenggara				5.039.224
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				9.451.967
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan				14.567.102
330	Provinsi Sulawesi Tengah	634.366	11.150.320	11.784.686	170.941.574
331	Kab. Banggai	808.817		808.817	73.761.379
332	Kab. Banggai Kepulauan				33.843.596
333	Kab. Buol				28.336.497
334	Kab. Toli-Toli				71.247.078
335	Kab. Donggala	713.662		713.662	56.177.557
336	Kab. Morowali				82.403.267



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
337	Kab. Poso			350.218	4.114.073		4.464.291
338	Kota Palu						
339	Kab. Parigi Moutong		43.407.843	2.527.999	4.317.039		50.252.881
340	Kab. Tojo Una Una				2.411.338		2.411.338
341	Kab. Sigi			335.765	1.717.206		2.052.971
342	Kab. Banggai Laut			116.659	282.725		399.384
343	Kab. Morowali Utara			184.813	5.839.306		6.024.119
344	Provinsi Sulawesi Selatan	105.785.152	41.062.050				41.062.050
345	Kab. Bantaeng			232.111	195.327		427.438
346	Kab. Barru			225.080	616.545		841.625
347	Kab. Bone		40.346.271	5.995.999	4.656.943		50.999.213
348	Kab. Bulukumba		37.011.366	549.146	2.500.500		40.061.012



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
337	Kab. Poso	3.148.541		1.030.000		2.777.481	8.149.495
338	Kota Palu			1.250.000	11.778.982		669.965
339	Kab. Parigi Moutong	750.000			13.151.721	1.377.808	11.368.896
340	Kab. Tojo Una Una	2.678.610			13.305.102	4.098.353	19.188.803
341	Kab. Sigi	1.679.039			12.466.036	1.313.805	25.866.503
342	Kab. Banggai Laut					2.029.833	
343	Kab. Morowali Utara				13.196.553	4.308.847	19.605.354
344	Provinsi Sulawesi Selatan				35.352.714	3.297.406	7.850.524
345	Kab. Bantaeng	2.273.667		1.000.000	12.014.979	7.436.030	4.574.057
346	Kab. Barru	2.888.545		2.000.000		2.982.823	5.124.810
347	Kab. Bone	1.712.693		1.150.000		5.854.496	7.229.245
348	Kab. Bulukumba	2.978.077		3.550.000		4.200.013	7.430.822



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
337	Kab. Poso	842.540		842.540	20.412.348
338	Kota Palu	610.578		610.578	14.309.525
339	Kab. Parigi Moutong	475.775		475.775	77.377.081
340	Kab. Tojo Una Una	792.958		792.958	42.475.164
341	Kab. Sigi				43.378.354
342	Kab. Banggai Laut				2.429.217
343	Kab. Morowali Utara				43.134.873
344	Provinsi Sulawesi Selatan		17.590.086	17.590.086	210.937.932
345	Kab. Bantaeng	808.817		808.817	28.534.988
346	Kab. Barru	848.465		848.465	14.686.268
347	Kab. Bone	883.841		883.841	67.829.488
348	Kab. Bulukumba	451.986		451.986	58.671.910



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
349	Kab. Enrekang			996.999	611.319		1.608.318
350	Kab. Gowa			1.030.993	1.740.273		2.771.266
351	Kab. Jeneponto			499.765	1.366.778		1.866.543
352	Kab. Luwu			564.431	6.568.093		7.132.524
353	Kab. Luwu Utara			440.752	1.441.388		1.882.140
354	Kab. Maros			502.799	2.808.832		3.311.631
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan						
356	Kota Palopo		40.321.762	273.170	2.281.322		42.876.254
357	Kab. Luwu Timur				1.490.012		1.490.012
358	Kab. Pinrang			524.975	2.760.552		3.285.527
359	Kab. Sinjai			312.475	1.017.879		1.330.354
360	Kab. Kepulauan Selayar				158.648		158.648



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
349	Kab. Enrekang	1.335.000		1.750.000		3.231.291	4.196.188
350	Kab. Gowa	2.508.289		1.000.000	16.251.794	4.304.032	5.703.592
351	Kab. Jeneponto			2.120.000	18.394.042	4.464.890	4.543.811
352	Kab. Luwu	1.865.000		4.808.483		3.254.350	14.416.798
353	Kab. Luwu Utara	2.039.573		3.781.194		7.551.429	9.126.433
354	Kab. Maros	3.150.000		3.200.000		1.500.000	7.765.679
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2.250.000		1.000.000		2.507.305	5.162.001
356	Kota Palopo	3.001.997		2.685.593			1.712.151
357	Kab. Luwu Timur	1.470.000		1.605.000		5.950.000	7.867.228
358	Kab. Pinrang	540.000		3.749.529		6.397.366	8.019.792
359	Kab. Sinjai	2.649.079		3.095.988		6.063.749	8.508.195
360	Kab. Kepulauan Selayar			1.500.000		3.638.375	1.710.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
349	Kab. Enrekang	868.289		868.289	12.989.086
350	Kab. Gowa	848.465		848.465	33.387.438
351	Kab. Jeneponto				31.389.286
352	Kab. Luwu	824.875		824.875	32.302.030
353	Kab. Luwu Utara				24.380.769
354	Kab. Maros	848.465		848.465	19.775.775
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	475.775		475.775	11.395.081
356	Kota Palopo	689.874		689.874	50.965.869
357	Kab. Luwu Timur	655.380		655.380	19.037.620
358	Kab. Pinrang	883.841		883.841	22.876.055
359	Kab. Sinjai	868.289		868.289	22.515.654
360	Kab. Kepulauan Selayar	300.000		300.000	7.307.523



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
361	Kab. Sidenreng Rappang			362.023	1.230.496		1.592.519
362	Kab. Soppeng			234.607	2.468.095		2.702.702
363	Kab. Takalar						
364	Kab. Tana Toraja			337.060	2.809.685		3.146.745
365	Kab. Wajo			434.590	5.330.316		5.764.906
366	Kota Pare-pare		42.426.010	192.473	120.533		42.739.016
367	Kota Makassar		38.739.234	2.030.466	3.970.314		44.740.014
368	Kab. Toraja Utara			368.845	4.104.572		4.473.417
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	106.263.192		1.089.179		15.196.700	16.285.879
370	Kab. Buton			2.427.999	113.399		2.541.398
371	Kab. Konawe						
372	Kab. Kolaka		52.630.703	1.869.999	877.898		55.378.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
361	Kab. Sidenreng Rappang	2.192.079		3.282.232		4.413.905	8.276.241
362	Kab. Soppeng			2.125.000		4.401.064	13.398.492
363	Kab. Takalar	2.891.806		3.552.832	12.014.979		2.217.611
364	Kab. Tana Toraja	3.510.644	4.424.267	1.500.000	13.022.844	3.452.524	3.718.970
365	Kab. Wajo	3.210.755		3.416.309		4.529.452	6.807.333
366	Kota Pare-pare			700.000		1.483.015	1.677.249
367	Kota Makassar	3.413.651		3.500.442		1.329.599	
368	Kab. Toraja Utara	3.290.584	6.299.654		12.014.979	6.018.040	3.577.882
369	Provinsi Sulawesi Tenggara		5.906.649		32.205.488		3.878.074
370	Kab. Buton	445.000	8.980.850	2.000.000		1.271.691	2.936.939
371	Kab. Konawe			2.500.000	18.538.234	3.063.774	5.276.732
372	Kab. Kolaka	2.991.089		2.200.000		2.465.202	3.764.912



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
361	Kab. Sidenreng Rappang	768.376		768.376	20.525.352
362	Kab. Soppeng	689.874		689.874	23.317.132
363	Kab. Takalar	848.465		848.465	21.525.693
364	Kab. Tana Toraja	848.465		848.465	33.624.459
365	Kab. Wajo	788.993		788.993	24.517.748
366	Kota Pare-pare	148.036		148.036	46.747.316
367	Kota Makassar	808.817		808.817	53.792.523
368	Kab. Toraja Utara				35.674.556
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	602.648	20.742.903	21.345.551	185.884.833
370	Kab. Buton				18.175.878
371	Kab. Konawe	842.540		842.540	30.221.280
372	Kab. Kolaka	475.775		475.775	67.275.578



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
373	Kab. Muna			564.132	800.735		1.364.867
374	Kota Kendari			640.735	415.196		1.055.931
375	Kota Bau-bau		52.599.950	285.173	463.595		53.348.718
376	Kab. Konawe Selatan			571.695	250.050		821.745
377	Kab. Bombana			391.859	1.474.640		1.866.499
378	Kab. Wakatobi		32.987.182	144.417	213.093		33.344.692
379	Kab. Kolaka Utara			235.717	505.326		741.043
380	Kab. Konawe Utara			121.371	1.422.826		1.544.197
381	Kab. Buton Utara			119.052	820.000		939.052
382	Kab. Konawe Kepulauan			69.747	124.724		194.471
383	Kab. Kolaka Timur			349.196			349.196
384	Kab. Muna Barat				390.078		390.078



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
373	Kab. Muna	1.853.185				3.218.507	3.301.047
374	Kota Kendari	2.316.799		3.035.241		2.803.718	1.204.733
375	Kota Bau-bau		5.352.417	1.819.796			904.137
376	Kab. Konawe Selatan	1.110.000	4.959.283		14.504.019	4.196.287	2.701.946
377	Kab. Bombana	708.000		950.000	12.014.979	5.779.301	2.146.329
378	Kab. Wakatobi	1.520.000	16.979.788	450.000	12.014.979	3.762.855	
379	Kab. Kolaka Utara	2.701.935		3.147.084		4.537.753	5.262.447
380	Kab. Konawe Utara	2.211.000		400.000	12.301.170	6.009.904	2.282.278
381	Kab. Buton Utara	2.436.198		400.000		3.747.041	2.305.838
382	Kab. Konawe Kepulauan				12.014.979	4.730.958	12.960.818
383	Kab. Kolaka Timur	1.875.468				1.945.416	2.958.899
384	Kab. Muna Barat			1.050.000		6.494.905	2.373.865



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
373	Kab. Muna				9.737.606
374	Kota Kendari	904.492		904.492	11.320.914
375	Kota Bau-bau	842.540		842.540	62.267.608
376	Kab. Konawe Selatan				28.293.280
377	Kab. Bombana				23.465.108
378	Kab. Wakatobi	553.433		553.433	68.625.747
379	Kab. Kolaka Utara	860.360		860.360	17.250.622
380	Kab. Konawe Utara				24.748.549
381	Kab. Buton Utara				9.828.129
382	Kab. Konawe Kepulauan				29.901.226
383	Kab. Kolaka Timur				7.128.979
384	Kab. Muna Barat				10.308.848



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
385	Kab. Buton Tengah						
386	Kab. Buton Selatan				131.684		131.684
387	Provinsi Bali	8.661.522		804.667		7.185.093	7.989.760
388	Kab. Badung			654.657	1.072.314		1.726.971
389	Kab. Bangli			206.417	2.322.025		2.528.442
390	Kab. Buleleng			3.223.999	1.037.332		4.261.331
391	Kab. Gianyar		40.100.908	1.464.999	1.628.547		43.194.454
392	Kab. Jembrana			295.605	864.997		1.160.602
393	Kab. Karangasem			404.704	1.435.074		1.839.778
394	Kab. Klungkung			158.484	454.534		613.018
395	Kab. Tabanan			346.677	2.647.216		2.993.893
396	Kota Denpasar			936.134	926.374		1.862.508



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
385	Kab. Buton Tengah					4.678.795	
386	Kab. Buton Selatan					6.300.000	
387	Provinsi Bali						4.228.252
388	Kab. Badung					1.903.869	558.421
389	Kab. Bangli	1.394.000		2.838.000		4.782.039	4.551.688
390	Kab. Buleleng	2.677.795		450.000		3.738.628	3.567.996
391	Kab. Gianyar	1.598.140				3.631.792	2.771.534
392	Kab. Jembrana	1.916.774				4.867.194	4.022.771
393	Kab. Karangasem					4.639.662	3.632.844
394	Kab. Klungkung					4.715.085	3.622.756
395	Kab. Tabanan	2.664.973				1.900.483	3.712.778
396	Kota Denpasar	2.159.653				1.625.959	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
385	Kab. Buton Tengah				4.678.795
386	Kab. Buton Selatan				6.431.684
387	Provinsi Bali		2.421.363	2.421.363	23.300.897
388	Kab. Badung	674.014		674.014	4.863.275
389	Kab. Bangli	674.014		674.014	16.768.183
390	Kab. Buleleng				14.695.750
391	Kab. Gianyar	350.000		350.000	51.545.920
392	Kab. Jembrana				11.967.341
393	Kab. Karangasem	640.314		640.314	10.752.598
394	Kab. Klungkung				8.950.859
395	Kab. Tabanan	808.817		808.817	12.080.944
396	Kota Denpasar	702.117		702.117	6.350.237



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	74.061.470	185.831.455	7.181.989			193.013.444
398	Kab. Bima			3.449.999	429.371		3.879.370
399	Kab. Dompu			1.775.999	738.147		2.514.146
400	Kab. Lombok Barat			2.880.999	1.535.313		4.416.312
401	Kab. Lombok Tengah			4.021.999	368.222		4.390.221
402	Kab. Lombok Timur			4.490.999	309.221		4.800.220
403	Kab. Sumbawa			3.370.999	1.068.601		4.439.600
404	Kota Mataram			608.765	422.455		1.031.220
405	Kota Bima				500.000		500.000
406	Kab. Sumbawa Barat			1.263.999	99.965		1.363.964
407	Kab. Lombok Utara			1.571.999	268.753		1.840.752
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	168.405.635				4.102.642	4.102.642



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		11.994.999		26.663.355		24.885.386
398	Kab. Bima	2.062.339			12.547.105	3.745.255	10.995.098
399	Kab. Dompu	600.000			12.014.979	4.531.245	8.113.930
400	Kab. Lombok Barat	1.859.945	5.088.247	7.200.000	18.570.574	2.976.407	41.842.488
401	Kab. Lombok Tengah	2.669.500	5.494.658	7.500.000	18.306.627	4.316.911	13.207.190
402	Kab. Lombok Timur	2.371.959	4.440.626	6.992.000	19.197.750	4.400.000	49.169.843
403	Kab. Sumbawa	920.000		5.246.561	12.014.979	7.146.634	8.044.510
404	Kota Mataram		3.819.157		10.511.621	1.463.680	4.409.921
405	Kota Bima			2.841.076		4.097.261	3.374.022
406	Kab. Sumbawa Barat	2.683.888			12.014.979	2.179.751	22.349.755
407	Kab. Lombok Utara	2.683.329	6.981.049	3.623.238	17.384.869	1.329.599	20.008.773
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur		4.961.066		36.947.137		6.070.559



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		8.593.127	8.593.127	339.211.781
398	Kab. Bima				33.229.167
399	Kab. Dompu				27.774.300
400	Kab. Lombok Barat	792.958		792.958	82.746.931
401	Kab. Lombok Tengah	808.817		808.817	56.693.924
402	Kab. Lombok Timur				91.372.398
403	Kab. Sumbawa	808.817		808.817	38.621.101
404	Kota Mataram	808.817		808.817	22.044.416
405	Kota Bima	689.874		689.874	11.502.233
406	Kab. Sumbawa Barat				40.592.337
407	Kab. Lombok Utara	808.817		808.817	54.660.426
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	300.000	15.336.730	15.636.730	236.123.769



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
409	Kab. Alor			3.651.999	2.402.325		6.054.324
410	Kab. Belu		51.482.423	2.672.999	2.055.565		56.210.987
411	Kab. Ende			1.389.999	2.390.742		3.780.741
412	Kab. Flores Timur			2.896.999	584.551		3.481.550
413	Kab. Kupang			1.039.999	1.419.044		2.459.043
414	Kab. Lembata			1.119.999	1.861.015		2.981.014
415	Kab. Manggarai		49.165.892	649.999	248.049		50.063.940
416	Kab. Ngada			1.359.999	110.022		1.470.021
417	Kab. Sikka		50.966.917		644.625		51.611.542
418	Kab. Sumba Barat			1.238.999	1.120.074		2.359.073
419	Kab. Sumba Timur		42.596.835	1.779.999	9.361.723		53.738.557
420	Kab. Timor Tengah Selatan			1.259.999	2.478.011		3.738.010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
409	Kab. Alor	2.975.000		1.050.000	18.760.949	3.808.740	3.208.410
410	Kab. Belu	2.541.000		1.800.000	17.265.214	2.696.389	2.971.814
411	Kab. Ende	2.061.250		1.400.000	13.148.898	1.625.959	4.540.956
412	Kab. Flores Timur	768.929		840.000		2.186.329	4.491.205
413	Kab. Kupang			2.956.631	17.751.841	4.371.105	1.343.723
414	Kab. Lembata	1.100.000		900.000	12.014.979	3.042.846	3.201.051
415	Kab. Manggarai	4.000.000	2.435.610	3.360.000	10.319.000	4.926.280	6.842.705
416	Kab. Ngada	1.200.000	3.950.898			3.721.011	3.321.305
417	Kab. Sikka	1.556.467		600.000		2.818.913	2.894.481
418	Kab. Sumba Barat	500.000		1.800.000	12.014.979	3.888.400	9.964.827
419	Kab. Sumba Timur	2.252.395		1.000.000	20.273.566	3.045.234	7.225.174
420	Kab. Timor Tengah Selatan	2.684.406			13.787.002	1.994.228	2.144.227



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
409	Kab. Alor				35.857.423
410	Kab. Belu				83.485.404
411	Kab. Ende				26.557.804
412	Kab. Flores Timur				11.768.013
413	Kab. Kupang	531.282		531.282	29.413.625
414	Kab. Lembata				23.239.890
415	Kab. Manggarai				81.947.535
416	Kab. Ngada				13.663.235
417	Kab. Sikka				59.481.403
418	Kab. Sumba Barat	689.874		689.874	31.217.153
419	Kab. Sumba Timur				87.534.926
420	Kab. Timor Tengah Selatan				24.347.873



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
421	Kab. Timor Tengah Utara			2.831.999	7.632.049		10.464.048
422	Kota Kupang			798.784	4.794.070		5.592.854
423	Kab. Rote Ndao			1.913.999	164.640		2.078.639
424	Kab. Manggarai Barat		11.787.293	1.214.999	2.340.058		15.342.350
425	Kab. Nagekeo			256.000	497.735		753.735
426	Kab. Sumba Barat Daya			103.999	155.581		259.580
427	Kab. Sumba Tengah			769.999	349.719		1.119.718
428	Kab. Manggarai Timur			2.746.999	350.070		3.097.069
429	Kab. Sabu Raijua			239.999			239.999
430	Kab. Malaka			2.168.999	85.017		2.254.016
431	Provinsi Maluku	55.195.711		15.412.170			15.412.170
432	Kab. Maluku Tenggara Barat			228.273	2.452.640		2.680.913



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
421	Kab. Timor Tengah Utara	1.012.198		2.250.000	18.395.078	3.571.223	1.954.721
422	Kota Kupang	2.000.000		4.115.578		527.546	2.148.450
423	Kab. Rote Ndao	1.800.000		750.000	23.625.823	3.333.202	5.604.785
424	Kab. Manggarai Barat		5.802.728	900.000	19.670.274	5.826.342	6.361.669
425	Kab. Nagekeo	3.000.000			12.014.979	5.674.620	5.141.507
426	Kab. Sumba Barat Daya			1.400.000	12.680.012	4.529.169	4.631.962
427	Kab. Sumba Tengah	1.500.000			12.219.350	3.400.000	5.756.721
428	Kab. Manggarai Timur	346.500	2.279.133	2.940.235	20.068.127		6.061.121
429	Kab. Sabu Raijua	2.000.000			18.394.606	1.700.000	2.325.069
430	Kab. Malaka	1.600.000			16.451.691	2.808.020	2.167.541
431	Provinsi Maluku				26.672.507		4.972.010
432	Kab. Maluku Tenggara Barat				24.648.002	4.548.704	12.466.380



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
421	Kab. Timor Tengah Utara				
422	Kota Kupang	713.662		713.662	37.647.268
423	Kab. Rote Ndao				15.098.090
424	Kab. Manggarai Barat	842.540		842.540	37.192.449
425	Kab. Nagekeo				54.745.903
426	Kab. Sumba Barat Daya				26.584.841
427	Kab. Sumba Tengah	713.662		713.662	23.500.723
428	Kab. Manggarai Timur				24.709.451
429	Kab. Sabu Raijua				34.792.185
430	Kab. Malaka				24.659.674
431	Provinsi Maluku		5.925.396	5.925.396	25.281.268
432	Kab. Maluku Tenggara Barat				108.177.794
					44.343.999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
433	Kab. Maluku Tengah		50.471.891	1.677.999	3.284.146		55.434.036
434	Kab. Maluku Tenggara		10.460.924	196.587	695.894		11.353.405
435	Kab. Buru		60.611.943	289.982	535.303		61.437.228
436	Kota Ambon			826.635	852.557		1.679.192
437	Kab. Seram Bagian Barat			139.999			139.999
438	Kab. Seram Bagian Timur			249.190	2.503.780		2.752.970
439	Kab. Kepulauan Aru			489.999			489.999
440	Kota Tual				594.867		594.867
441	Kab. Maluku Barat Daya			154.685	2.876.537		3.031.222
442	Kab. Buru Selatan			156.317	758.937		915.254
443	Provinsi Papua	94.490.531	85.706.328	11.467.833			97.174.161
444	Kab. Biak Numfor		50.303.851	3.048.999	1.217.403		54.570.253



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
433	Kab. Maluku Tengah	2.025.496		3.875.000	12.901.222	1.700.000	2.270.014
434	Kab. Maluku Tenggara	4.427.450		3.050.441		3.942.487	
435	Kab. Buru	1.050.000		2.228.892	16.906.995	3.975.500	2.698.314
436	Kota Ambon	3.040.597		3.555.942		1.617.825	
437	Kab. Seram Bagian Barat			750.000	12.014.979	3.452.213	3.956.942
438	Kab. Seram Bagian Timur	834.000		450.000	12.014.979	3.502.380	3.776.472
439	Kab. Kepulauan Aru				18.434.743	5.448.169	
440	Kota Tual			1.200.000			3.178.131
441	Kab. Maluku Barat Daya			800.000	27.530.501	1.850.679	
442	Kab. Buru Selatan	1.750.500			12.014.979	2.090.458	
443	Provinsi Papua				38.448.856		4.625.688
444	Kab. Biak Numfor				24.754.957	5.831.878	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
433	Kab. Maluku Tengah				78.205.768
434	Kab. Maluku Tenggara	753.310		753.310	23.527.093
435	Kab. Buru				88.296.929
436	Kota Ambon	927.761		927.761	10.821.317
437	Kab. Seram Bagian Barat				20.314.133
438	Kab. Seram Bagian Timur				23.330.801
439	Kab. Kepulauan Aru				24.372.911
440	Kota Tual				4.972.998
441	Kab. Maluku Barat Daya				33.212.402
442	Kab. Buru Selatan				16.771.191
443	Provinsi Papua	660.816	8.955.415	9.616.231	244.355.467
444	Kab. Biak Numfor	842.540		842.540	85.999.628



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
445	Kab. Jayapura			237.716	2.803.383		3.041.099
446	Kab. Jayawijaya		52.107.703		6.232.470		58.340.173
447	Kab. Merauke		47.500.000	358.712	2.576.682		50.435.394
448	Kab. Mimika		51.541.931		3.658.481		55.200.412
449	Kab. Nabire		50.780.433	3.140.999	3.976.375		57.897.807
450	Kab. Paniai						
451	Kab. Puncak Jaya				1.725.519		1.725.519
452	Kab. Kepulauan Yapen			1.948.999	2.074.014		4.023.013
453	Kota Jayapura			473.872	3.079.295		3.553.167
454	Kab. Sarmi				1.319.764		1.319.764
455	Kab. Keerom			2.079.999	1.977.458		4.057.457
456	Kab. Yahukimo			786.999	2.752.842		3.539.841



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
445	Kab. Jayapura			800.000	18.034.711	4.903.053	1.922.083
446	Kab. Jayawijaya				15.000.000	11.141.176	11.954.876
447	Kab. Merauke	1.420.157		1.215.000	27.723.520	3.583.692	5.579.654
448	Kab. Mimika				19.720.781	2.268.475	3.979.018
449	Kab. Nabire			3.291.128	19.697.861	11.985.661	17.738.596
450	Kab. Paniai	600.000			18.967.387	7.600.289	
451	Kab. Puncak Jaya				21.327.412	5.100.000	
452	Kab. Kepulauan Yapen				18.731.264	5.616.687	
453	Kota Jayapura	3.600.000		2.764.867		4.004.227	
454	Kab. Sarmi				19.455.611		5.519.587
455	Kab. Keerom				26.252.397	6.382.874	11.266.774
456	Kab. Yahukimo				18.620.282	7.295.549	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
445	Kab. Jayapura				28.700.946
446	Kab. Jayawijaya				96.436.225
447	Kab. Merauke				89.957.417
448	Kab. Mimika				81.168.686
449	Kab. Nabire				110.611.053
450	Kab. Paniai				27.167.676
451	Kab. Puncak Jaya				28.152.931
452	Kab. Kepulauan Yapen				28.370.964
453	Kota Jayapura	808.817		808.817	14.731.078
454	Kab. Sarmi				26.294.962
455	Kab. Keerom				47.959.502
456	Kab. Yahukimo				29.455.672



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan		Kesehatan dan KB			
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
457	Kab. Pegunungan Bintang			3.289.999			3.289.999
458	Kab. Tolikara			1.584.999	585.000		2.169.999
459	Kab. Boven Digoel			60.000	1.313.267		1.373.267
460	Kab. Mappi				2.612.768		2.612.768
461	Kab. Asmat				1.842.368		1.842.368
462	Kab. Waropen				980.496		980.496
463	Kab. Supiori			1.017.999	1.252.046		2.270.045
464	Kab. Mamberamo Raya			717.999	288.454		1.006.453
465	Kab. Mamberamo Tengah			60.000			60.000
466	Kab. Yalimo			1.438.999	3.336.367		4.775.366
467	Kab. Lanny Jaya			1.197.999	350.909		1.548.908
468	Kab. Nduga			1.585.999	3.090.618		4.676.617



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
457	Kab. Pegunungan Bintang				30.016.407	11.374.998	14.819.195
458	Kab. Tolikara			900.000	9.000.000	12.617.436	
459	Kab. Boven Digoel			2.500.000	26.687.842	3.195.936	8.254.886
460	Kab. Mappi	3.150.000			22.057.532	7.886.664	2.253.355
461	Kab. Asmat				20.259.394		
462	Kab. Waropen				18.828.654	9.095.861	501.910
463	Kab. Supiori			475.000	24.453.411	635.845	
464	Kab. Mamberamo Raya	1.125.000			21.488.736	16.407.920	19.758.927
465	Kab. Mamberamo Tengah	1.500.000			22.070.964	8.560.000	
466	Kab. Yalimo				20.407.861	12.282.572	
467	Kab. Lanny Jaya				20.567.693	12.913.999	
468	Kab. Nduga				19.893.619	15.960.585	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
457	Kab. Pegunungan Bintang				59.500.599
458	Kab. Tolikara				24.687.435
459	Kab. Boven Digoel				42.011.931
460	Kab. Mappi				37.960.319
461	Kab. Asmat				22.101.762
462	Kab. Waropen				29.406.921
463	Kab. Supiori				27.834.301
464	Kab. Mamberamo Raya				59.787.036
465	Kab. Mamberamo Tengah				32.190.964
466	Kab. Yalimo	808.817		808.817	38.274.616
467	Kab. Lanny Jaya				35.030.600
468	Kab. Nduga				40.530.821



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
469	Kab. Dogiyai			604.999	3.750.000		4.354.999
470	Kab. Puncak						
471	Kab. Intan Jaya			239.999	3.213.142		3.453.141
472	Kab. Deiyai			1.819.999			1.819.999
473	Provinsi Maluku Utara	74.759.648		383.520			383.520
474	Kab. Halmahera Tengah			106.594	2.473.738		2.580.332
475	Kota Ternate			369.463	4.220.302		4.589.765
476	Kab. Halmahera Barat			200.110	1.072.634		1.272.744
477	Kab. Halmahera Timur			183.396	1.576.181		1.759.577
478	Kab. Halmahera Selatan		51.533.338	2.705.999	8.988.259		63.227.596
479	Kab. Halmahera Utara		50.322.237	323.640	4.041.399		54.687.276
480	Kab. Kepulauan Sula			1.433.999	1.497.799		2.931.798



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
469	Kab. Dogiyai				19.443.674	11.791.370	
470	Kab. Puncak				23.007.864	15.038.062	
471	Kab. Intan Jaya				23.052.443	12.984.999	
472	Kab. Deiyai				19.865.602	5.361.941	
473	Provinsi Maluku Utara		2.451.500		41.222.746		47.263.533
474	Kab. Halmahera Tengah		5.892.618	2.871.162		4.324.693	
475	Kota Ternate	2.231.040		2.540.726		3.082.176	
476	Kab. Halmahera Barat		5.339.750	2.054.000	12.014.979	3.333.545	6.191.164
477	Kab. Halmahera Timur	2.813.107	5.001.310		19.622.464	4.388.025	14.819.195
478	Kab. Halmahera Selatan	660.000		500.000	13.841.371	6.587.855	17.027.920
479	Kab. Halmahera Utara	2.211.873	4.875.827			4.895.631	3.142.666
480	Kab. Kepulauan Sula	1.686.000		2.500.000	12.014.979	4.137.661	2.963.839



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
469	Kab. Dogiyai	531.282		531.282	36.121.325
470	Kab. Puncak				38.045.926
471	Kab. Intan Jaya				39.490.583
472	Kab. Deiyai				27.047.542
473	Provinsi Maluku Utara		14.329.417	14.329.417	180.410.364
474	Kab. Halmahera Tengah				15.668.805
475	Kota Ternate				12.443.707
476	Kab. Halmahera Barat				30.206.182
477	Kab. Halmahera Timur				48.403.678
478	Kab. Halmahera Selatan				101.844.742
479	Kab. Halmahera Utara	495.612		495.612	70.308.885
480	Kab. Kepulauan Sula				26.234.277



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
481	Kota Tidore Kepulauan		37.958.101	154.910	3.479.455		41.592.466
482	Kab. Pulau Morotai		33.832.434	135.485	1.537.610		35.505.529
483	Kab. Pulau Taliabu			100.286	588.711		688.997
484	Provinsi Banten	68.486.397		1.080.540			1.080.540
485	Kab. Lebak			4.952.999	3.674.656		8.627.655
486	Kab. Pandeglang		19.594.690	5.034.999	2.150.848		26.780.537
487	Kab. Serang		42.332.427	1.979.961	1.245.144		45.557.532
488	Kab. Tangerang				1.599.877		1.599.877
489	Kota Cilegon			483.633			483.633
490	Kota Tangerang				1.943.351		1.943.351
491	Kota Serang			817.025	421.019		1.238.044
492	Kota Tangerang Selatan			1.909.337	313.062		2.222.399



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
481	Kota Tidore Kepulauan			500.000		4.758.801	3.795.354
482	Kab. Pulau Morotai		7.227.584	1.750.451	30.600.841	3.703.699	318.559
483	Kab. Pulau Taliabu				12.109.886	3.929.395	
484	Provinsi Banten				30.975.746		
485	Kab. Lebak	4.686.169	3.041.367	1.400.000	18.719.966	1.868.127	6.794.811
486	Kab. Pandeglang	2.550.000	2.859.415	1.200.000	18.015.969	1.271.362	6.562.909
487	Kab. Serang	5.532.234			18.029.241	1.428.408	4.705.130
488	Kab. Tangerang					635.845	
489	Kota Cilegon					1.271.691	
490	Kota Tangerang						
491	Kota Serang			1.350.000			
492	Kota Tangerang Selatan					1.500.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
481	Kota Tidore Kepulauan				50.646.621
482	Kab. Pulau Morotai	808.817		808.817	79.915.480
483	Kab. Pulau Taliabu				16.728.278
484	Provinsi Banten		1.407.545	1.407.545	101.950.228
485	Kab. Lebak	475.775		475.775	45.613.870
486	Kab. Pandeglang	804.766		804.766	60.044.958
487	Kab. Serang	824.676		824.676	76.077.221
488	Kab. Tangerang				2.235.722
489	Kota Cilegon				1.755.324
490	Kota Tangerang	864.324		864.324	2.807.675
491	Kota Serang	872.254		872.254	3.460.298
492	Kota Tangerang Selatan	300.000		300.000	4.022.399



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
493	Provinsi Bangka Belitung	27.544.469	40.771.884	561.420			41.333.304
494	Kab. Bangka			1.978.999	1.366.704		3.345.703
495	Kab. Belitung		29.834.600	202.443	814.055		30.851.098
496	Kota Pangkal Pinang			257.359	230.257		487.616
497	Kab. Bangka Selatan			277.153	718.564		995.717
498	Kab. Bangka Tengah			256.135	331.666		587.801
499	Kab. Bangka Barat			1.385.999	379.632		1.765.631
500	Kab. Belitung Timur				1.205.127		1.205.127
501	Provinsi Gorontalo	9.179.685		1.256.579			1.256.579
502	Kab. Boalemo		48.703.618	516.999	799.939		50.020.556
503	Kab. Gorontalo		41.507.301	2.399.999	5.150.000		49.057.300
504	Kota Gorontalo			321.170	1.934.351		2.255.521



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
493	Provinsi Bangka Belitung				18.045.419		2.344.069
494	Kab. Bangka	2.476.800		2.825.000		1.271.691	2.234.271
495	Kab. Belitung	597.600	5.799.531	480.000	12.014.979		1.229.477
496	Kota Pangkal Pinang						
497	Kab. Bangka Selatan			500.000		2.961.066	13.607.131
498	Kab. Bangka Tengah	920.000		2.800.000			1.425.300
499	Kab. Bangka Barat	2.839.871		1.000.000			21.907.167
500	Kab. Belitung Timur		1.991.224		12.014.979	1.226.994	259.378
501	Provinsi Gorontalo				18.361.491		3.954.279
502	Kab. Boalemo	2.043.060			12.014.979	3.400.000	2.581.494
503	Kab. Gorontalo	2.949.293		4.795.000		4.192.203	3.424.631
504	Kota Gorontalo			1.500.000		853.049	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
493	Provinsi Bangka Belitung	300.000	3.412.684	3.712.684	92.979.945
494	Kab. Bangka	610.578		610.578	12.764.043
495	Kab. Belitung	730.711		730.711	51.703.396
496	Kota Pangkal Pinang	868.289		868.289	1.355.905
497	Kab. Bangka Selatan	808.817		808.817	18.872.731
498	Kab. Bangka Tengah	420.000		420.000	6.153.101
499	Kab. Bangka Barat	667.033		667.033	28.179.702
500	Kab. Belitung Timur	806.042		806.042	17.503.744
501	Provinsi Gorontalo	634.366	14.268.220	14.902.586	47.654.620
502	Kab. Boalemo				70.060.089
503	Kab. Gorontalo	925.142		925.142	65.343.569
504	Kota Gorontalo	729.521		729.521	5.338.091



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
505	Kab. Pohuwato			1.761.999	1.242.823		3.004.822
506	Kab. Bone Bolango			240.734	6.618.739		6.859.473
507	Kab. Gorontalo Utara			189.829	1.317.557		1.507.386
508	Provinsi Kepulauan Riau	45.467.136		135.180			135.180
509	Kab. Natuna			1.356.999	426.409		1.783.408
510	Kab. Kepulauan Anambas			53.902			53.902
511	Kab. Karimun			277.340	451.754		729.094
512	Kota Batam			2.161.958	456.970		2.618.928
513	Kota Tanjung Pinang				420.306		420.306
514	Kab. Lingga			746.999			746.999
515	Kab. Bintan			222.603	287.423		510.026
516	Provinsi Papua Barat	5.000.000		1.056.804			1.056.804



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
505	Kab. Pohuwato	1.581.518		1.350.000	12.014.979	3.649.005	2.867.983
506	Kab. Bone Bolango	1.584.000		1.500.000		2.935.496	5.957.281
507	Kab. Gorontalo Utara	2.873.693		1.500.000	12.014.979	1.503.278	2.495.416
508	Provinsi Kepulauan Riau				26.090.637		
509	Kab. Natuna	1.990.463		3.213.729	12.099.594	1.329.599	2.451.497
510	Kab. Kepulauan Anambas	1.734.000			12.237.628	2.995.921	6.984.695
511	Kab. Karimun	3.061.646		500.000	12.919.584	3.573.185	2.474.466
512	Kota Batam				11.908.335		
513	Kota Tanjung Pinang	2.063.748		3.247.269		3.776.285	
514	Kab. Lingga	1.295.000				4.930.000	
515	Kab. Bintan	1.875.000			18.767.349	1.500.000	
516	Provinsi Papua Barat				49.545.126		27.662.497



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
505	Kab. Pohuwato				
506	Kab. Bone Bolango	808.817		808.817	24.468.307
507	Kab. Gorontalo Utara	610.578		610.578	19.645.067
508	Provinsi Kepulauan Riau	578.214	582.595	1.160.809	22.505.330
509	Kab. Natuna				72.853.762
510	Kab. Kepulauan Anambas				22.868.290
511	Kab. Karimun	808.817		808.817	24.006.146
512	Kota Batam	689.874		689.874	24.066.792
513	Kota Tanjung Pinang	689.874		689.874	15.217.137
514	Kab. Lingga				10.197.482
515	Kab. Bintan	636.035		636.035	6.971.999
516	Provinsi Papua Barat		13.235.758	13.235.758	23.288.410
					96.500.185



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
517	Kab. Fak Fak			135.580	2.079.205		2.214.785
518	Kab. Manokwari		38.861.410	1.569.999	2.738.067		43.169.476
519	Kab. Sorong		51.562.753	156.136	1.715.027		53.433.916
520	Kota Sorong			729.999	3.459.069		4.189.068
521	Kab. Raja Ampat			110.072	2.452.690		2.562.762
522	Kab. Sorong Selatan			1.579.999	636.953		2.216.952
523	Kab. Teluk Bintuni			123.482	701.640		825.122
524	Kab. Teluk Wondama			71.974	2.387.605		2.459.579
525	Kab. Kaimana			122.242	616.904		739.146
526	Kab. Maybrat			61.647			61.647
527	Kab. Tambrau			2.072.999	3.793.162		5.866.161
528	Kab. Manokwari Selatan				645.129		645.129



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
517	Kab. Fak Fak				12.014.979		7.432.239
518	Kab. Manokwari			2.240.678	12.449.596	2.893.462	1.739.740
519	Kab. Sorong	2.680.000		1.759.787	27.059.422	5.400.800	2.165.967
520	Kota Sorong	3.273.720		3.430.540	10.321.564	1.800.000	
521	Kab. Raja Ampat				24.952.801	5.556.690	11.855.356
522	Kab. Sorong Selatan				18.671.091	3.400.000	429.357
523	Kab. Teluk Bintuni				29.077.532	2.611.361	
524	Kab. Teluk Wondama				16.983.785	5.633.459	17.891.905
525	Kab. Kaimana			1.500.000	12.014.979		2.963.839
526	Kab. Maybrat	1.174.000			19.164.400	3.780.208	4.247.885
527	Kab. Tambrauw				19.176.513	2.788.023	
528	Kab. Manokwari Selatan				12.014.979	11.735.530	9.879.463



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13) +(14)+(17)
517	Kab. Fak Fak	300.000		300.000	21.962.003
518	Kab. Manokwari	842.540		842.540	63.335.492
519	Kab. Sorong				92.499.892
520	Kota Sorong	674.014		674.014	23.688.906
521	Kab. Raja Ampat	808.817		808.817	45.736.426
522	Kab. Sorong Selatan				24.717.400
523	Kab. Teluk Bintuni				32.514.015
524	Kab. Teluk Wondama				42.968.728
525	Kab. Kaimana				17.217.964
526	Kab. Maybrat				28.428.140
527	Kab. Tambrauw				27.830.697
528	Kab. Manokwari Selatan				34.275.101



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
529	Kab. Pegunungan Arfak			809.999	257.051		1.067.050
530	Provinsi Sulawesi Barat	77.506.426	48.259.459				48.259.459
531	Kab. Majene			799.999	926.075		1.726.074
532	Kab. Mamuju			2.787.999	489.597		3.277.596
533	Kab. Polewali Mandar		52.117.134	1.558.999	208.768		53.884.901
534	Kab. Mamasa			2.894.999	5.502.922		8.397.921
535	Kab. Pasangkayu			335.001	539.473		874.474
536	Kab. Mamuju Tengah			225.909	745.826		971.735
537	Provinsi Kalimantan Utara	5.000.000		4.431.000			4.431.000
538	Kab. Bulungan			207.999	8.213.643		8.421.642
539	Kab. Malinau			2.241.999	617.476		2.859.475
540	Kab. Nunukan			1.220.999	640.767		1.861.766



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
529	Kab. Pegunungan Arfak				14.405.982	2.723.210	
530	Provinsi Sulawesi Barat						3.644.828
531	Kab. Majene	2.425.946		500.000		2.579.430	4.840.750
532	Kab. Mamuju	500.000		900.000		2.794.307	1.990.338
533	Kab. Polewali Mandar	2.346.773		560.000	12.014.979	2.733.115	3.218.641
534	Kab. Mamasa	2.660.000		3.904.398		3.094.641	3.251.487
535	Kab. Pasangkayu			600.000		2.863.993	1.928.690
536	Kab. Mamuju Tengah	1.000.000		4.150.000	12.014.979	1.493.701	19.064.179
537	Provinsi Kalimantan Utara				33.725.741		25.979.340
538	Kab. Bulungan	1.800.000		3.322.256	12.014.979	1.700.000	2.096.005
539	Kab. Malinau	2.635.018		1.120.000	13.423.873	4.440.914	2.800.828
540	Kab. Nunukan	2.061.560		3.119.751	24.738.818	4.816.775	3.048.021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
529	Kab. Pegunungan Arfak				18.196.242
530	Provinsi Sulawesi Barat	634.366	9.280.615	9.914.981	139.325.694
531	Kab. Majene	475.775		475.775	12.547.975
532	Kab. Mamuju	966.443		966.443	10.428.684
533	Kab. Polewali Mandar	888.113		888.113	75.646.522
534	Kab. Mamasa	925.142		925.142	22.233.589
535	Kab. Pasangkayu	420.000		420.000	6.687.157
536	Kab. Mamuju Tengah	420.000		420.000	39.114.594
537	Provinsi Kalimantan Utara		3.160.948	3.160.948	72.297.029
538	Kab. Bulungan				29.354.882
539	Kab. Malinau	689.874		689.874	27.969.982
540	Kab. Nunukan	808.817		808.817	40.455.508



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pendidikan	Kesehatan dan KB				Subtotal Kesehatan dan KB
		SMK	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pengendalian Penyakit	BAPELKES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
541	Kota Tarakan			302.518	653.953		956.471
542	Kab. Tana Tidung			40.002	205.036		245.038



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Air Minum	Pariwisata	Sanitasi	Jalan	Pasar	Irigasi
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
541	Kota Tarakan	4.639.546		3.725.962			
542	Kab. Tana Tidung			500.000		4.978.405	6.427.492



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			TOTAL DAK PENUGASAN
		Lingkungan Hidup	Kehutanan	Subtotal Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)=(3)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(17)
541	Kota Tarakan	808.817		808.817	10.130.796
542	Kab. Tana Tidung				12.150.935



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Aceh						
2	Kab. Aceh Barat					3.610.000	3.081.846
3	Kab. Aceh Besar					1.982.480	3.238.456
4	Kab. Aceh Selatan						
5	Kab. Aceh Singkil				2.664.375	1.879.791	1.584.635
6	Kab. Aceh Tengah					3.124.417	3.043.712
7	Kab. Aceh Tenggara						
8	Kab. Aceh Timur						
9	Kab. Aceh Utara						
10	Kab. Bireuen					3.345.347	500.000
11	Kab. Pidie						
12	Kab. Simeulue				2.932.700	1.666.341	1.200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
1	Provinsi Aceh				3.994.438	3.994.438	3.994.438
2	Kab. Aceh Barat	3.600.000	300.000	395.060		695.060	10.986.906
3	Kab. Aceh Besar	5.640.000		464.180		464.180	11.325.116
4	Kab. Aceh Selatan						
5	Kab. Aceh Singkil	4.845.000	414.715	550.650		965.365	11.939.166
6	Kab. Aceh Tengah	4.523.900					10.692.029
7	Kab. Aceh Tenggara						
8	Kab. Aceh Timur						
9	Kab. Aceh Utara						
10	Kab. Bireuen	3.900.000					7.745.347
11	Kab. Pidie						
12	Kab. Simeulue	4.435.111	310.797	300.000		610.797	10.844.949



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
13	Kota Banda Aceh						
14	Kota Sabang					3.773.914	1.982.989
15	Kota Langsa						
16	Kota Lhokseumawe						
17	Kab. Gayo Lues						
18	Kab. Aceh Barat Daya					4.124.879	2.774.183
19	Kab. Aceh Jaya				3.675.000		400.000
20	Kab. Nagan Raya						
21	Kab. Aceh Tamiang						
22	Kab. Bener Meriah					1.800.000	2.307.999
23	Kab. Pidie Jaya						
24	Kota Subulussalam					1.800.000	1.355.447



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
13	Kota Banda Aceh						
14	Kota Sabang	4.066.000	300.000	375.307		675.307	10.498.210
15	Kota Langsa						
16	Kota Lhokseumawe.						
17	Kab. Gayo Lues						
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.148.001					10.047.063
19	Kab. Aceh Jaya	3.700.000	300.000	592.590		892.590	8.667.590
20	Kab. Nagan Raya						
21	Kab. Aceh Tamiang						
22	Kab. Bener Meriah	5.199.176	600.975	417.808		1.018.783	10.325.958
23	Kab. Pidie Jaya						
24	Kota Subulussalam	3.500.000					6.655.447



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
25	Provinsi Sumatera Utara						
26	Kab. Asahan						
27	Kab. Dairi						
28	Kab. Deli Serdang						
29	Kab. Karo						
30	Kab. Labuhanbatu						
31	Kab. Langkat						
32	Kab. Mandailing Natal						
33	Kab. Nias				3.082.839		
34	Kab. Simalungun						
35	Kab. Tapanuli Selatan						
36	Kab. Tapanuli Tengah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
25	Provinsi Sumatera Utara						
26	Kab. Asahan						
27	Kab. Dairi						
28	Kab. Deli Serdang						
29	Kab. Karo						
30	Kab. Labuhanbatu						
31	Kab. Langkat						
32	Kab. Mandailing Natal						
33	Kab. Nias	5.578.063					8.660.902
34	Kab. Simalungun						
35	Kab. Tapanuli Selatan						
36	Kab. Tapanuli Tengah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
37	Kab. Tapanuli Utara						
38	Kab. Toba Samosir						
39	Kota Binjai						
40	Kota Medan						
41	Kota Pematang Siantar						
42	Kota Sibolga						
43	Kota Tanjung Balai						
44	Kota Tebing Tinggi						
45	Kota Padang Sidempuan						
46	Kab. Pakpak Bharat						
47	Kab. Nias Selatan	34.483.934		34.483.934		2.510.257	7.292.836
48	Kab. Humbang Hasundutan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
37	Kab. Tapanuli Utara						
38	Kab. Toba Samosir						
39	Kota Binjai						
40	Kota Medan						
41	Kota Pematang Siantar						
42	Kota Sibolga						
43	Kota Tanjung Balai						
44	Kota Tebing Tinggi						
45	Kota Padang Sidempuan						
46	Kab. Pakpak Bharat						
47	Kab. Nias Selatan	6.525.282	4.822.700	822.955		5.645.655	56.457.964
48	Kab. Humbang Hasundutan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
49	Kab. Serdang Bedagai				2.664.375		3.424.147
50	Kab. Samosir						
51	Kab. Batu Bara						
52	Kab. Padang Lawas						
53	Kab. Padang Lawas Utara						
54	Kab. Labuhanbatu Selatan						
55	Kab. Labuhanbatu Utara						
56	Kab. Nias Utara	16.826.802		16.826.802	3.201.542		2.750.000
57	Kab. Nias Barat		45.000.002	45.000.002	2.400.172	625.000	2.918.319
58	Kota Gunungsitoli						
59	Provinsi Sumatera Barat						
60	Kab. Limapuluh Kota						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
49	Kab. Serdang Bedagai	5.999.049					12.087.571
50	Kab. Samosir						
51	Kab. Batu Bara						
52	Kab. Padang Lawas						
53	Kab. Padang Lawas Utara						
54	Kab. Labuhanbatu Selatan						
55	Kab. Labuhanbatu Utara						
56	Kab. Nias Utara	4.480.000	2.616.299	879.440		3.495.739	30.754.083
57	Kab. Nias Barat	5.400.000	6.251.336	792.000		7.043.336	63.386.829
58	Kota Gunungsitoli						
59	Provinsi Sumatera Barat				4.952.809	4.952.809	4.952.809
60	Kab. Limapuluh Kota						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
61	Kab. Agam						
62	Kab. Kepulauan Mentawai	23.214.190		23.214.190	3.827.717	2.487.100	1.650.000
63	Kab. Padang Pariaman						
64	Kab. Pasaman						
65	Kab. Pesisir Selatan					4.587.756	2.100.000
66	Kab. Sijunjung					1.600.000	275.000
67	Kab. Solok						
68	Kab. Tanah Datar						
69	Kota Bukit Tinggi						
70	Kota Padang Panjang						
71	Kota Padang						
72	Kota Payakumbuh						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
61	Kab. Agam						
62	Kab. Kepulauan Mentawai	6.475.000	1.130.003	1.262.132		2.392.135	40.046.142
63	Kab. Padang Pariaman						
64	Kab. Pasaman						
65	Kab. Pesisir Selatan	5.177.500	418.376	666.900		1.085.276	12.950.532
66	Kab. Sijunjung	3.500.000	300.000			300.000	5.675.000
67	Kab. Solok						
68	Kab. Tanah Datar						
69	Kota Bukit Tinggi						
70	Kota Padang Panjang						
71	Kota Padang						
72	Kota Payakumbuh						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
73	Kota Sawahlunto						
74	Kota Solok						
75	Kota Pariaman						
76	Kab. Pasaman Barat	17.644.399		17.644.399	2.770.095		1.600.000
77	Kab. Dharmasraya						
78	Kab. Solok Selatan	17.099.999		17.099.999	2.865.616	4.114.996	2.604.304
79	Provinsi Riau						
80	Kab. Bengkalis	11.179.841		11.179.841		5.250.839	1.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	7.617.327		7.617.327		1.338.511	300.000
82	Kab. Indragiri Hulu						
83	Kab. Kampar						
84	Kab. Kuantan Singingi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
73	Kota Sawahlunto						
74	Kota Solok						
75	Kota Pariaman						
76	Kab. Pasaman Barat	5.051.831		560.000		560.000	27.626.325
77	Kab. Dharmasraya						
78	Kab. Solok Selatan	4.607.500	431.065	625.224		1.056.289	32.348.704
79	Provinsi Riau				2.570.542	2.570.542	2.570.542
80	Kab. Bengkalis	2.850.001	687.561	562.400		1.249.961	21.530.642
81	Kab. Indragiri Hilir	3.800.000	1.103.121			1.103.121	14.158.959
82	Kab. Indragiri Hulu						
83	Kab. Kampar						
84	Kab. Kuantan Singingi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
85	Kab. Pelalawan						
86	Kab. Rokan Hilir	8.044.780		8.044.780	2.664.375	4.000.000	4.110.684
87	Kab. Rokan Hulu						
88	Kab. Siak						
89	Kota Dumai				2.638.076	2.475.039	1.659.355
90	Kota Pekanbaru						
91	Kab. Kepulauan Meranti	16.800.000		16.800.000		2.413.371	3.055.925
92	Provinsi Jambi						
93	Kab. Batang Hari						
94	Kab. Bungo						3.863.494
95	Kab. Kerinci						
96	Kab. Merangin						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
85	Kab. Pelalawan	5.400.000	536.493	375.307		911.800	6.311.800
86	Kab. Rokan Hilir	2.992.501	589.236	788.000		1.377.236	23.189.576
87	Kab. Rokan Hulu						
88	Kab. Siak						
89	Kota Dumai	4.736.092	300.000	790.120		1.090.120	12.598.682
90	Kota Pekanbaru						
91	Kab. Kepulauan Meranti	5.600.000	450.558	429.761		880.319	28.749.615
92	Provinsi Jambi						
93	Kab. Batang Hari						
94	Kab. Bungo	6.125.345	374.413			374.413	10.363.252
95	Kab. Kerinci						
96	Kab. Merangin						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
97	Kab. Muaro Jambi						
98	Kab. Sarolangun					1.000.000	2.000.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat						
100	Kab. Tanjung Jabung Timur					1.050.000	3.742.985
101	Kab. Tebo						
102	Kota Jambi						
103	Kota Sungai Penuh						
104	Provinsi Sumatera Selatan						
105	Kab. Lahat					900.000	5.562.243
106	Kab. Musi Banyuasin						
107	Kab. Musi Rawas				2.821.298	4.935.969	4.800.000
108	Kab. Muara Enim						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
97	Kab. Muaro Jambi						
98	Kab. Sarolangun	3.300.000	1.827.096	790.120		2.617.216	8.917.216
99	Kab. Tanjung Jabung Barat						
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	9.813.782	719.258	831.395		1.550.653	16.157.420
101	Kab. Tebo						
102	Kota Jambi						
103	Kota Sungai Penuh						
104	Provinsi Sumatera Selatan						
105	Kab. Lahat	6.075.873	1.870.070	833.632		2.703.702	15.241.818
106	Kab. Musi Banyuasin						
107	Kab. Musi Rawas	4.824.545	904.463			904.463	18.286.275
108	Kab. Muara Enim						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
109	Kab. Ogan Komering Ilir						
110	Kab. Ogan Komering Ulu						
111	Kota Palembang						
112	Kota Prabumulih						
113	Kota Pagar Alam						
114	Kota Lubuk Linggau						
115	Kab. Banyuasin						
116	Kab. Ogan Ilir					3.394.368	4.075.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur						5.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan						1.800.000
119	Kab. Empat Lawang						
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
109	Kab. Ogan Komering Ilir						
110	Kab. Ogan Komering Ulu						
111	Kota Palembang						
112	Kota Prabumulih						
113	Kota Pagar Alam						
114	Kota Lubuk Linggau						
115	Kab. Banyuasin	6.555.000	461.620	711.108		1.172.728	15.197.096
116	Kab. Ogan Ilir	3.610.000	616.767	780.000		1.396.767	10.006.767
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.240.000	429.276	640.120		1.069.396	6.109.396
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan						
119	Kab. Empat Lawang						
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
121	Kab. Musi Rawas Utara				2.760.559	2.745.843	
122	Provinsi Bengkulu						
123	Kab. Bengkulu Selatan						
124	Kab. Bengkulu Utara				3.307.500	3.370.677	1.165.500
125	Kab. Rejang Lebong						
126	Kota Bengkulu						
127	Kab. Kaur					925.000	
128	Kab. Seluma	21.513.999		21.513.999	2.664.375	3.660.240	2.944.588
129	Kab. Mukomuko						
130	Kab. Lebong						
131	Kab. Kepahiang						
132	Kab. Bengkulu Tengah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
121	Kab. Musi Rawas Utara	4.259.851	304.806	360.000		664.806	10.431.059
122	Provinsi Bengkulu				529.840	529.840	529.840
123	Kab. Bengkulu Selatan						
124	Kab. Bengkulu Utara	9.360.000	411.094			411.094	17.614.771
125	Kab. Rejang Lebong						
126	Kota Bengkulu						
127	Kab. Kaur	3.478.000	384.946			384.946	4.787.946
128	Kab. Seluma	7.333.000	826.883	788.000		1.614.883	39.731.085
129	Kab. Mukomuko						
130	Kab. Lebong						
131	Kab. Kepahiang						
132	Kab. Bengkulu Tengah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
133	Provinsi Lampung						
134	Kab. Lampung Barat	28.453.403		28.453.403	2.835.906	4.486.084	5.406.131
135	Kab. Lampung Selatan						
136	Kab. Lampung Tengah						
137	Kab. Lampung Utara						
138	Kab. Lampung Timur						
139	Kab. Tanggamus						
140	Kab. Tulang Bawang						
141	Kab. Way Kanan					4.500.000	3.123.378
142	Kota Bandar Lampung						
143	Kota Metro						
144	Kab. Pesawaran						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
133	Provinsi Lampung				862.473	862.473	862.473
134	Kab. Lampung Barat	5.115.110	1.514.466	680.000		2.194.466	48.491.100
135	Kab. Lampung Selatan						
136	Kab. Lampung Tengah						
137	Kab. Lampung Utara						
138	Kab. Lampung Timur						
139	Kab. Tanggamus						
140	Kab. Tulang Bawang	5.316.251	1.105.057	780.000		1.885.057	7.201.308
141	Kab. Way Kanan	3.946.743					11.570.121
142	Kota Bandar Lampung						
143	Kota Metro						
144	Kab. Pesawaran						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
145	Kab. Pringsewu						
146	Kab. Mesuji						2.464.394
147	Kab. Tulang Bawang Barat						
148	Kab. Pesisir Barat	10.734.773		10.734.773	2.866.224	2.519.622	5.902.031
149	Provinsi DKI Jakarta						
150	Provinsi Jawa Barat						
151	Kab. Bandung						
152	Kab. Bekasi						
153	Kab. Bogor						
154	Kab. Ciamis						
155	Kab. Cianjur						
156	Kab. Cirebon						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
145	Kab. Pringsewu						
146	Kab. Mesuji	3.676.500	734.225			734.225	6.875.119
147	Kab. Tulang Bawang Barat						
148	Kab. Pesisir Barat	5.735.933	726.300	750.614		1.476.914	29.235.497
149	Provinsi DKI Jakarta						
150	Provinsi Jawa Barat						
151	Kab. Bandung						
152	Kab. Bekasi						
153	Kab. Bogor						
154	Kab. Ciamis						
155	Kab. Cianjur						
156	Kab. Cirebon						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
157	Kab. Garut						
158	Kab. Indramayu						
159	Kab. Karawang						
160	Kab. Kuningan						
161	Kab. Majalengka						
162	Kab. Purwakarta						
163	Kab. Subang						
164	Kab. Sukabumi						
165	Kab. Sumedang						
166	Kab. Tasikmalaya						
167	Kota Bandung						
168	Kota Bekasi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
157	Kab. Garut						
158	Kab. Indramayu						
159	Kab. Karawang						
160	Kab. Kuningan						
161	Kab. Majalengka						
162	Kab. Purwakarta						
163	Kab. Subang						
164	Kab. Sukabumi						
165	Kab. Sumedang						
166	Kab. Tasikmalaya						
167	Kota Bandung						
168	Kota Bekasi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
169	Kota Bogor						
170	Kota Cirebon						
171	Kota Depok						
172	Kota Sukabumi						
173	Kota Tasikmalaya						
174	Kota Cimahi						
175	Kota Banjar						
176	Kab. Bandung Barat						
177	Kab. Pangandaran						
178	Provinsi Jawa Tengah						
179	Kab. Banjarnegara						
180	Kab. Banyumas						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
169	Kota Bogor						
170	Kota Cirebon						
171	Kota Depok						
172	Kota Sukabumi						
173	Kota Tasikmalaya						
174	Kota Cimahi						
175	Kota Banjar						
176	Kab. Bandung Barat						
177	Kab. Pangandaran						
178	Provinsi Jawa Tengah						
179	Kab. Banjarnegara						
180	Kab. Banyumas						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
181	Kab. Batang						
182	Kab. Blora						
183	Kab. Boyolali						
184	Kab. Brebes						
185	Kab. Cilacap						
186	Kab. Demak						
187	Kab. Grobogan						
188	Kab. Jepara						
189	Kab. Karanganyar						
190	Kab. Kebumen						
191	Kab. Kendal						
192	Kab. Klaten						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
181	Kab. Batang						
182	Kab. Bora						
183	Kab. Boyolali						
184	Kab. Brebes						
185	Kab. Cilacap						
186	Kab. Demak						
187	Kab. Grobogan						
188	Kab. Jepara						
189	Kab. Karanganyar						
190	Kab. Kebumen						
191	Kab. Kendal						
192	Kab. Klaten						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
193	Kab. Kudus						
194	Kab. Magelang						
195	Kab. Pati						
196	Kab. Pekalongan						
197	Kab. Pemalang						
198	Kab. Purbalingga						
199	Kab. Purworejo						
200	Kab. Rembang						
201	Kab. Semarang						
202	Kab. Sragen						
203	Kab. Sukoharjo						
204	Kab. Tegal						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
193	Kab. Kudus						
194	Kab. Magelang						
195	Kab. Pati						
196	Kab. Pekalongan						
197	Kab. Pemalang						
198	Kab. Purbalingga						
199	Kab. Purworejo						
200	Kab. Rembang						
201	Kab. Semarang						
202	Kab. Sragen						
203	Kab. Sukoharjo						
204	Kab. Tegal						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
205	Kab. Temanggung						
206	Kab. Wonogiri						
207	Kab. Wonosobo						
208	Kota Magelang						
209	Kota Pekalongan						
210	Kota Salatiga						
211	Kota Semarang						
212	Kota Surakarta						
213	Kota Tegal						
214	Provinsi DI Yogyakarta						
215	Kab. Bantul						
216	Kab. Gunung Kidul						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
205	Kab. Temanggung						
206	Kab. Wonogiri						
207	Kab. Wonosobo						
208	Kota Magelang						
209	Kota Pekalongan						
210	Kota Salatiga						
211	Kota Semarang						
212	Kota Surakarta						
213	Kota Tegal						
214	Provinsi DI Yogyakarta						
215	Kab. Bantul						
216	Kab. Gunung Kidul						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
217	Kab. Kulon Progo						
218	Kab. Sleman						
219	Kota Yogyakarta						
220	Provinsi Jawa Timur						
221	Kab. Bangkalan	39.609.043		39.609.043		2.824.296	4.903.189
222	Kab. Banyuwangi						
223	Kab. Blitar						
224	Kab. Bojonegoro						
225	Kab. Bondowoso	13.003.612		13.003.612		4.082.030	6.000.000
226	Kab. Gresik						
227	Kab. Jember						
228	Kab. Jombang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
217	Kab. Kulon Progo						
218	Kab. Sleman						
219	Kota Yogyakarta						
220	Provinsi Jawa Timur				607.923	607.923	607.923
221	Kab. Bangkalan	4.000.000					51.336.528
222	Kab. Banyuwangi						
223	Kab. Blitar						
224	Kab. Bojonegoro						
225	Kab. Bondowoso	4.470.100	552.830	308.358		861.188	28.416.930
226	Kab. Gresik						
227	Kab. Jember						
228	Kab. Jombang						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
229	Kab. Kediri						
230	Kab. Lamongan						
231	Kab. Lumajang						
232	Kab. Madiun						
233	Kab. Magetan						
234	Kab. Malang						
235	Kab. Mojokerto						
236	Kab. Nganjuk						
237	Kab. Ngawi						
238	Kab. Pacitan						
239	Kab. Pamekasan						
240	Kab. Pasuruan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
229	Kab. Kediri						
230	Kab. Lamongan						
231	Kab. Lumajang						
232	Kab. Madiun						
233	Kab. Magetan						
234	Kab. Malang						
235	Kab. Mojokerto						
236	Kab. Nganjuk						
237	Kab. Ngawi						
238	Kab. Pacitan						
239	Kab. Pamekasan						
240	Kab. Pasuruan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
241	Kab. Ponorogo						
242	Kab. Probolinggo						
243	Kab. Sampang	34.201.804		34.201.804		1.949.478	6.813.382
244	Kab. Sidoarjo						
245	Kab. Situbondo					3.363.425	5.600.000
246	Kab. Sumenep						
247	Kab. Trenggalek						
248	Kab. Tuban						
249	Kab. Tulungagung						
250	Kota Blitar						
251	Kota Kediri						
252	Kota Madiun						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
241	Kab. Ponorogo						
242	Kab. Probolinggo						
243	Kab. Sampang	9.350.000	300.000	300.000		600.000	52.914.664
244	Kab. Sidoarjo						
245	Kab. Situbondo	5.800.000	1.162.548	300.000		1.462.548	16.225.973
246	Kab. Sumenep						
247	Kab. Trenggalek						
248	Kab. Tuban						
249	Kab. Tulungagung						
250	Kota Blitar						
251	Kota Kediri						
252	Kota Madiun						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
253	Kota Malang						
254	Kota Mojokerto						
255	Kota Pasuruan						
256	Kota Probolinggo						
257	Kota Surabaya						
258	Kota Batu						
259	Provinsi Kalimantan Barat						
260	Kab. Bengkayang	47.838.963		47.838.963	3.020.299	2.979.753	
261	Kab. Landak				3.046.483	3.682.330	6.468.437
262	Kab. Kapuas Hulu	63.101.549		63.101.549	4.321.339	3.392.693	3.600.000
263	Kab. Ketapang	40.342.715		40.342.715	3.765.148	1.500.000	3.800.000
264	Kab. Mempawah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
253	Kota Malang						
254	Kota Mojokerto						
255	Kota Pasuruan						
256	Kota Probolinggo						
257	Kota Surabaya						
258	Kota Batu						
259	Provinsi Kalimantan Barat				5.828.567	5.828.567	5.828.567
260	Kab. Bengkayang	6.840.000	1.827.631	748.600		2.576.231	63.255.246
261	Kab. Landak	8.720.000	1.159.950	833.632		1.993.582	23.910.832
262	Kab. Kapuas Hulu	6.270.000	5.013.736	936.447		5.950.183	86.635.764
263	Kab. Ketapang	6.127.500	2.590.133	1.221.480		3.811.613	59.346.976
264	Kab. Mempawah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
265	Kab. Sambas	40.937.999		40.937.999	3.382.286	3.227.328	3.996.230
266	Kab. Sanggau				3.068.809		2.000.000
267	Kab. Sintang	12.802.899		12.802.899	3.507.475	4.212.816	2.920.000
268	Kota Pontianak						
269	Kota Singkawang						
270	Kab. Sekadau						
271	Kab. Melawi	42.279.999		42.279.999	3.027.465	3.100.000	3.460.335
272	Kab. Kayong Utara	9.621.594		9.621.594	3.766.460	1.930.512	2.129.949
273	Kab. Kubu Raya						1.128.750
274	Provinsi Kalimantan Tengah						
275	Kab. Barito Selatan						
276	Kab. Barito Utara						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
265	Kab. Sambas	5.570.000	857.622	760.000		1.617.622	58.731.465
266	Kab. Sanggau	6.127.500	487.957	414.813		902.770	12.099.079
267	Kab. Sintang	9.893.169	455.494	760.000		1.215.494	34.551.853
268	Kota Pontianak						
269	Kota Singkawang						
270	Kab. Sekadau						
271	Kab. Melawi	5.776.190	2.442.082	1.123.242		3.565.324	61.209.313
272	Kab. Kayong Utara	6.370.100	480.964	833.632		1.314.596	25.133.211
273	Kab. Kubu Raya	6.800.000	1.270.666			1.270.666	9.199.416
274	Provinsi Kalimantan Tengah				527.558	527.558	527.558
275	Kab. Barito Selatan						
276	Kab. Barito Utara						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
277	Kab. Kapuas					4.795.823	2.100.000
278	Kab. Kotawaringin Barat						
279	Kab. Kotawaringin Timur						
280	Kota Palangkaraya						
281	Kab. Katingan						
282	Kab. Seruyan				3.534.259	2.554.741	675.000
283	Kab. Sukamara						
284	Kab. Lamandau						
285	Kab. Gunung Mas						
286	Kab. Pulang Pisau						
287	Kab. Murung Raya						
288	Kab. Barito Timur						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
277	Kab. Kapuas	5.138.360	1.176.591	790.120		1.966.711	14.000.894
278	Kab. Kotawaringin Barat						
279	Kab. Kotawaringin Timur						
280	Kota Palangkaraya						
281	Kab. Katingan						
282	Kab. Seruyan	5.625.000	404.335			404.335	12.793.335
283	Kab. Sukamara						
284	Kab. Lamandau						
285	Kab. Gunung Mas						
286	Kab. Pulang Pisau						
287	Kab. Murung Raya						
288	Kab. Barito Timur						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
289	Provinsi Kalimantan Selatan						
290	Kab. Banjar						
291	Kab. Barito Kuala						
292	Kab. Hulu Sungai Selatan						
293	Kab. Hulu Sungai Tengah						
294	Kab. Hulu Sungai Utara				1.700.204		3.651.006
295	Kab. Kotabaru						
296	Kab. Tabalong						
297	Kab. Tanah Laut						
298	Kab. Tapin						
299	Kota Banjarbaru						
300	Kota Banjarmasin						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
289	Provinsi Kalimantan Selatan						
290	Kab. Banjar						
291	Kab. Barito Kuala	3.550.000	300.000			300.000	3.850.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan						
293	Kab. Hulu Sungai Tengah						
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5.480.000	475.545	788.000		1.263.545	12.094.755
295	Kab. Kotabaru						
296	Kab. Tabalong						
297	Kab. Tanah Laut						
298	Kab. Tapin						
299	Kota Banjarbaru						
300	Kota Banjarmasin						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
301	Kab. Balangan						
302	Kab. Tanah Bumbu						
303	Provinsi Kalimantan Timur						
304	Kab. Berau				2.728.412	3.000.000	2.804.000
305	Kab. Kutai Kartanegara						
306	Kab. Kutai Barat						
307	Kab. Kutai Timur					3.114.528	
308	Kab. Paser						
309	Kota Balikpapan						
310	Kota Bontang						
311	Kota Samarinda						
312	Kab. Penajam Paser Utara						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
301	Kab. Balangan						
302	Kab. Tanah Bumbu						
303	Provinsi Kalimantan Timur				14.410.471	14.410.471	14.410.471
304	Kab. Berau	5.225.000		300.000		300.000	14.057.412
305	Kab. Kutai Kartanegara						
306	Kab. Kutai Barat						
307	Kab. Kutai Timur	4.893.961	517.930			517.930	8.526.419
308	Kab. Paser						
309	Kota Balikpapan						
310	Kota Bontang						
311	Kota Samarinda						
312	Kab. Penajam Paser Utara						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
313	Kab. Mahakam Ulu	26.302.822		26.302.822	4.132.504		2.200.000
314	Provinsi Sulawesi Utara						
315	Kab. Bolaang Mongondow						
316	Kab. Minahasa						
317	Kab. Kepulauan Sangihe					500.000	300.000
318	Kota Bitung						
319	Kota Manado						
320	Kab. Kepulauan Talaud	18.838.413		18.838.413	3.490.293	2.898.969	600.000
321	Kab. Minahasa Selatan						
322	Kota Tomohon						
323	Kab. Minahasa Utara						
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro				1.546.587	2.789.064	750.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
313	Kab. Mahakam Ulu	5.700.000	783.722	576.242		1.359.964	39.695.290
314	Provinsi Sulawesi Utara				7.918.207	7.918.207	7.918.207
315	Kab. Bolaang Mongondow						
316	Kab. Minahasa						
317	Kab. Kepulauan Sangihe	5.100.000	906.262	738.549		1.644.811	7.544.811
318	Kota Bitung						
319	Kota Manado						
320	Kab. Kepulauan Talaud	6.555.000	369.943	1.008.000		1.377.943	33.760.618
321	Kab. Minahasa Selatan						
322	Kota Tomohon						
323	Kab. Minahasa Utara	4.040.000	327.453	300.000		627.453	4.667.453
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	4.000.000	300.000	300.000		600.000	9.685.651



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
325	Kota Kotamobagu						
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara						300.000
327	Kab. Minahasa Tenggara						
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur						
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan						
330	Provinsi Sulawesi Tengah						
331	Kab. Banggai						
332	Kab. Banggai Kepulauan	24.624.051		24.624.051	2.793.000	2.868.115	
333	Kab. Buol	18.648.500		18.648.500	2.770.095	3.560.376	2.973.316
334	Kab. Toli-Toli	22.600.682		22.600.682		1.300.000	1.200.000
335	Kab. Donggala	48.209.483		48.209.483	6.877.477	4.061.798	4.800.000
336	Kab. Morowali					1.000.000	3.634.052



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
325	Kota Kotamobagu						
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.300.000	631.142	760.000		1.391.142	4.991.142
327	Kab. Minahasa Tenggara						
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur						
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan						
330	Provinsi Sulawesi Tengah				1.872.158	1.872.158	1.872.158
331	Kab. Banggai						
332	Kab. Banggai Kepulauan	8.832.525	1.390.617	513.000		1.903.617	41.021.308
333	Kab. Buol	8.272.034	410.498	633.640		1.044.138	37.268.459
334	Kab. Toli-Toli	8.466.280	407.394	621.280		1.028.674	34.595.636
335	Kab. Donggala	10.830.000	1.513.847	377.499		1.891.346	76.670.104
336	Kab. Morowali	5.614.010	1.087.552	790.120		1.877.672	12.125.734



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
337	Kab. Poso					3.902.519	2.767.742
338	Kota Palu						
339	Kab. Parigi Moutong	28.847.380		28.847.380	6.615.000	980.000	7.078.746
340	Kab. Tojo Una Una	37.468.341		37.468.341	2.770.095	2.800.000	
341	Kab. Sigi	14.738.643		14.738.643	6.877.477	3.319.062	3.200.000
342	Kab. Banggai Laut	7.145.733		7.145.733	3.031.875	1.737.553	3.552.146
343	Kab. Morowali Utara	27.729.671		27.729.671	2.664.375	2.573.887	2.500.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan						
345	Kab. Bantaeng						
346	Kab. Barru						
347	Kab. Bone						
348	Kab. Bulukumba						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
337	Kab. Poso	5.788.556	1.168.467	678.368		1.846.835	14.305.652
338	Kota Palu						
339	Kab. Parigi Moutong	12.910.000	1.935.000	833.632		2.768.632	59.199.758
340	Kab. Tojo Una Una	5.465.000	1.117.519	633.042		1.750.561	50.253.997
341	Kab. Sigi	7.163.400	378.187	300.000		678.187	35.976.769
342	Kab. Banggai Laut	8.409.445	426.769			426.769	24.303.521
343	Kab. Morowali Utara	6.946.100	1.131.990	833.632		1.965.622	44.379.655
344	Provinsi Sulawesi Selatan						
345	Kab. Bantaeng						
346	Kab. Barru						
347	Kab. Bone						
348	Kab. Bulukumba						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
349	Kab. Enrekang						
350	Kab. Gowa						
351	Kab. Jeneponto	21.771.444	45.000.002	66.771.446	2.940.000		4.837.150
352	Kab. Luwu						
353	Kab. Luwu Utara					3.071.489	3.458.569
354	Kab. Maros						
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan						
356	Kota Palopo						
357	Kab. Luwu Timur					900.000	3.210.000
358	Kab. Pinrang						
359	Kab. Sinjai						
360	Kab. Kepulauan Selayar						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
349	Kab. Enrekang						
350	Kab. Gowa						
351	Kab. Jeneponto	9.160.000	2.836.111	574.840		3.410.951	87.119.547
352	Kab. Luwu						
353	Kab. Luwu Utara	3.500.000	1.854.678	648.720		2.503.398	12.533.456
354	Kab. Maros						
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan						
356	Kota Palopo						
357	Kab. Luwu Timur	5.130.000	308.548	300.000		608.548	9.848.548
358	Kab. Pinrang						
359	Kab. Sinjai						
360	Kab. Kepulauan Selayar						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
361	Kab. Sidenreng Rappang					2.891.352	2.870.828
362	Kab. Soppeng					2.523.087	2.883.305
363	Kab. Takalar						
364	Kab. Tana Toraja						
365	Kab. Wajo						
366	Kota Pare-pare						
367	Kota Makassar						
368	Kab. Toraja Utara						
369	Provinsi Sulawesi Tenggara						
370	Kab. Buton					3.437.954	2.000.000
371	Kab. Konawe	33.519.599		33.519.599	2.770.095	3.286.215	2.958.661
372	Kab. Kolaka						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
361	Kab. Sidenreng Rappang	3.204.983	435.999	575.480		1.011.479	9.978.642
362	Kab. Soppeng	3.500.000	591.182	592.590		1.183.772	10.090.164
363	Kab. Takalar						
364	Kab. Tana Toraja						
365	Kab. Wajo						
366	Kota Pare-pare						
367	Kota Makassar						
368	Kab. Toraja Utara						
369	Provinsi Sulawesi Tenggara						
370	Kab. Buton	3.700.000	575.763	800.000		1.375.763	10.513.717
371	Kab. Konawe	7.367.254	2.437.973	704.760		3.142.733	53.044.557
372	Kab. Kolaka						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
373	Kab. Muna					2.329.551	3.159.460
374	Kota Kendari						
375	Kota Bau-bau						
376	Kab. Konawe Selatan					3.205.164	1.200.000
377	Kab. Bombana	30.552.925		30.552.925	2.664.375	3.218.550	3.182.955
378	Kab. Wakatobi						
379	Kab. Kolaka Utara						
380	Kab. Konawe Utara					2.944.926	2.134.819
381	Kab. Buton Utara						
382	Kab. Konawe Kepulauan				2.730.709	2.226.095	1.300.000
383	Kab. Kolaka Timur					2.134.201	
384	Kab. Muna Barat						1.900.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
373	Kab. Muna	3.600.000					9.089.011
374	Kota Kendari						
375	Kota Bau-bau						
376	Kab. Konawe Selatan	7.050.000	557.236	833.632		1.390.868	12.846.032
377	Kab. Bombana	6.658.000	428.997			428.997	46.705.802
378	Kab. Wakatobi						
379	Kab. Kolaka Utara						
380	Kab. Konawe Utara	6.556.856	3.589.210	790.000		4.379.210	16.015.811
381	Kab. Buton Utara						
382	Kab. Konawe Kepulauan	12.575.000	1.401.928	790.120		2.192.048	21.023.852
383	Kab. Kolaka Timur	3.950.000	2.517.600	833.632		3.351.232	9.435.433
384	Kab. Muna Barat	8.750.000	930.879	2.158.145		3.089.024	13.739.024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
385	Kab. Buton Tengah						
386	Kab. Buton Selatan						
387	Provinsi Bali						
388	Kab. Badung						
389	Kab. Bangli						
390	Kab. Buleleng						
391	Kab. Gianyar						
392	Kab. Jembrana						
393	Kab. Karangasem						
394	Kab. Klungkung						
395	Kab. Tabanan						
396	Kota Denpasar						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
385	Kab. Buton Tengah						
386	Kab. Buton Selatan						
387	Provinsi Bali						
388	Kab. Badung						
389	Kab. Bangli						
390	Kab. Buleleng						
391	Kab. Gianyar						
392	Kab. Jembrana						
393	Kab. Karangasem						
394	Kab. Klungkung						
395	Kab. Tabanan						
396	Kota Denpasar						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat						
398	Kab. Bima	49.250.229		49.250.229	3.675.000	2.297.372	5.824.380
399	Kab. Dompu	59.745.865		59.745.865	2.618.438	700.000	2.900.000
400	Kab. Lombok Barat	40.609.657		40.609.657	5.512.500	1.492.000	5.000.000
401	Kab. Lombok Tengah	33.413.705		33.413.705	5.512.500	1.282.900	
402	Kab. Lombok Timur	11.404.948		11.404.948		3.085.766	7.500.000
403	Kab. Sumbawa	52.046.376		52.046.376		2.280.000	3.600.000
404	Kota Mataram						
405	Kota Bima						
406	Kab. Sumbawa Barat	7.916.477		7.916.477	3.491.250	2.993.000	
407	Kab. Lombok Utara	10.000.000		10.000.000	5.731.231	2.941.787	3.302.059
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat						
398	Kab. Bima	10.457.999	957.170	666.804		1.623.974	73.128.954
399	Kab. Dompu	6.800.000	300.000	639.288		939.288	73.703.591
400	Kab. Lombok Barat	19.199.058	831.657			831.657	72.644.872
401	Kab. Lombok Tengah	14.962.500	952.165	555.200		1.507.365	56.678.970
402	Kab. Lombok Timur	16.710.967	1.218.652	833.632		2.052.284	40.753.965
403	Kab. Sumbawa	14.800.000	1.657.020	588.138		2.245.158	74.971.534
404	Kota Mataram						
405	Kota Bima						
406	Kab. Sumbawa Barat	11.103.504		980.820		980.820	26.485.051
407	Kab. Lombok Utara	18.474.000	1.310.129	526.016		1.836.145	42.285.222
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur				6.554.405	6.554.405	6.554.405



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
409	Kab. Alor				2.768.819	3.250.000	1.711.012
410	Kab. Belu					1.196.400	
411	Kab. Ende	53.004.999		53.004.999	2.664.375	3.077.112	2.961.160
412	Kab. Flores Timur						
413	Kab. Kupang				2.664.375	7.276.904	2.200.000
414	Kab. Lembata	55.430.907		55.430.907	2.664.375	3.082.113	2.188.174
415	Kab. Manggarai					7.599.999	4.648.664
416	Kab. Ngada						
417	Kab. Sikka						
418	Kab. Sumba Barat					2.550.138	3.196.234
419	Kab. Sumba Timur	34.667.791		34.667.791	2.531.156	2.635.839	
420	Kab. Timor Tengah Selatan	16.810.032		16.810.032	3.338.132	3.252.535	2.437.140



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
409	Kab. Alor	6.192.276	783.587	820.918		1.604.505	15.526.612
410	Kab. Belu	8.446.030	4.160.055	630.468		4.790.523	14.432.953
411	Kab. Ende	7.050.000	424.939	562.680		987.619	69.745.265
412	Kab. Flores Timur						
413	Kab. Kupang	5.187.000	1.188.048	374.850		1.562.898	18.891.177
414	Kab. Lembata	5.788.556	2.804.814	701.160		3.505.974	72.660.099
415	Kab. Manggarai	7.500.000	562.819	602.610		1.165.429	20.914.092
416	Kab. Ngada						
417	Kab. Sikka						
418	Kab. Sumba Barat	8.524.965					14.271.337
419	Kab. Sumba Timur	6.878.000	1.978.594	560.000		2.538.594	49.251.380
420	Kab. Timor Tengah Selatan	7.362.500	2.453.915	632.000		3.085.915	36.286.254



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
421	Kab. Timor Tengah Utara	47.754.158		47.754.158	2.531.156	2.568.456	2.780.789
422	Kota Kupang						
423	Kab. Rote Ndao				2.946.426	1.500.000	1.950.000
424	Kab. Manggarai Barat	17.264.638		17.264.638	2.664.375		2.694.943
425	Kab. Nagekeo	47.413.555		47.413.555	2.933.238	600.000	
426	Kab. Sumba Barat Daya	13.759.999		13.759.999	2.531.156	2.775.543	
427	Kab. Sumba Tengah				2.777.749	1.400.000	
428	Kab. Manggarai Timur	28.070.999		28.070.999	2.664.375		2.470.657
429	Kab. Sabu Rajjua				2.992.892	3.333.119	447.000
430	Kab. Malaka	10.821.034		10.821.034	2.531.156	3.176.950	
431	Provinsi Maluku						
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	21.283.342		21.283.342	4.027.919	2.688.340	2.496.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
421	Kab. Timor Tengah Utara	8.919.639	300.000	624.400		924.400	65.478.598
422	Kota Kupang						
423	Kab. Rote Ndao	8.000.000	310.443	600.000		910.443	15.306.869
424	Kab. Manggarai Barat	7.934.970	1.500.782	790.120		2.290.902	32.849.828
425	Kab. Nagekeo	6.893.644	2.798.872	790.120		3.588.992	61.429.429
426	Kab. Sumba Barat Daya	7.250.000	7.526.154	1.110.828		8.636.982	34.953.680
427	Kab. Sumba Tengah	7.350.000	1.219.575	690.987		1.910.562	13.438.311
428	Kab. Manggarai Timur	8.265.000	712.542	480.000		1.192.542	42.663.573
429	Kab. Sabu Raijua	9.634.900	336.310	460.770		797.080	17.204.991
430	Kab. Malaka	4.655.000	11.525.771	7.898.299		19.424.070	40.608.210
431	Provinsi Maluku				2.363.172	2.363.172	2.363.172
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	9.382.257	1.549.210	834.464		2.383.674	42.261.732



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
433	Kab. Maluku Tengah	11.232.898		11.232.898	2.991.582	2.368.409	3.734.034
434	Kab. Maluku Tenggara				3.481.539	7.099.840	2.514.928
435	Kab. Buru				4.098.626	1.383.000	
436	Kota Ambon						
437	Kab. Seram Bagian Barat	33.995.955		33.995.955	2.977.021	3.398.507	3.541.696
438	Kab. Seram Bagian Timur				3.014.474	2.887.500	1.248.000
439	Kab. Kepulauan Aru	28.223.395		28.223.395	3.299.296		
440	Kota Tual						
441	Kab. Maluku Barat Daya	17.824.648		17.824.648	3.805.637	3.162.229	1.814.331
442	Kab. Buru Selatan				3.571.328	3.575.588	1.658.590
443	Provinsi Papua						
444	Kab. Biak Numfor	28.226.499		28.226.499	4.834.251	2.655.615	2.527.148



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
433	Kab. Maluku Tengah	8.500.000	17.143.964	833.632		17.977.596	46.804.519
434	Kab. Maluku Tenggara	8.121.818	2.896.472	949.563		3.846.035	25.064.160
435	Kab. Buru	12.500.000	1.574.035	572.360		2.146.395	20.128.021
436	Kota Ambon						
437	Kab. Seram Bagian Barat	15.649.000	10.190.271	706.133		10.896.404	70.458.583
438	Kab. Seram Bagian Timur	17.448.485	1.861.825	833.632		2.695.457	27.293.916
439	Kab. Kepulauan Aru	13.300.000	1.433.728	790.120		2.223.848	47.046.539
440	Kota Tual						
441	Kab. Maluku Barat Daya	6.688.000	789.417	1.010.800		1.800.217	35.095.062
442	Kab. Buru Selatan	8.562.391	771.024	977.640		1.748.664	19.116.561
443	Provinsi Papua				10.132.081	10.132.081	10.132.081
444	Kab. Biak Numfor	7.544.644	2.310.350	1.371.317		3.681.667	49.469.824



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
445	Kab. Jayapura					2.000.000	2.000.000
446	Kab. Jayawijaya	20.617.642		20.617.642			5.731.663
447	Kab. Merauke				15.276.000	3.134.128	2.097.420
448	Kab. Mimika				3.807.300		
449	Kab. Nabire				4.086.721	5.297.946	2.767.093
450	Kab. Paniai	24.350.629		24.350.629	4.968.086	3.607.516	3.339.528
451	Kab. Puncak Jaya	19.540.005		19.540.005	6.101.867	3.700.517	
452	Kab. Kepulauan Yapen				3.729.096	2.500.000	
453	Kota Jayapura					2.350.000	1.200.000
454	Kab. Sarmi	35.775.202		35.775.202			700.000
455	Kab. Keerom	107.857.900		107.857.900	17.016.806	3.049.554	1.288.035
456	Kab. Yahukimo	58.328.838		58.328.838	6.245.516	3.876.328	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
445	Kab. Jayapura	9.500.000	436.746	843.720		1.280.466	14.780.466
446	Kab. Jayawijaya	8.583.480	2.278.547	1.566.020		3.844.567	38.777.352
447	Kab. Merauke	9.013.427	752.032	1.820.124		2.572.156	32.093.131
448	Kab. Mimika	5.500.000	1.169.199	2.242.140		3.411.339	12.718.639
449	Kab. Nabire	11.250.000	2.098.303	1.230.000		3.328.303	26.730.063
450	Kab. Paniai	16.849.961	1.740.770	1.692.840		3.433.610	56.549.330
451	Kab. Puncak Jaya	8.550.000	2.512.104	3.247.602		5.759.706	43.652.095
452	Kab. Kepulauan Yapen	8.375.000	1.411.231	1.642.475		3.053.706	17.657.802
453	Kota Jayapura	4.700.000	883.309	318.668		1.201.977	9.451.977
454	Kab. Sarmi	8.560.000	3.924.080	6.126.046		10.050.126	55.085.328
455	Kab. Keerom	18.564.000	1.037.751	1.067.400		2.105.151	149.881.446
456	Kab. Yahukimo	10.667.500	15.481.583	3.952.094		19.433.677	98.551.859



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
457	Kab. Pegunungan Bintang	72.105.991		72.105.991	18.404.000	4.122.028	1.926.000
458	Kab. Tolikara	26.393.777		26.393.777	7.744.622	4.949.322	5.709.336
459	Kab. Boven Digoel	42.258.999		42.258.999	14.126.500	3.000.000	
460	Kab. Mappi				5.000.853	3.992.844	3.253.884
461	Kab. Asmat				5.950.707	2.584.496	2.550.000
462	Kab. Waropen	31.755.999		31.755.999	4.343.198	2.500.000	
463	Kab. Supiori				12.733.431	3.187.500	1.530.000
464	Kab. Mamberamo Raya	61.290.186		61.290.186		2.875.000	2.277.190
465	Kab. Mamberamo Tengah				5.934.978	4.000.000	
466	Kab. Yalimo	95.813.999		95.813.999		4.514.920	
467	Kab. Lanny Jaya	43.001.491		43.001.491		4.991.599	
468	Kab. Nduga	52.802.517		52.802.517	8.189.297	2.280.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
457	Kab. Pegunungan Bintang	9.963.500	3.384.669	4.259.290		7.643.959	114.165.478
458	Kab. Tolikara	9.504.359	3.553.395	2.387.849		5.941.244	60.242.660
459	Kab. Boven Digoel	9.950.000	1.073.110			1.073.110	70.408.609
460	Kab. Mappi	13.504.972	3.214.117	5.892.538		9.106.655	34.859.208
461	Kab. Asmat	10.144.575	1.830.821	1.836.240		3.667.061	24.896.839
462	Kab. Waropen	15.600.000	1.024.137	1.217.400		2.241.537	56.440.734
463	Kab. Supiori	9.551.303	300.000	1.577.000		1.877.000	28.879.234
464	Kab. Mamberamo Raya	7.125.000	1.710.137	1.217.919		2.928.056	76.495.432
465	Kab. Mamberamo Tengah	8.735.458	3.138.136	1.183.493		4.321.629	22.992.065
466	Kab. Yalimo	11.577.113	3.481.319	2.928.622		6.409.941	118.315.973
467	Kab. Lanny Jaya	13.000.000	5.999.737	3.991.338		9.991.075	70.984.165
468	Kab. Nduga	9.200.000	996.248	1.477.098		2.473.346	74.945.160



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
469	Kab. Dogiyai				4.619.255	3.774.930	3.564.186
470	Kab. Puncak	27.705.999		27.705.999	6.908.412	4.966.236	5.591.936
471	Kab. Intan Jaya				7.580.055	4.906.326	3.250.000
472	Kab. Deiyai				6.109.145	3.327.387	3.346.898
473	Provinsi Maluku Utara						
474	Kab. Halmahera Tengah				3.904.625	2.487.563	2.329.111
475	Kota Ternate						
476	Kab. Halmahera Barat	28.515.000		28.515.000	3.288.905	3.196.995	2.706.469
477	Kab. Halmahera Timur	17.912.467		17.912.467		3.072.385	
478	Kab. Halmahera Selatan	44.553.398		44.553.398	3.027.991	3.564.382	2.800.000
479	Kab. Halmahera Utara						
480	Kab. Kepulauan Sula	9.139.999		9.139.999		3.052.545	2.914.474



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
469	Kab. Dogiyai	10.450.000	4.995.907	2.228.308		7.224.215	29.632.586
470	Kab. Puncak	10.756.190	709.905	2.730.870		3.440.775	59.369.548
471	Kab. Intan Jaya	8.651.261	3.124.857	4.217.617		7.342.474	31.730.116
472	Kab. Deiyai	13.595.740	6.441.584	2.110.140		8.551.724	34.930.894
473	Provinsi Maluku Utara				12.632.862	12.632.862	12.632.862
474	Kab. Halmahera Tengah	8.075.000	923.796	790.120		1.713.916	18.510.215
475	Kota Ternate						
476	Kab. Halmahera Barat	7.634.000	2.323.084	790.120		3.113.204	48.454.573
477	Kab. Halmahera Timur	8.945.951	706.295	677.017		1.383.312	31.314.115
478	Kab. Halmahera Selatan	14.655.572	5.335.752	2.084.080		7.419.832	76.021.175
479	Kab. Halmahera Utara						
480	Kab. Kepulauan Sula	5.700.000	2.161.732	1.554.360		3.716.092	24.523.110



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
481	Kota Tidore Kepulauan						
482	Kab. Pulau Morotai	31.587.234		31.587.234	3.042.672	3.323.476	1.440.136
483	Kab. Pulau Taliabu				3.202.312	3.780.981	3.550.023
484	Provinsi Banten						
485	Kab. Lebak	15.223.270		15.223.270		6.527.585	4.200.000
486	Kab. Pandeglang	10.821.355	19.538.595	30.359.950		3.909.943	7.500.000
487	Kab. Serang						
488	Kab. Tangerang						
489	Kota Cilegon						
490	Kota Tangerang						
491	Kota Serang						
492	Kota Tangerang Selatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
481	Kota Tidore Kepulauan						
482	Kab. Pulau Morotai	9.998.416	494.306	2.084.080		2.578.386	51.970.320
483	Kab. Pulau Taliabu	6.450.500	6.041.641	984.428		7.026.069	24.009.885
484	Provinsi Banten				500.000	500.000	500.000
485	Kab. Lebak	5.425.456	300.000	332.500		632.500	32.008.811
486	Kab. Pandeglang	4.815.026	628.096	574.864		1.202.960	47.787.879
487	Kab. Serang						
488	Kab. Tangerang						
489	Kota Cilegon						
490	Kota Tangerang						
491	Kota Serang						
492	Kota Tangerang Selatan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
493	Provinsi Bangka Belitung						
494	Kab. Bangka						
495	Kab. Belitung						
496	Kota Pangkal Pinang						
497	Kab. Bangka Selatan					2.669.904	2.974.213
498	Kab. Bangka Tengah						
499	Kab. Bangka Barat						
500	Kab. Belitung Timur						
501	Provinsi Gorontalo						
502	Kab. Boalemo					2.338.158	2.000.000
503	Kab. Gorontalo					4.161.874	3.600.000
504	Kota Gorontalo						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
493	Provinsi Bangka Belitung				1.984.443	1.984.443	1.984.443
494	Kab. Bangka						
495	Kab. Belitung						
496	Kota Pangkal Pinang						
497	Kab. Bangka Selatan	4.390.511	575.144	750.614		1.325.758	11.360.386
498	Kab. Bangka Tengah						
499	Kab. Bangka Barat						
500	Kab. Belitung Timur						
501	Provinsi Gorontalo				1.026.798	1.026.798	1.026.798
502	Kab. Boalemo	9.975.000	396.494	578.040		974.534	15.287.692
503	Kab. Gorontalo	4.088.826	1.530.103	331.020		1.861.123	13.711.823
504	Kota Gorontalo						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
505	Kab. Pohuwato	23.049.562		23.049.562	2.664.375	1.758.553	3.083.871
506	Kab. Bone Bolango						
507	Kab. Gorontalo Utara	24.560.133		24.560.133	2.770.095	3.263.109	3.000.000
508	Provinsi Kepulauan Riau						
509	Kab. Natuna	34.802.999		34.802.999	6.448.801	2.207.573	2.683.861
510	Kab. Kepulauan Anambas	61.764.999		61.764.999		3.702.860	2.014.364
511	Kab. Karimun	40.361.984		40.361.984	3.304.744	1.050.000	2.742.124
512	Kota Batam					6.371.931	2.784.000
513	Kota Tanjung Pinang						
514	Kab. Lingga						
515	Kab. Bintan	5.170.058		5.170.058	4.274.393	2.480.000	2.490.000
516	Provinsi Papua Barat						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
505	Kab. Pohuwato	7.071.000	872.657	738.549		1.611.206	39.238.567
506	Kab. Bone Bolango						
507	Kab. Gorontalo Utara	5.900.000	1.379.153	375.307		1.754.460	41.247.797
508	Provinsi Kepulauan Riau				13.199.329	13.199.329	13.199.329
509	Kab. Natuna	7.500.000	608.304	300.000		908.304	54.551.538
510	Kab. Kepulauan Anambas	4.678.944	2.659.989	1.014.400		3.674.389	75.835.556
511	Kab. Karimun	5.649.000	696.017	671.200		1.367.217	54.475.069
512	Kota Batam	4.750.000	300.000	395.060		695.060	14.600.991
513	Kota Tanjung Pinang						
514	Kab. Lingga						
515	Kab. Bintan	5.500.000	520.704	474.782		995.486	20.909.937
516	Provinsi Papua Barat						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
517	Kab. Fak Fak				3.983.700	2.731.771	
518	Kab. Manokwari					3.318.093	2.015.006
519	Kab. Sorong	11.349.869		11.349.869	3.055.101	3.127.470	1.422.791
520	Kota Sorong						
521	Kab. Raja Ampat	48.398.940		48.398.940	17.830.000		1.528.164
522	Kab. Sorong Selatan	7.679.699		7.679.699			2.318.402
523	Kab. Teluk Bintuni	25.827.309		25.827.309			
524	Kab. Teluk Wondama	35.152.999		35.152.999	4.486.495	4.198.957	1.950.000
525	Kab. Kaimana				2.682.781		
526	Kab. Maybrat	51.285.586		51.285.586	4.044.264	3.669.511	
527	Kab. Tambrau	63.466.408		63.466.408	18.768.735	1.515.423	801.939
528	Kab. Manokwari Selatan				4.207.728	3.295.153	500.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
529	Kab. Pegunungan Arfak					4.278.263	
530	Provinsi Sulawesi Barat						
531	Kab. Majene					3.020.405	3.008.797
532	Kab. Mamuju					2.707.500	5.304.382
533	Kab. Polewali Mandar	9.640.631		9.640.631		1.000.000	4.072.268
534	Kab. Mamasa					3.421.088	3.610.037
535	Kab. Pasangkayu					1.278.500	2.092.348
536	Kab. Mamuju Tengah	23.487.351		23.487.351	3.197.250	3.435.794	3.230.000
537	Provinsi Kalimantan Utara						
538	Kab. Bulungan					3.172.987	2.909.789
539	Kab. Malinau				3.691.501	2.750.000	1.990.613
540	Kab. Nunukan	10.281.966		10.281.966		2.416.209	2.640.902



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
517	Kab. Fak Fak	6.311.158	818.355	665.000		1.483.355	14.509.984
518	Kab. Manokwari	7.050.000	627.262	926.400		1.553.662	13.936.761
519	Kab. Sorong	8.155.000	1.172.848	910.135		2.082.983	29.193.214
520	Kota Sorong						
521	Kab. Raja Ampat	9.526.067	3.945.640	1.441.141		5.386.781	82.669.952
522	Kab. Sorong Selatan	11.260.000	1.607.992	980.000		2.587.992	23.846.093
523	Kab. Teluk Bintuni	11.050.000	933.171	1.575.000		2.508.171	39.385.480
524	Kab. Teluk Wondama	16.508.083	420.304	1.185.180		1.605.484	63.902.018
525	Kab. Kaimana	7.457.500	403.952	300.000		703.952	10.844.233
526	Kab. Maybrat	13.050.563	447.967	1.478.997		1.926.964	73.976.888
527	Kab. Tambrauw	10.156.285	1.018.459	1.750.000		2.768.459	97.477.249
528	Kab. Manokwari Selatan	8.735.458	1.133.120	600.000		1.733.120	18.471.459



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
529	Kab. Pegunungan Arfak	12.350.000	2.969.832	2.126.880		5.096.712	21.724.975
530	Provinsi Sulawesi Barat				2.593.658	2.593.658	2.593.658
531	Kab. Majene	3.500.000	731.719	300.000		1.031.719	10.560.921
532	Kab. Mamuju	4.000.000	515.874	788.000		1.303.874	13.315.756
533	Kab. Polewali Mandar	10.275.000	5.179.601	504.000		5.683.601	30.671.500
534	Kab. Mamasa	4.000.000	2.120.121	525.000		2.645.121	13.676.246
535	Kab. Pasangkayu	3.539.847	3.863.473	713.945		4.577.418	11.488.113
536	Kab. Mamuju Tengah	6.250.000	1.291.542	499.740		1.791.282	41.391.677
537	Provinsi Kalimantan Utara				2.815.561	2.815.561	2.815.561
538	Kab. Bulungan	7.037.832	323.200	625.224		948.424	14.069.032
539	Kab. Malinau	8.180.400	464.580	606.366		1.070.946	17.683.460
540	Kab. Nunukan	16.326.400	833.088	790.120		1.623.208	33.288.685



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Kesehatan			Perumahan dan Permukiman	Air Minum	Sanitasi
		Penguatan Puskesmas DTPK	Penguatan Pembangunan RS Pratama	Subtotal Kesehatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)
541	Kota Tarakan						
542	Kab. Tana Tidung						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

C. DAK AFIRMASI

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Transportasi	Pendidikan				TOTAL DAK AFIRMASI
			SD	SMP	SMA	Subtotal Pendidikan	
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(13)
541	Kota Tarakan						
542	Kab. Tana Tidung						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Sekretaris Bidang dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Hesti Shwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Provinsi Aceh	900.609.000	142.130.000	40.985.930
1	Kab. Aceh Barat	-	-	-
2	Kab. Aceh Besar	-	-	-
3	Kab. Aceh Selatan	-	-	-
4	Kab. Aceh Singkil	-	-	-
5	Kab. Aceh Tengah	-	-	-
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-
7	Kab. Aceh Timur	-	-	-
8	Kab. Aceh Utara	-	-	-
9	Kab. Bireuen	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
I	Provinsi Aceh	-	-	359.182.913
1	Kab. Aceh Barat	3.647.400	1.283.700	44.688.333
2	Kab. Aceh Besar	6.261.600	935.100	91.929.777
3	Kab. Aceh Selatan	6.366.000	397.800	76.775.412
4	Kab. Aceh Singkil	3.248.400	2.374.500	21.356.429
5	Kab. Aceh Tengah	3.993.000	321.900	61.751.115
6	Kab. Aceh Tenggara	4.379.400	2.388.100	53.362.017
7	Kab. Aceh Timur	5.170.800	3.215.700	79.472.594
8	Kab. Aceh Utara	10.888.200	4.271.200	146.865.756
9	Kab. Bireuen	7.242.000	1.663.800	107.879.231



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Provinsi Aceh	9.972.000	11.103.308	3.250.000	1.677.000
1	Kab. Aceh Barat	1.935.000	15.516.014	-	-
2	Kab. Aceh Besar	1.410.000	4.870.908	-	-
3	Kab. Aceh Selatan	1.512.000	20.478.254	-	-
4	Kab. Aceh Singkil	1.284.000	4.667.385	-	-
5	Kab. Aceh Tengah	1.359.800	8.783.978	450.000	-
6	Kab. Aceh Tenggara	1.161.000	4.568.169	-	-
7	Kab. Aceh Timur	2.682.000	12.194.148	-	-
8	Kab. Aceh Utara	2.543.200	15.381.137	450.000	-
9	Kab. Bireuen	1.992.000	7.556.540	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	Provinsi Aceh	4.149.000	-	-	415.000
1	Kab. Aceh Barat	10.835.500	-	803.670	326.350
2	Kab. Aceh Besar	24.832.850	-	3.157.730	-
3	Kab. Aceh Selatan	18.917.905	-	2.817.555	-
4	Kab. Aceh Singkil	11.090.947	-	1.393.000	-
5	Kab. Aceh Tengah	12.460.575	-	1.165.000	-
6	Kab. Aceh Tenggara	14.798.632	-	2.079.700	-
7	Kab. Aceh Timur	22.413.331	406.400	2.328.075	-
8	Kab. Aceh Utara	27.838.930	-	1.475.734	-
9	Kab. Bireuen	16.132.000	-	925.700	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
I	Provinsi Aceh	-	-	4.728.768
1	Kab. Aceh Barat	1.557.000	4.457.060	-
2	Kab. Aceh Besar	3.572.000	9.445.284	-
3	Kab. Aceh Selatan	1.673.000	5.215.835	-
4	Kab. Aceh Singkil	1.404.000	3.290.136	-
5	Kab. Aceh Tengah	1.710.000	4.852.515	-
6	Kab. Aceh Tenggara	1.619.000	5.141.405	-
7	Kab. Aceh Timur	3.767.000	8.177.227	-
8	Kab. Aceh Utara	4.227.000	10.759.925	358.000
9	Kab. Bireuen	1.646.000	7.228.722	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
I	Provinsi Aceh	2.348.613	-	-	1.480.551.532
1	Kab. Aceh Barat	1.163.597	-	-	86.213.624
2	Kab. Aceh Besar	1.614.129	558.580	-	148.587.958
3	Kab. Aceh Selatan	1.216.438	-	-	135.370.199
4	Kab. Aceh Singkil	1.022.507	92.600	-	51.223.904
5	Kab. Aceh Tengah	1.106.795	621.736	-	98.576.414
6	Kab. Aceh Tenggara	976.052	75.072	-	90.548.547
7	Kab. Aceh Timur	1.678.437	-	-	141.505.712
8	Kab. Aceh Utara	1.954.802	-	-	227.013.884
9	Kab. Bireuen	1.552.196	521.736	-	154.339.925



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kab. Pidie	-	-	-
11	Kab. Simeulue	-	-	-
12	Kota Banda Aceh	-	-	-
13	Kota Sabang	-	-	-
14	Kota Langsa	-	-	-
15	Kota Lhokseumawe	-	-	-
16	Kab. Gayo Lues	-	-	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-
18	Kab. Aceh Jaya	-	-	-
19	Kab. Nagan Raya	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
10	Kab. Pidie	4.417.200	332.200	103.099.801
11	Kab. Simeulue	2.110.800	1.044.600	17.523.832
12	Kota Banda Aceh	5.415.000	291.000	58.889.435
13	Kota Sabang	796.800	360.000	14.719.264
14	Kota Langsa	2.285.400	1.443.800	38.377.726
15	Kota Lhokseumawe	2.807.400	829.400	38.592.957
16	Kab. Gayo Lues	826.200	1.028.000	16.089.171
17	Kab. Aceh Barat Daya	2.026.200	471.300	40.778.716
18	Kab. Aceh Jaya	3.109.200	649.500	20.960.855
19	Kab. Nagan Raya	1.874.400	2.102.100	40.113.282



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Kab. Pidie	2.141.350	6.735.704	-	-
11	Kab. Simeulue	1.581.000	2.853.272	-	-
12	Kota Banda Aceh	624.411	-	-	-
13	Kota Sabang	468.000	-	-	-
14	Kota Langsa	768.000	-	450.000	-
15	Kota Lhokseumawe	792.000	-	450.000	-
16	Kab. Gayo Lues	882.000	2.911.556	-	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	744.000	4.949.880	-	-
18	Kab. Aceh Jaya	1.272.000	4.761.928	-	-
19	Kab. Nagan Raya	1.404.000	9.075.726	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	Kab. Pidie	21.950.966	-	1.095.210	-
11	Kab. Simeulue	11.136.218	-	-	-
12	Kota Banda Aceh	6.905.499	-	657.558	-
13	Kota Sabang	4.068.834	-	385.695	-
14	Kota Langsa	3.606.466	-	625.298	-
15	Kota Lhokseumawe	4.101.580	-	648.000	-
16	Kab. Gayo Lues	9.871.167	-	1.979.200	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	10.255.260	-	428.175	-
18	Kab. Aceh Jaya	10.165.710	-	579.980	-
19	Kab. Nagan Raya	11.557.480	-	1.507.612	325.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
10	Kab. Pidie	3.028.000	8.917.392	-
11	Kab. Simeulue	1.259.000	2.852.675	-
12	Kota Banda Aceh	421.000	2.016.025	-
13	Kota Sabang	436.000	585.883	360.500
14	Kota Langsa	581.000	1.275.439	-
15	Kota Lhokseumawe	577.000	1.114.817	-
16	Kab. Gayo Lues	1.257.000	3.041.787	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	459.000	2.619.282	-
18	Kab. Aceh Jaya	1.263.000	2.883.792	-
19	Kab. Nagan Raya	1.301.000	3.393.477	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
10	Kab. Pidie	1.385.201	521.736	-	153.624.760
11	Kab. Simeulue	954.459	521.736	-	41.837.592
12	Kota Banda Aceh	1.011.413	521.736	-	76.753.077
13	Kota Sabang	775.553	752.170	-	23.708.699
14	Kota Langsa	880.392	-	-	50.293.521
15	Kota Lhokseumawe	911.267	-	-	50.824.421
16	Kab. Gayo Lues	819.808	-	-	38.705.889
17	Kab. Aceh Barat Daya	1.016.553	-	-	63.748.366
18	Kab. Aceh Jaya	928.419	-	-	46.574.384
19	Kab. Nagan Raya	1.021.026	75.072	-	73.750.175



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-
21	Kab. Bener Meriah	-	-	-
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	-
23	Kota Subulussalam	-	-	-
II	Provinsi Sumatera Utara	3.113.544.200	231.625.000	92.302.695
1	Kab. Asahan	-	-	-
2	Kab. Dairi	-	-	-
3	Kab. Deli Serdang	-	-	-
4	Kab. Karo	-	-	-
5	Kab. Labuhanbatu	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
20	Kab. Aceh Tamiang	3.967.200	1.425.500	61.786.803
21	Kab. Bener Meriah	2.811.600	455.100	34.617.325
22	Kab. Pidie Jaya	2.406.000	105.300	42.032.341
23	Kota Subulussalam	2.734.200	840.500	17.166.292
II	Provinsi Sumatera Utara	-	-	614.377.661
1	Kab. Asahan	6.964.800	1.896.300	124.448.155
2	Kab. Dairi	2.511.600	22.500	71.769.130
3	Kab. Deli Serdang	15.316.800	7.791.200	280.537.241
4	Kab. Karo	3.093.000	524.300	93.726.711
5	Kab. Labuhanbatu	5.566.800	2.527.000	82.175.581



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Kab. Aceh Tamiang	1.596.000	4.201.836	-	-
21	Kab. Bener Meriah	1.368.000	3.555.550	-	-
22	Kab. Pidie Jaya	972.000	1.153.500	-	-
23	Kota Subulussalam	1.077.000	4.180.923	-	-
II	Provinsi Sumatera Utara	8.628.000	6.856.112	1.800.000	-
1	Kab. Asahan	1.287.000	-	-	-
2	Kab. Dairi	1.503.000	2.553.327	-	-
3	Kab. Deli Serdang	1.277.750	7.327.199	450.000	-
4	Kab. Karo	674.700	1.822.161	-	-
5	Kab. Labuhanbatu	698.988	5.609.381	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
20	Kab. Aceh Tamiang	11.812.209	-	807.194	-
21	Kab. Bener Meriah	10.539.560	-	2.073.180	-
22	Kab. Pidie Jaya	9.138.230	-	1.434.040	-
23	Kota Subulussalam	4.657.101	-	657.000	-
II	Provinsi Sumatera Utara	5.135.250	-	-	450.000
1	Kab. Asahan	18.568.921	-	1.765.641	-
2	Kab. Dairi	14.688.916	-	2.630.264	-
3	Kab. Deli Serdang	27.760.050	-	641.491	-
4	Kab. Karo	15.373.782	550.000	1.534.840	-
5	Kab. Labuhanbatu	11.063.664	-	581.459	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
20	Kab. Aceh Tamiang	2.214.000	3.737.847	-
21	Kab. Bener Meriah	1.419.000	3.457.535	448.000
22	Kab. Pidie Jaya	1.363.000	2.994.342	358.000
23	Kota Subulussalam	600.000	1.346.473	-
II	Provinsi Sumatera Utara	-	-	3.948.740
1	Kab. Asahan	2.975.000	6.231.507	-
2	Kab. Dairi	2.098.000	3.944.407	-
3	Kab. Deli Serdang	3.918.000	6.897.110	448.000
4	Kab. Karo	3.233.000	4.929.820	388.000
5	Kab. Labuhanbatu	3.850.000	2.417.630	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
20	Kab. Aceh Tamiang	1.227.515	-	-	92.776.104
21	Kab. Bener Meriah	1.003.495	-	-	61.748.345
22	Kab. Pidie Jaya	932.946	521.736	-	63.411.435
23	Kota Subulussalam	834.346	-	-	34.093.835
II	Provinsi Sumatera Utara	2.425.738	-	-	4.081.093.396
1	Kab. Asahan	2.098.324	-	-	166.235.648
2	Kab. Dairi	1.266.875	1.013.038	-	104.001.057
3	Kab. Deli Serdang	2.763.405	-	-	355.128.246
4	Kab. Karo	1.457.979	913.038	-	128.221.331
5	Kab. Labuhanbatu	1.400.864	-	-	115.891.367



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kab. Langkat	-	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	-	-	-
8	Kab. Nias	-	-	-
9	Kab. Simalungun	-	-	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-
12	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-
13	Kab. Toba Samosir	-	-	-
14	Kota Binjai	-	-	-
15	Kota Medan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
6	Kab. Langkat	8.895.600	4.023.100	220.178.991
7	Kab. Mandailing Natal	4.646.400	3.801.600	120.128.931
8	Kab. Nias	2.407.800	1.658.100	24.191.684
9	Kab. Simalungun	8.227.800	1.335.300	221.003.698
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.357.600	341.100	76.231.453
11	Kab. Tapanuli Tengah	4.029.000	478.800	73.261.907
12	Kab. Tapanuli Utara	2.201.400	618.600	86.022.821
13	Kab. Toba Samosir	3.219.600	135.900	63.946.925
14	Kota Binjai	2.565.000	1.263.700	67.557.756
15	Kota Medan	19.185.600	11.532.300	245.258.195



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Kab. Langkat	387.200	8.578.839	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	719.030	14.521.907	-	-
8	Kab. Nias	1.281.000	14.424.612	-	-
9	Kab. Simalungun	1.467.500	4.640.924	-	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	936.000	6.984.712	-	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.518.000	5.144.590	-	-
12	Kab. Tapanuli Utara	1.638.950	3.041.566	-	-
13	Kab. Toba Samosir	1.341.000	8.022.266	-	-
14	Kota Binjai	792.000	-	-	-
15	Kota Medan	1.719.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Kab. Langkat	25.767.369	-	1.727.335	-
7	Kab. Mandailing Natal	21.222.765	520.040	3.826.830	-
8	Kab. Nias	9.497.457	-	2.148.125	-
9	Kab. Simalungun	29.113.627	1.103.110	4.107.800	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	13.179.431	-	546.585	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	17.619.455	-	3.753.100	-
12	Kab. Tapanuli Utara	15.694.931	-	2.127.400	-
13	Kab. Toba Samosir	15.433.912	-	3.065.220	-
14	Kota Binjai	5.178.000	-	532.617	-
15	Kota Medan	22.064.999	-	2.095.368	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
6	Kab. Langkat	3.042.000	6.599.595	-
7	Kab. Mandailing Natal	4.220.000	7.056.635	-
8	Kab. Nias	1.580.000	3.493.055	-
9	Kab. Simalungun	2.873.000	8.946.037	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	2.448.000	4.420.270	-
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.829.000	5.213.152	448.000
12	Kab. Tapanuli Utara	2.665.000	4.299.795	-
13	Kab. Toba Samosir	1.855.000	4.720.122	-
14	Kota Binjai	508.000	1.152.188	448.000
15	Kota Medan	2.615.000	3.966.834	448.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
6	Kab. Langkat	2.414.044	-	-	281.614.073
7	Kab. Mandailing Natal	1.697.675	75.072	-	182.436.885
8	Kab. Nias	838.359	698.225	-	62.218.417
9	Kab. Simalungun	2.603.580	913.038	-	286.335.414
10	Kab. Tapanuli Selatan	1.256.967	-	-	109.702.118
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.462.731	521.736	-	115.279.471
12	Kab. Tapanuli Utara	1.284.814	1.013.038	-	120.608.315
13	Kab. Toba Samosir	1.130.061	913.038	-	103.783.044
14	Kota Binjai	994.012	521.736	-	81.513.009
15	Kota Medan	5.610.114	-	-	314.495.410



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Kota Pematang Siantar	-	-	-
17	Kota Sibolga	-	-	-
18	Kota Tanjung Balai	-	-	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
20	Kota Padang Sidempuan	-	-	-
21	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-
22	Kab. Nias Selatan	-	-	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-
24	Kab. Serdang Bedagai	-	-	-
25	Kab. Samosir	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
16	Kota Pematang Siantar	3.162.600	1.085.100	59.576.011
17	Kota Sibolga	1.917.600	563.800	22.527.120
18	Kota Tanjung Balai	2.158.200	816.600	30.796.929
19	Kota Tebing Tinggi	2.625.000	1.231.900	39.239.648
20	Kota Padang Sidempuan	2.026.800	1.289.800	59.387.512
21	Kab. Pakpak Bharat	922.200	222.600	14.833.579
22	Kab. Nias Selatan	3.373.800	432.000	27.864.033
23	Kab. Humbang Hasundutan	4.338.000	48.600	61.508.641
24	Kab. Serdang Bedagai	6.900.000	2.693.400	126.067.624
25	Kab. Samosir	2.205.600	546.600	46.255.462



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Kota Pematang Siantar	267.563	-	-	-
17	Kota Sibolga	-	-	-	-
18	Kota Tanjung Balai	480.750	-	-	-
19	Kota Tebing Tinggi	227.463	-	450.000	-
20	Kota Padang Sidempuan	522.000	-	-	-
21	Kab. Pakpak Bharat	810.000	2.248.802	-	-
22	Kab. Nias Selatan	1.345.750	30.955.503	-	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	2.085.000	1.073.726	-	-
24	Kab. Serdang Bedagai	1.043.200	1.961.610	-	-
25	Kab. Samosir	1.419.000	8.247.825	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
16	Kota Pematang Siantar	11.361.561	-	1.841.408	-
17	Kota Sibolga	3.544.500	-	362.000	500.000
18	Kota Tanjung Balai	5.129.169	-	1.155.966	-
19	Kota Tebing Tinggi	5.796.305	-	1.224.646	-
20	Kota Padang Sidempuan	6.123.780	550.000	1.044.766	-
21	Kab. Pakpak Bharat	6.380.020	-	755.796	-
22	Kab. Nias Selatan	35.421.413	564.340	4.207.830	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	9.945.602	-	1.599.280	-
24	Kab. Serdang Bedagai	16.580.800	-	486.165	-
25	Kab. Samosir	10.026.166	-	1.140.795	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
16	Kota Pematang Siantar	542.000	1.778.377	448.000
17	Kota Sibolga	560.000	853.948	-
18	Kota Tanjung Balai	431.000	1.291.214	448.000
19	Kota Tebing Tinggi	511.000	1.116.855	-
20	Kota Padang Sidempuan	506.000	1.534.451	-
21	Kab. Pakpak Bharat	656.000	1.910.877	358.000
22	Kab. Nias Selatan	3.159.000	9.127.296	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	1.869.000	2.780.380	-
24	Kab. Serdang Bedagai	4.018.000	5.588.078	358.000
25	Kab. Samosir	1.907.000	2.650.932	360.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
16	Kota Pematang Siantar	1.065.932	-	-	81.128.552
17	Kota Sibolga	793.593	-	-	31.622.561
18	Kota Tanjung Balai	896.863	-	-	43.604.691
19	Kota Tebing Tinggi	849.975	-	-	53.272.792
20	Kota Padang Sidempuan	947.645	-	-	73.932.754
21	Kab. Pakpak Bharat	660.587	913.038	-	30.671.499
22	Kab. Nias Selatan	1.760.461	698.225	-	118.909.651
23	Kab. Humbang Hasundutan	1.018.840	1.013.038	-	87.280.107
24	Kab. Serdang Bedagai	1.830.766	-	-	167.527.643
25	Kab. Samosir	930.604	913.038	-	76.603.522



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Kab. Batu Bara	-	-	-
27	Kab. Padang Lawas	-	-	-
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-
31	Kab. Nias Utara	-	-	-
32	Kab. Nias Barat	-	-	-
33	Kota Gunungsitoli	-	-	-
III	Provinsi Sumatera Barat	1.111.055.000	45.560.000	39.736.631
1	Kab. Limapuluh Kota	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
26	Kab. Batu Bara	4.485.000	1.125.700	85.009.059
27	Kab. Padang Lawas	4.670.400	3.049.200	51.558.470
28	Kab. Padang Lawas Utara	2.631.600	659.700	50.912.159
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.286.200	723.500	47.064.690
30	Kab. Labuhanbatu Utara	3.292.800	416.400	72.284.977
31	Kab. Nias Utara	2.800.800	426.200	23.273.017
32	Kab. Nias Barat	565.200	22.500	14.822.023
33	Kota Gunungsitoli	2.524.800	1.727.100	37.897.347
III	Provinsi Sumatera Barat	-	-	470.301.730
1	Kab. Limapuluh Kota	4.882.200	1.396.600	136.634.092



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Kab. Batu Bara	799.038	218.514	-	-
27	Kab. Padang Lawas	885.000	6.154.245	-	-
28	Kab. Padang Lawas Utara	1.011.000	12.565.912	-	-
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	810.000	1.785.262	-	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	695.198	2.466.138	-	-
31	Kab. Nias Utara	1.557.000	15.856.413	-	-
32	Kab. Nias Barat	629.950	8.048.784	-	-
33	Kota Gunungsitoli	-	13.004.136	-	-
III	Provinsi Sumatera Barat	2.990.951	2.261.908	1.800.000	1.677.000
1	Kab. Limapuluh Kota	879.025	3.347.596	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
26	Kab. Batu Bara	10.920.200	-	1.301.737	-
27	Kab. Padang Lawas	13.188.385	-	971.951	-
28	Kab. Padang Lawas Utara	13.807.244	-	1.673.630	-
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	14.081.816	-	1.040.200	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	14.349.818	-	2.243.721	-
31	Kab. Nias Utara	12.067.445	-	1.263.000	-
32	Kab. Nias Barat	8.505.745	-	705.495	-
33	Kota Gunungsitoli	4.785.245	-	417.000	-
III	Provinsi Sumatera Barat	3.750.750	-	-	-
1	Kab. Limapuluh Kota	17.326.174	-	2.122.803	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
26	Kab. Batu Bara	1.531.000	2.352.065	448.000
27	Kab. Padang Lawas	2.391.000	4.399.765	-
28	Kab. Padang Lawas Utara	1.720.000	4.148.332	-
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.090.000	1.357.737	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	2.608.000	2.160.320	-
31	Kab. Nias Utara	1.470.000	3.295.408	-
32	Kab. Nias Barat	1.325.000	2.535.130	-
33	Kota Gunungsitoli	735.000	1.839.859	-
III	Provinsi Sumatera Barat	-	-	3.696.640
1	Kab. Limapuluh Kota	2.594.000	3.064.441	360.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
26	Kab. Batu Bara	1.174.508	521.736	-	109.886.557
27	Kab. Padang Lawas	916.461	-	-	88.184.877
28	Kab. Padang Lawas Utara	887.240	-	-	90.016.817
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	827.577	-	-	74.066.982
30	Kab. Labuhanbatu Utara	1.244.132	-	-	101.761.504
31	Kab. Nias Utara	1.012.944	558.580	-	63.580.807
32	Kab. Nias Barat	874.851	558.580	-	38.593.258
33	Kota Gunungsitoli	828.491	521.736	-	64.280.714
III	Provinsi Sumatera Barat	1.986.516	-	-	1.684.817.126
1	Kab. Limapuluh Kota	1.354.410	521.736	-	174.483.577



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Agam	-	-	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-
4	Kab. Padang Pariaman	-	-	-
5	Kab. Pasaman	-	-	-
6	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-
7	Kab. Sijunjung	-	-	-
8	Kab. Solok	-	-	-
9	Kab. Tanah Datar	-	-	-
10	Kota Bukit Tinggi	-	-	-
11	Kota Padang Panjang	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
2	Kab. Agam	6.336.600	2.319.200	150.344.398
3	Kab. Kepulauan Mentawai	333.600	1.812.600	15.491.389
4	Kab. Padang Pariaman	5.805.600	2.566.800	139.217.040
5	Kab. Pasaman	5.388.600	1.677.500	81.318.614
6	Kab. Pesisir Selatan	6.177.600	2.739.600	144.720.428
7	Kab. Sijunjung	8.150.400	2.023.800	63.294.469
8	Kab. Solok	6.518.400	2.188.000	117.230.235
9	Kab. Tanah Datar	5.496.000	902.800	128.104.585
10	Kota Bukit Tinggi	2.887.800	922.000	29.341.941
11	Kota Padang Panjang	1.473.000	334.800	19.335.375



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kab. Agam	1.593.000	-	450.000	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	5.632.918	-	-
4	Kab. Padang Pariaman	2.091.000	-	-	-
5	Kab. Pasaman	1.476.000	2.122.546	450.000	-
6	Kab. Pesisir Selatan	1.827.000	3.851.752	-	-
7	Kab. Sijunjung	1.326.000	2.994.167	-	-
8	Kab. Solok	1.575.000	5.341.102	-	-
9	Kab. Tanah Datar	1.113.000	-	450.000	-
10	Kota Bukit Tinggi	411.000	-	900.000	-
11	Kota Padang Panjang	88.268	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Kab. Agam	18.732.000	-	1.113.605	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	12.543.600	-	517.428	-
4	Kab. Padang Pariaman	20.679.760	-	2.148.800	-
5	Kab. Pasaman	13.926.409	-	1.000.000	-
6	Kab. Pesisir Selatan	14.970.171	-	1.515.058	-
7	Kab. Sijunjung	10.882.738	-	906.640	350.000
8	Kab. Solok	15.314.773	550.000	2.191.000	471.434
9	Kab. Tanah Datar	19.294.000	-	1.570.170	-
10	Kota Bukit Tinggi	4.369.500	-	622.500	350.000
11	Kota Padang Panjang	2.855.301	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
2	Kab. Agam	3.117.000	3.697.917	358.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.309.000	2.513.653	-
4	Kab. Padang Pariaman	1.549.000	3.787.797	358.000
5	Kab. Pasaman	2.187.000	2.773.350	-
6	Kab. Pesisir Selatan	1.870.000	4.146.020	-
7	Kab. Sijunjung	1.872.000	1.976.900	-
8	Kab. Solok	2.968.000	3.509.205	358.000
9	Kab. Tanah Datar	2.204.000	3.265.070	-
10	Kota Bukit Tinggi	511.000	689.711	360.500
11	Kota Padang Panjang	357.000	457.324	388.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	Kab. Agam	1.622.968	752.170	-	190.436.858
3	Kab. Kepulauan Mentawai	832.825	798.225	-	41.785.238
4	Kab. Padang Pariaman	1.556.726	521.736	-	180.282.259
5	Kab. Pasaman	1.192.832	-	-	113.512.851
6	Kab. Pesisir Selatan	1.488.701	752.170	-	184.058.500
7	Kab. Sijunjung	1.049.138	652.170	-	95.478.422
8	Kab. Solok	1.381.794	752.170	-	160.349.113
9	Kab. Tanah Datar	1.085.173	752.170	-	164.236.968
10	Kota Bukit Tinggi	809.090	652.170	-	42.827.212
11	Kota Padang Panjang	774.371	521.736	-	26.585.175



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kota Padang	-	-	-
13	Kota Payakumbuh	-	-	-
14	Kota Sawahlunto	-	-	-
15	Kota Solok	-	-	-
16	Kota Pariaman	-	-	-
17	Kab. Pasaman Barat	-	-	-
18	Kab. Dharmasraya	-	-	-
19	Kab. Solok Selatan	-	-	-
IV	Provinsi Riau	1.291.011.400	106.245.000	40.283.451
1	Kab. Bengkalis	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
12	Kota Padang	10.538.400	6.365.700	177.277.719
13	Kota Payakumbuh	3.472.200	562.500	38.778.058
14	Kota Sawahlunto	1.494.600	542.800	24.507.611
15	Kota Solok	1.529.400	135.700	24.770.519
16	Kota Pariaman	2.005.800	582.200	33.977.249
17	Kab. Pasaman Barat	5.718.000	2.375.200	86.076.449
18	Kab. Dharmasraya	4.422.600	1.242.100	56.915.777
19	Kab. Solok Selatan	2.603.400	1.953.900	54.590.792
IV	Provinsi Riau	-	-	254.254.817
1	Kab. Bengkalis	7.713.000	1.610.700	108.974.432



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kota Padang	1.698.000	-	-	-
13	Kota Payakumbuh	528.000	-	-	-
14	Kota Sawahlunto	367.550	303.342	900.000	-
15	Kota Solok	-	-	-	-
16	Kota Pariaman	404.588	-	-	-
17	Kab. Pasaman Barat	1.485.000	1.267.658	-	-
18	Kab. Dharmasraya	1.074.000	4.507.358	-	-
19	Kab. Solok Selatan	1.356.000	6.162.879	-	-
IV	Provinsi Riau	3.678.000	4.185.740	1.450.000	1.677.000
1	Kab. Bengkalis	1.610.000	13.301.060	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
12	Kota Padang	13.911.613	550.000	1.624.450	-
13	Kota Payakumbuh	5.235.653	-	564.410	-
14	Kota Sawahlunto	3.911.458	-	624.080	-
15	Kota Solok	2.910.329	-	474.800	400.000
16	Kota Pariaman	4.412.823	-	579.100	-
17	Kab. Pasaman Barat	18.985.954	-	1.075.314	-
18	Kab. Dharmasraya	11.048.971	-	1.315.780	400.000
19	Kab. Solok Selatan	9.412.233	-	622.500	-
IV	Provinsi Riau	3.059.250	-	-	-
1	Kab. Bengkalis	9.151.754	-	1.457.530	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
12	Kota Padang	334.000	2.607.451	448.000
13	Kota Payakumbuh	415.000	1.281.008	360.500
14	Kota Sawahlunto	484.000	937.108	388.000
15	Kota Solok	405.000	444.882	360.500
16	Kota Pariaman	367.000	1.124.494	360.500
17	Kab. Pasaman Barat	3.393.000	2.792.304	-
18	Kab. Dharmasraya	1.916.000	2.529.320	358.000
19	Kab. Solok Selatan	1.386.000	1.838.339	444.800
IV	Provinsi Riau	-	-	2.989.500
1	Kab. Bengkalis	4.366.000	2.731.960	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Kota Padang	1.913.313	521.736	-	217.790.382
13	Kota Payakumbuh	848.457	521.736	-	52.567.522
14	Kota Sawahlunto	838.915	652.170	-	35.951.634
15	Kota Solok	813.720	752.170	-	32.997.020
16	Kota Pariaman	842.219	621.736	-	45.277.709
17	Kab. Pasaman Barat	1.382.415	-	-	124.551.294
18	Kab. Dharmasraya	1.070.040	-	-	86.799.946
19	Kab. Solok Selatan	986.608	698.225	-	82.055.676
IV	Provinsi Riau	1.596.749	-	-	1.710.430.907
1	Kab. Bengkalis	816.036	752.170	-	152.484.642



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-
3	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-
4	Kab. Kampar	-	-	-
5	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-
6	Kab. Pelalawan	-	-	-
7	Kab. Rokan Hilir	-	-	-
8	Kab. Rokan Hulu	-	-	-
9	Kab. Siak	-	-	-
10	Kota Dumai	-	-	-
11	Kota Pekanbaru	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
2	Kab. Indragiri Hilir	4.428.000	1.912.600	106.504.471
3	Kab. Indragiri Hulu	5.452.200	2.546.100	87.327.611
4	Kab. Kampar	11.161.800	3.170.400	171.755.574
5	Kab. Kuantan Singingi	5.169.000	1.788.200	95.520.037
6	Kab. Pelalawan	4.168.200	1.517.400	61.903.712
7	Kab. Rokan Hilir	7.245.600	2.123.400	83.025.470
8	Kab. Rokan Hulu	7.431.000	2.495.400	88.035.589
9	Kab. Siak	8.302.200	1.063.100	80.137.575
10	Kota Dumai	3.252.000	465.900	52.410.671
11	Kota Pekanbaru	9.508.800	5.812.900	141.006.871



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kab. Indragiri Hilir	2.811.000	12.172.343	-	-
3	Kab. Indragiri Hulu	1.728.000	-	-	-
4	Kab. Kampar	1.070.600	11.980.252	-	-
5	Kab. Kuantan Singingi	1.389.000	25.123.336	-	-
6	Kab. Pelalawan	1.365.000	7.378.623	-	-
7	Kab. Rokan Hilir	2.187.568	12.813.934	450.000	-
8	Kab. Rokan Hulu	1.576.650	3.225.981	-	-
9	Kab. Siak	1.731.000	10.384.432	450.000	-
10	Kota Dumai	426.950	-	-	-
11	Kota Pekanbaru	2.004.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Kab. Indragiri Hilir	22.991.000	-	1.500.000	-
3	Kab. Indragiri Hulu	14.890.716	-	1.593.572	-
4	Kab. Kampar	27.903.120	-	1.930.500	300.000
5	Kab. Kuantan Singingi	19.441.320	-	1.440.520	-
6	Kab. Pelalawan	12.246.052	-	1.385.812	-
7	Kab. Rokan Hilir	14.954.086	564.000	1.767.830	-
8	Kab. Rokan Hulu	19.434.000	-	2.565.560	-
9	Kab. Siak	12.663.034	550.000	-	315.000
10	Kota Dumai	6.179.743	-	1.086.500	393.235
11	Kota Pekanbaru	12.038.000	-	1.302.660	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
2	Kab. Indragiri Hilir	4.888.000	5.799.597	-
3	Kab. Indragiri Hulu	3.489.000	3.523.047	448.000
4	Kab. Kampar	5.524.000	6.066.232	358.000
5	Kab. Kuantan Singingi	2.304.000	3.583.372	360.500
6	Kab. Pelalawan	3.731.000	3.260.343	360.500
7	Kab. Rokan Hilir	4.640.000	3.724.114	448.000
8	Kab. Rokan Hulu	5.035.000	3.511.410	358.000
9	Kab. Siak	3.739.000	2.909.822	448.000
10	Kota Dumai	452.000	1.688.223	358.000
11	Kota Pekanbaru	2.005.000	2.145.642	448.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	Kab. Indragiri Hilir	1.867.302	658.580	-	165.532.893
3	Kab. Indragiri Hulu	1.410.695	521.736	-	122.930.677
4	Kab. Kampar	2.000.822	521.736	-	243.743.036
5	Kab. Kuantan Singingi	1.056.656	521.736	-	157.697.677
6	Kab. Pelalawan	1.341.687	558.580	-	99.216.909
7	Kab. Rokan Hilir	1.783.771	-	-	135.727.773
8	Kab. Rokan Hulu	1.669.986	-	-	135.338.576
9	Kab. Siak	1.138.370	521.736	-	124.353.269
10	Kota Dumai	1.012.132	698.225	-	68.423.579
11	Kota Pekanbaru	1.897.967	521.736	-	178.691.576



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-
V	Provinsi Jambi	643.363.400	68.265.000	24.539.548
1	Kab. Batang Hari	-	-	-
2	Kab. Bungo	-	-	-
3	Kab. Kerinci	-	-	-
4	Kab. Merangin	-	-	-
5	Kab. Muaro Jambi	-	-	-
6	Kab. Sarolangun	-	-	-
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
12	Kab. Kepulauan Meranti	3.559.800	1.096.300	34.427.016
V	Provinsi Jambi	-	-	158.666.505
1	Kab. Batang Hari	5.964.000	2.090.400	65.086.042
2	Kab. Bungo	4.926.000	1.656.400	66.125.589
3	Kab. Kerinci	3.494.400	3.614.400	73.844.805
4	Kab. Merangin	5.529.600	3.132.000	80.822.746
5	Kab. Muaro Jambi	4.917.000	1.392.600	90.562.372
6	Kab. Sarolangun	7.936.200	490.200	55.513.904
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	6.185.400	1.345.500	59.231.568
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	4.007.400	90.000	62.978.003



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kab. Kepulauan Meranti	1.380.000	15.531.596	-	-
V	Provinsi Jambi	3.852.000	-	3.950.000	1.677.000
1	Kab. Batang Hari	1.635.000	4.198.020	-	-
2	Kab. Bungo	1.578.000	1.629.283	-	-
3	Kab. Kerinci	1.245.000	2.151.890	-	-
4	Kab. Merangin	-	9.626.924	-	-
5	Kab. Muaro Jambi	1.180.433	-	-	-
6	Kab. Sarolangun	1.200.000	3.920.128	-	-
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	3.089.170	-	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.173.000	1.870.689	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
12	Kab. Kepulauan Meranti	8.076.052	-	504.790	-
V	Provinsi Jambi	2.929.500	-	-	300.000
1	Kab. Batang Hari	14.652.092	-	1.490.725	-
2	Kab. Bungo	16.059.686	-	1.721.320	-
3	Kab. Kerinci	16.397.196	402.120	1.000.000	375.000
4	Kab. Merangin	21.438.202	-	1.845.920	375.000
5	Kab. Muaro Jambi	14.691.681	228.840	1.411.100	375.000
6	Kab. Sarolangun	13.655.310	-	876.600	-
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	13.248.003	-	859.301	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	15.096.845	-	1.082.399	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
12	Kab. Kepulauan Meranti	1.291.000	2.529.796	-
V	Provinsi Jambi	-	-	1.927.390
1	Kab. Batang Hari	2.236.000	2.391.912	-
2	Kab. Bungo	2.829.000	4.348.737	-
3	Kab. Kerinci	1.328.000	5.201.505	-
4	Kab. Merangin	2.856.000	6.110.480	-
5	Kab. Muaro Jambi	2.723.000	3.184.122	-
6	Kab. Sarolangun	2.059.000	3.006.792	-
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.171.000	3.397.790	379.000
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.443.000	2.966.872	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Kab. Kepulauan Meranti	1.188.563	558.580	-	70.143.493
V	Provinsi Jambi	1.586.401	-	-	911.056.744
1	Kab. Batang Hari	1.135.570	-	-	100.879.761
2	Kab. Bungo	1.251.533	-	-	102.125.548
3	Kab. Kerinci	1.199.210	652.170	-	110.905.696
4	Kab. Merangin	1.510.092	752.170	-	133.999.134
5	Kab. Muaro Jambi	1.266.543	521.736	-	122.454.427
6	Kab. Sarolangun	1.115.764	521.736	-	90.295.634
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	936.590	-	-	90.843.322
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.073.036	521.736	-	92.302.980



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Tebo	-	-	-
10	Kota Jambi	-	-	-
11	Kota Sungai Penuh	-	-	-
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.601.373.400	132.265.000	46.473.867
1	Kab. Lahat	-	-	-
2	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-
3	Kab. Musi Rawas	-	-	-
4	Kab. Muara Enim	-	-	-
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
9	Kab. Tebo	4.266.000	913.500	61.559.797
10	Kota Jambi	6.843.600	1.218.500	102.571.106
11	Kota Sungai Penuh	2.521.200	545.700	36.979.867
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	288.194.353
1	Kab. Lahat	6.232.800	2.129.200	97.228.868
2	Kab. Musi Banyuasin	9.754.800	2.375.100	111.695.302
3	Kab. Musi Rawas	4.237.200	1.583.900	79.449.205
4	Kab. Muara Enim	7.148.400	7.129.500	115.007.392
5	Kab. Ogan Komering Ilir	8.458.800	699.400	140.895.827
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3.729.000	2.048.600	75.575.970



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Kab. Tebo	1.545.000	5.687.190	-	-
10	Kota Jambi	-	-	-	-
11	Kota Sungai Penuh	581.900	-	-	-
VI	Provinsi Sumatera Selatan	5.790.000	-	5.400.000	1.677.000
1	Kab. Lahat	1.552.650	4.785.390	-	-
2	Kab. Musi Banyuasin	2.130.000	3.760.052	-	-
3	Kab. Musi Rawas	1.210.739	1.894.803	-	-
4	Kab. Muara Enim	1.914.250	4.626.000	-	-
5	Kab. Ogan Komering Ilir	2.685.000	11.363.334	-	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	1.638.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
9	Kab. Tebo	14.501.000	-	997.390	-
10	Kota Jambi	11.802.050	-	1.641.050	-
11	Kota Sungai Penuh	6.055.512	-	1.275.715	483.600
VI	Provinsi Sumatera Selatan	3.523.500	-	-	-
1	Kab. Lahat	24.450.140	-	2.797.312	365.000
2	Kab. Musi Banyuasin	23.627.146	1.080.000	1.648.040	-
3	Kab. Musi Rawas	17.405.487	540.000	2.514.078	375.000
4	Kab. Muara Enim	16.105.506	-	708.300	375.000
5	Kab. Ogan Komering Ilir	28.069.960	-	2.427.475	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	13.914.880	-	3.715.132	375.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
9	Kab. Tebo	2.277.000	3.107.240	-
10	Kota Jambi	506.000	2.393.933	-
11	Kota Sungai Penuh	357.000	1.847.236	-
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	3.392.300
1	Kab. Lahat	2.987.000	6.238.467	-
2	Kab. Musi Banyuasin	4.589.000	3.961.777	-
3	Kab. Musi Rawas	2.962.000	4.679.729	-
4	Kab. Muara Enim	4.032.000	5.089.115	-
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.338.000	5.838.022	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	2.090.000	2.773.342	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
9	Kab. Tebo	990.945	521.736	-	96.366.798
10	Kota Jambi	1.460.814	-	-	128.437.053
11	Kota Sungai Penuh	838.963	652.170	-	52.138.863
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.900.263	100.000	-	2.090.089.683
1	Kab. Lahat	1.406.614	652.170	-	150.825.611
2	Kab. Musi Banyuasin	1.613.006	-	-	166.234.223
3	Kab. Musi Rawas	1.456.165	-	-	118.308.306
4	Kab. Muara Enim	1.740.809	-	-	163.876.272
5	Kab. Ogan Komering Ilir	1.913.898	-	-	205.689.716
6	Kab. Ogan Komering Ulu	1.220.422	-	-	107.080.346



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kota Palembang	-	-	-
8	Kota Prabumulih	-	-	-
9	Kota Pagar Alam	-	-	-
10	Kota Lubuk Linggau	-	-	-
11	Kab. Banyuasin	-	-	-
12	Kab. Ogan Ilir	-	-	-
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-
15	Kab. Empat Lawang	-	-	-
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
7	Kota Palembang	16.280.400	3.092.800	262.743.784
8	Kota Prabumulih	2.679.000	558.700	44.073.244
9	Kota Pagar Alam	1.705.200	856.800	30.576.799
10	Kota Lubuk Linggau	1.875.600	594.700	46.663.429
11	Kab. Banyuasin	9.326.400	3.085.600	144.552.209
12	Kab. Ogan Ilir	7.816.800	2.512.600	102.088.053
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	9.969.000	1.484.700	125.589.254
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.532.800	198.300	48.461.359
15	Kab. Empat Lawang	1.672.200	648.300	33.846.576
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.833.000	12.047.600	19.049.880



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kota Palembang	1.779.000	-	900.000	-
8	Kota Prabumulih	678.000	-	-	-
9	Kota Pagar Alam	813.000	-	-	-
10	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-
11	Kab. Banyuasin	2.286.000	8.464.978	-	-
12	Kab. Ogan Ilir	2.085.000	2.605.268	-	-
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.893.200	3.573.417	-	-
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2.541.000	6.058.275	-	-
15	Kab. Empat Lawang	1.282.708	3.050.900	-	-
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	516.000	1.145.424	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Kota Palembang	23.868.000	-	1.207.700	-
8	Kota Prabumulih	5.811.741	-	552.450	-
9	Kota Pagar Alam	4.400.198	-	567.210	375.000
10	Kota Lubuk Linggau	5.735.982	-	-	350.000
11	Kab. Banyuasin	24.601.057	-	4.210.150	-
12	Kab. Ogan Ilir	19.920.854	-	1.664.473	-
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	18.466.600	540.000	2.248.206	365.000
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	15.627.088	-	1.354.500	-
15	Kab. Empat Lawang	6.717.365	-	749.400	-
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6.027.970	-	614.185	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
7	Kota Palembang	2.547.000	3.255.083	-
8	Kota Prabumulih	602.000	1.330.653	-
9	Kota Pagar Alam	374.000	1.113.110	-
10	Kota Lubuk Linggau	633.000	1.861.493	-
11	Kab. Banyuasin	3.429.000	5.803.887	-
12	Kab. Ogan Ilir	790.000	4.664.060	-
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.902.000	5.931.515	-
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2.792.000	5.218.307	-
15	Kab. Empat Lawang	2.088.000	2.966.795	-
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	495.000	1.448.870	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
7	Kota Palembang	3.679.958	652.170	-	320.005.895
8	Kota Prabumulih	924.225	-	-	57.210.013
9	Kota Pagar Alam	833.380	652.170	-	42.266.867
10	Kota Lubuk Linggau	934.685	-	-	58.648.889
11	Kab. Banyuasin	2.043.936	752.170	-	208.555.387
12	Kab. Ogan Ilir	1.480.862	652.170	-	146.280.140
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.830.344	-	-	174.793.236
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.512.023	-	-	87.295.652
15	Kab. Empat Lawang	1.140.085	652.170	-	54.814.499
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	873.603	-	-	44.051.532



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-
VII	Provinsi Bengkulu	385.396.800	37.365.000	15.619.586
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-
2	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-
3	Kab. Rejang Lebong	-	-	-
4	Kota Bengkulu	-	-	-
5	Kab. Kaur	-	-	-
6	Kab. Seluma	-	-	-
7	Kab. Mukomuko	-	-	-
8	Kab. Lebong	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
17	Kab. Musi Rawas Utara	1.850.400	22.500	19.666.953
VII	Provinsi Bengkulu	-	-	121.680.861
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.860.400	1.896.400	63.546.100
2	Kab. Bengkulu Utara	3.966.600	2.682.300	74.601.532
3	Kab. Rejang Lebong	1.906.800	755.100	74.199.624
4	Kota Bengkulu	7.059.600	5.458.000	85.888.494
5	Kab. Kaur	1.705.800	1.157.600	32.832.972
6	Kab. Seluma	2.406.600	2.236.700	57.238.081
7	Kab. Mukomuko	3.281.400	1.224.000	42.641.431
8	Kab. Lebong	2.494.200	946.500	28.042.298



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Kab. Musi Rawas Utara	639.000	3.760.734	-	-
VII	Provinsi Bengkulu	3.141.000	1.253.339	2.500.000	1.677.000
1	Kab. Bengkulu Selatan	1.095.000	2.233.743	-	-
2	Kab. Bengkulu Utara	1.071.000	4.031.061	-	-
3	Kab. Rejang Lebong	906.000	3.502.032	-	-
4	Kota Bengkulu	963.000	-	-	-
5	Kab. Kaur	667.753	2.645.632	-	-
6	Kab. Seluma	-	6.835.415	-	-
7	Kab. Mukomuko	990.000	2.162.999	-	-
8	Kab. Lebong	886.750	3.013.394	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
17	Kab. Musi Rawas Utara	7.650.209	-	750.250	-
VII	Provinsi Bengkulu	2.830.500	-	-	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	11.143.164	-	582.640	-
2	Kab. Bengkulu Utara	23.726.604	540.000	2.593.400	-
3	Kab. Rejang Lebong	16.867.482	-	1.473.455	350.000
4	Kota Bengkulu	11.986.707	240.000	885.922	-
5	Kab. Kaur	13.779.127	-	1.260.504	-
6	Kab. Seluma	19.114.400	-	1.766.292	-
7	Kab. Mukomuko	13.972.000	240.000	2.005.470	-
8	Kab. Lebong	11.222.092	-	1.566.500	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
17	Kab. Musi Rawas Utara	1.446.000	2.106.009	-
VII	Provinsi Bengkulu	-	-	2.452.100
1	Kab. Bengkulu Selatan	1.471.000	3.182.600	379.000
2	Kab. Bengkulu Utara	2.207.000	5.342.032	-
3	Kab. Rejang Lebong	566.000	3.953.517	379.000
4	Kota Bengkulu	643.000	2.038.773	469.000
5	Kab. Kaur	1.315.000	4.400.617	-
6	Kab. Seluma	1.436.000	4.577.892	-
7	Kab. Mukomuko	1.445.000	3.924.665	-
8	Kab. Lebong	979.000	3.030.980	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
17	Kab. Musi Rawas Utara	964.005	558.580	-	39.414.640
VII	Provinsi Bengkulu	1.621.408	-	-	575.537.594
1	Kab. Bengkulu Selatan	956.562	-	-	90.346.609
2	Kab. Bengkulu Utara	1.031.676	652.170	-	122.445.375
3	Kab. Rejang Lebong	1.195.158	652.170	-	106.706.338
4	Kota Bengkulu	1.152.916	521.736	-	117.307.148
5	Kab. Kaur	1.037.945	521.736	-	61.324.686
6	Kab. Seluma	1.167.202	558.580	-	97.337.162
7	Kab. Mukomuko	1.058.480	-	-	72.945.445
8	Kab. Lebong	990.063	652.170	-	53.823.947



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Kepahiang	-	-	-
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-
VIII	Provinsi Lampung	1.462.180.800	105.355.000	49.875.813
1	Kab. Lampung Barat	-	-	-
2	Kab. Lampung Selatan	-	-	-
3	Kab. Lampung Tengah	-	-	-
4	Kab. Lampung Utara	-	-	-
5	Kab. Lampung Timur	-	-	-
6	Kab. Tanggamus	-	-	-
7	Kab. Tulang Bawang	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
9	Kab. Kepahiang	2.268.600	2.701.300	36.435.753
10	Kab. Bengkulu Tengah	1.783.800	544.000	40.751.123
VIII	Provinsi Lampung	-	-	289.795.394
1	Kab. Lampung Barat	2.844.000	1.598.000	62.833.223
2	Kab. Lampung Selatan	12.528.000	6.078.200	156.491.742
3	Kab. Lampung Tengah	18.688.800	4.253.600	241.526.911
4	Kab. Lampung Utara	7.351.200	1.062.000	136.710.571
5	Kab. Lampung Timur	19.768.800	4.280.000	198.698.407
6	Kab. Tanggamus	9.453.600	3.067.000	127.954.336
7	Kab. Tulang Bawang	6.273.000	3.582.300	55.886.724



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Kab. Kepahiang	843.000	177.531	-	-
10	Kab. Bengkulu Tengah	747.945	7.070.762	-	-
VIII	Provinsi Lampung	3.825.000	1.677.629	3.950.000	1.677.000
1	Kab. Lampung Barat	1.017.000	6.964.259	-	-
2	Kab. Lampung Selatan	2.268.000	678.207	-	-
3	Kab. Lampung Tengah	2.871.000	1.839.863	-	-
4	Kab. Lampung Utara	2.260.500	3.687.443	-	-
5	Kab. Lampung Timur	1.977.000	872.000	-	-
6	Kab. Tanggamus	1.584.000	10.441.972	-	-
7	Kab. Tulang Bawang	1.272.000	2.293.401	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
9	Kab. Kepahiang	11.138.100	-	-	350.000
10	Kab. Bengkulu Tengah	16.225.256	-	2.017.480	-
VIII	Provinsi Lampung	3.324.000	-	-	-
1	Kab. Lampung Barat	15.223.185	-	1.460.400	-
2	Kab. Lampung Selatan	22.739.411	530.000	1.432.623	300.000
3	Kab. Lampung Tengah	31.948.552	-	930.370	-
4	Kab. Lampung Utara	22.404.847	530.000	971.440	-
5	Kab. Lampung Timur	30.545.776	-	1.005.900	315.000
6	Kab. Tanggamus	19.169.564	-	902.700	-
7	Kab. Tulang Bawang	15.938.552	-	905.300	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
9	Kab. Kepahiang	844.000	2.336.982	-
10	Kab. Bengkulu Tengah	1.311.000	2.899.655	-
VIII	Provinsi Lampung	-	-	2.921.420
1	Kab. Lampung Barat	2.025.000	4.322.916	-
2	Kab. Lampung Selatan	1.473.000	5.220.862	-
3	Kab. Lampung Tengah	4.558.000	6.335.855	-
4	Kab. Lampung Utara	2.945.000	6.219.365	-
5	Kab. Lampung Timur	2.391.000	5.931.635	-
6	Kab. Tanggamus	2.532.000	6.059.767	-
7	Kab. Tulang Bawang	2.368.000	3.900.215	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
9	Kab. Kepahiang	987.339	621.736	-	58.704.341
10	Kab. Bengkulu Tengah	911.363	521.736	-	74.784.120
VIII	Provinsi Lampung	1.777.511	100.000	-	1.926.459.567
1	Kab. Lampung Barat	1.225.695	658.580	-	100.172.258
2	Kab. Lampung Selatan	3.281.965	752.170	-	213.774.180
3	Kab. Lampung Tengah	3.902.659	-	-	316.855.610
4	Kab. Lampung Utara	2.155.547	-	-	186.297.913
5	Kab. Lampung Timur	3.195.697	652.170	-	269.633.385
6	Kab. Tanggamus	1.829.214	621.736	-	183.615.889
7	Kab. Tulang Bawang	1.441.209	-	-	93.860.701



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kab. Way Kanan	-	-	-
9	Kota Bandar Lampung	-	-	-
10	Kota Metro	-	-	-
11	Kab. Pesawaran	-	-	-
12	Kab. Pringsewu	-	-	-
13	Kab. Mesuji	-	-	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-
15	Kab. Pesisir Barat	-	-	-
IX	Provinsi DKI Jakarta	1.649.322.200	0	39.920.112
X	Provinsi Jawa Barat	8.256.210.000	193.505.000	205.033.978



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
8	Kab. Way Kanan	7.227.600	2.804.000	86.586.242
9	Kota Bandar Lampung	16.932.000	5.012.400	164.654.765
10	Kota Metro	4.380.000	1.856.100	45.039.724
11	Kab. Pesawaran	6.553.800	1.714.300	99.983.286
12	Kab. Pringsewu	6.426.600	2.276.400	112.937.281
13	Kab. Mesuji	3.870.000	1.455.900	28.932.601
14	Kab. Tulang Bawang Barat	4.743.000	1.489.700	54.940.122
15	Kab. Pesisir Barat	1.281.600	203.400	33.503.581
IX	Provinsi DKI Jakarta	97.448.400	38.543.700	1.297.973.658
X	Provinsi Jawa Barat	-	-	1.082.709.954



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kab. Way Kanan	2.154.000	1.406.326	-	-
9	Kota Bandar Lampung	1.518.000	-	-	-
10	Kota Metro	471.000	-	-	-
11	Kab. Pesawaran	1.290.000	2.398.760	-	-
12	Kab. Pringsewu	969.000	224.896	-	-
13	Kab. Mesuji	1.086.000	1.668.008	-	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	942.000	442.043	-	-
15	Kab. Pesisir Barat	711.000	2.600.598	-	-
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-
X	Provinsi Jawa Barat	-	-	3.950.000	1.677.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	Kab. Way Kanan	17.002.000	-	1.103.700	-
9	Kota Bandar Lampung	18.086.500	-	1.398.875	-
10	Kota Metro	7.449.541	-	482.611	-
11	Kab. Pesawaran	9.949.434	-	519.661	-
12	Kab. Pringsewu	10.823.292	530.000	832.650	-
13	Kab. Mesuji	10.575.004	530.000	859.720	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	8.528.812	-	588.900	-
15	Kab. Pesisir Barat	8.496.186	-	931.600	-
IX	Provinsi DKI Jakarta	20.075.000	-	-	-
X	Provinsi Jawa Barat	3.623.250	-	-	400.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
8	Kab. Way Kanan	3.138.000	4.178.435	-
9	Kota Bandar Lampung	1.804.000	3.503.719	-
10	Kota Metro	376.000	1.058.843	404.000
11	Kab. Pesawaran	1.450.000	3.085.857	-
12	Kab. Pringsewu	952.000	2.631.335	-
13	Kab. Mesuji	1.388.000	2.060.405	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	786.000	2.279.155	-
15	Kab. Pesisir Barat	1.527.000	2.919.228	-
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	2.809.750
X	Provinsi Jawa Barat	-	-	5.460.010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	Kab. Way Kanan	1.487.032	621.736	-	127.709.071
9	Kota Bandar Lampung	3.085.147	521.736	-	216.517.142
10	Kota Metro	852.052	-	-	62.369.871
11	Kab. Pesawaran	1.474.079	521.736	-	128.940.913
12	Kab. Pringsewu	1.291.380	521.736	-	140.416.570
13	Kab. Mesuji	1.111.771	-	-	53.537.409
14	Kab. Tulang Bawang Barat	1.043.940	-	-	75.783.672
15	Kab. Pesisir Barat	1.007.530	658.580	-	53.840.303
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	913.038	-	3.147.005.858
X	Provinsi Jawa Barat	4.142.684	-	-	9.756.711.876



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bandung	-	-	-
2	Kab. Bekasi	-	-	-
3	Kab. Bogor	-	-	-
4	Kab. Ciamis	-	-	-
5	Kab. Cianjur	-	-	-
6	Kab. Cirebon	-	-	-
7	Kab. Garut	-	-	-
8	Kab. Indramayu	-	-	-
9	Kab. Karawang	-	-	-
10	Kab. Kuningan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bandung	33.124.800	14.576.200	482.248.443
2	Kab. Bekasi	26.973.000	6.210.400	255.634.254
3	Kab. Bogor	47.692.200	47.958.200	393.058.569
4	Kab. Ciamis	15.007.800	4.258.400	285.427.085
5	Kab. Cianjur	24.050.400	13.584.700	341.851.501
6	Kab. Cirebon	19.075.800	13.023.800	341.730.362
7	Kab. Garut	41.536.200	11.743.100	423.368.948
8	Kab. Indramayu	20.043.000	7.790.100	247.132.086
9	Kab. Karawang	26.706.000	14.345.800	293.953.224
10	Kab. Kuningan	17.710.800	7.987.200	270.619.900



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Bandung	-	3.716.386	-	-
2	Kab. Bekasi	730.500	-	-	-
3	Kab. Bogor	943.984	1.072.545	-	-
4	Kab. Ciamis	-	-	-	-
5	Kab. Cianjur	1.713.000	-	-	-
6	Kab. Cirebon	1.662.000	707.913	450.000	-
7	Kab. Garut	1.495.705	947.298	-	-
8	Kab. Indramayu	-	-	-	-
9	Kab. Karawang	-	-	-	-
10	Kab. Kuningan	1.281.000	1.361.319	450.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kab. Bandung	45.074.206	-	2.749.050	-
2	Kab. Bekasi	30.286.000	500.000	-	-
3	Kab. Bogor	68.045.000	-	6.613.300	256.000
4	Kab. Ciamis	27.195.700	-	2.996.168	349.067
5	Kab. Cianjur	34.726.000	500.000	-	290.000
6	Kab. Cirebon	46.796.660	-	4.089.990	322.465
7	Kab. Garut	50.203.224	-	4.230.178	315.000
8	Kab. Indramayu	36.874.320	-	6.000.000	-
9	Kab. Karawang	39.391.028	-	3.235.316	-
10	Kab. Kuningan	28.194.595	-	4.000.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
1	Kab. Bandung	13.753.000	8.397.772	-
2	Kab. Bekasi	5.573.000	4.751.782	-
3	Kab. Bogor	12.274.000	9.099.182	-
4	Kab. Ciamis	1.860.000	6.975.452	380.000
5	Kab. Cianjur	12.362.000	8.868.600	-
6	Kab. Cirebon	2.455.000	8.728.915	-
7	Kab. Garut	10.912.000	11.463.285	467.500
8	Kab. Indramayu	1.649.000	8.405.092	-
9	Kab. Karawang	2.589.000	8.162.932	-
10	Kab. Kuningan	1.868.000	7.947.377	470.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Kab. Bandung	4.596.972	-	-	608.236.829
2	Kab. Bekasi	6.488.177	-	-	337.147.113
3	Kab. Bogor	7.918.310	-	-	594.931.290
4	Kab. Ciamis	2.834.417	621.736	-	347.905.825
5	Kab. Cianjur	5.681.312	752.170	-	444.379.683
6	Kab. Cirebon	5.629.435	-	-	444.672.340
7	Kab. Garut	5.863.360	521.736	-	563.067.534
8	Kab. Indramayu	4.951.828	-	-	332.845.426
9	Kab. Karawang	5.001.877	-	-	393.385.177
10	Kab. Kuningan	2.756.945	-	-	344.647.136



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kab. Majalengka	-	-	-
12	Kab. Purwakarta	-	-	-
13	Kab. Subang	-	-	-
14	Kab. Sukabumi	-	-	-
15	Kab. Sumedang	-	-	-
16	Kab. Tasikmalaya	-	-	-
17	Kota Bandung	-	-	-
18	Kota Bekasi	-	-	-
19	Kota Bogor	-	-	-
20	Kota Cirebon	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
11	Kab. Majalengka	15.920.400	9.495.800	262.235.119
12	Kab. Purwakarta	8.487.000	2.472.900	167.041.694
13	Kab. Subang	22.088.400	7.432.300	268.591.343
14	Kab. Sukabumi	43.695.000	14.723.900	295.357.415
15	Kab. Sumedang	15.402.000	5.351.900	278.719.971
16	Kab. Tasikmalaya	24.474.000	6.410.200	359.406.467
17	Kota Bandung	26.621.400	20.224.400	337.726.249
18	Kota Bekasi	27.060.000	7.873.200	214.377.262
19	Kota Bogor	9.715.200	10.423.600	128.635.135
20	Kota Cirebon	5.177.400	3.405.000	69.960.486



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Kab. Majalengka	1.057.250	-	-	-
12	Kab. Purwakarta	708.000	-	-	-
13	Kab. Subang	1.911.000	-	450.000	-
14	Kab. Sukabumi	-	-	-	-
15	Kab. Sumedang	1.701.000	815.459	-	-
16	Kab. Tasikmalaya	1.476.738	811.028	-	-
17	Kota Bandung	2.085.000	-	-	-
18	Kota Bekasi	718.755	-	-	-
19	Kota Bogor	-	-	-	-
20	Kota Cirebon	414.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
11	Kab. Majalengka	23.959.470	-	2.422.240	327.927
12	Kab. Purwakarta	14.952.000	-	1.419.810	303.430
13	Kab. Subang	31.172.989	-	3.253.582	-
14	Kab. Sukabumi	44.731.849	-	1.540.000	330.800
15	Kab. Sumedang	24.041.262	-	2.709.115	300.000
16	Kab. Tasikmalaya	30.941.610	-	3.496.765	-
17	Kota Bandung	39.571.500	-	4.318.146	336.300
18	Kota Bekasi	21.453.000	-	3.266.219	250.000
19	Kota Bogor	14.079.000	-	2.207.774	-
20	Kota Cirebon	12.652.000	-	-	309.541



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
11	Kab. Majalengka	3.827.000	7.532.085	-
12	Kab. Purwakarta	3.090.000	3.719.060	380.000
13	Kab. Subang	1.468.000	7.482.390	-
14	Kab. Sukabumi	11.018.000	11.900.475	-
15	Kab. Sumedang	2.269.000	7.092.285	375.000
16	Kab. Tasikmalaya	8.515.000	7.546.225	380.000
17	Kota Bandung	601.000	4.392.369	470.000
18	Kota Bekasi	-	2.698.294	-
19	Kota Bogor	-	1.216.902	-
20	Kota Cirebon	542.000	1.083.558	380.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
11	Kab. Majalengka	2.839.755	-	-	329.617.046
12	Kab. Purwakarta	2.055.607	-	-	204.629.501
13	Kab. Subang	4.355.281	-	-	348.205.285
14	Kab. Sukabumi	5.020.880	-	-	428.318.319
15	Kab. Sumedang	2.610.093	-	-	341.387.085
16	Kab. Tasikmalaya	4.840.395	521.736	-	448.820.164
17	Kota Bandung	5.524.054	652.170	-	442.522.588
18	Kota Bekasi	5.377.439	-	-	283.074.169
19	Kota Bogor	1.519.396	-	-	167.797.007
20	Kota Cirebon	957.624	-	-	94.881.609



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Kota Depok	-	-	-
22	Kota Sukabumi	-	-	-
23	Kota Tasikmalaya	-	-	-
24	Kota Cimahi	-	-	-
25	Kota Banjar	-	-	-
26	Kab. Bandung Barat	-	-	-
27	Kab. Pangandaran	-	-	-
XI	Provinsi Jawa Tengah	5.431.091.800	186.815.000	162.794.000
1	Kab. Banjarnegara	-	-	-
2	Kab. Banyumas	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
21	Kota Depok	18.717.000	4.589.600	132.467.545
22	Kota Sukabumi	4.858.800	4.880.300	59.328.195
23	Kota Tasikmalaya	7.620.600	5.092.600	152.870.174
24	Kota Cimahi	6.535.800	3.857.600	84.289.703
25	Kota Banjar	4.653.600	1.795.800	41.514.802
26	Kab. Bandung Barat	16.946.400	5.420.200	235.252.600
27	Kab. Pangandaran	4.848.600	1.768.700	97.486.084
XI	Provinsi Jawa Tengah	-	-	1.093.567.810
1	Kab. Banjarnegara	14.323.800	4.245.400	192.757.044
2	Kab. Banyumas	23.777.400	8.064.000	300.750.736



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Kota Depok	1.167.000	-	-	-
22	Kota Sukabumi	288.000	-	-	-
23	Kota Tasikmalaya	831.000	-	-	-
24	Kota Cimahi	-	-	-	-
25	Kota Banjar	104.488	-	-	-
26	Kab. Bandung Barat	-	4.311.792	-	-
27	Kab. Pangandaran	459.000	1.283.828	-	-
XI	Provinsi Jawa Tengah	5.271.000	29.481	2.500.000	-
1	Kab. Banjarnegara	-	1.024.283	-	-
2	Kab. Banyumas	-	1.838.841	900.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
21	Kota Depok	17.107.000	-	2.684.820	-
22	Kota Sukabumi	8.787.000	524.240	1.036.350	355.552
23	Kota Tasikmalaya	11.939.262	-	-	316.943
24	Kota Cimahi	7.675.000	-	1.179.465	-
25	Kota Banjar	6.063.610	-	779.431	-
26	Kab. Bandung Barat	24.260.000	603.640	4.300.317	336.300
27	Kab. Pangandaran	11.474.000	-	1.295.158	-
XI	Provinsi Jawa Tengah	4.151.250	-	-	-
1	Kab. Banjarnegara	26.602.098	-	-	-
2	Kab. Banyumas	31.195.974	-	3.726.725	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
21	Kota Depok	1.500.000	2.230.907	-
22	Kota Sukabumi	459.000	1.344.547	-
23	Kota Tasikmalaya	603.000	2.269.146	380.000
24	Kota Cimahi	474.000	673.805	-
25	Kota Banjar	472.000	894.220	375.000
26	Kab. Bandung Barat	9.251.000	4.480.875	-
27	Kab. Pangandaran	712.000	2.560.640	380.000
XI	Provinsi Jawa Tengah	-	-	5.446.780
1	Kab. Banjarnegara	1.412.000	5.744.945	-
2	Kab. Banyumas	6.342.000	7.710.075	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
21	Kota Depok	3.993.963	-	-	184.457.835
22	Kota Sukabumi	814.014	-	-	82.675.998
23	Kota Tasikmalaya	2.245.655	-	-	184.168.380
24	Kota Cimahi	980.197	-	-	105.665.570
25	Kota Banjar	901.351	-	-	57.554.302
26	Kab. Bandung Barat	5.729.898	-	-	310.893.022
27	Kab. Pangandaran	1.280.896	652.170	-	124.201.076
XI	Provinsi Jawa Tengah	4.432.538	100.000	-	6.896.199.659
1	Kab. Banjarnegara	2.262.097	913.038	-	249.284.705
2	Kab. Banyumas	4.424.131	621.736	-	389.351.618



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kab. Batang	-	-	-
4	Kab. Blora	-	-	-
5	Kab. Boyolali	-	-	-
6	Kab. Brebes	-	-	-
7	Kab. Cilacap	-	-	-
8	Kab. Demak	-	-	-
9	Kab. Grobogan	-	-	-
10	Kab. Jepara	-	-	-
11	Kab. Karanganyar	-	-	-
12	Kab. Kebumen	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
3	Kab. Batang	14.887.200	4.382.000	137.445.299
4	Kab. Blora	16.468.800	2.386.800	190.177.618
5	Kab. Boyolali	16.479.600	1.550.700	209.022.588
6	Kab. Brebes	22.000.800	9.130.600	236.776.250
7	Kab. Cilacap	21.850.200	5.717.100	290.702.870
8	Kab. Demak	21.293.400	4.891.800	167.676.246
9	Kab. Grobogan	23.422.200	5.500.000	218.450.484
10	Kab. Jepara	24.665.400	8.375.400	189.066.139
11	Kab. Karanganyar	17.683.800	4.972.700	211.935.705
12	Kab. Kebumen	20.755.800	3.612.100	259.049.905



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kab. Batang	-	-	-	-
4	Kab. Blora	222.070	1.331.817	-	-
5	Kab. Boyolali	-	-	450.000	-
6	Kab. Brebes	2.631.000	958.234	-	-
7	Kab. Cilacap	535.100	-	-	-
8	Kab. Demak	1.647.000	-	-	-
9	Kab. Grobogan	354.125	212.734	450.000	-
10	Kab. Jepara	194.010	1.590.536	450.000	-
11	Kab. Karanganyar	-	-	-	-
12	Kab. Kebumen	1.421.184	1.064.654	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Kab. Batang	15.525.740	-	1.160.600	-
4	Kab. Blora	20.880.773	-	1.650.900	300.000
5	Kab. Boyolali	22.042.000	-	1.706.200	332.200
6	Kab. Brebes	28.616.682	510.000	758.695	300.000
7	Kab. Cilacap	29.171.000	-	1.600.000	-
8	Kab. Demak	21.499.000	-	750.000	300.000
9	Kab. Grobogan	23.580.000	-	1.570.760	315.000
10	Kab. Jepara	16.549.000	-	864.180	-
11	Kab. Karanganyar	16.548.000	-	539.800	-
12	Kab. Kebumen	26.877.157	510.000	8.714.950	320.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
3	Kab. Batang	1.280.000	4.554.515	380.000
4	Kab. Blora	2.122.000	5.258.272	380.000
5	Kab. Boyolali	2.721.000	5.399.670	470.000
6	Kab. Brebes	2.029.000	5.466.187	-
7	Kab. Cilacap	1.977.000	6.770.115	-
8	Kab. Demak	1.830.000	4.508.687	380.000
9	Kab. Grobogan	1.908.000	5.821.147	-
10	Kab. Jepara	2.613.000	4.433.690	380.000
11	Kab. Karanganyar	3.367.000	4.502.517	-
12	Kab. Kebumen	1.296.000	8.281.462	375.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	Kab. Batang	1.899.171	-	-	181.514.525
4	Kab. Blora	2.072.963	-	-	243.252.013
5	Kab. Boyolali	2.253.523	913.038	-	263.340.519
6	Kab. Brebes	4.446.614	75.072	-	313.699.134
7	Kab. Cilacap	4.507.421	621.736	-	363.452.542
8	Kab. Demak	2.342.133	913.038	-	228.031.304
9	Kab. Grobogan	3.689.278	-	-	285.273.728
10	Kab. Jepara	1.948.293	913.038	-	252.042.686
11	Kab. Karanganyar	2.079.038	913.038	-	262.541.598
12	Kab. Kebumen	2.940.738	-	-	335.218.950



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kab. Kendal	-	-	-
14	Kab. Klaten	-	-	-
15	Kab. Kudus	-	-	-
16	Kab. Magelang	-	-	-
17	Kab. Pati	-	-	-
18	Kab. Pekalongan	-	-	-
19	Kab. Pemalang	-	-	-
20	Kab. Purbalingga	-	-	-
21	Kab. Purworejo	-	-	-
22	Kab. Rembang	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
13	Kab. Kendal	20.841.000	7.309.400	190.099.793
14	Kab. Klaten	19.995.000	1.605.400	252.580.669
15	Kab. Kudus	13.068.600	3.296.800	161.347.618
16	Kab. Magelang	16.824.600	5.084.100	198.833.660
17	Kab. Pati	21.138.600	2.947.900	229.531.321
18	Kab. Pekalongan	18.764.400	4.251.500	170.359.978
19	Kab. Pemalang	20.341.200	5.263.400	226.912.563
20	Kab. Purbalingga	11.030.400	1.995.700	181.135.782
21	Kab. Purworejo	12.417.000	2.255.900	193.692.626
22	Kab. Rembang	16.794.000	2.721.400	134.607.539



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Kab. Kendal	-	-	-	-
14	Kab. Klaten	1.050.687	-	-	-
15	Kab. Kudus	-	-	450.000	-
16	Kab. Magelang	-	1.363.265	450.000	-
17	Kab. Pati	754.313	688.995	-	-
18	Kab. Pekalongan	317.508	-	-	-
19	Kab. Pemasang	473.853	773.916	-	-
20	Kab. Purbalingga	368.513	-	450.000	-
21	Kab. Purworejo	-	1.264.946	450.000	-
22	Kab. Rembang	876.000	-	450.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	Kab. Kendal	22.965.900	-	1.306.400	300.000
14	Kab. Klaten	26.468.243	-	510.000	-
15	Kab. Kudus	14.706.000	-	1.818.100	300.000
16	Kab. Magelang	21.260.760	-	1.819.617	302.865
17	Kab. Pati	22.112.933	568.280	920.000	347.480
18	Kab. Pekalongan	20.063.000	-	274.664	309.077
19	Kab. Pemasang	19.316.143	-	923.600	355.359
20	Kab. Purbalingga	17.445.534	-	1.809.000	-
21	Kab. Purworejo	20.891.000	-	-	-
22	Kab. Rembang	13.223.065	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
13	Kab. Kendal	1.315.000	5.718.412	375.000
14	Kab. Klaten	3.142.000	7.504.392	-
15	Kab. Kudus	570.000	2.504.875	380.000
16	Kab. Magelang	5.431.000	6.540.305	-
17	Kab. Pati	2.335.000	6.747.530	495.000
18	Kab. Pekalongan	1.849.000	5.759.505	380.000
19	Kab. Pemalang	1.252.000	4.415.745	-
20	Kab. Purbalingga	4.850.000	5.293.395	-
21	Kab. Purworejo	3.260.000	6.346.850	375.000
22	Kab. Rembang	1.284.000	4.643.690	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
13	Kab. Kendal	2.266.634	913.038	-	253.410.577
14	Kab. Klaten	2.794.165	913.038	-	316.563.594
15	Kab. Kudus	1.419.855	913.038	-	200.774.886
16	Kab. Magelang	2.722.566	1.013.038	-	261.645.776
17	Kab. Pati	2.661.271	-	-	291.248.623
18	Kab. Pekalongan	2.191.456	-	-	224.520.088
19	Kab. Pemalang	3.692.230	-	-	283.720.009
20	Kab. Purbalingga	2.194.069	-	-	226.572.393
21	Kab. Purworejo	1.858.666	913.038	-	243.725.026
22	Kab. Rembang	1.675.598	-	-	176.275.292



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Kab. Semarang	-	-	-
24	Kab. Sragen	-	-	-
25	Kab. Sukoharjo	-	-	-
26	Kab. Tegal	-	-	-
27	Kab. Temanggung	-	-	-
28	Kab. Wonogiri	-	-	-
29	Kab. Wonosobo	-	-	-
30	Kota Magelang	-	-	-
31	Kota Pekalongan	-	-	-
32	Kota Salatiga	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
23	Kab. Semarang	16.745.400	4.153.500	191.335.184
24	Kab. Sragen	16.573.200	2.950.800	200.273.765
25	Kab. Sukoharjo	13.029.000	2.204.700	195.367.372
26	Kab. Tegal	22.499.400	5.855.800	235.432.502
27	Kab. Temanggung	12.288.000	3.377.400	144.296.716
28	Kab. Wonogiri	13.894.800	2.672.400	247.287.690
29	Kab. Wonosobo	15.007.800	4.291.200	171.562.253
30	Kota Magelang	2.997.000	1.754.200	35.809.318
31	Kota Pekalongan	6.892.200	2.370.600	51.228.423
32	Kota Salatiga	3.826.800	1.836.300	43.369.492



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Kab. Semarang	1.067.663	339.221	-	-
24	Kab. Sragen	984.625	-	-	-
25	Kab. Sukoharjo	511.575	-	-	-
26	Kab. Tegal	775.272	663.848	-	-
27	Kab. Temanggung	23.925	-	-	-
28	Kab. Wonogiri	637.813	-	-	-
29	Kab. Wonosobo	801.480	906.683	-	-
30	Kota Magelang	-	-	450.000	-
31	Kota Pekalongan	167.450	-	600.000	-
32	Kota Salatiga	237.600	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
23	Kab. Semarang	20.459.990	-	774.625	290.000
24	Kab. Sragen	19.506.000	-	2.193.400	300.000
25	Kab. Sukoharjo	9.540.000	-	-	300.000
26	Kab. Tegal	21.884.492	-	1.760.000	450.000
27	Kab. Temanggung	18.875.000	-	875.370	-
28	Kab. Wonogiri	25.308.251	-	2.642.750	375.000
29	Kab. Wonosobo	18.789.000	-	372.000	345.000
30	Kota Magelang	3.341.445	-	828.904	-
31	Kota Pekalongan	8.435.368	-	713.000	-
32	Kota Salatiga	3.784.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
23	Kab. Semarang	4.943.000	5.288.240	380.000
24	Kab. Sragen	988.000	5.345.660	-
25	Kab. Sukoharjo	2.142.000	3.475.167	380.000
26	Kab. Tegal	1.802.000	5.433.800	380.000
27	Kab. Temanggung	4.049.000	5.531.412	-
28	Kab. Wonogiri	3.247.000	6.827.765	-
29	Kab. Wonosobo	2.609.000	4.858.455	-
30	Kota Magelang	442.000	673.183	-
31	Kota Pekalongan	415.000	916.963	380.000
32	Kota Salatiga	635.000	886.387	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
23	Kab. Semarang	2.294.785	913.038	-	248.984.646
24	Kab. Sragen	2.225.325	913.038	-	252.253.813
25	Kab. Sukoharjo	2.008.803	-	-	228.958.617
26	Kab. Tegal	2.826.922	-	-	299.764.036
27	Kab. Temanggung	1.991.860	913.038	-	192.221.721
28	Kab. Wonogiri	2.508.290	913.038	-	306.314.797
29	Kab. Wonosobo	2.011.994	913.038	-	222.467.903
30	Kota Magelang	724.818	913.038	-	47.933.906
31	Kota Pekalongan	988.244	-	-	73.107.248
32	Kota Salatiga	872.179	652.170	-	56.099.928



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Kota Semarang	-	-	-
34	Kota Surakarta	-	-	-
35	Kota Tegal	-	-	-
XII	Provinsi DI Yogyakarta	610.727.400	6.600.000	20.667.839
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	-	-	-
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
XIII	Provinsi Jawa Timur	5.671.827.000	205.105.000	195.752.326



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
33	Kota Semarang	31.424.400	7.883.300	193.985.381
34	Kota Surakarta	10.964.400	1.867.600	128.097.285
35	Kota Tegal	5.206.800	1.696.100	59.820.815
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	268.436.525
1	Kab. Bantul	25.771.200	4.199.400	180.612.289
2	Kab. Gunung Kidul	17.557.800	2.755.600	193.056.802
3	Kab. Kulon Progo	12.114.600	1.053.000	130.733.438
4	Kab. Sleman	25.269.000	2.168.600	188.465.723
5	Kota Yogyakarta	11.052.600	3.041.300	81.395.549
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	-	1.255.196.040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Kota Semarang	-	-	-	-
34	Kota Surakarta	153.100	-	600.000	-
35	Kota Tegal	501.000	-	-	-
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	-	-
1	Kab. Bantul	1.302.000	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	931.913	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	897.139	-	-	-
4	Kab. Sleman	1.235.953	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-	-
XIII	Provinsi Jawa Timur	7.098.000	972.854	1.800.000	1.677.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
33	Kota Semarang	21.039.000	-	1.940.265	315.000
34	Kota Surakarta	9.996.678	-	-	-
35	Kota Tegal	5.026.509	-	-	315.000
XII	Provinsi DI Yogyakarta	2.325.000	-	-	-
1	Kab. Bantul	21.418.800	-	799.740	-
2	Kab. Gunung Kidul	23.099.709	-	888.600	-
3	Kab. Kulon Progo	16.715.045	-	622.020	300.000
4	Kab. Sleman	19.127.000	-	730.000	290.000
5	Kota Yogyakarta	10.547.000	510.000	562.320	-
XIII	Provinsi Jawa Timur	4.349.250	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
33	Kota Semarang	787.000	3.831.973	470.000
34	Kota Surakarta	450.000	1.237.249	470.000
35	Kota Tegal	398.000	914.873	380.000
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	3.517.970
1	Kab. Bantul	4.831.000	4.095.922	437.500
2	Kab. Gunung Kidul	3.560.000	4.576.587	470.000
3	Kab. Kulon Progo	2.512.000	3.175.732	497.500
4	Kab. Sleman	5.284.000	4.016.045	527.500
5	Kota Yogyakarta	499.000	1.718.240	380.000
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	-	5.504.110



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
33	Kota Semarang	3.935.005	652.170	-	266.263.494
34	Kota Surakarta	1.353.785	913.038	-	156.103.135
35	Kota Tegal	957.600	-	-	75.216.697
XII	Provinsi DI Yogyakarta	1.227.772	-	-	913.502.506
1	Kab. Bantul	1.984.903	1.013.038	-	246.465.792
2	Kab. Gunung Kidul	1.881.741	913.038	-	249.691.790
3	Kab. Kulon Progo	1.394.409	1.013.038	-	171.027.921
4	Kab. Sleman	2.866.694	913.038	-	250.893.553
5	Kota Yogyakarta	1.305.254	913.038	-	111.924.301
XIII	Provinsi Jawa Timur	1.640.735	-	-	7.350.922.315



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Bangkalan	-	-	-
2	Kab. Banyuwangi	-	-	-
3	Kab. Blitar	-	-	-
4	Kab. Bojonegoro	-	-	-
5	Kab. Bondowoso	-	-	-
6	Kab. Gresik	-	-	-
7	Kab. Jember	-	-	-
8	Kab. Jombang	-	-	-
9	Kab. Kediri	-	-	-
10	Kab. Lamongan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bangkalan	13.197.600	4.235.200	153.706.611
2	Kab. Banyuwangi	29.968.200	8.101.400	275.430.222
3	Kab. Blitar	23.135.400	1.803.600	251.150.233
4	Kab. Bojonegoro	32.185.200	11.694.300	217.906.218
5	Kab. Bondowoso	21.820.200	17.551.400	146.288.055
6	Kab. Gresik	31.424.400	1.962.300	156.980.291
7	Kab. Jember	40.738.800	2.803.600	326.185.635
8	Kab. Jombang	23.441.400	6.117.000	218.343.974
9	Kab. Kediri	34.971.000	5.106.600	263.521.309
10	Kab. Lamongan	30.533.400	1.733.300	209.148.698



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Bangkalan	1.296.000	294.804	450.000	-
2	Kab. Banyuwangi	-	-	450.000	-
3	Kab. Blitar	1.362.000	-	450.000	-
4	Kab. Bojonegoro	1.869.000	-	-	-
5	Kab. Bondowoso	2.853.000	1.860.239	-	-
6	Kab. Gresik	366.150	-	450.000	-
7	Kab. Jember	720.916	-	-	-
8	Kab. Jombang	924.700	-	-	-
9	Kab. Kediri	1.608.000	-	-	-
10	Kab. Lamongan	300.898	-	450.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kab. Bangkalan	20.373.400	-	706.470	-
2	Kab. Banyuwangi	33.318.000	-	1.436.552	330.000
3	Kab. Blitar	18.158.222	-	1.605.770	326.351
4	Kab. Bojonegoro	26.612.350	520.000	2.586.820	-
5	Kab. Bondowoso	22.706.529	-	374.820	307.402
6	Kab. Gresik	23.887.823	520.000	1.126.725	-
7	Kab. Jember	40.985.027	-	880.050	325.000
8	Kab. Jombang	25.537.000	-	-	-
9	Kab. Kediri	29.168.589	-	1.063.150	-
10	Kab. Lamongan	26.955.170	-	1.164.170	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
1	Kab. Bangkalan	1.307.000	6.295.081	-
2	Kab. Banyuwangi	1.813.000	5.666.165	470.000
3	Kab. Blitar	4.078.000	5.701.685	470.000
4	Kab. Bojonegoro	1.428.000	8.311.902	470.000
5	Kab. Bondowoso	2.398.000	6.912.944	472.800
6	Kab. Gresik	3.971.000	5.772.622	380.000
7	Kab. Jember	5.255.000	7.981.597	-
8	Kab. Jombang	3.032.000	4.728.550	470.000
9	Kab. Kediri	2.663.000	6.996.970	470.000
10	Kab. Lamongan	1.764.000	8.567.257	497.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Kab. Bangkalan	2.469.177	-	-	204.331.343
2	Kab. Banyuwangi	4.095.321	521.736	-	361.600.596
3	Kab. Blitar	3.250.667	521.736	-	312.013.664
4	Kab. Bojonegoro	2.296.265	-	-	305.880.055
5	Kab. Bondowoso	2.103.187	698.225	-	226.346.801
6	Kab. Gresik	3.272.315	521.736	-	230.635.362
7	Kab. Jember	6.112.718	-	-	431.988.343
8	Kab. Jombang	3.519.985	-	-	286.114.609
9	Kab. Kediri	3.945.803	-	-	349.514.421
10	Kab. Lamongan	2.357.889	-	-	283.472.282



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kab. Lumajang	-	-	-
12	Kab. Madiun	-	-	-
13	Kab. Magetan	-	-	-
14	Kab. Malang	-	-	-
15	Kab. Mojokerto	-	-	-
16	Kab. Nganjuk	-	-	-
17	Kab. Ngawi	-	-	-
18	Kab. Pacitan	-	-	-
19	Kab. Pamekasan	-	-	-
20	Kab. Pasuruan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
11	Kab. Lumajang	22.104.000	5.439.100	183.088.234
12	Kab. Madiun	12.752.400	1.037.900	164.641.698
13	Kab. Magetan	11.939.400	1.776.200	193.522.988
14	Kab. Malang	42.150.000	8.795.600	327.056.758
15	Kab. Mojokerto	20.895.000	587.700	188.719.019
16	Kab. Nganjuk	21.222.600	2.176.100	231.831.557
17	Kab. Ngawi	13.063.200	3.720.400	200.932.104
18	Kab. Pacitan	12.477.000	3.967.700	156.029.616
19	Kab. Pamekasan	15.094.200	1.967.700	160.566.990
20	Kab. Pasuruan	25.747.200	2.723.000	222.988.286



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Kab. Lumajang	821.150	54.270	450.000	-
12	Kab. Madiun	1.182.000	-	-	-
13	Kab. Magetan	-	-	-	-
14	Kab. Malang	-	252.003	-	-
15	Kab. Mojokerto	942.050	789.023	-	-
16	Kab. Nganjuk	1.323.000	230.298	600.000	-
17	Kab. Ngawi	1.300.013	1.776.984	450.000	-
18	Kab. Pacitan	964.775	-	-	-
19	Kab. Pamekasan	1.130.650	-	450.000	-
20	Kab. Pasuruan	2.022.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
11	Kab. Lumajang	19.228.940	636.940	584.950	-
12	Kab. Madiun	19.238.043	767.080	1.599.750	-
13	Kab. Magetan	16.705.846	-	888.875	300.000
14	Kab. Malang	31.279.850	-	2.738.000	362.600
15	Kab. Mojokerto	20.331.000	-	1.624.000	-
16	Kab. Nganjuk	16.524.000	520.000	-	315.000
17	Kab. Ngawi	18.160.582	-	1.485.808	341.400
18	Kab. Pacitan	19.183.712	-	616.600	-
19	Kab. Pamekasan	15.937.147	520.000	1.000.000	-
20	Kab. Pasuruan	24.721.185	-	1.288.600	412.800



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
11	Kab. Lumajang	1.656.000	5.221.407	470.000
12	Kab. Madiun	1.675.000	4.201.365	-
13	Kab. Magetan	398.000	5.071.827	470.000
14	Kab. Malang	2.022.000	8.931.557	470.000
15	Kab. Mojokerto	2.344.000	5.511.845	470.000
16	Kab. Nganjuk	3.096.000	5.794.932	375.000
17	Kab. Ngawi	2.302.000	5.142.485	470.000
18	Kab. Pacitan	2.291.000	3.477.575	470.000
19	Kab. Pamekasan	561.000	3.982.860	-
20	Kab. Pasuruan	1.418.000	6.741.525	467.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
11	Kab. Lumajang	2.502.561	913.038	-	243.170.590
12	Kab. Madiun	1.851.501	-	-	208.946.737
13	Kab. Magetan	1.864.968	-	-	232.938.104
14	Kab. Malang	5.949.325	1.013.038	-	431.020.731
15	Kab. Mojokerto	2.407.896	652.170	-	245.273.703
16	Kab. Nganjuk	1.987.024	-	-	285.995.511
17	Kab. Ngawi	2.172.856	-	-	251.317.832
18	Kab. Pacitan	1.552.800	913.038	-	201.943.816
19	Kab. Pamekasan	1.490.802	621.736	-	203.323.085
20	Kab. Pasuruan	3.177.345	913.038	-	292.620.479



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Kab. Ponorogo	-	-	-
22	Kab. Probolinggo	-	-	-
23	Kab. Sampang	-	-	-
24	Kab. Sidoarjo	-	-	-
25	Kab. Situbondo	-	-	-
26	Kab. Sumenep	-	-	-
27	Kab. Trenggalek	-	-	-
28	Kab. Tuban	-	-	-
29	Kab. Tulungagung	-	-	-
30	Kota Blitar	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
21	Kab. Ponorogo	12.677.400	847.500	216.718.778
22	Kab. Probolinggo	20.916.600	8.182.800	157.170.153
23	Kab. Sampang	13.039.200	5.895.000	119.953.205
24	Kab. Sidoarjo	41.566.800	3.259.800	254.467.818
25	Kab. Situbondo	11.256.000	1.922.700	142.385.203
26	Kab. Sumenep	14.336.400	7.844.100	171.227.639
27	Kab. Trenggalek	12.517.200	2.665.800	177.316.919
28	Kab. Tuban	24.334.200	3.387.900	196.472.129
29	Kab. Tulungagung	21.084.000	3.802.300	251.272.611
30	Kota Blitar	4.252.200	1.828.100	42.871.239



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Kab. Ponorogo	1.372.150	-	-	-
22	Kab. Probolinggo	1.554.000	175.514	-	-
23	Kab. Sampang	1.956.000	2.152.070	-	-
24	Kab. Sidoarjo	-	768.018	-	-
25	Kab. Situbondo	1.257.000	8.342.954	-	-
26	Kab. Sumenep	573.963	3.014.374	450.000	-
27	Kab. Trenggalek	1.011.785	-	-	-
28	Kab. Tuban	210.403	-	600.000	-
29	Kab. Tulungagung	-	-	450.000	-
30	Kota Blitar	112.825	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
21	Kab. Ponorogo	24.322.890	-	315.400	315.000
22	Kab. Probolinggo	26.318.630	-	2.756.320	326.000
23	Kab. Sampang	18.337.617	-	872.000	-
24	Kab. Sidoarjo	18.402.655	-	-	-
25	Kab. Situbondo	14.338.266	-	1.015.353	340.000
26	Kab. Sumenep	24.452.300	-	1.114.450	-
27	Kab. Trenggalek	17.527.670	-	-	290.000
28	Kab. Tuban	24.689.762	-	1.270.000	-
29	Kab. Tulungagung	23.726.000	-	2.739.042	-
30	Kota Blitar	2.348.000	-	-	332.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
21	Kab. Ponorogo	2.325.000	6.138.102	380.000
22	Kab. Probolinggo	2.761.000	6.969.272	470.000
23	Kab. Sampang	1.501.000	4.695.201	-
24	Kab. Sidoarjo	1.818.000	4.582.285	-
25	Kab. Situbondo	1.755.000	4.786.826	576.400
26	Kab. Sumenep	1.293.000	7.441.507	-
27	Kab. Trenggalek	2.093.000	3.968.062	375.000
28	Kab. Tuban	1.772.000	5.804.487	380.000
29	Kab. Tulungagung	2.989.000	5.535.275	470.000
30	Kota Blitar	504.000	686.409	470.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
21	Kab. Ponorogo	2.250.430	-	-	267.662.650
22	Kab. Probolinggo	2.534.075	1.013.038	-	231.147.402
23	Kab. Sampang	2.053.432	92.600	-	170.547.325
24	Kab. Sidoarjo	2.644.059	-	-	327.509.435
25	Kab. Situbondo	1.897.565	92.600	-	189.965.867
26	Kab. Sumenep	2.653.275	521.736	-	234.922.744
27	Kab. Trenggalek	1.829.471	-	-	219.594.907
28	Kab. Tuban	3.160.833	-	-	262.081.714
29	Kab. Tulungagung	1.968.525	-	-	314.036.753
30	Kota Blitar	809.859	521.736	-	54.736.968



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Kota Kediri	-	-	-
32	Kota Madiun	-	-	-
33	Kota Malang	-	-	-
34	Kota Mojokerto	-	-	-
35	Kota Pasuruan	-	-	-
36	Kota Probolinggo	-	-	-
37	Kota Surabaya	-	-	-
38	Kota Batu	-	-	-
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	1.022.802.200	164.135.000	40.390.683
1	Kab. Bengkayang	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
31	Kota Kediri	6.803.400	2.183.800	62.181.224
32	Kota Madiun	4.456.800	555.700	59.959.146
33	Kota Malang	17.321.400	3.388.000	119.633.585
34	Kota Mojokerto	3.616.800	384.000	33.433.567
35	Kota Pasuruan	5.697.600	2.019.300	40.297.425
36	Kota Probolinggo	5.191.800	899.800	47.327.321
37	Kota Surabaya	76.206.000	8.738.100	278.277.670
38	Kota Batu	4.041.600	297.300	39.054.679
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	128.392.972
1	Kab. Bengkayang	1.627.200	1.137.700	48.767.867



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Kota Kediri	172.163	-	450.000	-
32	Kota Madiun	200.350	-	-	-
33	Kota Malang	254.100	-	450.000	-
34	Kota Mojokerto	213.000	-	-	-
35	Kota Pasuruan	-	-	-	-
36	Kota Probolinggo	123.800	-	-	-
37	Kota Surabaya	2.055.000	-	-	-
38	Kota Batu	444.000	-	-	-
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	4.938.000	5.960.319	2.500.000	1.677.000
1	Kab. Bengkayang	2.142.100	13.457.614	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
31	Kota Kediri	5.338.000	-	-	340.000
32	Kota Madiun	3.846.050	-	-	-
33	Kota Malang	9.729.622	-	1.948.940	-
34	Kota Mojokerto	3.370.583	-	456.000	-
35	Kota Pasuruan	5.113.293	-	-	-
36	Kota Probolinggo	4.021.670	-	-	-
37	Kota Surabaya	33.649.343	360.678	3.984.048	-
38	Kota Batu	3.324.108	-	-	-
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	3.896.250	-	-	-
1	Kab. Bengkayang	19.817.705	540.000	2.459.691	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
31	Kota Kediri	488.000	810.789	405.000
32	Kota Madiun	374.000	725.243	-
33	Kota Malang	1.257.000	1.276.803	470.000
34	Kota Mojokerto	365.000	477.917	380.000
35	Kota Pasuruan	-	929.431	470.000
36	Kota Probolinggo	432.000	1.121.226	380.000
37	Kota Surabaya	1.667.000	3.894.200	467.500
38	Kota Batu	384.000	708.096	375.000
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	3.569.600
1	Kab. Bengkayang	1.974.000	4.357.394	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
31	Kota Kediri	952.603	621.736	-	80.746.715
32	Kota Madiun	837.511	-	-	70.954.800
33	Kota Malang	1.723.050	913.038	-	158.365.538
34	Kota Mojokerto	774.701	652.170	-	44.123.738
35	Kota Pasuruan	899.336	913.038	-	56.339.423
36	Kota Probolinggo	960.742	913.038	-	61.371.397
37	Kota Surabaya	6.439.459	-	26.912.253	442.651.251
38	Kota Batu	880.205	913.038	-	50.422.026
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	1.740.480	-	-	1.380.002.504
1	Kab. Bengkayang	1.089.924	658.580	-	98.029.775



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Landak	-	-	-
3	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-
4	Kab. Ketapang	-	-	-
5	Kab. Mempawah	-	-	-
6	Kab. Sambas	-	-	-
7	Kab. Sanggau	-	-	-
8	Kab. Sintang	-	-	-
9	Kota Pontianak	-	-	-
10	Kota Singkawang	-	-	-
11	Kab. Sekadau	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
2	Kab. Landak	1.539.600	401.700	55.360.451
3	Kab. Kapuas Hulu	2.179.200	1.895.100	61.586.292
4	Kab. Ketapang	4.651.200	2.316.800	94.904.328
5	Kab. Mempawah	3.068.400	734.300	64.328.765
6	Kab. Sambas	6.807.000	999.800	130.881.960
7	Kab. Sanggau	2.227.200	2.354.200	75.178.417
8	Kab. Sintang	2.910.600	1.857.300	74.260.415
9	Kota Pontianak	7.386.000	2.644.700	79.101.525
10	Kota Singkawang	1.947.600	1.347.700	44.562.892
11	Kab. Sekadau	1.716.000	123.600	26.991.212



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kab. Landak	2.340.000	29.743.720	-	-
3	Kab. Kapuas Hulu	2.289.000	39.693.297	-	-
4	Kab. Ketapang	2.326.300	39.374.094	-	-
5	Kab. Mempawah	1.006.000	4.074.482	-	-
6	Kab. Sambas	1.986.000	10.406.724	450.000	-
7	Kab. Sanggau	2.124.000	26.140.563	-	-
8	Kab. Sintang	2.718.000	48.708.860	600.000	-
9	Kota Pontianak	1.360.163	-	-	-
10	Kota Singkawang	894.000	-	-	-
11	Kab. Sekadau	2.241.000	18.609.076	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Kab. Landak	18.229.294	340.000	2.249.180	-
3	Kab. Kapuas Hulu	27.601.615	540.000	2.134.960	-
4	Kab. Ketapang	27.512.859	-	1.138.670	415.000
5	Kab. Mempawah	12.752.752	-	1.324.025	-
6	Kab. Sambas	31.822.361	540.000	2.696.800	400.000
7	Kab. Sanggau	20.977.716	240.000	4.323.997	-
8	Kab. Sintang	24.579.473	-	1.000.000	375.000
9	Kota Pontianak	14.204.265	-	1.464.154	350.000
10	Kota Singkawang	5.280.916	-	500.000	-
11	Kab. Sekadau	11.107.217	-	1.135.620	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
2	Kab. Landak	3.231.000	4.035.716	-
3	Kab. Kapuas Hulu	2.556.000	6.582.127	444.800
4	Kab. Ketapang	3.967.000	6.592.027	-
5	Kab. Mempawah	2.206.000	2.224.910	-
6	Kab. Sambas	4.563.000	5.883.438	-
7	Kab. Sanggau	3.563.000	4.585.834	358.000
8	Kab. Sintang	3.432.000	5.970.063	-
9	Kota Pontianak	529.000	1.357.661	-
10	Kota Singkawang	884.000	1.099.619	358.000
11	Kab. Sekadau	1.690.000	1.940.457	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	Kab. Landak	1.434.876	658.580	-	119.564.117
3	Kab. Kapuas Hulu	1.092.249	698.225	-	149.292.865
4	Kab. Ketapang	1.765.318	558.580	-	185.522.176
5	Kab. Mempawah	1.165.139	521.736	-	93.406.509
6	Kab. Sambas	1.905.674	798.225	-	200.140.982
7	Kab. Sanggau	1.526.448	558.580	-	144.157.955
8	Kab. Sintang	1.425.878	-	-	167.837.589
9	Kota Pontianak	1.500.165	-	-	109.897.633
10	Kota Singkawang	927.370	521.736	-	58.323.833
11	Kab. Sekadau	992.456	-	-	66.546.638



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Melawi	-	-	-
13	Kab. Kayong Utara	-	-	-
14	Kab. Kubu Raya	-	-	-
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	504.771.000	91.155.000	24.869.551
1	Kab. Barito Selatan	-	-	-
2	Kab. Barito Utara	-	-	-
3	Kab. Kapuas	-	-	-
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-
6	Kota Palangkaraya	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
12	Kab. Melawi	1.729.200	572.400	31.336.493
13	Kab. Kayong Utara	1.043.400	144.600	20.896.889
14	Kab. Kubu Raya	4.338.000	2.232.500	99.059.027
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	129.400.588
1	Kab. Barito Selatan	1.690.800	1.288.500	45.038.208
2	Kab. Barito Utara	2.257.800	1.908.300	54.418.406
3	Kab. Kapuas	8.236.200	3.399.600	115.144.355
4	Kab. Kotawaringin Barat	4.912.200	1.764.000	53.236.077
5	Kab. Kotawaringin Timur	6.299.400	1.262.800	74.680.177
6	Kota Palangkaraya	3.930.000	2.223.500	75.949.018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kab. Melawi	2.247.000	36.080.808	-	-
13	Kab. Kayong Utara	1.602.000	3.913.656	-	-
14	Kab. Kubu Raya	1.921.275	-	-	-
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	4.911.000	12.439.955	1.450.000	1.677.000
1	Kab. Barito Selatan	1.359.000	9.697.173	-	-
2	Kab. Barito Utara	1.116.000	11.360.080	-	-
3	Kab. Kapuas	1.230.000	16.888.722	-	-
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.110.000	1.900.521	-	-
5	Kab. Kotawaringin Timur	1.968.000	24.658.901	450.000	-
6	Kota Palangkaraya	1.467.000	-	-	-

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
12	Kab. Melawi	12.603.557	220.283	665.000	-
13	Kab. Kayong Utara	8.778.881	-	721.335	-
14	Kab. Kubu Raya	18.546.653	-	753.698	-
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	3.920.250	-	-	-
1	Kab. Barito Selatan	15.071.183	-	1.628.834	-
2	Kab. Barito Utara	15.243.946	240.000	3.145.240	-
3	Kab. Kapuas	24.937.590	-	5.057.845	350.000
4	Kab. Kotawaringin Barat	15.172.906	-	1.473.460	375.000
5	Kab. Kotawaringin Timur	19.353.946	660.580	3.135.510	375.000
6	Kota Palangkaraya	6.212.600	-	845.836	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
12	Kab. Melawi	1.733.000	3.708.454	-
13	Kab. Kayong Utara	1.453.000	1.643.843	-
14	Kab. Kubu Raya	3.995.000	2.572.640	-
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	3.014.090
1	Kab. Barito Selatan	1.251.000	1.698.982	-
2	Kab. Barito Utara	1.530.000	2.284.675	-
3	Kab. Kapuas	3.139.000	4.337.277	-
4	Kab. Kotawaringin Barat	2.086.000	1.743.966	358.000
5	Kab. Kotawaringin Timur	3.412.000	3.987.135	-
6	Kota Palangkaraya	516.000	1.170.920	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Kab. Melawi	1.142.994	-	-	92.039.189
13	Kab. Kayong Utara	886.403	92.600	-	41.176.607
14	Kab. Kubu Raya	1.577.223	652.170	-	135.648.186
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	1.751.314	-	-	779.359.748
1	Kab. Barito Selatan	869.315	-	-	75.795.995
2	Kab. Barito Utara	947.604	-	-	94.451.733
3	Kab. Kapuas	1.326.621	-	-	184.047.210
4	Kab. Kotawaringin Barat	959.030	752.170	-	85.843.330
5	Kab. Kotawaringin Timur	1.426.258	-	-	141.651.707
6	Kota Palangkaraya	911.513	521.736	-	93.808.199



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kab. Katingan	-	-	-
8	Kab. Seruyan	-	-	-
9	Kab. Sukamara	-	-	-
10	Kab. Lamandau	-	-	-
11	Kab. Gunung Mas	-	-	-
12	Kab. Pulang Pisau	-	-	-
13	Kab. Murung Raya	-	-	-
14	Kab. Barito Timur	-	-	-
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	630.995.400	77.805.000	25.647.787
1	Kab. Banjar	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
7	Kab. Katingan	2.999.400	1.196.800	51.324.357
8	Kab. Seruyan	2.362.200	1.534.800	24.530.609
9	Kab. Sukamara	1.404.000	262.500	11.764.408
10	Kab. Lamandau	2.153.400	197.700	22.721.918
11	Kab. Gunung Mas	2.324.400	22.500	46.211.902
12	Kab. Pulang Pisau	2.893.800	454.400	54.697.312
13	Kab. Murung Raya	3.186.600	2.957.700	36.051.456
14	Kab. Barito Timur	2.535.600	1.137.900	43.538.641
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	161.592.199
1	Kab. Banjar	9.363.000	5.170.600	112.507.703



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kab. Katingan	1.457.163	21.636.970	-	-
8	Kab. Seruyan	1.452.000	9.147.410	-	-
9	Kab. Sukamara	921.000	1.090.494	-	-
10	Kab. Lamandau	1.113.000	9.389.080	-	-
11	Kab. Gunung Mas	1.491.000	20.466.278	-	-
12	Kab. Pulang Pisau	396.173	14.393.843	-	-
13	Kab. Murung Raya	1.067.025	18.951.508	-	-
14	Kab. Barito Timur	1.380.250	11.006.945	-	-
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	3.423.000	519.581	2.500.000	1.677.000
1	Kab. Banjar	2.337.000	8.342.193	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Kab. Katingan	14.840.054	-	4.488.700	-
8	Kab. Seruyan	12.370.093	-	1.475.840	-
9	Kab. Sukamara	4.853.446	-	1.128.300	-
10	Kab. Lamandau	9.527.755	-	1.162.273	-
11	Kab. Gunung Mas	14.918.491	-	1.252.060	-
12	Kab. Pulang Pisau	11.080.797	542.040	3.264.954	-
13	Kab. Murung Raya	15.014.401	581.275	1.905.120	-
14	Kab. Barito Timur	10.547.875	245.140	992.721	-
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	3.771.750	-	-	-
1	Kab. Banjar	19.931.059	-	1.491.010	375.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
7	Kab. Katingan	1.978.000	3.584.540	-
8	Kab. Seruyan	1.791.000	2.951.565	-
9	Kab. Sukamara	448.000	1.201.925	358.000
10	Kab. Lamandau	551.000	2.147.495	-
11	Kab. Gunung Mas	1.640.000	2.837.407	-
12	Kab. Pulang Pisau	1.440.000	2.123.992	-
13	Kab. Murung Raya	1.309.000	2.348.365	-
14	Kab. Barito Timur	1.842.000	2.826.120	-
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	3.477.050
1	Kab. Banjar	3.509.000	4.838.982	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
7	Kab. Katingan	1.023.401	-	-	104.529.385
8	Kab. Seruyan	987.790	698.225	-	59.301.532
9	Kab. Sukamara	830.349	652.170	-	24.914.592
10	Kab. Lamandau	855.165	-	-	49.818.786
11	Kab. Gunung Mas	1.035.231	-	-	92.199.269
12	Kab. Pulang Pisau	889.058	521.736	-	92.698.105
13	Kab. Murung Raya	905.275	-	-	84.277.725
14	Kab. Barito Timur	911.004	-	-	76.964.196
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	1.863.509	-	-	913.272.276
1	Kab. Banjar	1.709.015	521.736	-	170.096.298



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Barito Kuala	-	-	-
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-
6	Kab. Kotabaru	-	-	-
7	Kab. Tabalong	-	-	-
8	Kab. Tanah Laut	-	-	-
9	Kab. Tapin	-	-	-
10	Kota Banjarbaru	-	-	-
11	Kota Banjarmasin	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
2	Kab. Barito Kuala	6.739.200	1.616.800	85.486.528
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	4.835.400	3.091.000	69.598.285
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	5.133.000	2.064.900	81.135.341
5	Kab. Hulu Sungai Utara	4.725.000	4.112.600	70.719.407
6	Kab. Kotabaru	5.744.400	840.500	56.661.030
7	Kab. Tabalong	6.250.200	1.637.800	74.548.796
8	Kab. Tanah Laut	8.047.800	4.875.600	94.179.783
9	Kab. Tapin	3.892.800	2.009.200	52.550.792
10	Kota Banjarbaru	5.838.000	3.110.800	52.764.644
11	Kota Banjarmasin	11.627.400	3.649.400	99.472.421



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kab. Barito Kuala	1.468.650	2.776.724	-	-
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.236.000	3.061.232	450.000	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	998.300	7.407.369	-	-
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.470.000	7.578.832	-	-
6	Kab. Kotabaru	1.443.000	5.309.346	-	-
7	Kab. Tabalong	286.400	10.570.976	-	-
8	Kab. Tanah Laut	711.400	4.750.197	-	-
9	Kab. Tapin	1.770.000	9.703.320	-	-
10	Kota Banjarbaru	774.000	-	-	-
11	Kota Banjarmasin	1.449.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Kab. Barito Kuala	16.610.812	-	1.000.000	-
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	17.978.863	500.000	888.770	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	15.538.117	-	2.112.552	-
5	Kab. Hulu Sungai Utara	13.311.125	-	1.008.708	-
6	Kab. Kotabaru	23.375.706	250.000	2.999.999	-
7	Kab. Tabalong	14.268.182	-	1.888.977	-
8	Kab. Tanah Laut	16.273.060	-	2.728.800	-
9	Kab. Tapin	10.871.768	-	524.630	-
10	Kota Banjarbaru	5.809.513	-	513.515	-
11	Kota Banjarmasin	16.202.260	-	-	320.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
2	Kab. Barito Kuala	2.433.000	4.377.425	358.000
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.195.000	3.137.067	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.957.000	3.274.250	-
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.735.000	4.076.339	-
6	Kab. Kotabaru	2.545.000	4.649.668	358.000
7	Kab. Tabalong	2.074.000	2.454.260	-
8	Kab. Tanah Laut	2.520.000	2.365.615	358.000
9	Kab. Tapin	1.725.000	3.228.545	-
10	Kota Banjarbaru	415.000	968.070	358.000
11	Kota Banjarmasin	1.891.000	1.159.443	358.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	Kab. Barito Kuala	1.339.942	521.736	-	124.728.817
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.080.143	752.170	-	108.803.930
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.078.277	-	-	120.699.106
5	Kab. Hulu Sungai Utara	888.064	-	-	109.625.075
6	Kab. Kotabaru	1.114.549	-	-	105.291.198
7	Kab. Tabalong	1.076.367	-	-	115.055.958
8	Kab. Tanah Laut	1.205.909	-	-	138.016.164
9	Kab. Tapin	1.048.409	-	-	87.324.464
10	Kota Banjarbaru	838.606	521.736	-	71.911.884
11	Kota Banjarmasin	1.459.542	521.736	-	138.110.202



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Balangan	-	-	-
13	Kab. Tanah Bumbu	-	-	-
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	728.807.800	46.385.000	20.433.071
1	Kab. Berau	-	-	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-
3	Kab. Kutai Barat	-	-	-
4	Kab. Kutai Timur	-	-	-
5	Kab. Paser	-	-	-
6	Kota Balikpapan	-	-	-
7	Kota Bontang	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
12	Kab. Balangan	4.174.200	4.430.000	46.034.452
13	Kab. Tanah Bumbu	7.918.800	3.472.300	54.429.714
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	149.271.163
1	Kab. Berau	4.351.200	2.310.900	41.494.755
2	Kab. Kutai Kartanegara	12.070.200	2.902.500	196.579.724
3	Kab. Kutai Barat	1.999.200	76.500	26.642.483
4	Kab. Kutai Timur	8.305.200	1.692.700	51.969.449
5	Kab. Paser	4.599.000	549.400	62.258.770
6	Kota Balikpapan	7.851.000	2.024.300	79.484.344
7	Kota Bontang	4.624.200	2.292.500	24.344.022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kab. Balangan	1.134.000	7.360.920	-	-
13	Kab. Tanah Bumbu	1.779.000	2.119.544	-	-
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	2.775.000	1.288.667	1.800.000	1.677.000
1	Kab. Berau	83.797	8.577.153	-	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	-	27.428.297	-	-
3	Kab. Kutai Barat	1.299.000	11.320.277	450.000	-
4	Kab. Kutai Timur	1.824.000	10.199.166	-	-
5	Kab. Paser	1.191.000	6.507.778	450.000	-
6	Kota Balikpapan	1.187.648	-	-	-
7	Kota Bontang	302.913	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
12	Kab. Balangan	9.064.758	-	694.100	-
13	Kab. Tanah Bumbu	12.646.571	-	1.197.850	-
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	3.325.500	-	-	406.044
1	Kab. Berau	19.451.729	488.440	3.027.220	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	27.116.910	-	3.849.387	-
3	Kab. Kutai Barat	17.101.747	-	2.458.950	-
4	Kab. Kutai Timur	17.946.603	-	5.690.763	-
5	Kab. Paser	15.325.707	-	2.232.200	424.082
6	Kota Balikpapan	15.856.000	-	1.794.400	-
7	Kota Bontang	4.036.000	-	488.400	400.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
12	Kab. Balangan	1.246.000	2.321.772	358.000
13	Kab. Tanah Bumbu	3.119.000	2.940.057	358.000
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	3.571.520
1	Kab. Berau	1.994.000	3.098.690	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	5.439.000	4.490.085	-
3	Kab. Kutai Barat	1.363.000	3.649.752	-
4	Kab. Kutai Timur	3.517.000	3.331.620	-
5	Kab. Paser	2.396.000	2.485.975	360.500
6	Kota Balikpapan	612.000	1.191.961	-
7	Kota Bontang	394.000	669.440	360.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Kab. Balangan	900.949	-	-	77.719.151
13	Kab. Tanah Bumbu	1.197.853	-	-	91.178.689
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	1.671.072	-	-	961.411.837
1	Kab. Berau	1.115.816	-	-	85.993.700
2	Kab. Kutai Kartanegara	1.879.045	-	-	281.755.148
3	Kab. Kutai Barat	1.141.643	-	-	67.502.552
4	Kab. Kutai Timur	1.546.721	-	-	106.023.222
5	Kab. Paser	1.131.218	-	-	99.911.630
6	Kota Balikpapan	1.484.291	-	-	111.485.944
7	Kota Bontang	876.788	621.736	-	39.410.499



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kota Samarinda	-	-	-
9	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-
10	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	500.357.400	50.420.000	25.481.118
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-
2	Kab. Minahasa	-	-	-
3	Kab. Kepulauan Sangihe	-	-	-
4	Kota Bitung	-	-	-
5	Kota Manado	-	-	-
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
8	Kota Samarinda	9.286.200	6.146.200	134.702.535
9	Kab. Penajam Paser Utara	2.730.600	290.200	41.640.010
10	Kab. Mahakam Ulu	756.000	435.600	3.335.266
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	194.531.202
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.336.200	935.700	51.947.783
2	Kab. Minahasa	3.424.800	2.043.900	96.644.030
3	Kab. Kepulauan Sangihe	2.132.400	1.173.900	43.897.014
4	Kota Bitung	1.456.200	1.146.800	34.327.637
5	Kota Manado	3.630.600	796.300	92.612.538
6	Kab. Kepulauan Talaud	1.174.200	340.200	35.118.640



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kota Samarinda	1.476.000	-	-	-
9	Kab. Penajam Paser Utara	810.000	227.628	-	-
10	Kab. Mahakam Ulu	-	2.532.782	-	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	2.250.000	2.489.925	1.450.000	-
1	Kab. Bolaang Mongondow	729.000	1.959.236	-	-
2	Kab. Minahasa	508.900	1.679.146	-	-
3	Kab. Kepulauan Sangihe	729.000	5.799.063	-	-
4	Kota Bitung	303.268	-	-	-
5	Kota Manado	334.500	-	-	-
6	Kab. Kepulauan Talaud	762.000	4.738.948	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	Kota Samarinda	15.072.400	560.000	1.801.900	-
9	Kab. Penajam Paser Utara	11.283.239	-	560.000	-
10	Kab. Mahakam Ulu	6.113.809	-	1.305.660	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	3.821.250	-	-	384.217
1	Kab. Bolaang Mongondow	15.066.520	-	278.940	-
2	Kab. Minahasa	20.060.733	370.404	2.682.232	-
3	Kab. Kepulauan Sangihe	19.693.000	-	1.672.000	-
4	Kota Bitung	5.845.274	570.000	789.255	-
5	Kota Manado	9.990.000	-	639.180	-
6	Kab. Kepulauan Talaud	24.247.686	-	5.241.116	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
8	Kota Samarinda	2.334.000	2.130.331	-
9	Kab. Penajam Paser Utara	535.000	1.334.835	-
10	Kab. Mahakam Ulu	538.000	1.371.755	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	4.117.080
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.644.000	4.620.212	-
2	Kab. Minahasa	2.157.000	6.230.975	-
3	Kab. Kepulauan Sangihe	1.278.000	4.547.042	-
4	Kota Bitung	834.000	2.318.759	-
5	Kota Manado	1.403.000	3.111.302	-
6	Kab. Kepulauan Talaud	1.237.000	5.102.573	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	Kota Samarinda	1.397.146	621.736	-	175.528.448
9	Kab. Penajam Paser Utara	893.786	-	-	60.305.298
10	Kab. Mahakam Ulu	838.041	-	-	17.226.913
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	2.034.714	-	-	787.336.906
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.261.579	521.736	-	80.300.906
2	Kab. Minahasa	1.627.557	752.170	-	138.181.847
3	Kab. Kepulauan Sangihe	2.631.733	558.580	-	84.111.732
4	Kota Bitung	1.027.019	652.170	-	49.270.382
5	Kota Manado	1.405.304	521.736	-	114.444.460
6	Kab. Kepulauan Talaud	2.671.082	92.600	-	80.726.045



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kab. Minahasa Selatan	-	-	-
8	Kota Tomohon	-	-	-
9	Kab. Minahasa Utara	-	-	-
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	-
11	Kota Kotamobagu	-	-	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	-
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	-
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	602.920.000	78.985.000	29.350.525



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
7	Kab. Minahasa Selatan	2.229.000	726.900	66.866.012
8	Kota Tomohon	1.067.400	362.100	32.320.242
9	Kab. Minahasa Utara	1.601.400	1.405.300	50.669.107
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	701.400	78.900	21.769.924
11	Kota Kotamobagu	1.403.400	1.381.900	30.131.079
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.801.800	833.700	19.974.746
13	Kab. Minahasa Tenggara	2.075.400	498.600	33.128.202
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.395.600	456.600	15.180.126
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	831.000	768.900	14.179.407
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	156.470.058



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kab. Minahasa Selatan	489.000	472.734	-	-
8	Kota Tomohon	231.000	-	-	-
9	Kab. Minahasa Utara	567.000	1.591.133	-	-
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	507.000	762.850	-	-
11	Kota Kotamobagu	37.423	-	-	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	345.675	307.954	-	-
13	Kab. Minahasa Tenggara	294.850	592.547	-	-
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	33.733	1.069.475	-	-
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	420.000	1.691.046	-	-
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	3.663.000	2.193.995	1.450.000	1.677.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Kab. Minahasa Selatan	14.366.895	-	1.750.000	-
8	Kota Tomohon	4.802.735	570.000	336.115	-
9	Kab. Minahasa Utara	10.321.675	289.980	438.700	-
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	15.247.747	804.490	1.831.475	-
11	Kota Kotamobagu	3.475.652	840.000	680.863	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.362.464	-	1.675.100	-
13	Kab. Minahasa Tenggara	10.572.100	570.000	1.432.750	-
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.032.341	-	1.006.300	-
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6.949.367	-	1.415.450	-
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	3.554.250	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
7	Kab. Minahasa Selatan	1.890.000	4.366.817	-
8	Kota Tomohon	500.000	1.449.484	-
9	Kab. Minahasa Utara	1.516.000	3.230.107	-
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	726.000	2.887.703	-
11	Kota Kotamobagu	596.000	1.129.585	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	536.000	2.343.097	-
13	Kab. Minahasa Tenggara	1.283.000	3.728.809	-
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	420.000	1.872.186	-
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	488.000	1.881.691	-
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	3.787.720



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
7	Kab. Minahasa Selatan	1.284.961	652.170	-	95.094.489
8	Kota Tomohon	851.021	652.170	-	43.142.267
9	Kab. Minahasa Utara	1.074.743	652.170	-	73.357.315
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	918.101	-	-	46.235.590
11	Kota Kotamobagu	807.270	-	-	40.483.172
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	854.324	621.736	-	39.656.596
13	Kab. Minahasa Tenggara	1.022.572	752.170	-	55.951.000
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	827.691	521.736	-	28.815.788
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	803.630	621.736	-	30.050.227
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	1.802.882	-	-	885.854.430



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Banggai	-	-	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-
3	Kab. Buol	-	-	-
4	Kab. Toli-Toli	-	-	-
5	Kab. Donggala	-	-	-
6	Kab. Morowali	-	-	-
7	Kab. Poso	-	-	-
8	Kota Palu	-	-	-
9	Kab. Parigi Moutong	-	-	-
10	Kab. Tojo Una Una	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Banggai	4.948.200	598.800	97.483.399
2	Kab. Banggai Kepulauan	2.740.800	596.100	30.992.931
3	Kab. Buol	2.112.000	133.200	35.867.392
4	Kab. Toli-Toli	3.506.400	717.600	43.588.960
5	Kab. Donggala	4.944.600	629.700	74.946.720
6	Kab. Morowali	2.277.000	649.800	32.237.407
7	Kab. Poso	4.069.800	383.400	73.722.441
8	Kota Palu	4.200.000	1.543.900	95.631.867
9	Kab. Parigi Moutong	10.126.800	3.127.800	88.923.096
10	Kab. Tojo Una Una	2.290.200	634.800	31.241.763



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Banggai	1.605.000	1.779.713	450.000	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.410.000	3.285.144	-	-
3	Kab. Buol	830.640	3.918.592	-	-
4	Kab. Toli-Toli	-	1.581.470	-	-
5	Kab. Donggala	1.866.000	5.566.787	-	-
6	Kab. Morowali	798.000	3.104.165	-	-
7	Kab. Poso	1.535.641	3.694.137	-	-
8	Kota Palu	180.107	-	-	-
9	Kab. Parigi Moutong	1.692.000	-	-	-
10	Kab. Tojo Una Una	1.643.953	7.969.244	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kab. Banggai	24.881.538	419.700	614.134	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	12.939.299	349.000	1.496.200	-
3	Kab. Buol	11.280.215	308.400	2.255.165	-
4	Kab. Toli-Toli	14.600.891	303.460	886.500	-
5	Kab. Donggala	16.609.472	570.000	886.500	-
6	Kab. Morowali	8.328.636	316.200	1.543.320	-
7	Kab. Poso	19.907.181	-	9.481.090	-
8	Kota Palu	8.287.493	-	1.398.750	-
9	Kab. Parigi Moutong	24.376.460	522.000	1.448.695	-
10	Kab. Tojo Una Una	12.960.128	1.237.510	614.134	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
1	Kab. Banggai	2.931.000	6.884.040	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.497.000	3.723.989	-
3	Kab. Buol	1.964.000	3.103.640	-
4	Kab. Toli-Toli	2.048.000	3.045.579	-
5	Kab. Donggala	3.094.000	4.774.947	-
6	Kab. Morowali	1.318.000	2.623.850	-
7	Kab. Poso	2.460.000	4.831.535	358.000
8	Kota Palu	641.000	1.751.734	-
9	Kab. Parigi Moutong	4.093.000	7.395.438	-
10	Kab. Tojo Una Una	1.880.000	3.743.571	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Kab. Banggai	1.516.924	521.736	-	144.634.184
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.032.268	521.736	-	60.584.467
3	Kab. Buol	1.044.201	521.736	-	63.339.181
4	Kab. Toli-Toli	1.061.776	658.580	-	71.999.216
5	Kab. Donggala	1.366.470	658.580	-	115.913.776
6	Kab. Morowali	964.441	621.736	-	54.782.555
7	Kab. Poso	1.253.700	621.736	-	122.318.661
8	Kota Palu	1.154.242	521.736	-	115.310.829
9	Kab. Parigi Moutong	1.740.441	-	-	143.445.730
10	Kab. Tojo Una Una	1.017.790	798.225	-	66.031.318



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kab. Sigi	-	-	-
12	Kab. Banggai Laut	-	-	-
13	Kab. Morowali Utara	-	-	-
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	1.714.482.800	110.785.000	64.624.861
1	Kab. Bantaeng	-	-	-
2	Kab. Barru	-	-	-
3	Kab. Bone	-	-	-
4	Kab. Bulukumba	-	-	-
5	Kab. Enrekang	-	-	-
6	Kab. Gowa	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
11	Kab. Sigi	4.388.400	264.600	62.865.212
12	Kab. Banggai Laut	1.213.800	1.017.900	13.551.983
13	Kab. Morowali Utara	2.838.600	486.300	34.644.571
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	544.106.780
1	Kab. Bantaeng	2.545.200	2.796.100	63.730.490
2	Kab. Barru	3.681.000	2.305.800	72.278.163
3	Kab. Bone	13.787.400	6.610.600	210.786.727
4	Kab. Bulukumba	8.445.600	3.017.100	119.276.238
5	Kab. Enrekang	4.173.600	934.200	75.063.966
6	Kab. Gowa	6.931.200	1.729.000	148.270.816



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Kab. Sigi	-	3.670.605	-	-
12	Kab. Banggai Laut	367.988	2.167.288	-	-
13	Kab. Morowali Utara	589.950	5.059.894	-	-
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	7.035.000	4.094.499	3.950.000	-
1	Kab. Bantaeng	966.000	-	-	-
2	Kab. Barru	1.275.000	-	-	-
3	Kab. Bone	-	4.029.184	450.000	-
4	Kab. Bulukumba	1.040.750	267.866	-	-
5	Kab. Enrekang	1.281.000	2.836.545	-	-
6	Kab. Gowa	-	-	450.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
11	Kab. Sigi	21.246.072	-	2.321.105	-
12	Kab. Banggai Laut	7.210.491	570.000	1.085.800	-
13	Kab. Morowali Utara	13.629.213	-	2.037.600	-
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	4.935.000	-	-	-
1	Kab. Bantaeng	11.050.010	-	379.800	-
2	Kab. Barru	10.671.903	322.654	449.960	-
3	Kab. Bone	36.111.324	-	2.618.650	354.843
4	Kab. Bulukumba	17.503.754	-	1.343.765	-
5	Kab. Enrekang	12.740.926	883.800	1.789.795	-
6	Kab. Gowa	22.523.819	-	1.983.955	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
11	Kab. Sigi	2.000.000	4.628.036	-
12	Kab. Banggai Laut	597.000	2.041.626	-
13	Kab. Morowali Utara	1.279.000	3.131.885	-
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	5.040.900
1	Kab. Bantaeng	1.498.000	2.018.487	360.500
2	Kab. Barru	589.000	1.757.930	358.000
3	Kab. Bone	5.126.000	7.902.690	-
4	Kab. Bulukumba	3.377.000	2.852.112	448.000
5	Kab. Enrekang	2.317.000	3.386.977	-
6	Kab. Gowa	5.027.000	4.630.640	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
11	Kab. Sigi	1.275.156	658.580	-	103.317.766
12	Kab. Banggai Laut	849.868	558.580	-	31.232.324
13	Kab. Morowali Utara	961.437	558.580	-	65.217.030
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	1.650.969	-	-	2.460.705.809
1	Kab. Bantaeng	945.537	521.736	-	86.811.860
2	Kab. Barru	947.788	521.736	-	95.158.934
3	Kab. Bone	2.275.632	521.736	-	290.574.786
4	Kab. Bulukumba	1.391.497	521.736	-	159.485.418
5	Kab. Enrekang	1.145.235	621.736	-	107.174.780
6	Kab. Gowa	1.980.519	521.736	-	194.048.685



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kab. Jeneponto	-	-	-
8	Kab. Luwu	-	-	-
9	Kab. Luwu Utara	-	-	-
10	Kab. Maros	-	-	-
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	-	-	-
12	Kota Palopo	-	-	-
13	Kab. Luwu Timur	-	-	-
14	Kab. Pinrang	-	-	-
15	Kab. Sinjai	-	-	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
7	Kab. Jeneponto	4.597.200	2.428.500	84.375.553
8	Kab. Luwu	4.516.800	3.392.000	77.572.016
9	Kab. Luwu Utara	4.308.000	4.429.800	65.943.936
10	Kab. Maros	4.859.400	1.340.300	95.946.862
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	5.692.800	3.450.200	97.555.674
12	Kota Palopo	2.155.800	2.663.500	45.823.721
13	Kab. Luwu Timur	4.421.400	3.050.300	46.648.292
14	Kab. Pinrang	4.573.200	2.745.800	101.749.318
15	Kab. Sinjai	4.930.800	1.196.200	88.943.619
16	Kab. Kepulauan Selayar	3.064.200	1.204.600	50.250.089



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kab. Jeneponto	1.419.000	144.828	-	-
8	Kab. Luwu	1.743.000	9.394.871	-	-
9	Kab. Luwu Utara	963.000	5.024.631	-	-
10	Kab. Maros	834.000	699.654	450.000	-
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1.017.000	6.037.797	-	-
12	Kota Palopo	660.000	-	-	-
13	Kab. Luwu Timur	1.329.000	-	-	-
14	Kab. Pinrang	1.143.000	2.337.249	-	-
15	Kab. Sinjai	1.227.000	-	-	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	1.119.000	8.994.456	450.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Kab. Jeneponto	19.934.830	-	1.595.200	-
8	Kab. Luwu	20.627.700	-	1.298.400	-
9	Kab. Luwu Utara	13.084.030	-	1.676.970	-
10	Kab. Maros	12.308.237	-	1.016.850	-
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	21.760.270	-	1.335.230	329.342
12	Kota Palopo	7.639.180	-	322.100	-
13	Kab. Luwu Timur	14.453.723	-	2.651.120	-
14	Kab. Pinrang	15.138.050	550.000	1.239.600	-
15	Kab. Sinjai	14.317.359	-	391.920	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	14.052.677	300.780	1.181.025	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
7	Kab. Jeneponto	2.000.000	3.277.148	-
8	Kab. Luwu	3.500.000	5.692.357	-
9	Kab. Luwu Utara	2.601.000	3.469.002	-
10	Kab. Maros	3.226.000	3.430.835	-
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2.644.000	2.976.365	-
12	Kota Palopo	408.000	1.927.037	-
13	Kab. Luwu Timur	2.705.000	2.995.602	-
14	Kab. Pinrang	2.398.000	3.073.887	-
15	Kab. Sinjai	2.347.000	2.305.865	358.000
16	Kab. Kepulauan Selayar	1.329.000	2.738.277	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
7	Kab. Jeneponto	1.422.236	558.580	-	121.753.075
8	Kab. Luwu	1.552.985	521.736	-	129.811.865
9	Kab. Luwu Utara	1.322.247	-	-	102.822.616
10	Kab. Maros	1.417.792	521.736	-	126.051.666
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1.282.460	621.736	-	144.702.874
12	Kota Palopo	948.399	621.736	-	63.169.473
13	Kab. Luwu Timur	1.204.572	521.736	-	79.980.745
14	Kab. Pinrang	1.393.679	521.736	-	136.863.519
15	Kab. Sinjai	1.051.604	521.736	-	117.591.103
16	Kab. Kepulauan Selayar	983.155	621.736	-	86.288.995



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-
18	Kab. Soppeng	-	-	-
19	Kab. Takalar	-	-	-
20	Kab. Tana Toraja	-	-	-
21	Kab. Wajo	-	-	-
22	Kota Pare-pare	-	-	-
23	Kota Makassar	-	-	-
24	Kab. Toraja Utara	-	-	-
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	586.965.200	68.475.000	25.046.850
1	Kab. Buton	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
17	Kab. Sidenreng Rappang	6.253.200	1.690.100	89.636.872
18	Kab. Soppeng	3.204.600	1.588.400	98.643.285
19	Kab. Takalar	4.653.600	1.795.400	87.854.322
20	Kab. Tana Toraja	2.664.000	1.550.600	68.436.682
21	Kab. Wajo	7.572.000	531.000	119.001.721
22	Kota Pare-pare	1.955.400	1.484.200	50.411.517
23	Kota Makassar	12.006.000	4.027.300	211.110.295
24	Kab. Toraja Utara	2.268.000	806.000	64.228.438
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	220.843.155
1	Kab. Buton	2.487.600	621.000	34.732.919



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Kab. Sidenreng Rappang	909.000	29.010	-	-
18	Kab. Soppeng	1.275.000	-	-	-
19	Kab. Takalar	840.000	146.072	-	-
20	Kab. Tana Toraja	1.455.000	6.108.254	-	-
21	Kab. Wajo	1.350.000	-	-	-
22	Kota Pare-pare	864.000	-	-	-
23	Kota Makassar	1.968.000	-	600.000	-
24	Kab. Toraja Utara	1.206.000	3.556.619	450.000	-
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.961.000	2.767.787	1.450.000	1.677.000
1	Kab. Buton	558.050	236.387	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
17	Kab. Sidenreng Rappang	12.917.081	690.050	1.710.400	-
18	Kab. Soppeng	14.931.613	-	753.655	325.000
19	Kab. Takalar	13.506.705	-	961.260	-
20	Kab. Tana Toraja	19.848.159	-	2.152.210	-
21	Kab. Wajo	20.258.311	550.000	2.153.150	-
22	Kota Pare-pare	4.057.000	-	942.950	300.000
23	Kota Makassar	27.663.200	203.196	1.793.940	-
24	Kab. Toraja Utara	26.818.135	-	3.485.987	-
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.085.250	-	-	350.000
1	Kab. Buton	13.898.612	501.880	1.659.250	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
17	Kab. Sidenreng Rappang	586.000	2.852.795	-
18	Kab. Soppeng	1.902.000	2.060.142	360.500
19	Kab. Takalar	625.000	2.426.300	-
20	Kab. Tana Toraja	2.182.000	4.593.137	-
21	Kab. Wajo	1.629.000	3.988.287	-
22	Kota Pare-pare	486.000	875.938	-
23	Kota Makassar	2.698.000	3.412.627	-
24	Kab. Toraja Utara	2.594.000	5.113.055	358.000
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	4.119.060
1	Kab. Buton	1.301.000	2.491.990	448.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.225.787	-	-	118.500.295
17	Kab. Sidenreng Rappang	1.080.018	621.736	-	126.745.949
18	Kab. Soppeng	1.149.736	521.736	-	114.480.131
19	Kab. Takalar	1.298.997	913.038	-	111.202.077
20	Kab. Tana Toraja	1.623.893	621.736	-	159.279.098
21	Kab. Wajo	838.158	621.736	-	62.836.899
22	Kota Pare-pare	3.953.935	-	-	269.436.493
23	Kota Makassar	1.326.225	1.013.038	-	113.223.497
24	Kab. Toraja Utara	1.834.457	-	-	920.574.759
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	896.093	913.038	-	60.745.819
1	Kab. Buton				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kab. Konawe	-	-	-
3	Kab. Kolaka	-	-	-
4	Kab. Muna	-	-	-
5	Kota Kendari	-	-	-
6	Kota Bau-bau	-	-	-
7	Kab. Konawe Selatan	-	-	-
8	Kab. Bombana	-	-	-
9	Kab. Wakatobi	-	-	-
10	Kab. Kolaka Utara	-	-	-
11	Kab. Konawe Utara	-	-	-



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
2	Kab. Konawe	5.308.200	4.057.200	70.418.209
3	Kab. Kolaka	3.763.200	1.710.100	52.149.870
4	Kab. Muna	4.899.000	353.200	85.956.076
5	Kota Kendari	4.524.600	1.917.600	85.308.177
6	Kota Bau-bau	2.476.200	3.021.900	51.142.018
7	Kab. Konawe Selatan	2.785.200	2.810.200	71.623.811
8	Kab. Bombana	3.135.600	892.200	39.681.871
9	Kab. Wakatobi	2.796.000	2.953.600	35.386.224
10	Kab. Kolaka Utara	2.668.200	943.900	26.539.224
11	Kab. Konawe Utara	1.930.800	1.134.600	18.081.853



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Kab. Konawe	951.000	7.586.114	-	-
3	Kab. Kolaka	1.269.000	1.824.730	-	-
4	Kab. Muna	-	1.595.271	450.000	-
5	Kota Kendari	1.206.000	-	-	-
6	Kota Bau-bau	780.000	-	-	-
7	Kab. Konawe Selatan	1.714.900	3.817.163	-	-
8	Kab. Bombana	843.000	7.359.802	-	-
9	Kab. Wakatobi	957.000	530.950	-	-
10	Kab. Kolaka Utara	-	1.392.358	-	-
11	Kab. Konawe Utara	447.000	4.710.995	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Kab. Konawe	29.429.765	550.000	6.223.310	-
3	Kab. Kolaka	12.938.833	353.500	2.107.475	400.800
4	Kab. Muna	22.862.962	-	2.558.900	-
5	Kota Kendari	9.337.610	388.900	743.820	-
6	Kota Bau-bau	10.281.912	550.000	1.287.848	-
7	Kab. Konawe Selatan	21.876.731	457.560	1.005.150	-
8	Kab. Bombana	22.064.880	-	1.850.090	-
9	Kab. Wakatobi	18.990.321	550.000	859.300	-
10	Kab. Kolaka Utara	14.571.964	-	827.100	-
11	Kab. Konawe Utara	14.042.087	-	966.510	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
2	Kab. Konawe	2.479.000	7.820.243	-
3	Kab. Kolaka	1.999.000	3.888.155	-
4	Kab. Muna	2.086.000	6.083.791	-
5	Kota Kendari	579.000	2.749.349	-
6	Kota Bau-bau	369.000	2.096.713	-
7	Kab. Konawe Selatan	2.908.000	7.539.261	-
8	Kab. Bombana	1.991.000	5.217.633	-
9	Kab. Wakatobi	1.406.000	2.546.487	-
10	Kab. Kolaka Utara	1.665.000	4.297.778	448.000
11	Kab. Konawe Utara	501.000	3.548.078	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	Kab. Konawe	1.463.378	-	-	136.286.419
3	Kab. Kolaka	1.241.228	-	-	83.645.891
4	Kab. Muna	1.317.245	75.072	-	128.237.517
5	Kota Kendari	1.183.986	621.736	-	108.560.778
6	Kota Bau-bau	921.633	1.013.038	-	73.940.262
7	Kab. Konawe Selatan	1.499.576	913.038	-	118.950.590
8	Kab. Bombana	1.260.645	-	-	84.296.721
9	Kab. Wakatobi	910.820	1.013.038	-	68.899.740
10	Kab. Kolaka Utara	1.091.283	-	-	54.444.807
11	Kab. Konawe Utara	891.383	75.072	-	46.329.378



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kab. Buton Utara	-	-	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	-
14	Kab. Kolaka Timur	-	-	-
15	Kab. Muna Barat	-	-	-
16	Kab. Buton Tengah	-	-	-
17	Kab. Buton Selatan	-	-	-
XXII	Provinsi Bali	813.343.800	8.060.000	22.458.159
1	Kab. Badung	-	-	-
2	Kab. Bangli	-	-	-
3	Kab. Buleleng	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
12	Kab. Buton Utara	2.550.000	969.300	20.601.647
13	Kab. Konawe Kepulauan	939.000	599.400	6.342.142
14	Kab. Kolaka Timur	2.391.000	551.100	24.502.610
15	Kab. Muna Barat	2.711.400	540.800	26.399.399
16	Kab. Buton Tengah	2.051.400	1.375.400	23.396.627
17	Kab. Buton Selatan	1.972.800	131.700	22.407.457
XXII	Provinsi Bali	-	-	219.466.573
1	Kab. Badung	8.874.600	1.571.500	103.916.071
2	Kab. Bangli	2.230.200	97.200	50.975.136
3	Kab. Buleleng	6.570.600	1.831.600	159.772.280



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Kab. Buton Utara	672.000	2.606.211	-	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	381.000	1.472.226	-	-
14	Kab. Kolaka Timur	338.150	3.365.704	-	-
15	Kab. Muna Barat	-	2.854.956	-	-
16	Kab. Buton Tengah	354.000	1.128.582	-	-
17	Kab. Buton Selatan	360.000	860.608	-	-
XXII	Provinsi Bali	2.442.000	-	2.900.000	1.677.000
1	Kab. Badung	1.536.000	-	450.000	-
2	Kab. Bangli	1.248.000	-	-	-
3	Kab. Buleleng	2.277.000	924.879	450.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
12	Kab. Buton Utara	12.407.000	-	1.747.440	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	6.937.583	285.000	1.005.150	-
14	Kab. Kolaka Timur	10.436.595	-	1.924.190	-
15	Kab. Muna Barat	13.225.381	-	1.487.762	-
16	Kab. Buton Tengah	10.340.786	550.000	1.990.900	-
17	Kab. Buton Selatan	7.686.069	-	1.797.900	-
XXII	Provinsi Bali	2.583.000	-	-	-
1	Kab. Badung	8.946.320	-	204.852	-
2	Kab. Bangli	9.084.000	-	538.000	-
3	Kab. Buleleng	16.703.000	530.000	495.275	315.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
12	Kab. Buton Utara	464.000	2.004.075	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	589.000	2.138.684	-
14	Kab. Kolaka Timur	1.779.000	3.446.263	-
15	Kab. Muna Barat	867.000	2.878.581	-
16	Kab. Buton Tengah	1.245.000	2.126.712	-
17	Kab. Buton Selatan	1.288.000	2.053.690	-
XXII	Provinsi Bali	-	-	5.468.830
1	Kab. Badung	3.322.000	1.571.437	407.500
2	Kab. Bangli	499.000	1.261.115	407.500
3	Kab. Buleleng	458.000	2.967.270	527.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Kab. Buton Utara	839.534	-	-	44.861.207
13	Kab. Konawe Kepulauan	980.805	-	-	21.669.990
14	Kab. Kolaka Timur	1.006.211	621.736	-	50.362.559
15	Kab. Muna Barat	845.625	621.736	-	52.432.640
16	Kab. Buton Tengah	879.886	521.736	-	45.961.029
17	Kab. Buton Selatan	868.163	521.736	-	39.948.123
XXII	Provinsi Bali	1.830.896	-	-	1.080.230.258
1	Kab. Badung	1.003.751	652.170	-	132.456.201
2	Kab. Bangli	945.264	752.170	-	68.037.585
3	Kab. Buleleng	1.778.719	752.170	-	196.353.293



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kab. Gianyar	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	-
6	Kab. Karangasem	-	-	-
7	Kab. Klungkung	-	-	-
8	Kab. Tabanan	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	871.003.200	45.970.000	34.923.010
1	Kab. Bima	-	-	-
2	Kab. Dompu	-	-	-
3	Kab. Lombok Barat	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
4	Kab. Gianyar	5.883.600	1.130.400	101.743.275
5	Kab. Jembrana	3.088.200	633.600	53.335.375
6	Kab. Karangasem	3.978.000	1.937.400	127.101.727
7	Kab. Klungkung	3.148.200	377.800	66.954.135
8	Kab. Tabanan	5.349.000	1.125.900	116.284.336
9	Kota Denpasar	13.180.200	2.573.500	84.718.018
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	228.012.067
1	Kab. Bima	12.513.600	10.711.500	132.035.111
2	Kab. Dompu	5.028.000	5.307.600	55.428.818
3	Kab. Lombok Barat	8.715.600	10.231.700	118.619.348



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kab. Gianyar	1.467.000	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	450.000	-
6	Kab. Karangasem	2.496.000	-	-	-
7	Kab. Klungkung	1.113.000	-	450.000	-
8	Kab. Tabanan	-	-	450.000	-
9	Kota Denpasar	1.890.000	-	-	-
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.090.000	1.055.379	1.800.000	1.677.000
1	Kab. Bima	1.749.000	3.088.869	450.000	-
2	Kab. Dompu	1.653.000	-	-	-
3	Kab. Lombok Barat	1.188.000	1.694.472	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Kab. Gianyar	11.408.998	-	346.185	315.000
5	Kab. Jembrana	7.845.085	-	863.580	-
6	Kab. Karangasem	9.460.191	530.000	541.260	300.000
7	Kab. Klungkung	7.007.852	530.000	356.124	-
8	Kab. Tabanan	15.596.000	530.000	1.299.300	-
9	Kota Denpasar	6.427.385	-	731.185	-
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.001.427	-	-	456.700
1	Kab. Bima	19.423.122	540.000	1.852.960	-
2	Kab. Dompu	9.589.052	-	437.860	-
3	Kab. Lombok Barat	16.115.456	489.618	1.794.731	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
4	Kab. Gianyar	2.773.000	1.899.860	502.500
5	Kab. Jembrana	535.000	1.258.875	377.500
6	Kab. Karangasem	632.000	2.104.227	502.500
7	Kab. Klungkung	477.000	1.206.815	437.500
8	Kab. Tabanan	1.706.000	2.863.670	500.000
9	Kota Denpasar	598.000	1.024.047	472.500
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	3.994.240
1	Kab. Bima	2.183.000	5.707.381	547.600
2	Kab. Dompu	2.043.000	2.651.821	-
3	Kab. Lombok Barat	1.783.000	3.529.747	546.400



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
4	Kab. Gianyar	1.311.468	652.170	-	129.433.456
5	Kab. Jembrana	1.078.094	752.170	-	70.217.479
6	Kab. Karangasem	1.415.222	652.170	-	151.650.697
7	Kab. Klungkung	890.608	-	-	82.949.034
8	Kab. Tabanan	1.318.859	752.170	-	147.775.235
9	Kota Denpasar	1.438.898	-	-	113.053.733
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.716.045	100.000	-	1.196.799.068
1	Kab. Bima	1.667.254	798.225	-	193.267.622
2	Kab. Dompu	1.071.137	798.225	-	84.008.513
3	Kab. Lombok Barat	1.834.300	977.515	-	167.519.887



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kab. Lombok Tengah	-	-	-
5	Kab. Lombok Timur	-	-	-
6	Kab. Sumbawa	-	-	-
7	Kota Mataram	-	-	-
8	Kota Bima	-	-	-
9	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-
10	Kab. Lombok Utara	-	-	-
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.368.123.400	210.210.000	49.018.715
1	Kab. Alor	-	-	-
2	Kab. Belu	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
4	Kab. Lombok Tengah	22.734.600	5.546.300	168.236.177
5	Kab. Lombok Timur	23.393.400	6.928.100	231.556.578
6	Kab. Sumbawa	12.266.400	1.794.100	108.963.993
7	Kota Mataram	5.752.200	899.300	77.146.877
8	Kota Bima	3.478.800	1.469.900	46.515.035
9	Kab. Sumbawa Barat	4.291.200	348.300	37.297.984
10	Kab. Lombok Utara	3.514.800	3.234.500	34.313.471
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	204.801.963
1	Kab. Alor	2.116.200	2.353.700	24.643.421
2	Kab. Belu	3.481.200	1.792.500	37.271.547



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kab. Lombok Tengah	1.231.088	766.491	-	-
5	Kab. Lombok Timur	1.940.853	1.444.540	-	-
6	Kab. Sumbawa	1.569.000	3.546.606	450.000	-
7	Kota Mataram	888.000	-	-	-
8	Kota Bima	945.000	-	-	-
9	Kab. Sumbawa Barat	791.350	442.206	-	-
10	Kab. Lombok Utara	771.000	766.491	-	-
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7.536.000	5.856.544	1.450.000	1.677.000
1	Kab. Alor	1.252.500	10.191.357	450.000	-
2	Kab. Belu	1.030.938	4.351.756	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Kab. Lombok Tengah	23.533.445	-	1.705.250	-
5	Kab. Lombok Timur	31.303.426	-	2.260.815	-
6	Kab. Sumbawa	24.472.878	540.000	3.729.300	-
7	Kota Mataram	6.878.789	-	678.600	-
8	Kota Bima	4.137.713	-	1.356.590	377.300
9	Kab. Sumbawa Barat	9.207.720	-	-	-
10	Kab. Lombok Utara	8.101.790	-	1.278.983	-
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.575.000	-	-	-
1	Kab. Alor	27.316.937	888.150	2.689.956	-
2	Kab. Belu	20.659.600	-	1.468.075	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
4	Kab. Lombok Tengah	2.906.000	4.166.369	-
5	Kab. Lombok Timur	2.431.000	6.915.569	546.400
6	Kab. Sumbawa	2.748.000	6.929.455	446.800
7	Kota Mataram	1.282.000	1.803.055	359.000
8	Kota Bima	538.000	1.471.973	357.000
9	Kab. Sumbawa Barat	1.914.000	2.545.119	446.800
10	Kab. Lombok Utara	408.000	1.690.888	440.000
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	4.238.780
1	Kab. Alor	2.667.000	5.324.060	-
2	Kab. Belu	2.286.000	3.459.241	548.400



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
4	Kab. Lombok Tengah	2.766.096	977.515	-	234.569.331
5	Kab. Lombok Timur	3.364.729	977.515	-	313.062.925
6	Kab. Sumbawa	1.786.247	698.225	-	169.941.004
7	Kota Mataram	1.203.950	913.038	-	97.804.809
8	Kota Bima	886.280	521.736	-	62.055.327
9	Kab. Sumbawa Barat	959.720	658.580	-	58.902.979
10	Kab. Lombok Utara	1.029.718	977.515	-	56.527.156
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.334.219	-	-	1.859.821.621
1	Kab. Alor	1.455.886	698.225	-	82.047.392
2	Kab. Belu	1.252.079	558.580	-	78.159.916



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kab. Ende	-	-	-
4	Kab. Flores Timur	-	-	-
5	Kab. Kupang	-	-	-
6	Kab. Lembata	-	-	-
7	Kab. Manggarai	-	-	-
8	Kab. Ngada	-	-	-
9	Kab. Sikka	-	-	-
10	Kab. Sumba Barat	-	-	-
11	Kab. Sumba Timur	-	-	-
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
3	Kab. Ende	4.016.400	150.000	55.293.156
4	Kab. Flores Timur	3.710.400	252.000	50.982.795
5	Kab. Kupang	3.780.600	1.477.200	65.223.204
6	Kab. Lembata	2.035.800	563.100	23.460.596
7	Kab. Manggarai	3.081.000	2.561.900	59.720.808
8	Kab. Ngada	1.697.400	474.300	34.481.859
9	Kab. Sikka	5.885.400	595.500	53.702.165
10	Kab. Sumba Barat	2.705.400	1.322.600	13.454.256
11	Kab. Sumba Timur	1.740.600	22.500	40.219.916
12	Kab. Timor Tengah Selatan	8.076.600	837.600	55.606.994



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kab. Ende	1.995.000	5.876.351	-	-
4	Kab. Flores Timur	2.475.000	1.738.277	-	-
5	Kab. Kupang	2.156.050	5.679.675	-	-
6	Kab. Lembata	1.380.110	1.000.209	-	-
7	Kab. Manggarai	1.788.000	4.050.213	-	-
8	Kab. Ngada	1.374.000	2.550.758	-	-
9	Kab. Sikka	2.559.000	5.614.470	-	-
10	Kab. Sumba Barat	1.050.000	-	-	-
11	Kab. Sumba Timur	2.166.000	9.462.340	450.000	-
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2.910.000	7.596.959	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Kab. Ende	27.376.000	-	1.805.650	-
4	Kab. Flores Timur	21.260.073	-	2.767.550	-
5	Kab. Kupang	29.787.200	301.950	3.156.956	-
6	Kab. Lembata	11.088.550	338.150	216.580	-
7	Kab. Manggarai	24.416.335	-	1.900.000	-
8	Kab. Ngada	14.590.040	-	560.070	-
9	Kab. Sikka	22.493.643	-	2.403.100	380.000
10	Kab. Sumba Barat	11.114.535	550.000	629.463	-
11	Kab. Sumba Timur	25.226.329	-	1.585.570	-
12	Kab. Timor Tengah Selatan	33.556.900	358.270	3.339.504	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
3	Kab. Ende	2.560.000	6.822.168	548.400
4	Kab. Flores Timur	2.423.000	5.839.550	450.500
5	Kab. Kupang	3.624.000	5.654.012	-
6	Kab. Lembata	1.566.000	3.347.146	447.600
7	Kab. Manggarai	1.830.000	3.864.182	444.800
8	Kab. Ngada	1.625.000	3.788.711	358.000
9	Kab. Sikka	2.938.000	4.792.185	360.500
10	Kab. Sumba Barat	1.657.000	1.994.579	-
11	Kab. Sumba Timur	2.956.000	5.922.416	444.800
12	Kab. Timor Tengah Selatan	4.068.000	8.670.758	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	Kab. Ende	1.414.035	-	-	107.857.160
4	Kab. Flores Timur	1.348.913	621.736	-	93.869.794
5	Kab. Kupang	1.652.411	558.580	-	123.051.838
6	Kab. Lembata	1.034.797	658.580	-	47.137.218
7	Kab. Manggarai	1.254.823	1.077.515	-	105.989.576
8	Kab. Ngada	1.140.510	913.038	-	63.553.686
9	Kab. Sikka	1.534.505	621.736	-	103.880.204
10	Kab. Sumba Barat	984.663	652.170	-	36.114.666
11	Kab. Sumba Timur	1.371.466	521.736	-	92.089.673
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2.006.781	521.736	-	127.550.102



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-
14	Kota Kupang	-	-	-
15	Kab. Rote Ndao	-	-	-
16	Kab. Manggarai Barat	-	-	-
17	Kab. Nagekeo	-	-	-
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-
19	Kab. Sumba Tengah	-	-	-
20	Kab. Manggarai Timur	-	-	-
21	Kab. Sabu Raijua	-	-	-
22	Kab. Malaka	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.562.200	684.500	50.241.923
14	Kota Kupang	5.565.000	4.236.900	70.235.809
15	Kab. Rote Ndao	1.242.000	1.114.600	30.933.342
16	Kab. Manggarai Barat	1.359.600	745.800	43.633.014
17	Kab. Nagekeo	1.898.400	528.800	27.423.971
18	Kab. Sumba Barat Daya	2.217.600	22.500	30.543.421
19	Kab. Sumba Tengah	2.009.400	1.007.000	10.718.258
20	Kab. Manggarai Timur	1.397.400	36.600	41.845.887
21	Kab. Sabu Raijua	2.051.400	482.300	11.201.424
22	Kab. Malaka	2.139.000	22.500	27.650.002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Kab. Timor Tengah Utara	2.445.000	2.423.684	-	-
14	Kota Kupang	1.577.700	-	-	-
15	Kab. Rote Ndao	1.959.000	4.274.202	-	-
16	Kab. Manggarai Barat	1.854.000	15.190.206	-	-
17	Kab. Nagekeo	1.962.000	5.200.948	-	-
18	Kab. Sumba Barat Daya	1.265.350	21.476.242	-	-
19	Kab. Sumba Tengah	1.212.000	1.301.085	-	-
20	Kab. Manggarai Timur	2.073.000	16.088.733	-	-
21	Kab. Sabu Raijua	926.200	3.347.218	-	-
22	Kab. Malaka	1.521.000	1.822.497	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	Kab. Timor Tengah Utara	30.979.626	550.000	3.548.550	-
14	Kota Kupang	7.591.959	340.930	767.061	377.300
15	Kab. Rote Ndao	14.444.414	550.000	3.210.199	-
16	Kab. Manggarai Barat	17.800.062	527.080	336.042	-
17	Kab. Nagekeo	9.064.694	550.000	796.380	-
18	Kab. Sumba Barat Daya	12.381.715	-	1.066.115	-
19	Kab. Sumba Tengah	10.429.951	531.720	-	-
20	Kab. Manggarai Timur	25.072.000	-	3.758.950	-
21	Kab. Sabu Raijua	7.903.206	550.000	-	-
22	Kab. Malaka	20.760.693	515.420	969.350	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
13	Kab. Timor Tengah Utara	2.708.000	6.910.148	548.400
14	Kota Kupang	616.000	1.775.821	448.000
15	Kab. Rote Ndao	2.984.000	3.083.239	-
16	Kab. Manggarai Barat	3.476.000	3.592.344	-
17	Kab. Nagekeo	1.398.000	2.599.118	478.400
18	Kab. Sumba Barat Daya	4.391.000	3.952.830	-
19	Kab. Sumba Tengah	3.053.000	1.800.675	-
20	Kab. Manggarai Timur	2.064.000	3.539.646	444.800
21	Kab. Sabu Raijua	1.310.000	1.994.837	-
22	Kab. Malaka	2.060.000	3.133.187	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
13	Kab. Timor Tengah Utara	1.697.556	-	-	106.299.587
14	Kota Kupang	1.294.183	621.736	-	95.448.399
15	Kab. Rote Ndao	1.077.350	698.225	-	65.570.571
16	Kab. Manggarai Barat	1.228.213	913.038	-	90.655.399
17	Kab. Nagekeo	1.029.454	652.170	-	53.582.335
18	Kab. Sumba Barat Daya	1.321.673	652.170	-	79.290.616
19	Kab. Sumba Tengah	878.881	652.170	-	33.594.140
20	Kab. Manggarai Timur	1.201.732	913.038	-	98.435.786
21	Kab. Sabu Raijua	919.962	-	-	30.686.547
22	Kab. Malaka	941.516	-	-	61.535.165



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXV	Provinsi Maluku	424.844.000	59.820.000	19.657.511
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-
2	Kab. Maluku Tengah	-	-	-
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-
4	Kab. Buru	-	-	-
5	Kota Ambon	-	-	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-
9	Kota Tual	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
XXV	Provinsi Maluku	-	-	117.440.299
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.084.800	2.472.000	23.160.364
2	Kab. Maluku Tengah	3.542.400	892.200	102.413.561
3	Kab. Maluku Tenggara	2.319.000	1.482.900	18.250.320
4	Kab. Buru	3.256.800	579.300	34.138.102
5	Kota Ambon	2.748.000	3.227.700	87.352.586
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.769.400	265.300	41.431.899
7	Kab. Seram Bagian Timur	898.800	22.500	9.273.872
8	Kab. Kepulauan Aru	999.000	22.500	11.557.430
9	Kota Tual	659.400	22.500	10.256.976



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXV	Provinsi Maluku	6.330.000	8.084.979	1.450.000	1.677.000
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.152.000	9.023.684	-	-
2	Kab. Maluku Tengah	3.741.000	8.258.525	-	-
3	Kab. Maluku Tenggara	1.104.000	2.540.205	-	-
4	Kab. Buru	1.722.000	9.019.013	-	-
5	Kota Ambon	2.427.000	659.282	-	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	2.670.000	9.765.022	-	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	966.000	16.913.882	-	-
8	Kab. Kepulauan Aru	1.332.000	18.722.159	-	-
9	Kota Tual	522.000	1.706.128	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
XXV	Provinsi Maluku	3.834.750	-	-	-
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	15.856.000	600.000	3.000.000	-
2	Kab. Maluku Tengah	40.515.309	372.440	5.324.588	-
3	Kab. Maluku Tenggara	14.050.969	-	2.641.515	-
4	Kab. Buru	11.639.929	-	1.418.540	-
5	Kota Ambon	13.823.360	-	3.259.740	350.000
6	Kab. Seram Bagian Barat	21.794.855	-	1.822.993	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	23.161.300	-	2.517.700	-
8	Kab. Kepulauan Aru	29.566.000	600.000	2.797.270	-
9	Kota Tual	10.101.113	-	1.781.664	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
XXV	Provinsi Maluku	-	-	4.618.340
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.802.000	2.812.471	-
2	Kab. Maluku Tengah	3.507.000	5.149.847	-
3	Kab. Maluku Tenggara	1.627.000	3.862.511	-
4	Kab. Buru	1.587.000	2.517.187	-
5	Kota Ambon	1.476.000	1.583.980	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	2.036.000	3.131.822	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.455.000	4.377.223	-
8	Kab. Kepulauan Aru	1.343.000	3.030.824	-
9	Kota Tual	623.000	1.317.845	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
XXV	Provinsi Maluku	2.197.800	-	-	649.954.679
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.426.452	558.580	-	62.948.351
2	Kab. Maluku Tengah	1.914.928	558.580	-	176.190.378
3	Kab. Maluku Tenggara	1.318.124	621.736	-	49.818.280
4	Kab. Buru	1.307.721	558.580	-	67.744.172
5	Kota Ambon	1.268.467	621.736	-	118.797.851
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.463.703	558.580	-	86.709.574
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.502.520	658.580	-	61.747.377
8	Kab. Kepulauan Aru	1.537.370	-	-	71.507.553
9	Kota Tual	925.019	521.736	-	28.437.381



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-
11	Kab. Buru Selatan	-	-	-
XXVI	Provinsi Papua	620.144.000	84.150.000	19.028.198
1	Kab. Biak Numfor	-	-	-
2	Kab. Jayapura	-	-	-
3	Kab. Jayawijaya	-	-	-
4	Kab. Merauke	-	-	-
5	Kab. Mimika	-	-	-
6	Kab. Nabire	-	-	-
7	Kab. Paniai	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
10	Kab. Maluku Barat Daya	1.141.800	87.200	4.755.379
11	Kab. Buru Selatan	1.447.800	621.300	3.849.833
XXVI	Provinsi Papua	-	-	103.314.133
1	Kab. Biak Numfor	1.055.400	242.600	19.694.749
2	Kab. Jayapura	2.193.000	2.202.200	28.271.330
3	Kab. Jayawijaya	924.000	1.820.600	12.374.770
4	Kab. Merauke	2.016.000	1.360.000	36.836.479
5	Kab. Mimika	2.998.800	2.288.100	19.192.064
6	Kab. Nabire	2.239.200	645.600	26.643.549
7	Kab. Paniai	424.800	98.100	5.723.138



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	13.544.366	-	-
11	Kab. Buru Selatan	810.000	9.519.168	-	-
XXVI	Provinsi Papua	4.518.000	8.262.759	1.450.000	1.677.000
1	Kab. Biak Numfor	837.000	4.473.993	-	-
2	Kab. Jayapura	909.000	3.049.878	-	-
3	Kab. Jayawijaya	546.000	5.793.436	-	-
4	Kab. Merauke	1.296.000	8.221.500	-	-
5	Kab. Mimika	893.150	2.507.935	-	-
6	Kab. Nabire	720.000	2.392.016	-	-
7	Kab. Paniai	249.900	3.215.955	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	Kab. Maluku Barat Daya	25.644.803	600.000	4.100.910	-
11	Kab. Buru Selatan	13.147.463	600.000	896.495	-
XXVI	Provinsi Papua	5.250.000	-	-	459.300
1	Kab. Biak Numfor	22.939.398	-	1.788.930	-
2	Kab. Jayapura	20.738.983	558.900	974.300	-
3	Kab. Jayawijaya	17.002.728	620.000	700.000	-
4	Kab. Merauke	24.761.278	-	3.778.098	-
5	Kab. Mimika	13.730.327	-	1.121.203	-
6	Kab. Nabire	32.489.947	620.000	1.400.000	-
7	Kab. Paniai	23.011.959	479.242	1.069.618	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
10	Kab. Maluku Barat Daya	1.368.000	3.437.677	-
11	Kab. Buru Selatan	1.301.000	1.900.009	-
XXVI	Provinsi Papua	-	-	4.366.070
1	Kab. Biak Numfor	1.720.000	6.919.713	-
2	Kab. Jayapura	1.497.000	4.424.960	-
3	Kab. Jayawijaya	1.478.000	9.778.602	-
4	Kab. Merauke	2.339.000	5.293.285	-
5	Kab. Mimika	2.421.000	4.662.927	452.470
6	Kab. Nabire	1.680.000	3.963.381	-
7	Kab. Paniai	1.655.000	6.150.451	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
10	Kab. Maluku Barat Daya	1.496.123	-	-	56.176.258
11	Kab. Buru Selatan	1.080.690	558.580	-	35.732.338
XXVI	Provinsi Papua	3.429.106	-	-	856.048.566
1	Kab. Biak Numfor	1.626.857	658.580	-	61.957.220
2	Kab. Jayapura	1.875.331	521.736	-	67.216.618
3	Kab. Jayawijaya	2.576.149	558.580	-	54.172.865
4	Kab. Merauke	1.789.163	558.580	-	88.249.383
5	Kab. Mimika	1.660.610	621.736	-	52.550.322
6	Kab. Nabire	1.510.374	558.580	-	74.862.647
7	Kab. Paniai	1.954.980	558.580	-	44.591.723



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kab. Puncak Jaya	-	-	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-
10	Kota Jayapura	-	-	-
11	Kab. Sarmi	-	-	-
12	Kab. Keerom	-	-	-
13	Kab. Yahukimo	-	-	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-
15	Kab. Tolikara	-	-	-
16	Kab. Boven Digoel	-	-	-
17	Kab. Mappi	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
8	Kab. Puncak Jaya	172.200	22.500	994.182
9	Kab. Kepulauan Yapen	637.200	50.400	15.677.008
10	Kota Jayapura	3.281.400	1.710.900	38.270.698
11	Kab. Sarmi	373.800	101.400	6.981.200
12	Kab. Keerom	1.088.400	271.300	17.493.471
13	Kab. Yahukimo	164.400	100.000	1.860.657
14	Kab. Pegunungan Bintang	142.800	22.500	4.937.946
15	Kab. Tolikara	7.200	42.700	537.343
16	Kab. Boven Digoel	282.600	120.600	4.227.174
17	Kab. Mappi	126.000	22.500	7.227.084



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kab. Puncak Jaya	207.000	3.201.948	-	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	804.000	7.163.829	-	-
10	Kota Jayapura	1.269.000	68.670	-	-
11	Kab. Sarmi	366.000	3.382.268	-	-
12	Kab. Keerom	-	4.359.186	-	-
13	Kab. Yahukimo	210.000	4.609.120	-	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	147.000	6.571.655	-	-
15	Kab. Tolikara	204.000	4.645.601	-	-
16	Kab. Boven Digoel	765.000	3.477.670	-	-
17	Kab. Mappi	152.050	4.431.300	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	Kab. Puncak Jaya	11.066.234	620.000	-	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	16.790.275	-	679.010	-
10	Kota Jayapura	8.487.373	-	1.795.380	-
11	Kab. Sarmi	10.414.808	620.000	1.178.300	-
12	Kab. Keerom	13.112.524	-	1.646.400	-
13	Kab. Yahukimo	38.623.387	-	1.295.825	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	35.724.826	-	946.092	-
15	Kab. Tolikara	31.063.009	620.000	770.860	-
16	Kab. Boven Digoel	23.078.367	743.000	2.581.900	-
17	Kab. Mappi	15.022.128	-	3.306.380	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
8	Kab. Puncak Jaya	1.431.000	7.427.520	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	1.247.000	4.530.750	-
10	Kota Jayapura	1.675.000	1.561.608	-
11	Kab. Sarmi	393.000	3.034.209	-
12	Kab. Keerom	449.000	3.178.921	-
13	Kab. Yahukimo	1.609.000	13.259.561	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	1.244.000	8.023.017	-
15	Kab. Tolikara	1.298.000	12.323.900	-
16	Kab. Boven Digoel	1.427.000	4.549.357	-
17	Kab. Mappi	1.489.000	4.573.114	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	Kab. Puncak Jaya	1.518.021	-	-	26.660.605
9	Kab. Kepulauan Yapen	1.350.563	658.580	-	49.588.615
10	Kota Jayapura	1.411.070	621.736	-	60.152.835
11	Kab. Sarmi	1.333.196	-	-	28.178.181
12	Kab. Keerom	1.266.274	-	-	42.865.476
13	Kab. Yahukimo	3.593.904	558.580	-	65.884.434
14	Kab. Pegunungan Bintang	2.873.322	-	-	60.633.158
15	Kab. Tolikara	3.638.007	558.580	-	55.709.200
16	Kab. Boven Digoel	1.751.523	558.580	-	43.562.771
17	Kab. Mappi	1.619.469	-	-	37.969.025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Kab. Asmat	-	-	-
19	Kab. Waropen	-	-	-
20	Kab. Supiori	-	-	-
21	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-
23	Kab. Yalimo	-	-	-
24	Kab. Lanny Jaya	-	-	-
25	Kab. Nduga	-	-	-
26	Kab. Dogiyai	-	-	-
27	Kab. Puncak	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
18	Kab. Asmat	69.000	22.500	5.557.010
19	Kab. Waropen	189.600	95.400	5.223.165
20	Kab. Supiori	669.000	472.500	4.062.614
21	Kab. Mamberamo Raya	60.000	495.000	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	191.400	22.500	-
23	Kab. Yalimo	51.600	22.500	-
24	Kab. Lanny Jaya	64.200	308.700	-
25	Kab. Nduga	80.400	22.500	-
26	Kab. Dogiyai	13.200	22.500	2.727.003
27	Kab. Puncak	7.200	180.900	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Kab. Asmat	549.000	10.621.499	-	-
19	Kab. Waropen	246.000	3.723.083	-	-
20	Kab. Supiori	552.000	2.498.394	-	-
21	Kab. Mamberamo Raya	159.000	2.457.686	-	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	96.000	192.117	-	-
23	Kab. Yalimo	231.000	1.259.036	-	-
24	Kab. Lanny Jaya	162.000	4.952.626	-	-
25	Kab. Nduga	192.000	4.167.220	-	-
26	Kab. Dogiyai	120.000	4.152.706	-	-
27	Kab. Puncak	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
18	Kab. Asmat	17.339.978	620.000	981.124	-
19	Kab. Waropen	11.812.693	-	959.800	-
20	Kab. Supiori	6.648.000	624.680	926.900	-
21	Kab. Mamberamo Raya	9.747.505	-	665.000	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	7.272.122	620.000	1.044.000	-
23	Kab. Yalimo	10.232.581	-	1.026.850	-
24	Kab. Lanny Jaya	12.749.742	-	695.390	-
25	Kab. Nduga	10.138.342	-	695.390	-
26	Kab. Dogiyai	12.539.457	-	860.000	-
27	Kab. Puncak	11.388.526	-	988.300	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
18	Kab. Asmat	1.585.000	5.376.956	-
19	Kab. Waropen	308.000	3.042.005	-
20	Kab. Supiori	579.000	1.746.843	-
21	Kab. Mamberamo Raya	630.000	2.065.404	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	664.000	1.804.924	-
23	Kab. Yalimo	328.000	3.874.295	-
24	Kab. Lanny Jaya	1.385.000	9.123.715	-
25	Kab. Nduga	1.290.000	7.514.348	-
26	Kab. Dogiyai	1.334.000	2.935.464	-
27	Kab. Puncak	1.244.000	6.249.401	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
18	Kab. Asmat	1.768.701	-	-	44.490.768
19	Kab. Waropen	1.363.802	-	-	26.963.548
20	Kab. Supiori	1.189.434	658.580	-	20.627.945
21	Kab. Mamberamo Raya	1.351.640	-	-	17.631.235
22	Kab. Mamberamo Tengah	1.160.597	-	-	13.067.660
23	Kab. Yalimo	1.314.751	-	-	18.340.613
24	Kab. Lanny Jaya	3.014.470	658.580	-	33.114.423
25	Kab. Nduga	2.547.066	558.580	-	27.205.846
26	Kab. Dogiyai	2.448.550	-	-	27.152.880
27	Kab. Puncak	2.439.707	558.580	-	23.056.614



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Kab. Intan Jaya	-	-	-
29	Kab. Deiyai	-	-	-
XXVII	Provinsi Maluku Utara	280.333.000	58.135.000	14.508.647
1	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-
2	Kota Ternate	-	-	-
3	Kab. Halmahera Barat	-	-	-
4	Kab. Halmahera Timur	-	-	-
5	Kab. Halmahera Selatan	-	-	-
6	Kab. Halmahera Utara	-	-	-
7	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
28	Kab. Intan Jaya	36.000	22.500	-
29	Kab. Deiyai	74.400	22.500	2.048.332
XXVII	Provinsi Maluku Utara	-	-	62.402.966
1	Kab. Halmahera Tengah	1.235.400	352.200	9.314.844
2	Kota Ternate	1.956.600	442.900	42.035.224
3	Kab. Halmahera Barat	1.471.800	89.700	28.586.650
4	Kab. Halmahera Timur	1.471.200	500.700	8.991.821
5	Kab. Halmahera Selatan	2.700.000	923.300	26.244.649
6	Kab. Halmahera Utara	4.636.200	2.089.000	23.609.417
7	Kab. Kepulauan Sula	723.600	22.500	16.373.362



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Kab. Intan Jaya	-	1.687.335	-	-
29	Kab. Deiyai	33.000	2.001.719	-	-
XXVII	Provinsi Maluku Utara	3.018.000	3.161.675	-	-
1	Kab. Halmahera Tengah	849.000	2.035.980	-	-
2	Kota Ternate	1.308.000	-	-	-
3	Kab. Halmahera Barat	1.527.000	7.402.931	-	-
4	Kab. Halmahera Timur	1.305.000	5.344.425	-	-
5	Kab. Halmahera Selatan	835.205	14.144.898	-	-
6	Kab. Halmahera Utara	969.000	3.738.495	-	-
7	Kab. Kepulauan Sula	627.000	9.733.972	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
28	Kab. Intan Jaya	7.833.033	-	-	-
29	Kab. Deiyai	12.280.406	-	703.100	-
XXVII	Provinsi Maluku Utara	3.653.250	-	-	-
1	Kab. Halmahera Tengah	10.941.875	-	2.121.400	-
2	Kota Ternate	6.751.850	351.520	742.150	-
3	Kab. Halmahera Barat	14.983.450	-	1.855.050	-
4	Kab. Halmahera Timur	17.316.692	-	2.750.000	-
5	Kab. Halmahera Selatan	38.229.000	920.000	5.194.322	-
6	Kab. Halmahera Utara	15.413.650	970.440	2.445.047	-
7	Kab. Kepulauan Sula	13.103.006	-	867.500	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
28	Kab. Intan Jaya	441.000	2.697.002	-
29	Kab. Deiyai	1.366.000	1.971.412	-
XXVII	Provinsi Maluku Utara	-	-	4.238.780
1	Kab. Halmahera Tengah	521.000	2.664.141	-
2	Kota Ternate	915.000	2.150.872	-
3	Kab. Halmahera Barat	1.623.000	3.333.726	-
4	Kab. Halmahera Timur	1.460.000	2.963.382	-
5	Kab. Halmahera Selatan	2.940.000	8.275.544	-
6	Kab. Halmahera Utara	2.309.000	4.620.221	-
7	Kab. Kepulauan Sula	1.471.000	3.417.723	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
28	Kab. Intan Jaya	2.318.893	-	-	15.035.763
29	Kab. Deiyai	2.463.740	558.580	-	23.523.189
XXVII	Provinsi Maluku Utara	2.004.149	-	-	431.455.467
1	Kab. Halmahera Tengah	1.088.782	913.038	-	32.037.660
2	Kota Ternate	1.114.208	521.736	-	58.290.060
3	Kab. Halmahera Barat	1.257.573	1.077.515	-	63.208.395
4	Kab. Halmahera Timur	1.239.151	977.515	-	44.319.886
5	Kab. Halmahera Selatan	2.196.868	558.580	-	103.162.366
6	Kab. Halmahera Utara	1.514.831	913.038	-	63.228.339
7	Kab. Kepulauan Sula	2.035.903	-	-	48.375.566



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-
9	Kab. Pulau Morotai	-	-	-
10	Kab. Pulau Taliabu	-	-	-
XXVIII	Provinsi Banten	2.083.853.400	100.030.000	51.801.386
1	Kab. Lebak	-	-	-
2	Kab. Pandeglang	-	-	-
3	Kab. Serang	-	-	-
4	Kab. Tangerang	-	-	-
5	Kota Cilegon	-	-	-
6	Kota Tangerang	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
8	Kota Tidore Kepulauan	1.893.600	273.200	27.703.906
9	Kab. Pulau Morotai	1.564.200	125.500	5.227.708
10	Kab. Pulau Taliabu	1.124.400	22.500	3.991.680
XXVIII	Provinsi Banten	-	-	220.837.730
1	Kab. Lebak	13.669.800	4.634.000	234.224.403
2	Kab. Pandeglang	13.204.200	7.074.400	245.810.606
3	Kab. Serang	17.263.200	11.187.500	204.430.302
4	Kab. Tangerang	23.575.800	15.423.000	238.383.028
5	Kota Cilegon	5.791.200	1.521.600	75.967.257
6	Kota Tangerang	18.655.800	8.864.000	167.103.912



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kota Tidore Kepulauan	1.344.000	2.147.580	-	-
9	Kab. Pulau Morotai	747.000	1.824.718	-	-
10	Kab. Pulau Taliabu	207.000	5.450.123	-	-
XXVIII	Provinsi Banten	1.962.000	1.398.970	1.450.000	-
1	Kab. Lebak	2.181.775	17.975.328	450.000	-
2	Kab. Pandeglang	2.355.000	20.431.899	-	-
3	Kab. Serang	1.618.850	-	-	-
4	Kab. Tangerang	-	-	-	-
5	Kota Cilegon	260.512	-	-	-
6	Kota Tangerang	1.254.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	Kota Tidore Kepulauan	6.401.841	320.600	690.340	-
9	Kab. Pulau Morotai	8.213.590	600.000	1.854.815	-
10	Kab. Pulau Taliabu	6.701.787	600.000	1.940.673	-
XXVIII	Provinsi Banten	2.367.000	-	-	412.950
1	Kab. Lebak	35.550.125	-	1.078.500	315.000
2	Kab. Pandeglang	29.764.347	-	2.272.175	557.044
3	Kab. Serang	23.304.000	-	2.779.260	-
4	Kab. Tangerang	29.384.186	-	2.912.200	-
5	Kota Cilegon	4.246.000	-	774.480	-
6	Kota Tangerang	17.896.989	-	990.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
8	Kota Tidore Kepulauan	596.000	2.447.894	-
9	Kab. Pulau Morotai	570.000	1.772.108	-
10	Kab. Pulau Taliabu	488.000	2.268.336	-
XXVIII	Provinsi Banten	-	-	2.232.600
1	Kab. Lebak	7.101.000	8.979.675	-
2	Kab. Pandeglang	6.914.000	10.433.814	-
3	Kab. Serang	1.565.000	7.785.732	-
4	Kab. Tangerang	5.252.000	6.540.162	-
5	Kota Cilegon	473.000	1.421.462	470.000
6	Kota Tangerang	-	2.490.816	470.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	Kota Tidore Kepulauan	1.168.604	621.736	-	45.609.301
9	Kab. Pulau Morotai	1.331.001	977.515	-	24.808.155
10	Kab. Pulau Taliabu	1.432.410	-	-	24.226.909
XXVIII	Provinsi Banten	1.433.318	-	-	2.467.779.354
1	Kab. Lebak	2.152.486	977.515	-	329.289.607
2	Kab. Pandeglang	2.279.975	1.077.515	-	342.174.975
3	Kab. Serang	3.555.624	652.170	-	274.141.638
4	Kab. Tangerang	3.587.703	-	-	325.058.079
5	Kota Cilegon	897.166	-	-	91.822.677
6	Kota Tangerang	3.410.334	-	-	221.135.851



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kota Serang	-	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	269.532.800	15.125.000	8.731.810
1	Kab. Bangka	-	-	-
2	Kab. Belitung	-	-	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	-	-	-
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-
7	Kab. Belitung Timur	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
7	Kota Serang	7.480.200	1.987.200	99.877.882
8	Kota Tangerang Selatan	17.176.200	3.388.900	98.210.023
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-	-	51.800.133
1	Kab. Bangka	5.833.800	1.700.900	54.362.593
2	Kab. Belitung	2.441.400	489.500	41.213.839
3	Kota Pangkal Pinang	3.509.400	577.500	32.328.950
4	Kab. Bangka Selatan	2.746.200	1.412.700	34.824.695
5	Kab. Bangka Tengah	4.008.600	1.091.500	37.727.698
6	Kab. Bangka Barat	4.581.600	580.300	34.094.406
7	Kab. Belitung Timur	2.365.800	1.135.400	39.333.892



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kota Serang	625.000	-	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	1.275.000	-	-	-
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	1.509.000	-	-	-
1	Kab. Bangka	1.002.985	-	-	-
2	Kab. Belitung	726.200	684.675	450.000	-
3	Kota Pangkal Pinang	493.600	-	-	-
4	Kab. Bangka Selatan	798.000	-	-	-
5	Kab. Bangka Tengah	840.000	-	-	-
6	Kab. Bangka Barat	1.053.000	218.814	-	-
7	Kab. Belitung Timur	738.000	245.844	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Kota Serang	9.565.169	-	495.540	300.000
8	Kota Tangerang Selatan	13.859.100	-	2.156.010	-
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	2.533.500	-	-	-
1	Kab. Bangka	10.693.851	304.000	640.840	350.000
2	Kab. Belitung	7.362.576	328.640	431.290	350.000
3	Kota Pangkal Pinang	5.437.282	339.460	550.600	300.000
4	Kab. Bangka Selatan	8.559.535	-	447.920	-
5	Kab. Bangka Tengah	6.676.250	-	791.850	-
6	Kab. Bangka Barat	7.440.958	-	696.000	-
7	Kab. Belitung Timur	5.776.000	-	277.920	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
7	Kota Serang	564.000	1.479.234	-
8	Kota Tangerang Selatan	838.000	1.358.491	-
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-	-	3.630.220
1	Kab. Bangka	2.110.000	2.556.172	-
2	Kab. Belitung	1.417.000	1.377.329	358.000
3	Kota Pangkal Pinang	396.000	1.670.722	358.000
4	Kab. Bangka Selatan	1.860.000	2.161.083	358.000
5	Kab. Bangka Tengah	1.424.000	1.804.853	358.000
6	Kab. Bangka Barat	1.502.000	2.017.869	360.500
7	Kab. Belitung Timur	542.000	1.831.624	358.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
7	Kota Serang	1.108.737	752.170	-	124.235.132
8	Kota Tangerang Selatan	2.724.222	-	-	140.985.946
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	1.436.691	-	-	354.299.154
1	Kab. Bangka	1.164.679	521.736	-	81.241.556
2	Kab. Belitung	837.772	913.038	-	59.381.259
3	Kota Pangkal Pinang	907.136	621.736	-	47.490.386
4	Kab. Bangka Selatan	835.195	521.736	-	54.525.064
5	Kab. Bangka Tengah	918.058	521.736	-	56.162.545
6	Kab. Bangka Barat	939.641	521.736	-	54.006.824
7	Kab. Belitung Timur	863.639	913.038	-	54.381.157



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXX	Provinsi Gorontalo	225.884.400	24.435.000	10.289.812
1	Kab. Boalemo	-	-	-
2	Kab. Gorontalo	-	-	-
3	Kota Gorontalo	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	-	-	-
5	Kab. Bone Bolango	-	-	-
6	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	387.507.600	13.830.000	12.447.941
1	Kab. Natuna	-	-	-
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
XXX	Provinsi Gorontalo	-	-	74.660.501
1	Kab. Boalemo	4.886.400	491.900	34.806.658
2	Kab. Gorontalo	8.538.000	2.743.100	90.249.623
3	Kota Gorontalo	2.664.000	1.375.300	58.601.152
4	Kab. Pohuwato	4.813.800	1.101.400	34.212.187
5	Kab. Bone Bolango	3.715.200	1.504.800	46.619.675
6	Kab. Gorontalo Utara	3.588.600	1.483.000	27.820.523
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	63.975.022
1	Kab. Natuna	1.740.000	635.700	19.384.851
2	Kab. Kepulauan Anambas	867.000	161.700	8.852.157



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXX	Provinsi Gorontalo	1.839.000	162.512	1.450.000	-
1	Kab. Boalemo	939.000	3.424.628	-	-
2	Kab. Gorontalo	939.000	1.392.894	-	-
3	Kota Gorontalo	630.000	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	1.050.000	2.068.487	-	-
5	Kab. Bone Bolango	717.000	3.658.356	-	-
6	Kab. Gorontalo Utara	714.000	2.118.928	-	-
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	1.587.000	1.088.244	-	-
1	Kab. Natuna	918.000	1.520.411	-	-
2	Kab. Kepulauan Anambas	591.000	2.879.016	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
XXX	Provinsi Gorontalo	2.631.000	-	-	-
1	Kab. Boalemo	11.666.952	543.160	830.590	-
2	Kab. Gorontalo	19.763.089	570.000	2.155.900	350.000
3	Kota Gorontalo	6.458.723	543.160	637.950	-
4	Kab. Pohuwato	16.452.642	-	1.862.380	-
5	Kab. Bone Bolango	17.919.818	1.140.000	2.280.960	-
6	Kab. Gorontalo Utara	14.807.636	550.260	899.480	-
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	2.946.750	-	-	-
1	Kab. Natuna	13.539.939	-	1.811.300	-
2	Kab. Kepulauan Anambas	6.580.286	644.800	328.182	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
XXX	Provinsi Gorontalo	-	-	2.597.350
1	Kab. Boalemo	1.276.000	2.382.742	444.800
2	Kab. Gorontalo	2.517.000	5.253.870	448.000
3	Kota Gorontalo	548.000	1.944.800	358.000
4	Kab. Pohuwato	1.303.000	3.851.574	-
5	Kab. Bone Bolango	1.646.000	4.629.072	-
6	Kab. Gorontalo Utara	1.720.000	3.357.648	-
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	2.616.940
1	Kab. Natuna	872.000	3.398.521	358.000
2	Kab. Kepulauan Anambas	406.000	1.940.889	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
XXX	Provinsi Gorontalo	1.734.644	-	-	345.684.219
1	Kab. Boalemo	1.106.508	100.000	-	62.899.338
2	Kab. Gorontalo	1.508.575	658.580	-	137.087.631
3	Kota Gorontalo	936.432	521.736	-	75.219.253
4	Kab. Pohuwato	1.014.780	558.580	-	68.288.830
5	Kab. Bone Bolango	1.157.280	652.170	-	85.640.331
6	Kab. Gorontalo Utara	999.341	798.225	-	58.857.641
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	1.486.066	-	-	487.485.563
1	Kab. Natuna	1.261.984	798.225	-	46.238.931
2	Kab. Kepulauan Anambas	1.014.669	658.580	-	24.924.279



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kab. Karimun	-	-	-
4	Kota Batam	-	-	-
5	Kota Tanjung Pinang	-	-	-
6	Kab. Lingga	-	-	-
7	Kab. Bintan	-	-	-
XXXII	Provinsi Papua Barat	222.818.800	32.140.000	9.167.233
1	Kab. Fak Fak	-	-	-
2	Kab. Manokwari	-	-	-
3	Kab. Sorong	-	-	-
4	Kota Sorong	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
3	Kab. Karimun	3.426.600	1.791.800	46.836.080
4	Kota Batam	10.194.600	6.867.700	68.678.338
5	Kota Tanjung Pinang	2.041.800	784.900	34.321.448
6	Kab. Lingga	1.407.000	513.100	29.012.204
7	Kab. Bintan	2.355.600	596.600	34.847.265
XXXII	Provinsi Papua Barat	-	-	49.403.114
1	Kab. Fak Fak	706.200	1.335.900	16.071.731
2	Kab. Manokwari	1.916.400	1.688.600	25.513.987
3	Kab. Sorong	906.600	529.000	30.268.778
4	Kota Sorong	1.639.800	22.500	27.938.871



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Kab. Karimun	897.000	6.878.168	-	-
4	Kota Batam	1.491.000	-	-	-
5	Kota Tanjung Pinang	387.000	-	450.000	-
6	Kab. Lingga	1.542.000	296.535	450.000	-
7	Kab. Bintan	882.000	1.106.478	450.000	-
XXXII	Provinsi Papua Barat	2.238.000	10.632.178	-	-
1	Kab. Fak Fak	1.281.000	3.748.019	-	-
2	Kab. Manokwari	732.000	208.529	-	-
3	Kab. Sorong	795.000	21.986.382	-	-
4	Kota Sorong	936.000	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Kab. Karimun	9.618.503	-	1.243.300	-
4	Kota Batam	11.917.459	-	1.927.100	-
5	Kota Tanjung Pinang	4.744.200	-	549.000	-
6	Kab. Lingga	9.997.985	1.078.480	1.281.900	-
7	Kab. Bintan	12.395.450	-	1.123.750	-
XXXII	Provinsi Papua Barat	4.415.250	-	-	-
1	Kab. Fak Fak	10.986.308	-	825.212	-
2	Kab. Manokwari	14.135.909	650.000	1.158.450	-
3	Kab. Sorong	21.956.874	-	1.787.700	-
4	Kota Sorong	7.458.302	-	1.385.150	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
3	Kab. Karimun	547.000	2.411.971	-
4	Kota Batam	3.823.000	3.219.609	-
5	Kota Tanjung Pinang	386.000	916.878	-
6	Kab. Lingga	341.000	2.445.607	-
7	Kab. Bintan	821.000	2.095.801	-
XXXII	Provinsi Papua Barat	-	-	4.791.641
1	Kab. Fak Fak	1.312.000	4.721.045	-
2	Kab. Manokwari	1.797.000	3.855.460	-
3	Kab. Sorong	1.433.000	7.215.942	445.661
4	Kota Sorong	1.247.000	2.768.501	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	Kab. Karimun	1.201.745	558.580	-	75.410.747
4	Kota Batam	2.677.336	558.580	-	111.354.722
5	Kota Tanjung Pinang	853.498	652.170	-	46.086.894
6	Kab. Lingga	916.279	-	-	49.282.090
7	Kab. Bintan	982.338	698.225	-	58.354.507
XXXII	Provinsi Papua Barat	2.144.909	-	-	337.751.125
1	Kab. Fak Fak	1.176.925	752.170	-	42.916.510
2	Kab. Manokwari	1.320.661	521.736	-	53.498.732
3	Kab. Sorong	1.799.115	558.580	-	89.682.632
4	Kota Sorong	1.235.411	521.736	-	45.153.271



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kab. Raja Ampat	-	-	-
6	Kab. Sorong Selatan	-	-	-
7	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-
8	Kab. Teluk Wondama	-	-	-
9	Kab. Kaimana	-	-	-
10	Kab. Maybrat	-	-	-
11	Kab. Tambrauw	-	-	-
12	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	285.945.400	38.520.000	13.285.518



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
5	Kab. Raja Ampat	1.000.800	58.200	7.312.730
6	Kab. Sorong Selatan	410.400	116.400	9.419.497
7	Kab. Teluk Bintuni	597.600	277.200	5.274.690
8	Kab. Teluk Wondama	607.800	22.500	2.525.193
9	Kab. Kaimana	1.257.600	928.900	4.997.185
10	Kab. Maybrat	147.600	184.800	5.710.956
11	Kab. Tambrau	22.800	264.700	2.228.084
12	Kab. Manokwari Selatan	123.000	22.500	2.510.206
13	Kab. Pegunungan Arfak	9.000	22.500	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	59.687.785



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kab. Raja Ampat	556.550	8.623.199	-	-
6	Kab. Sorong Selatan	594.000	9.735.500	-	-
7	Kab. Teluk Bintuni	525.000	3.126.399	-	-
8	Kab. Teluk Wondama	681.000	3.486.778	-	-
9	Kab. Kaimana	452.936	5.990.674	-	-
10	Kab. Maybrat	2.150	5.709.362	-	-
11	Kab. Tambrau	336.000	3.567.422	-	-
12	Kab. Manokwari Selatan	60.000	365.586	-	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	2.141.098	-	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	1.557.000	907.161	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Kab. Raja Ampat	21.285.381	-	3.341.900	-
6	Kab. Sorong Selatan	17.698.385	-	673.326	-
7	Kab. Teluk Bintuni	22.253.614	-	1.157.450	-
8	Kab. Teluk Wondama	7.243.702	-	1.084.000	-
9	Kab. Kaimana	9.382.195	-	1.213.150	-
10	Kab. Maybrat	14.997.342	-	979.475	-
11	Kab. Tambrau	12.353.057	-	2.266.600	-
12	Kab. Manokwari Selatan	4.377.526	-	-	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	9.231.411	-	961.350	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	2.707.500	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
5	Kab. Raja Ampat	570.000	5.459.351	-
6	Kab. Sorong Selatan	520.000	4.705.973	-
7	Kab. Teluk Bintuni	1.294.000	5.171.222	-
8	Kab. Teluk Wondama	357.000	3.694.655	-
9	Kab. Kaimana	566.000	2.244.932	-
10	Kab. Maybrat	609.000	6.128.785	-
11	Kab. Tambrauw	533.000	7.429.846	-
12	Kab. Manokwari Selatan	420.000	1.885.662	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	612.000	3.535.190	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	3.158.080



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
5	Kab. Raja Ampat	1.956.686	658.580	-	50.823.377
6	Kab. Sorong Selatan	1.513.004	-	-	45.386.485
7	Kab. Teluk Bintuni	2.959.727	-	-	42.636.902
8	Kab. Teluk Wondama	1.488.666	798.225	-	21.989.519
9	Kab. Kaimana	1.234.833	-	-	28.268.405
10	Kab. Maybrat	1.892.072	92.600	-	36.454.142
11	Kab. Tambrauw	2.138.228	-	-	31.139.737
12	Kab. Manokwari Selatan	1.152.915	-	-	10.917.395
13	Kab. Pegunungan Arfak	2.314.041	-	-	18.826.590
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	1.665.762	-	-	407.434.206



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Majene	-	-	-
2	Kab. Mamuju	-	-	-
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	-
4	Kab. Mamasa	-	-	-
5	Kab. Pasangkayu	-	-	-
6	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	136.766.200	14.715.000	4.851.838
1	Kab. Bulungan	-	-	-
2	Kab. Malinau	-	-	-
3	Kab. Nunukan	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Majene	3.814.200	3.075.500	60.229.814
2	Kab. Mamuju	2.973.600	2.782.700	52.053.556
3	Kab. Polewali Mandar	6.973.200	5.365.000	99.314.023
4	Kab. Mamasa	2.620.200	5.163.900	28.559.509
5	Kab. Pasangkayu	1.475.400	1.863.900	20.165.829
6	Kab. Mamuju Tengah	2.362.800	648.000	19.111.197
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	28.681.516
1	Kab. Bulungan	2.418.600	3.040.400	37.869.215
2	Kab. Malinau	1.536.600	561.800	16.945.388
3	Kab. Nunukan	2.640.000	1.071.900	28.445.024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Majene	1.554.000	3.698.092	450.000	-
2	Kab. Mamuju	780.960	4.310.523	-	-
3	Kab. Polewali Mandar	2.031.000	1.776.140	-	-
4	Kab. Mamasa	838.050	12.512.568	-	-
5	Kab. Pasangkayu	1.197.000	1.531.716	-	-
6	Kab. Mamuju Tengah	530.500	2.890.714	-	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	1.398.000	1.846.450	-	-
1	Kab. Bulungan	1.173.000	5.309.669	-	-
2	Kab. Malinau	1.009.600	8.579.858	-	-
3	Kab. Nunukan	1.740.000	14.240.819	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kab. Majene	11.123.140	-	2.301.200	-
2	Kab. Mamuju	21.760.343	260.000	1.954.990	-
3	Kab. Polewali Mandar	21.228.000	-	1.456.900	350.000
4	Kab. Mamasa	16.527.919	-	2.579.800	-
5	Kab. Pasangkayu	11.652.361	-	2.646.443	-
6	Kab. Mamuju Tengah	10.187.859	-	2.394.730	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	2.724.000	-	-	-
1	Kab. Bulungan	11.594.198	-	1.575.900	-
2	Kab. Malinau	18.778.451	570.000	2.500.000	-
3	Kab. Nunukan	18.326.928	750.000	2.314.000	450.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
1	Kab. Majene	1.804.000	2.297.025	-
2	Kab. Mamuju	3.331.000	3.030.727	-
3	Kab. Polewali Mandar	3.735.000	4.984.407	-
4	Kab. Mamasa	1.981.000	4.686.097	-
5	Kab. Pasangkayu	2.334.000	2.788.940	-
6	Kab. Mamuju Tengah	1.807.000	1.515.454	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	2.992.800
1	Kab. Bulungan	1.265.000	2.138.385	-
2	Kab. Malinau	591.000	3.043.410	-
3	Kab. Nunukan	1.665.000	4.658.570	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Kab. Majene	926.657	621.736	-	91.895.364
2	Kab. Mamuju	1.131.420	-	-	94.369.819
3	Kab. Polewali Mandar	1.693.907	658.580	-	149.566.157
4	Kab. Mamasa	1.179.214	-	-	76.648.257
5	Kab. Pasangkayu	1.052.131	-	-	46.707.720
6	Kab. Mamuju Tengah	921.416	92.600	-	42.462.270
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	1.518.883	-	-	195.494.687
1	Kab. Bulungan	992.051	621.736	-	67.998.154
2	Kab. Malinau	1.031.072	798.225	-	55.945.404
3	Kab. Nunukan	1.132.549	558.580	-	77.993.370



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kota Tarakan	-	-	-
5	Kab. Tana Tidung	-	-	-
	Dana Cadangan	462.825.800	-	-
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	46.872.740.000	2.854.120.000	1.500.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	TUNJANGAN PROFESI GURU
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
4	Kota Tarakan	2.665.200	2.219.700	34.566.562
5	Kab. Tana Tidung	580.800	22.500	3.381.493
	Dana Cadangan	692.190.400	265.695.500	1.009.244.262
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	4.475.500.000	1.548.500.000	56.867.226.628



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
				MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kota Tarakan	705.000	-	450.000	-
5	Kab. Tana Tidung	231.460	1.882.790	-	-
	Dana Cadangan	272.535.492	204.600.743	-	-
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	914.100.000	2.306.445.422	96.400.000	33.540.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI		
			AKREDITASI RUMAH SAKIT	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Kota Tarakan	4.595.920	-	607.140	-
5	Kab. Tana Tidung	5.039.686	570.000	688.850	-
	Dana Cadangan	-	-	-	-
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	8.368.219.734	75.060.000	769.386.011	42.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM
		JAMINAN PERSALINAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)
4	Kota Tarakan	394.000	849.035	-
5	Kab. Tana Tidung	363.000	1.181.862	-
	Dana Cadangan	-	-	-
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	1.003.967.000	1.967.367.255	200.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2019
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
4	Kota Tarakan	861.827	621.736	-	48.536.120
5	Kab. Tana Tidung	822.269	521.736	-	15.286.446
	Dana Cadangan	-	-	-	2.907.092.197
	JUMLAH ALOKASI NASIONAL	907.500.000	213.159.300	26.912.253	131.042.143.603

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Heri Suswati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Provinsi Sumatera Barat			9.847.994
2	Provinsi Riau			
3	Provinsi Jambi	16.446.957		
4	Provinsi Sumatera Selatan	15.476.836	12.046.438	9.948.487
5	Provinsi Bengkulu		11.684.700	10.406.546
6	Provinsi Lampung	14.923.673	11.832.690	
7	Provinsi DKI Jakarta	13.538.813		10.802.589
8	Provinsi Jawa Barat		12.153.659	
9	Provinsi Jawa Tengah			12.079.662
10	Provinsi DI Yogyakarta	14.038.441		11.142.009
11	Provinsi Jawa Timur			11.168.567
12	Provinsi Kalimantan Barat	15.271.459		
13	Provinsi Kalimantan Tengah		13.636.005	
14	Provinsi Kalimantan Selatan	14.745.235	11.586.902	10.309.591



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Sumatera Barat			
2	Provinsi Riau			
3	Provinsi Jambi	9.294.142		
4	Provinsi Sumatera Selatan	9.738.865		
5	Provinsi Bengkulu			
6	Provinsi Lampung			
7	Provinsi DKI Jakarta			12.220.044
8	Provinsi Jawa Barat		11.284.496	
9	Provinsi Jawa Tengah		10.070.267	12.412.209
10	Provinsi DI Yogyakarta	12.794.267	10.116.522	
11	Provinsi Jawa Timur	10.458.694		12.292.983
12	Provinsi Kalimantan Barat			
13	Provinsi Kalimantan Tengah			
14	Provinsi Kalimantan Selatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
1	Provinsi Sumatera Barat			9.299.524
2	Provinsi Riau			
3	Provinsi Jambi			
4	Provinsi Sumatera Selatan		9.060.952	10.203.660
5	Provinsi Bengkulu			
6	Provinsi Lampung			
7	Provinsi DKI Jakarta			
8	Provinsi Jawa Barat	8.817.340		10.324.299
9	Provinsi Jawa Tengah	8.477.898		9.684.181
10	Provinsi DI Yogyakarta			10.740.560
11	Provinsi Jawa Timur	9.025.455	9.926.888	10.356.695
12	Provinsi Kalimantan Barat			
13	Provinsi Kalimantan Tengah			
14	Provinsi Kalimantan Selatan			9.856.737



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
1	Provinsi Sumatera Barat	9.019.924		18.319.448
2	Provinsi Riau			9.847.994
3	Provinsi Jambi			25.741.099
4	Provinsi Sumatera Selatan			66.475.238
5	Provinsi Bengkulu			22.091.246
6	Provinsi Lampung			26.756.363
7	Provinsi DKI Jakarta	11.597.045	9.019.817	57.178.308
8	Provinsi Jawa Barat			42.579.794
9	Provinsi Jawa Tengah	9.664.204		62.388.421
10	Provinsi DI Yogyakarta			58.831.799
11	Provinsi Jawa Timur	10.566.196		73.795.478
12	Provinsi Kalimantan Barat			15.271.459
13	Provinsi Kalimantan Tengah			13.636.005
14	Provinsi Kalimantan Selatan	9.019.924		55.518.389



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Provinsi Kalimantan Timur			
16	Provinsi Sulawesi Utara	13.421.825	12.460.413	
17	Provinsi Sulawesi Tengah			
18	Provinsi Sulawesi Selatan			
19	Provinsi Sulawesi Tenggara			
20	Provinsi Bali		12.619.782	12.565.582
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	13.960.187	12.134.059	10.252.182
22	Provinsi Bangka Belitung	14.273.456		
23	Provinsi Gorontalo			
24	Provinsi Kepulauan Riau	13.748.028		9.441.899
25	Provinsi Sulawesi Barat	13.967.507	12.523.830	9.592.824
26	Kab. Aceh Barat		12.092.064	
27	Kab. Aceh Timur			10.019.599
28	Kab. Bireuen		12.615.772	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
15	Provinsi Kalimantan Timur			
16	Provinsi Sulawesi Utara		9.759.760	
17	Provinsi Sulawesi Tengah	10.781.295	9.913.687	
18	Provinsi Sulawesi Selatan	10.195.860	9.726.064	
19	Provinsi Sulawesi Tenggara		12.496.864	
20	Provinsi Bali	12.054.618	12.423.409	
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
22	Provinsi Bangka Belitung		11.212.346	
23	Provinsi Gorontalo	10.288.774		
24	Provinsi Kepulauan Riau	10.326.373	10.847.466	
25	Provinsi Sulawesi Barat			
26	Kab. Aceh Barat			
27	Kab. Aceh Timur			
28	Kab. Bireuen	10.080.903		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
15	Provinsi Kalimantan Timur			9.883.392
16	Provinsi Sulawesi Utara			
17	Provinsi Sulawesi Tengah			
18	Provinsi Sulawesi Selatan			
19	Provinsi Sulawesi Tenggara			
20	Provinsi Bali		8.985.653	9.785.362
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
22	Provinsi Bangka Belitung			
23	Provinsi Gorontalo			
24	Provinsi Kepulauan Riau			8.943.665
25	Provinsi Sulawesi Barat			
26	Kab. Aceh Barat			
27	Kab. Aceh Timur			
28	Kab. Bireuen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
15	Provinsi Kalimantan Timur			9.883.392
16	Provinsi Sulawesi Utara			35.641.998
17	Provinsi Sulawesi Tengah			20.694.982
18	Provinsi Sulawesi Selatan	9.019.924		28.941.848
19	Provinsi Sulawesi Tenggara			12.496.864
20	Provinsi Bali			68.434.406
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat			36.346.428
22	Provinsi Bangka Belitung			25.485.802
23	Provinsi Gorontalo			10.288.774
24	Provinsi Kepulauan Riau			53.307.431
25	Provinsi Sulawesi Barat			36.084.161
26	Kab. Aceh Barat			12.092.064
27	Kab. Aceh Timur			10.019.599
28	Kab. Bireuen			22.696.675



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Kab. Aceh Jaya			
30	Kab. Nagan Raya			
31	Kab. Bener Meriah			
32	Kab. Pidie Jaya			
33	Kab. Asahan			
34	Kab. Dairi		12.209.016	
35	Kab. Tapanuli Selatan		14.036.772	
36	Kab. Toba Samosir			10.393.118
37	Kab. Pakpak Bharat			
38	Kab. Humbang Hasundutan	12.815.324		
39	Kab. Samosir			
40	Kab. Padang Lawas Utara	14.168.597		
41	Kab. Limapuluh Kota	12.849.321		10.999.881
42	Kab. Agam	13.898.934	13.465.576	11.252.172



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
29	Kab. Aceh Jaya		10.205.512	
30	Kab. Nagan Raya	10.792.337		
31	Kab. Bener Meriah	11.171.741		
32	Kab. Pidie Jaya		10.664.040	
33	Kab. Asahan	10.939.377		
34	Kab. Dairi		9.114.925	
35	Kab. Tapanuli Selatan		9.095.892	
36	Kab. Toba Samosir			
37	Kab. Pakpak Bharat	10.929.686		
38	Kab. Humbang Hasundutan			
39	Kab. Samosir		10.482.264	
40	Kab. Padang Lawas Utara			
41	Kab. Limapuluh Kota	11.711.860	9.796.587	
42	Kab. Agam		11.198.631	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
29	Kab. Aceh Jaya			
30	Kab. Nagan Raya			
31	Kab. Bener Meriah			
32	Kab. Pidie Jaya			
33	Kab. Asahan			
34	Kab. Dairi			
35	Kab. Tapanuli Selatan			
36	Kab. Toba Samosir			
37	Kab. Pakpak Bharat			
38	Kab. Humbang Hasundutan			
39	Kab. Samosir			
40	Kab. Padang Lawas Utara			
41	Kab. Limapuluh Kota			
42	Kab. Agam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
29	Kab. Aceh Jaya			10.205.512
30	Kab. Nagan Raya			10.792.337
31	Kab. Bener Meriah			11.171.741
32	Kab. Pidie Jaya			10.664.040
33	Kab. Asahan			10.939.377
34	Kab. Dairi			21.323.941
35	Kab. Tapanuli Selatan			23.132.664
36	Kab. Toba Samosir			10.393.118
37	Kab. Pakpak Bharat			10.929.686
38	Kab. Humbang Hasundutan			12.815.324
39	Kab. Samosir			10.482.264
40	Kab. Padang Lawas Utara			14.168.597
41	Kab. Limapuluh Kota			45.357.649
42	Kab. Agam			49.815.313



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	Kab. Kepulauan Mentawai	12.805.604	12.885.455	10.788.881
44	Kab. Padang Pariaman		12.137.734	10.746.842
45	Kab. Pasaman			
46	Kab. Pesisir Selatan			10.456.340
47	Kab. Sijunjung		13.140.710	
48	Kab. Solok			10.324.443
49	Kab. Tanah Datar	13.767.366		10.551.906
50	Kab. Pasaman Barat		12.100.227	10.465.248
51	Kab. Dharmasraya	12.855.836	12.437.096	10.495.261
52	Kab. Solok Selatan	14.864.097		10.825.078
53	Kab. Indragiri Hilir		14.138.949	
54	Kab. Kampar	14.057.294	13.506.065	
55	Kab. Kuantan Singingi		12.031.549	
56	Kab. Pelalawan	13.020.919	12.085.117	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
43	Kab. Kepulauan Mentawai	10.647.268		
44	Kab. Padang Pariaman			
45	Kab. Pasaman		9.630.660	
46	Kab. Pesisir Selatan	9.962.792	9.527.735	
47	Kab. Sijunjung		9.307.904	
48	Kab. Solok			
49	Kab. Tanah Datar	9.508.866	9.133.020	
50	Kab. Pasaman Barat			
51	Kab. Dharmasraya	10.164.983		
52	Kab. Solok Selatan	10.607.508		
53	Kab. Indragiri Hilir	9.352.434		
54	Kab. Kampar		9.322.940	
55	Kab. Kuantan Singingi		10.639.965	
56	Kab. Pelalawan	10.050.819		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
43	Kab. Kepulauan Mentawai			
44	Kab. Padang Pariaman			
45	Kab. Pasaman			
46	Kab. Pesisir Selatan			
47	Kab. Sijunjung			
48	Kab. Solok			
49	Kab. Tanah Datar			
50	Kab. Pasaman Barat			
51	Kab. Dharmasraya			
52	Kab. Solok Selatan			
53	Kab. Indragiri Hilir			
54	Kab. Kampar			
55	Kab. Kuantan Singingi			
56	Kab. Pelalawan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
43	Kab. Kepulauan Mentawai			47.127.208
44	Kab. Padang Pariaman			22.884.576
45	Kab. Pasaman			9.630.660
46	Kab. Pesisir Selatan			29.946.867
47	Kab. Sijunjung			22.448.614
48	Kab. Solok			10.324.443
49	Kab. Tanah Datar			42.961.158
50	Kab. Pasaman Barat			22.565.475
51	Kab. Dharmasraya			45.953.176
52	Kab. Solok Selatan			36.296.683
53	Kab. Indragiri Hilir			23.491.383
54	Kab. Kampar			36.886.299
55	Kab. Kuantan Singingi			22.671.514
56	Kab. Pelalawan			35.156.855



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57	Kab. Rokan Hulu		12.935.781	
58	Kab. Siak	15.125.616		
59	Kab. Kepulauan Meranti		12.905.302	
60	Kab. Batang Hari	13.459.631	11.947.188	
61	Kab. Kerinci	12.989.063		11.550.285
62	Kab. Merangin		13.059.078	10.719.842
63	Kab. Muaro Jambi			
64	Kab. Sarolangun			
65	Kab. Tanjung Jabung Timur			
66	Kab. Musi Banyuasin	12.965.810	12.203.036	10.125.994
67	Kab. Muara Enim		13.688.377	
68	Kab. Ogan Komering Ilir		12.239.742	
69	Kab. Ogan Komering Ulu	14.694.296	13.763.518	
70	Kab. Banyuasin		13.726.813	10.545.357



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
57	Kab. Rokan Hulu			
58	Kab. Siak	9.560.818	10.808.574	12.372.935
59	Kab. Kepulauan Meranti	9.386.209		
60	Kab. Batang Hari		10.062.682	
61	Kab. Kerinci		9.003.007	
62	Kab. Merangin	10.208.577	9.610.953	
63	Kab. Muaro Jambi	9.907.981		
64	Kab. Sarolangun		9.998.362	
65	Kab. Tanjung Jabung Timur	10.184.609		
66	Kab. Musi Banyuasin			
67	Kab. Muara Enim	11.293.554		
68	Kab. Ogan Komering Ilir	11.030.896	10.428.083	
69	Kab. Ogan Komering Ulu			
70	Kab. Banyuasin		11.009.717	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
57	Kab. Rokan Hulu			
58	Kab. Siak			
59	Kab. Kepulauan Meranti			
60	Kab. Batang Hari			
61	Kab. Kerinci			
62	Kab. Merangin			
63	Kab. Muaro Jambi			
64	Kab. Sarolangun			
65	Kab. Tanjung Jabung Timur			
66	Kab. Musi Banyuasin			
67	Kab. Muara Enim			8.929.239
68	Kab. Ogan Komering Ilir			
69	Kab. Ogan Komering Ulu			
70	Kab. Banyuasin			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
57	Kab. Rokan Hulu			12.935.781
58	Kab. Siak			47.867.943
59	Kab. Kepulauan Meranti			22.291.511
60	Kab. Batang Hari			35.469.501
61	Kab. Kerinci			33.542.355
62	Kab. Merangin			43.598.450
63	Kab. Muaro Jambi			9.907.981
64	Kab. Sarolangun			9.998.362
65	Kab. Tanjung Jabung Timur			10.184.609
66	Kab. Musi Banyuasin			35.294.840
67	Kab. Muara Enim			33.911.170
68	Kab. Ogan Komering Ilir			33.698.721
69	Kab. Ogan Komering Ulu			28.457.814
70	Kab. Banyuasin			35.281.887



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Kab. Ogan Ilir			
72	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		11.794.475	11.630.612
73	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			
74	Kab. Mukomuko		12.678.988	11.412.153
75	Kab. Lampung Barat		13.450.351	10.578.014
76	Kab. Lampung Selatan		13.433.188	10.877.257
77	Kab. Tanggamus		12.405.685	
78	Kab. Tulang Bawang			
79	Kab. Way Kanan	12.865.766		
80	Kab. Pesawaran		14.169.449	
81	Kab. Mesuji		13.809.071	
82	Kab. Tulang Bawang Barat		13.973.334	
83	Kab. Bandung			
84	Kab. Bekasi		12.810.621	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
71	Kab. Ogan Ilir	9.465.334		
72	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		9.222.124	
73	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	9.569.062		
74	Kab. Mukomuko			
75	Kab. Lampung Barat		11.013.249	
76	Kab. Lampung Selatan		10.227.476	
77	Kab. Tanggamus			
78	Kab. Tulang Bawang	9.689.913		
79	Kab. Way Kanan			
80	Kab. Pesawaran			
81	Kab. Mesuji			
82	Kab. Tulang Bawang Barat			
83	Kab. Bandung		11.571.605	
84	Kab. Bekasi		11.402.248	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
71	Kab. Ogan Ilir			
72	Kab. Ogan Komering Ulu Timur			
73	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			
74	Kab. Mukomuko			
75	Kab. Lampung Barat			
76	Kab. Lampung Selatan			
77	Kab. Tanggamus			
78	Kab. Tulang Bawang			
79	Kab. Way Kanan			
80	Kab. Pesawaran			
81	Kab. Mesuji			
82	Kab. Tulang Bawang Barat			
83	Kab. Bandung			
84	Kab. Bekasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
71	Kab. Ogan Ilir			9.465.334
72	Kab. Ogan Komering Ulu Timur			32.647.211
73	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			9.569.062
74	Kab. Mukomuko			24.091.141
75	Kab. Lampung Barat			35.041.614
76	Kab. Lampung Selatan			34.537.921
77	Kab. Tanggamus			12.405.685
78	Kab. Tulang Bawang			9.689.913
79	Kab. Way Kanan			12.865.766
80	Kab. Pesawaran			14.169.449
81	Kab. Mesuji			13.809.071
82	Kab. Tulang Bawang Barat			13.973.334
83	Kab. Bandung			11.571.605
84	Kab. Bekasi			24.212.869



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85	Kab. Bogor		14.279.484	
86	Kab. Ciamis			11.253.578
87	Kab. Cianjur			11.071.383
88	Kab. Cirebon		13.692.336	
89	Kab. Garut		13.644.055	
90	Kab. Indramayu		12.412.249	
91	Kab. Karawang	13.875.303	11.974.824	11.178.028
92	Kab. Kuningan			
93	Kab. Majalengka	13.801.262	12.548.575	
94	Kab. Sukabumi			10.444.022
95	Kab. Sumedang	13.855.320	12.015.964	
96	Kab. Tasikmalaya		11.523.528	10.261.140
97	Kab. Pangandaran		13.936.075	
98	Kab. Banjarnegara	13.150.491		10.646.256



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
85	Kab. Bogor		10.769.158	
86	Kab. Ciamis		9.156.509	
87	Kab. Cianjur			
88	Kab. Cirebon		11.134.692	
89	Kab. Garut		9.103.875	
90	Kab. Indramayu		11.306.142	
91	Kab. Karawang	11.141.729	10.488.674	
92	Kab. Kuningan	11.182.977	9.882.052	
93	Kab. Majalengka	11.849.153		
94	Kab. Sukabumi		9.690.196	
95	Kab. Sumedang	10.738.680	12.612.453	
96	Kab. Tasikmalaya	9.954.477		
97	Kab. Pangandaran	10.683.401	10.111.103	
98	Kab. Banjarnegara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
85	Kab. Bogor			
86	Kab. Ciamis			
87	Kab. Cianjur			
88	Kab. Cirebon			
89	Kab. Garut			
90	Kab. Indramayu			
91	Kab. Karawang			
92	Kab. Kuningan	9.489.982		
93	Kab. Majalengka			
94	Kab. Sukabumi			
95	Kab. Sumedang			
96	Kab. Tasikmalaya			
97	Kab. Pangandaran			
98	Kab. Banjarnegara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
85	Kab. Bogor			25.048.642
86	Kab. Ciamis			20.410.087
87	Kab. Cianjur			11.071.383
88	Kab. Cirebon			24.827.028
89	Kab. Garut			22.747.930
90	Kab. Indramayu			23.718.391
91	Kab. Karawang			58.658.558
92	Kab. Kuningan			30.555.011
93	Kab. Majalengka			38.198.990
94	Kab. Sukabumi			20.134.218
95	Kab. Sumedang			49.222.417
96	Kab. Tasikmalaya			31.739.145
97	Kab. Pangandaran			34.730.579
98	Kab. Banjarnegara			23.796.747



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	Kab. Banyuwangi	13.893.154		10.371.352
100	Kab. Batang		13.912.147	10.648.840
101	Kab. Blora		13.695.242	10.665.211
102	Kab. Boyolali	13.641.924		11.216.545
103	Kab. Cilacap	13.718.239		10.294.839
104	Kab. Demak	13.087.635	11.746.518	10.256.922
105	Kab. Grobogan	13.932.476		11.039.483
106	Kab. Jepara		12.319.460	
107	Kab. Karanganyar			10.507.869
108	Kab. Kebumen		13.081.159	11.328.892
109	Kab. Kendal	14.083.861	12.000.129	
110	Kab. Kudus		13.678.396	10.802.400
111	Kab. Magelang	14.474.551	11.691.322	10.537.181
112	Kab. Pati		14.067.715	12.086.555



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
99	Kab. Banyumas	11.599.387	8.964.976	
100	Kab. Batang			
101	Kab. Blora		9.840.312	
102	Kab. Boyolali	11.571.095	9.910.636	
103	Kab. Cilacap	10.177.569	12.173.210	
104	Kab. Demak	10.732.850	10.670.192	
105	Kab. Grobogan		11.623.015	
106	Kab. Jepara	9.848.152	10.132.709	
107	Kab. Karanganyar	11.083.270		
108	Kab. Kebumen		10.159.611	
109	Kab. Kendal		10.370.074	
110	Kab. Kudus	10.840.176	11.610.977	
111	Kab. Magelang		11.078.473	
112	Kab. Pati		10.644.387	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
99	Kab. Banyumas			
100	Kab. Batang			
101	Kab. Blora			
102	Kab. Boyolali			
103	Kab. Cilacap			
104	Kab. Demak			
105	Kab. Grobogan			
106	Kab. Jepara			
107	Kab. Karanganyar	9.638.132		
108	Kab. Kebumen			
109	Kab. Kendal			
110	Kab. Kudus	9.488.354		
111	Kab. Magelang			
112	Kab. Pati			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
99	Kab. Banyumas			44.828.869
100	Kab. Batang			24.560.987
101	Kab. Blora			34.200.765
102	Kab. Boyolali			46.340.200
103	Kab. Cilacap			46.363.857
104	Kab. Demak			56.494.117
105	Kab. Grobogan			36.594.974
106	Kab. Jepara			32.300.321
107	Kab. Karanganyar			31.229.271
108	Kab. Kebumen			34.569.662
109	Kab. Kendal			36.454.064
110	Kab. Kudus			56.420.303
111	Kab. Magelang			47.781.527
112	Kab. Pati			36.798.657



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
113	Kab. Pekalongan		12.740.173	10.654.337
114	Kab. Pemasang	13.282.709	11.990.216	10.275.357
115	Kab. Purbalingga	12.986.796		11.455.398
116	Kab. Purworejo		11.775.331	12.174.532
117	Kab. Semarang		12.541.575	10.261.084
118	Kab. Sragen		13.973.606	10.626.813
119	Kab. Sukoharjo		12.625.234	10.018.969
120	Kab. Tegal		11.798.735	11.483.290
121	Kab. Temanggung		11.786.056	10.422.517
122	Kab. Wonogiri	13.882.986		10.540.852
123	Kab. Wonosobo	13.675.188		10.154.629
124	Kab. Bantul	14.018.823	12.320.283	10.323.048
125	Kab. Gunung Kidul	13.456.337	14.280.517	10.130.516
126	Kab. Kulon Progo	14.455.990	13.420.682	10.347.061



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
113	Kab. Pekalongan		11.792.259	
114	Kab. Pemasang	11.099.756		
115	Kab. Purbalingga	10.280.170	9.110.123	
116	Kab. Purworejo		11.515.247	
117	Kab. Semarang	12.110.920	9.416.523	
118	Kab. Sragen	11.150.088	10.530.274	11.894.625
119	Kab. Sukoharjo	10.464.986	10.230.734	
120	Kab. Tegal		11.430.845	
121	Kab. Temanggung	10.433.092	9.126.438	
122	Kab. Wonogiri	11.643.040	11.502.543	
123	Kab. Wonosobo	9.994.925		
124	Kab. Bantul	10.546.101	10.347.404	
125	Kab. Gunung Kidul	10.175.484	11.016.193	
126	Kab. Kulon Progo	10.799.970	9.947.669	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
113	Kab. Pekalongan			
114	Kab. Pemasang			
115	Kab. Purbalingga			
116	Kab. Purworejo			
117	Kab. Semarang			
118	Kab. Sragen			
119	Kab. Sukoharjo			
120	Kab. Tegal		9.864.139	
121	Kab. Temanggung			
122	Kab. Wonogiri			
123	Kab. Wonosobo			
124	Kab. Bantul			9.934.021
125	Kab. Gunung Kidul			
126	Kab. Kulon Progo			9.633.589



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
113	Kab. Pekalongan			35.186.769
114	Kab. Pemasang			46.648.038
115	Kab. Purbalingga			43.832.487
116	Kab. Purworejo			35.465.110
117	Kab. Semarang			44.330.102
118	Kab. Sragen			58.175.406
119	Kab. Sukoharjo			43.339.923
120	Kab. Tegal			44.577.009
121	Kab. Temanggung			41.768.103
122	Kab. Wonogiri			47.569.421
123	Kab. Wonosobo			33.824.742
124	Kab. Bantul			67.489.680
125	Kab. Gunung Kidul			59.059.047
126	Kab. Kulon Progo			68.604.961



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
127	Kab. Sleman	14.187.975	13.255.149	12.051.962
128	Kab. Bangkalan			
129	Kab. Banyuwangi		12.176.720	
130	Kab. Blitar	13.485.302		
131	Kab. Bojonegoro			11.898.274
132	Kab. Bondowoso			
133	Kab. Gresik	13.077.332		
134	Kab. Jombang	13.307.991	13.151.607	10.755.569
135	Kab. Kediri	14.112.809	14.005.527	11.551.241
136	Kab. Lamongan		13.832.319	
137	Kab. Madiun		12.919.318	10.997.083
138	Kab. Magetan		14.352.794	
139	Kab. Malang	14.431.915	13.974.484	
140	Kab. Mojokerto	14.583.437	14.363.944	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
127	Kab. Sleman	12.329.136	10.068.219	
128	Kab. Bangkalan		9.078.913	
129	Kab. Banyuwangi	9.876.054	11.840.444	
130	Kab. Blitar	9.793.833		
131	Kab. Bojonegoro	11.462.572	9.815.147	
132	Kab. Bondowoso			
133	Kab. Gresik	9.825.140	10.687.868	
134	Kab. Jombang		11.953.911	
135	Kab. Kediri	10.174.755	9.501.185	
136	Kab. Lamongan	10.718.593	11.122.991	
137	Kab. Madiun	11.817.094	10.597.969	
138	Kab. Magetan	12.267.632	8.927.298	
139	Kab. Malang	9.744.708	10.567.073	
140	Kab. Mojokerto	10.134.513	11.164.836	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
127	Kab. Sleman			9.954.900
128	Kab. Bangkalan			
129	Kab. Banyuwangi	9.567.042	9.362.147	10.369.785
130	Kab. Blitar			
131	Kab. Bojonegoro			8.986.706
132	Kab. Bondowoso			9.140.578
133	Kab. Gresik			
134	Kab. Jombang			
135	Kab. Kediri			9.049.851
136	Kab. Lamongan			
137	Kab. Madiun			
138	Kab. Magetan			8.992.126
139	Kab. Malang	9.552.390		
140	Kab. Mojokerto			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
127	Kab. Sleman			71.847.341
128	Kab. Bangkalan			9.078.913
129	Kab. Banyuwangi	9.019.924		72.212.116
130	Kab. Blitar			23.279.135
131	Kab. Bojonegoro			33.175.993
132	Kab. Bondowoso			8.986.706
133	Kab. Gresik			42.730.918
134	Kab. Jombang			49.169.078
135	Kab. Kediri			59.345.517
136	Kab. Lamongan			44.723.754
137	Kab. Madiun			46.331.464
138	Kab. Magetan			35.547.724
139	Kab. Malang	9.664.204		76.926.900
140	Kab. Mojokerto			50.246.730



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
141	Kab. Nganjuk			10.906.048
142	Kab. Ngawi			
143	Kab. Pacitan	13.484.157		10.770.642
144	Kab. Pamekasan		14.257.593	
145	Kab. Pasuruan	14.170.103	12.840.546	
146	Kab. Ponorogo	14.933.669		10.242.387
147	Kab. Probolinggo			
148	Kab. Sidoarjo		12.060.402	10.706.362
149	Kab. Situbondo		12.483.707	
150	Kab. Sumenep		13.835.235	
151	Kab. Trenggalek	13.598.213		10.724.618
152	Kab. Tuban			10.207.784
153	Kab. Tulungagung			11.863.190
154	Kab. Ketapang		11.626.981	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
141	Kab. Nganjuk	10.006.358	10.484.752	
142	Kab. Ngawi	11.060.051	10.689.243	
143	Kab. Pacitan	11.515.458		
144	Kab. Pamekasan			
145	Kab. Pasuruan	9.803.620		
146	Kab. Ponorogo	9.587.198		
147	Kab. Probolinggo	10.272.641	10.774.968	
148	Kab. Sidoarjo	11.317.357	10.469.773	
149	Kab. Situbondo			
150	Kab. Sumenep			
151	Kab. Trenggalek	10.844.141		
152	Kab. Tuban	12.430.135	10.390.909	
153	Kab. Tulungagung	10.067.563	9.730.541	
154	Kab. Ketapang	9.402.190		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
141	Kab. Nganjuk			8.931.628
142	Kab. Ngawi			
143	Kab. Pacitan			
144	Kab. Pamekasan			
145	Kab. Pasuruan	9.530.954		9.441.269
146	Kab. Ponorogo			8.932.501
147	Kab. Probolinggo			9.142.141
148	Kab. Sidoarjo	9.748.023		
149	Kab. Situbondo			
150	Kab. Sumenep			
151	Kab. Trenggalek			
152	Kab. Tuban			9.046.661
153	Kab. Tulungagung	9.746.938		
154	Kab. Ketapang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
141	Kab. Nganjuk			31.397.158
142	Kab. Ngawi			30.680.922
143	Kab. Pacitan			35.770.257
144	Kab. Pamekasan			14.257.593
145	Kab. Pasuruan			55.786.492
146	Kab. Ponorogo			34.763.254
147	Kab. Probolinggo			29.980.110
148	Kab. Sidoarjo			63.444.058
149	Kab. Situbondo			12.483.707
150	Kab. Sumenep			13.835.235
151	Kab. Trenggalek	9.019.924		44.186.896
152	Kab. Tuban			33.028.828
153	Kab. Tulungagung	9.664.204		60.119.097
154	Kab. Ketapang			21.029.171



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
155	Kab. Mempawah			
156	Kab. Sanggau	13.919.532		
157	Kab. Kubu Raya			
158	Kab. Barito Utara		12.484.802	10.326.739
159	Kab. Kapuas		14.528.685	
160	Kab. Kotawaringin Barat	13.503.318	14.926.989	
161	Kab. Kotawaringin Timur		12.464.431	
162	Kab. Sukamara		12.512.514	
163	Kab. Lamandau		13.733.770	
164	Kab. Gunung Mas			
165	Kab. Pulang Pisau		12.326.077	
166	Kab. Barito Timur	14.696.212	12.399.963	
167	Kab. Banjar		13.682.558	
168	Kab. Barito Kuala		12.171.460	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
155	Kab. Mempawah		9.301.169	
156	Kab. Sanggau			
157	Kab. Kubu Raya		10.482.860	
158	Kab. Barito Utara			
159	Kab. Kapuas		10.098.933	
160	Kab. Kotawaringin Barat			
161	Kab. Kotawaringin Timur			
162	Kab. Sukamara		9.149.113	
163	Kab. Lamandau			
164	Kab. Gunung Mas		11.044.165	
165	Kab. Pulang Pisau			
166	Kab. Barito Timur			
167	Kab. Banjar	10.585.229		
168	Kab. Barito Kuala	9.290.221		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
155	Kab. Mempawah			
156	Kab. Sanggau			
157	Kab. Kubu Raya			
158	Kab. Barito Utara			
159	Kab. Kapuas			
160	Kab. Kotawaringin Barat			
161	Kab. Kotawaringin Timur			
162	Kab. Sukamara			
163	Kab. Lamandau			
164	Kab. Gunung Mas			
165	Kab. Pulang Pisau			
166	Kab. Barito Timur			
167	Kab. Banjar			
168	Kab. Barito Kuala			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
155	Kab. Mempawah			9,301,169
156	Kab. Sanggau			13,919,532
157	Kab. Kubu Raya			10,482,860
158	Kab. Barito Utara			22,811,541
159	Kab. Kapuas			24,627,618
160	Kab. Kotawaringin Barat			28,430,307
161	Kab. Kotawaringin Timur			12,464,431
162	Kab. Sukamara			21,661,627
163	Kab. Lamandau			13,733,770
164	Kab. Gunung Mas			11,044,165
165	Kab. Pulang Pisau			12,326,077
166	Kab. Barito Timur			27,096,175
167	Kab. Banjar			24,267,787
168	Kab. Barito Kuala			21,461,681



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
169	Kab. Hulu Sungai Selatan		12.325.550	
170	Kab. Hulu Sungai Utara		13.026.984	
171	Kab. Kotabaru		12.470.646	
172	Kab. Tabalong		13.593.259	
173	Kab. Tapin	13.494.782	11.536.398	
174	Kab. Balangan		12.295.158	
175	Kab. Tanah Bumbu		14.646.470	
176	Kab. Berau			
177	Kab. Kutai Barat	14.539.165		
178	Kab. Kutai Timur		12.286.261	
179	Kab. Penajam Paser Utara			10.331.785
180	Kab. Minahasa		12.637.211	10.054.737
181	Kab. Kepulauan Sangihe		13.948.451	
182	Kab. Kepulauan Talaud		11.913.063	12.024.773



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
169	Kab. Hulu Sungai Selatan		9.070.858	
170	Kab. Hulu Sungai Utara	9.999.919	10.725.999	
171	Kab. Kotabaru			
172	Kab. Tabalong		9.039.239	
173	Kab. Tapin		10.271.637	
174	Kab. Balangan			
175	Kab. Tanah Bumbu	12.080.947		
176	Kab. Berau	10.652.016		
177	Kab. Kutai Barat			
178	Kab. Kutai Timur	10.549.666	10.438.402	
179	Kab. Penajam Paser Utara	9.725.714		
180	Kab. Minahasa		9.267.836	
181	Kab. Kepulauan Sangihe		9.445.919	
182	Kab. Kepulauan Talaud			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
169	Kab. Hulu Sungai Selatan			8,929,637
170	Kab. Hulu Sungai Utara			
171	Kab. Kotabaru			
172	Kab. Tabalong			
173	Kab. Tapin			
174	Kab. Balangan			
175	Kab. Tanah Bumbu			
176	Kab. Berau			
177	Kab. Kutai Barat			
178	Kab. Kutai Timur			
179	Kab. Penajam Paser Utara			
180	Kab. Minahasa			
181	Kab. Kepulauan Sangihe			
182	Kab. Kepulauan Talaud			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
169	Kab. Hulu Sungai Selatan			30,326,045
170	Kab. Hulu Sungai Utara			33,752,902
171	Kab. Kotabaru			12,470,646
172	Kab. Tabalong			22,632,498
173	Kab. Tapin			35,302,817
174	Kab. Balangan			12,295,158
175	Kab. Tanah Bumbu			26,727,417
176	Kab. Berau			10,652,016
177	Kab. Kutai Barat			14,539,165
178	Kab. Kutai Timur			33,274,329
179	Kab. Penajam Paser Utara			20,057,499
180	Kab. Minahasa			31,959,784
181	Kab. Kepulauan Sangihe			23,394,370
182	Kab. Kepulauan Talaud			23,937,836



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
183	Kab. Minahasa Selatan			
184	Kab. Minahasa Utara	13.452.523	13.564.369	
185	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	12.985.894		
186	Kab. Minahasa Tenggara		12.628.776	
187	Kab. Bolaang Mongondow Timur		12.046.008	
188	Kab. Banggai	12.901.201	14.204.668	
189	Kab. Buol	14.120.215		
190	Kab. Tojo Una Una			
191	Kab. Sigi		11.536.956	
192	Kab. Banggai Laut		12.038.924	
193	Kab. Bantaeng			
194	Kab. Barru			
195	Kab. Bone			
196	Kab. Bulukumba		12.046.709	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
183	Kab. Minahasa Selatan		9.396.242	
184	Kab. Minahasa Utara			
185	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		10.878.991	
186	Kab. Minahasa Tenggara			
187	Kab. Bolaang Mongondow Timur	10.970.377		
188	Kab. Banggai	10.838.085		
189	Kab. Buol		10.344.469	
190	Kab. Tojo Una Una	9.890.864		
191	Kab. Sigi			
192	Kab. Banggai Laut	9.923.481	11.667.453	
193	Kab. Bantaeng	9.734.086	8.990.792	
194	Kab. Barru	12.087.476	12.450.624	
195	Kab. Bone			
196	Kab. Bulukumba		9.643.577	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
183	Kab. Minahasa Selatan			
184	Kab. Minahasa Utara			
185	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			
186	Kab. Minahasa Tenggara			
187	Kab. Bolaang Mongondow Timur			
188	Kab. Banggai			8,931,453
189	Kab. Buol			
190	Kab. Tojo Una Una			
191	Kab. Sigi			
192	Kab. Banggai Laut			
193	Kab. Bantaeng			
194	Kab. Barru			
195	Kab. Bone	9,486,726		
196	Kab. Bulukumba	9,487,812		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
183	Kab. Minahasa Selatan			9,396,242
184	Kab. Minahasa Utara			27,016,892
185	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			23,864,885
186	Kab. Minahasa Tenggara			12,628,776
187	Kab. Bolaang Mongondow Timur			23,016,385
188	Kab. Banggai			46,875,407
189	Kab. Buol			24,464,684
190	Kab. Tojo Una Una			9,890,864
191	Kab. Sigi			11,536,956
192	Kab. Banggai Laut			33,629,858
193	Kab. Bantaeng			18,724,878
194	Kab. Barru			24,538,100
195	Kab. Bone			9,486,726
196	Kab. Bulukumba			31,178,098



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
197	Kab. Gowa			10.554.048
198	Kab. Luwu Utara			
199	Kab. Maros		12.892.735	
200	Kab. Pangkajene dan Kepulauan			
201	Kab. Luwu Timur			
202	Kab. Sinjai			
203	Kab. Soppeng		11.981.991	
204	Kab. Wajo		12.192.756	
205	Kab. Toraja Utara	12.801.537		
206	Kab. Buton			
207	Kab. Konawe		11.503.205	
208	Kab. Kolaka		11.790.064	
209	Kab. Muna		12.448.704	10.018.644
210	Kab. Wakatobi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
197	Kab. Gowa	9.896.326		
198	Kab. Luwu Utara	12.780.589	10.829.939	
199	Kab. Maros		10.301.664	
200	Kab. Pangkajene dan Kepulauan		13.003.601	
201	Kab. Luwu Timur	11.029.018	10.232.604	
202	Kab. Sinjai		10.129.214	
203	Kab. Soppeng	9.819.799		
204	Kab. Wajo	11.094.777	9.301.559	
205	Kab. Toraja Utara	10.062.958	11.487.319	
206	Kab. Buton		9.729.610	
207	Kab. Konawe	10.721.613	10.600.600	
208	Kab. Kolaka	9.630.748	10.381.319	
209	Kab. Muna			
210	Kab. Wakatobi		12.370.937	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
197	Kab. Gowa			
198	Kab. Luwu Utara			
199	Kab. Maros			
200	Kab. Pangkajene dan Kepulauan			
201	Kab. Luwu Timur			
202	Kab. Sinjai			
203	Kab. Soppeng			
204	Kab. Wajo			
205	Kab. Toraja Utara			
206	Kab. Buton			
207	Kab. Konawe			
208	Kab. Kolaka			
209	Kab. Muna			
210	Kab. Wakatobi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
197	Kab. Gowa			20,450,374
198	Kab. Luwu Utara	9,019,924		32,630,452
199	Kab. Maros			23,194,399
200	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	9,019,924		22,023,525
201	Kab. Luwu Timur			21,261,622
202	Kab. Sinjai			10,129,214
203	Kab. Soppeng			21,801,790
204	Kab. Wajo			32,589,092
205	Kab. Toraja Utara			34,351,814
206	Kab. Buton			9,729,610
207	Kab. Konawe			32,825,418
208	Kab. Kolaka			31,802,131
209	Kab. Muna			22,467,348
210	Kab. Wakatobi			12,370,937



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
211	Kab. Kolaka Utara			
212	Kab. Muna Barat			10.698.315
213	Kab. Buton Tengah			10.087.326
214	Kab. Badung	14.511.997	12.631.690	12.289.531
215	Kab. Bangli		12.418.280	10.946.642
216	Kab. Buleleng		11.521.213	11.093.672
217	Kab. Gianyar	15.642.973		10.026.758
218	Kab. Jembrana			
219	Kab. Karangasem			10.524.133
220	Kab. Klungkung		13.523.780	
221	Kab. Tabanan		12.964.310	11.067.616
222	Kab. Bima		12.221.076	
223	Kab. Dompu		14.630.342	
224	Kab. Lombok Barat		13.254.593	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
211	Kab. Kolaka Utara		9.725.367	
212	Kab. Muna Barat	9.548.528		
213	Kab. Buton Tengah		12.781.928	
214	Kab. Badung	12.397.645	12.820.462	
215	Kab. Bangli	10.471.927	9.061.829	
216	Kab. Buleleng	9.613.809	11.574.353	
217	Kab. Gianyar	11.647.471	11.074.922	
218	Kab. Jembrana	9.374.038	9.794.946	
219	Kab. Karangasem	11.214.663	9.575.119	
220	Kab. Klungkung	12.938.542	10.897.934	
221	Kab. Tabanan	11.884.916	13.205.883	
222	Kab. Bima			
223	Kab. Dompu		9.729.442	
224	Kab. Lombok Barat		9.049.952	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
211	Kab. Kolaka Utara			
212	Kab. Muna Barat			
213	Kab. Buton Tengah			
214	Kab. Badung			9,886,827
215	Kab. Bangli			
216	Kab. Buleleng			
217	Kab. Gianyar			
218	Kab. Jembrana			
219	Kab. Karangasem			
220	Kab. Klungkung			
221	Kab. Tabanan			
222	Kab. Bima			
223	Kab. Dompu			
224	Kab. Lombok Barat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
211	Kab. Kolaka Utara			9,725,367
212	Kab. Muna Barat			20,246,843
213	Kab. Buton Tengah			22,869,254
214	Kab. Badung			74,538,152
215	Kab. Bangli			42,898,678
216	Kab. Buleleng			43,803,047
217	Kab. Gianyar			48,392,124
218	Kab. Jembrana			19,168,984
219	Kab. Karangasem			31,313,915
220	Kab. Klungkung	9,664,204		47,024,460
221	Kab. Tabanan			49,122,725
222	Kab. Bima			12,221,076
223	Kab. Dompu			24,359,784
224	Kab. Lombok Barat			22,304,545



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
225	Kab. Lombok Tengah		14.284.203	
226	Kab. Lombok Timur			
227	Kab. Sumbawa		14.399.156	
228	Kab. Sumbawa Barat		14.661.710	
229	Kab. Lombok Utara			
230	Kab. Sikka			
231	Kab. Maluku Tengah		11.989.011	11.210.965
232	Kab. Maluku Tenggara		12.382.314	
233	Kab. Buru		14.321.934	
234	Kab. Jayapura		12.898.698	
235	Kab. Merauke		11.876.131	
236	Kab. Nabire			
237	Kab. Halmahera Barat			11.239.728
238	Kab. Halmahera Utara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
225	Kab. Lombok Tengah			
226	Kab. Lombok Timur	9.473.144		
227	Kab. Sumbawa			
228	Kab. Sumbawa Barat		13.140.420	
229	Kab. Lombok Utara	9.927.731	10.425.995	
230	Kab. Sikka	9.758.944	9.781.094	
231	Kab. Maluku Tengah		9.680.162	
232	Kab. Maluku Tenggara	11.828.447		
233	Kab. Buru			
234	Kab. Jayapura	9.608.505	9.356.557	9.235.166
235	Kab. Merauke	10.978.132		
236	Kab. Nabire	10.120.593	10.120.135	
237	Kab. Halmahera Barat	9.532.929		
238	Kab. Halmahera Utara	9.319.403	9.387.132	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
225	Kab. Lombok Tengah			
226	Kab. Lombok Timur			
227	Kab. Sumbawa			
228	Kab. Sumbawa Barat			
229	Kab. Lombok Utara		9,424,896	
230	Kab. Sikka			
231	Kab. Maluku Tengah			
232	Kab. Maluku Tenggara			
233	Kab. Buru			
234	Kab. Jayapura			
235	Kab. Merauke			
236	Kab. Nabire			
237	Kab. Halmahera Barat			
238	Kab. Halmahera Utara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
225	Kab. Lombok Tengah			14,284,203
226	Kab. Lombok Timur			9,473,144
227	Kab. Sumbawa	9,019,924		23,419,080
228	Kab. Sumbawa Barat			27,802,130
229	Kab. Lombok Utara			29,778,622
230	Kab. Sikka			19,540,038
231	Kab. Maluku Tengah			32,880,138
232	Kab. Maluku Tenggara			24,210,761
233	Kab. Buru			14,321,934
234	Kab. Jayapura			41,098,926
235	Kab. Merauke	9,019,924		31,874,187
236	Kab. Nabire			20,240,728
237	Kab. Halmahera Barat			20,772,657
238	Kab. Halmahera Utara			18,706,535



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
239	Kab. Pulau Morotai		11.644.397	10.587.151
240	Kab. Lebak			
241	Kab. Serang	13.680.994		
242	Kab. Tangerang	13.915.183		
243	Kab. Bangka	14.132.685	13.720.590	10.551.806
244	Kab. Bangka Tengah			10.284.342
245	Kab. Gorontalo	12.858.226	12.724.145	
246	Kab. Pohuwato			10.687.469
247	Kab. Bone Bolango			11.106.225
248	Kab. Gorontalo Utara			
249	Kab. Natuna			
250	Kab. Karimun			
251	Kab. Lingga		14.364.531	
252	Kab. Bintan		12.700.878	10.843.519



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
239	Kab. Pulau Morotai		11.843.035	
240	Kab. Lebak			
241	Kab. Serang		10.661.714	
242	Kab. Tangerang		12.155.350	
243	Kab. Bangka	10.251.221	11.070.095	
244	Kab. Bangka Tengah			
245	Kab. Gorontalo	9.486.213		
246	Kab. Pohuwato	9.951.916	11.676.500	
247	Kab. Bone Bolango	11.319.196		
248	Kab. Gorontalo Utara	10.880.400	10.029.031	
249	Kab. Natuna	9.956.287	8.940.735	
250	Kab. Karimun	10.682.022	10.608.919	
251	Kab. Lingga			
252	Kab. Bintan	9.927.794	11.583.694	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
239	Kab. Pulau Morotai			8,936,361
240	Kab. Lebak			8,928,362
241	Kab. Serang			
242	Kab. Tangerang			
243	Kab. Bangka			
244	Kab. Bangka Tengah			
245	Kab. Gorontalo			
246	Kab. Pohuwato			
247	Kab. Bone Bolango			8,928,049
248	Kab. Gorontalo Utara			
249	Kab. Natuna			8,929,836
250	Kab. Karimun			9,189,170
251	Kab. Lingga			
252	Kab. Bintan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
239	Kab. Pulau Morotai			34,074,583
240	Kab. Lebak			8,936,361
241	Kab. Serang			33,271,070
242	Kab. Tangerang			26,070,533
243	Kab. Bangka			59,726,397
244	Kab. Bangka Tengah			10,284,342
245	Kab. Gorontalo			35,068,584
246	Kab. Pohuwato			32,315,885
247	Kab. Bone Bolango			31,353,470
248	Kab. Gorontalo Utara			20,909,431
249	Kab. Natuna			27,826,858
250	Kab. Karimun			30,480,111
251	Kab. Lingga			14,364,531
252	Kab. Bintan			45,055,885



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
253	Kab. Sorong			
254	Kab. Raja Ampat		11.511.107	
255	Kab. Sorong Selatan		12.445.857	
256	Kab. Teluk Bintuni			
257	Kab. Majene		13.438.124	10.351.562
258	Kab. Mamuju			
259	Kab. Polewali Mandar		14.052.065	
260	Kab. Mamasa			10.276.945
261	Kab. Pasangkayu	14.400.381		10.611.235
262	Kab. Mamuju Tengah			
263	Kota Banda Aceh			
264	Kota Sabang			10.392.723
265	Kota Lhokseumawe			
266	Kota Pematang Siantar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
253	Kab. Sorong		10.156.872	
254	Kab. Raja Ampat	10.206.870		
255	Kab. Sorong Selatan			
256	Kab. Teluk Bintuni	9.962.651		
257	Kab. Majene		10.281.285	
258	Kab. Mamuju	9.582.266	8.949.233	
259	Kab. Polewali Mandar	10.551.281		
260	Kab. Mamasa			
261	Kab. Pasangkayu		9.201.533	
262	Kab. Mamuju Tengah	10.381.537		
263	Kota Banda Aceh	11.705.030	11.305.551	
264	Kota Sabang			
265	Kota Lhokseumawe		10.018.090	
266	Kota Pematang Siantar	11.383.830	11.054.484	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
253	Kab. Sorong			
254	Kab. Raja Ampat			
255	Kab. Sorong Selatan			
256	Kab. Teluk Bintuni			
257	Kab. Majene			
258	Kab. Mamuju			
259	Kab. Polewali Mandar			
260	Kab. Mamasa			
261	Kab. Pasangkayu			
262	Kab. Mamuju Tengah			
263	Kota Banda Aceh			
264	Kota Sabang			
265	Kota Lhokseumawe			
266	Kota Pematang Siantar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
253	Kab. Sorong			10,156,872
254	Kab. Raja Ampat			21,717,977
255	Kab. Sorong Selatan			12,445,857
256	Kab. Teluk Bintuni	9,019,924		18,982,575
257	Kab. Majene			34,070,971
258	Kab. Mamuju			18,531,499
259	Kab. Polewali Mandar			24,603,346
260	Kab. Mamasa			10,276,945
261	Kab. Pasangkayu			34,213,149
262	Kab. Mamuju Tengah			10,381,537
263	Kota Banda Aceh			23,010,581
264	Kota Sabang			10,392,723
265	Kota Lhokseumawe			10,018,090
266	Kota Pematang Siantar			22,438,314



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
267	Kota Bukit Tinggi		14.249.887	
268	Kota Padang Panjang		13.565.486	10.990.436
269	Kota Padang	15.741.994		9.275.502
270	Kota Payakumbuh		12.723.561	
271	Kota Sawahlunto		12.186.107	10.007.041
272	Kota Solok		11.993.468	9.547.214
273	Kota Pariaman	13.523.600		9.097.466
274	Kota Dumai		12.134.623	9.332.906
275	Kota Pekanbaru			
276	Kota Jambi			
277	Kota Sungai Penuh		12.533.099	11.291.431
278	Kota Palembang	15.403.382	12.600.921	
279	Kota Prabumulih			9.584.526
280	Kota Pagar Alam		12.184.320	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
267	Kota Bukit Tinggi		11.763.337	
268	Kota Padang Panjang		9.926.261	
269	Kota Padang			
270	Kota Payakumbuh		11.331.007	
271	Kota Sawahlunto			
272	Kota Solok			
273	Kota Pariaman			
274	Kota Dumai			
275	Kota Pekanbaru			12.179.366
276	Kota Jambi		11.291.209	
277	Kota Sungai Penuh	9.463.918	10.851.219	
278	Kota Palembang	11.287.358	13.127.564	
279	Kota Prabumulih		10.792.936	
280	Kota Pagar Alam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
267	Kota Bukit Tinggi			
268	Kota Padang Panjang			
269	Kota Padang			8,985,750
270	Kota Payakumbuh			8,960,244
271	Kota Sawahlunto			
272	Kota Solok			
273	Kota Pariaman			
274	Kota Dumai			
275	Kota Pekanbaru			
276	Kota Jambi			
277	Kota Sungai Penuh			
278	Kota Palembang		9,236,649	
279	Kota Prabumulih			
280	Kota Pagar Alam			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
267	Kota Bukit Tinggi			26,013,224
268	Kota Padang Panjang			34,482,183
269	Kota Padang	9,019,924	9,117,991	52,141,161
270	Kota Payakumbuh			33,014,812
271	Kota Sawahlunto			22,193,148
272	Kota Solok			21,540,682
273	Kota Pariaman			22,621,066
274	Kota Dumai			21,467,529
275	Kota Pekanbaru			12,179,366
276	Kota Jambi			11,291,209
277	Kota Sungai Penuh			44,139,667
278	Kota Palembang			61,655,874
279	Kota Prabumulih			20,377,462
280	Kota Pagar Alam			12,184,320



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
281	Kota Lubuk Linggau			9.163.335
282	Kota Bandar Lampung			10.847.497
283	Kota Metro			11.898.286
284	Kota Bekasi	14.973.454	13.384.257	
285	Kota Bogor		13.035.583	
286	Kota Cirebon			
287	Kota Depok			
288	Kota Sukabumi		12.370.230	
289	Kota Tasikmalaya		11.937.216	
290	Kota Cimahi	13.744.636		
291	Kota Banjar			
292	Kota Magelang		12.159.263	9.158.225
293	Kota Pekalongan		12.703.928	10.128.167
294	Kota Salatiga		13.591.135	11.371.164



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
281	Kota Lubuk Linggau	11.136.466		
282	Kota Bandar Lampung			
283	Kota Metro		9.920.505	
284	Kota Bekasi	9.964.007	10.560.186	
285	Kota Bogor	10.046.775		
286	Kota Cirebon	10.169.989	12.318.572	
287	Kota Depok		11.347.345	
288	Kota Sukabumi	11.923.800		
289	Kota Tasikmalaya	10.288.887		
290	Kota Cimahi	10.000.966		
291	Kota Banjar	12.292.559	12.623.058	
292	Kota Magelang	9.820.104	11.258.547	
293	Kota Pekalongan		10.428.847	
294	Kota Salatiga		12.580.830	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
281	Kota Lubuk Linggau			
282	Kota Bandar Lampung			
283	Kota Metro			
284	Kota Bekasi			
285	Kota Bogor			
286	Kota Cirebon			
287	Kota Depok			
288	Kota Sukabumi			9,500,535
289	Kota Tasikmalaya			
290	Kota Cimahi			
291	Kota Banjar			
292	Kota Magelang			
293	Kota Pekalongan			
294	Kota Salatiga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
281	Kota Lubuk Linggau			11,136,466
282	Kota Bandar Lampung			9,163,335
283	Kota Metro			20,768,002
284	Kota Bekasi			60,780,190
285	Kota Bogor	9,019,924	8,970,729	41,073,011
286	Kota Cirebon			22,488,561
287	Kota Depok		9,117,991	20,465,336
288	Kota Sukabumi			33,794,565
289	Kota Tasikmalaya			22,226,103
290	Kota Cimahi	9,019,924	9,326,613	42,092,139
291	Kota Banjar			24,915,617
292	Kota Magelang			42,396,139
293	Kota Pekalongan			33,260,942
294	Kota Salatiga			37,543,129



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
295	Kota Semarang	16.189.397	15.875.053	10.028.806
296	Kota Surakarta	14.505.828		10.942.150
297	Kota Yogyakarta	16.230.508		10.354.582
298	Kota Blitar			10.709.803
299	Kota Kediri			11.176.667
300	Kota Madiun	14.076.289		11.114.630
301	Kota Malang	13.615.161		10.922.902
302	Kota Mojokerto			10.021.426
303	Kota Pasuruan			9.971.638
304	Kota Probolinggo	13.460.416		
305	Kota Surabaya	16.692.194	15.549.665	11.632.162
306	Kota Batu		13.403.235	9.139.991
307	Kota Pontianak	14.606.878	12.836.786	
308	Kota Palangkaraya		13.493.701	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
295	Kota Semarang	9.995.982	10.027.684	12.062.945
296	Kota Surakarta			12.128.870
297	Kota Yogyakarta			
298	Kota Blitar	10.832.553	11.459.226	
299	Kota Kediri	10.373.171	10.297.120	
300	Kota Madiun	10.860.324	10.471.559	
301	Kota Malang	10.719.547	10.203.019	
302	Kota Mojokerto	13.646.097	10.798.191	
303	Kota Pasuruan	9.876.925	9.911.425	
304	Kota Probolinggo	12.441.866	10.762.619	
305	Kota Surabaya		12.598.794	
306	Kota Batu			
307	Kota Pontianak	10.004.144	11.149.470	
308	Kota Palangkaraya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
295	Kota Semarang	9,263,959		
296	Kota Surakarta		9,186,450	
297	Kota Yogyakarta			9,175,769
298	Kota Blitar	9,392,573		9,036,645
299	Kota Kediri			
300	Kota Madiun			
301	Kota Malang	9,702,981		9,049,515
302	Kota Mojokerto			
303	Kota Pasuruan			
304	Kota Probolinggo			
305	Kota Surabaya	9,527,969		
306	Kota Batu			
307	Kota Pontianak			8,929,562
308	Kota Palangkaraya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
295	Kota Semarang			83,443,826
296	Kota Surakarta			46,763,298
297	Kota Yogyakarta			35,760,859
298	Kota Blitar			51,430,800
299	Kota Kediri			31,846,958
300	Kota Madiun	9,019,924		55,542,726
301	Kota Malang		9,657,953	73,871,078
302	Kota Mojokerto			34,465,714
303	Kota Pasuruan			29,759,988
304	Kota Probolinggo			36,664,901
305	Kota Surabaya	10,308,484	9,326,613	85,635,881
306	Kota Batu			22,543,226
307	Kota Pontianak			57,526,840
308	Kota Palangkaraya			13,493,701



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
309	Kota Banjarbaru			
310	Kota Banjarmasin			9.255.889
311	Kota Balikpapan	13.517.779		11.367.997
312	Kota Bontang		12.088.856	9.011.883
313	Kota Samarinda			10.243.246
314	Kota Manado	14.520.212		9.039.749
315	Kota Tomohon			
316	Kota Kotamobagu	15.695.153		
317	Kota Palu		14.066.092	9.036.214
318	Kota Palopo			
319	Kota Pare-pare			
320	Kota Makassar		12.511.830	9.000.361
321	Kota Kendari		12.563.394	9.025.083
322	Kota Bau-bau	14.722.538		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA.

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
309	Kota Banjarbaru	10.031.650		
310	Kota Banjarmasin	9.841.829		
311	Kota Balikpapan		10.591.465	
312	Kota Bontang		10.872.543	
313	Kota Samarinda		10.619.744	
314	Kota Manado		10.033.738	
315	Kota Tomohon	10.966.347	10.731.237	
316	Kota Kotamobagu	9.738.697		
317	Kota Palu	9.464.593	9.814.062	
318	Kota Palopo		13.007.644	
319	Kota Pare-pare	10.757.574		
320	Kota Makassar	9.991.264	12.887.468	
321	Kota Kendari		10.769.665	
322	Kota Bau-bau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
309	Kota Banjarbaru			
310	Kota Banjarmasin			
311	Kota Balikpapan			
312	Kota Bontang			
313	Kota Samarinda	9,224,073		
314	Kota Manado			8,975,289
315	Kota Tomohon			
316	Kota Kotamobagu			
317	Kota Palu		9,399,797	
318	Kota Palopo			
319	Kota Pare-pare	9,205,351		
320	Kota Makassar	9,543,978		
321	Kota Kendari			
322	Kota Bau-bau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
309	Kota Banjarbaru			10,031,650
310	Kota Banjarmasin		9,338,885	28,436,603
311	Kota Balikpapan		11,056,945	46,534,186
312	Kota Bontang			31,973,282
313	Kota Samarinda			30,087,063
314	Kota Manado			42,568,988
315	Kota Tomohon			21,697,584
316	Kota Kotamobagu			25,433,850
317	Kota Palu			51,780,758
318	Kota Palopo			13,007,644
319	Kota Pare-pare	9,019,924		28,982,849
320	Kota Makassar		8,897,098	62,831,999
321	Kota Kendari			32,358,142
322	Kota Bau-bau			14,722,538



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
323	Kota Denpasar			9.258.130
324	Kota Mataram		13.073.245	9.966.896
325	Kota Bima		13.537.330	
326	Kota Ambon			
327	Kota Jayapura		14.036.623	
328	Kota Ternate		12.368.466	9.416.869
329	Kota Tidore Kepulauan			
330	Kota Cilegon	13.658.829		9.569.985
331	Kota Tangerang	15.100.762		9.820.940
332	Kota Tangerang Selatan	16.155.016	13.000.454	
333	Kota Pangkal Pinang			
334	Kota Gorontalo	13.733.877	12.414.378	
335	Kota Batam			10.807.545
336	Kota Tanjung Pinang			9.757.003



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
323	Kota Denpasar	9.620.651		
324	Kota Mataram		9.955.062	
325	Kota Bima			
326	Kota Ambon	10.860.813		
327	Kota Jayapura	9.912.099	10.254.765	
328	Kota Ternate		11.951.254	10.489.151
329	Kota Tidore Kepulauan	12.073.835	9.797.982	
330	Kota Cilegon	9.938.002		
331	Kota Tangerang		10.180.152	
332	Kota Tangerang Selatan			
333	Kota Pangkal Pinang		10.240.398	
334	Kota Gorontalo			
335	Kota Batam	9.573.455	11.182.207	
336	Kota Tanjung Pinang	10.436.479	10.772.562	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
323	Kota Denpasar			
324	Kota Mataram			
325	Kota Bima			
326	Kota Ambon			
327	Kota Jayapura			
328	Kota Ternate			
329	Kota Tidore Kepulauan			
330	Kota Cilegon			
331	Kota Tangerang	9,230,856		
332	Kota Tangerang Selatan			
333	Kota Pangkal Pinang			
334	Kota Gorontalo	9,278,611		
335	Kota Batam			
336	Kota Tanjung Pinang			9,869,531



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
323	Kota Denpasar			18,878,781
324	Kota Mataram			32,995,203
325	Kota Bima			13,537,330
326	Kota Ambon			10,860,813
327	Kota Jayapura			34,203,487
328	Kota Ternate			44,225,740
329	Kota Tidore Kepulauan			21,871,817
330	Kota Cilegon			33,166,816
331	Kota Tangerang			44,332,710
332	Kota Tangerang Selatan			29,155,470
333	Kota Pangkal Pinang			10,240,398
334	Kota Gorontalo			35,426,866
335	Kota Batam			31,563,207
336	Kota Tanjung Pinang			40,835,575



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Tata Kelola Keuangan Daerah	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik
		Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JUMLAH ALOKASI DID PROVINSI	173.812.417	122.678.478	127.557.932
	JUMLAH ALOKASI DID KABUPATEN	853.406.240	1.743.850.711	958.708.008
	JUMLAH ALOKASI DID KOTA	309.867.903	404.172.192	412.678.466
	JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL	1.337.086.560	2.270.701.381	1.498.944.406



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Dasar Publik		Pelayanan Umum Pemerintahan
		Kesehatan	Infrastruktur	Kemudahan Berusaha
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH ALOKASI DID PROVINSI	95.932.888	107.850.881	36.925.236
	JUMLAH ALOKASI DID KABUPATEN	1.274.912.647	1.446.162.145	33.502.726
	JUMLAH ALOKASI DID KOTA	381.441.586	493.840.603	46.860.332
	JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL	1.752.287.121	2.047.853.629	117.288.294



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)
	JUMLAH ALOKASI DID PROVINSI	26,320,693	27,973,493	99,078,075
	JUMLAH ALOKASI DID KABUPATEN	95,736,353	28,651,182	203,144,690
	JUMLAH ALOKASI DID KOTA	84,370,351	27,822,896	82,482,840
	JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL	206,427,397	84,447,571	384,705,605



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Daerah	Pelayanan Umum Pemerintahan		Jumlah
		Inovasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Sampah	
(1)	(2)	(12)	(13)	(14) = (3) + (4) + ...s.d. (13)
	JUMLAH ALOKASI DID PROVINSI	58,887,217	9,019,817	886,037,127
	JUMLAH ALOKASI DID KABUPATEN	92,132,080	-	6,730,206,782
	JUMLAH ALOKASI DID KOTA	55,408,104	84,810,818	2,383,756,091
	JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL	206,427,401	93,830,635	10,000,000,000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hesti Suharti
Hesti Suharti Lestari



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN XX
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	296.000.236.667
1	Pembiayaan Utang	359.250.583.103
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	388.957.891.000
1.2	Pinjaman (Neto)	-29.707.307.897
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482.419.505
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956.367.535
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-1.473.948.030
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-30.189.727.402
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280.479.702
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	30.000.000.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	30.280.479.702
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	23.700.791.191
1.2.2.1.2.1.1	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	23.304.695.566
1.2.2.1.2.1.2	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	396.095.625
1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	6.579.688.511
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	-90.470.207.104
2	Pembiayaan Investasi	-75.900.341.459
2.1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-17.800.000.000
2.1.1	Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-6.500.000.000
2.1.2	Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero)	-10.500.000.000
2.1.3	Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-800.000.000
2.2	Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	-2.500.000.000
2.2.1	Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	-2.500.000.000
2.3	Investasi kepada Badan Layanan Umum	-53.190.000.000
2.3.1	Dana Bergulir	-8.200.000.000
2.3.1.1	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	-5.200.000.000
2.3.1.2	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	-3.000.000.000
2.3.2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	-20.000.000.000
2.3.3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-22.000.000.000
2.3.4	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	-2.000.000.000
2.3.5	Dana Abadi Penelitian	-990.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XX
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
2.4	Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	-2.410.341.459
2.4.1	Islamic Development Bank (IDB)	-87.216.265
2.4.2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-44.525.029
2.4.3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-45.000.000
2.4.4	International Development Association (IDA)	-217.300.000
2.4.5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-2.016.300.165
3	Pemberian Pinjaman	-2.350.004.977
3.1.	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/ Badan Lainnya	-2.350.004.977
3.1.1.	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	-2.350.004.977
3.1.1.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	-6.579.688.511
3.1.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	4.229.683.534
4	Pembiayaan Lainnya	15.000.000.000
4.1	Saldo Anggaran Lebih	15.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten Signature]
Sriwati Lestari